



unikama
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

IDEOLOGI DAN SAINS DALAM INTEGRASI PENDIDIKAN

GAGASAN DAN TINDAKAN ILMUWAN MENGANTISIPASI DISRUPSI



Editor:
Andri Fransiskus Gultom
Arief Rahman Hakim
Ludovikus Bomans Wadu



**KANJURUHAN
PRESS**

IDEOLOGI DAN SAINS
DALAM INTEGRASI PENDIDIKAN
Gagasan dan Tindakan Ilmuwan Mengantisipasi
Disrupsi

Copyright ©2021, Kanjuruhan Press
All rights reserved

IDEOLOGI DAN SAINS DALAM INTEGRASI PENDIDIKAN

Gagasan dan Tindakan Ilmuwan Mengantisipasi Disrupsi

Editor:

Andri Fransiskus Gultom, Arief Rahman Hakim, Ludovikus Bomans Wadu

Desain Cover & Penata Isi

Tim Kanjuruhan Press

Cetakan I, Mei 2021

Diterbitkan oleh:

Kanjuruhan Press

No. IKAPI : 135/JTI/2011

No. APPTI : 002.019.1.10.2017

Alamat : Jl. S. Supriadi No.48 Malang

Telp : (0341) 801488, ext 133

Email : kanjuruhanpress@unikama.ac.id

ISBN : 978-623-91605-7-9

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN:

Ideologi dan Sains dalam Integrasi Pendidikan _____ 1
Andri Fransiskus Gultom

CHAPTER I: INTEGRASI IDEOLOGI, KEPEMIMPINAN, DAN DISRUPSI

Pembinaan Ideologi Pancasila: Fungsi dan Kewajiban Negara _19
Dr. Ahmad Basarah

Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional _____ 42
Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.

Transformasi Perguruan Tinggi di Era Disrupsi:
Mempersiapkan Masa Depan yang Datang Lebih Cepat dari
Perkiraan Manusia _____ 56
Richardus Eko Indrajit

Karakter Kepemimpinan: Kesenjangan Antara Konsep dan
Implementasi _____ 65
Pieter Sahertian

Ideologi Pancasila dan Kesadaran Sejarah _____ 88
I Wayan Legawa

Filosofi Koperasi Dalam Konsep Welfare State _____ 110
Suciati

Perempuan Selalu Di Belakang, Laki-Laki Selalu Terdepan ____ 120
Ludovikus Bomans Wadu, Maria Fransiska Ugha Buu

CHAPTER II: INTEGRASI MULTIKULTURALISME DAN BAHASA

Merajut Multikulturalisme lewat Pendidikan Karakter _____ 133
Yudi Latif

Tantangan dan Masa Depan Kampus Multikultural _____ **156**
Wadji

Membangun Masyarakat Berkebudayaan Bermutu Melalui Pendidikan Multikultural _____ **180**
Gatot Sarmidi

Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Bilingualisme dalam Masyarakat yang Multilingual dan Multikultural _____ **202**
Rusfandi

Relativitas Bahasa dan Budaya Dalam Komunikasi Global ____ **222**
Teguh Sulisty, Nara Sari, dan Oktavia Widiastuti

Konvensi Naratif Novel Kearifan Lokal Sastra Indonesia ____ **244**
Soedjijono

Revitalisasi Bahasa Indonesia dalam Pembentukan Karakter Bangsa _____ **275**
Rahutami

CHAPTER III: INTEGRASI SAINS DALAM PENDIDIKAN NILAI

Berdayakan Keterampilan Berpikir Selama Pembelajaran Sains Demi Masa Depan Kita _____ **297**
Prof. Dr. AD. Corebima, M.Pd

Character Building Dalam Era Merdeka Belajar _____ **332**
Romadhon

Pembiasaan Karakter Baik (*Knowing, Acting, and Habit*) Berbasis *Value Clarification Approach* _____ **357**
Romia Hari Susanti

Motivasi Belajar Siswa SD di Saat Pandemi COVID-19 _____ **388**
Arief Rahman Hakim, Sholihah

Integrasi *Augmented Reality* Dalam Pembelajaran _____ 402

*Prof. Dr. AD. Corebima, M.Pd., Badrud Tamam, dan
Bea Hana Siswati*

**Pembentukan Karakter Kreatif Siswa Melalui Kreativitas
Problem Solving _____ 419**

Sri Hariyani

**Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Sains:
Laboratorium Virtual _____ 439**

Sudi Dul Aji dan Muhammad Nur Hudha

**Kepala Sekolah dan Pengembangan Profesional Guru:
Kontradiksi antara Persepsi dan Praktik _____ 446**

Umiati Jawas

**Pengembangan Instrumen Pengukuran Kepribadian Mahasiswa
Calon Guru _____ 469**

Sudiyono dan Danang Aditya Nugraha

**Kajian Penguatan Pendidikan Karakter Sesuai Profil Pelajar
Pancasila di Jenjang Sekolah Dasar _____ 488**

Yulianti

CHAPTER IV: INTEGRASI SAINS MIKROSKOPIS MENGANTISIPASI VIRUS

Jaringan 5G dan Upaya Meningkatkan Konektivitas _____ 509

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

**Pembentukan Karakter Ilmiah Melalui Praktikum
Mikrobiologi _____ 515**

Prof.Dr.Dra.Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.

**Pemanfaatan Serangga Sebagai Bahan Pakan Unggas:
Sebuah Review Pustaka _____ 539**

Eko Widodo, Enike Dwi Kusumawati, dan Bayu Aji Pradikdo

Hubungan Perubahan Iklim Dengan Penularan Penyakit _____ 563

Endang Surjati

Vaksin Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Virus Hepatitis B__ 581

Maris Kurniawati

**Ironi Pemaknaan Genetika sebagai Ilmu tentang Pewarisan
Sifat pada Masa Kini, bahkan di Era Revolusi Industri 4.0 _____ 603**

Prof. Dr. AD. Corebima, M.Pd, dan Dr. Bea Hana Siswati, M.Pd

PENDAHULUAN

Ideologi dan Sains dalam Integrasi Pendidikan

Di sela-sela menunggu jadwal pulang dari kampus, saya sempatkan bertanya kepada dua teman dosen. Pertanyaannya demikian, apa yang bisa dijadikan pegangan bila semua telah berubah? Keduanya sejenak terdiam. Lalu, mereka memberi jawaban singkat. Teman yang satu menjawab: kesetiaan (*fidelity*), sedangkan seorang yang lain merespon dengan penuh keyakinan, “jawaban saya, iman (*faith*).”

Saya lumayan terhenyak dengan kedua jawaban yang tidak biasa itu. Mereka berdua bagi saya bukanlah manusia medioker, yang sekedar hidup dengan menjalani aturan tanpa tanda tanya. Jawaban kedua teman dosen ini mengantarkan imajinasi saya untuk merefleksikan situasi modern di mana manusia terjebak dalam dunia yang teradministrasikan (*the administrated world*) [1]. Dunia yang teradministrasikan maksudnya mengarah pada wahana kehidupan yang hampir seluruh dimensinya kesehariannya dipenuhi oleh ideologi tanpa kekritisan [2]. Suatu dunia yang menjadikan manusia menjadi satu dimensi [3].

Sains *quaeritur*

Diskursus tentang kesetiaan dan keimanan yang *quaeritur* (memunculkan pertanyaan) dan tampaknya perlu didalami secara lebih serius. Pertanyaan yang layak diajukan adalah, apakah kesetiaan dan keimanan itu bisa menjadi pegangan yang tepat bila semua telah berubah? Pertanyaan serius ini akan mengantarkan saya (mungkin juga para pembaca) pada jejak-jejak petualangan pemikiran di mana manusia mengalami kerapuhan pada kesetiaan dan keimanan. Tetapi, kerapuhan tersebut dalam sisi lain, menjadi satu kekuatan inheren bagi identitas manusia untuk menjalani kehidupan yang serba berubah [4]. Suatu dunia yang terus-menerus diancam oleh disrupsi [5].

Tulisan saya ini berisi empat pesan mendasar yang menjadi semacam penjelajahan intelektual saya sembari memberikan justifikasi

filosofis pada segitiga gagasan yang saling bertaut yaitu: ideologi, sains, dan pendidikan. Pada penjelasan pertama saya akan memberi tawaran wacana pada kesejajaran antara ideologi dan sains dengan dengan keimanan dan kesetiaan. Penjelajahan kedua, saya memproblematisir bahwa baik keimanan dan kesetiaan menjadi semacam “cangkang mistis” (ideologi) yang bisa mengantarkan para ilmuwan pada favoritisme ilmu dan bisa terjebak pada *conservative turn*. Pada posisi ini, integrasi ilmu menjadi duduk perkara yang akan saya unguhit dan angkat ke permukaan akademis untuk menjadi suatu diskursus yang *urgent* dan saya mencoba menjawab tantangan dari Thompson Klein, dkk yaitu, “*What kind of science do we need today and tomorrow?*” [6]. Pesan ketiga, saya akan memetakan satu diskursus lanjutan yang berfokus integrasi ilmu dalam tiga rangkaian yaitu monodisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Pada bagian ini, saya menebarkan beberapa *insight* yang harapannya bisa “mencelikkan mata” siapa saja yang ada dalam *framework* ideologi dan sains. Keempat, saya akan menguraikan secara ringkas tentang isi buku ini. Mari kita mulai penjelajahan intelektual ini.

Setelah mendengar pengakuan dari dua teman dosen di atas, saya lalu bertanya, apa benar kesetiaan dan keimanan itu bisa menjadi pegangan yang tepat bila semua telah berubah? Jawaban singkat bisa saja, ya. Ya, oleh karena dua hal tersebut ada dan berlangsung dalam sejarah monotheisme arkaik dan terdapat dalam kisah yang figurnya adalah orang yang setia dan sekaligus beriman bisa selamat. Narasi sejarah itu tentu ada dalam ingatan skriptural, misalnya tentang Nuh menjadi “yang terpilih” (*the chosen*), yang diselamatkan dari bencana air bah [7]. Nuh menjadi orang yang diselamatkan oleh Sang Pencipta karena ia memiliki iman dan setia pada-Nya. Nuh bersama keluarga dan hewan-hewan (berpasang-pasangan) mengatasi badai dan tiba di dunia yang baru. Ringkasnya, Nuh dengan keimanan dan kesetiannya menjadi selamat. “Walau dilambung-lambungkan ombak, tetapi (Nuh) tak tenggelam.” Begitulah sepenggal kisah yang bisa memberi kekuatan bahwa kesetiaan dan keimanan menjadi pegangan dalam situasi yang berubah.

Saya dan orang-orang beriman tentu percaya pada kisah bahwa mereka yang beriman dan yang setia akan diselamatkan. Mari kita relevankan peristiwa keselamatan di masa monotheisme arkaik dengan modernitas, situasi yang dipenuhi oleh sains yang bekerja dengan evidensi atau pembuktian-pembuktian faktual melalui eksperimen, observasi, investigasi, dokumentasi, dan laboratorium sebagai lokusnya. Manusia modern mulai bertanya dengan kritis, benarkah yang diselamatkan hanya mereka yang berada dalam kategori “yang terpilih” (*the chosen*)? *The chosen* adalah mereka yang memiliki kesetiaan dan keimanan, dibalut dengan adanya totalitas keyakinan tanpa perlu mempertanyakannya dan membutuhkan pembuktian. Di sinilah, posisi skeptis dari manusia modern untuk mempertanyakan “*the chosen*.” Manusia yang telah dibekali oleh sains yang membutuhkan pembuktian, berupaya menanggalkan alam pikir “keselamatan berasal dari langit” (manusia dituntut beriman dan setia pada langit). Kita diminta untuk memiliki kesetiaan pada kebenaran saintifik [8]. Pesan yang diterima oleh manusia modern dari apa yang telah digemakan di abad ke-19 oleh Auguste Comte, melalui prinsip positivisme. Positivisme Comte bekerja dengan menerapkan metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana memperoleh kebenaran [9]. Pikiran Comte mengajak sains untuk menanggalkan alam pikir teologis, metafisik, dan saatnya memasuki dunia yang penuh dengan penjelasan dan pembuktian ilmiah. Suatu dunia yang patuh pada hukum ilmiah (*scientia nomos*) [10].

Cangkang mistis dan kehendak untuk berkuasa.

Pesan yang digemakan Comte membuat manusia modern mengalami favoritisme sains. Puja-puja pada ketunggalan (singularitas) kebenaran dalam sains membuat manusia menjadi lebih suka disebut sebagai: sarjana (*scholar*), ahli (*expert*), peneliti (*researcher*) saintis, intelektual, akademisi, ilmuwan, dan mahaguru atau *professor* (yang disebut terakhir ini dikejar dan diupayakan dengan sekuat tenaga dan pikiran). Pengandaian dilematis singularitas ilmu yaitu, bila memilih satu ilmu pengetahuan, hampir pasti meninggalkan ilmu pengetahuan yang lain, oleh karena favoritisme [11]. Di dalam kondisi terakhir, ilmu

menjadi semakin rumit. Satu ilmu yang dipilih dan ditekuninya berakibat terjadi linearitas. Pada akhirnya, overspesialisasi menjadi satu kebanggaan yang nantinya menjebak mereka pada konservatisme (pemikiran). Pada titik ini, saya memberi penjelasan mendasar bahwa sains (dan saintis) *an sich* (pada dirinya sendiri) memuat sebetulnya keimanan dan kesetiaan. Keimanan yang dimaksud adalah bentuk keyakinan bahwa sains adalah jalan menuju kebenaran dan bahkan kebenaran itu sendiri, *an sich*. Keyakinan, oleh karena itu membentuk kesetiaan (dan ketekunan) untuk mendalami satu bidang ilmu, sehingga menjadi *lex specialis*. Friedrich Nietzsche membongkar dengan tegas bahwa dalam sains ada keimanan yang menuntut seseorang yang masuk ke sana untuk tetap setia dan tekun untuk meniti jalan kebenaran [12]. Ternyata, sains pun tidak bisa menanggalkan keimanan dan kesetiaan secara total. Hal ini karena, ada problem mendasar (*ontological problem*) bahwa pikiran memerlukan “inti” (*core*) dan sekaligus inti itu memerlukan perlindungan. Inti itu adalah hasrat dan perlindungan itu, saya sebut sebagai “cangkang mistis.”

Uraian pertama, saya akan memperinci terkait hasrat dan kedua tentang keterkaitannya dengan “cangkang mistis”[13]. Hasrat menjadi inti kemudian menjadi problematis. Mengapa? Pertama, karena, hasrat merupakan suatu yang *invisible*, yang datang entah dari mana, sifatnya liar, bebas, dan tak terbatas (*infinite*), membuat suatu keacakan, serta ada dalam lokus tak teratur (*deteritorialisasi*) [14]. Hasrat bisa dimengerti sebagai sesuatu dari sesuatu yang tak terpikirkan, menyelami suatu dunia yang tak terselami. Memahami hasrat ibarat memasuki sumur tanpa dasar. Maka, kita bisa memahami bahwa bila semakin seseorang memiliki banyak ilmu pengetahuan, maka semakin ia tidak tahu apa-apa. Suatu pesan kebijaksanaan yang tersirat dalam ilmu pengetahuan. Kedua, hasrat menjadi problematis dalam ilmu oleh karena ada satu pertanyaan oxymoronik yaitu: “apa yang dihasrati oleh hasrat?” Pertanyaan sejajar berikutnya, “apa yang dikehendaki oleh kehendak?”; dan “apa yang diinginkan oleh keinginan?” Hasrat, kehendak, dan keinginan merupakan satu kesatuan utuh yang ada dalam hasrat itu sendiri, yang enigmatik, melekat atau ada dalam diri manusia dengan *telos* kekuasaan.

Bila pertanyaan tersebut ditanyakan kepada para ilmuwan, apa yang kira-kira mereka (mesti) jawab? Jawaban tersebut tentu tidak akan mudah terurai dengan dua atau bahkan lebih dari proposisi. Apa yang dihasrati oleh hasrat adalah “kekuasaan.” Ada, hasrat untuk berkuasa (*will to power*) dalam diri manusia terutama para ilmuwan. Mengapa? Karena kekuasaan tersirat dan tersimpan secara tak tampak dalam hasrat manusia. Jawaban ini telah disabdakan oleh Francis Bacon, Friedrich Nietzsche, dan Michel Foucault. Hasrat bukan elemen kosong [15], tanpa tuan, tetapi hasrat mengajak, mengarahkan, dan membuat seseorang menjadi tuan penguasa bagi yang lainnya, di mana ilmu pengetahuan menjadi sarananya. Kehendak untuk berkuasa menyimpan suatu pesan implisit: pertama, ilmuwan menginginkan untuk menjadi dominan. Dalam kehendak, ada cara berpikir atau logis yang mereka ingin menguasai yang lain. Kedua, tidak mau salah. Hal ini karena, tuntutan sains yaitu obyektivitas, yang berupaya untuk mengarah kepada kebenaran dengan mengumpulkan bukti dan mendasarkan pada fakta. Singkatnya, dari luar ke dalam diri (pikiran). Sedangkan, kehendak di baliknya, yang tersembunyi adalah manusia tidak mau salah. Pertanyaan yang menggugat adalah, mengapa sains tidak mau salah, dan harus benar? Karena di dalam dirinya yang tersembunyi, sains (termasuk saintis) memiliki hasrat mencapai kebenaran dengan menanggalkan praduga, hal-hal mistik, dengan pembuktian yang ilmiah. Padahal, sains tidak bisa dengan seutuhnya menanggalkan praduga, yang mistik, karena dalam sains pun memiliki kesalahan (*erratum*). namun *erratum* itu mesti ditutupi agar sains menjadi pemegang otoritas yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah [16]. Ketiga, kehendak untuk berkuasa ingin mencapai kesempurnaan dan memiliki tendensi pada solipsisme.

Kehendak untuk berkuasa itu menjadi cangkang mistis yang disembunyikan dan dirawat dalam sains. Untuk itu, bagi para saintis perlu memiliki kritik imanen, kecurigaan metafisik untuk melihat dirinya bahwa sains yang disebut sebagai ilmu pasti pun tidak pasti-pasti amat, dan menyembunyikan kehendak dalam cangkangnya yaitu ingin selalu benar, dan tidak mau salah. Penjelasan cangkang mistis agar tidak terlalu abstrak dan membingungkan, mari kita menikmati

kisah fiksi dari seorang sastrawan Jerman bernama Johann Wolfgang von Goethe yang menulis tentang tragedi Doktor Faust.

Faust digambarkan sebagai berhasrat menjadi manusia saintifik ideal. manusia saintifik ideal adalah manusia yang mempunyai keilmuan yang komprehensif, memiliki moralitas, dan ingin berkontribusi bagi orang-orang yang lemah dan menderita. Dalam diri Faust, keinginan untuk menjadi manusia saintifik yang ideal begitu menggebu-gebu sehingga dia mencoba untuk mempelajari hampir semua ilmu pengetahuan untuk mencapai ambisinya itu. Akan tetapi, Faust tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya dan merasa gagal karena tidak bisa menyembuhkan wabah ada pada masa itu. Faust mengungkapkan ketidakpuasannya demikian,

“Ah! Now I’ve done Philosophy, I’ve finished Law and Medicine, and sadly even Theology: Taken fierce pains, from end to end. Now here I am, a fool for sure! No wiser than I was before: Master, Doctor’s what they call me, and I’ve been ten years, already, Crosswise, arcing, to and fro, Leading my students by the nose, and see that we can know - nothing! It almost sets my heart burning. I’m cleverer than all these teachers, Doctors, Masters, scribes, preachers: I’m not plagued by doubt or scruple.”[17]

(Ah! Sekarang saya telah menguasai Filsafat, saya telah menguasai Ilmu Hukum dan Ilmu Kedokteran, dan bahkan Teologi: menerima rasa sakit yang sengit, tanpa akhir. Sekarang di sinilah saya, seorang bodoh! Tidak lebih bijaksana dari saya sebelumnya: Master, Doktor adalah sebutan yang disematkan pada diri saya, dan saya sudah sepuluh tahun berselisih, memancar kemana dan darimana, Memimpin para siswa saya, dan melihat bahwa kita bisa tahu - tidak ada! Hampir membuat hatiku terbakar. Saya lebih pandai dari semua guru, Doktor, Master, juru tulis, dan para pengkhotbah: Saya tidak terganggu oleh keraguan atau rintangan).

Doktor Faust menguasai beragam ilmu, mulai dari filsafat, hukum, kedokteran, teologi, dan bahkan memiliki laboratorium untuk melakukan eksperimen kimiawi. Tetapi, saat wabah menjelang, ia merasa bukan siapa-siapa, dan tak berdaya dengan beragam ilmu yang dimilikinya. Faust tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya sehingga akhirnya menempuh jalan yang salah, yakni mengadakan perjanjian darah dengan rela membiarkan jiwanya dikuasai si jahat bernama Mephistopheles. Kegundahan Faust karena merasa tidak mampu menyembuhkan orang-orang yang terkena wabah mengakibatkan terjadinya sebuah tragedi. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul di dalamnya adalah adanya tragedi yang terjadi pada tokoh-tokohnya, yakni pada diri Faust dan Gretchen. Tragedi pada diri Faust yang terkenal dengan nama *Gelehrtentragödie* adalah tragedi seorang ilmuwan yang mengadakan perjanjian dengan kejahatan. Apabila seorang ilmuwan yang juga pemikir dikuasai oleh kejahatan, maka tragedi yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan di muka bumi. Pada akhirnya, tragedi itu berujung pada satu ungkapan, “*sie ist gerichtet!*” (dia sekarang diadili!).

Yang menonjol dari drama Faust bagian I, sebagai karya sastra periode klasik, adalah persoalan jati diri (eksistensi) manusia saintifik ideal. Faust kehilangan jati dirinya sebagai ilmuwan. Kontrak darah dengan kejahatan Mephistopheles, walaupun awalnya menyenangkan bagi Faust karena bisa menyembuhkan wabah untuk sementara. Namun, setelahnya wabah terus berlanjut dan semakin parah. Karena kontrak darah tersebut memiliki batas waktu, maka Faust kehilangan jiwanya. Poin penting dari figur Doktor Faust adalah pertama, ia bingung saat mengetahui bahwa beragam ilmu yang dimilikinya sendiri ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah wabah. Ia terjebak pada cangkang keilmuannya dan bahkan tergelincir dalam bentuk solipsisme dan tidak mau berdialog secara rasional dengan figur ilmuwan lain, atau bahkan dengan warga lain yang mungkin memiliki kecerdasan tertentu. Ia malah memilih kuasa yang jahat. Kedua, kebuntuan yang terjadi pada para ilmuwan tidak lantas berujung pada kebuntuan yaitu mempertaruhkan jiwa. Melalui proses pertarungan, tawaran itu diterima meskipun itu berarti Faust telah menggadaikan jiwanya. Faust yakin

bahwa Mephistopheles tidak akan pernah bisa memuaskan dirinya sehingga dia kalah dalam pertarungan itu [18].

Keilmuan yang terpresentasikan pada figur Doktor Faust berciri multidisiplin, namun ada dan melekat pada satu subyek. Faust mengalami solipsisme, merasa paling mampu dalam hal ihwal ragam keilmuan, namun ia tak sadar, ada dalam cangkang mistis keilmuan itu sendiri. Kekhawatiran, pada kasus bahwa satu subyek memiliki beragam varian ilmu menyebabkan tidak terjadinya dialog. Padahal ilmu pengetahuan justru berkembang melalui adanya saling menyapa, saling melengkapi dari para saintis, terutama pada saat itu yakni wabah sebagai disrupsi. Perubahan, bila tidak segera diatasi bisa membuat ilmuwan seperti Faust menjadi kikuk, dan tidak merasa puas. Faust ingin tetap mau membuktikan bahwa dengan mampu menyelesaikan wabah, siapapun yang memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan bisa mengatasi disrupsi. Walaupun, kepemilikan dan kekuasaan itu tampil invisible melalui hasrat tersembunyi dengan kontrak terlarang dengan kejahatan.

Kekuasaan, dengan demikian menjadi eksplanasi dari tujuan hasrat itu sendiri, dan keimanan (keyakinan) serta kesetiaan menjadi cangkang mistisnya. Saya akan memberi penjelasan lebih lanjut tentang cangkang mistis ini dengan menautkannya pada duduk perkara tulisan ini yaitu dalam konteks integrasi ilmu. Para ilmuwan dengan segenap kecerdasan dan keterampilannya hampir pasti menempatkan asumsi mendasar pada sebetuk keyakinan bahwa segenap ilmu pengetahuan yang dimilikinya mampu menyelesaikan problem kehidupan. Kemampuan berupa kecerdasan dan keterampilan tersebut dilatih, dieksperimentasi, dan diterapkan dengan kesetiaan (ketekunan) terus-menerus agar keahlian atau spesialisasi menjadi miliknya, dan tidak dimiliki oleh yang lain. Repetisi menjadi metode untuk mengerti bahwa cangkang mistis itu adalah dimensi abstrak yaitu keimanan dan kesetiaan. Cangkang mistis adalah ideologi itu sendiri. Ideologi, oleh karena pendasaran pada asumsi keyakinan bahwa ilmu yang dimiliki bisa menjadi solusi pada hidup beserta ketidakberesan yang ada di dalamnya (*life and its disorder*).

De facto, ideologi semacam itu dalam praxisnya, tidak serta-merta berjalan mulus, karena sains ternyata memiliki keterbatasan, *margin of error* alias tidak selalu benar. Untuk itu, langkah antisipasi, membuat seseorang yang kegagalan, akan kembali ke cangkang mistis, yang berfungsi sebagai proteksi diri dari *chaos*. Ia melakukan eskapisme (melarikan diri) dari kepastian awalnya yang ditawarkan sains. Sains (dan saintis) kemudian berlindung dan masuk ke dalam cangkang. Sains, ideologi, keimanan, keyakinan, dan kesetiaan dalam ketunggalnya bergerak kembali pada konservatisme (*conservative turn*) yaitu kembali ke cangkang mistis.

Ketunggalan sains bisa disebut dengan istilah, monodisiplin [19]. Monodisiplin kerap kali bertaut dengan linearitas, *expertise*, spesialisasi, dan bahkan over-spesialisasi. Imbasnya, cara berpikirnya terkotak-kotak, ilmu saling mengeklusi, dan adanya klaim metodologis sebagai ilmu yang paling benar. Dengan begitu, ilmu yang satu sulit untuk “saling menyapa” dengan ilmu yang lain, yang berbeda dengan keahliannya. Situasi ini memperuncing paradigma asimetris yang justru membuat kerumitan dan kurang tangkas (*agile*) pada perubahan [20]. Mari kita dalam paradigma asimetris dalam eksperimen pikiran berikut. Pasca kejadian, seorang pemuda pengendara motor tertabrak mobil dan jatuh pingsan. Peristiwa itu dilihat oleh tiga orang. Ketiganya adalah saintis. Yang satu berprofesi sebagai seorang dokter, melihat korban dan mengatakan, “darah dari korban mengucur terus, kemungkinan mengidap *hemofilia* (darah sulit membeku).” Seorang dosen humaniora yang melintas, melihat, lalu mengungkapkan, “kasihan korban itu, akibat tabrakan ini ia tidak bisa bekerja dan akan berdampak kurang baik bagi keluarganya.” Yang terakhir, seorang mahasiswa teknik mesin, berlari dan menyaksikan peristiwa tersebut dan berkata, “walaupun rusak, motornya masih bisa diperbaiki, dan masih laku dijual.”

Ilmu yang dibutuhkan hari ini dan esok?

Satu peristiwa, tetapi ada beragam paradigma yang mengemuka. Tiga saintis memiliki cara pandang tersendiri, namun satu hal yang terlupakan oleh mereka, menolong korban itu sendiri. Di sini,

satu pertanyaan dari Thompson Klein, dkk (di awal tulisan ini) menjadi relevan, “*What kind of science do we need today and tomorrow?*” (Ilmu yang seperti apa yang kita butuhkan hari ini dan esok?) Bila pertanyaan ini hendak dijawab, ilmu monodisiplin sebaiknya sudah mulai kita pertimbangkan ulang agar korban tabrakan bisa segera diselamatkan. Eksperimen pikiran tersebut mengundang para saintis untuk bisa saling berinteraksi: menyapa, bercakap-cakap, berkomunikasi, dan menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan korban. Di sinilah, multidisiplin sebagai diskursus dan praktik dalam pendidikan menjadi penting. Penting, oleh karena, diskursus dunia saat ini melemparkan satu tantangan besar bagi para penghuni bumi, termasuk para ilmuwan, yaitu pada apa yang disebut *anthropocene*.

Anthropocene merupakan abad dimana manusia diminta untuk berkontribusi bagi bumi dengan beragam keahliannya. Dalam laman <https://www.anthropocene-curriculum.org/contribution/anthropocene-lecture-bruno-latour> terungkap kejengkelan demikian,

“Di tengah badai politik saat ini adalah masalah perubahan iklim, saran Bruno Latour. Dia merefleksikan kondisi geopolitik saat ini sambil menggarisbawahi hubungan rumit mereka dengan migrasi, ledakan ketidakadilan di bawah rezim neoliberal dan kembalinya ke egoisme nasionalis yang dipicu oleh kepanikan. Dalam ceramah *anthropocen*nya, dia merenungkan bagaimana kita bisa mendapatkan landasan lagi dalam situasi yang menjengkelkan ini.”[21]

Anthropocene memetakan situasi pelik bahwa antar bidang kajian ilmu pun memiliki dampak bagi bumi terutama manusia. Refleksi dari Bruno Latour kemudian bagi para ilmuwan untuk bisa menjadi konteks bersama sekaligus menjadi peristiwa (yang menantang) bagi para ilmuwan untuk menggeser titik kordinat pengetahuan, dari gagasan menjadi tindakan. Inilah yang menjadi kekuatan dari multidisiplin ilmu. Multidisiplin oleh karena menjadi strategi riset yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama. Dari sini, kita bisa memahami bahwa *anthropocene* adalah wahana tindakan

konkret dari warga dunia (kosmopolit) untuk mengantisipasi pada apa telah dipesankan oleh Virgil (pujangga Romawi Kuno), dalam epik Aeneid yaitu *sed terrae graviora manent* (tapi di bumi, hal-hal yang lebih buruk telah menunggu) [22].

Kembali ke pertanyaan mendasar, ilmu yang seperti apa yang kita butuhkan hari ini dan esok, adalah ilmu-ilmu (dan para ilmuwan) yang bisa dan mampu untuk saling menyapa, bercorak dialogis dan integratif seperti yang menjadi tiga usulan dari Amin Abdullah, yaitu: *semipermeable* (saling menembusi), *intersubjective testability* (keterujian intersubjektif), dan *creative imagination* (imajinasi kreatif). Dengan beralihnya monodisiplin menjadi multidisiplin, maka terjadi kemajuan pada keilmuan [23]. Penjelasan pertama tentang *semipermeable* adalah membran yang menjadi filter antara ilmu-ilmu. Maksudnya, seorang ilmuwan tidak harus menguasai semua bidang ilmu (seperti Doktor Faust) untuk kemudian disebut menjadi *multi-expert*. Tetapi, seorang diminta untuk memahami secara umum inti dari ilmu lain yang bisa mengubah gagasan menjadi tindakan. Seorang ekonom, misalnya, tidak mesti studi lama dan mendetail untuk menjadi antropolog. Ia cukup memahami dan mulai mengaplikasi inti-inti dari bidang antropologi, memfilternya (dengan membran *semipermeable*) unsur-unsur mana saja yang bisa digunakan untuk memahami tipikal budaya dari suatu warga desa. Penjelasan kedua yaitu tentang *intersubjective testability*. Maksudnya, ada kebutuhan untuk berdialog antar ilmu dan dialog tersebut diuji agar layak untuk menjadi solusi. Ketiga, imajinasi kreatif, maksudnya lebih pada upaya untuk melampaui logika berpikir induktif dan deduktif yang *kadung* dominan menjadi metode ilmu pengetahuan. Untuk itu, kemampuan untuk mengabstrakkan dan menganalogikan ada dalam peran imajinasi kreatif sehingga ilmu bisa lebih mudah dipahami.

Tahapan selanjutnya setelah kita mulai tahap pertama dengan berpindah dari monodisiplin ke interdisiplin, kita diminta untuk mencoba kemungkinan berikutnya, yaitu transdisiplin [24]. Apa itu transdisiplin ilmu? Transdisiplin sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 tahun 2014, dimengerti sebagai strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di

luar akademisi seperti praktisi profesional, pemerintah, politisi, pengusaha, agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat. Dari sini, kita bisa mengerti bahwa transdisiplin adalah nama lain dari ide segar yaitu *pentahelix* [25], yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media. Ilmu bergerak melintasi bidang-bidang *lex specialis*-nya untuk menjawab persoalan-persoalan konkret dengan berkolaborasi pada par pihak. Harapannya, problem-problem antroposentris bisa terjawab dalam bentuk gagasan dan tindakan yang metodologis. Di sinilah peran ilmuwan untuk bergerak melintasi batas-batas dirinya. Untuk itu, para ilmuwan diminta untuk memahami terlebih dahulu prinsip pertama dari ilmu, bahwa semua ilmu dasarnya adalah metodologi. Ilmu (semuanya) itu bisa dipelajari bila tahu kerangka dasarnya. Kerangka dasar itu adalah *insight* mendasar dalam melanjutkan misi untuk mengajak para pihak dalam *pentahelix framework* [26] untuk mengerti *grand design* bahwa penelitian perlu untuk menjawab problem hidup sampai pada wujudnya yang mikroskopis.

Untuk meringkaskan penjelasan di atas, ada empat peristiwa yang menjadi bisa mendaratkan hal ihwal integrasi ilmu dalam tulisan ini. Peristiwa pertama tentang dua teman (yang satu adalah dosen yang setia, dan satunya dosen yang beriman); kedua, kisah tentang Nuh; ketiga, kisah Doktor Faust; keempat tentang tiga ilmuwan. Keempat peristiwa itu menjadi konteks yang menegaskan bahwa ketunggalan ilmu kurang cukup untuk mengatasi disrupsi, situasi dunia yang cepat berubah. Para ilmuwan dalam mengantisipasi disrupsi dengan menjadikan gagasan dan tindakan sebagai wujud *anthropocenic*, menjadikan dunia menjadi lebih baik. Antisipasi tersebut dilakukan dengan berupaya dengan berdialog dengan berupaya beralih dari monodisiplin ilmu ke interdisiplin ilmu. Dalam interdisiplin, ilmuwan memiliki kemampuan memfilter dengan *semipermeable*, *intersubjective testability*, dan *creative imagination*. Akhirnya, perlu ada kerelaan untuk tidak terjebak pada linearitas dan favoritisme sehingga membuka kemungkinan bagi para ilmuwan untuk menjajagi transdisiplin atau *pentahelix*.

Apa yang ada dalam buku ini?

Buku ini terdiri dari empat *chapter* yang dikategorikan berdasarkan keilmuan umum. *Chapter* pertama memuat tentang integrasi ideologi dalam mengantisipasi disrupsi. *Chapter* kedua tentang integrasi multikulturalisme dan bahasa. *Chapter* ketiga mencakup integrasi sains dalam pendidikan nilai, dan *chapter* keempat berfokus pada upaya integrasi sains mikroskopis dalam mengantisipasi virus. Para penulis di setiap chapter adalah para ilmuwan yang setia dan memiliki keyakinan pada bidang ilmunya, namun ketika para pembaca masuk ke detail-detail pembahasannya, ada suatu lintasan pikiran dari para penulis untuk keluar dari cangkang mistis, untuk mau berdialog dengan disiplin ilmu lain. Dalam teks yang ditulis oleh Prof. Dr. AD. Corebima, M.Pd, sebagai contoh, yang berjudul “Berdayakan Keterampilan Berpikir Selama Pembelajaran Sains Demi Masa Depan Kita”, kita (sebagai pembaca) menemukan secara eksplisit upaya dari penulis untuk mendialogkan sains dengan sastra dari Khalil Gibran. Sains bila mau membuka diri, keluar dari cangkang mistisnya, memiliki beragam kemungkinan untuk lebih mudah diterima, imajinatif, dan mengundang siapa saja untuk tertarik masuk ke dalam dunia sains. Poinnya, sains diminta untuk tidak jumawa, merasa paling benar, totaliter, bersikap feodalistis dan sebagainya, dan sebagainya, sehingga perkembangan sains tetap mengedepankan sikap untuk mau bercakap-cakap dengan serius-santai, berkomunikasi tanpa intimidasi, dan menggunakan dialektika tanpa mencela. Para ilmuwan pun diminta untuk menyadari bahwa setiap sains memiliki celah untuk dikritik, ada *margin of errors*, dan dengan begitu kebijaksanaan rendah hati menjadi prioritas. Para ilmuwan diminta untuk tidak jatuh pada pseudo sains [27]. Dimensi etisnya, ilmuwan disarankan untuk tidak terjebak untuk menjadi intelektual Faustian.

Para penulis dalam buku ini adalah juga ilmuwan-ilmuan yang memiliki keprihatinan pada perubahan yang terjadi. Perubahan yang membuat situasi menjadi berisiko, persis seperti yang pernah disampaikan Ulrich Beck tentang adanya masyarakat resiko (*risk society*) [28]. Dalam masyarakat resiko, kita diminta untuk mengantisipasi dengan mengembangkan peralihan gerak dari gagasan

menjadi tindakan, dan *vise versa*. Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang menyadarkan pada suatu resiko yang bukan saja mengantarkan kita pada untuk sekedar memikirkannya dalam bentuk gagasan, tetapi kita diminta untuk segera (*hurry up*) bertindak untuk menyelamatkan diri. Resiko yang terjadi mengantarkan kita pada ketakutan ultim, yaitu kematian. Ketakutan dan kecemasan membuat kita kembali ke cangkang kita masing-masing. Cangkang itu adalah rumah, sebagai bentuk proteksi diri agar tidak teracam beragam varian virus corona, mulai dari SARS-CoV-2 (Wuhan), Corona versi Alpha, Betta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, dan Lambda.

Ucapan terimakasih juga tidak lupa disampaikan kepada Dr. Pieter Sahertian, Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, karena dengan ide-ide briliannya, buku ini hadir dalam bentuk eksistensi yang nyata. Selain itu, terima kasih pula kepada para penulis tamu yang diundang memberikan sumbangsih pemikiran diantaranya: Dr. Ahmad Basarah, Dr. Yudi Latif, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., Richardus Eko Indrajit, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Prof. Dr. Dra. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes. *Last but not least*, terima kasih bagi para dosen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu) karena memiliki kehendak baik untuk turut berkontribusi memberikan beragam gagasan dalam ranah pendidikan dan mudah-mudahan bisa menjadi tindakan yang berguna bagi civitas akademika dan bagi warga negara.

“Dalam bayang-bayang keringkahan pandemi dan masa-masa
kedinginan di Bukit Buring”
Malang, 09 Juli 2021

Andri Fransiskus Gultom

Referensi

- [1] Brunger, Jeremy, The Administered World of Theodor Adorno: Essay - Jeremy Brunger. Magazine, Vol. VI, No. 5 [online]. Available:

- <http://numerocinqmagazine.com/2015/05/05/the-administered-world-of-theodor-adorno-jeremy-brunger/>, 2015, May 15
- [2] T. W. Adorno, & Horkheimer, M. *Dialectic of Enlightenment* (Vol. 15). Verso, 1997
- [3] Marcuse, Herbert. *One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society*. Routledge, 2013.
- [4] Gultom, Andri Fransiskus, Misnal Munir, and Iva Ariani. "Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga Negara Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9.2, p: 77-84, 2019.
- [5] Fukuyama, Francis. *The great disruption*. Profile Books, 2017.
- [6] Klein, J. Thompson, et al., eds. *Transdisciplinarity: Joint problem solving among science, technology, and society: An effective way for managing complexity*. Springer Science & Business Media, 2001.
- [7] Dynes, Russell R. "Noah and disaster planning: the cultural significance of the flood story,"1998.
- [8] J. Sudarminta, Setia pada Kebenaran Sumbangan Filsafat sebagai Ilmu Kritis. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Filsafat. Jakarta: STF Driyarkara, 2007, Mei 12
- [9] William, Whewell, "Comte and Positivism." *Epistemology & Philosophy of Science* 54.4, pp. 209-224, 2017
- [10] Duke, George. *Aristotle's Legal Theory: The Politics of Nomos*. Cambridge University Press, 2019.
- [11] Yan, Weiwei, et al. "Favoritism or equality: difference analysis of users' utilization of academic social networks for top research corporations." *Online Information Review*, 2020.
- [12] James. I. Porter, "Nietzsche's Theory of The Will to Power", A Companion to Nietzsche, Pearson, Keith, Ansell, (ed), Blackwell, London, pp. 548, 2006
- [13] Horn, A. J. "1. The Enigma of the Inversion. 2. Part One. 3. Rational Kernel and Mystical Shell." *Critique* 41.1, p. 23-54, 2013.
- [14] Deleuze, Gilles, et al. "Anti-oedipus." Trans. Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane. New York: Viking, 1977
- [15] Goodchild, Philip. *Deleuze and Guattari: An introduction to the politics of desire*. Vol. 44. Sage, 1996.
- [16] Wibowo, A. Setyo. *Gaya Filsafat Nietzsche*. Galangpress Group, 2004.

- [17] S. Kline, *Faust parts I & II*. published by Poetry In Translation, 2003
- [18] M.A. Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Ilmu Pengetahuan dan Riset pada Pendidikan Tinggi Masa Depan*. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 1, xi [online]. Available: <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/36>, 2018
- [19] Denikina, Zoya D., and Anatoly V. Denikin. "On the role of interdisciplinary, transdisciplinary, and philosophical knowledge in modern higher education." *SHS Web of Conferences*. Vol. 103. EDP Sciences, 2021.
- [20] Ulrich, Dave, and Arthur Yeung. "Agility: The new response to dynamic change." *Strategic HR Review*, 2019.
- [21] *Anthropocene Lecture – Bruno Latour* [online], available: <https://www.anthropocene-curriculum.org/contribution/anthropocene-lecture-bruno-latour>, May 04, 2018
- [22] Heaney, Seamus. *Aeneid Book VI: A New Verse Translation*. Farrar, Straus and Giroux, 2016.
- [23] Muhammad Amin Abdullah, "Islamic studies in higher education in Indonesia: Challenges, impact and prospects for the world community." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55.2 pp. 391-426, 2017.
- [24] Hadorn, Gertrude Hirsch, et al., eds. *Handbook of transdisciplinary research*. Vol. 10. Dordrecht: Springer, 2008.
- [25] Dymitrowa, Mirek, Karin Ingelhag, and Shelley Kotze. "The 'Research Forum' as a methodological tool for transdisciplinary co-production," 2019
- [26] Suidiana, Kiki, et al. "The development and validation of the penta helix construct." *Business: Theory and Practice* 21.1 p. 136-145, 2020.
- [27] Lakatos, Imre. "Science and pseudoscience." *Philosophical papers* 1, p. 1-7, 1978 .
- [28] Ulrich Beck, "Risk Society: towards a new modernity." *Political Studies-Oxford-* 43, p.178, 1995



CHAPTER I:

INTEGRASI IDEOLOGI, KEPEMIMPINAN, DAN DISRUPSI

Pembinaan Ideologi Pancasila: Fungsi dan Kewajiban Negara

Dr. Ahmad Basarah ¹

Pengantar

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Sejak hari kelahirannya pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), proses perumusan pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan, dan kesepakatan final pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI); Pancasila resmi menjadi dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan norma dasar negara (*grundnorm*), pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa, serta ideologi negara dan bangsa Indonesia.

Karena eksistensinya sebagai dasar dan ideologi negara, maka Pancasila harus selalu dilindungi, dikuatkan dan diinternalisasi dari generasi ke generasi agar senantiasa lestari sepanjang zaman. Pancasila oleh karenanya harus dipahami, dihayati, diamankan, dilembagakan, serta diamankan dari berbagai ancaman yang menghadang. Karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka proses penguatan dan pengamanan Pancasila harus dilakukan melalui aturan hukum. Inilah yang membuat Negara Republik Indonesia wajib menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila. Sebab jika fungsi tersebut tidak dijalankan, maka negara melakukan pembiaran terhadap pengikisan dasar negara yang sangat fundamental bagi keberlangsungan kehidupan negara. Dalam kaitan ini, penghidupan program pembinaan ideologi Pancasila oleh negara pasca Reformasi merupakan kabar baik. Meskipun upaya tersebut masih perlu ditingkatkan menjadi program yang struktural, sistematis dan masif berdasarkan kerjasama, terutama antara Pemerintah, Parlemen dan

¹ Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Kementerian/Lembaga Negara.

Dimulai dengan program Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang massif dilakukan sejak kepemimpinan Dr. (HC). H. Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR RI periode 2009-2014. Dalam program tersebut, Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan bangsa, disosialisasikan kepada masyarakat oleh pimpinan serta anggota MPR RI. Meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XI/2013 atas gugatan terhadap pasal 34 ayat (3b) huruf a UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang melarang penggunaan frasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, namun karena alasan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan. MPR tetap menggunakan frasa tersebut dengan menggantinya menjadi Empat Pilar MPR RI, setelah melakukan konsultasi dengan Pimpinan MK pada 16 Februari 2015. [1]

Langkah baik dari MPR ini kemudian disambut oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui penghidupan kembali program nasional pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini diawali dengan langkah yang paling penting dalam sejarah Pancasila, yakni pelurusan sejarah kelahiran Pancasila melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan Keppres ini, Pemerintah telah meluruskan sejarah kelahiran Pancasila yang sempat “bengkok” akibat proyek De-Soekarnoisasi Pancasila oleh Orde Baru. Dalam proyek tersebut, jasa Bung Karno sebagai penggali Pancasila dihapus, digantikan dengan sosok Muhammad Yamin yang dikonstruksikan sebagai pengusul lima sila Pancasila lebih awal dari Bung Karno. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 di Sidang Pertama BPUPK. Sedangkan Bung Karno berpidato pada 1 Juni 1945 di forum yang sama.

Melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila untuk pertama kali diusulkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945, bukan oleh tokoh lain, termasuk Mr. Yamin. Keppres ini juga menegaskan kesatuan proses kelahiran, perumusan dan kesepakatan final Pancasila Dasar Negara. Sebagai ide tentang falsafah dasar negara (*philosophische grondslag*), Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno. Ide ini lalu dirumuskan menjadi dasar negara oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, serta disepakati rumusan finalnya pada Sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Ketiga proses ini merupakan kesatuan, dimana satu fase tidak akan hadir dan sempurna tanpa fase lainnya. Berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 2016 ini, maka 1 Juni kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila sebagaimana terjadi pada masa kepresidenan Bung Karno.

Program nasional pembinaan Pancasila lalu dihidupkan melalui pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tentang UKP-PIP. Setahun kemudian, Unit Kerja Presiden ini dinaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Hanya saja payung hukum Peraturan Presiden atas BPIP dirasa kurang kuat sebab ia murni diskresi hukum Presiden yang tidak melibatkan legitimasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kedudukan hukum yang lemah ini, BPIP bisa bernasib sama dengan lembaga pembinaan Pancasila sebelumnya, yakni Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) di masa Orde Baru. Serta Lembaga Pembina Jiwa Revolusi (LPDR) pada era Demokrasi Terpimpin. Kedua lembaga ini didirikan melalui Keputusan Presiden. LPDR didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1966 tentang LPDR. Sedangkan BP-7 didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang BP-7. Kedua lembaga ini dibubarkan seiring pergantian rezim. Oleh karena itu dalam rangka

membangun permanensi pembinaan ideologi Pancasila, dibutuhkan penaikan payung hukum BPIP dari Perpres menjadi Undang-Undang tentang BPIP tersendiri.

Tulisan ini hendak mengkaji urgensi penaikan landasan hukum BPIP dari Perpres kepada UU. Urgensi tersebut didukung oleh berbagai faktor, baik yuridis, filosofis maupun sosiologis. Dalam rangka pengkajian tersebut, penulis akan mengelaborasi kesejarahan program pembinaan Pancasila yang pernah terjadi, baik di era Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru. Pengkajian historis tersebut diarahkan demi terciptanya perbandingan, baik sifatnya yuridis, politik, hingga diskursus Pancasila yang berkembang di setiap era. Dari perbandingan ini, akan lahir pelajaran berharga bagi pembinaan ideologi Pancasila di era Reformasi ini.

Kelahiran Pancasila

Pembinaan ideologi Pancasila harus berangkat dari sejarah Pancasila yang lurus. Sebab jika tidak, ia akan menghasilkan pembinaan yang manipulatif pada satu sisi, dan *output* yang justru bertentangan dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Untuk itu sebelum membahas upaya pembinaan Pancasila oleh negara, perlu kiranya kita memahami sejarah kelahiran Pancasila berdasarkan fakta sejarah yang otentik.

Sebagaimana Diktum Keputusan Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, Pancasila dilahirkan pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno mengenai Pancasila di depan Sidang BPUPK. Pidato ini diterima secara aklamasi oleh Sidang BPUPK karena berhasil menjawab pertanyaan Ketua BPUPK, dr. Radjiman Wediodiningrat tentang, “apa dasar dari negara yang hendak kita dirikan?” Setelah diterima secara aklamasi oleh Sidang, Ketua BPUPK lalu membentuk Panitia Kecil yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato 1 Juni Bung Karno.[2] Ini berarti, tujuan perumusan dasar negara oleh Panitia Kecil adalah perumusan dasar negara berdasarkan ide Pancasila Bung Karno.

Dalam kaitan ini, pidato Bung Karno menjadi satu-satunya pidato yang berhasil menawarkan ide dasar negara. Sebab terdapat 39 pembicara yang telah menyampaikan pendapatnya sebelum Bung Karno, terhitung sejak 29 Mei-1 Juni 1945. [3] Namun dari berbagai pembicara tersebut, belum ada gagasan yang mampu memenuhi pertanyaan Ketua BPUPK tersebut. Muhammad Yamin misalnya, berpidato pada 29 Mei 1945. Ia berbicara tentang banyak hal namun tidak sistematis. [4] [5] Terdapat pula Ki Bagus Hadikusumo yang berpidato pada 30 Mei. Sebagai bagian dari kelompok Islam (Pimpinan Muhammadiyah), ia mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Jika kita ingin mendirikan negara persatuan, maka dasarkanlah negara tersebut atas agama Islam, karena Islam menyerukan persatuan dan persaudaraan.

Pada tanggal 31 Mei, Soepomo berpidato, menyatakan ketidaksetujuannya dengan pandangan Ki Bagus. Menurutnya, pendirian sebuah negara Islam akan melahirkan persoalan minoritas, karena akan ada umat beragama tertentu yang menjadi mayoritas berkuasa. Hal ini melahirkan perasaan minoritas bagi umat beragama lain. Jika Indonesia ingin dibangun sebagai negara persatuan, maka tidak boleh ada dikotomi mayoritas dan minoritas ini. Ia lalu menegaskan, “meskipun negara nasional bukan negara agama, tetapi juga bukan negara areligius (anti-agama). Negara nasional tersebut adalah pula negara berdasarkan nilai-nilai luhur yang dimuliakan oleh agama.”

Selain berbicara tentang hubungan agama dan negara, Soepomo juga banyak bicara tentang pengertian atau teori negara dalam perspektif teori negara integralistik. Pandangan ini merupakan pemaknaannya terhadap dasar negara yang diajukan oleh Ketua BPUPK. Hanya saja dalam konteks ide dasar negara, Soepomo lebih berbicara tentang pengertian negara (*Staatside*). Sebab menurutnya, sebelum membahas dasar dan juga bentuk negara, diperlukan terlebih dahulu, pengertian tentang negara yang mana, yang akan digunakan

oleh peserta Sidang BPUPK? Pengertian liberalistik, komunistik, atau integralistik? Dari tiga pengertian ini, Soepomo lalu mengajukan pengertian negara integralistik sebagai teori kenegaraan yang cocok dengan kultur bangsa Indonesia. Dengan pandangan tentang pengertian negara integralistik dan hubungan agama dan negara ini, Soepomo berarti tidak mengajukan gagasan berarti tentang dasar negara.

Bung Karno tampil sebagai pembicara di hari terakhir Sidang Pertama BPUPK, yakni 1 Juni 1945. Pidato yang disampaikan tanpa teks ini pada satu sisi berusaha menyimpulkan dan menengahi berbagai perbedaan pandangan pada hari-hari sebelumnya. Pada saat bersamaan, Bung Karno sebenarnya mempresentasikan ide-ide yang telah lama beliau geluti, dan dipersembahkan sebagai dasar negara. Dalam pengantarnya, beliau melakukan kritik terhadap para pembicara terdahulu yang belum menjawab secara tepat, pertanyaan tentang dasar negara. Menurutnya,

“Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda *“Philosophische grondslag”* daripada Indonesia Merdeka. *Philosophische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”[6].

Setelah itu beliau menyatakan,

“Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta *Philosophische Grondslag*, atau jikalau kitab oleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu

Weltanschauung di atas di mana kita mendirikan negara Indonesia itu”[6].

Dari dua alinea pidato ini, kita menemukan pandangan Bung Karno yang menawarkan ide tentang dasar negara dalam rangka dua hal. Pertama, filsafat dasar (*Philosophische grondslag*). Kedua, pandangan dunia (*Weltanschauung*). Filsafat dasar adalah sifat pertama dari dasar negara yang diusulkan oleh Bung Karno. Yang dimaksud filsafat dasar adalah filsafat yang bersifat sangat mendasar bagi bangunan kenegaraan kita. Dengan demikian, yang dimaksud Bung Karno sebagai filsafat dasar adalah filsafat kenegaraan. Oleh karena itu, dasar negara tidak lain ialah filsafat kenegaraan yang menjadi dasar bagi konsep, konstitusi, dan bangunan kenegaraan secara umum.

Dasar negara dalam rangka falsafah dasar ini hanya disampaikan oleh Bung Karno, yang membuat pidatonya sebagai satu-satunya pidato yang diterima secara aklamasi oleh Sidang BPUPK. Mengapa? Karena falsafah dasar negara ini merupakan bahan baku bagi perumusan norma dasar (*Grundnorm*) negara. Sebab yang dimaksud sebagai dasar negara tersebut ialah norma dasar negara yang mendasari konstitusi dan sistem hukum kita. Substansi konseptual dan nilai-nilai dari norma dasar negara tersebut, ialah falsafah dasar negara. Hal ini terkait dengan sistem hukum, yang selalu memuat filsafat hukum di dalam setiap norma hukum.

Falsafah dasar negara yang menjadi bahan bagi norma dasar negara ini oleh Bung Karno disusun secara berurutan melalui pengangka-an, dari nomor satu hingga nomor lima. Pengurutan angka inilah yang olehnya diberi nama Pancasila. Penyampaian ide secara berurutan, sistematis dan komprehensif ini tidak dilakukan oleh para pembicara BPUPK sebelumnya. Sehingga wajar, jika hanya pidato Bung Karno yang berhasil mengajukan dua hal. Pertama, konsep yang tepat tentang dasar negara, yakni dasar negara sebagai falsafah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedua, metode penyampaian

konsep dasar dan ideologi negara tersebut yang disampaikan melalui pengangka-an, sehingga diberi nama Pancasila (lima prinsip dasar).

Selain mengusulkan dasar falsafah negara, Bung Karno juga memaknai dasar negara sebagai pandangan dunia (*Weltanschauung*). Jika *Philosophische grondslag* beliau sebut sebanyak tiga kali. Maka *Weltanschauung* beliau sebut sebanyak tiga puluh tiga kali. Yang dimaksud *Weltanschauung* ialah pandangan dunia komprehensif berdasarkan ide tentang penataan kehidupan manusia yang ideal menjadi pandangan hidup bangsa. Pemaknaan pandangan hidup bangsa oleh Bung Karno ini dekat dengan konsep ideologi, karena beliau menempatkan pandangan hidup bangsa Indonesia ini dalam perbandingan dengan ideologi- ideologi bangsa lain. Yakni Marxisme-Leninisme di Uni Soviet, Sosialisme-Nasionalis di Jerman, Tenno Koodo Seisin di Jepang, Islam di Arab Saudi dan san Min Chu I di Tiongkok. Dengan demikian, selain sebagai filsafat dasar kenegaraan, dasar negara bagi Bung Karno juga merupakan ideologi negara. [7]

Dalam uraian tanpa teks, Bung Karno lalu mengusulkan lima nilai dasar yang beliau beri nama Pancasila dengan pokok pikiran sebagai berikut: Pertama, s kebangsaan Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia adalah negara kebangsaan, yakni negara yang dibangun “satu untuk semua, dan semua untuk semua”. Kebangsaan menjadi prinsip pertama sebab ia yang mampu mempersatukan keragaman di masyarakat, serta menjadi modal utama dalam meraih kemerdekaan. Dalam hal ini bangsa dibentuk oleh kesatuan nasib dan karakter yang melahirkan kehendak untuk menjadi satu bangsa di atas geopolitik negara kesatuan. Kedua, internasionalisme atau Perikemanusiaan. Kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan yang *chauvinistik*, melainkan kebangsaan yang dibangun demi terbentuknya kekeluargaan antar-bangsa. Hubungan antar-bangsa yang bersifat kekeluargaan inilah yang melahirkan tata dunia yang berperikemanusiaan, sebagai antitesa dari kolonialisme dan imperialisme yang anti-kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi.

Prinsip kebangsaan yang berperikemanusiaan tersebut dipraktekkan melalui sistem demokrasi berbasis mekanisme permusyawaratan. Demokrasi menjadi sistem terbaik karena ia memberikan kesempatan pada semua kelompok masyarakat bangsa untuk menyalurkan aspirasinya di lembaga perwakilan rakyat. Dalam menyampaikan aspirasi tersebut, musyawarah diutamakan demi tercapainya permufakatan. Keempat, kesejahteraan sosial. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi politik yang hanya menciptakan kesetaraan di bidang politik, melainkan demokrasi sosial yang mampu menciptakan kesetaraan politik, sekaligus kesetaraan ekonomi. Sebab tujuan utama dari Negara Persatuan adalah kesejahteraan sosial. Kelima, Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip negara kebangsaan yang berperikemanusiaan serta demokratis dan berkejahteraan sosial itu didasarkan pada keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kaitan ini, bukan hanya tiap-tiap bangsa Indonesia yang bertuhan, tetapi Negara Indonesia adalah negara yang bertuhan. Iman kepada Tuhan ini diamalkan secara beradab, berkebudayaan, berbudi pekerti luhur dan saling hormat menghormati antar-umat beragama. Sebuah iman dan amal ketuhanan yang toleran, inklusif dan menjunjung tinggi persatuan nasional. [6]

Setelah pidato Lahirnya Pancasila tersebut disetujui dan dijadikan bahan utama perumusan dasar negara oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Maka ide Pancasila Bung Karno disepakati oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan revisi atas sistematika nilai (sila) tanpa mengubah tema dari nilai-nilai tersebut. Oleh Panitia Sembilan, kebangsaan yang awalnya menjadi sila pertama ditempatkan sebagai sila ketiga dengan redaksi “Persatuan Indonesia”; internasionalisme atau perikemanusiaan tetap menempati sila kedua dengan redaksi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”; mufakat atau demokrasi yang awalnya menjadi sila ketiga digeser menjadi sila keempat dengan redaksi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”; kesejahteraan sosial yang awalnya

menjadi sila keempat digeser menjadi sila kelima dengan redaksi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”; serta Ketuhanan Yang Maha Esa yang awalnya menempati sila kelima dinaikkan menjadi sila pertama dengan redaksi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya.”

Rumusan Pancasila yang termaktub dalam Naskah Piagam Jakarta tersebut lalu dilaporkan Bung Karno pada Sidang Kedua BPUPK tanggal 10-17 Juli 1945. Hingga sidang kedua selesai, rumusan Pancasila tersebut disepakati oleh sidang, termasuk sila Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam”. Baru pada 18 Agustus 1945 pagi hari, Bung Hatta melobi para pemimpin organisasi Islam seperti Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan untuk mengubah “tujuh kata syariat” tersebut. Para pemimpin Islam sepakat dan menggantinya dengan frasa Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sejatinya kembali pada gagasan awal Bung Karno pada 1 Juni tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan fakta sejarah ini, maka sudah tepat jika Pemerintahan Presiden Joko Widodo kini menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016 untuk meluruskan sejarah kelahiran, perumusan dan kesepakatan final Pancasila. Berdasarkan pelurusan sejarah Pancasila inilah, pembinaan ideologi Pancasila harus diberangkatkan.

Pembinaan Era Demokrasi Terpimpin

Sebagai dasar negara dan ideologi negara, Pancasila telah dikuatkan oleh negara di berbagai era pemerintahan. Di masa Demokrasi Terpimpin, Pancasila dikuatkan melalui program Pembinaan Djiwa Revolusi berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1960 tentang Panitia Pembina Djiwa Revolusi (PPDR). Hingga tahun 1966, pembinaan Pancasila ini dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui penaikan status PPDR menjadi Lembaga Pembina Djiwa Revolusi (LPDR) berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1966 tentang Lembaga Pembina Djiwa Revolusi (LPDR).[8]

Pembinaan Pancasila di era Demokrasi Terpimpin dilakukan berdasarkan konsep Manipol-USDEK. Manipol adalah akronim dari Manifesto Politik yang merupakan intisari pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Manipol berisi amanat Bung Karno terhadap persoalan-persoalan pokok revolusi, beserta program-program revolusi nasional. Sedangkan USDEK merupakan akronim dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. USDEK adalah intisari dari pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1960 dengan judul “Jalannya Revolusi Kita” (Jarek). Inti USDEK adalah pendasaran kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita kepada Pancasila, UUD 1945 dan sosialisme Indonesia dalam sistem demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kebudayaan bangsa berbasis kepribadian Indonesia.

Pemerintah Presiden Soekarno menjadikan Manipol-USDEK sebagai konsep turunan dari Pancasila karena konsep ini mencerminkan nilai-nilai praksis Pancasila ke dalam konteks revolusi nasional. Oleh karenanya, hubungan Pancasila dan Manipol-USDEK merupakan kesatuan, dimana Manipol-USDEK menjadi pedoman dalam menjelaskan Pancasila. Hubungan keduanya pun diibaratkan Bung Karno seperti hubungan al-Qur’an dan hadis sahih. Artinya, jika Pancasila diibaratkan al-Qur’an (teks utama), maka Manipol-USDEK diibaratkan sebagai hadis sahih yang menjelaskan maksud Pancasila. Untuk soal ini, Bung Karno menyatakan:

“Manifesto Politik adalah pemancaran daripada Pancasila. USDEK adalah pemancaran daripada Pancasila. Manifesto Politik, USDEK dan Pancasila adalah terjalin satu sama lain...Jika saya harus mengambil qiyas agama, sekadar qias, maka saya katakan: Pancasila adalah semacam Qur’annya, dan Manifesto Politik dan USDEK adalah semacam hadist sahihnya, (Awas!

Saya tidak mengatakan bahwa Pancasila adalah Qur'an dan bahwa Manifesto Politik adalah hadis). Qur'an dan hadis sahih merupakan satu kesatuan, maka Pancasila dan Manifesto Politik dan USDEK pun merupakan satu kesatuan...Qur'an dijelaskan dengan hadis, Pancasila dijelaskan dengan Manifesto Politik serta intisarinya yang bernama USDEK." [9]

Pembinaan Pancasila dalam rangka pembinaan jiwa revolusioner merupakan amanat dari TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pasal 4 TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tersebut menyatakan: Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan dalam TAP MPRS tersebut. Adapun putusan TAP MPRS No. I/MPRS/1960, salah satunya adalah memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia serta perinciannya sebagai GBHN. Dengan demikian, pembentukan LPDR merupakan tindak lanjut Presiden Soekarno dalam rangka memperkuat Manifesto Politik.

Lembaga Pembina Djiwa Revolusi kemudian dibubarkan oleh TAP MPRS No. 17/B/1967 tentang Pembubaran Lembaga/Panitia Pembina Djiwa Revolusi tertanggal 16 Februari 1967. Menindaklanjuti TAP ini, terbit Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1967 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. H. Roeslan Abdulgani sebagai Ketua Lembaga/Panitia Pembina Djiwa Revolusi. Penandatanganan Keppres tersebut adalah Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI.

Pembinaan Era Orde Baru

Setelah Lembaga Pembina Djiwa Revolusi dibubarkan oleh TAP MPRS No. 17/B/1967, Pemerintah Orde Baru tidak langsung mendirikan lembaga pembinaan ideologi Pancasila. Butuh waktu hingga 1979 untuk mendirikan lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh fokus Orde Baru pada pembangunan ekonomi di satu sisi, serta

upaya menghapuskan “jejak” Soekarno pada saat bersamaan, terutama peran, jasa dan pemikiran Bung Karno dalam soal Pancasila.

Upaya menghapus peran, jasa dan pemikiran Bung Karno dalam hal Pancasila dilakukan melalui beberapa langkah: pertama, penghentian peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Selama era Kepresidenan Soekarno, 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, sejak 1958 hingga 1968. Bahkan pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 1967 dan 1968, Soeharto memberikan amanat sebagai Pejabat Presiden dan sebagai Presiden. Namun sejak tahun 1970 secara resmi peringatan tersebut dihentikan berdasarkan Radiogram Sekretaris Negara (Mayjen TNI Alamsyah). [10][11] Penghentian peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni disebabkan oleh rekonstruksi sejarah kelahiran Pancasila versi Orde Baru yang mendaulat Muhammad Yamin sebagai pengusul sila-sila Pancasila lebih awal dari Bung Karno.

Dalam konstruksi sejarah tersebut, Muhammad Yamin yang berpidato pada 29 Mei 1945 dikonstruksikan telah mengusulkan lima sila yang mirip Pancasila, yakni; (1) Perikebangsaan, (2) Perikemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Perikerakyatan dan (5) Kesejahteraan Rakyat. Usulan ini mirip dengan usulan Bung Karno pada 1 Juni 1945 mengenai Pancasila, meliputi: (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme/Perikemanusiaan; (3) Mufakat/Demokrasi; (4) Kesejahteraan Sosial; dan (5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Konstruksi sejarah seperti ini dijadikan pedoman baku penulisan sejarah Pancasila baik dalam materi pendidikan maupun pedoman kenegaraan. [12] Belakangan diketahui bahwa konstruksi sejarah tersebut manipulatif, karena sumber pidato Muhammad Yamin tidak otentik. [13]

Kedua, pembentukan Panitia Lima oleh Presiden Soeharto pada 1975. Panitia Lima adalah panitia yang terdiri dari para pendiri bangsa. Tiga anggotanya merupakan mantan Panitia Sembilan perumus Pancasila (Piagam Jakarta), yakni Mohammad Hatta, Achmad

Soebardjo dan AA Maramis, serta AG Pringgodigdo (anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dan Sunario (mantan anggota Perhimpunan Indonesia).

Panitia Lima diminta Presiden Soeharto untuk menyusun tafsir Pancasila menurut para perumus Pancasila. Misi terselubung dari pembentukan panitia ini adalah permintaan dukungan untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak diusulkan pada 1 Juni 1945 oleh Bung Karno, tetapi pada 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin. Panitia Lima ternyata menolak hal tersebut, dan justru menegaskan bahwa Pancasila memang diusulkan Bung Karno pada 1 Juni, bukan oleh Muhammad Yamin. [4]

Karena kesulitan untuk menghapus peran, jasa dan pemikiran Pancasila Bung Karno, Orde Baru lalu menyusun tafsir Pancasila sendiri dalam bentuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Lembaga pembinaan Pancasila di era ini, yakni Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) didirikan sebagai pelaksana pembinaan P-4. P-4 sendiri ditetapkan oleh TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa.

Dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, terdapat Konsideran Menimbang yang memuat dua hal pokok: (1) untuk menjaga kelestarian dan kemampuan Pancasila, Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa serta dasar negara RI, perlu dihayati dan diamalkan secara nyata demi terwujudnya tujuan nasional dan cita-cita bangsa seperti tercantum dalam UUD 1945; (2) agar dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila itu tercapai kesatuan bahasa, pandangan dan kesatuan gerak langkah, diperlukan adanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dalam rangka pembinaan Pancasila model P-4 dibentuklah BP-7 berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang BP-7, tertanggal 26 Maret 1979. Pembentukan BP-7 merupakan

pelaksanaan amanat Pasal 5 TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 yang menunjuk Presiden sebagai pelaksana P-4. Sebelum membentuk BP-7, Presiden Soeharto membentuk Tim Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan P-4 (Tim P-7) diketuai oleh Dr. Roeslan Abduhani, mantan Ketua Lembaga Pembina Djiwa Revolusi era Presiden Soekarno.

Sebagai lembaga pemerintah non-departemental, BP-7 bertugas membantu Presiden untuk melakukan pembinaan P-4 dalam bentuk pelatihan yang disebut Penataran P-4. BP-7 tidak hanya dibentuk pada level Pusat, tetapi juga memiliki jaringan kelembagaan di daerah dalam bentuk BP-7 Daerah pada Daerah Tingkat I dan II. BP-7 juga berdiri di Daerah Tingkat I dan II (BP-7 Daerah) yang masing-masing merupakan badan staf pembantu Gubernur dan Bupati. Pembentukan BP-7 Daerah beserta perincian susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerjanya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Kepala BP-7.

Setelah Presiden Soeharto lengser, BP-7 dibubarkan melalui Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang BP-7. Keppres yang diterbitkan oleh Presiden BJ Habibie pada tanggal 31 Maret 1999 tersebut merupakan konsekuensi hukum dari TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4. Karena program pembinaan Pancasila dalam bentuk P-4 dihapus, maka lembaga pelaksana pembinaan tersebut secara otomatis dibubarkan.

Pembinaan Era Reformasi

Memasuki era Reformasi, upaya pembinaan ideologi Pancasila tidak langsung dihidupkan. Baru sejak tahun periode MPR RI tahun 2009-2014, MPR RI mulai menyosialisasikan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan lainnya, melalui program Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo lalu menyambut semangat MPR ini dengan menghidupkan

kembali program nasional pembinaan ideologi Pancasila melalui pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tentang UKP-PIP, tertanggal 19 Mei 2017.

Dalam Konsideran Menimbang Perpres tersebut dinyatakan:

- a. Bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara;
- b. Bahwa program pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis dan terpadu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam Ketentuan Umum dinyatakan bahwa UKP-PIP adalah Unit Kerja Presiden yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Unit kerja ini memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tahun 2018, status UKP-PIP dinaikkan menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam Konsideran Menimbang Perpres No. 7 Tahun 2018 dinyatakan:

- a. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa dan warga negara Indonesia;
- c. Bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya;

Bahwa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana UKP-PIP, BPIP merupakan lembaga Pemerintah setingkat kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dalam Bab III tentang Tugas dan Fungsi, Pasal 3 Perpres No. 7 Tahun 2018 dinyatakan bahwa BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.

Sebagai upaya menciptakan penyempurnaan pembinaan ideologi Pancasila, baik UKP-PIP maupun BPIP berangkat dari semangat pelurusan sejarah kelahiran Pancasila serta pembinaan Pancasila yang tidak bersifat *rejimental*. Hal ini dilakukan melalui

pelurusan sejarah kelahiran Pancasila berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Keppres tersebut terbit setahun sebelum terbitnya Perpres No. 54 Tahun 2017 tentang UKP-PIP.

Melalui Keppres No. 24 Tahun 2016, Pemerintah Presiden Joko Widodo meluruskan sejarah kelahiran Pancasila dengan menegaskan kesatuan proses kelahiran, perumusan dan kesepakatan final Pancasila. Kelahiran Pancasila terjadi pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno tentang Pancasila di depan Sidang BPUPK. Bukan pada 29 Mei 1945 melalui pidato Muhammad Yamin sebagaimana dikonstruksikan Orde Baru. Sementara itu fase perumusan Pancasila sebagai awal konsensus pendiri bangsa terjadi pada 22 Juni 1945 yang menghasilkan naskah Piagam Jakarta, serta fase kesepakatan final Pancasila pada 18 Agustus 1945 di Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pelurusan sejarah kelahiran Pancasila menjadi titik awal bagi pembinaan ideologi Pancasila yang tidak bersifat rejimental, melainkan berdasarkan fakta-fakta objektif pembentukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara oleh para pembentuknya serta berdasar nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Objektifikasi Pancasila inilah yang berusaha dihadirkan dalam pedoman materi dan metodologi pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP.

Menaikkan Dasar Hukum BPIP

Tantangan yang mengemuka pasca penghidupan pembinaan Pancasila melalui pendirian BPIP adalah kenaikan landasan hukum (*legal standing*) dari badan setingkat kementerian tersebut. Sebab hingga tahun 2021 ini, dasar hukum BPIP masih Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Dasar hukum Perpres ini sangat rapuh sebab jika Presiden berganti, maka BPIP bisa saja dibubarkan dengan mudah ketika Sang Presiden memiliki visi lain. Oleh karenanya, kenaikan dasar hukum tersebut mendesak dilakukan demi penguatan pembinaan

Pancasila yang tidak bergantung pada selera politik Sang Presiden, juga tidak hanya sebagai program lembaga Eksekutif tetapi juga kesepakatan dan keputusan bersama lembaga Legislatif dalam bentuk Undang-Undang.

Pada tahun 2020, DPR sempat melakukan penyusunan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Hanya saja karena bersifat kontroversial, RUU tersebut tidak dilanjutkan pembahasannya. Pemerintah Presiden Joko Widodo lalu mengajukan RUU BPIP sebagai pengganti atas RUU HIP. Pada Prolegnas 2021, RUU BPIP masuk dalam RUU prioritas yang akan dibahas oleh DPR RI.

Penyusunan UU BPIP memang urgen sebab negara wajib menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini dilatari tidak hanya oleh alasan yuridis tentang kuatnya dasar hukum undang-undang daripada peraturan presiden. Akan tetapi juga alasan sosiologis yang mengacu pada krisis ideologi nasional akibat dihapuskannya program pembinaan ideologi Pancasila sejak awal Reformasi. Krisis ideologi nasional ini lahir dalam bentuk memudarnya kecintaan warga negara terhadap Pancasila, akibat gempuran ideologi-ideologi transnasional yang bebas masuk ke dalam negeri dan mengembangkan propaganda anti-Pancasila, anti-NKRI dan anti kebhinekaan.

Indeks Ketahanan Nasional (2018) yang dikeluarkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menunjukkan ketahanan ideologi nasional masuk kategori kurang tangguh, yakni skor 2,44. Demikian pula Survei Nilai-nilai Kebangsaan (SKN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 menemukan 24 dari 100 orang warga kita tidak hafal sila-sila Pancasila. Survei Alvara Research Center (2017) juga menunjukkan bahwa 15,5% profesional, 16,8% mahasiswa, 18,6% pelajar dan 19,4% Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih setuju Khilafah daripada Negara Pancasila.

Tidak hanya berhadapan dengan ideologi transnasional, berhadapan dengan ide politik sektarian yang bersifat nasional pun, Pancasila kalah populer. Ide sektarian tersebut salah satunya ialah NKRI Bersyariah, yang diusung oleh Front Pembela Islam (FPI). Temuan Lingkaran Survei Indonesia pada Juli 2018 menunjukkan terjadi peningkatan dukungan terhadap NKRI Bersyariah sebanyak 9%, di saat dukungan terhadap Pancasila mengalami penurunan 10%. Tren naik-turun dukungan ini ditemukan oleh LSI dalam rentang waktu 13 tahun (2005-2018). Dalam rentang waktu ini, dukungan terhadap Pancasila mengalami penurunan dari 85,2% pada 2005 menjadi 75,3% pada 2018. Sedangkan dukungan terhadap ide NKRI Bersyariah naik dari 4,6% pada 2005 menjadi 13,2% pada 2018. Memang jika dilihat dalam keseluruhan populasi, pendukung Pancasila masih lebih besar, yakni 75% suara, sedangkan pendukung NKRI Bersyariah hanya 13%. Namun di dalam dukungan itu, terjadi kenaikan di kalangan kelompok anti-Pancasila, dan penurunan di kelompok Pancasila.

Baik ideologi Khilafah maupun NKRI Bersyariah mengembangkan penolakan serta tantangan terhadap Pancasila. Jika Khilafah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara Islam dalam kerangka Negara Khilafah Islamiyyah internasional. Maka, NKRI Bersyariah ingin mengganti Pancasila yang resmi menjadi Pancasila versi Piagam Jakarta, dengan imbuhan “tujuh kata syariah” di sila ketuhanan. Dengan demikian, meskipun tidak ingin mengganti Pancasila secara keseluruhan, NKRI Bersyariah tetap ingin mengubah sifat dasar Pancasila yang merupakan ideologi negara nasionalis pluralistik, dengan ideologi keislaman yang sektarian. Berhadapan dengan tantangan ideologi ini, di sebagian masyarakat kita, Pancasila kalah populer. Alasannya, karena dasar negara kita ini oleh kelompok anti Pancasila dinilai sebagai dasar negara sekuler yang bertentangan dengan agama Islam.

Tidak hanya gempuran ideologi trans-nasional bernuansa keagamaan, Pancasila juga mendapatkan tantangan dari ideologi lain

yang bersifat sekular, yakni komunisme dan neoliberalisme. Di negeri ini, komunisme beserta partai yang mengusungnya, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) telah ditetapkan sebagai ideologi dan partai terlarang berdasarkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1996 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme serta Pembubaran PKI. Akan tetapi ideologi latennya tetap harus diwaspadai. Pada saat bersamaan, generasi muda kita digempur oleh ideologi neoliberalisme dalam bentuk gaya hidup bebas yang melahirkan sex bebas, narkoba hingga pernikahan sejenis yang dibanyak negara lain diawali dengan gaya hidup dan kampanye lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Neo-liberalisme juga menysasar pada liberalisasi ekonomi dalam bentuk pasar bebas yang menimbulkan ketimpangan sosial.

Berdasarkan ancaman ideologi trans-nasional dan krisis ideologi nasional ini, maka penguatan BPIP melalui penaikan dasar hukum, dari Perpres menjadi UU merupakan langkah urgen baik dalam rangka menjaga Pancasila, maupun demi menjaga masyarakat serta generasi muda bangsa. Jatuh banggunya lembaga pembinaan Pancasila, sejak Lembaga Pembina Djiwa Revolusi (LPRD) hingga Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) semestinya menjadi pelajaran berharga. Ke depan, upaya pembinaan Pancasila oleh negara harus didukung dengan payung hukum yang kuat, sehingga tidak mudah dibubarkan akibat pergantian suatu rejim pemerintahan.

Kesimpulan

Kewajiban negara dalam menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila harus didukung, baik oleh masyarakat maupun oleh aturan hukum yang kuat. Hal ini disebabkan posisi Pancasila yang merupakan dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Kewajiban ini sempat dilupakan oleh negara dan bangsa ini, akibat trauma dengan praktik indoktrinasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Di awal-awal Reformasi, Pancasila diidentikkan dengan rezim sehingga ia tabu untuk diperbincangkan, apalagi dikuatkan.

Berbagai eksperimen kebijakan pembinaan Pancasila, baik yang dilakukan oleh MPR RI maupun Pemerintah Presiden Joko Widodo membuah kesadaran di masyarakat, bahwa Pancasila harus selalu dijaga, dipahami dan dijamin. Pancasila bukan ideologi kekuasaan dari rezim tertentu, melainkan dasar negara yang bahkan bersifat perenial atau abadi. Keberhasilan Bung Karno dalam menggali Pancasila dari bumi kebudayaan bangsa menunjukkan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup dari bangsa Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia berdiri. Dengan demikian, menguatkan Pancasila tidak hanya menguatkan dasar negara, melainkan pula menguatkan pandangan hidup dan cara hidup dari bangsa Indonesia. Posisi Pancasila, tidak hanya sebagai norma dasar (*grundnorm*) tetapi juga falsafah dasar negara (*philosophische grondslag*) merupakan alasan filosofis mengapa UU BPIP urgen dibentuk demi kelestarian falsafah dasar negara tersebut.

Tantangan pembinaan ideologi Pancasila kini berada pada ranah yuridis, yakni pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya merupakan diskresi Presiden, tetapi juga keputusan Parlemen. Kesatuan langkah antara eksekutif dan legislatif dalam pembinaan Pancasila ini akan membentuk kekuatan negara yang permanen. Hal ini sangat dibutuhkan di tengah tantangan dan ancaman bagi bangsa Indonesia di masa depan yang akan semakin kompleks.

Referensi

- [1] MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019.
- [2] Panitia Lima, *Uraian Pancasila, Dilengkapi dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Jakarta: Mutiara, 1980.
- [3] A. Basarah, *Bung Karno, Islam dan Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Press, 2017.
- [4] M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta: SLSN, 1959.
- [5] Y. Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- [6] Soekarno, *Pancasila Sukarno*. Jakarta: Badiklat Pusat PDI Perjuangan, 2019.
- [7] Y. Latif, *Revolusi Pancasila, Kembali ke Rel Perjuangan Bangsa*. Bandung: Mizan, 2015.
- [8] I. P. P. D. Revolusi, *Penetapan 7 [i.e. tujuh] bahan-bahan pokok indoktrinasi*. Dua-R, 1961.
- [9] M. Rasjad and S. Soedarman, *Doktrin revolusi Indonesia: bahan indoktrinasi manipol*. Narsih, 1962.
- [10] Departemen Penerangan, *Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1967*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1967.
- [11] D. Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1970.
- [12] N. Notosusanto, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979.
- [13] AB Kusuma RM, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd ¹

Pengantar

Menengok perjalanan panjang bangsa ini ke belakang, Pancasila telah terbukti dan teruji menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia yang ditakdirkan sangat majemuk. Tidak ada bangsa lain yang memiliki keberagaman seperti Indonesia dengan lebih dari 1.400 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa lokal. Beruntung para pendiri bangsa (*founding fathers*) berhasil menggali nilai-nilai luhur yang ada di setiap suku bangsa dan meramunya menjadi satu kesatuan sebagai modal utama untuk membangun rumah bersama, bernama Indonesia. Keragaman yang diramu ini bukan hanya dari sisi budaya, tetapi juga dari keyakinan, paham politik serta beragam keunikan lainnya. Keragaman tersebut menjadi modal besar bangsa dalam membangun rumah besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Para pendiri bangsa juga telah memberi keteladanan yang luar biasa untuk meredam etnosentrisme (merasa kelompoknya paling hebat) sehingga mencapai kesepakatan agung yang menghasilkan Pancasila. Tak cuma itu, para pendiri bangsa juga berhasil menumbuhkan kesadaran bersama untuk menghargai perbedaan dalam rangka menjaga dan merawat persatuan Indonesia. Menghargai perbedaan artinya menerima keunikan setiap kelompok untuk merawat ruang hidup bersama demi kesejahteraan bersama. Kesepakatan agung berupa butir-butir Pancasila yang semula dirumuskan Ir Soekarno pada 1 Juni 1945 ini dalam kenyataannya berjalan dinamis. Berdasarkan Keppres No 24/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila disebutkan, rumusan Pancasila sejak 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga rumusan final 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila

¹ Universitas Negeri Jakarta

sebagai Dasar Negara. Artinya, Pancasila sebagai norma ketatanegaraan, bukan merupakan karya perseorangan tetapi karya bersama dan kesepakatan bersama para pendiri bangsa.

Kesepakatan agung ini, dalam perjalanannya tidak berjalan mulus. Ada saja upaya untuk membelokkan dan mengganti Dasar Negara. Pada 5 Juli 1959, misalnya, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 setelah melihat terjadinya penyelewengan yang luar biasa dalam mencapai cita-cita bernegara. Begitupun tahun 1965 terjadi pengkhianatan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia yang berhasil ditumpas ini, mendorong Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat pada 17 September 1966 untuk mengeluarkan keputusan yang menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Baik 1 Juni 1945, 5 Juli 1959 maupun 1 Oktober 1965 merupakan momentum bersejarah yang menguji ketangguhan Pancasila sebagai Dasar Negara yang nilai-nilainya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila bukan cuma tangguh dari sisi ideologi, tetapi juga tangguh dari sisi kemampuannya dalam merajut persatuan bangsa yang hampir saja robek dan mengoyak-ngoyak keutuhan bangsa serta digantikan ideologi lain.

Perwujudan Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD-1945) adalah Negara kebangsaan, Negara demokratis, Negara kesejahteraan, Negara yang menjunjung tinggi HAM, serta Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat proklamasi kemerdekaan, wujud Negara Pancasila tersebut barulah merupakan cita-cita, karena itu setiap penyelenggara pemerintahan/negara perlu berusaha mengemban misi mewujudkan bangsa yang cerdas. Maknanya adalah melakukan transformasi budaya tradisional menuju budaya modern, budaya feodal menuju budaya demokratis, serta budaya birokratis menuju budaya yang profesional. Makna kecerdasan itu adalah masyarakat dan bangsa dengan kehidupan yang semakin

maju dan modern. Sejumlah Negara yang kini menjadi Negara maju, terutama yang memiliki filosofi kenegaraan yang tertuang dalam konstitusinya dan yang mantap kehidupan politiknya adalah Negara yang sejak kemerdekaannya telah menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan Negara.

Pada masa Orde Baru, upaya merawat, menjaga dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila antara lain dilakukan melalui mata pelajaran wajib Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di semua jenjang pendidikan, serta Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) bagi semua calon mahasiswa baru dan calon pegawai negeri sipil (PNS). Terlepas dari sisi positif dan negatifnya, ada upaya untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila saat itu.

Kini di era Reformasi, kita tidak menghendaki pelajaran PMP dan P4 dihidupkan kembali. Namun kenyataan yang harus kita renungkan bersama, internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada seluruh anak bangsa seolah terputus sejak Reformasi 1998. Semua pihak seakan pikiran dan tenaganya tercurah pada persoalan-persoalan politik. Terjadi lompatan yang sangat signifikan di bidang politik mulai dari amandemen Undang-undang Dasar 1945 pada 2002, sistem pemilihan langsung presiden mulai 2004, serta pemilihan langsung kepala daerah dan anggota legislatif. Pemekaran wilayah juga berlangsung signifikan sejak terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni dari 319 daerah otonom pada tahun 1999 menjadi 548 daerah otonom saat ini yang terdiri atas 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi.

Jika di bidang politik terjadi kemajuan yang luar biasa, tidak demikian halnya di sektor pendidikan terutama yang menyangkut penanaman nilai-nilai kebangsaan. Penanaman nilai-nilai Pancasila, misalnya, seolah terputus, atau setidaknya kurang mendapat perhatian serius. Keterputusan ini menyebabkan Pancasila menjadi terasa asing di kalangan generasi kekinian. Generasi pasca reformasi

seperti tidak tersambung dengan masa lalu. Pada era Reformasi, penanaman nilai-nilai kebangsaan, sikap toleran dan menghargai keberagaman terasa kurang. Fenomena ini tentu saja sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena bisa menyebabkan memudarnya semangat nasionalisme. Semangat cinta pada Tanah Air.

Dalam jangka panjang, fenomena ini sangat membahayakan karena memudarnya semangat cinta Tanah Air bisa mengancam keutuhan NKRI. Sedangkan dalam jangka pendek, degenerasi atau kurangnya penanaman nilai-nilai luhur Pancasila serta semangat kebangsaan, bisa menjadi celah menyusupnya ideologi lain ke kalangan generasi milenial, termasuk paham-paham radikal yang memang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Terjadinya beberapa kasus terorisme yang juga melibatkan generasi milenial, cukup menjadi bukti bahwa kita harus semakin waspada terhadap penyusupan ideologi lain di luar Pancasila. Bangsa ini harus berpikir ulang mengenai pentingnya Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai sarana penting dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila agar generasi muda tetap teguh memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Visi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Berdasarkan visi tersebut, Presiden Jokowi memberikan arah pembangunan nasional yang menekankan pada pembangunan sumber daya manusia. Dalam pembangunan sumber daya manusia tersebut menggunakan Strategi Pembangunan Karakter dan Sub Strateginya melalui Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Dalam pembangunan Nasional prioritas utama diletakkan pada Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang modern dan berkarakter.

Revolusi mental merupakan gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Pendidikan merupakan wahana penting yang digunakan untuk menerjemahkan visi dan arahan Presiden dengan menggunakan strategi pembangunan karakter.

Pancasila Dalam Pendidikan di Indonesia 1946-1965

Sejak tahun 1946 Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sudah membuat Pedoman bagi Guru yang memuat sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila. Pedoman ini digunakan agar guru-guru di Indonesia mampu menghasilkan manusia yang memiliki jiwa patriotisme pasca-Indonesia merdeka. Undang-Undang (UU) 4/1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, merupakan UU pendidikan pertama yang memuat Pancasila, UUD 1945, dan asas kebudayaan Indonesia sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah. UU 22/1961 tentang Perguruan Tinggi bertujuan Membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat sosialis. Di sini bisa dilihat sebuah konstelasi bahwa Pancasila mulai disusupi oleh kepentingan kaum komunis (konteks politik pada masa itu, PKI berhasil meraih suara terbanyak keempat di parlemen, setelah PNI, Masyumi, dan NU pada pemilu 1955).

Periode 1959-1965, muncul Keppres 145/1965 yang bertujuan agar pendidikan melahirkan warga negara sosialis dan berjiwa Pancasila. Ini sejalan dengan situasi politik pada masa itu yang cenderung dekat dengan kelompok Komunis. Sejak tahun 1950, dalam kurikulum muncul mata pelajaran Sejarah Indonesia, Sejarah Dunia, dan Sejarah Kebudayaan sebagai muatan wajib untuk menanamkan patriotisme. Tahun 1959-1961 muncul mata pelajaran Civic yang muatan materi pembelajarannya merujuk pada MANIPOL-USDEK.

Pelajaran penting dari beberapa periode tersebut, bahwa Pancasila harus tetap terjaga kemurniannya dari berbagai macam ancaman ideologi yang datang baik dari dalam maupun luar.

Pancasila Dalam Pendidikan Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru menerbitkan TAP MPRS XXVII/1966 yang bertujuan Membentuk Manusia Pancasila Sejati, serta mencabut Keppres 145/1965. Pendidikan nasional diarahkan membentuk masyarakat Pancasila dengan cara mengendalikan memori kolektif bangsa akan semangat perjuangan masa lalu dan penguatan ideologi Pancasila. Pengejawantahannya dalam Kurikulum 1975 adalah menyusun buku Sejarah Nasional Indonesia di bawah pimpinan Mendikbud sekaligus Sejarawan Prof. Nugroho Notosusanto, menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran dalam bentuk Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kemudian pada Kurikulum 1984 ada mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Tahun 1989 Pemerintah Orde Baru berhasil Menyusun UU 2/1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelajaran penting bahwa Pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat indoktrinasi melalui tafsir tunggal dan intervensi kurikulum, semua ini pada akhirnya gagal karena cenderung digunakan sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan Presiden.

Pancasila Dalam Pendidikan Era Reformasi

Di masa pemerintahan Presiden Megawati terjadi revisi dari UU 2/1989 ke UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang kembali menegaskan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan, dan tanggap perubahan zaman. Frase Pancasila tidak termuat sebagai muatan wajib di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di UU 20/2003, melainkan kewarganegaraan, dalam kurikulum menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Presiden SBY tahun 2010 mencanangkan

Gerakan Pembangunan Karakter Bangsa yang diejawantahkan dalam 18 nilai pendidikan karakter.

Presiden Jokowi tahun 2017 menerbitkan Perpres 87/2017 tentang Penguatan Karakter Bangsa yang bertujuan membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter untuk menghadapi masa depan. Mendikbud Nadiem Makarim tahun 2020 menjadikan Profil Pelajar Pancasila sebagai muara dari Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Pancasila diintegrasikan dalam Muatan wajib Kewarganegaraan yang pengejawantahannya di Pendidikan Dasar dan Menengah melalui mata pelajaran PPKn sebagaimana amanat UU 20/2003 Pasal 37 Ayat 1. Sedangkan di Perguruan Tinggi Muatan Pancasila dijadikan muatan wajib diejawantahkan dalam mata kuliah Pancasila, sebagaimana amanat UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi.

Polemik revisi PP 57/2021 menyisakan celah hukum bahwa frase Pancasila tidak termuat sebagai muatan wajib di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di UU 20/2003, melainkan kewarganegaraan. Karena itu memasukan Pancasila sebagai muatan wajib direvisi PP 57/2021 akan bertentangan dengan UU 20/2003. Jika ingin menjadikan Pancasila sebagai muatan wajib yang diejawantahkan melalui mata pelajaran Pancasila yang bersifat *lex specialis*, maka harus ada revisi terhadap UU 20/2003. Perlu ada komunikasi dan kolaborasi antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pihak yang berwenang menangani konten ideologi Pancasila dengan Puskurbuk sebagai pihak yang berwenang mendesain Kurikulum, jangan sampai tumpang tindih.

Pada era Reformasi ini pula, penanaman nilai-nilai kebangsaan, sikap toleran dan menghargai keberagaman terasa kurang. Fenomena ini tentu saja berdampak sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena bisa menyebabkan memudarnya semangat nasionalisme, cinta pada Tanah Air, dan identitas kebangsaan. Akibatnya, paham radikal dari ideologi di luar

Pancasila masuk dalam alam pikiran anak-anak muda bangsa rawan dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu.

Menangkal paham radikal sekaligus merawat, menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai kesepakatan agung bersama tidak mudah karena menghadapi berbagai tantangan. Pertama, belum ada kebijakan dan strategi nasional, apalagi dalam tataran operasional menyangkut sosialisasi nilai-nilai luhur Pancasila seperti misalnya Pendidikan Moral Pancasila dan Penataran P4 dulu. Kedua, seiring dengan berkembangnya penggunaan media sosial, berbagai informasi bertebaran di media sosial termasuk informasi menyesatkan dan paham radikal anti Pancasila. Di sisi lain, kemampuan generasi milenial, termasuk kalangan pelajar belum optimal dalam memilah dan memilih informasi yang mereka terima. Paham anti-Pancasila dianggap sebagai kebenaran karena lemahnya literasi dan sosialisasi nilai-nilai luhur Pancasila selama ini.

Ketiga, sanksi dan penegakan hukum bagi penyebar paham radikal masih lemah, bahkan jauh untuk dikatakan optimal. Padahal, bahaya penyebaran paham radikal ini tidak bisa dianggap remeh karena melunturkan semangat nasionalisme dan mengancam keutuhan NKRI. Keempat, terjadi salah persepsi yang meluas, karena seolah-olah Pancasila diartikan sekedar hafalan sila-sila Pancasila atau secara verbal berupa lambang burung Garuda yang memegang semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dan terpampang di depan kelas. Kelima, secara sosiologis, terjadi perubahan kultur masyarakat dari tradisional-agraris menuju masyarakat modern, sehingga sikap individualis semakin menguat termasuk di kalangan milenial. Seiring dengan sikap individualis, berkembang pula sikap kosmopolitan yaitu kecenderungan melonggarnya ikatan kebangsaan meskipun berada dalam satu wilayah negara yang sama. Muncul kecenderungan untuk lebih mematuhi aturan-aturan yang bersifat global atau lintas negara, walaupun di media sosial (misalnya, kecenderungan untuk mematuhi

aturan di *Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok*, dan sebagainya karena sanksinya tegas dan keras) dibandingkan mematuhi aturan negara.

Melihat kondisi kebangsaan seperti ini, diusulkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, dalam Peraturan Presiden No 7 Tahun 2018 dinyatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan unit kerja Presiden yang bertugas membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Karena itu kami mengusulkan BPIP juga merumuskan arah kebijakan, strategi dan tataran operasional pembinaan ideologi Pancasila di kalangan tenaga pendidik dan peserta didik di semua jenjang pendidikan. Kebijakan ini pun harus secara efektif meyakinkan semua pihak bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang paling ideal untuk melangkah sekaligus meraih cita-cita kehidupan berbangsa. Kedua, sekolah merupakan lahan subur untuk penanaman nilai-nilai Pancasila. Karena itu alangkah baiknya jika Pendidikan Pancasila menjadi pelajaran wajib di sekolah di semua jenjang pendidikan. Karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak secara tegas mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib perlu ditinjau ulang. Memasukkan Pendidikan Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), membuat keunggulan Pancasila “terdegradasi” dan siswa tidak utuh mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur Pancasila.

Usulan ketiga, guru/pendidik mempunyai peran strategis dalam mencetak manusia-manusia Pancasila. Meski demikian, sosialisasi dan penanaman nilai-nilai Pancasila bukan cuma tanggung jawab guru. Semua pihak harus berperan dalam merawat, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik setidaknya dengan memberi keteladanan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila bukanlah hafalan, tetapi nilai hidup yang harus dilakukan secara konsisten, penuh integritas dan disertai keteladanan. Perlu adanya rumusan Profil Pendidik Pancasila yang secara utuh

memuat indikator-indikator yang harus dimiliki Pendidik yang Pancasilais.

Usulan keempat, generasi milenial yang sedang dalam tahap pencarian identitas, sangat familiar dengan penggunaan media sosial. Karena itu penanaman nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, cinta Tanah Air, gotong royong dan sikap toleran juga alangkah baiknya jika dilakukan secara terencana dan terarah menggunakan media sosial. Usulan kelima, Bank Dunia mengingatkan, potensi konflik di Indonesia paling besar bersumber dari kesenjangan. Di bidang pendidikan, kesenjangan akses, mutu serta fasilitas pendidikan masih terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan, daerah Jawa dan luar Jawa, serta antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Agar potensi konflik ini tidak terjadi, maka alangkah bijaknya jika persoalan kesenjangan di bidang pendidikan ini segera dibenahi. Usulan keenam, perlu sanksi tegas dan keras bagi penyebar paham radikal dan anti-Pancasila, apalagi jika dilakukan di lingkungan sekolah karena sekolah merupakan lahan subur untuk mencetak putra-putri pemimpin bangsa di masa depan.

Usaha membangun mental karakter insan Pancasila memerlukan berbagai upaya pembudayaan yang terus menerus, berkelanjutan, dan terintegrasi. Salah satu upaya yang terpenting adalah melalui pendidikan karakter. Dalam pandangan Durkheim (Yudi Latif, 2020), fungsi lembaga pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan wahana untuk menumbuhkan warga negara yang baik (*good citizen*). Dalam pembudayaan Pancasila, dunia pendidikan berperan penting dalam memperbaiki pendidikan karakter yang selama ini cenderung diabaikan oleh perhatian berlebihan terhadap pragmatisme. Pendidikan harus dikembalikan kepada hakikatnya sebagaimana disampaikan Ki Hadjar Dewantara, yakni suatu proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hayat.

Tantangan pendidikan karakter kolektif berbasis Pancasila adalah bagaimana mendorong peserta didik sebagai generasi muda harapan bangsa untuk dapat mengembangkan tata kelakuan hidup berdasarkan nilai dan konsepsi Pancasila. Pancasila tidak berhenti sekadar sebagai hafalan, melainkan terinternalisasi nilai-nilainya dan menjelma menjadi karakter yang mendarah daging dalam perilaku individu dalam ruang publik. Dalam mengajarkan Pancasila, seorang pendidik bukan hanya transfer konsep, namun harus membudayakan karakter dengan praktik keteladanan. Peserta didik mempelajari Pancasila dengan mempraktikkan tingkah lakunya langsung dalam kehidupan publik.

Pembelajaran Pancasila dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok terbatas yang terdiri atas ragam identitas lalu mendorong mereka untuk mengembangkannya melalui berbagai proyek kegiatan dalam rangka pengamalan nilai dari sila-sila Pancasila. Pendidikan karakter dapat diintroduksi ke dalam kelas melalui medium kesusasteraan, pelajaran sejarah, dan epik kepahlawanan. Peserta didik dapat mengamati, dan meniru sifat-sifat karakter yang menjelma dalam diri pahlawan itu. Intinya, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, peserta didik dapat menemukan teladan yang baik dalam semua aspek kehidupan, salah satunya kehidupan di sekolah.

Pentingnya pertautan antara pengetahuan moral dengan perilaku aktual dalam situasi konkret. Pengetahuan dan pemahaman moral merupakan prasyarat untuk melakukan tindakan moral. Keputusan moral untuk melakukan tindakan aktual ditentukan dalam konteks situasi konkret. Karena itu, penanaman nilai dalam sila-sila Pancasila perlu dilakukan melalui pendidikan dengan membudayakan karakter melalui praktik keteladanan dalam kehidupan. Kesadaran akan pentingnya karakter dan penyempurnaan pendidikan karakter dalam pendidikan Pancasila harus dihidupkan kembali.

Para pendidik dapat menjernihkan Pancasila melalui literasi atas berbagai sumber primer dan kredibel, di antaranya: Menjadikan

Pidato 1 Juni 1945 oleh Bung Karno sebagai bacaan wajib anak sekolah; Menjadikan buku Uraian Pancasila yang disusun oleh Mohammad Hatta, Maramis, Ahmad Subarjo, Prof. Sunario, dan A.G. Pringgodigdo sebagai bacaan wajib; Menjadikan buku risalah Sidang BPUPK-PPKI sebagai bacaan wajib; Serta Buku-buku kajian Pancasila yang teruji baik secara akademis maupun aktualitas secara kontekstual dalam kehidupan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan dengan memperkuat mata pelajaran yang bersifat ideologis dengan menjadikannya sebagai muatan wajib pada struktur kurikulum dengan jumlah jam proporsional, antara lain Sejarah, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Agama.

Kesimpulan

Bangsa Indonesia memiliki fase perjalanan yang panjang. Menengok perjalanan bangsa ini ke belakang, Pancasila telah terbukti dan teruji menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia yang ditakdirkan sangat majemuk. Memudarnya nasionalisme dan cinta tanah air, kurangnya sikap toleran, dan merebaknya paham radikal di generasi muda sangat meresahkan. Fenomena ini tentu saja sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara Diperlukan cara terbaik dan terus menerus dalam menjaga, merawat, dan mengembangkan Pancasila di kalangan generasi milenial demi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Butuh kerja keras dan upaya yang tidak mengenal lelah untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda melalui sistem pendidikan. Upaya ini dilakukan agar penanaman nilai-nilai Pancasila tidak terputus antargenerasi. Pendidikan berperan penting untuk mencegah semakin terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan menangkal masuknya ideologi selain Pancasila.

Dunia pendidikan berperan penting dalam pembudayaan Pancasila melalui perbaikan pendidikan karakter yang selama ini cenderung diabaikan karena perhatian berlebihan terhadap pragmatisme. Pendidikan harus dikembalikan kepada hakikatnya

sebagaimana disampaikan Ki Hadjar Dewantara, yakni suatu proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hayat.

Tantangan pendidikan karakter kolektif berbasis Pancasila adalah bagaimana mendorong peserta didik sebagai generasi muda harapan bangsa untuk dapat mengembangkan tata kelakuan hidup berdasarkan nilai dan konsepsi Pancasila. Dibutuhkan strategi jitu agar Pancasila dapat terinternalisasi nilai-nilainya dan menjelma menjadi karakter yang mendarah daging dalam perilaku individu dalam ruang publik.

Peserta didik sebagai generasi muda bangsa perlu dikembangkan tata kelakuan hidup berdasarkan nilai dan konsepsi Pancasila. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan bukan sekadar sebagai hafalan, melainkan harus terinternalisasi nilai-nilainya dan mendarah daging pada peserta didik sehingga berperilaku sebagai individu yang Pancasila-lis dalam ruang publik. Para pendidik dalam mengajarkan Pancasila, tidak mentransfer konsep saja, namun harus menumbuhkembangkan karakter dengan praktik keteladanan. Peserta didik mempelajari Pancasila dengan mempraktikkan tingkah lakunya langsung dalam kehidupan di ruang-ruang publik.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sangat ditentukan oleh titik keseimbangan yang optimal antara dua pilihan kepentingan yang tarik-menarik, yaitu: berorientasi pada fungsi pembudayaan dalam rangka memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar dapat memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penguatan keunggulan dan daya saing bangsa dalam persaingan global.

Indonesia tidak perlu memilih salah satu dari keduanya, tetapi mencari titik keseimbangan yang dinamis dengan maksud untuk memperoleh keunggulan dalam persaingan global tetapi tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang berdaulat dan mampu mewujudkan empat

misi penyelenggaraan pemerintahan Negara RI (termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945)

Referensi

- [1] Abdulgani, Roeslan. *Pancasila: Perjalanan Sebuah Ideologi*, Jakarta: Grasindo. 1998.
- [2] Bagir, Haidar. *Kontroversi khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila*, Bandung: Mizan. 2014.
- [3] Basarah, Ahmad. *Bung Karno Islam dan Pancasila*, Jakarta: Konstitusi Press. 2017
- [4] Karim, Mulayawan (ed). *Rindu Pancasila Merajut Nusantara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010.
- [5] Kartohadiprojo, Soediman. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Jakarta: Gatra Pustaka. 2010.
- [6] Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung : Mizan. 2014.
- [7] Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- [8] Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Bandung: Mizan. 2017.
- [9] Sumardiansyah Perdana Kusuma, *Narasi Pancasila dan Tujuan Pendidikan Nasional dalam Sejarah Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Pattingalloang, Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Kesejarahan, Vol 8 No.1, April 2021, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar,
- [10] Sumardiansyah Perdana Kusuma, *Kesejarahan Pancasila*, Majalah Pancasila Silapedia, Pancasila sebagai Ilmu, Edisi April-Mei 2021, h. 84-87
- [11] Sunario, Imam & Sutowo, Pontjo. *Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2017.
- [12] Suryohadiprojo, Sayidiman. *Mengobarkan Kembali Api Pancasila*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2014.
- [13] Sularto, St (ed). *Nilai Keindonesiaan: Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2017.

Transformasi Perguruan Tinggi di Era Disrupsi: Mempersiapkan Masa Depan Yang Datang Lebih Cepat Dari Perkiraan Manusia

Richardus Eko Indrajit ¹

Pengantar

Jauh sebelum pandemi Covid-19 mengemuka, telah terjadi disrupsi di berbagai sektor kehidupan manusia. Globalisasi yang secepat terlihat tak terkendali telah membawa situasi dunia ke alam yang serba VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous*) - tatanan kehidupan yang serba tidak teratur dan sulit diprediksi kecenderungan trennya. Kemajuan teknologi dan informasi yang sedemikian pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan tinggi. Situasi ini menawarkan tantangan baru bagi para pengelola kampus di seluruh dunia, berubah untuk beradaptasi atau tetap bertahan melawan laju disrupsi.

Fenomena Pendidikan Terbuka

Semenjak Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengeluarkan inisiatif OpenCourse-warenya, ekosistem dunia pendidikan tinggi berubah secara fundamental. Keberanian MIT untuk membuka ke publik seluruh bahan dan video perkuliahan yang diselenggarakan membuat orang bertanya-tanya mengenai ke arah mana perilaku disruptif ini menuju. Terlepas dari apapun alasan dan jawabannya, masyarakat global menyambut gembira inisiatif dari kampus terkemuka yang selalu bercokol di sepuluh besar perguruan tinggi terbaik dunia tersebut. Semenjak itulah gerakan open education mulai mengepakkan sayapnya dengan berbagai variasi dan bentuk implementasinya. Lihatlah fenomena yang terjadi saat ini dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan para praktisi pendidikan tinggi, seperti:

¹ PGRI *Smart Learning and Character Center*

1. Massive Open Online Course (MOOC): kumpulan mata kuliah dari institusi pendidikan tinggi terkemuka dunia yang ditawarkan secara terbuka dan telah diikuti secara masif oleh puluhan juta manusia di bumi (diselenggarakan oleh organisasi aggregator seperti EdX, Coursera, Futurelearn, Udacity, dan lain-lain).
2. University of People (UoPeople): sebuah perguruan tinggi virtual dengan program berkualitas yang ditawarkan di seluruh dunia dimana siapa saja dapat mengikuti program sarjana maupun pasca sarjana tanpa dipungut biaya.
3. Program sarjana dan pascasarjana dari kampus terkemuka (50 besar peringkat dunia) yang ditawarkan secara fully online dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dunia tanpa mengenal batasan negara.
4. Situs-situs repositori pengetahuan berbasis video atau multimedia yang dapat ditemukan secara bebas di YouTube, konten berkualitas dari National Geographic, pelatihan kelas dunia dari Alibaba Cloud, dan lain sebagainya.

Perguruan tinggi yang menolak untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman akan diasingkan oleh masyarakat karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan manusia.

Peran Teknologi dalam Dunia Pendidikan Tinggi

Disrupsi yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini mengakselerasi evolusi peran teknologi dalam dunia pendidikan tinggi, mulai dari dahulu hingga sekarang. Berikut adalah perjalanan peran yang dimaksud:

1. Teknologi sebagai *Supporter*

Pada mulanya teknologi dalam dunia pendidikan dianggap sebagai pendukung semata. Pertama, teknologi berfungsi untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam mendukung aktivitas belajar mengajar (mengerjakan tugas,

mengetik tugas akhir, menyusun laporan, mempresentasikan konten, dan lain-lain). Kedua, teknologi dipakai untuk mendukung proses penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Ketiga, teknologi dimanfaatkan oleh kampus untuk membantu menyelenggarakan kegiatan operasional dan administratif secara efektif, efisien, serta terkendali dengan baik.

2. Teknologi sebagai Driver.

Peran berikutnya teknologi dalam evolusi adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran, dengan tujuan utama meningkatkan kinerja atau *outcome* yang dihasilkan. Model pembelajaran yang awalnya monoton, satu arah, dan cenderung membosankan, diperkaya dengan berbagai metoda yang menyenangkan - karena melibatkan multimedia, animasi, dan simulasi. Disamping itu diperkenalkan pula berbagai aplikasi untuk melengkapi model pembelajaran tatap muka, sehingga model *blended learning* mulai diadopsi secara luas.

3. Teknologi sebagai Driver

Peran berikutnya teknologi dalam evolusi adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran, dengan tujuan utama meningkatkan kinerja atau *outcome* yang dihasilkan. Model pembelajaran yang awalnya monoton, satu arah, dan cenderung membosankan, diperkaya dengan berbagai metoda yang menyenangkan, karena melibatkan multimedia, animasi, dan simulasi. Disamping itu diperkenalkan pula berbagai aplikasi untuk melengkapi model pembelajaran tatap muka, sehingga model *blended learning* mulai diadopsi secara luas.

4. Teknologi sebagai Enabler

Perkembangan aplikasi teknologi dalam dunia pendidikan pun semakin tumbuh berkembang sejalan dengan

kemajuan ilmu komputer dan telekomunikasi. Kehadiran produk-produk canggih seperti *smart board* menggantikan papan tulis, *smart table* menggantikan meja belajar, atau *smart classroom* menggantikan kelas konvensional mampu merobohkan batas-batas fisik ruang kelas. Pendidik dan peserta didik secara simultan dan leluasa sanggup mengakses berbagai sumber belajar serta menayangkannya secara menarik di dalam kelas. Situasi belajar mengajar pun menjadi lebih menyenangkan.

5. Teknologi sebagai Transformer

Evolusi selanjutnya menempatkan teknologi sebagai pemicu terjadinya transformasi. Pada saat ini perguruan tinggi yang merasa mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi informasi berusaha melakukan digitalisasi di seluruh aktivitas kampus. Proses digitalisasi se- cara *end-to-end* ini memindahkan kampus ke alam siber. Konsep *e-learning*, *mobile learning*, maupun *ubiquitous learning* menyadarkan manajemen kampus mengenai tidak perlunya perguruan tinggi berinvestasi pada aset fisik yang besar.

6. Teknologi sebagai Disruptor

Akhirnya evolusi pun memasuki tahapan dimana diperlukan perubahan pola pikir yang cenderung fundamental dan radikal. Terbukanya berbagai perguruan tinggi terkemuka dunia untuk diakses masyarakat umum, terbentuknya kampus-kampus virtual berkualitas tinggi, bergesernya pandangan masyarakat mengenai kesakralan gelar akademik, suksesnya orang-orang besar dengan latar belakang pendidikan unik, dan suksesnya kampus-kampus baru menggeser kemapanan perguruan tinggi yang mendahuluinya - membuat penyelenggara dan manajemen pendidikan tinggi harus memikirkan kembali bagaimana seharusnya mengoperasikan kampus di era disruptif ini.

Transformasi Perguruan Tinggi

Evolusi peran teknologi informasi dan komunikasi dalam ekosistem kampus tersebut telah membawa perguruan tinggi menuju perubahan dari waktu ke waktu. Pertama dimulai dari pemahaman masyarakat akan universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi, atau akademi sebagai tempat menimba ilmu. Para orang tua berusaha keras agar putra putrinya dapat menimba ilmu di perguruan tinggi yang menjadi impian mereka. Perjalanan merantau jauh dari tempat kelahiran adalah cara untuk dapat menjadi sarjana. Pada situasi ini perguruan tinggi dipandang sebagai entitas "fisik" tempat berkumpulnya cerdas pandai dan laboratorium canggih dimana transfer ilmu dan eksperimen saintifik berlangsung. Mereka yang ingin menjadi ilmuwan harus hadir di kampus dan berinteraksi dengan para dosen, serta belajar dari satu kelas ke kelas yang lain, satu laboratorium ke laboratorium yang lain. Adalah mustahil bagi mereka untuk mendapatkan gelar akademik tanpa kehadiran secara fisik di perguruan tinggi tempat mereka mendaftarkan diri (kecuali pada masa itu mereka adalah mahasiswa Universitas Terbuka, satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mendapatkan izin menyelenggarakan pendidikan jarak jauh).

Kemudian kedua, sejalan dengan kemajuan teknologi digital, berkembanglah konsep daring. Perguruan tinggi mulai sadar dan berlomba-lomba untuk menyelenggarakan perkuliahan berbasis *online* atau yang dikenal dengan istilah *e-learning*. Pada konteks ini, perguruan tinggi mulai memahami adanya dinamika perubahan dimana pada dasarnya "layanan" sebuah kampus dapat dinikmati masyarakat tanpa yang bersangkutan harus hadir atau datang secara fisik ke tempat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena dimanfaatkannya beragam aplikasi teknologi seperti *Learning Management System*, *tele-conference*, *online examination*, *mobile learning*, dan lain sebagainya. Konsep dasar yang diadopsi agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik adalah *distance*

education, atau yang dikenal dengan pendidikan jarak jauh. Praktek *e-learning* ini menjadi semakin masif ketika terjadi pandemi COVID-19. Dan ketiga, jika tren dan kecenderungan ini diteruskan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perguruan tinggi adalah suatu "*platform*" tempat bertemunya para *scholar* atau ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara kolektif melalui aktivitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagaimana *platform* aplikasi bank yang mempertemukan mereka yang punya uang lebih dan yang membutuhkan uang, atau *platform* aplikasi taksi *online* yang mempertemukan mereka yang punya alat transportasi dan yang ingin bepergian, maka akan tumbuh platform aplikasi perguruan tinggi tempat bertemunya "mereka" yang punya ilmu (manusia dan sumber belajar) dengan yang membutuhkan ilmu (peserta didik). Disadari atau tidak, *platform* semacam ini telah tumbuh di mana-mana, dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat dunia. Bahkan ada sejumlah aplikasi yang menerapkan *artificial intelligence* dan *machine learning* sehingga dapat menawarkan kurikulum yang sangat *agile*, fleksibel, dan *customised* (sesuai dengan kebutuhan personal).

Konvergensi dalam Ekosistem Pendidikan

Pada hakikatnya, setiap insan manusia memiliki impian. Impian ini dimanifestasikan dalam bentuk cita-cita yang ingin diraih dalam masa hidupnya. Keinginan ini bersifat personal, unik, dan dinamis, sesuai dengan situasi kondisi zaman yang kerap berubah-ubah. Mengikuti proses pembelajaran formal adalah salah satu strategi untuk menggapai cita-cita, karena di sanalah terjadi proses pendewasaan dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku, bersamaan dengan kesempatan mendalami bidang ilmu yang selaras dengan bakat, impian, dan talenta yang dimiliki masing-masing peserta didik.

Fenomena belakangan ini memperlihatkan bagaimana terjadi konvergensi antara sektor pendidikan formal, non-formal, dan informal. Manusia pembelajar dewasa (generasi muda) saat ini sudah

mulai kurang atau tidak peduli dengan dari mana mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Mereka cenderung ingin menjadi individu independen yang memiliki kendali penuh atas kehidupannya - termasuk cara mereka belajar dan memperoleh edukasi. Aplikasi, *platform*, institusi virtual, repositori konten digital, dan komunitas siber adalah sumber daya pembelajaran bagi mereka. Mereka merasa dan menganggap bahwa proses belajar (dan pembelajaran) dapat secara fleksibel dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Disamping itu, generasi milenial memiliki ciri tidak begitu suka dikungkung dan dikendalikan, terutama oleh sistem yang sangat *rigid*, karena hal tersebut tidak sesuai dengan DNA mereka yang penuh dengan dinamika, kreasi, dan inovasi.

Para penggiat *startup* yang mayoritas adalah mahasiswa atau anak-anak muda misalnya, hampir semua ilmu yang diperolehnya didapat dari hasil racikan pribadi atas "kurikulum kehidupan" masing-masing individu dengan cara belajar dari berbagai institusi formal maupun informal. Selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, siapa saja dapat menjadi "mahasiswa" (secara *de facto* dan/atau *de jure*), karena seluruh konten dan kurikulum terbuka secara bebas di dunia siber. Fenomena di negara maju memperlihatkan semakin tidak relevannya usia seseorang, latar belakang ekonomi, kewarganegaraan, gelar akademi, bahkan kecerdasan intelektual dalam mendapatkan kesempatan bekerja di dunia industri. Sejauh mereka adalah pribadi yang profesional, memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berbekal *soft skills* yang prima, *berintegritas* dan *resourceful*, maka dunia pekerjaan dan kesuksesan terbuka menanti.

Meredefinisi Pendidikan Tinggi Masa Depan

Makna pendidikan tinggi perlu mengalami redefinisi di masa depan. Kata "tinggi" diberikan karena merupakan kelanjutan dari istilah "dasar" dan "menengah" selaku jenjang pendidikan yang mendahuluinya. Posisinya dianggap berada pada bagian hilir dari

serangkaian pendidikan formal yang dijalani manusia selama hidupnya. Kata "mahasiswa" disematkan pada peserta didik sebagai tanda bahwa tidak ada status yang lebih tinggi lagi daripadanya dalam domain ke- siswa-an. Sejalan dengan usia yang menyertainya, seorang mahasiswa dianggap telah menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab penuh secara hukum, dan matang/dewasa sebagai manusia. Apakah pandangan dan status ini masih relevan di masa depan?

Pada era *cybernetics*, terdapat sejumlah hal yang bertolak belakang prinsipnya dengan dunia nyata yang dikenal selama ini. Ruang dan waktu tidak lagi relevan dalam dunia siber, karena siapapun dan dari manapun memiliki hak dan kemampuan akses yang sama terhadap konten maupun sumber daya komputasi yang terhubung via internet. Tidak ada pihak manapun yang dapat melarang adanya sebuah institusi yang meluluskan seorang doktor di usianya yang masih di bawah 17 tahun, karena yang bersangkutan memperlihatkan kejeniusan atau kebriliannya dalam bidang tertentu (selain bakat, yang bersangkutan sudah dapat mengakses konten pendidikan tinggi di usianya yang masih sangat dini). Tak bisa dicegah pula kehadiran kampus terbaik di Amerika dan Eropa secara virtual pada sejumlah negara berkembang Asia yang menawarkan programnya secara daring berbasis beasiswa penuh bagi para lulusan terbaik di negara bersangkutan. Bukan merupakan hal yang mustahil apabila mendadak tumbuh menjamur berbagai perguruan tinggi baru berbasis *platform* yang diselenggarakan oleh "*non academic communities*" seperti dunia industri, asosiasi profesi, tokoh masyarakat, maupun komunitas (tidak ada yang mampu menghalangi karena selain diselenggarakan di dunia siber, masyarakat yang mengikutinya sangat banyak dan merasa mendapatkan manfaat besar darinya).

Makna klasik pembelajaran sebagai "interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan

belajar" akan menemukan bentuk barunya (berbasis digital) karena begitu banyaknya jenis interaksi yang dapat dipilih, banyaknya komunitas pendidik yang tersedia, terbukanya sumber belajar di mana-mana, dan bervariasinya lingkungan belajar yang dibangun. Kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 akan semakin membuka berbagai kemungkinan frontier bagi perguruan tinggi untuk bertransformasi dan berinovasi tanpa henti. Peringatan *change or die* kali ini harus benar-benar diresapkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan tinggi. Tetap ngotot bertahan dengan kondisi sekarang, tidak mau berubah, mencoba melawan dinamika jaman, dan abai terhadap tren teknologi adalah sikap yang akan mempercepat kematian sebuah perguruan tinggi.

Penutup

Transformasi bukanlah pilihan, namun merupakan keniscayaan yang harus dijalani jika sebuah perguruan tinggi tetap ingin bertahan keberadaannya. Tantangan menjalani perubahan ke masa depan yang lebih baik ini bukanlah masalah dana, teknologi, peraturan, atau proses, tetapi lebih pada keterbukaan untuk mengubah *mindset* atau pola pikir lama dari para penyelenggara dan pengelola institusi pendidikan tinggi. Konsep pendidikan terbuka yang menggejala di mana-mana harus dipandang sebagai sebuah tantangan yang harus disikapi secara positif melalui penawaran produk, layanan, dan *value* baru dari perguruan tinggi untuk masyarakat dan dunia. Jadikan slogan *transform or die* sebagai cambuk, semangat, sekaligus prinsip yang mempersatukan seluruh pemangku kepentingan dari sebuah perguruan tinggi.

Karakter Kepemimpinan: Kesenjangan Antara Konsep dan Implementasi

Pieter Sahertian ¹

Pengantar

Kajian tentang kepemimpinan telah banyak dilakukan para pakar dan praktisi tentang apa yang membuat pemimpin itu hebat. Berbagai teori dan hasil penelitian lebih difokuskan pada sifat, keterampilan, atau gaya tertentu yang paling efektif. Para pemerhati kepemimpinan menyadari pentingnya seorang pemimpin untuk mendiagnosis masalah, memahami lingkungan, dan menerapkan strategi dalam organisasi. Diskursus tentang kepemimpinan dan sifat kepemimpinan merupakan topik yang menjadi fokus para peneliti di bidang kepemimpinan dan manajemen organisasi beberapa tahun terakhir ini adalah tentang karakter kepemimpinan. Konsep penting yang menjadi *concern* mereka terkait karakter kepemimpinan adalah: kejujuran, integritas, kompetensi, keberanian dan lain sebagainya. Dibalik upaya a untuk memetakan karakter kepemimpinan yang relevan, mereka masih dihadapkan pada pertanyaan “apakah karakter kepemimpinan sesuatu yang *esoteris*/suatu yang susah dipahami” [1] atau bagi Jenkins [2] merupakan sesuatu yang utopis.

Pertanyaan seperti itu wajar ada karena kita masih menyaksikan fenomena penyimpangan perilaku pemimpin yang sering muncul kepermukaan seperti korupsi, kriminalitas, seks bebas, dan lain sebagainya. Begitu massivenya perilaku yang tidak sejalan dengan karakter kepemimpinan yang seharusnya inheren pada para pemimpin tersebut dalam menjalankan roda organisasi yang dipercayakan kepadanya. Gejala krisis kepemimpinan terasa semakin kuat, hal ini diindikasikan dengan semakin minimnya pemimpin yang berkarakter melindungi pengikut/rakyatnya. Dengan kaca mata seorang ilmuwan

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

dan juga tokoh agama, secara vulgar dan tegas Syafi'i Maarif mengatakan, akibat dari defisit karakter para pemimpin kita sehingga sulit dibedakan mana pejabat dan mana penjahat [3]. Bahkan persoalan keberanian untuk mengambil tindakan, para pemimpin tidak punya nyali, walaupun hanya untuk menanganai perusak pagar kantornya sekalipun [3]. Bukan persoalan keberanian saja yang terjadi deficit tapi juga persoalan integritas, bakat/kemampuan, masih perlu menjadi perhatian bersama untuk disolusikan. Apakah ini berarti kita sedang mengalami krisis kepemimpinan?. Apakah mereka sedang berada dalam proses pencarian identitas yang pas untuk mengendalikan dan mengelola organisasi bahkan negara.

Tentunya kita tidak ingin menyaksikan akrobatik yang akan dipertontonkan para pemimpin di Indonesia dengan gaya *cowboy ala* presiden Donald Trump yang menyesakkan lawan politiknya bahkan masyarakat dunia, namun kita merindukan pemimpin seperti yang dikatakan Stephen R. Covey [4], "pemimpin yang memiliki kebiasaan proaktif, memiliki tujuan yang jelas, berpikir menang-menang, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti, bersinergi dan selalu mengembangkan diri". Pemimpin yang diidolakan adalah pemimpin yang memiliki hati, kepala dan tangan yang mau melayani pengikutnya [5]. Masyarakat menginginkan pemimpin yang berkarakter baik bukan hanya pemimpin yang memiliki nama besar. Sejarah membuktikan bahwa Adolf Hitler adalah seorang pemimpin yang besar tetapi bukan pemimpin yang baik. Keahlian dan kharismanya begitu besar, namun karakternya begitu buruk sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Oleh karenanya menarik apa yang dikatakan Tim Elmore [6], bahwa "gunung es menggambarkan kepemimpinan anda, 10% yang berada di atas permukaan air menggambarkan keahlian anda, dan 90% yang berada di bawah permukaan air menggambarkan karakter anda". Bagian inilah yang membuat organisasi anda hancur bagaikan "Kapal Titanic" tenggelam akibat kesombongan/keangkuhan.

Berangkat dari fenomena itulah, maka tulisan ini digagas. Pembahasan dilakukan menggunakan pendekatan rasional empiris dengan mengandalkan data yang bersumber dari berbagai literatur (*grand theory* maupun hasil-hasil penelitian). Permasalahan didefinisikan, solusi diajukan untuk menghasilkan konklusi yang relevan. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pemahaman kritis dan teoritis.

Tinjauan tentang Karakter

Akhir-akhir ini karakter sontak menjadi terminologi yang banyak diperbincangkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa karakter sebagai suatu konsep sekaligus perilaku yang merepresentasikan pribadi yang eksis di antara sesama. Karakter merupakan moralitas universal, yang memuat prinsip-prinsip dasar hidup, yaitu prinsip-prinsip dasar cara berinteraksi dengan sesama manusia, prinsip-prinsip dasar cara berinteraksi antar organisasi, dan cara berinteraksi dengan institusi. Karakter pada dasarnya merupakan sejumlah kebiasaan-kebiasaan seseorang, karena itu jika kita ingin membangun suatu kebiasaan baik, kita harus mempelajari dan melihat role model sebagai rujukan [5]. Oleh karenanya Lickona [7] mengatakan, hati-hati dengan pikiran anda karena akan menjadi kata-kata anda, kata-kata anda akan menjadi perbuatan anda, dan perbuatan anda akan menjadi kebiasaan anda, dan kebiasaan akan menjadi karakter anda, dan pada akhirnya karakter anda akan menjadi takdir anda.

Begitu pentingnya karakter dalam kehidupan manusia sehingga para filsuf Yunani telah merumuskannya sebagai sesuatu yang dihadirkan bersama dengan prinsip-prinsip hidup lainnya. Heraclitus mengatakan: “karakter adalah takdir”, karakter membentuk takdir seseorang dan takdir tersebut menjadi takdir seluruh masyarakat”. “Dalam karakter warga negara, terletak kesejahteraan rakyat” demikian kata Cicero. Sejalan dengan itu, Yudi Latif [8] menegaskan, karakter ibarat akar yang menunjang gerak tumbuhnya

suatu pohon, karena tanpa akar yang kuat, secepat apapun laju pertumbuhan pohon akan mudah roboh diterjang angin. Karakter bukan saja menentukan eksistensi dan kemajuan seseorang, melainkan juga sebuah bangsa.

Karakter adalah kepemilikan akan hal-hal yang baik, karena itu kita tahu karakter yang baik ketika kali pertama melihatnya. Oleh karenanya sekolah-sekolah di Jepang membutuhkan waktu yang relatif panjang (4 tahun) untuk membiasakan karakter baik bagi siswa-siswa mereka. Pendidikan Barat juga mendahulukan pendidikan karakter pada jenjang Pendidikan Dasar hanya untuk membiasakan mengucapkan terima kasih, maaf dan tolong. Karakter adalah sesuatu yang dibiasakan dalam perilaku hidup yang didasarkan pada nilai-nilai dan tradisi yang tumbuh dalam suatu masyarakat. Namun tidak sedikit pula tokoh-tokoh bangsa di dunia yang menggemakan pentingnya karakter dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam pidato terkenalnya *I have a Dream*, Martin Luther King, Jr., berkata bahwa dia bermimpi datangnya hari ketika semua orang Amerika, "akan dinilai bukan oleh warna kulit mereka tetapi oleh karakter mereka." Bung Karno pernah mengidekan pentingnya *nation and character building* sebagai upaya untuk membentuk karakter/mental bangsa Indonesia. Bung karno telah meletakkan dasar teoritis dan konseptual tentang bagaimana bangsa Indonesia dibangun.

Pemikir Yunani kuno menawarkan empat karakter baik yang meliputi kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri [7]. Lickona [7] mengidentifikasi karakter yang baik disebutkan kebajikan, dan kebajikan itu meliputi kejujuran, keberanian, keadilan dan kasih sayang. Karakter adalah objektivitas kualitas baik dari manusia dan bukan preferensi subyektif yang melibatkan unsur rasa. Dalam realitas kehidupan, karakter memiliki dua sisi; (1) perilaku benar dalam hubungan dengan orang lain dan (2) perilaku benar dalam kaitannya dengan diri sendiri [7]. Perilaku yang diorientasikan kepada orang lain seperti keadilan, kejujuran, rasa syukur, dan cinta kasih.

Sedangkan perilaku yang diorientasikan pada diri sendiri adalah kerendahan hati, ketabahan, kontrol diri, dan berusaha yang terbaik daripada menyerah.

Karakter baik yang diidekan para bijak tersebut, pada prakteknya mengalami pasang surut dalam kehidupan berbagai bangsa di dunia, dengan latar belakang ideologi, budaya, sosial-ekonomi, sistem nilai maupun agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu rencana Kemendikbud untuk mengganti Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter adalah sebuah terobosan baru dalam sistem pendidikan dan penilaian untuk membentuk karakter subyek didik yang hasil dan dampaknya dapat kita ketahui beberapa tahun kedepan.

Sumber Karakter Kepemimpinan

Banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dalam berbagai sektor. Proses pembangunan yang berkelanjutan tersebut mengharuskan setiap individu yang terlibat di dalamnya melakukan adaptasi dan inovasi sejalan dengan kebijakan organisasi. Namun yang sering terjadi adalah, proses adaptasi dan inovasi yang dilakukan tanpa kendali kompas yang jelas bahkan cenderung tanpa didukung dengan moralitas yang kredibel. Banyak penulis tentang kepemimpinan dan manajemen mempertanyakan tentang sumber pembentukan karakter seorang pemimpin. Pertanyaan menarik diajukan oleh Yudi Latif [8] adalah “dari mana sumber kepemimpinan itu bisa kita harapkan”? Dalam penjelasannya tersirat bahwa pribadi yang diharapkan muncul sebagai figur pemimpin lahir dari organisasi seperti partai politik tempat kader-kadernya ditempa. Namun penulis meragukan hadirnya seorang pemimpin yang berkarakter/memiliki kebajikan dari organisasi politik yang sarat dengan nilai-nilai ideologi yang diusungnya. Machiavelli dalam Jenkins [2] menjelaskan bahwa kebajikan dan karakter individu adalah produk konstruksi sosial, sejarah, dan pendidikan. Beberapa penulis seperti Robert Greenleaf

yang terkenal dengan teori *Kepemimpinan Melayani*, mendasarkan teorinya pada iman Kristen yang diyakininya. Begitu juga Service dan Carson [9], meyakini agama Kristen telah mempengaruhi cara kita mengatur dan memimpin orang lain. Penulis buku *The One Minute Manager* Ken Blanchard, ketika mengintrodusir bukunya tentang *leadership (Lead Like Jesus)* merujuk pada ajaran Yesus yang menurutnya memuat prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah teruji.

Ajaran Konfusius dan Mencius diyakini membentuk perilaku seorang pemimpin. Menurut mereka, bahwa sifat manusia pada dasarnya baik, dan seseorang akan memelihara kepribadian yang diperlukan melalui pendidikan dan latihan yang tekun [10]. Ajaran Konfusius juga menyatakan bahwa hukuman tidaklah disukai dalam tujuan untuk memupuk kepribadian yang diperlukan. Mencius memiliki pandangan bahwa perilaku baik dari seorang pemimpin adalah untuk membantu orang lain melakukan kebaikan. Mencius mengatakan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang bisa memotivasi para pengikutnya untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan selalu menawarkan peluang bagi pengikutnya. Seorang leader yang bijak akan mengembangkan pengikutnya sebagai modal manusia dan bukan sebagai sumberdaya manusia [10].

Konsep *Dharma* (keadilan dan perilaku etis) merupakan landasan filosofi Hindu. Nilai-nilai Agama Hindu dalam tradisi India mempengaruhi perilaku orang India dalam masyarakat maupun dalam organisasi. Salah satu upaya awal untuk mencari sebuah gaya leadership yang efektif dalam konteks India dibuat oleh Sinha [11]. Berdasarkan pada risetnya yang luas, dia menemukan bahwa, Nurturant Task Leadership Style (NTL) ditemukan sebagai gaya yang paling efektif. Gaya ini dikarakterisasikan dengan kepedulian pemimpin terhadap tugas dan orientasi memelihara. Pada tingkatan tertentu karakteristik ini penekanannya pada teamwork, mendukung tujuan jangka panjang dan lainnya, akan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk persepsi kepemimpinan dalam konteks India.

Nilai keteladanan (menjadi model) dalam masyarakat Islam, mengutamakan konsultasi dalam pembuatan keputusan, mengedepankan serta budaya patriarki [12], serta berorientasi pada diri sendiri [13], merupakan ciri dan karakteristik masyarakat Arab yang terinternalisasi dan diimplementasikan oleh para pemimpin Arab. Beekuni [14] mendeskripsikan sifat pragmatis dari kepemimpinan Arab Islam seperti kebenaran dan integritas, kepercayaan, keadilan, kebajikan dan kerendahan hati. Aldulaimi menjelaskan bahwa konsultasi merupakan suatu nilai dan sikap para pemimpin Arab dalam proses pengambilan keputusan, dimana seseorang harus berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman.

Namun, sumber karakter pemimpin tidak hanya berasal dari nilai dan ajaran agama tertentu seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Bahkan seorang ateis terkenal Richard Dawson memiliki keyakinan dan etika kejujuran dan kebenarannya. [15] Kejujuran tidak terbatas pada agama dan tentunya tidak pada agama tertentu. Bahkan nilai-nilai kultural juga berkontribusi pada pembentukan karakter pemimpin. Sejumlah penelitian yang memasukkan kontekstualisasi kultural terhadap pembentukan karakter pemimpin telah dilaksanakan di berbagai negara. [16] [17] [18] Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa, kontekstualisasi kultur dianggap penting dimana kultur selalu mewarnai setiap aspek perilaku manusia, dan karena itu pengetahuan tentang kultur dan pengaruhnya bisa berguna bagi para pemimpin yang bekerja di sebuah lingkungan organisasi yang multikultur. [19]

Bagaimana Karakter Kepemimpinan Dibentuk

Karakter tidak pernah diwariskan begitu saja, juga tidak tumbuh dengan sendirinya. Karakter harus dibentuk dan dikembangkan. Karakter berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kita mungkin mengira bahwa karakter seseorang terbentuk sejak awal kehidupan tetapi kita tidak tahu seberapa banyak atau

bagaimana awal mula karakter berkembang. Bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, pasti memahami bahwa karakter tidak berkembang dengan cepat namun mengalami proses pemurnian sepanjang waktu. Karakter dan kepemimpinan berkarakter adalah inti dari kepemimpinan yang baik pada semua level dan jenis organisasi, baik kepemimpinan bisnis, pendidikan, politik, agama dan juga dalam keluarga, dimana setiap orang mempengaruhi kehidupan di sekitar mereka. Norman Schwarzkopf seorang jenderal veteran perang Vietnam mengatakan, "unsur utama kepemimpinan yang baik adalah karakter yang baik. Kepemimpinan selalu terkait dengan perilaku dan perilaku ditentukan oleh nilai-nilai karakter". Kepemimpinan pada dasarnya adalah tentang siapa kita dari pada apa kita. Dalam pandangan Norman Schwarzkopf dalam Heenan [20], karakter dalam kepemimpinan adalah penting karena sejumlah alasan:

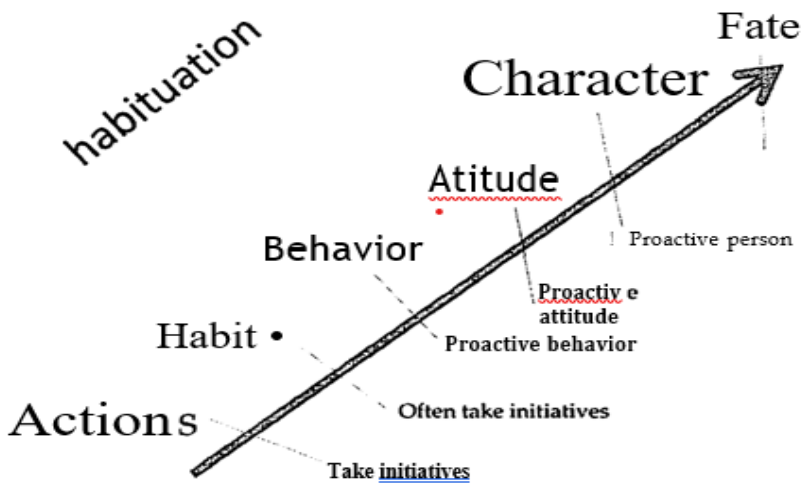
- a. Karakter menyediakan hubungan kepercayaan antara pemimpin dan pengikut. Pengikut yang memiliki kepercayaan pada tindakan pemimpin mereka, akan berkontribusi pada organisasi. Melalui kepercayaan itu individu terikat dengan pemimpin dan organisasi. Namun kepercayaan itu mudah rapuh dan mudah rusak. Contoh topiknya adalah kepatuhan birokrasi. Kepatuhan yang memberatkan adalah kontraproduktif, hal itu menghancurkan kepercayaan dan mengurangi komitmen dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab. Korbannya adalah kesukarelaan, keinginan untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain atau organisasi. Kerelawanan adalah tentang "menempuh jarak yang sangat jauh". Saat kepatuhan meningkatkan kesukarelaan menurun. Jauh lebih baik untuk membangun kepercayaan, menghormati pengikut dan mendorong penerimaan tanggung jawab.
- b. Karakter menyediakan sumber keberadaan terdalam bagi pemimpin dan sumber pengendalian terkuat. Dalam banyak

kasus, dorongan pertama untuk melakukan "kebaikan" dan penghalang terakhir untuk melakukan kesalahan adalah sama yaitu karakternya. Karakter adalah motivasi dan control terakhir.

- c. Karakter yang mencakup - integritas, rasa hormat dan tanggung jawab - adalah komponen kunci dari kepemimpinan yang baik. Dalam beberapa dekade terakhir ada fokus yang lebih besar pada keterampilan manajemen daripada kualitas kepemimpinan. Dikatakan bahwa "manajer adalah orang yang melakukan sesuatu dengan benar sedangkan pemimpin adalah orang yang melakukan hal yang benar". Manajemen membutuhkan keterampilan dan strategi, tetapi kepemimpinan yang baik membutuhkan lebih banyak lagi. Kepemimpinan yang baik membutuhkan karakter yang baik.
- d. Tidak ada gaya kepemimpinan yang efektif dari waktu ke waktu kecuali jika berakar pada karakter yang menginspirasi kepercayaan dan komitmen. Hampir tidak mungkin untuk mempertahankan apa pun, apalagi kepemimpinan. Semua mode ada harinya, begitu pula gaya kepemimpinan. Pemimpin terbaik memiliki kualitas yang berakar pada karakter.

Pendekatan dengan karakter merupakan salah satu dari usaha sistematis untuk mempelajari kepemimpinan. Pendekatan ini fokus kepada pemimpin secara eksklusif. Oleh sebab itu karakter kepemimpinan sangat penting, karena karakter mengakar ke dalam semua tindakan kita sebagai manusia. Salah satu faktor pembentuk karakter adalah kebiasaan. Langkah-langkah proses terbentuknya karakter menurut Tarigan, Siregar dan Panjaitan [21], melalui kebiasaan adalah: (1) tindakan (*action*) yang terus menerus diulang akan menjadi kebiasaan, (2) kebiasaan (*habit*) yang tidak bisa dihentikan akan menjadi tingkah laku. Ketika telah menjadi rutinitas maka lama kelamaan akan menjadi kebutuhan, (3) tingkah laku yang terus menerus dipelihara akan menjadi sifat (*attitude*), dan (4) sifat

bila dipelihara akan menjadi karakter, (5) kemudian karakter yang telah dibangun tersebut akan berkontribusi dalam menentukan nasib orang tersebut (Gambar 1).



Gambar 1: Karakter & Gaya Kepemimpinan

Memelihara Karakter untuk Kepemimpinan yang Realistis

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa kebajikan dan karakter individu adalah produk konstruksi sosial, sejarah, dan pendidikan. Sebagai hasil dari konstruksi sosial, karakter selalu berhubungan dengan orang lain dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, ketika berbicara terkait karakter pemimpin, kebajikan adalah persoalan bersama. Karakter pemimpin ditentukan dan dibentuk serta dibutuhkan untuk mempertahankan nilai-nilai tertentu dengan keterlibatan pemimpin dan dengan tanggung jawab untuk komunitas. Definisi Machiavelli tentang kebajikan yang diadopsi Jenkins [2] adalah kompleks dan terdiri dari lima elemen penting, yaitu: integritas, keberanian, bakat, kehati-hatian, dan fleksibilitas. Semua elemen kebajikan tersebut dianggap

sama, dan seorang pemimpin memiliki tugas untuk menyesuaikan elemen-elemen itu dengan situasi yang dipersyaratkan. Sebagai contoh, moral staf mungkin mengalami tekanan di organisasi karena kepemimpinan yang tidak fleksibel. Untuk mengatasi masalah ini, pemimpin organisasi harus menjalankan kepemimpinan yang fleksibel. Deskripsi tentang elemen-elemen kebijakan dijelaskan sebagai berikut.

Elemen pertama yaitu Integritas, artinya keutuhan, kelengkapan dan keseluruhan. Integritas merupakan tantangan bagi setiap pemimpin saat mereka menghadapi keseimbangan kepentingan yang beragam dan nilai-nilai yang terkait dengan masyarakat yang majemuk, dan nilai-nilai serta misi organisasi yang mereka pimpin. Integritas memiliki konsep dasar kejujuran, bersikap otentik dalam segala tindakan. Integritas didasarkan pada dua dasar utama: (1) untuk mendapatkan kepercayaan publik, pemimpin tidak boleh menetapkan tujuan organisasi sendiri; (2) keragaman dan pluralitas yang tidak bisa dinegosiasikan, karena itu pemimpin harus menghormati nilai dan perspektif orang dari berbagai latar belakang dalam organisasi dan menegosiasikan konsensus. Integritas menuntut para pemimpin untuk menyadari realitas situasi yang mereka hadapi. Pemimpin harus mau melihat kebenaran dan berbicara kebenaran. Hal ini mempersyaratkan pemimpin untuk menunjukkan keberanian. Zauder [22] mengidentifikasi perilaku spesifik pemimpin yang berkaitan dengan integritas sebagai nilai-nilai utama dimana karakter pemimpin berakar. Integritas pemimpin dapat dilihat dari beberapa karakter seperti: memiliki kerendahan hati, perhatian terhadap kebaikan yang lebih besar, jujur, memenuhi komitmen, berjuang untuk keadilan, bertanggung jawab, menghormati individu, mengembangkan orang lain, dan bersikap pemaaf.

Elemen kedua, yakni keberanian, adalah kemauan untuk menghadapi kebenaran, menanggapi kekhawatiran dengan cara yang masuk akal dan mengembangkan strategi itu untuk mencapai tujuan

organisasi. Keberanian seorang pemimpin adalah sumber daya organisasi yang paling penting dalam menghadapi krisis. Seorang pemimpin perlu dan harus memiliki keberanian dalam menjalankan perannya. Namun keberanian perlu juga diimbangi dengan bekal karakter yang kuat dari sang pemimpin. Berani yang bertanggung jawab itulah yang perlu bagi seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin pun perlu didukung oleh kemampuan atau *skill* yang dapat menjadikannya berani. Terkadang keberanian seorang pemimpin dapat memiliki konotasi yang negatif. Hal ini dikarenakan perilaku berani cenderung mengarah kepada yang agresif atau perilaku yang destruktif. Untuk itu tantangan bagi pemimpin agar dapat dengan bijak menunjukkan keberaniannya. Pemimpin yang berani juga diharapkan mampu memperhatikan sisi-sisi kemanusiaannya dalam menjalankan kepemimpinannya.

Lucinda Everet dalam bukunya *Courageous Leader* yang dikutip Kertamuda [23] mengemukakan beberapa karakter untuk menjadi sosok pemimpin yang berani. Pertama adalah *authenticity*, seorang pemimpin harus dapat menyampaikan kebenaran dengan sungguh-sungguh tentang dirinya dan juga situasi yang tengah dihadapinya. Kesungguhan yang dimiliki pemimpin akan mampu membantunya saat menghadapi situasi atau kondisi yang menuntut keberaniannya. Kedua adalah *persistence*, keberanian pemimpin perlu secara terus menerus diupayakan dengan baik, agar segala visi dan misinya dapat tercapai. Tanpa adanya ketekunan dan usaha optimal dalam menjalankan setiap tugas dan aktivitasnya maka tujuan yang hendak dicapai sulit untuk diraihinya. Hal ini dapat berdampak bagi seluruh organisasi yang dipimpinnya. Ketiga adalah *bravery*, keberanian untuk melakukan sesuatu yang memang perlu untuk dikerjakan tanpa rasa takut dan khawatir.

Pemimpin yang berani harus menghilangkan perasaan-perasaan yang dapat menghambat keinginannya untuk meraih tujuan yang diharapkannya. Namun keberanian seorang pemimpin perlu

diawasi dan mempertimbangkan risiko-risiko yang kelak dapat dihadapinya. Keempat adalah *humility*, kerendahan hati seorang pemimpin menjadi faktor penyeimbang saat menunjukkan keberaniannya. Tanpa kerendahan hati, maka keberanian pemimpin cenderung akan menjadi sikap angkuh dan sombong. Bila hal tersebut terjadi maka dia akan menghadapi banyak kesulitan dalam berinteraksi dengan dirinya dan juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karakter kelima adalah *vitality*, pemimpin harus memiliki vitalitas yang optimal dalam memimpin. Vitalitas seorang pemimpin menjadi sumber semangat dan menjadikannya sosok yang memiliki antusias. Menjadi berani perlu didukung oleh semangat dan antusias pemimpin, dan perlu juga kemampuan menularkan kedua hal tersebut pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Keenam adalah *curiosity*, keberanian pemimpin perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk mencari tahu hal-hal apa yang akan diperjuangkannya. Keberanian tidak berarti tanpa pertimbangan yang tepat. Tanpa pengetahuan dan keingintahuan pemimpin maka keberanian yang akan disampaikan menjadi sia-sia dan tanpa makna. Oleh karena itu, pemimpin yang berani haruslah memiliki kemampuan untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi.

Keberanian seorang pemimpin bukanlah semata-mata untuk melaksanakan kepentingan dan keinginan pribadinya. Akan tetapi, keberanian yang ditunjukkan oleh pemimpin haruslah dipahami dan dirasakan oleh orang-orang yang dipimpinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang benar. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa kekuatan atau power yang menjadikannya berani, harus dapat digunakan secara tepat dan bijak. Keberanian pemimpin perlu disertai cara dan strategi yang dapat memberikan manfaat buat instiitusi dan orang-orang yang dipimpinya. Memperhatikan kepentingan orang-orang yang ada di sekitar dan menghargai orang lain itulah keberanian seorang pemimpin yang sesungguhnya.

Elemen ketiga, fleksibilitas berarti kapasitas untuk membantu organisasi menjadi mudah beradaptasi adalah inti dan tantangan utama kepemimpinan. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk beradaptasi. Mereka yang tidak memiliki tulang punggung dan karena itu sangat patuh bukanlah pemimpin, namun pemimpin yang tidak pernah membungkuk akan patah. Kepemimpinan yang hebat menemukan keseimbangan. Salah satu kriteria utama untuk menjadi pemimpin yang baik adalah bersifat fleksibel. Fleksibel yang dimaksud disini adalah seorang pemimpin yang dapat membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan setiap perkembangan zaman yang ada supaya tidak salah mengambil langkah ke depannya [24].

Elemen keempat, bakat adalah kapasitas manusia untuk merespon secara kreatif dan berfungsi dalam lingkungan kerja. Bakat bisa dikembangkan dan pemimpin organisasi harus berusaha untuk mendorong kemajuan bakat dalam organisasi dengan mengundang anggotanya menemukan masalah, mempresentasikan hipotesis, menginvestasikan waktu untuk rasa ingin tahu dan menjelaskan ide-ide mereka dalam konteks untuk saling percaya dan saling menghormati. Tidak setiap orang ditakdirkan dengan bakat menjadi pemimpin. Walaupun memiliki bakat, tetap harus dilengkapi dengan pengalaman. Menjadi pemimpin juga tidak boleh hanya mengandalkan popularitas. Apabila kepemimpinan hanya mengandalkan popularitas dan tanpa disertai bakat serta pengalaman, maka hasil kinerja akan buruk [25]. Dale Carnegie [26] mengidentifikasi kepemimpinan yang berbakat memiliki ciri-ciri: (1) kemampuan berkomunikasi; pemimpin pasti berbicara layaknya mereka adalah seorang pemimpin, tetapi mereka semua tidak berbicara dengan cara yang sama. Seorang pemimpin memiliki keahlian berkomunikasi tertentu yang membedakan mereka dengan orang yang lain. Semua pemimpin mampu berkomunikasi dengan cara mereka yang efektif, tetapi pemimpin yang baik dalam berkomunikasi, akan berpengaruh

terhadap anak buah dalam memahami apa yang dikatakan dan mereka siap untuk menindaklanjuti idenya; (2) menunjukkan ketertarikan kepada orang lain; seorang pemimpin harus mampu menghargai orang lain, bila ia ingin dihargai secara tulus oleh orang lain juga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengekspresikan ketertarikan kepada orang lain dan sebagian besar hanya membutuhkan perhatian terfokus. Memerlihatkan kepedulian kepada orang lain bukanlah pertanda kelemahan atau kurangnya otoritas dalam diri pemimpin, malah itu bukti bakat seorang pemimpin sejati; (3) memiliki sikap yang bukan hanya sekedar performa; seorang pemimpin memiliki kekuasaan penuh terhadap apa yang dipimpin. Pemimpin dapat berbuat apa saja yang dimau, tetapi itu semua akan sangat berbahaya jika tidak dilakukan dengan bijak.

Elemen keempat, kebijaksanaan: dicirikan oleh refleksi yang seimbang dan penuh pertimbangan, bahkan saat menghadapi konflik sekalipun. Pemimpin yang bijaksana memiliki kapasitas untuk belajar dari kesalahan, dan memprediksi serta menafsirkan konsekuensi dari tindakan. Mampu menghindari perilaku menghakimi adalah penggunaan yang baik dari penilaian. Pemimpin harus memiliki kebijaksanaan untuk menjelaskan seperti apa masa depan, tindakan apa yang akan menciptakan kesuksesan dan tindakan mana yang perlu dihindari. Melakukan sedikit keleluasaan lebih memperjelas pilihan, keputusan dan tanggung jawab penting. Kebijaksanaan menunjukkan penilaian yang baik dan kemampuan yang kuat untuk membedakan tempat yang tepat untuk memposisikan diri kita untuk sukses [27]. Pemimpin yang bijaksana menentukan dan mengarahkan penilaian dan mampu menerapkan prinsip-prinsip perilaku moral untuk mengatasi keraguan dan mencapai kebaikan. Menjadi bijaksana berarti memahami prioritas, apa yang penting dalam jangka panjang, dan perilaku apa yang membuat semua ini terjadi. Pemimpin yang memahami bagaimana melakukan sesuatu yang benar dalam semua situasi, memiliki kepribadian seorang pemimpin yang bijaksana.

Pemimpin yang fokus pada masa depan, memahami pilihan yang harus dibuat dan yang menerapkan penilaian yang tepat ketika berurusan dengan orang lain adalah pemimpin yang bijaksana yang dibutuhkan. Kemampuan penilaian, kebijaksanaan, bertindak dengan berani, melihat jauh ke depan merupakan kualitas diri yang selalu ada pada seorang pemimpin yang bijaksana. Seorang pemimpin bisa turun dari jabatannya atas dorongan anak buahnya dan akan lari meninggalkannya jika tidak bijaksana.

Kecerdasan Kepemimpinan untuk Menakar Karakter Kepemimpinan

Kecerdasan kepemimpinan/*Leadership Quotient* (LQ) merupakan kapasitas yang terintegrasi untuk melaksanakan tanggung jawab dengan teguh dan rasional. Studi tentang kecerdasan kepemimpinan, belum terlalu lama dilakukan, tepatnya pada akhir tahun 1990-an, ketika para peneliti mencoba menemukan cara yang berguna untuk penilaian diri kepemimpinan dan perbaikannya. Tujuannya tidak lain agar menghasilkan seperangkat pedoman yang dapat diidentifikasi, terukur dan bisa dipraktekkan. Hasil studi yang telah diimplementasikan menunjukkan bahwa LQ memberi manfaat yang signifikan. Munculnya kecerdasan kepemimpinan diilhami oleh gagasan tentang jenis kecerdasan yang berbeda dengan yang telah ada dalam literatur psikologis, seperti *Intelligence Quotient* (IQ), yang dikembangkan Howard Gardner yang mencakup tujuh jenis dasar kecerdasan: verbal, matematis-logis, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, dan intra-pribadi. Namun IQ gagal dalam memprediksi kesuksesan dalam banyak usaha kehidupan [28]. Belakangan muncul juga *Success Quotient* (SQ) dan *Emotional Quotient* (EQ) yang tampaknya mengarah pada kesuksesan dalam relasi kepemimpinan [29] [30] [31]. Kecerdasan-kecerdasan ini lebih mudah dibentuk daripada IQ yang tradisional, sehingga membuatnya lebih sesuai untuk perbaikan. Dengan EQ dapat diidentifikasi bagaimana seseorang mengelola emosi mereka sendiri dan dapat membaca dan menggunakan emosi orang lain. Mengikuti EQ-nya Goleman's, muncul

kemudian karya Sternberg tentang kecerdasan yang sukses (SQ). Oleh karena itu para pakar merasa perlu untuk memunculkan parameter baru untuk mengukur kecerdasan kepemimpinan sebagai sebuah langkah ekstrapolasi.

Saat ini berbagai organisasi dan manajemen tengah berada dalam perubahan paradigma manajerial yang sedang bertransformasi untuk mengkaji kembali apa artinya menjadi pemimpin yang efektif. Dalam pandangan pakar, “kepemimpinan bukanlah sebuah posisi, namun merupakan suatu proses. Ini adalah seperangkat keterampilan dan praktik yang dapat diamati, dapat dipahami, dan dapat dipelajari yang tersedia untuk semua orang, di mana pun dalam organisasi” [32]. Kecerdasan kepemimpinan secara inovatif menjelaskan kompleksitas interaksi orang dan proses yang terlibat dalam mengukur dan meningkatkan kepemimpinan. Seperti yang dikatakan Einstein, dalam Service & Reburn [15], “Masalah penting yang kita hadapi saat ini, tidak dapat diselesaikan dengan cara berpikir yang sama.” Banyak tes awal telah memperkuat pemahaman tentang semua aspek kepemimpinan. Kecerdasan kepemimpinan (LQ) mendefinisikan kepemimpinan sebagai ukuran dari komponen yang sangat penting saat kepemimpinan terjadi. Elemen positif menunjukkan kepemimpinan yang efektif atau baik, dan elemen negatif adalah kebalikannya. Triangulasi dianggap begitu penting terjadi ketika kita menyaksikan kecerdasan yang efektif sebagai fungsi dari interaksi: (1) pemimpin; (2) pengikut; dan (3) lingkungan/situasi.

Sebagian besar kecerdasan ini relatif dikenal dan mudah dipahami, seperti mengasah keinginan, perilaku, komunikasi, pengalaman, sangat penting untuk pengembangan kepemimpinan. Richard I. Lester [15] menjelaskan, bahwa kecerdasan kepemimpinan memberikan gambaran yang realistis, model praktis, dan bisa diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Melalui LQ, diharapkan mampu mengarahkan pemimpin untuk jujur menilai dan menyadari sifat,

kemampuan, dan perilaku yang secara alami memiliki atau tidak memiliki serta bagaimana caranya menyesuaikan mereka dengan pengikut dan lingkungan untuk mempengaruhi. Setelah mengidentifikasi dan mengasah kemungkinan-kemungkinan (memaksimalkan kekuatan) dan mencari tahu cara mengatasi kekurangan (meminimalkan kelemahan), dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas sebagai pemimpin [15]. Semakin kompleks suatu organisasi atau komunitas yang dipimpinnya, maka kepemimpinan harus menjadi lebih baik, karena leadership memainkan peran utama untuk menciptakan keunggulan dalam sebuah organisasi. Apalagi ketika sebuah organisasi berada dalam era persaingan global, dimana fokus persaingan bergeser dari mengelola dan mengontrol stabilitas beralih ke kepemimpinan untuk kecepatan, eksperimen, fleksibilitas, perubahan, dan inovasi menjadi lebih sangat dominan diperlukan [33]. Kepemimpinan adalah seni untuk mencapai lebih dari yang ditetapkan atau direncanakan, demikian kata Colin Powell [15].

Kepemimpinan adalah pengaruh terhadap manusia yang terjadi ketika orang melakukan sesuatu bersama-sama. Dalam proses tersebut terjadi hal-hal seperti: pemahaman tentang diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (situasi); belajar menyeimbangkan orang, konteks dan tugas; komitmen, kecocokan, kecerdasan, prinsip, keinginan, dan pola interaksi lainnya [34]. Kehadiran seorang pemimpin, harus membantu orang lain menyadari lebih banyak kehidupan mereka saat mereka belajar bagaimana menyesuaikan diri dan menunjukkan perbedaan dengan orang lain. Seorang pemimpin harus benar-benar mengabdikan diri untuk dapat mengembangkan orang lain sebagai pemimpin. Perjalanan menuju peningkatan kepemimpinan pribadi dimulai dengan keinginan dan kesadaran diri, untuk berkembang menjadi komitmen berkelanjutan yang tidak pernah berakhir, dan diakhiri dengan praktik untuk diterapkan pada diri sendiri dan pengikutnya [35]. Belajar untuk memahami kecerdasan

kepemimpinan pada diri sendiri dan orang lain memberikan gambaran tentang semua perilaku yang dapat memberikan panduan bagi mereka yang ingin mengajar, meningkatkan atau mengukur kepemimpinan.

Setiap pemimpin yang menerapkan LQ dalam organisasi, harus memahami dan ingat bahwa kepemimpinan yang efektif serta kehidupan yang sukses dan memuaskan, membutuhkan kesesuaian yang seimbang di antara lingkungan, perilaku, konteks, proses, isi, dan kebutuhan. Prinsip maksimal-minimal dapat diimplementasikan untuk mewujudkan apa yang terbaik dari apa yang dimiliki dan untuk membuang kelemahan yang tidak relevan, Seorang pemimpin tidak dapat (atau tidak akan) berubah, jika tanpa menerapkan kebijaksanaan. Seperti pepatah Inggris “pertimbangkan dengan baik-baik, siapa Anda, apa yang Anda lakukan, dari mana Anda datang, dan ke mana Anda akan pergi.” [36]. Kepemimpinan adalah tentang mendapatkan keselarasan dan tentang menginspirasi orang untuk mencapai kesuksesan [37]. Orang hebat perlu memiliki proses yang baik. Hal itu akan mudah dicapai bila dapat menerapkan dengan tepat prinsip-prinsip berikut: (1) beradaptasi dengan pengikut; (2) menyesuaikan dengan lingkungan dan tugas; (3) menyeimbangkan diri, pengikut, dan lingkungan; (4) mengkondisikan situasi yang tepat dengan waktu, tempat, orang, dan hal-hal yang ada; (5) memahami diri sebelum tampil ke permukaan. Itulah prinsip *leaderology* dan hal itu dapat terlaksana bila pemimpin hanya bekerja dengan kejujuran, maka semuanya akan menjadi lebih baik.

Kesimpulan

Para pemimpin seharusnya menjadi termostat dan bukan hanya sekedar termometer, demikian kata Tim Elmore. Pemimpin harus mengatur iklim sosial di lingkungan dimana dia berada. Pengaruh positif dan suhu organisasi yang sehat hanya bisa dicapai bila pemimpin tersebut memiliki karakter yang positif. Organisasi membutuhkan pemimpin yang berkarakter, dan itu bisa terwujud

apabila ada proses belajar dengan menjadikan organisasi sebagai kawah candradimuka untuk mencetak pemimpin yang hebat. Tantangan yang dihadapi tidak kecil karena ada begitu banyak godaan untuk mewujudkan figur pemimpin yang ideal. Instrumen kecerdasan kepemimpinan dapat dijadikan parameter untuk menentukan karakter pemimpin yg baik dan yang diidolakan. Oleh karenanya, tanggung jawab untuk menjadikan pemimpin yang berkarakter bukan hanya kewajiban pemimpin semata, namun semua pihak harus berkomitmen ikut terlibat dalam upaya yang berkelanjutan. Dengan pemimpin yang berkarakter, harapan untuk membawa pengaruh positif kepada para pengikut agar berperilaku yang memenuhi nilai-nilai karakter, bukan merupakan mimpi di siang bolong.

Referensi

- [1] Alexander, D., 2015. *The Character of a Leader: A Handbook for the Young Leader*, Published by CreateSpace Independent Publishing Platform, North Charleston, SC.
- [2] Jinkins, M., & Jinkins, D.B. 2010. *The Character of Leadership, Political Realism and Public Virtue in Nonprofit Organizations*, Executive Book Summary.
- [3] Octavianus, P., 2007. *Menuju Indonesia Jaya 2005-2030 dan Indonesia Adidaya 2030-2055, Jilid III: Solusi Masalah Bangsa Indonesia dan Benang Merah Pembangunan*, Batu: Departemen Multi Media YPPH.
- [4] Covey, Stephen R., 1997. *Kepemimpinan yang Berprinsip*. Binarupa Aksara: Jakarta.
- [5] Blanchard, K. & Hodges, P., 2006. *Lead Like Jesus, belajar dari Kepemimpinan Paling Dahsyat Sepanjang Zaman*, Visimedi: Tangerang.
- [6] Elmore, T., 2007. *Kebiasaan dan Sikap yang Membangun Seorang pemimpin*, (Penerjemah: Vonny Sijabat), Jakarta: Metanoia Publishing.
- [7] Lickona, Thomas, 2016. *Persoalan Karakter, Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya*, Bumi Aksara: Jakarta.

- [8] Yudi Latif, 2021. Moral Kepemimpinan (Makrifat Pagi), www.instagram.com.
- [9] Service, R. W. and Carson, C. M. (2009). Management and Leadership: Religion The “Mother of all Context.” *Interbeing Journal*, 3(1): 37-43.
- [10] Wah, S. S. (2010) Confucianisme and Chinese Leadership. Chinese management studies. 4 (3): 280-285. <https://doi.org/10.1108/17506141011074165>
- [11] Sinha, J.B.P. (1980). The Nurturant Task Leader: A Model of the Effective Executive. New Delhi: Concept Publishing Company.
- [12] Aldulaimi, S.H., 2019. Leadership Concept and Constructs in Arabic Philosophy, *Journal of Economic Cooperation and Development*, 40, 2 (2019), 193-210.
- [13] House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W., and Gupta, V. (2004). Culture, Leadership, and Organizations: The Globe Study of 62 Societies. London: Sage Publications.
- [14] Beekun, R. (2008). Is Muhammad (p) a Transformational Leader? keynote address to the Conference on Islamic Management and Leadership Ethics, May 20-21, Kuala Lumpur.
- [15] Service, R. W., & Reburn, J.P., 2017. The Character of Leadership: is Leadership, <https://www.researchgate.net/publication/320217339>.
- [16] Karande, K, Rao, C.P. and Singhakpadi, A. 2002. “Moral philosophies of managers: a comparison of American, Australian, and Indonesian cultures”, *European Journal of Marketing*, Vol. 36 No. 7/8, pp. 768-91.
- [17] Kennedy, J.C. 2002. “Leadership in Malaysia: traditional values, international outlook”.
- [18] Saufi, R.A., Wafa, S.A. and Hamzah, M.Y.Z. 2002. “Leadership style preferences of Malaysian managers”, *Malaysia Management Review*, Vol. 37 No. 1 pp 1-10.
- [19] Javidan, M., Dorfman, P.W., de Luque, M.S. and House, R.J., 2006, In the eye of the beholder: Cross culture lessons in leadership from project Globe. *Academy of management perspectives*, 20 (1), 68-90

- [20] Heenan, John, 2008. *Character the Key to Leadership*, <https://www.pnbhs.school.nz/wp-content/uploads/2015>, diunduh April 2021.
- [21] Tarigan, N.P., Siregar, C., Panjaitan, H., 2012. Kualitas Keberanian Marta Tilaar (Pemimpin Martha Tilaar) Dalam Bisnis Berbasis Tanaman Untuk Kecantikan dan Obat, *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 12, No. 3, pp. 257-274.
- [22] Zauder, D.A. 2000. Integrity: An essential executive quality. In *Leaders and the leadership process*. Eds. J. Pearce and J. Newstom. New York: R. Irwin.
- [23] Kertamuda, F.E., 2016. Kiat Manajemen: Keberanian Pemimpin Kerendahan Hati, <https://www.paramadina.ac.id/content/media/>, diunduh 17 Mei 2021
- [24] Sevira, M., 2018. Evolusi Kepemimpinan, Menjadi Pemimpin yang "Fleksibel", www.kompas.com, diunduh 18 Mei 2021.
- [25] Jonan, Ignatius, 2018. Pemimpin Harus Memiliki Bakat dan Pengalaman <https://mediaindonesia.com/>, diunduh 18 Mei 2021.
- [26] Carnegie, Dale, 2009. *Leadership Mastery, Sukses Memimpin Diri Sendiri dan Orang Lain*, Meraih Posisi No. 1, Jakarta: Gramedia.
- [27] Arcement, Billy 2016. 4 virtues that sound leaders possess, <https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2016/06/4-virtues-that-sound-leaders-possess.html>, diunduh 21 Mei 2021.
- [28] Khalfa, J. (editor), 1994. *What is Intelligence?* New York: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- [29] Sternberg, R. J., 1996. *Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life*. New York: Simon & Schuster.
- [30] Goleman, D. *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books, 1995.
- [31] McIntosh, F., 2011. *The Relational Leader: A Revolutionary Framework to Engage Your Team*. Boston MA: Course Technology.
- [32] Hesselbein, F. and Cohen, P. M. (Editors). *Leader to Leader: Enduring Insights on Leadership from The Drucker Foundation's Award-Winning Journal*. San Francisco: Jossey-Bass, 1999.
-

- [33] Chopra, D., and Mlodinow, L. *War of Worldviews*. New York: Harmony Books, 2011.
- [34] Blanchard, K. *Leading at a Higher Level*. New York: Prentice Hall, 2007.
- [35] Yukl, G., 2013. *Leadership in Organizations*, 8th Edition, State University of New York: Albany.
- [36] Safire, W. & Safire, L. *Leadership*. New York: Galahad Books, 2000.
- [37] Fullan, M. *Leading in a Culture of Change*. San Francisco: Jossey-Bass, 2001

Ideologi Pancasila dan Kesadaran Sejarah

I Wayan Legawa ¹

Pengantar

Ideologi sebagai suatu gagasan dasar atau *guiding principles* merupakan pedoman yang berangkat dari yang dipikirkan dan dicita-citakan serta disusun dalam suatu ajaran (doktrin), *any set of general ideas philosophical program*. Ideologi ini berfungsi untuk mengikat kelompok atau bangsa menjadi satu kesatuan untuk mengejar cita-cita bersama, memberikan pedoman untuk bertindak serta mendorong bangsa untuk berjuang di dalam mengejar tujuan bersama [1]. Secara harfiah berarti *a system of ideas* yang menunjuk pada seperangkat nilai yang terpadu, berkenaan dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Ideologi terbuka, telah terdapat rangkaian konsensus nasional. Ideologi terbuka dimaksudkan ideologi yang berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan lingkungan sekitarnya [2]. Dengan adanya upaya mengkaji ulang beberapa ideologi dunia maka diperlukan konsolidasi terhadap ideologi Pancasila.

Perkembangan yang dinamis di tengah suasana globalisasi mengharuskan suatu ideologi tidak “termakan arus” sehingga akan menghilangkan jatidiri dan landasan filosofis yang mendasari ideologi Pancasila. Terjadinya *multi-interpretable* dalam memahami nilai-nilai Pancasila mengakibatkan terjadinya gesekan antar kepentingan yang bermain, yang salah satunya nampak ketika dilakukan pembahasan Undang Undang yang berkaitan BPIP.

Fenomena lainnya nampak dari hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA:

“Pada 2005, publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2%. Lima tahun kemudian, tahun 2010, angkanya menjadi 81,7%. Tahun 2015 angkanya menjadi 79,4% dan

¹ Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

tahun 2018 menjadi 75,3%. Menurunnya angka warga pro-Pancasila merata di berbagai level pendidikan. Warga pro-Pancasila di kalangan lulusan atau di bawah SD pada 2005 mencapai 86,5%, pada 2010 mencapai 83,1%, pada 2015 mencapai 80,1%, dan pada 2018 mencapai 76,3%. Sedangkan lulusan SLTP yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai 84,7%, pada 2010 sebesar 81,3%, pada 2015 mencapai 80,0%, dan pada 2018 sebesar 76,5%. Untuk lulusan SMA, yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai 83,3%, pada 2010 mencapai 80,1%, pada 2015 mencapai 78,4%, dan pada 2018 sebesar 74,0%. Untuk yang pernah kuliah atau di atasnya yang pro-Pancasila, pada 2005 mencapai 82,2%, dan angka persentase ini terus menurun. Pada tahun 2018, persentasenya mencapai 72,8%” [3].

Pancasila sebagai Ideologi Nasional telah diterima, akan tetapi dalam praktek kenegaraan masih terjadi permasalahan baik yang berkaitan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat maupun strategi dan teknik dalam membumikan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Ideologi, dan Dasar Negara serta dasar hukum tertinggi di Indonesia kurang diangkat sebagai paradigma ilmu pengetahuan [4]. Sebenarnya telah ada beberapa regulasi dalam rangka menjaga, mengamalkan dan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas MPR, kemudian MPR membentuk Badan Sosialisasi yang kemudian kita kenal dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Walaupun telah ada upaya untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat seperti dengan membentuk Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan juga adanya Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila (BPIP), ternyata dalam prakteknya masih terjadi anomali dalam bagaimana membumikan Pancasila baik dalam masyarakat umumnya, khususnya dalam lembaga Pendidikan. Hal ini tampak dari keberadaan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003) dan juga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada hal yang mengingatkan kita untuk jangan melupakan sejarah termasuk bagaimana kita sebagai bangsa memiliki kesadaran sejarah sehingga nilai-nilai sejarah yang menjadikan kita bijaksana.

Historisitas Pancasila Sebagai Ideologi Negara RI

Berbicara tentang historisitas Pancasila tidak bisa dilepaskan dengan munculnya kesadaran nasional dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Kesadaran nasional berkaitan dengan beberapa peristilahan atau pengertian tentang bangsa (*nation*), rasa kebangsaan/nasionalisme, ketahanan nasional. Kesadaran tentang (*nasional, natie, nation*) adalah pandangan yang terkait dengan soal perasaan, soal kehendak (tekad) semata-mata untuk kehidupan bersama (*le désir de vivre ensemble*) yang timbul antara golongan besar manusia yang nasibnya sama dalam masa lampau terutama dalam penderitaan bersama [5]. Kesadaran nasional memiliki fungsi sentral, adalah suatu kesadaran yang menempatkan pengalaman, perilaku serta tindakan individu dalam kerangka nasional, kesemuanya ditempatkan dalam konteks secara nasional baik secara sinkronis maupun diakronis [6].

Rasa kebangsaan menunjukkan pada semangat kadar nasionalitas. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia merekam kepemilikan rasa/kesadaran kebangsaan itu. Penentuan kepastian tentang munculnya kesadaran nasional terjadi bukanlah suatu perkara yang sederhana, hal ini berkaitan dengan gejala yang terjadi dalam masyarakat. Kapan persisnya timbul secara pasti sangat sukar ditentukan oleh karena berkaitan dengan suatu proses pertumbuhan serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan politik

masyarakat Indonesia. Dari sudut material kesadaran nasional telah ada jauh sebelum abad ke XX. Semenjak bangsa asing menanamkan kekuasaannya di bumi nusantara sebenarnya telah muncul keinginan untuk mengusir kekuasaan asing tersebut yang sebenarnya merupakan sebuah kesadaran bangsa akan eksistensinya.

Bangsa Indonesia dalam gerak sejarahnya baik secara vertikal maupun horizontal membentuk rasa/kesadaran kebangsaan tersebut sejak periode Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei, dan diperingati oleh bangsa Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 tertanggal 16 Desember 1959. Sejak saat itu bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai salah satu tonggak/momentum dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengalaman bangsa Indonesia selama penjajahan memang menunjukkan arah rasa kebangsaan meski dalam taraf primordial dan bersifat tribalistik [7]. Perjuangan fisik rakyat dan penguasa kita terhadap ulah penjajah menunjukkan, kiranya bukan tanpa suatu rasa/kesadaran harga diri primordial antisipatif. Rasa/kesadaran kebangsaan muncul dari sifat primordialis dan tribalis yang sehat. Matrik di bawah ini memberikan gambaran tentang peristiwa.

Rentang Waktu	Pra Nasional	Nasional	Pasca Nasional
Formasi sosial	1908	1908-1985	1985
Sistem Pengetahuan	Pra kapitalisme	Kapitalisme	Pasca Kapitalisme
Kohesi sosial	Mitos	Ideologi	Ilmu
Kecenderungan	Primordial kultural	Nasional Politisasi	Sistem sistemisasi
Agen sejarah	Orang keramat	Politisi	Intelektual

Peristiwa kesadaran nasional bertolak dari faktor kohesi sosial sebagai dasar integrasi dan solidaritas sosial terbentuk oleh kekuatan sejarah. Pada gilirannya kekuatan sejarah akan membentuk kesadaran

sejarah. Suatu kecenderungan sejarah adalah arus besar yang menandai perjalanan alur sejarah dari suatu periode tertentu. Kecenderungan sejarah mengandung golongan dominan yang memegang posisi kunci. Pada periode 1908-1928 bangsa Indonesia mengalami integrasi yang bersifat *etno-linguistik* yang mencapai puncaknya pada saat diucapkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Pada Periode 1928-1945 Bangsa Indonesia mengalami suatu proses yang bersifat *konstitusionalisme* melalui kesadaran nasional yang dipelopori para tokoh pergerakan nasional dengan tujuan Indonesia Merdeka. Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan itu maka terdapat serangkaian langkah politik yang terjadi. Peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 7 September 1944 dimana saat itu Perdana Menteri Jepang *Kuniaki Koiso* dalam persidangannya di Parlemen Jepang (*Teikoku Gikai*) mengumumkan berdirinya Pemerintahan Kemaharajaan Jepang. Dalam putusan itu juga bahwa Hindia Timur (Indonesia) akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Tentunya janji ini merupakan upaya untuk menarik perhatian/simpaty rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam menghadapi peperangan melawan Sekutu.

Dalam kaitan inilah kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 *Saiko Shikikan* mengumumkan dua hal yaitu: (1) akan didirikan suatu badan yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*); (2) akan dilakukan pembicaraan mengenai kemerdekaan. Tindakan ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan Perdana Menteri Kuniaki Koiso tentang kemerdekaan yang kelak dikemudian hari. Dalam Maklumat *Gunseikan* Nomor 23 tertanggal 29 Mei 1945 pembentukan BPUPK dimaksudkan melakukan penyelidikan terhadap hal-hal yang penting, sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia "Asia Raya". Maklumat ini diterbitkan pada tanggal 29 April 1945 yang berisi tentang tugas dari BPUPK yaitu: " *Mempelajari semua*

hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam tata pembentukan negara Indonesia”[4].

BPUPK ini beranggotakan 60 orang termasuk didalamnya golongan Arab, peranakan Belanda dan orang Jepang. Lembaga yang secara resmi didirikan pada 29 April 1945 dengan ketuanya dr Radjiman Wediodiningrat bertempat di gedung *Cuo Sangi In* jalan Pejambon No. 6 Jakarta (sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila). Dalam peresmian itu dihadiri oleh Jendral Itagaki (Panglima Wilayah Tentara Ketujuh yang bermarkas di Singapura), Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara Keenambelas di Jawa). Dalam acara tersebut dikibarkan bendera Hinomaru oleh Mr.A.G.Pringgodigdo, dilain pihak Toyohiko Masuda mengibarkan Bendera Merah Putih. Peristiwa ini ternyata membangkitkan semangat para anggota BPUPK dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPK) mulai mengadakan persidangan dalam rangka merumuskan Undang Undang Dasar yang diawali dengan membicarakan tentang “**dasar**” Negara Indonesia Merdeka yang akan dibentuk. Pembahasan berkaitan dengan dasar negara, persidangan BPUPK dimulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang pleno pertama tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya sebagaimana yang tertuang dalam Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPK dan PPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1995, yang ditawarkan adalah bentuk negara dan bukan dasar negara. Dalam sidang tersebut Muhammad Yamin *mengusulkan*, “..... Jadi bentuk Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat itu ialah suatu republik Indonesia yang tersusun atas paham unitaris” [4].

Pada saat persidangan berikutnya yang berlangsung 31 Mei 1945 Soepomo mengemukakan pokok-pokok pikirannya yang menekankan pada syarat-syarat berdirinya suatu negara yang terdiri dari: daerah, rakyat sebagai warga negara serta pemerintahan yang

berdaulat menurut hukum internasional. Beliau juga menawarkan suatu bentuk “negara integralistik” yang diartikan sebagai negara kesatuan. Negara yang tidak memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri melampaui semua kepentingan sebagaimana yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller dan Hegel.

Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengawali dengan mengatakan,

“Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah-dalam bahasa Belanda- “Philosofische grondslag” dari Indonesia Merdeka.”[8].

Selanjutnya Ir. Soekarno menyampaikan uraiannya:

“Philosofische grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka Tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada Tuan-tuan sekalian,

apakah yang akan saya artikan dengan perkataan “merdeka”. “Merdeka” buat saya ialah political independence, politieke onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid” [8].

Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Soekarno menawarkan menjelaskan dalam pidatonya yang bernama Pancasila seperti apa yang tercantum dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945:

“Saudara-saudara! **Dasar-dasar Negara** telah saya usulkan. **Lima bilangannya**. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Inderia. Apalagi yang lima bilangannya ? (Seorang yang hadir: “Pendawa Lima”). Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip; **kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan** lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah **Pancasila**. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi [8].

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian kita kenal dengan UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946 yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Rumusan dan sistematika Pancasila yang kita kenal sekarang didasarkan atas Instruksi Presiden RI Nomor 12 tanggal 13 April 1968 yang isinya tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan/pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
5. Permusyawaratan/Perwakilan
6. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila tersebut diatas dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Oleh karena itu sebagai hukum derajat tertinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia. BPIP dalam kajiannya menyebutkan bahwa secara ontologis, Pancasila dilihat sebagai Dasar Negara, ideologi negara dan filsafat hidup bangsa yang rumusannya terpumpun dalam Pembukaan UUD RI 1945. Secara epistemologis Pancasila merupakan pandangan dunia yang keberadaannya telah menyejarah dan telah dikehendaki bersama sebagai falsafah bangsa yang bersumber dari pengalaman (*empiric*), akal budi (*rationality*) dan kearifan (*wisdom*) bangsa Indonesia dalam ladang luhur tradisi Nusantara klasik [4].

Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila [9].

Hakikat Sejarah

Kata sejarah yang kita kenal dalam bahasan Indonesia berasal dari Bahasa Melayu, yang mengambil alih dari Bahasa Arab, *Syajarah* [10]. Dalam bahasa lain kata sejarah terkait dengan istilah/kata *geschiedenis*, *historia*, *history*, *geschichte* yang kurang lebih memiliki makna suatu peristiwa. Secara etimologis sejarah memiliki empat pengertian yaitu: (1) sesuatu yang telah berlalu, suatu peristiwa, suatu kejadian; (2) riwayat dari peristiwa/kejadian itu; (3) semua pengetahuan tentang masa lalu yaitu duduk persoalan tertentu pada umumnya, dan khususnya tentang masyarakat tertentu; (4) Ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan [10].

Sejarah dengan demikian dapat berarti semua perbuatan manusia dimasa lampau dan juga ilmu tentang kejadian masa lampau yang disusun berdasarkan fakta sejarah sebagai sumber dengan menggunakan metodologi tertentu. Walaupun sejarah merupakan hasil perbuatan manusia pada masa lampau, tentu tidak semua kejadian masa lampau ditulis dalam sejarah karena masih diperlukan pertimbangan berdasarkan atas pentingnya dan tujuan yang ingin dicapai.

Pengertian sejarah pada dasarnya mengungkap segi segi obyektif dan subyektif sejarah [11]. Pengertian objektif sejarah menunjuk pada masa silam yang mutlak sekali jadi atau *einmaligkeit* seperti apa adanya. Sementara itu pengertian subyektif tentang sejarah menunjuk pada peristiwa silam yang nisbi dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini terjadi karena fenomena: (1) peristiwa silam mengandung banyak data empirik; (2) kemampuan dan pertimbangan subyek dalam menentukan data; (3) pembentukan fakta-fakta sejarah memerlukan langkah-langkah pengerjaan; (4) penyajian kisah sejarah memerlukan wawasan tertentu. Walaupun demikian pengertian sejarah selalu bertumpu pada triloginya yakni *homo spatio tempora* yakni manusia yang *meruang* sekaligus *mewaktu*, dalam aneka peristiwa yang dialaminya

baik perorangan maupun bersama-sama. Namun tidak semua peristiwa merupakan sejarah, hanya suatu peristiwa merupakan sejarah apabila terjadi dalam ruang dan waktu tertentu yang bersifat sosial dan mempunyai arti penting.

Pengertian sejarah secara *politis* pada gilirannya menimbulkan permasalahan antara sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni. Berangkat dari pengertian tersebut bahwa sejarah sebenarnya menunjukkan sebagai peristiwa historis memiliki aneka fungsi dalam sistem pengetahuan. Karena itu muncullah kemudian Antropologi Sejarah, Sosiologi Sejarah, Filsafat Sejarah, Ilmu Sejarah, Metode Sejarah, Geohistori dan sebagainya. Disiplin sejarah hingga kini cenderung dikelompokkan berdasarkan pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah dan ilmu [12].

Pengertian sejarah sebagai peristiwa mengacu pada segi obyektif sejarah, sementara sejarah sebagai kisah dan ilmu mengacu pada segi subyektif sejarah. Sejarah sebagai kisah merupakan penuturan ungkapan pengalaman yang terjalin dalam suatu peristiwa yang (1) bersifat sementara; (2) hikayatnya tidak pernah tuntas digali; (3) lepas, sekaligus terikat ruang, waktu dan suasana; (4) menjalin relasi pencerita dan pendengar yang berhak sama dalam pengalaman; (5) diwarnai daya imajinasi untuk menyatakan kebenaran pengalaman; (6) menyatakan peristiwa, makna, nilai bagi situasi dan orang tertentu; (7) mengandung sejarah [13].

Paparan sejarah sebagai kisah merupakan paparan sejak zaman Herodotus hingga abad ke XVIII. Beberapa dekade menjelang abad ke XVII nampak bahwa *common sense* telah memiliki kesangsian sebagai prinsip. Sejarah abad ke XVII memunculkan kritik terhadap sejarah sebagai kisah. Kritik itu mencapai kematangannya dalam metodologi sejarah abad ke XIX. Ketika itu muncul pengertian-pengertian sejarah ilmiah, sejarah kritis, sejarah empiris, sejarah metodologik. Aneka predikat tersebut tampaknya sering dikaitkan dengan nama Leopold Von Ranke yang mencetuskan sejarah harus

memaparkan kejadian yang sebenarnya/*wei es eigentlich gewesen* [14]. Penegasan Von Renke itu nampaknya dipengaruhi oleh alam pemikiran *positivistik* dampak dari kecemerlangan ilmu-ilmu alamiah atau *Naturwissenschaften*. Sementara itu pembebasan diri sejarah dari keterkungkungannya pada *seni* tidak menjadikannya sejarah mencapai taraf keilmuan ilmu alamiah. Sejarah masuk pada ilmu kerohanian atau *Geisteswissenschaften*. Keilmuan sejarah ternyata dalam kriteria memiliki hukum kausal, metode, spesialisasi berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya [15].

Sejarah sebagai ilmu adalah teori untuk menemukan kebenaran-kebenaran dari sumber-sumber yang tepat bagi bagian masa silam yang akan diteliti. Sementara itu ilmu sejarah yang meneliti secara sistematis perkembangan manusia masa silam yang nampak dalam aneka peristiwa kemudian menilainya secara kritis untuk pedoman penilaian masa kini secara arahan ke masa depan [16]. Ilmu sejarah bersifat terbuka, memberi wawasan tentang perkembangan dan menyiratkan dinamika pendukungnya dalam menatap masa depan. Sementara itu sejarah mengikuti aliran filsafat rangkaian siklis yang selalu meninggi [16]. Ilmu sejarah yang bermutu tinggi memerlukan suatu konsepsi tentang arti waktu dan peran manusia dalam peristiwa dunia. Ternyata fatalisme religius atau materialisme dialektika tidak mampu memberi konsepsi tersebut. Peningkatan mutu ilmu sejarah dapat dilakukan dengan jalan mempertinggi martabat manusia sebagai titik temu waktu silam, kini dan yang akan datang. Manusia mampu menyadari dan membuat perhitungan perubahan dahulu dan kemudian berdiri diatas aneka peristiwa dan tidak hanyut oleh gelombang arus waktu. Konsep waktu menunjuk pada perhitungan aneka perubahan menurut sekuensnya atas dahulu dan kemudian. Sedang peranan manusia dalam peristiwa menunjuk pada penghayatan kesadaran waktu sebagai pencerminan dalam mengantisipasi peristiwa.

Ilmu sejarah tidak bersifat meramalkan, kesanggupan ilmu sejarah dalam memperdalam pemahaman mengenai masa kini, mengungkapkan sedikit masa depan berdasar pemahaman masa silam. Secara garis besar fungsi ilmu sejarah adalah: (1). Menentukan batas masa silam yang dipilih, (2). Memastikan pendekatan yang dipakai, (3). Membuat penggalan-penggalan peristiwa, (4). Mengartikan peristiwa berdasar sudut pandangan tertentu, (5). Deskripsi rekonstruksi [16].

Manusia sebagai subyek dan obyek sejarah

Sejarah tanpa manusia adalah khayal, karena manusia sebagai pembuat sejarah/pencipta sejarah dan pelaku sejarah. Hal ini karena sejarah tidak lain dari akumulasi pengalaman-pengalaman yang kemudian ditulis menjadi sejarah. Sejarah menceritakan riwayat hidup/kehidupan manusia, riwayat tentang manusia itu diceritakan oleh manusia sendiri pada orang lain, cerita itu dibaca dan bahkan dialami oleh manusia itu sendiri. Dalam kaitan inilah manusia dapat berperan sebagai obyek dan subyek sejarah. Cerita tentang kejadian (yang semula hanya merupakan cerita dari mulut ke mulut) kemudian harus ditulis. Dalam penulisan ini peran subyek (penulis) sangat besar.

Sejarah memang ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan, akan tetapi fakta sejarah kadang sudah tidak murni lagi seperti yang dikatakan oleh E.H.Carr sebagai berikut: *"the facts of history never come to us pure, since they do not and can not exist in a pure form. They are reflected through the mind of the record. It follows which it contains but the historian who wrote it"* [15]. Bahwa fakta sejarah tidak pernah sampai pada kita secara murni, karena fakta tidak terdapat dan tidak dapat berada dalam suatu bentuk yang murni. Fakta selalu merupakan bias lewat pikiran perekam. Akibatnya jika kita mengambil suatu karya sejarah, perhatian kita tidak terarah lagi pada fakta yang terkandung di dalamnya, akan tetapi terpantul pada sejarawan yang menulisnya.

Walaupun demikian fakta sejarah dapat diuji secara empiris karena pemunculan suatu fakta yang sudah dipilih menunjukkan subyektivitas dalam penulisan sejarah merupakan bagian terakhir dalam kerangka metodologi sejarah. Langkah ini merupakan suatu fase yang paling berat dan menuntut responsibilitas dari penulis sekaligus merupakan legitimasi terhadap dirinya [15]. Subyektivitas sejarah dipengaruhi oleh banyak hal, obyek yang tidak dinilai sebagaimana seharusnya, tetapi dipandang sebagai kreasi. Oleh karena itu istilah sejarah serba subyek memberikan indikasi adanya kecenderungan pandangan subyektivistik. Sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai cerita tidak dapat terlepas dari subyek (manusia) sebagai penulis sejarah.

Seperti disebutkan di atas, bahwa manusia adalah subyek dan sekaligus sebagai obyek sejarah. Peran manusia amatlah besar baik sebagai penulis sejarah maupun dalam kaitannya dengan kejadian itu sendiri. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa peristiwa peristiwa besar amat terkait dengan orang-orang besar dalam sejarah. Oleh karena itu sering muncul adagium tentang sejauh mana manusia dapat menentukan jalannya sejarah.

Pandangan determinisme (*otonom*) kejadian/sejarah itu dapat ditentukan oleh manusia. Dengan demikian munculnya peristiwa besar dalam sejarah karena ditentukan oleh tokoh tertentu sebagai orang besar. Pandangan semacam ini kurang mendapatkan apresiasi dalam penulisan sejarah nasional Indonesia. Tokoh sejarah/pelaku sejarah kita juga tidak apriori mengklaim hasil perjuangan itu milik sekelompok orang atau individu. Dalam sejarah peran orang besar dalam sejarah mungkin saja terjadi seperti yang dikatakan oleh Thomas Carlyle yang hidup pada abad ke XIX menyatakan bahwa kejadian-kejadian dalam sejarah itu digerakkan oleh Orang Besar. Orang besar itu disebut sebagai “hero atau pahlawan”. Dalam bukunya *The Heroes, Hero Worship and the Hero in History*, 1840 menyatakan, “ *Universal History, the history of what man has accomplished in this*

world is at bottom the history of the Great Men, who have worked here". Orang besar sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) mereka yang bertindak aktif (*the hero of historical action*); dan (2) mereka yang besar karena sumbangan pikirannya (*the hero thought*). Paham otonom kurang memiliki nilai edukatif karena akan menimbulkan kultus individu. Namun demikian jalannya sejarah tidaklah mutlak dapat ditentukan oleh orang besar karena ada pandangan lain yaitu determinisme sosial, yaitu bahwa sejarah itu lebih banyak digerakkan oleh kehendak masyarakat itu sendiri [15].

Sejarawan Sidney Hook dalam bukunya *The Hero in History* yang diterbitkan tahun 1943 menyatakan bahwa yang berperan sebagai orang besar karena kebetulan ada kesempatan ikut arus masyarakat (*the eventful man*) dan bisa juga mereka menjadi orang besar karena menciptakan suatu kejadian besar (*the even making man*)[15]. Sejarah yang merupakan kejadian masa lampau, bagi kita yang hidup sekarang tentu memiliki keterbatasan terhadap masa lalu itu, terkadang peninggalan sejarah yang sampai pada kita kurang lengkap (belum ditemukan), tidak mampu memberikan interpretasi terhadap benda temuan (membaca) juga merupakan salah satu subyektivitas dalam menampilkan fakta.

Jika dilihat dari aspek penulis sejarah, terdapat banyak hal yang menyebabkan subyektivitas dalam penulisan sejarah antara lain: pertama, *personal bias*: secara pribadi setiap penulis sejarah memiliki "warna" yang dapat didasarkan atas pertimbangan agama yang dianut, pendidikan yang melatar belakanginya, suku bangsa atau kewarganegaraan yang bersangkutan. Faktor faktor inilah yang sebenarnya dapat mewarnai karyanya, yang mencerminkan suatu yang bersifat subyektif. Kedua, *group prejudice* (prasangka kelompok) yaitu kelompok dalam hal ini dapat berupa rezim yang berkuasa, komunitas keagamaan, partai politik. Kita sering mendengar ganti pemerintahan buku pelajaran sejarah juga berubah disesuaikan dengan kepentingan rezim yang bersangkutan. Sebagai contoh bahwa

pada masa Orde Baru Serangan Umum 1 Maret selalu diperingati dengan upacara hari-hari besar bersejarah secara nasional.

Tokoh yang mengemuka dalam peristiwa itu adalah Soeharto sebagai orang yang memerintahkan dilakukannya Serangan Umum 1 Maret 1949 ke Yogyakarta yang kemudian dapat menduduki selama 6 jam. Dalam penelitian selanjutnya ternyata yang memerintahkan Serangan Umum itu bukan Soeharto tetapi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tumbangnya kekuasaan Soeharto peringatan itu tidak dilakukan lagi. Penggantian rezim juga berimplikasi terhadap cerita tentang satu peristiwa sejarah. Ketiga, tujuan yang ingin dicapai: Tidak jarang sejarah yang ditulis merupakan “pesanan” karena sebagaimana kita sadari sejarah sebagai pisau bermata dua, yang memiliki dua sisi yang konstruktif dan destruktif. Hasil rekonstruksi sejarah yang bersifat *istana-sentris* cenderung diarahkan untuk meningkatkan kewibawaan sang penguasa. Keempat, pendekatan yang dipilih: Pendekatan yang dimaksud adalah cara pandang (*approach*) terhadap sesuatu berdasarkan parameter tertentu. Pendekatan politik terhadap suatu fenomena akan menghasilkan kesimpulan yang mengarah pada aspek politik. Karena sejarah yang memiliki aspek *multi interpretable*, maka pendekatannya pun sebaiknya tidak dari satu aspek saja melainkan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial [17].

Kelima, *interpretation* (penafsiran) yang berbeda: Sejarah ditulis atas dasar fakta yang ditemukan, akan tetapi perlu disadari bahwa sejarah bukan semata mata sederetan fakta. Sejarah merupakan rekonstruksi masa lampau yang di dalamnya sarat dengan interpretasi. Fakta yang kita miliki tentang Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825-1830 menghasilkan konstruk yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan, tetapi sebaliknya bagi Belanda Pangeran Diponegoro adalah penghianat. Dalam menulis sejarah yang bersifat Indonesia

sentris (*National Centries*) diperlukan landasan interpretasi tentunya harus disesuaikan dengan filsafat bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Kesadaran Sejarah

Sejarah sebagai kejadian masa lalu, namun demikian tidak vakum hanya dalam konteks masa lampau, akan tetapi terkait juga dengan masa kini dan masa yang akan datang. Itulah sebabnya sejarah disebut memiliki tiga dimensi yaitu masa lampau (*the past*), masa kini (*the present*) dan masa yang akan datang (*the future*). Masa datang memang bukan/belum sejarah, masih samar-samar. Masa itu masih penuh dengan kemungkinan yang tidak/belum dapat dipastikan secara tepat oleh manusia yang hidup di masa kini. Dalam kaitannya dengan kesadaran sejarah ini ada fenomena yang menarik berkaitan dengan gejala “demam sejarah” seperti penetapan hari lahirnya kabupaten/kota di suatu daerah.

Gejala ini menandakan adanya kecenderungan umum untuk menentukan identitas berdasarkan sejarahnya atau lebih tepat proses genesisnya [17]. Mulai nampak juga kunjungan yang dilakukan ke tempat bersejarah (wisata budaya), khususnya saat liburan sekolah. Tempat-tempat yang sarat dengan nilai-nilai sejarah mulai menjadi destinasi masyarakat manakala mereka harus meluangkan waktu senggangnya. Terlepas dari fenomena itu memiliki muatan rekreatif, sedikit banyak sebenarnya telah nampak akan adanya gejala pemahaman akan peninggalan masa lalu (sejarah) yang sekecil apapun pada gilirannya akan dapat membangkitkan kesadaran sejarah.

Kesadaran sejarah tidak harus berhenti pada pemahaman akan fakta-fakta, walau harus bermula dari pengenalan akan fakta (kognitif), sehingga dapat disebut bahwa sejarah adalah ingatan manusia yang tercatat (*history might be defined by analogy as the recorded memory of mankind*) seperti yang dikemukakan oleh Dr. Ruslan Abdulgani[18]. Kesadaran (*consciousness*) mencakup cita rasa yang ada dalam hati nurani manusia. Oleh karena itu kesadaran sejarah mencakup: (1) pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah serta

hubungan kausalnya; (2) pengisian alam pikiran kita dengan logika; (3) peningkatan hati nurani kita dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan untuk menghadapi masa sekarang dan masa depan, dengan belajar dan bercermin kepada pengalaman-pengalaman masa lampau [18].

Dengan demikian kesadaran sejarah berkaitan dengan sikap kewajiban atau *mental attitude* dan *state of mind* yang berproses dalam perjalanan sejarah manusia. Sikap ini harus ditanamkan sejak awal melalui proses pendidikan. Betapa pentingnya kesadaran sejarah itu ditanamkan, salah satunya tercermin seperti yang pada tulisan di pintu keluar Museum Nasional Mexico yang berbunyi:

“We leave the museum behind, but not history, because history continues with our life. The Motherland is a continuity, and we are all labourers toiling for its greatness. Out of the past we receive the strength required for the present. Out of the past we receive the purpose and couragement for the future. Let us then realized the responsibilities for freedom, in order to deserve more and more the honour of being Mexicans”[16].

(Kita meninggalkan museum, akan tetapi tidak meninggalkan sejarah, oleh karena sejarah berjalan terus dengan kehidupan kita. Tanah tumpah darah merupakan kesinambungan, dan kita semua adalah pekerja yang membanting tulang untuk kebesarannya. Dari zaman lampau kita menerima kekuatan yang dibutuhkan untuk zaman sekarang, dari zaman lampau kita menerima niat/tujuan dan dorongan/keberanian untuk hari depan. Mari kita menyadari tanggung jawab kemerdekaan kita, agar kita makin patut menerima kehormatan sebagai warga bangsa Mexico).

Kita sebagai bangsa Indonesia dituntut juga memiliki kesadaran sejarah tersebut, sehingga mampu dijadikan suatu pedoman atau petunjuk untuk hari depan yang lebih baik. Dilihat dari aspek historis (perjalanan sejarah bangsa Indonesia) dalam

menghadirkan kesadaran masa lampau/kesadaran sejarah diperlukan juga kehadiran dokumen dan momen masa lampau sebagai bukti empiris pengalaman yang pernah dilalui pada masa itu. Dokumen dan momen itu akan mampu membangkitkan, menumbuh kembangkan atau menghadirkan masa lampau dalam masa kini, sangat berkaitan dengan bagaimana masa lampau itu ditulis. Faktor ini juga diperlukan dalam memahami Pancasila sebagai ideologi sehingga rekonstruksi/historiografi tentang Pancasila harus didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam menampilkan munculnya kesadaran dalam perjalanan bangsa Indonesia perlu memperhatikan cakrawala yang hidup dan berkembang dalam perjalanan munculnya kesadaran sejarah itu dari suatu proses penulisan sejarah. Pengembangan usaha penulisan sejarah Indonesia perlu disebarakan dengan (berbagai latar belakang) cakrawala religio magis seperti dalam babad, hikayat, *nasiosentris* yang menggantikan *etnosentrisme* dan sejarah bangsa Indonesia menggantikan cakrawala kolonial-elitis [17]. Kesadaran sejarah pada masyarakat tradisional masih terbungkus pandangan *kosmogonis* atau *religio magis* dan belum mampu beranjak ke arah *kosmosentris*. Oleh karena itu penampakan kesadaran sejarah pada kelompok masyarakat ini cenderung menghadirkan suatu peristiwa *religio magis* lewat upacara. Melalui sistem ritual itu maka ditampilkan suatu proses aktualisasi mitologis sehingga cerita sejarah berfungsi menghidupkan kembali masa lampau [17].

Kesadaran sejarah tidak sekedar pemahaman fakta, akan tetapi meliputi cita rasa yang ada dalam hati nurani manusia. Banyak bukti yang kita temukan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kesadaran sejarah bagi suatu generasi adalah tanggung jawab sejarah dari zamannya. Oleh karena itu kesadaran sejarah dapat terekam, tercermin dalam tingkah laku subyek sejarah atau pelaku sejarah. Dalam konteks yang lebih luas (sejarah dunia), kesadaran sejarah ini menjadi pusat perhatian dunia berkaitan dengan “buku Teks Sejarah

Jepang” pada tahun 1982. Menteri Pendidikan Jepang pada bulan Juli 1981 mengumumkan contoh buku yang akan digunakan sebagai buku pelajaran di sekolah di Jepang, termuat dalam Surat Khabar Asahi tanggal 26 Juni 1982. Terminologi sejarah yang dianggap menyimpang antara lain: “ Ketika Angkatan Perang Jepang melakukan agresi (invasi) ke Cina Utara, diganti dengan kalimat : ketika Angkatan Perang maju (masuk) ke Cina Utara. Dengan kata lain istilah *Shinryaku* (agresi/invasi) diganti dengan istilah *Shinshutsu* (masuk). Terminologi yang dipakai Jepang ini mendapatkan reaksi yang sangat keras dari RRC, Korea dan Negara-negara yang ada di Asia Tenggara, karena adanya kecemasan akan militerisme Jepang. Protes yang dilakukan melalui perwakilan Jepang pada masing-masing negara itu merupakan pencerminan kesadaran sejarah dan tanggungjawab suatu bangsa terhadap generasi berikutnya.

Rasa kebangsaan menunjuk pada semangat kadar nasionalitas. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia merekam pemilikan rasa/kesadaran kebangsaan itu. Menentukan kapan sebenarnya munculnya kesadaran nasional itu bukanlah suatu yang mudah, mengingat hal tersebut merupakan gejala masyarakat dimana masyarakat selalu sarat dengan mobilitas serta pertumbuhan. Memang dari sudut material kesadaran itu sudah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kesadaran nasional bertolak dari faktor kohesi sosial sebagai dasar integrasi dan solidaritas sosial yang terbentuk oleh suatu kekuatan sejarah. Pada gilirannya kekuatan sejarah akan membentuk kecenderungan sejarah yaitu suatu arus besar yang menandai perjalanan alur sejarah dari suatu periode tertentu. Pada awal abad XX titik-titik terang penemuan kembali harga diri bangsa yang secara nyata telah muncul sebagai sebuah kesadaran nasional. Kebutuhan pendidikan telah disadari sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabaikan lagi, kesadaran ini semakin hari semakin meluas di Indonesia.

Kehadiran Pancasila melalui sebuah proses sejarah dan menyejarah. Kesadaran sejarah tidak harus berhenti pada pemahaman akan fakta-fakta, walau harus bermula dari pengenalan akan fakta (kognitif), sehingga dapat disebut bahwa sejarah adalah ingatan manusia yang tercatat (*history might be defined by analogy as the recorded memory of mankind*). Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi, Jiwa Bangsa, Kepribadian Bangsa, Pandangan Hidup Bangsa, Sumber dari Segala Sumber Hukum, Perjanjian Luhur, dan Filsafat Hidup dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya dipahami secara holistik. Munculnya interpretasi yang berbeda-beda walaupun telah terdapat kesepakatan normatif tentang Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi tidak terlepas dari kurangnya pemahaman terhadap proses sejarah lahirnya Pancasila. Oleh karena itu pengetahuan kesejarahan yang pada gilirannya akan melahirkan kesadaran sejarah adalah modal penting dalam memahami Pancasila.

Referensi

- [1] Dekker, Nyoman, 1997, Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa, Penerbit IKIP Malang.
- [2] Moerdiono, 1992, Pancasila Sebagai Ideologi, BP-7 Pusat, Jakarta.
- [3] Arismunandar, Satrio, 2019, NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi, Cerah Budaya Indonesia, Jakarta.
- [4] Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pancasila, 2019, Dialektika dan Masa Depan Bangsa, BPIP, Jakarta.
- [5] Renan, E., 1994, *Apakah Bangsa Itu*, (terjemahan), Alumni, Bandung
- [6] Kartodirdjo, Sartono, 1994, *Kebangsaan, Sejarah Nasional dan Proses Integrasi*, Sanata Dharma, Yogyakarta
- [7] Benda, H.J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Terjemahan Daniel Dhakidae. Pustaka Jaya. Jakarta.
- [8] Pusat Studi Pancasila dan Multikultural, 2019, Selayang Pandang Pusat Studi Pancasila dan Multikultural, Tim PSPM

- [9] Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, 2015, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
- [10] Gazalba, Sidi, 1981, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Bratara Karya Aksara, Jakarta
- [11] Gottschalk, Louis, 1975, *Understanding History, A Primer of Historical Method*, Alfred A Knopf. Inc, New York
- [12] Notosusanto, Nugroho, 1984, *Sejarah dan Sejarahwan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- [13] Purwanto, A.J. 1993, *Sumbangan Kemampuan Berpikir Reflektif dan Kemampuan Klarifikasi Nilai Pada Wawasan Sejarah, Thesis, Tidak diterbitkan.*
- [14] Notosusanto, Nugroho, 1965, *Hakekat sejarah dan Azas-azas Metode Sejarah*, Mega Bookstore, Jakarta
- [15] Legawa, I Wayan. 1996. *Pentingnya Kesadaran Sejarah dalam Memantapkan Kesadaran Nasional*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. IKIP Malang.
- [16] Abdulgani, R, 1964, *Penggunaan Ilmu Sejarah*, Prapanca, Jakarta
- [17] Kartodirdjo, Sartono, 1994, *Kebangsaan, Sejarah Nasional dan Proses Integrasi*, Sanata Dharma, Yogyakarta
- [18] Abdurrachman Surjomihardjo. 1980. *Arsip Nasional dan Kesadaran Sejarah*. Arsip Nasional. Jakarta

Filosofi Koperasi Dalam Konsep *Welfare State*

Suciati ¹

Pengantar

Dalam pembukaan UUD 45 mengamanatkan bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar perdamaian, keadilan sosial, melaksanakan ketertiban, memajukan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan umum. Sedangkan asas koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Hal ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama dan saling membantu dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan koperasi berarti ada keinsyafan dan kesadaran semangat dan tanggung jawab terhadap akibat dari kerja tanpa memikirkan untuk diri sendiri, akan tetapi untuk kesejahteraan bersama. Masalah solidaritas sangat penting karena koperasi tidak bisa bekerja sendiri.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai suatu negara dimana pemerintah negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya [1] Oleh karena Pembangunan ekonomi yang dilakukan dalam negara kesejahteraan harus berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Kebijakan negara harus betul-betul bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini dimana perekonomian rakyat terpuruk perlu kebijakan pemerintah dan bersama masyarakat bergotong royong, bergandengan tangan untuk mencari solusi yang bisa mengurangi beban negara untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat sehingga permasalahan bisa terselesaikan.

Filosofi Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia merupakan suatu wadah untuk

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia, dengan tidak memandang golongan dan aliran kepercayaan. Organisasi koperasi Indonesia menjamin hak-hak individu serta memegang asas-asas demokrasi. Dalam pertumbuhan koperasi di Indonesia pernah badan-badan tertentu memasukkan unsur-unsur politik sehingga tujuan koperasi menjadi kabur. Koperasi hendaknya harus mampu memainkan peranan yang sungguh-sungguh dalam tatanan ekonomi Indonesia.

UUD 45 Pasal 33 menyebutkan: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Landasan idiil koperasi adalah Pancasila yang menjadi sumber semangat dan menjadi dasar setiap pemikiran dalam mengarahkan dan menetapkan tujuan organisasi koperasi. Asas koperasi meliputi: (1) kekeluargaan, yaitu mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia bekerja sama oleh semua untuk semua; (2) gotong-royong, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, bertanggung-jawab tanpa memikirkan diri sendiri namun untuk kesejahteraan bersama.

Jelas asas kekeluargaan dan gotong-royong yang dinamis bantu-membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Koperasi walaupun pada pokok usaha organisasi ekonomi yang dibina oleh dan untuk anggota harus turut membangun masyarakat sehingga pengabdianya semakin nyata. Jadi koperasi berfungsi mempertinggi golongan ekonomi lemah sehingga dapat berdiri sendiri. Sehingga pemerintah perlu mengadakan pembinaan, bimbingan serta fasilitas dari pemerintah. Untuk mengarahkan hal tersebut perlu penyempurnaan struktur organisasi koperasi baik vertikal maupun

horizontal. Peranan pemerintah dalam menggerakkan koperasi meliputi: pertama, bimbingan yang dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan dengan melibatkan pemerintah setempat. Karena koperasi membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi, untuk itu bukan saja perencanaan dan pelaksanaan melainkan juga pengawasannya. Kedua, pengawasan untuk mengamankan dan kepentingan organisasi koperasi itu sendiri pengawasan, dilakukan untuk mengamankan kepentingan organisasi koperasi itu sendiri maupun kepentingan anggotanya. Pengawasan selain dilakukan pejabat koperasi juga oleh instansi pemerintah yang lain sesuai bidang masing-masing. Ketiga, fasilitas dalam bentuk: memberikan sesuatu, baik berupa uang subsidi atau jasa., keistimewaan baik berupa keringanan ataupun kekuatan dalam lalu lintas hukum misalnya keringanan bea meterai, hak didahulukan (preferen) terhadap panen yang dijamin bagi pinjaman yang diperoleh dari koperasi pertanian dan sebagainya.

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan lain. Dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah (Ahmad Sumiyanto, 200: 23). Tetapi karena dalam operasionalnya bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah. Demikian juga lahir Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang operasionalnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor /Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang

pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Ahmad Ifham Sholihin, 456).

Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS mempunyai payung Hukum dan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan Undang-Undang. Jadi koperasi syariah merupakan badan usaha yang bernuansa Islam yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota terutama memberi lapangan kerja bagi karyawannya bahkan memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah, peralatan ibadah serta menerima harta hibah. Tujuan membangun koperasi syariah: (1) meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah; (2) mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.

Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peranan koperasi syariah sangat berarti bagi masyarakat karena koperasi syariah tersebut merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. Koperasi syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial yang demikian juga mendukung keuangan inklusif. Artinya adanya suatu keadaan dimana

semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta menjunjung harga diri dan kehormatan (Radyati, 2012).

Hal yang ditinjau secara konsep, koperasi syariah merupakan suatu lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat terutama kalangan ekonomi lemah. Akan tetapi disisi lain, yaitu dalam bidang operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan. Diantaranya dalam operasionalisasi di lapangan tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam sendiri dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah secara sistematis dan proporsional (Aam Slamet Rusydiana, 2018). Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan koperasi syariah di antara lembaga keuangan konvensional.

Pada hal ditinjau dari latar belakang berdirinya, koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan umat Muslim. Kehadiran koperasi syariah muncul di saat Islam mengharap adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Oleh karena itu bagaimana upaya pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan koperasi yang ada di Indonesia sehingga filosofi koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan bisa terealisasi.

Konsep Negara Welfare State (Negara Kesejahteraan)

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 didesain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Secara singkat, *welfare state* sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup bagi warga negara atau Negara harus hadir dalam segala aspek kehidupan

masyarakat. Untuk mendukung perwujudan negara kesejahteraan perlu kebijakan sosial Sebagai suatu kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial, mengindikasikan pada seperangkat kewajiban negara untuk melindungi dan melayani terhadap warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia kesejahteraan sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik. Pemusatan segala urusan publik kepada negara pada kenyataannya sebuah retorika dan mustahil pelayanan publik yang demikian rumit dapat dikerjakan semua hanya oleh pemerintah. Mengingat usaha tersebut menyangkut berbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu peran swasta sangat diharapkan untuk melengkapi pemerintahan dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang optimal.

Keterlibatan swasta dalam optimalisasi pelayanan publik sangat mendukung dalam pencapaian tujuan utama *good governance*. Dalam konsep *good governance*, peran masyarakat dan sektor swasta sangat penting karena adanya perubahan paradigma pembangunan dimana peran pemerintah dalam pembangunan yang semula berperan sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi inisiator bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Hal ini bisa diwujudkan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah memiliki kapabilitas yang memadai. Di negara–negara dunia berkembang kini tidak lagi mendominasi peran penyedia pelayanan publik yang optimal. Berbeda dengan kondisi yang terjadi pada era orde baru dimana konsep demokrasi di berbagai negara masih terkesan otoriter. Sebagai contoh, terjadinya penataan kembali organisasi perburuhan.

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar tujuan bersama. Tujuan terakhir suatu negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyat (*omnum*

publicum, common good, common wealth). Menurut H. J. Laki [2] menyatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan mereka secara maksimal. Terlepas dari ideologi, bahwa setiap negara menyelenggarakan fungsi minimum yaitu: (1) melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus hadir menyelesaikan permasalahan dan bertindak sebagai stabilisator; (2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; (3) pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan negara; (4) menegakkan keadilan melalui badan-badan peradilan.

Pentingnya suatu pemerintahan memilih sistem negara kesejahteraan: (1) menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan roda pemerintahan; (2) untuk mempromosikan efisiensi ekonomi; (3) mengurangi kemiskinan; (4) mempromosikan stabilitas sosial dan kemandirian individu. Kebijakan sosial adalah kebijakan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar terhadap warga negara seperti pendidikan, pemerataan kesehatan, dasar dan perlindungan sosial terhadap kelompok yang harus dipenuhi dan dinyatakan dalam konsep *welfare state*. Upaya mereformasi sistem birokrasi dan paradigma pelayanan terhadap publik tidak bisa dilakukan secara serampangan, melainkan harus berpedoman pada seperangkat aturan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan yang jelas, dirancang berdasarkan pendekatan sistem dan kesadaran demi kebaikan serta kepentingan orang banyak. Kendati kita tetap berpegang pada prinsip demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintahan sesungguhnya merupakan salah satu penyeimbang dalam memposisikan antara kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda organisasi negara.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur, memungut pajak, menegakkan hukum, mengenakan sanksi yang merupakan serangkaian kekuasaan dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Di lain pihak masyarakat memiliki pula hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari berbagai tindakan pemerintah yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu adanya pertanggungjawaban ini sebenarnya memberikan ruang yang cukup leluasa bagi timbulnya peran serta masyarakat yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang demokratis.

Dengan pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban secara konsisten dan konsekuen, akan meningkatkan pula wibawa dan martabat pemerintah di mata rakyatnya. Apabila pemerintah dengan kerelaan hati untuk menegakkan prinsip ini maka akan tercapai beberapa hal antara lain: (1) ditegakkannya prinsip-negara, *rule of law*, supremasi hukum dan kesamaan di hadapan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) adanya pertanggungjawaban pemerintah ini mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela; (3) memperkokoh komitmen reformasi untuk mewujudkan *good governance* yang selaras dengan penguatan masyarakat madani (*civil society*).

Rendahnya kinerja birokrasi karena tidak adanya etika yang kuat yang bisa digunakan oleh pejabat birokrasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Pada umumnya pejabat birokrasi belum mampu menempatkan para pengguna jasa birokrasi sebagai pelanggan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memperjuangkan nasib dirinya dan birokrasinya. Bahkan para pengguna jasa masih diperlakukan sebagai klien yang nasibnya ditentukan oleh tindakannya. Nilai nilai seperti kesamaan, profesionalisme yang seharusnya menjadi dasar dalam pengembangan etika masih jauh dari praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Akibat diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih dijumpai di banyak birokrasi pelayanan publik.

Pelayanan publik dalam negara *welfare state* merupakan hak dari setiap warga negara, dan implikasi dari hak ini menjadi kewajiban bagi negara (pemerintah) untuk memenuhinya. Sejak awal kemerdekaan di Indonesia semangat dan komitmen para pendiri bangsa untuk berusaha memperbaiki kesejahteraan umum masyarakat salah satunya dengan memperbaiki pelayanan publik dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pendirian koperasi sebagai salah satu soko guru ekonomi masyarakat digalakkan. Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan harus terus dikembangkan dan dibina, apalagi pada masa pandemi COVID-19 dimana segala sektor ekonomi mengalami keterpurukan maka peran dari koperasi sangat diharapkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Penutup

Konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) adalah menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin tentang kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat, yang salah satunya adalah hak rakyat atas pelayanan dan keterbukaan akses informasi terhadap publik. Negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun dalam kepentingan politik sesuai dengan Pembukaan UUD 45 alinea ke empat. Sedangkan filosofi koperasi di Indonesia yang merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal yang betul mengabdikan pada kepentingan kemanusiaan, bekerja bersama didasarkan pada persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya secara gotong-royong dan bermusyawarah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Hal ini justru sejalan dengan konsep *welfare state* yang tertuang dalam pembukaan UUD 45.

Referensi

- [1] E. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- [2] M. Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [3] Mustafa Lutfi, Luthfi J Kurniawan, 2012, *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik*, Malang, Setara Press
- [4] UUD 1945
- [5] UU Koperasi No 7 Tahun 2012.
- [6] Jurnal Ekonomi Islam, Volume, Nomor 12018)
<http://jurnal.walisongo.ac.id/index.php/economia>

Perempuan Selalu di Belakang, Laki-Laki Selalu Terdepan (Studi Kasus Pembangunan Kesetaraan Gender di Yayasan Plan Indonesia)

Ludovikus Bomans Wadu ¹, Maria Fransiska Ugha Buu ²

Pengantar

Mengatasi berbagai permasalahan global menjadi perhatian negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang dicanangkan oleh PBB dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa merugikan generasi masa depan. Upaya yang dilakukan dalam bentuk kerja sama antar negara dengan fokus pembangunan pada lingkungan alam, keterkaitan manusia, sumber daya serta pengembangannya [1]. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan berbagai sektor kehidupan manusia demi kesejahteraan hidup manusia.

Berbagai sektor tersebut dimasukkan dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan *Sustainable Developments Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB demi memperhatikan kesejahteraan manusia dengan membangun sektor sektor yang menjadi prioritas global. Sektor-sektor yang diperhatikan dalam SDGs tertuang dalam tujuh belas tujuan. Ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu; (1) tidak adanya kemiskinan (2) tanpa kelaparan (3) kesehatan serta kesejahteraan (4) pendidikan yang berkualitas (5) kesetaraan gender (6) terpenuhinya air bersih dan sanitasi (7) energi terjangkau dan bersih (8) pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi (9) industri, inovasi, dan infrastruktur (10) ketimpangan berkurang (11) mempunyai kota dan komunitas yang berkelanjutan (12) konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab (13) mengatasi perubahan iklim (14) ekosistem air (15) ekosistem darat (16) perdamaian, keadilan, dan lembaga tangguh (17) kemitraan

^{1,2} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

demi mencapai tujuan [2]. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan setiap aspek kehidupan mulai dari manusia itu sendiri, alam, serta pengembangan sumber daya.

Saat ini PBB sedang menggerakkan berbagai pimpinan di dunia untuk selalu mengambil kebijakan yang berdampak baik bagi pembangunan yang berkelanjutan dengan cara menjadi aktor yang bertanggung jawab untuk pengembangan sumberdaya manusia. Target ini diharapkan tercapai pada tahun 2030 [3].

Untuk mendukung tujuan ini pada tanggal 25 September 2015 di New York, negara-negara anggota PBB menyepakati berbagai tujuan umum yang ditetapkan oleh PBB yang meliputi 17 Tujuan, 169 target, serta 304 indikator dengan target pencapaian selama 15 tahun kedepan dimulai dari tahun 2016 [4]. Dari berbagai tujuan dalam pembangunan berkelanjutan, naskah ini secara khusus membahas pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang mendukung tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.

Pembangunan dalam lingkup kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kelima [5]. Mengingat pembangunan berkelanjutan bertujuan mengusahakan keberlanjutan dunia di masa depan maka dibutuhkan kerja sama dalam berbagai lini kehidupan masyarakat dan *stakeholder* [2]. Kerja sama yang dimaksudkan dapat berupa lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada salah satu dari ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan cara ini setiap sektor masyarakat atau *stakeholder* yang memiliki visi dan misi sejalan dengan strategi global tersebut secara tidak langsung akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang demikian selayaknya didukung, dan jika memungkinkan warga negara

diharapkan dapat terlibat di dalamnya untuk memberikan sumbangsih positif bagi warga negara lainnya.

Kesetaraan Gender dan Hak Anak

Yayasan Plan Internasional Indonesia merupakan salah satu lembaga yang membantu mengatasi kesetaraan gender dan hak anak yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan ini [7]. *Plan International* memiliki tujuan memperjuangkan dunia yang adil dalam pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, sehingga mereka dapat belajar, memimpin, memutuskan, dan berkembang dengan baik [8]. Sebagai organisasi yang Independen, Plan Internasional mengusahakan hak anak agar terbebas dari kekerasan, kemiskinan, dan ketidakadilan sehingga komitmen dari organisasi ini tertuju pada hak anak dan kemanusiaan [9]. Dengan demikian Plan memiliki fokus yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kelima.

Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kelima tentu memiliki keterkaitan dengan apa yang diperjuangkan oleh Plan Internasional. Meskipun tujuan utamanya memperhatikan kesetaraan gender, tujuan pembangunan berkelanjutan kelima juga memberdayakan perempuan dan anak perempuan artinya secara tidak langsung pemenuhan hak anak secara khusus anak perempuan juga diperhatikan. Hal ini dikarenakan selain memprioritaskan kesetaraan gender pembangunan berkelanjutan kelima juga memperhatikan masalah lintas sektoral [6].

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kelima merupakan upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, mengupayakan pekerjaan perempuan yang tidak dibayar, menangani kesehatan, hak seksual, serta reproduksi wanita [5]. Melalui analisis situasi hak anak Plan Internasional di Indonesia ada lima persoalan pokok yang teridentifikasi yaitu (1) buruknya layanan kesehatan serta pengasuhan anak, (2) banyaknya tingkat kekerasan terhadap anak dan kekerasan

berbasis gender, (3) layanan informasi masih terbatas untuk memberi edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja serta perilaku beresiko (4) tingkat pendidikan masih rendah mengakibatkan kurangnya keterampilan ketika memasuki dunia kerja bagi kalangan kaum muda terutama perempuan, dan (5) kesempatan anak-anak serta kaum muda terutama perempuan ketika berpartisipasi untuk pengambilan keputusan masih sangat minim. Plan Internasional Indonesia memiliki komitmen untuk menangani persoalan ini dan berkontribusi demi pencapaian SDGs di Indonesia. Kontribusi Plan di Indonesia biasa dirangkai dalam strategi 5 tahunan Plan.

Strategi 5 tahunan Plan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kelima dikemas dalam keempat program prioritas yakni *Child Development and Protection (CDP)*, *Adolescent Health and Agency (AHA)*, *Humanitarian and Resilient (HR)*, dan *Youth Economic Empowerment (YEE)*. Keempat program utama Plan ini diwujudkan melalui pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Dalam pembangunan fisik yang dilakukan Plan sebagian memberikan bantuan langsung yang menjawab kebutuhan akan terpenuhinya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Pada pembangunan non fisik Plan berupaya mengkapasitasi pemahaman warga negara akan pentingnya menciptakan situasi sosial yang sadar gender dan pentingnya untuk menjaga hak-hak anak.

Upaya untuk menciptakan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak tentu menjadi perhatian dunia saat ini. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, "Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat". Hak anak ialah martabat anak untuk memperoleh kepentingan terbaik anak, tidak adanya diskriminasi dan bersifat universal serta dipertanggung jawabkan oleh masyarakat dan Negara [11]. Maka tidak heran jika ingin mewujudkan

keduanya dibutuhkan pembangunan berkelanjutan yang diwujudkannyatakan melalui pembangunan fisik dan nonfisik.

Kedua jenis pembangunan ini tentu memiliki titik fokus yang berbeda namun ada untuk saling melengkapi, hal ini dikarenakan fokus pembangunan yang berbeda mengarahkan pada peran pembangunan yang berbeda pula. Pembangunan fisik identik dengan pembangunan infrastruktur sedangkan pembangunan non fisik mengarah pada pembangunan sumber daya manusia [12]. Ketika melakukan sebuah pembangunan sangat diperlukan keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik [13]. Tanpa pembangunan fisik maka pembangunan nonfisik kurang maksimal begitupun sebaliknya, sebab perpaduan antara pembangunan fisik dan pembangunan non fisik tentu saling melengkapi sehingga mampu menunjang adanya pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

Naskah ini merupakan hasil penelitian ini dilaksanakan pada Yayasan Plan Internasional Indonesia, Program Implementasi Area Flores di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembangunan berkelanjutan melalui Yayasan Plan Internasional Indonesia Program Implementasi Area Flores di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui pembangunan berkelanjutan pada Yayasan Plan Internasional Indonesia diwujudkan melalui pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Adapun alasan adanya Plan adalah memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak terutama anak perempuan serta mengupayakan terwujudnya kesetaraan gender. Maka dalam kaitannya dengan ketujuh belas pembangunan berkelanjutan, Plan berkontribusi dalam tujuan pembangunan kelima yang memperhatikan kesetaraan gender atau yang biasa dikenal dengan *Sustainable Development Goal 5* (SDG 5). Berikut uraian dari kedua bentuk pembangunan yang dijalankan oleh Plan.

Pembangunan fisik

Pembangunan fisik diwujudkan melalui membantu mempercepat pengadaan akta kelahiran, pemenuhan sanitasi, membuat proposal dan laporan ketika melakukan sebuah kegiatan, dan program respon covid yang membantu pengadaan masker dan air bersih. Pembangunan fisik identik dengan pembangunan infrastruktur [12]. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Yoseph Arifin yang bertugas sebagai *Field Development Officer* dikatakan bahwa dalam program sanitasi dan kesehatan lingkungan hidup, lembaga ini memastikan kelestarian sumber daya alam terutama daerah sekitar mata air dipastikan terawat sehingga kebutuhan air minum masyarakat terjamin. Pembangunan fisik yang dilakukan Plan dalam kegiatan ini yakni mensupport adanya perpipaian bagi daerah-daerah yang membutuhkan serta ada daerah tertentu yang hanya memakai bak penampungan air hujan.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi di lapangan. Diketahui Plan mempunyai cara kerja yang transparan dan pada setiap programnya telah tertata secara teratur. Ini dibuktikan dengan adanya penetapan budget yang jelas untuk setiap kegiatannya. Dalam program *Child Development and Protection* terdapat beberapa kegiatan seperti perlindungan anak, asuhan dini atau tumbuh kembang anak, air, sanitasi. Budget yang ditetapkan Plan untuk air bersih, sanitasi senilai Rp.684.950.000 dengan sasaran 30 desa beserta pemanfaat sebanyak 2.225 jiwa. Program-program Plan dapat berjalan dengan baik karena Plan juga bekerja sama dengan pemerintah setempat bahkan bekerjasama dengan pemerintah desa tempat Plan berkarya.

Namun sebelum pembangunan fisik diberikan oleh Plan bagi warga negara yang membutuhkan, Plan terlebih dahulu menyadarkan warga negara tentang pentingnya pembangunan fisik yang akan diberikan. Hal ini bertujuan agar apa yang diusahakan oleh Plan turut dirasakan sebagai kebutuhan bagi warga negara itu sendiri sehingga muncul rasa kepemilikan warga negara terhadap apa yang diberikan.

Dan harapannya apa yang telah diberikan dapat dijaga ataupun dikembangkan menjadi lebih baik. “Tapi kita tidak ingin ketika melakukan sesuatu masyarakat hanya menonton kemudian hanya sebagai pemakai, rasa kepemilikannya tidak ada. Bagaimana kita memastikan mereka berlanjut misalnya kita berusaha libatkan mereka dengan baik dari awal sehingga ada rasa kepemilikan yang kuat” kata Eka Hadiyanto selaku *Manager Area*.

Zuniatmi yang menjabat sebagai *Deputy Area Manager* juga menegaskan bahwa untuk memastikan setiap program Plan mampu memberikan manfaat maka diupayakan penerima manfaat diberi pengetahuan, diberi kesadaran agar bisa bergerak bersama-sama. Pemberian pengetahuan atau upaya membangun kesadaran oleh Plan ini dapat dijumpai pada kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi ataupun kegiatan sosialisasi. Setiap kegiatan yang akan dilakukan terlebih dahulu dipahami dengan melakukan penjelajahan lapangan agar mampu memajemen proyek yang mendukung pencapaian agar efektif pada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat [14]. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kerja Plan untuk menghasilkan pembangunan fisik yang efektif dan efisien, lembaga ini juga berusaha membentuk pemahaman masyarakat tentang apa diperjuangkan yang tidak lain adalah bagian dari pembangunan non fisik.

Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik diwujudkan melalui implementasi *Menstrual Hygiene Management* (MHM), penanaman *soft skill* untuk memimpin, adanya organisasi penyuar hak anak seperti panel anak yang sering menyuarakan isu-isu tentang hak anak agar dapat diperjuangkan bersama Plan serta kerja sama dengan Forum Anak Nagekeo (FAN) dan program respon covid yang berupaya mengedukasi masyarakat tentang pencegahan COVID-19. Pembangunan non fisik mengarah pada pembangunan sumber daya manusia [12]. Jika yang dibahas dalam pembangunan non fisik berkaitan dengan sumber daya manusia maka tujuan akhir dari

pembangunan non fisik ialah tumbuhnya kesadaran, pengetahuan, pemahaman, skill ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan manusia itu sendiri. “Pada program *Better Life Option and Opportunity Model* (BLOOM) terdapat kegiatan diskusi yang memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan mengerti tentang gender dengan target jangka pendek dapat merubah persepsi orang tuanya bahwa gender itu tidak nampak karena perempuan selalu di belakang sedangkan laki-laki selalu terdepan” kata Maria Fransiska Azi selaku fasilitator kecamatan.

Di sisi lain pembangunan non fisik yang dilakukan oleh Plan dapat dilihat pada norma atau aturan yang berlaku di organisasi tersebut. Hal ini diakui oleh Muhammad Juarsa selaku *Humanitarian and Resilient Project Coordinator* bahwa dalam menjalankan kerjanya Plan tidak mentolerir dua hal baik pada staf maupun mitra kerja, kedua hal tersebut ialah kekerasan terhadap anak dan *Fraud* atau yang biasa dikenal dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada kegiatan *Save Garding* dengan Dinas Peternakan yang saat itu bermitra dengan Plan. Pada kegiatan tersebut dijelaskan tentang kode etik yang berlaku ketika bekerja sama dengan Plan. Dengan adanya kesepahaman norma sosial yang sejalan dengan mitra akan berpengaruh pada pemecahan masalah-masalah sosial yang ingin diatasi [15].

Secara tidak langsung berlakunya kedua norma yang mengatur kehidupan berorganisasi Yayasan Plan Internasional Indonesia Program Implementasi Area Flores di Kabupaten Nagekeo pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki sumber daya manusia secara khusus karakter tentang pemenuhan hak anak serta menjauhi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti halnya dalam pembuatan undang-undang memiliki maksud untuk menangani sebuah hal yang menjadi perhatian publik untuk dijaga, diatur, ataupun dicegah munculnya permasalahan yang tidak diinginkan [16]. Karena pada dasarnya pembuatan norma memiliki dampak awal

dalam menyentuh mental ataupun membentuk sikap dan tingkah laku setiap orang yang terikat di dalamnya. Dalam pembangunan non fisik tidak selalu berbentuk program yang dirangkai dalam berbagai kegiatan tetapi juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan warga negara dapat dikategorikan sebagai pembangunan non fisik selama berpengaruh pada pembentukan sumber daya manusia.

Simpulan

Pembangunan berkelanjutan pada Yayasan Plan Internasional Indonesia, Program Implementasi Area Flores di Kabupaten Nagekeo telah diupayakan melalui pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Hal ini bertujuan memastikan pembangunan yang dilakukan dapat diteruskan oleh warga negara yang terlibat maupun diadopsi ataupun direplikasi oleh pemerintah setempat jika suatu saat ini nanti Plan tidak lagi berkarya di daerah tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian diperoleh pada pembangunan fisik terbukti dengan anak memiliki akta kelahiran, pemenuhan sanitasi, laporan, perizinan kantor Plan di Nagekeo, dan program respon COVID-19. Kemudian pada pembangunan nonfisik terdapat kegiatan *Menstrual Hygiene Management*, kegiatan menjadi pemimpin sehari, mendukung organisasi penyuaara hak anak dan perempuan, penerapan pola hidup sehat, terbentuknya kreativitas remaja melalui berbagai pelatihan.

Referensi

- [1] D. Crowther, S. Seifi, and A. Moyeen, *The Goals of Sustainable Development Responsibility and Governance*. Singapore, 2018.
- [2] J. Monkelbaan, *Governance for the Sustainable Development Goals Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies*. Switzerland: Springer Nature, 2019.
- [3] P. Kuenkel, *Stewarding Sustainability Transformations. An Emerging Theory and Practice of SDG Implementation*. Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2019.
- [4] J. Servaes, *Sustainable Development Goals in the Asian Context*. Singapore: Springer Nature, 2017.

- [5] Z. Khan and N. Burn, *Financing For Gender Equality; Realising Women's Rights through Gender Responsive Budgeting*. Springer Nature, 2017.
- [6] M. Kaltenborn, M. Krajewski, and H. Kuhn, *Sustainable Development Goals and human rights*. Switzerland: Springer Nature, 2020.
- [7] Supriyanto, P. M. Kamayana, S. Laksmi, and F. Jalal, "Menciptakan perubahan jangka panjang untuk anak-anak di Indonesia," *Yayasan Plan Internasional Indonesia*, 2020. [Online]. Available: <https://plan-international.or.id/tentang-plan/#profil>.
- [8] R. Hastari, *Gender and Inclusion*. rani.hastari@plan-international.org, 2018.
- [9] Andri, "Plan International Indonesia Job Vacancy : Konsultan Evaluasi Midterm," *Bina Integrasi Edukasi*, 2017. [Online]. Available: <http://www.integrasi-edukasi.org/plan-international-indonesia-job-vacancy-konsultan-evaluasi-midterm/>. [Accessed: 15-Feb-2020].
- [10] *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*.
- [11] M. Desai and S. Goel, *Child Rights Education for Inclusion and Protection*, 1st ed. Singapore: Springer Singapore, 2018.
- [12] S. Tri Harjanto and G. Sukowiyono, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengembangan Wilayah Kota Gresik," *Estetika*, vol. IX, no. 17, pp. 9–20, 2010.
- [13] G. Pramana, "Pembangunan Fisik dan Non Fisik Di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ilmu Adm. Negara*, vol. 1, no. 2, pp. 584–598, 2013.
- [14] Y. Nanthagopan, N. L. Williams, and S. Page, "Understanding the nature of Project Management capacity in Sri Lankan non-governmental organisations (NGOs): A Resource Based Perspective," *Int. J. Proj. Manag.*, vol. 34, pp. 1608–1624, 2016.
- [15] J. Eastin, "Climate change and gender equality in developing states," *World Dev.*, vol. 107, pp. 289–305, 2018, doi: 10.1016/j.worlddev.2018.02.021.
- [16] M. Kagawa, "The Extractive Industries and Society Interventions

to promote gender equality in the mining sector of South Africa," *Extr. Ind. Soc.*, no. March, pp. 0–1, 2019, doi: 10.1016/j.exis.2019.03.015.



CHAPTER II :

INTEGRASI MULTIKULTURALISME DAN BAHASA

Merajut Multikulturalisme lewat Pendidikan Karakter

Yudi Latif¹

The accommodation of difference is the essence of true equality

(Will Kymlicka, 1996)

Pengantar

Mestinya kita tidak perlu gundah dengan pluralitas kebangsaan Indonesia. Toh, meminjam ungkapan Albert Einstein, Tuhan tidak sedang “bermain dadu” dalam desain penciptaan negeri ini sebagai negeri multikultural. Keragaman tidak selalu berakhir dengan pertikaian asal tersedia sistem pengelolaan yang tepat. Kita juga tidak perlu terobsesi dengan homogenisasi kebangsaan, karena keseragaman bukanlah jaminan kedamaian dan kesejahteraan.

Pada kenyataannya, realitas sejagad kontemporer menunjukkan hanya sedikit negara yang terdiri dari satu kelompok etno-kultural. Pada umumnya, negara modern merupakan negara dengan aneka suku-bangsa (polietnik). Bahkan, suatu negara dengan ragam kebangsaan pun hadir di pelbagai belahan dunia. Sehingga yang terakhir ini lebih tepat dikatakan sebagai “*nations-state*” ketimbang “*nation-state*”.

Sebutlah contohnya *United Kingdom of Great Britain and Ireland*, Perancis dan Canada. Jika orang-orang dari Britania raya ditanya: ‘what is your nationality?’, maka jawabannya, bisajadi English, Wales, Scottish atau bahkan Irish. Namun jika ditanya: “what is your citizenship?”, maka jawabannya adalah British. Begitu pun Perancis. Negara ini memungkinkan penduduk dari wilayah bekas jajahannya memperoleh kewarganegaraan Perancis. Akibatnya, Negara ini dihuni oleh warga-negara dengan imajinasi kebangsaan yang beragam. Canada memberi contoh yang tak kalah menariknya. Negara ini tidak hanya bersifat polietnik (*polyethnic state*) yang mencerminkan keragaman etno-kultural dengan penerimaan yang luas terhadap individu dan keluarga imigran dari berbagai latar budaya. Tetapi juga

¹ Universitas Negeri Yogyakarta

merupakan negara yang bersifat multinasion (*multination state*), dalam bentuk federasi dari tiga kelompok bangsa yang berbeda (Inggris, Perancis, dan Aborigin/Indian). Ketiga kelompok ini bisa dikatakan bangsa dalam arti sosiologis karena masing-masing merupakan komunitas historis, menghuni teritori dan pemukiman tertentu, memiliki institusi yang lengkap serta bahasa dan sejarahnya sendiri-sendiri (Kymlicka 1996, 2000).

Globalisasi dan Ledakan Pluralitas

Dengan arus globalisasi yang semakin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya, setiap negara bukan saja menghadapi potensi ledakan pluralitas dari dalam, melainkan juga tekanan keragaman dari luar. Memasuki awal milenium baru terjadi berbagai perubahan yang cepat, dinamis, dan mendasar dalam tata pergaulan dan kehidupan antarbangsa dan masyarakat.

"Globalisasi", tulis Anthony Giddens (1990), "adalah intersifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di seberang jauh dan begitupun sebaliknya."

Globalisasi merestrukturisasi cara hidup umat manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Berhembus dari Barat, dengan muatan pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat yang kuat, globalisasi pada akhirnya menerpa semua bagian dunia, tak terkecuali Amerika Serikat sendiri, meskipun dengan konsekuensi yang tak merata.

Pada ranah negara-bangsa (*nation-state*) di satu sisi, globalisasi menarik (*pull away*) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus *global interdependence*, yang membuat negara-bangsa dirasa terlalu kecil untuk bisa mengatasi (secara sendirian) tantangan-tantangan global. Dalam situasi kesaling-tergantungan, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya. Kelemahan suatu elemen negara terhadap penetrasi kekuatan global ini bisa melumpuhkan dirinya. Bahkan negara adikuasa seperti Uni Soviet menjadi korban globalisasi yang didorong temuan-temuan teknologinya sendiri. Meski dalam kadar dan implikasi yang tak sama, krisis perekonomian sebagai konsekuensi

globalisasi juga melanda Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya pada awal milenium baru.

Bagi Indonesia sendiri, globalisasi modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan “fundamentalisme pasar” dan “fundamentalisme agama”.

Di sisi lain, globalisasi juga menekan (*push down*) negara-bangsa, yang mendorong ledakan ke arah desentralisasi dan otonomisasi. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkat lokal, yang menyulut merebaknya etno-nasionalisme dan tuntutan otonomi lokal beriringan dengan revivalisme identitas-identitas kedaerahan. Dalam planet bumi yang dirasa kian “mengecil”, jumlah negara bangsa justru kian bertambah. Antara 1960 dan 2006, anggota PBB bertambah hampir dua kali lipat dari 99 menjadi 192, dengan pertambahan cepat terjadi menyusul kehancuran Blok-Timur (antara 1992-2006 terjadi penambahan sekitar 13 anggota baru). Seiring dengan itu, antara 1975 dan 2002, lebih dari 60 (asosiasi) kebangsaan diterima sebagai anggota baru Federation of International Football Association (FIFA). Bagi Indonesia sendiri, tekanan globalisasi yang bertaut dengan demokratisasi ini mendorong otonomisasi daerah dan pemekaran wilayah disertai kecenderungan “revivalisme etnoreligius”.

Pada ranah ekonomi, di satu sisi, pergerakan global dari ide, orang, teknologi dan barang memberi peluang-peluang baru dalam perekonomian, terutama bagi negara-bangsa dan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Perdagangan dunia saat ini jauh lebih luas cakupannya dan instan kecepatannya dibanding periode manapun dalam sejarah umat manusia. Yang paling menonjol adalah lonjakan dalam tingkat arus finansial dan kapital yang difasilitasi oleh perekonomian elektronik (*economy electronic*). Intensifikasi penguasaan ruang dan waktu lewat arus globalisasi berpengaruh besar bagi perilaku dunia usaha. Pergeseran modus produksi Fordisme (yang kaku dan kurang mobil) ke sistem akumulasi

fleksibel (yang beroperasi dengan kelenturan dan layanan *just-in-time*) merupakan eksemplar bagaimana pengelolaan atas ruang dan waktu semakin signifikan dalam kapitalisme lanjut di era globalisasi ini.

Di sini lain, dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (*winners*) dan "yang kalah" (*losers*), serta menumbuhkan ketidaksetaraan baik secara internasional maupun dalam negara-bangsa (Hobsbawm, 2007: 3). Selain itu, kecenderungan negara-negara terbelakang untuk terjerat utang luar negeri, korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan "global village" (dusun dunia), tetapi juga "global pillage" (perampasan dunia).

Globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu kekuatan pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi, yang akan mempengaruhi kemandirian perekonomian nasional. Pasar bebas dunia pada gilirannya melemahkan kemampuan negara-bangsa dan sistem-sistem kesejahteraan untuk melindungi jalan hidupnya (Hobsbawm, 2007: 4).

Globalisasi dan perdagangan bebas juga mengandung kemungkinan gejala "penunggang bebasnya" (*free-riders*) tersendiri. Bahwa suatu organisme bisa melakukan tindakan di luar tujuan aslinya, bahkan melakukan sesuatu yang berkebalikan dari niat awalnya. Dalam konteks kelembagaan antarbangsa, ada beberapa institusi yang semula didirikan dengan tujuan menolong, justru digunakan untuk tujuan sebaliknya. Hal inilah yang terjadi dengan IMF dan World Bank. Ketika didirikan, premis kebijakannya diletakkan pada pengandaian-pengandaian John Maynard Keynes. Tetapi kemudian IMF menjadi pintu bagi terjadinya globalisasi korporasi dan juga kegiatan spekulasi tingkat dunia, tanpa memperhatikan dampak tingkah lakunya.

Pemiskinan global mengalami percepatan terutama dengan rejim pemotongan pajak dan *minimal state* sejak tahun '80-an, yang

kemudian mendorong korporasi-korporasi swasta (internasional) mengambil alih hampir semua kegiatan ekonomi, dan mengambil keuntungan dengan persentase yang luar biasa besar. Pada saat yang sama, IMF dan World Bank tidak dapat dijangkau dengan alat kedaulatan hukum apapun, bahkan hukum internasional.

Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan diikuti oleh kecenderungan berkurangnya kebebasan pemerintahan nasional untuk menentukan kebijakannya, akibat dari adanya pengaruh kekuatan-kekuatan komersial (keuangan internasional dan multinasional) dan lembaga-lembaga supranasional (Bank Dunia, IMF, dll). Kecenderungan globalisasi seperti itu membawa tantangan yang serius pada usaha-usaha pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Globalisasi memang meningkatkan kesadaran akan HAM di Dunia Ketiga, namun sekaligus juga memasok hambatan baru yang membuat idealisasi HAM itu sulit diimplementasikan dalam praksis pembangunan.

Halangan dalam promosi HAM muncul sejak tahun '80-an dari hegemoni ideologi neoliberalisme yang menyerang pondasi dasar pada sistem hak asasi manusia yang telah dibangun: kombinasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan perluasan pasar tanpa kepedulian sosial, globalisasi pasar meningkatkan ketidaksetaraan di dalam negara, dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang.

Tantangan-tantangan globalisasi pasca Perang Dingin memerlukan komitmen dan visi internasionalisme baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan praktik demokrasi dalam skala transnasional untuk merespon realitas global yang saling tergantung. Problem dalam tata dunia hari ini, menurut penilaian William Connolly (1991), adalah terjadinya kesenjangan antara perkembangan waktu (*temporality*) dan ruang (*spatiality*); yakni ketidakcocokan antara realitas sosial-politik era globalisasi dengan struktur kenegaraan, antara perkembangan ekonomi yang kian merobohkan batas-batas teritorial dengan perkembangan demokrasi politik yang masih terkungkung dalam batas teritorial negara-bangsa.

Hal senada dikemukakan oleh Eric Hobsbawm, yang menilai bahwa 'demokrasi elektoral tak dapat berfungsi secara efektif di luar

unit-unit politik seperti negara-bangsa' (Hobsbawm, 2007: 118). Negara kuat atau aktor non-negara yang punya *global intent* sering mengabaikan prosedur demokrasi dalam merealisasikan ambisinya. Di lain pihak, kelompok-kelompok yang marginal dalam demokrasi politik negara-bangsa, berusaha melepaskan keterkaitannya dengan demokrasi dan negara-bangsa dengan melakukan "retradisionalasi politik", dengan putaran balik ke arah fasisme seperti dalam bentuk "populisme" dan "khalifahisme".

Jika demokrasi elektoral bukanlah sarana yang efektif untuk memecahkan masalah-masalah global atau transnasional, Hobsbawm memberi isyarat tentang alternatif non elektoral. Ia mengajukan contoh keberadaan badan transnasional seperti Uni Eropa, yang mampu berkembang menjadi struktur yang kuat dan efektif justru ketika tidak melibatkan *popular electorate*, melainkan melalui prosedur-prosedur permusyawaratan yang melibatkan sejumlah kecil perwakilan pemerintah anggota (Hobsbawm, 2007: 118). Dengan demikian, proses-proses demokrasi permusyawaratan dalam semangat kegotong-royongan merupakan alternatif bagi pengembangan politik demokratisasi non-teritorial dari isu-isu global.

Singkat kata, intensifikasi globalisasi modern menuntut setiap bangsa untuk lebih memiliki wawasan internasionalisme dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjamin kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dalam pergaulan antarbangsa. Hal ini menuntut perubahan paradigmatis dalam hubungan internasional dari prinsip '*zero-sum-game*' menuju prinsip "*win-win-solution*". Hal itu bisa ditempuh, antara lain, dengan cara memperluas praktik demokrasi melampaui batas-batas teritorial negara-bangsa, melalui penguatan daya-daya permusyawaratan, restrukturisasi dalam lembaga-lembaga multilateral, serta partisipasi warga bangsa dalam persoalan kemanusiaan universal.

Akhirnya ada perkembangan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, globalisasi mengurangi otoritas negara-bangsa. Di sisi lain, negara yang mampu mengambil keuntungan dari globalisasi justru negara yang kuat, seperti ditunjukkan oleh China. Akan tetapi perlu dicatat, pengertian kuat di sini tidaklah sebangun dengan otoritarianisme, melainkan merujuk pada kapasitas negara untuk mempertahankan otoritasnya melalui regulasi dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara komitmen internasionalisme dan nasionalisme, pemberdayaan *international governance* dan pemberdayaan negara-bangsa. Pada titik ini,antisipasi sila kedua Pancasila seperti dikemukakan oleh Soekarno sudah tepat. “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.”

Antisipasi Pancasila

Alhasil, globalisasi membawa ledakan pluralitas eksternal dan internal serta aneka bentuk kesenjangan sosial yang mempersulit perwujudan inklusi sosial. Tarikan global ke arah demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi memang menguat. Tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia, “politik identitas” (*identity politics*) yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif—etnis, ras, kelas dan status sosial, bahasa, agama, bahasa dan bangsa—mengalami gelombang pasang.

Karena setiap pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan (*otherness*).

Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas prinsip dasarnya. Ide sentral dari republikanisme menegaskan bahwa proses demokrasi bisa melayani sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang semakin mengalami ragam perbedaan. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (*political recognition*) dan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam suatu republik.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan tersebut, bangsa ini sesungguhnya telah memiliki daya antisipasinya dalam ideologi Pancasila. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya ‘egoisme-agama’...Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.”

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip “sosio-nasionalisme” yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu. Dalam prinsip “sosio-nasionalisme”, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme”.

Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan, antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavistik, antara kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara pemerintahan otokratis dengan demokrasi pasar-individualis, antara ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris.

Urgensi Pendidikan Karakter

Jarak lebar antara idealitas dan realitas kebudayaan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara menyiratkan pentingnya pendidikan karakter. Yang dimaksud dengan pendidikan karakter di sini adalah suatu payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Beberapa area di bawah payung ini meliputi “penalaran moral/pengembangan kognitif”; “pembelajaran sosial dan emosional”, “pendidikan/kebajikan moral”; “pendidikan keterampilan hidup”, “pendidikan kesehatan”; “pencegahan kekerasan”; “resolusi konflik”, dan “filsafat etik/moral”. Seperti diindikasikan oleh ragam istilah yang berkaitan dengan itu, pendidikan karakter bersifat luas dalam cakupan dan sulit untuk didefinisikan secara tepat.

Singkat kata, pendidikan karakter menggarap pelbagai aspek dari pendidikan moral, pendidikan kewargaan, dan pengembangan karakter, yang diperlukan untuk menempa siswa menjadi pribadi baik (karakter pribadi) sekaligus warga negara baik (karakter kolektif). Antara karakter pribadi dan karakter kolektif bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan.

Urgensi pendidikan untuk menanamkan kapabilitas nilai karakter itu kian penting dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi baru yang bersifat hadir dimana-mana (*omnipresent*). Perubahan teknologi itu, terlebih dengan bobot (*magnitude*) besar, biasanya memperlihatkan sifat “dua muka” (*janus face*): positif dan negatif, peluang dan ancaman. Oleh karena itu, dalam memasuki revolusi industri 4.0, kita perlu memiliki kesiapan dan kewaspadaan tingkat tinggi. Yang kita hadapi bukan hanya peluang-peluang,

kemudahan-kemudahan dan kebebasan hidup yang lebih menjanjikan, tetapi juga potensi ancaman dehumanisasi baru, yang ditimbulkan oleh apa yg disebut Shoshana Zuboff (2019) sebagai “kapitalisme pengawasan” (*surveillance capitalism*).

Kapitalisme pengawasan secara sepihak mengklaim pengalaman manusia sebagai bahan mentah yang secara bebas bisa diubah menjadi data perilaku. Meski sebagian data ini memang diterapkan pada perbaikan produk dan jasa, namun sisanya dideklarasikan sebagai surplus perilaku yang dituangkan ke dalam proses *manufacturing* bernama “kecerdasan mesin (*machine intelligence*). Selanjutnya, produk-produk prediksi hasil olahan kecerdasan mesin ini diperdagangkan di pasar prediksi perilaku bernama “pasar masa depan perilaku” (*behavioral future market*). Dengan itu, kapitalisme pengawasan terlahir sebagai bentuk “kuasa” (*power*) baru bernama *instrumentarianism* yang beroperasi secara asimetris. Para penguasa kapitalisme pengawasan tahu segala sesuatu tentang kita, sedangkan operasi mereka dirancang untuk tidak kita ketahui. Mereka mengakumulasi domain-domain pengetahuan baru dari kita, tapi tidak untuk kita. Mereka memprediksi masa depan kita untuk perolehan yang lain, bukan milik kita.

Implikasinya, alih-alih dengan teknologi itu bisa lebih membebaskan manusia, yang terjadi malah memenjarakan kebebasan manusia di bawah pengawasan dan pengendalian kecerdasan mesin. Kita sudah melihat bagaimana preferensi pemilihan presiden di Amerika Serikat dan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) yang bisa dimanipulasi dan diarahkan oleh rekayasa kecerdasan mesin.

Dalam usaha menghindari sisi negatif dari perkembangan teknologi, dunia pendidikan berperan penting untuk memastikan agar ketertarikan masyarakat ke arah teknologi tinggi (*hi-tech*), sejalan dengan penguatan sentuhan nilai (*hi-touch*). Kapabilitas yang harus ditumbuhkan dalam proses pendidikan tak sebatas *explicit knowledge* yang berkaitan dengan penguatan keterampilan teknis (*hard skills*); melainkan juga *implicit knowledge* dengan penguatan *soft skills*, yang berkaitan dengan pembudayaan nilai karakter.

Ahli pendidikan Indonesia, Daoed Joesoef mengingatkan, “Di atas kelompok teori kita membangun mazhab. Di atas kelompok nilai kita membangun budaya.” Nilai itu iluminasi, sinar pencerahan yang

membuat segalanya menjadi terang, sehingga manusia bisa mengenali mana yang baik dan yang buruk, dan bisa menuntun mereka keluar dari kegelapan. Dengan pendidikan nilai karakter diharapkan kegandrungan anak-anak pada teknologi baru itu bisa tetap mengantarkan mereka menemukan “rumah” (*home*) yang ramah dan sakinah; bukan malah menjerumuskan mereka ke tempat pengasingan (*exile*).

Tentang bagaimana menjadi pribadi baik, nilai inti karakter yang perlu ditumbuhkan pada dasarnya bersifat universal. Thomas Lickona (2011), menengarai ada 9 nilai inti karakter pribadi yang harus ditumbuhkan: keberanian (*courage*), keadilan (*justice*), kebaikan hati (*benevolence*), rasa terima kasih (*gratitude*), kebijaksanaan (*wisdom*), mawas diri (*reflection*), rasa hormat (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), dan pengendalian diri (*temperance*).

Tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, Jonathan Haidt (2012), menengarai ada 6 nilai inti moral publik sebagai basis karakter kolektif kewargaan: peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama (*care*), rasa keadilan dan kepatasan (*fairness*), kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia (*liberty*), kesetiaan pada institusi, tradisi dan konsensus bersama (*loyalty*), respek terhadap otoritas yang disepakati bersama (*authority*), menghormati nilai-nilai yang dipandang paling “mulia” (*santinctity*).

Dalam konteks Indonesia, keenam nilai inti moral publik itu terkandung dalam Pancasila. Di dalam Pancasila, sila pertama mewakili nilai *sanctity*; sila kedua mewakili nilai *care* dan *liberty*; sila ketiga mewakili nilai *loyalty*; sila keempat mewakili nilai *authority*; sila kelima mewakili nilai *fairness*. Artinya, dalam Pancasila, semua nilai inti (matriks moral) itu diintegrasikan secara inklusif sebagai cerminan dari pandangan hidup yang menghendaki keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, jasmani dan rohani, partikular dan universal.

Sila Ketuhanan mencerminkan nilai “sanctity” (kesucian). Bahwa setiap komunitas moral harus ada nilai yang “disucikan” bersama sebagai jangkar pengikat kohesi sosial. Pengertian “suci” di sini tidak harus dalam konotasi keagamaan, melainkan dalam arti nilai yang paling dipandang penting (dimuliakan). Dalam liberalisme,

misalnya, nilai yang paling disucikan itu adalah “kebebasan” (*liberty*). Pada warisan Sumpah Pemuda, nilai yang “disucikan” itu adalah spirit “gotong-royong”. Pada Pancasila, spirit gotong-royong itu tetap “disucikan”, namun ditarik secara vertikal ke hulu sumbernya dari pancaran sinar Ketuhanan. Bahwa segala keragaman yang saling bergantung (yang memerlukan gotong-royong) pada segala fenomena kehidupan ini merupakan pancaran (iluminasi) dari “Yang Tak Terhingga” (Tuhan), yang tidak bergantung. Singkat kata, dalam Pancasila, sesuatu “Yang Suci” itu disucikan dalam moral publik.

Tentang Ketuhanan sebagai nilai yang “disucikan” bisa dijelaskan urgensinya bagi negara-bangsa dengan meminjam pandangan Durkheim dan Rousseau. Bahwa legitimasi kekuasaan negara tidak bisa bertumpu pada “kekerasan/pemaksaan (*force*), melainkan harus berbasis legitimasi moral; dan dalam kaitan itu, keduanya melihat agama sebagai sumber moralitas dengan kekuatannya sebagai semen integrasi sosial.

Tentang pentingnya ketuhanan (agama) sebagai basis sosiabilitas juga dijelaskan oleh Robert Putnam (2000) dalam konteks kebangsaan-kewargaan Amerika Serikat. Dalam pandangannya, keterpautan pada kelompok kecil, seperti sesama anggota gereja dan perkumpulan agama yang melibatkan aneka individu dan latar sosial, merupakan modal awal bagi afeksi publik. “Agama-agama membuat orang-orang Amerika menjadi tetangga dan warga negara yang lebih baik”. Bahwa “ramuan aktif yang membuat masyarakat Amerika lebih baik adalah keterpautan mereka dalam relasinya dengan sesama komunitas agama. Segala hal yang mengikat masyarakat secara bersama ke dalam kerapatan jaringan rasa saling percaya membuat orang-orang kurang mementingkan diri sendiri”. Dan itu merupakan modal sosial yang amat penting bagi integrasi nasional.

Para perumus Pancasila menyadari benar kekuatan agama sebagai modal moral yang harus “disucikan” (ditinggikan). Dalam pandangan Bung Hatta, sila Ketuhanan merupakan “fundamen moril yang menjadi dasar pimpinan yang tertinggi”; sedang keempat sila lainnya ia sebut sebagai “fundamen politik” (Hatta, 2015: 66). Hatta juga mengingatkan bahwa pengakuan (dalam) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan kemerdekaan Indonesia “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, mengingatkan bahwa dalam

usaha mewujudkan cita-cita nasional, kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa bukan saja di hadapan sesama manusia, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sementara itu, dalam Pidato 1 Juni 1945, Bung Karno lebih dulu menyatakan bahwa “Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!” Negara yang bertuhan mengandung arti bahwa negara sebagai entitas kolektif harus menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dalam segala kebijakan dan tindakannya. Tidak boleh ada kampanye anti-Tuhan dan anti-agama di ruang publik-kenegaraan Indonesia.

Konvensi dan praktik kenegaraan di Indonesia pun memperlihatkan ekspresi *civil religion* yang memuliakan eksistensi keagamaan. Di negara Indonesia ada kementerian khusus yang menangani agama. Ada peringatan resmi hari-hari besar keagamaan dengan dihadiri kepala negara. Ada hari libur nasional pada hari raya agama-agama. Dalam hal ini, tidak banyak negara di dunia seperti Indonesia, yang menetapkan libur nasional pada hari raya begitu banyak agama (Islam, Kristen-Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu), tanpa membedakan perlakuan baik terhadap pemeluk agama mayoritas maupun minoritas. Ada prosesi do’a pada setiap upacara resmi kenegaraan. Ada pengambilan sumpah pejabat negara di bawah “simbol suci” agama-agama. Nama Tuhan pun kerap diseru dalam pidato-pidato resmi kenegaraan.

Meski demikian, gerak vertikal ke wilayah “suci” (*sacred*) sebagai basis sosia-bilitas dalam masyarakat multi-agama dan multi-kepercayaan masih menyimpan persoalan. Tuhan (keyakinan keagamaan) yang berbeda bisa melahirkan keragaman komunitas moral, yang menyulitkan integrasi nasional. Untuk mengatasinya, dalam Pancasila, gerak pendakian menuju ranah “suci” ini tidak berhenti pada stase “Tuhan kelompok” (*tribal-communal god*), namun ditarik lebih tinggi menuju “Tuhan universal” (*universal god*). Yakni, Tuhan welas-asih (*rahman-rahim*) yang menjadi titik-temu semua agama dan keyakinan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan, “Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.

Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’.”

Dengan demikian, Ketuhanan dalam Pancasila adalah ketuhanan yang telah direkonsiliasikan ke dalam “agama sipil” (*civil religion*) yang bersifat inklusif. Untuk memperkuat aspek inklusivitas tersebut, sebutan pada “Yang Mahasuci” itu sendiri tidak menggunakan istilah yang punya konotasi keagamaan tertentu, melainkan istilah yang bisa diterima oleh semua komunitas agama (baik penganut monoteis maupun politeis). Istilahnya adalah “Tuhan” (Ketuhanan).

Sila pertama meyakini bahwa kodrat keberadaan manusia sebagai kristalisasi dari cinta kasih Sang Pencipta. Sebagai kristalisasi dari Cinta, ia harus memancarkan semangat kasih yang dipancarkan ketiga arah: relasi kasih dengan Yang Transenden, relasi kasih dengan sesama manusia dan relasi kasih dengan alam semesta. Dengan keterbukaan pada yang transenden, manusia bisa terhindar dari tarikan untuk memutlakan hal-hal yang imanen (absolutisme), yang dengan itu paham persamaan manusia dan kerjasama secara berkeadaban dimungkinkan. Dengan prinsip persamaan makhluk di hadapan Sang Pencipta, tiap-tiap manusia harus menjunjung rasa kemanusiaan, dengan memuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, kebebasan sesama manusia, dan kelestarian alam, yang dengan kemuliaan dan kemerdekaan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya (Madjid, 1992: 4). Dengan penghayatan seperti itu, Ketuhanan dalam Pancasila bisa menjadi basis “spirit” (elan vital) kebudayaan seperti dibayangkan oleh Oswald Spengler; juga menjadi jantung “visi spiritual”, sebagai perisai terdalam ketahanan dan keberlangsungan peradaban seperti dibayangkan oleh Arnold Toynbee.

Dalam implementasinya, nilai-nilai Ketuhanan itu diaktualisasikan dengan jalan: 1) Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing secara berkeadaban; 2) saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing; 3) menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama dengan tidak menempuh cara-cara kekerasan dan

pemaksaan keyakinan keagamaan kepada orang lain. 4) mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 5) mengembangkan etika ketuhanan dan spiritualitas yang inklusif dalam kehidupan publik dengan menjaga integritas dalam ketuhanan kebersihan pikiran, perkataan dan perbuatan.

Sila kemanusiaan mencerminkan nilai "care" (peduli) dan liberty (kebebasan); peduli terhadap bahaya/harm yang mengancam keselamatan bersama); bebas dari penindasan dan pengekangan serta bebas untuk mengembangkan diri. Bahwa komunitas moral diikat oleh kepedulian terhadap hak-hak dasar manusia (hak negatif dan hak positif), dengan menjunjung tinggi keadilan dan keadaban.

Dengan semangat kemanusiaan yang menginsafi segala makhluk sama-sama sebagai ciptaan Yang Tak Terhingga (Tuhan), semua manusia dipandang setara dan bersaudara, yang mengandung keharusan untuk menghormati kemanusiaan universal dan kelestarian alam dengan mengembangkan tata pergaulan dunia yang adil dan beradab. Dalam ungkapan Hatta, "Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam, dilakukan terutama dengan jalan memupuk persahabatan dan persaudaraan antara manusia dan bangsa" [1].

Untuk itu, perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa kita harus menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif 'ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial', sebagaimana tertera pada (alinea 4) Pembukaan UUD 1945. Kedalam, bangsa kita harus menerima, apa yang disebut Muhammad Yamin, 'benda ruhani berupa pengakuan dan pemuliaan hak-asasi kemanusiaan' (Yamin, 1956: 186-187).

Dalam komunitas moral Pancasila, pengakuan terhadap hak dasar itu bersifat menyeluruh-- tidak terbatas pada hak sipil dan politik tapi juga hak sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, ada pengakuan terhadap hak asasi manusia secara universal (seperti hak beragama dan keyakinan), hak asasi manusia sebagai warga negara (seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan); ada pengakuan terhadap hak komunitarian (hak ulayat), dan ada pula

pengakuan terhadap hak sosial secara keseluruhan (seperti menyangkut bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak).

Dalam implementasinya, nilai-nilai kemanusiaan itu diaktualisasikan dengan jalan: 1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas; 3) mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; 4) berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan; 5) bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila persatuan (kebangsaan) mencerminkan nilai "loyalty" (kesetiaan); yakni setia terhadap ruang hidup/tanah-air, bersama konsensus dan tradisi bersamanya. Bahwa komunitas moral memerlukan kesadaran bersama untuk merawat "rumah" bersama, dimana kebebasan individu dan partikularitas lainnya jangan sampai menghancurkan tatanan tradisi dan konsensus yang menjaga harmoni dalam kebersamaan.

Kemanusiaan universal hanyalah bermakna sejauh bisa dibumikan dalam konteks sosio-historis partikularitas bangsa Indonesia sendiri. Bahwa aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat, sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam ungkapan Bung Karno, "Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme." Aktualisasi nilai-nilai etis kesetaraan dan persaudaraan kemanusiaan dalam konteks kebangsaan bisa menjadi semen perekat dari kemajemukan keindonesiaan, sebagai tamansari kemajemukan dunia.

Sila ketiga meyakini bahwa dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan. Cara menghidupkan

komunitas moral dengan cara meleburkan kepentingan pribadi/golongan ke dalam kepentingan secara keseluruhan masyarakat bangsa yang mendiami tanah-air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan. Dalam kaitan ini, cinta negeri (*amore patria*) merupakan basis moralitas yang penting. Patriotisme berarti menempatkan kemaslahatan umum (*bonum commune*) diatas kepentingan lainnya dan dipandang sebagai kesalehan puncak. Melalui cinta negeri tergalilah kekuatan semua komponen bangsa untuk mengambil keputusan berat mengorbankan semua demi kepentingan semua.

Dalam implementasinya, nilai-nilai persatuan (kebangsaan) itu diaktualisasikan dengan jalan: 1) Menunjukkan rasa memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa Indonesia (manusianya) dan seluruh tumpah darah Indonesia (alam semestanya); 2) mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa-negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 3) rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; 4) bangga sebagai Bangsa Indonesia dengan memuliakan potensi dan hasil karyanya; 5) memajukan semangat gotong-royong dan pergaulan lintas-budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Sila keempat mencerminkan nilai "authority" (otoritas). Bahwa komunitas moral memerlukan respek terhadap otoritas yang menjadi pusat kedaulatan dan keteraturan dalam kehidupan publik. Pengalaman historis yang berbeda, karakteristik sosial-budaya yang berbeda; serta pandangan dunia yang berbeda memberi perbedaan (variasi) tipe-tipe otoritas di antara berbagai negara-bangsa.

Dalam komunitas moral Pancasila, pengembangan otoritas itu harus dilandasi semangat cinta kasih yang termanifestasi dalam keterwakilan perseorangan, keragaman golongan dan kedaerahan melalui pengambilan keputusan yang dilandasi semangat musyawarah. Dalam institusionalisasinya, pengembangan otoritas ini diarahkan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, melalui cita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial.

Negara persatuan dilembagakan dalam bentuk demokrasi perwakilan yang dapat mengakomodasi hak individu (lewat anggota DPR), hak komunitas marjinal (perwakilan golongan) dan hak teritorial (perwakilan daerah) yang secara keseluruhan terhimpun dalam Majelis Permusyawaratan rakyat. MPR inilah yang (dalam loyalitas tradisi) menjadi pusat otoritas, sebagai penjelmaan seluruh rakyat, penjelmaan seluruh golongan, dan penjelmaan seluruh daerah.

Negara keadilan dilembagakan dalam bentuk negara kesejahteraan ala Indonesia, dimana negara bukan sekedar penjaga malam, namun berkewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan umum [2]. Perwujudan negara persatuan dan keadilan itu termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.

Dalam implementasinya, nilai-nilai kerakyatan (demokrasi) itu diaktualisasikan dengan jalan: 1) Menghormati aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan sistem dan praktik demokrasi; 2) Menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dengan dibimbing oleh kearifan dan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. 4) dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah; 5) mengemban peran publik secara bertanggung jawab.

Sila kelima mencerminkan nilai "fairness" (keadilan). Bahwa komunitas moral menghendaki pemuliaan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan keadilan. Kohesi sosial memerlukan konsepsi keadilan bersama (*a shared conception of justice*) yang memberi harapan tentang kesejahteraan bersama (*social welfare*). Sistem produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak berkeadilan akan melahirkan berbagai bentuk kesenjangan sosial yang bisa melemahkan kohesi sosial.

Sila keadilan meyakini bahwa keberadaan manusia sebagai roh yang menjasmani memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Oleh karena itu, cita-cita

demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (Kerakyatan) dan sila kelima (Keadilan) dari Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sila 'Keadilan sosial' merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja, "mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Dalam implementasinya, nilai-nilai keadilan itu diaktualisasikan dengan jalan: . 1) Mengembangkan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong; 2) suka memberi pertolongan dan menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; 3) bersama-sama memperjuangkan kemandirian perekonomian dan kesejahteraan yang berkeadilan. 4) tidak melakukan kegiatan perekonomian yang memboroskan sumber daya yang membahayakan kesinambungan dan kesejahteraan umum; 5) Suka bekerja keras dan inovatif serta menghargai hasil karya orang lain.

Pada tingkat lebih lanjut, moral ketuhanan (*sanctity*), kemanusiaan (*care and liberty*), persatuan kebangsaan (*loyalty*), kerakyatan (*authority*), dan keadilan sosial (*fairness*) itu secara horizontal bisa diikat oleh satu nilai "suci" juga, bernama nilai "gotong-royong". Dengan kata lain, secara vertikal, nilai suci kita bernama "Ketuhanan", sedang secara horizontal bernama "gotong-royong".

Bahwa proses peleburan aneka kelompok dengan konflik kepentingan ke dalam kualiti kebangsaan kewargaan ini dimungkinkan oleh semangat gotong-royong. Dalam pandangan Soekarno, "gotong-royong" adalah paham yang lebih dinamis dari "kekeluargaan". Dalam arti, kalau semangat kekeluargaan itu sifatnya masih pasif. Intensitasnya sampai taraf tumbuhnya rasa solidaritas (rasa mencintai dan menghargai) antar sesama keluarga bangsa. Sedangkan gotong-royong sifatnya aktif. Dalam arti, rasa solidaritas itu diwujudkan dalam praksis tindakan dengan aktif menggalang kerjasama, tolong-menolong, saling berbagi, saling menjaga dan melindungi [3].

Gotong-royong adalah level tertinggi dari proses adaptasi manusia dalam mengarungi tantangan seleksi alam kehidupan, dari makhluk individu dengan kecenderungan simpanse (yang bersifat

selfish) menjadi makhluk sosial dengan kecenderungan lebah (yang bersifat *groupish*). Semangat gotong-royong itu adalah semangat kooperatif, kolaboratif: “satu untuk semua, semua untuk satu”; senasib-sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; bukan yang satu untung, yang lain buntung.

Ketuhanan menurut alam Pancasila hendaknya dikembangkan dengan jiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong-royong (yang berkeadilan dan berkeadaban); bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Persatuan kebangsaannya harus berjiwa gotong-royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan, “*bhineka tunggal ika*”); bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun menolak persatuan. Demokrasinya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat tolong-menolong/kooperatif); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Dengan demikian, semangat gotong-royong menempatkan sila-sila Pancasila sebagai “kaidah emas” (*golden rule*) dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Inti dari kaidah emas adalah menghindari berbuat sesuatu kepada orang lain yang diri sendiri tak suka diperlakukan seperti itu serta mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Dalam kearifan Sunda, semangat gotong-royong itu tersimpul dalam petiti, *silih asih, silih asah, silih asuh*. Dalam kearifan Melayu tersimpul dalam peribahasa, “asam di gunung, garap di laut, bersatu dalam belanga.” Dalam kearifan masyarakat Maluku dan Papua tersimpul dalam istilah “*basudara*” (bersaudara, berasal dari kata “se-udara”)—bahwa apapun perbedaan di antara kita, sejauh masih menghirup udara yang sama, maka semua kita kerabat. Dalam kearifan Jawa tersimpul dalam peribahasa “*hamemayu hayuning bawana*” (mempercantik keindahan dunia, bukan merusak keindahan dunia). Dalam ajaran Hindu tersimpul dalam semangat “*tat twam asi*”

(aku adalah engkau, engkau adalah aku). Dalam ajaran Buddha tersimpul dalam do'a "*semoga semua makhluk bahagia*". Dalam ajaran Kristiani tersimpul dalam semangat "kasih". Dalam ajaran Islam tersimpul dalam semangat "*rahmatan lil alamin*" (kasih sayang bagi seru sekalian alam).

Kegotong-royongan Pancasila menghendaki sosiabilitas kebangsaan yang dapat mengatasi kecenderungan individualistik (individualisme) dan ultrasosiosentrik (totalitarianisme). Di dalam masyarakat yang super majemuk, terlalu menekankan individualisme dan perbedaan menyulitkan integrasi nasional. Tetapi, mematkan aspirasi kedirian dan perbedaan oleh aspirasi totalitarianisme (kanan dan kiri) bisa membunuh kekayaan potensi dan kreativitas. Jalan tengah Pancasila memilih kearifan "*Bhinneka Tunggal Ika*": mengakui keragaman/perbedaan seraya berusaha mencari persamaan/persatuan.

Dalam pergaulan "antar-individu" di wilayah privat (keluarga) dan paguyuban (etnis, agama, dan golongan masyarakat), masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas moral-ideologinya masing-masing. Namun, dalam pergaulan "antar-sosial" dalam wilayah publik-kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus menganut moral-ideologi Pancasila sebagai titik temu.

Namun demikian, harus segera diingatkan bahwa meskipun antara wilayah privat, komunitas, dan publik itu bisa dibedakan secara kategoris, dalam realitas hidup tidak selalu bisa dipisahkan. Berbeda dengan paham individualisme yang menarik garis demarkasi yang ketat antara "*the public self*" (yang melibatkan relasi sosial yang bisa diobservasi) dengan "*private self*" (yang tidak bisa diakses oleh yang lain), menurut ideologi Pancasila ketiga wilayah itu tidak sepenuhnya terpisah. Meski demikian, berbeda pula dengan paham kolektivisme totalitarian, yang bisa semena-mena mengintervensi wilayah privat.

Pancasila sebagai *civil religion* memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas (agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana

pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik.

Penutup: Pembumihian Pancasila

Diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstrimisme dan eksklusi sosial. Dengan menguatkan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprinsip kemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia diharapkan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal.

Tinggal masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sinilah letak masalahnya. Setelah 75 tahun Pancasila dilahirkan, keluhuran nilai-nilainya sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan dengan defisit kemampuan untuk membukumkannya.

Setiap pandangan hidup atau ideologi yang ingin mempengaruhi kehidupan secara efektif, tak bisa diindoktrinasi sebatas upacara, melainkan perlu mengalami apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai proses “pengakaran” (radikalisasi). Proses radikalisasi ini melibatkan tiga dimensi ideologis: keyakinan (mitos), penalaran (logos), dan kejujuran (etos).

Pada dimensi mitos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sisi ini, bangsa Indonesia harus diyakinkan bahwa, seperti kata John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.” Mematrikan keyakinan pada hati warga tidak selalu bersifat rasional. Pendekatan afektif-emosional dengan menggunakan bahasa seni-budaya dan instrumen multimedia akan jauh lebih efektif.

Pada dimensi logos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari ideologi menjadi ilmu. Pancasila harus

dijadikan paradigma keilmuan yang melahirkan teori-teori pengetahuan dan komunitas epistemiknya. Proses objektivikasi ini penting karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan semestinya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila.

Pada dimensi etos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antar sila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Referensi

- [1] Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- [2] Latif, Yudi, *Wawasan Pancasila: Edisi Komprehensif*, Bandung, Mizan, 2020.
- [3] Latif, Yudi, *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.

Tantangan dan Masa Depan Kampus Multikultural

Wadji¹

Pengantar

Akhir-akhir ini banyak sekali perguruan tinggi yang mengusung multikulturalisme sebagai slogan kampusnya. Slogan-slogan itu sebagian besar hanya sekadar pencitraan untuk menarik calon mahasiswa dari pelbagai kalangan. Beberapa di antaranya memang memiliki tujuan mulia, yakni mengemban tugas merawat kebhinekaan di negeri ini. Munculnya slogan-slogan tersebut bukannya tanpa alasan. Pasca reformasi tahun 1998 Indonesia mengalami krisis identitas. Pada saat saluran kebebasan dibuka, terbuka pula perdebatan di ruang publik. Perdebatan itu cenderung menggiring pada persaingan ideologi untuk mengisi kekosongan identitas pasca tumbangannya kekuasaan Orde Baru.

Maraknya diskusi di kampus, terutama yang membincang tentang ideologi pasca reformasi merupakan tren baru. Di era kekuasaan otoriter hal tersebut memang mustahil untuk dilaksanakan. Jika pun terjadi, hal tersebut merupakan kegiatan destruktif. Sebagai pusat pemikiran, kampus menjadi ruang besar euforia pengembaraan pemikiran yang selama berpuluh-puluh tahun mengalami belenggu. Di luar kampus kebanyakan kegiatan diskusi lebih mengarah pada ideologi politik. Jika di era Orde Baru Pancasila adalah asas tunggal, maka pasca-reformasi lahirlah partai-partai politik yang mengusung pelbagai ideologi yang dulu sangat diharamkan oleh negara.

Segala peristiwa yang terjadi di luar kampus, terutama kebijakan negara, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kampus. Pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses politik. Semua kebijakan di bidang pendidikan adalah produk politik. Dicabutnya TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang asas tunggal Pancasila sangat dirasakan dampaknya dalam berbagai kebijakan

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

pemerintah. Yang paling merasakan hal tersebut adalah dunia pendidikan. Dalam *grand design* pendidikan kita, Pancasila sudah tidak menjadi landasannya lagi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mencantumkan Pancasila dalam kurikulum pendidikan kita.

Menguatnya radikalisme dan tindakan intoleransi ditengarai karena menguatnya gerakan sektarian yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai perekat bangsa dari aneka latar sosial-budaya dan keyakinan menjadi kosakata yang jarang terucap. Puncaknya, yang mengundang debat panjang hingga hari ini, adalah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam SNP 2021 tersebut Pancasila dan Bahasa Indonesia bukanlah mata pelajaran wajib di sekolah. Menyadari kekhilafannya, dan atas desakan dari pelbagai elemen masyarakat, pemerintah berencana untuk merevisi PP tersebut.

Perguruan tinggi tak lepas dari sejumlah aksi radikalisme. Makin meningkatnya mahasiswa yang terlibat tindakan rasisme, intoleransi, bahkan terorisme adalah indikator bahwa dunia pendidikan pun tak pernah steril dari gerakan-gerakan yang mengancam persatuan bangsa. Menyikapi realitas tersebut sejumlah perguruan tinggi membangun kesadaran betapa pentingnya hidup bersama secara damai dalam kebhinekaan. Kampus harus menjadi pusat peradaban. Perbedaan adalah realitas yang tak bisa dibantah. Mengembangkan sikap moderasi adalah program yang mendesak harus dilakukan oleh perguruan tinggi.

Menyandang nama sebagai kampus multikultural memang memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Sejumlah tantangan jelas berada di depan mata. Proses panjang yang harus dilalui dan penyiapan infrastruktur harus dilakukan. Infrastruktur itu tidak hanya infrastruktur fisik, namun lebih pada penyiapan infrastruktur sosial-budaya. Membangun karakter sumber daya manusia sebagai penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi serta menyiapkan

kurikulum pendukung adalah hal yang pokok yang harus menjadi prioritas. Bila itu dipenuhi, maka masa depan kampus multikultural yang akan mengawal dan menopang terwujudnya masa depan Indonesia yang maju dan modern akan segera terlaksanakan.

Tulisan ini mungkin belum bisa menjawab sejumlah persoalan yang penulis kemukakan. Sebagian di antaranya bahkan hanya sekadar keluh-kesah penulis yang kerap kali melihat kemunafikan dalam dunia pendidikan. Banyak lembaga pendidikan hanya sekadar pameran baju, sebatas pencitraan yang memiliki tujuan pendek hanya sekadar menarik minat calon mahasiswa. Bila tulisan ini tidak memenuhi harapan, anggap saja sebagai utopia.

Pembahasan

Kampus multikultural: citra atau cita-cita?

Menguatnya sentimen sektarian dibarengi dengan kebebasan yang nyaris tidak terkontrol, semakin menumbuh-kembangkan bibit-bibit perpecahan. Kondisi demikian mendorong sejumlah kampus mengusung multikulturalisme sebagai slogannya. Otonomi daerah juga melahirkan sejumlah Perda yang tidak selaras dengan ideologi negara. Sentimen kedaerahan juga meningkat. Perguruan tinggi memperoleh imbas langsungnya. Bentrok antar etnis kerap kali terjadi di kampus. Melihat situasi yang makin rawan, banyak pihak membangun kesadaran dengan berusaha meramu formula untuk kembali kepada jati diri bangsa, yang ramah dan toleran. Sekalipun beberapa perguruan tinggi mengangkat multikulturalisme masih sebatas sebagai slogannya, namun upaya itu cukup menggelorakan semangat keramahan terhadap perbedaan.

Di samping sebagai rahmat Tuhan, keragaman budaya di Indonesia adalah tantangan. Keragaman budaya yang tidak dikelola dengan baik justru akan melahirkan konflik. Kebudayaan dalam konteks ini adalah kebudayaan dalam arti luas. Clyde Kluckhohn membagi kebudayaan menjadi tujuh unsur, yakni sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup

dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem religi, serta kesenian. Banyak negara yang tidak sekompleks Indonesia hingga saat ini masih terus dilanda perang saudara. Negeri yang kini bernama Indonesia ini mengalami proses yang panjang dalam mengelola perbedaan. Sebelum era kolonial kita pernah memiliki negara yang berdaulat, adil, dan makmur yang dilandasi oleh persatuan. Nusantara yang multikultural itu telah mengundang minat berbagai bangsa untuk datang mengunjungi negeri ini.

Indonesia dibangun atas dasar paham kebangsaan. Dalam pidato tentang Pancasila, 1 Juni 1945 Bung Karno [1] menyatakan bahwa *nationale staat* hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, kata Bung Karno, “Jikalau Tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat*.”

Pernyataan Bung Karno tersebut bukannya tanpa alasan yang mendasar. Bung Karno sengaja menyebut Sriwijaya dan Majapahit bukan bertujuan hanya sekadar membandingkan wilayah teritorial yang akan dibangun pada saat itu. Yang ingin ia katakan sebenarnya lebih pada semangat persatuan yang didasari oleh multikulturalisme dalam dua kerajaan tersebut. Paham kebangsaan terbukti telah mampu menyatukan Nusantara dari ujung Timur sampai ke ujung Barat. Ribuan pulau yang terbentang luas itu dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai etnis, bahasa, dan keyakinan.

Kerajaan Majapahit juga sangat dikenal baik dalam mengelola perbedaan keyakinan yang dianut oleh penduduknya. Mekanisme keagamaan pada zaman itu, menurut Rassers, [2] disebut sebagai pen-Jawa-an kesatuan Civa-Buddha. Dalam Civa dan Buddha, sebagaimana mereka datang dari India sampai ke kepulauan ini, kedua-duanya melebur dalam suasana renungan Tantrisme. Keduanya mengalami

proses asimilasi dalam waktu yang lama, dan telah saling condong satu kepada yang lain. Bangsa Jawa, kata Rassers mengenali pembawa mitos milik kebudayaannya sendiri. Sekalipun dua jumlahnya, tetapi serupa satu dan lain seperti kembar. Rassers menyebut bangsa Jawa, karena pusat pemerintahan dan kebudayaan pada era Majapahit terletak di Jawa, begitu pula era sesudahnya.

Di masa Islam berkembang di Nusantara, spiritualitas kita juga tidak serta merta merupakan perwujudan spiritualitas murni dari pembawa ajaran agama tersebut. Pertemuan dengan spiritualitas pra Islam melahirkan spiritualitas Islam Nusantara. Menurut Saiful Arif [3] keberhasilan pribumisasi Islam salah satunya disebabkan pertemuan isi substantif masing-masing agama. Dalam lekuk sejarah, kata Arif, hal itu telah ada dalam tiga ruang. Pertama, konsepsi tasawuf falsafi yang digerakkan para sufi besar semisal Hamzah Fansuri dan Siti Jenar. Tasawuf model ini sering menjelma dalam karya sastra puitis, jika bukan renungan filosofis yang radikal. Kedua, sufisme Jawa yang akhirnya melahirkan Kejawen. Tradisi ini juga melahirkan kesusastraan baru bernuansa Islam, selayak renungan sufistik Ronggowarsito, yang menjadi titik pijak bagi zaman keemasan sastra Jawa. Ketiga, ordo tarekat. Jika sufisme tadi bersifat renungan individual, maka tarekat adalah studi tentang praktik spiritual terorganisasi, sekaligus praksis gerakannya pada level sosial-politik.

Berangkat dari keragaman tersebut, maka yang paling cocok ideologi yang akan mengisi Indonesia adalah paham kebangsaan, yang dikenal dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah dikembangkan oleh leluhur bangsa Indonesia sejak ribuan tahun, bahkan sebelum masuknya agama-agama besar ke Nusantara, seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi dalam jiwa bangsa Indonesia. Ideologi apa pun yang masuk ke Nusantara pasti akan mengalami transformasi dan adaptasi dengan nilai-nilai yang telah berkembang sebelumnya. Bangsa Indonesia selalu ramah terhadap budaya asing, tetapi dalam waktu yang sama mampu mempertahankan budaya lokalnya.

Teknologi informasi telah mengubah peradaban dunia. Di satu sisi semua urusan dipermudah dengan teknologi itu, tetapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri ada sejumlah pengaruh buruk tanpa disadari sedang deras mengalir mempengaruhi peradaban kita. Dunia menjadi kian sempit, perubahan di satu tempat cepat bisa menyebar ke tempat lain. Kecepatan penyebaran itu seperti penularan virus. Teknologi informasi juga membawa perubahan dalam dunia politik. Perubahan paradigma politik di satu sisi akan membawa harapan baru bagi demokratisasi dan kebebasan. Di sisi lain, masuknya ideologi-ideologi tertentu yang kemudian diadopsi sebagai landasan politik melahirkan persoalan baru. Ideologi-ideologi itu sebagian di antaranya tidak ramah terhadap kondisi objektif Indonesia yang sangat multikultural.

Pengaruh asing memang tak selamanya berakibat buruk bagi peradaban kita. Sejak dulu kala bangsa kita selalu ramah dalam menghadapi pelbagai kebudayaan yang datang ke negeri ini. Agama Hindu datang juga dengan membawa serta budaya India pada umumnya, yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan agama Hindu. Begitu pula agama Buddha. Karya sastra dalam bentuk Kakawin dan Serat, tidak seratus persen merupakan pengaruh agama. Begitu pula dengan arsitektur dan bentuk kebudayaan lainnya.

Masuknya agama Kristen ke Nusantara sekaligus juga masuknya pemikiran Barat ke negeri ini. Pemikiran-pemikiran tersebut tak hanya bersumber dari pemikiran Katolik dan Protestanisme saja, namun lebih dari itu pemikiran Barat secara umum juga mewarnai budaya kita. Beberapa budaya asing tersebut membawa pengaruh positif terhadap peradaban kita. Pengaruh itu antara lain membuat kita sadar bahwa beberapa adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa kita bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Peradaban bangsa kita adalah hasil buah pertemuan antara Timur dan Barat, yang melahirkan kebudayaan Indonesia.

Jika kita menengok teks-teks kuno, kita mendapatkan bahwa sejak zaman dulu bangsa kita selalu mendahulukan pembentukan

karakter dalam pola pendidikannya. Ini bisa kita lihat manakala kita membaca serat dan kakawin. Persyaratan calon pemimpin, salah satunya adalah ia harus memiliki penguasaan terhadap sastra. Pada zaman tersebut sastra memiliki pengertian sebagai buku petunjuk, pedoman hidup, ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Perempuan yang mulia juga diukur dari seberapa pemahamannya terhadap sastra.

Pemikiran pendidikan modern yang berbasis karakter di tanah air sudah muncul sejak zaman kolonial. Frans van Lith, [4] Pastor Jesuit Belanda yang ditugaskan di Jawa misalnya mencanangkan visi pendidikan karakter tanpa menomorduakan prestasi akademik. Lith juga memprotes kebijakan pemerintah yang paternalistik. Gagasan misi visioner Lith juga terkandung dalam bidang politik. Menurutnya pemerintah kolonial harus mempersiapkan orang-orang pribumi untuk memerintah negaranya. Ia berjuang dengan memprioritaskan peran pribumi dalam pencatatan kehidupan dan kemajuan bangsanya.

Era kolonial juga diwarnai dengan pergulatan pemikiran, antara berkiblat ke Barat atau tetap mempertahankan budaya sendiri. Sekalipun Sutan Takdir Alisjahbana [5] dalam pandangannya lebih condong ke Barat, namun dalam beberapa pernyataannya ia lebih suka mengambil jalan tengah. Di satu sisi ia menyatakan bahwa dalam segala lapangan kehidupan dan kebudayaan kita harus membawa timbangan dan ukuran baru. Jika tidak, kata Alisjahbana, kita akan hilang terbenam dalam perjuangan bangsa di zaman modern. Kita hendaknya meninggalkan komunalisme dengan semangatnya yang tenang, menuju ke arah masyarakat manusia yang bebas. Yang lebih mengemukakan kepentingan manusia seorang-seorang, yang lebih banyak memakai timbangan pikiran, yang lebih *zakelijk*, yang tiada berhenti-hentinya bergerak.

Di lain sisi ia justru mengkhawatirkan kebebasan individu akan menjadi benih-benih kerusakan. Ia menyatakan bahwa manusia diliputi kegelisahan untuk lepas dari ikatan adat-istiadat. Bagi manusia yang selalu gelisah maju itu hanya tinggal dua jalan saja. Pertama, terus-menerus mencari kebebasan, sehingga nafsu nafsu kebebasan

itu menjadi mati sendirinya dalam anarki dan ketamakan seorang-seorang. Kedua, kembali lagi beratur dalam masyarakat manusia, tetapi sekarang bukan sebagai manusia yang hamba adat. Hidup kita bukan sebagai tumbuh-tumbuhan, tetapi sebagai manusia yang berkemauan dan berpikiran sendiri. Dengan kemauan sendiri, menyerahkan dan menyatukan tenaganya kepada kepentingan bersama yang melingkungi kepentingan individu.

Teknologi dan pergeseran politik selalu membawa arus deras yang mempengaruhi jati diri kita. Krisis nilai dalam tiap zaman jelas berbeda kriterianya. Perubahan politik dari era kerajaan ke era kolonial juga diwarnai dengan krisis nilai. Begitu pula dari era kolonial ke era kemerdekaan, dan seterusnya sampai ke era pemerintahan otoriter ke era demokrasi. Sebagai bangsa yang baru belajar berdemokrasi, Indonesia belum menemukan formula yang tepat dalam tata kelola kenegaraannya.

Muji Sutrisno [6] menyebut bahwa krisis nilai mengoyak dan menggeser dua bidang pokok kehidupan secara langsung yang bertaut dengan kebudayaan. Yang pertama, bidang pendidikan. Goresan krisis di bidang pendidikan, kini tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang memonopoli pembinaan kepribadian murid-muridnya. Yang kedua, bidang kemasyarakatan atau hidup sosial. Dalam kemasyarakatan, menyurutlah nilai-nilai umum, nilai-nilai bersama. Pudar pula keterlibatan dalam kepentingan bersama. Penggantinya adalah semakin menjamurnya nilai-nilai kepentingan diri, kepentingan kelompok kecil atau kelas.

Selama ini kampus multikultural sering disalahpahami. Secara umum hampir setiap kampus pada dasarnya adalah kampus multikultural. Beberapa kampus mungkin memang membatasi diri karena misi tertentu dengan sangat terpaksa tidak membuka diri terhadap kelompok lain. Biasanya kampus yang demikian itu adalah kampus yang berafiliasi ke agama tertentu, dengan tujuan pendidikan yang khusus pula. Kampus dalam kategori ini misalnya yang menghasilkan sumberdaya dalam pembinaan dan penyebaran agama.

Pun demikian, gerakan multikulturalisme justru banyak muncul dari pemikir-pemikir keagamaan.

Secara umum yang disebut dengan kampus multikultural adalah kampus yang civitas akademiknya terdiri dari latar budaya yang beragam. Budaya yang dimaksud tidak dalam arti sempit, tetapi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebudayaan yang dimaksud terdiri dari berbagai unsur, antara lain adalah bahasa, etnis, dan agama. Namun demikian, apakah sebuah kampus yang tiap tahun menyelenggarakan pameran makanan tradisional dengan panitianya berpakaian tradisional pula sudah dapat disebut sebagai kampus multikultural? Apakah dikarenakan kampus tersebut mahasiswanya terdiri dari aneka etnis juga sudah dapat disebut kampus multikultural? Jika ya, maka betapa ringannya beban yang harus diemban oleh sebuah kampus dengan label multikultural. Dalam praktiknya, seringkali cita-cita multikultural tidak menjadi jiwa atas penghuni kampus tersebut, namun demikian yang terjadi justru sebaliknya. Sudahkan di ruang publik, baik di ruang nyata maupun di ruang maya para penghuni kampus tersebut diberi kebebasan yang memadai?

Dilihat dari ideologinya, perguruan tinggi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yakni perguruan tinggi yang berafiliasi ke agama, dan perguruan tinggi sekuler. Perguruan tinggi yang berafiliasi agama pada umumnya berinduk pada agama tertentu. Agama tersebut adalah agama yang dianggap resmi oleh negara. Istilah agama resmi sebenarnya sangat bertentangan dengan ideologi negara, yakni Pancasila. Sementara itu perguruan tinggi dalam kategori sekuler memiliki corak dan warna yang beraneka ragam. Ciri khas dari perguruan tinggi tersebut sangat bergantung pada watak badan penyelenggaranya yang tertera dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Secara umum perguruan tinggi yang bercorak sekuler otomatis sekaligus memiliki ciri sebagai perguruan tinggi multikultural. Karena membawa misi agama tertentu, perguruan tinggi yang berafiliasi

kepada agama tertentu sebenarnya tidak dapat disebut sebagai perguruan tinggi multikultural. Dalam banyak kasus memang perguruan-perguruan tinggi ini juga menerima mahasiswa di luar agama yang menjadi afiliasi perguruan tinggi tersebut. Keterbukaan terhadap kehadiran pemeluk agama lain di kampus agama tidak serta merta menjadikannya sebagai kampus multikultural. Sepanjang kampus tersebut masih memiliki muatan mata kuliah yang memberikan ciri khas agama tertentu dalam pembelajarannya, maka sebutan sebagai kampus multikultural menjadi tidak cocok. Bisa dikecualikan jika isi mata kuliah tersebut mengarah kepada penghargaan terhadap semua pilihan keyakinannya. Dalam kasus demikian, mata kuliah yang mengemban ciri khas perguruan tinggi tersebut memiliki sifat sebagai khazanah memperkaya wawasan bagi pesertanya. Ia bukanlah sarana indoktrinasi.

Maraknya perguruan tinggi yang memasang label kampus multikultural memang memiliki pengaruh positif. Setidaknya ia adalah representasi dalam mengampanyekan keanekaragaman budaya bangsa kita. Kampus memiliki citra penjaga persatuan dan pemberi kepastian perlindungan terhadap latar budaya yang beragam. Yang menjadi persoalan apakah kampus-kampus tersebut telah memiliki *grand-design* sebagai kampus multikultural. *Grand-design* diperlukan untuk memberikan isi sebagai ciri khas kampus multikultural. Jika ternyata apa yang dilakukan sama saja dengan kampus-kampus lain, maka dapat dipastikan label itu hanyalah sekadar pencitraan.

Infrastruktur kampus multikultural

Lembaga pendidikan yang memiliki tingkat keragaman paling tinggi jelas ada pada tingkat perguruan tinggi. Pada umumnya, terutama di kota-kota besar, mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi datang dari hampir seluruh pelosok tanah air, dan bahkan luar negeri. Di kampus, hidup beraneka etnis dan keyakinan. Mereka juga berasal dari latar belakang bahasa daerah yang berbeda. Kampus menjadi ajang pertemuan bagi aneka latar budaya yang berbeda. Kampus memiliki peran penting dalam proses pembauran.

Dari ketujuh unsur kebudayaan, agama menempati posisi yang paling sensitif di ranah publik. Kesalahpahaman terhadap keyakinan orang lain dikarenakan minimnya literasi dan dialog antar-iman. Dalam wilayah etnis dan bahasa, orang bisa bebas saling mengapresiasi satu sama lainnya. Dalam tataran berikutnya secara bersama-sama dengan mudah bisa saling masuk dalam wilayahnya. Kenyataan itu masih sulit terjadi dalam wilayah agama. Keengganan untuk memahami sistem religi orang lain tak hanya disebabkan oleh minimnya literasi semata. Dalam beberapa kasus, dan barangkali ini yang terbanyak, juga diawali oleh prasangka buruk terhadap keyakinan tersebut.

Kampus multikultural harus menjadi jembatan atas kebuntuan tersebut. Fasilitator yang berperan sebagai penembus kebuntuan harus memiliki kesanggupan untuk berani mengambil sikap yang mencerminkan representasi ideologi multikulturalisme. Orang dari pelbagai latar budaya harus mendapatkan pelayanan yang sama. Kebenaran bukanlah monopoli dari sekelompok orang. Teks-teks keagamaan sebagai sumber utama agama harus menjadi literatur yang tidak “haram” untuk dibaca oleh semua komunitas tanpa terkecuali. Kampus multikultural harus memiliki ciri khusus yang diwujudkan dalam bentuk kurikulumnya. Membangun peradaban tak hanya dapat dicapai dengan satu atau dua matakuliah. Nafas multikulturalisme harus menjiwai dalam setiap matakuliah, tidak hanya mata kuliah humaniora saja, namun juga matakuliah-matakuliah di bawah fakultas dengan body keilmuan sosial maupun eksakta.

Pembelajaran agama tidak hanya berhenti pada dogma. Agama harus menjadi spirit pembebasan. Semua orang di mata Tuhan adalah sederajat, yang membedakan hanyalah ketakwaan kepadanya. Takwa dalam artian pengabdian terhadap sesama manusia. Ritual adalah sarana bagi menciptakan kesalehan sosial, bukan sebaliknya. Semua kitab suci memiliki benang merah, dengan spirit yang sama: membangun dunia yang lebih indah serta meningkatkan peradaban manusia. Semua bentuk penyembahan hasil akhirnya adalah ketertundukan dan penurunan ego pribadi.

Salah satu batu sandungan bagi terbentuknya masyarakat yang bebas seperti di negara-negara Barat umumnya adalah faktor afiliasi agama. Secara umum kehidupan beragama di Indonesia memang dapat disebut sebagai sangat moderat. Sekalipun demikian sensitivitas kita terhadap agama sampai hari ini masih sangat tinggi. Melihat realitas tersebut mengundang pemerintah mengambil peran yang sangat besar dalam turut campur tangan urusan keyakinan rakyatnya. Negara membedakan mana agama resmi dan agama tidak resmi. Dikotomi agama resmi dan agama tak resmi memicu stigma kafir dan sesat terhadap kelompok-kelompok yang berlabel tak resmi tersebut. Agama-agama lokal, yang merupakan tuan rumah, yang sudah hidup dan berkembang sebelum agama-agama dunia masuk ke Indonesia, semakin terpinggirkan. Upaya untuk mendapatkan kartu identitas saja harus dilaluinya dengan perjuangan yang sangat panjang.

Sekalipun pasca reformasi hampir semua kelompok keagamaan memperoleh kebebasan berekspresi yang cukup memadai, namun dalam perkembangan selanjutnya yang terjadi justru adalah hukum rimba. Negara justru tidak hadir di area publik untuk berdiri di tengah, tetapi malah menjadi eksekutor yang melegalkan tindakan yang menghakimi keyakinan masyarakatnya. Negara hadir dalam wilayah internal agama. Dogma yang harusnya urusan internal, diambil alih oleh negara. Kondisi semacam ini tak lepas dari kepentingan partai politik tertentu yang berperan sebagai penumpang gelap dan mengais keuntungan di balik kekacauan. Ideologi partai yang beraneka ragam, dan tidak ada garansi apa pun yang menunjukkan bahwa mereka cukup ramah terhadap perbedaan, membuat ketidakpastian bahwa jaminan kebebasan di negeri ini akan tetap dapat dilangsungkan.

Secara umum demokratisasi di Indonesia mengarah pada peran negara yang makin kecil dibandingkan di masa pemerintahan otoriter. Mengecilnya peran pemerintah dalam beberapa segi sangat berperan dalam menyumbang konflik sosial dalam masyarakat. Era multi-partai yang mulanya diharapkan sebagai bentuk kebebasan

menyalurkan aspirasi yang lebih longgar, telah berbelok arah menjadi ajang hukum rimba. Ukuran kebenaran hanya ditentukan pada suara terbanyak, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Otonomi daerah banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kurang memahami tata kelola negara. Agama dan pendidikan yang semestinya menjadi wewenang pusat, seringkali direbut perannya oleh kepala daerah tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Jika terjadi konflik, pemerintah pusat cenderung tutup mata.

Krisis identitas tersebut sebenarnya telah terlihat beberapa tahun sebelum reformasi. Kekecewaan atas otoritarian dalam praktik pemerintahan Orde Baru menimbulkan munculnya banyak pemikiran baru yang berujung pada persaingan ideologi. Hal ini berlanjut sampai pasca reformasi. Saat ini banyak orang tergugah kembali karena krisis identitas kita telah mencapai puncaknya. Dua bulan sebelum Soeharto mengundurkan diri dari kursi kekuasaannya, Prof. Sartono dalam Sarasehan Dies Natalis Fakultas Sastra UGM, 3 Maret 1998 [7] menyatakan bahwa setiap bangsa perlu menentukan identitas dirinya sesuai dengan konteks zamannya. Padahal saat ini kita dapat menyaksikan hampir di seluruh Nusantara krisis identitas itu terjadi baik di tingkat pribadi, keluarga, kesukuan, maupun dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas sampai ke tingkat nasional.

Memasuki dasawarsa kedua era reformasi, Indonesia mengalami anjloknya praktik penghargaan terhadap kebhinekaan. Pada tahun 2010 berdasarkan hasil penelitian Pew Research Center Forum on Religion & Public Life, [8] Indonesia berada di 11 negara tertinggi di dunia dalam tingkat konflik sosial yang melibatkan agama. Dari 11 negara tersebut, enam berada di Asia yakni India, Pakistan, Afghanistan, Indonesia, Bangladesh dan Sri Lanka) sedangkan empat di Timur Tengah dan Afrika Utara (Irak, Israel, Sudan dan Arab Saudi) dan satu di sub-Sahara Afrika (Somalia). Pergantian pemerintahan, dengan harapan demokrasi makin membaik, tetapi dalam realitasnya justru menunjukkan hal sebaliknya. Sampai awal 2021 kebebasan beragama kita cenderung mengalami penurunan. Jika selama ini ada

anggapan bahwa sumber dari intoleransi adalah teks keagamaan, tetapi pendapat tersebut tidak selamanya benar. Teks keagamaan adalah teks terbuka terhadap penafsiran. Seringkali penafsiran terhadap teks sangat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Secara umum, teks-teks keagamaan itu membuka ruang bagi penerimaan atas kelompok di luar lingkaran tertentu. Setidaknya eksklusivitas itu hanya ditunjukkan dalam peribadatan, karena di tiap-tiap komunitas memiliki liturgi yang berbeda. Bahkan dalam banyak kasus, para penafsir yang sangat moderat berpendapat bahwa keselamatan yang disediakan oleh Tuhan melampaui batas-batas dari apa yang tertulis dalam teks keagamaan.

Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Litle [9] bahwa paksaan dan campur tangan eksternal (berkenaan dengan ketaatan sejati terhadap kehendak Tuhan) akan merupakan antitesis dari keyakinan Islam adalah benar. Oleh karena itu, kata Litle, Quran mengajarkan pentingnya di pihak orang-orang yang telah mendapatkan jalan yang benar, untuk menjauhkan diri dari mencaci maki orang-orang yang belum melakukannya, dan menjauhkan diri dari memaksa mereka untuk mengubah agama. Di atas segalanya, ada jaminan bahwa pertimbangan terakhir berkenaan dengan keyakinan hanya berhubungan dengan Tuhan semata, dan tidak yang lain, tidak juga nabi.

Kampus multikultural harus menjadi yang terdepan dalam pendidikan toleransi. Moderasi beragama harus ditanamkan pada penyelenggara dan pelaksana pendidikan. Pemegang kebijakan kampus multikultural harus berani menjamin bahwa di kampusnya steril dari gerakan intoleransi, dan para penyelenggara dan pelaksanaannya memiliki kesanggupan untuk mengatakan bahwa di depan Tuhan seluruh manusia adalah sama. Badan penyelenggara dan unsur pimpinan lainnya serta seluruh pendidik harus menjadi contoh dalam pengembangan peradaban yang berbasis multikultural. Mereka harus memiliki wawasan yang memadai tentang kebhinekaan.

Kampus multikultural harus memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh mahasiswa. Pelayanan itu tidak hanya yang bersangkutan paut dengan kegiatan akademik, tetapi juga kegiatan non akademik. Dalam brosur penerimaan mahasiswa baru harus disebutkan bahwa pihak kampus akan menjamin kebebasan berekspresi bagi tiap komunitas adat dan keyakinan. Selama ini kebebasan secara mencolok hanya diperuntukkan bagi mayoritas saja. Jika komunitas Islam bebas menggelar pembacaan sholawat yang dihadiri oleh ribuan orang, harus diberlakukan pula bagi kelompok agama lain. Komunitas Kristiani juga bebas menggelar Kebaktian Kebangkitan Rohani (KKR) di kampus secara terbuka. Begitu pula dengan komunitas agama lainnya, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya.

Kelompok-kelompok yang sangat minoritas selama ini juga mengalami kesulitan untuk mengekspresikan keyakinannya secara terbuka. Terhadap mereka, kampus tidak cukup hanya melayani secara khusus karena mereka berbeda dari kelompok yang lain. Kampus juga harus memberikan ruang kebebasan bagi mereka setara dengan kelompok lainnya. Saksi-saksi Yehuwa, misalnya, kelompok ini memiliki kesulitan untuk mencari tempat untuk melaksanakan ibadahnya secara terbuka. Jika di suatu perguruan tinggi terdapat pemeluk sekte ini, maka kampus memiliki kewajiban untuk memperlakukan sama dengan sekte-sekte lainnya. Jika ini dilakukan, maka kampus tidak hanya turut serta dalam gerakan penghapusan terhadap tindakan intoleransi saja. Kampus semacam ini akan menjadi lembaga dengan daya saing yang tinggi.

Dalam Resolusi PBB tentang Penghapusan Intoleransi Berdasarkan Agama disebutkan bahwa siapapun memiliki hak kebebasan berpikir, nurani, dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau apa pun keyakinan yang menjadi keyakinan yang menjadi pilihannya. Kebebasan itu baik secara individu atau bersama-sama dengan kelompok yang lain. Secara umum atau pribadi, tiap orang bebas untuk mengamalkan agama atau

keyakinannya dalam beribadah, menjaga dan melaksanakan, serta mengajarkannya.

Tiap manusia bebas menjalankan agamanya, dan juga bebas memilih dan berpindah keyakinan yang diinginkannya. Dalam salah satu tulisannya di *Young India*, 29 Mei 1924, Mahatma Gandhi [10] menulis tentang kesetaraan semua pemeluk agama. “Hindu, dengan pesan-pesan Ahimsanya, bagiku adalah agama yang paling mulia, seperti istriku bagiku adalah perempuan tercantik di dunia. Tetapi yang lain boleh merasakan yang sama tentang agama mereka sendiri. Kasus-kasus perubahan agama yang nyata dan jujur cukup mungkin untuk terjadi. Jika beberapa orang, karena kepuasan dan pertumbuhan batin mereka, merubah agamanya, biarkanlah.”

Sebagai kampus multikultural yang sama sekali tidak ada ikatan apapun dengan agama tertentu, dan lepas dari denominasi tertentu pula, maka memiliki kewajiban sebagai perpanjangan tangan paham kebangsaan, yakni melayani seluruh pemeluk agama yang ada dalam komunitas kampus tersebut. Dikotomi mayoritas dan minoritas masih terdengar nyaring, dan belum ada upaya untuk melunturkannya. Beberapa problema yang seringkali dihadapi memang lebih pada persoalan keberanian menentang arus. Tekanan sosial dan politik selalu menjadi penghalang ke arah sana.

Kampus-kampus non agama, terutama kampus yang dikelola oleh masyarakat belum menyediakan sarana ibadah bagi semua komunitas keagamaan. Sarana yang tersedia sebatas untuk mayoritas pemeluk agama di lingkungan tersebut. Minoritas merasakan belum mendapatkan pelayanan yang memadai dalam perkara mengekspresikan keagamaannya. Sebagai negara dengan populasi pemeluk terbesarnya beragama Islam, sudah hampir bisa dipastikan bahwa di tiap kampus tersedia tempat ibadah Islam. Beberapa kampus yang juga menyediakan tempat ibadah selain Islam belum menempatkannya sejajar dengan tempat ibadah umat Islam. Bahkan beberapa di antaranya sengaja disembunyikan dan disamarkan untuk menghindari protes.

Contoh kasus yang terjadi di kota Malang, misalnya. Di beberapa perguruan tinggi di kota Malang memiliki jumlah mahasiswa dari Indonesia Timur yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagian besar pendatang tersebut umumnya pemeluk Kristiani. Dalam beberapa kasus jumlah pemeluk Kristiani di kampus-kampus tersebut hanya memiliki selisih jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan pemeluk Islam. Tempat ibadah untuk umat Kristiani di kampus-kampus tersebut belum kelihatan mencolok, atau bahkan barangkali tidak ada.

Jika agama tertentu secara bebas bisa menunjukkan simbol-simbolnya, mengapa yang lain tidak. Sepanjang agama lain tidak memiliki kebebasan untuk menunjukkan simbol-simbol itu, apa yang dinamakan kampus multikultural tersebut adalah omong kosong. Jika simbol-simbol itu dianggap mengganggu, justru kebijakan yang harus diambil sebaiknya sekalian pemakaian simbol-simbol itu ditiadakan tanpa terkecuali. Dengan tidak adanya simbol-simbol itu maka pihak penyelenggara sudah berbuat netral atas semua golongan agama. Tidak adanya simbol bukan berarti kampus multikultural tidak menyediakan tempat ibadah bagi civitas akademika. Tempat-tempat ibadah itu harus steril dari identitas yang mencolok.

Selama ini hanya masjid dan mushola yang merupakan identitas agama yang paling ditonjolkan di kampus. Identitas tersebut tidak hanya dalam bentuk papan nama yang mencolok. Pengeras suara melantunkan simbol-simbol keagamaan adalah bentuk ekspresi bebas. Jika mayoritas merasa keberatan terhadap simbol-simbol agama lain, maka bisakah kita berpikir dalam posisi sebagai minoritas? Mereka pun sebenarnya juga keberatan dengan simbol-simbol yang diusung oleh mayoritas ke ruang publik. Lebih-lebih yang mengganggu ketenangan dan ketenteraman sosial.

Agama adalah hak asasi yang paling mendasar. Pilihan terhadap agama yang dipeluk adalah urusan pribadi, termasuk hak untuk tidak memilih agama tertentu. Warisan yang salah kaprah mestinya sudah harus ditinggalkan. Sekali pun Mahkamah Konstitusi

telah memutuskan untuk bisa mencantumkan agama di luar enam agama yang diakui oleh pemerintah, namun pelaksanaannya masih setengah hati. Selama Orde Baru berkuasa, agama diperalat dalam ranah politik. Islam dikontraskan dengan komunisme. Sebagai salah satu kekuatan sosial yang menentang kekuatan komunisme, kata Neil Mulder, [12] kekuatannya dimobilisir dalam penumpasan PKI, di saat jatuhnya rezim Soekarno, dan oleh karena itu Islam menjadi sekutu alamiah dari pemerintah baru yang dikuasai oleh militer.

Seni dan masa depan kampus multikultural

Ki Hadjar Dewantara [11] dalam pidatonya pada sidang Komite Nasional Pusat (DPR) di Malang tanggal 3 Maret 1947 menyatakan bahwa kemerdekaan seutuhnya, tidak hanya kemerdekaan politik saja, tetapi merdeka dalam hidup kebudayaannya, merdeka dalam caranya mewujudkan hidup dan penghidupannya sendiri. Apa perlunya kita mengejar dan mencapai kemerdekaan politik, kalau dalam kebudayaan kita, dan sifat hidup dan penghidupan kita, kita mengekor, membuntut dan dijajah bangsa lain. Awal atau akhir, kemerdekaan politik kita akan terdesak, akan lenyap atau tidak berarti, kalau tidak didasarkan pada kemerdekaan budaya.

Pernyataan Ki Hadjar Dewantara tersebut tidak didasari pada kebenciannya kepada budaya asing. Ia lebih menekankan pada kesadaran betapa pentingnya landasan pendidikan dengan corak kebangsaan. Ki Hadjar Dewantara juga menolak pengembalian bahasa Belanda ke sekolah, dengan alasan untuk menghargai dan memertahankan bahasa sendiri. Ia takut orang Indonesia lebih mencintai bahasa Belanda daripada bahasa Indonesia. Kecintaan kepada bahasanya dapat berakibat pada kecintaan kepada negaranya. Maklum pada saat itu Indonesia baru merdeka, sehingga segala kekhawatiran pasti akan muncul.

Rapuhnya persatuan kita dewasa ini antara lain dikarenakan kita belum mencapai kemerdekaan dalam hal kebudayaan. Memang tak selamanya pengaruh asing itu membawa dampak buruk bagi

pengembangan kebudayaan kita, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa demi kepentingan politik daya filter kita terhadap pengaruh asing dirasakan semakin lemah. Dunia pendidikan mendapatkan dampaknya secara langsung. Pendidikan tak dapat dipisahkan dari politik. Semua kebijakan pendidikan adalah kebijakan politik.

Di samping kesenian itu adalah salah satu unsur kebudayaan, kesenian juga menyimpan sejarah budaya bangsa dalam semua unturnya. Melalui kesenian, sebuah generasi dapat menimba kebijakan-kebijakan yang telah dilahirkan oleh bangsanya di masa lalu. Indonesia, dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya menyimpan khasanah kesenian yang tak ternilai harganya. Dalam tradisi seni itu terletak kearifan masa lalu dari etnis-etnis yang mendiaminya. Salah satu daya tarik suatu tempat adalah karya seninya.

Kesenian memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi. Kesenian, terutama sastra, tidak hanya memiliki fungsi sebagai hiburan, namun lebih jauh dari itu mengemban tugas mulia sebagai pembentuk karakter. Dalam sastra, kata Mudji Sutrisno, [13] simbolisasi terutama ekspresif dan evaluatif sebagai isi sistem budaya muncul kentara dalam konteks ide-ide, gagasan, nilai, norma. Di situ pula nilai budaya bisa ditelusuri lewat kehidupan tokoh-tokohnya, lewat cara penyajian, melalui pengucapan penulisnya (elemen-elemen sastra, meliputi unsur kehidupan, unsur penulisan, elemen teknis/gaya).

Dalam membahas estetika Lukacs, Greg Sutomo [14] menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya refleksi total karya seni ditentukan oleh kemampuannya untuk mengatasi keterpecahan hidup sehari-hari. Warna keterpecahan inilah yang menekan munculnya kesadaran manusia. Lukacs, kata Sutomo, menganggap bahwa keseluruhan dunia seni itu membangun media yang homogen, dan kemudian melahirkan cara pandang holistik dalam diri sang penikmat. Lukacs menganggap bahwa karya-karya seni realis yang merupakan media yang menyatukan akan membawa si pembaca karya sastra, misanya, memfokuskan pada satu titik perhatian. Dalam pengalaman

estetis tadi, segala keterpecahan pembaca dibawa pada satu kesatuan jiwa.

Berkesenian adalah bentuk penghayatan terhadap nilai-nilai. Nilai-nilai itu digali dari peradaban masa lampau dan diberi arti dalam konteks masa kini. Seni sastra misalnya, telah menyumbang pembangunan peradaban bagi banyak bangsa di dunia ini. Sebagai penghormatan terhadap sastrawannya, bahkan beberapa negara malah menjadikannya sebagai ikon. Melalui nama sastrawan itu, negara tersebut dikenal. Di belahan dunia mana orang yang tak mengenal nama Goethe? Sastrawan Jerman ini menjadi nama lembaga kebudayaan Jerman yang memiliki kantor di seluruh dunia. Nama Goethe tak dapat dipisahkan dengan Jerman.

Coba kita tengok ke negeri kita sendiri. Sudahkah Indonesia bangga dengan W.S. Rendra, Chairil Anwar, atau Sutan Takdir Alisyahbana? Tampaknya masih perlu dipertanyakan. Nama-nama tersebut masih belum bisa mengungguli nama-nama tokoh politik maupun pemain bola di negeri ini. Karya sastra juga belum mendapatkan tempat yang layak di media masa kita. Dulu, pada saat media massa sedang mengalami kejayaan, rubrik olahraga menempati beberapa halaman koran. Sastra dan juga bentuk kesenian lain paling-paling hanya mendapatkan jatah seminggu sekali, itu pun tidak satu halaman penuh. Beberapa media massa memang telah memberi porsi untuk kesenian cukup memadai, tetapi jumlah media tersebut tidak banyak.

Kebutuhan akan penikmatan terhadap karya seni bukanlah prioritas bagi kehidupan Indonesia saat ini. Kurangnya penghargaan kita terhadap hasil karya, menurut Koentjaraningrat, [15] akibat dari kemiskinan. Kebutuhan akan kualitas dari hasil karya kita, dan tasa peka kita terhadap mutu, kata Koentjaraningrat, sudah hampir hilang. Hal itu rupa-rupanya adalah akibat dari kemiskinan yang melanda bangsa kita. Demikian kita sampai tak sempat memikirkan mengenai mutu dari pekerjaan yang dihasilkan dan mutu dari barang dan jasa yang kita konsumsi.

Pembelajaran sastra dari tahun ke tahun juga belum beranjak pada tujuan yang sebenarnya. Anak didik kita lebih banyak dicekoki secara kognitif daripada disentuh secara afektif ketika mereka menerima pelajaran ini. Dari dulu hingga kini yang mereka hafal hanyalah nama pengarang beserta judul-judul karyanya. Minimnya penghayatan terhadap karya-karya sastra tersebut memiliki korelasi positif terhadap tingkat kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap karya sastra.

Kampus multikultural harus beranjak dari paradigma lama, dan melangkah melangkah membangun paradigma baru. Program studi pendidikan bahasa dan sastra, misalnya, harus mencetak calon guru yang memiliki wawasan kesusastraan yang mantap, yang tak hanya pandai bercerita tentang sejarah sastra melulu, namun harus mampu membelajarkan sastra dengan objek langsung karya sastra.

Di tiap-tiap daerah pasti memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Di Malang ada Wayang Topeng, di Banyuwangi ada Gandrung Banyuwangi, di Ponorogo ada Reog. Perguruan tinggi setempat diharapkan menjadi pusat studi bagi kesenian lokal tersebut. Seniman-seniman daerah pada umumnya mengalami krisis yang cukup serius. Krisis tersebut tidak hanya menyangkut sulitnya pewarisan kepada generasi muda, dikarenakan minat yang kurang, tetapi karena kurangnya keterlibatan pemerintah. Beberapa pemerintah daerah kurang bahkan ada yang tidak memperhatikan tumbuh kembangnya kesenian daerah. Seniman-seniman tersebut harus mengeluarkan keringat dan merogoh kocek dalam-dalam untuk mempertahankan budaya lokalnya. Dalam persoalan ini kampus multikultural bisa memerankan diri sebagai koordinator bagi para seniman daerah.

Kampus multikultural bisa menyediakan tempat mereka berekspresi. Dengan demikian maka terjadilah simbiosis mutualisme. Para seniman merasa dihargai karyanya, mendapat kesempatan untuk “manggung” dan dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Bagi kampus, ini sangat menguntungkan, karena akan meningkatkan citra

di masyarakat. Orang-orang yang rindu dengan kesenian tradisional akan berbondong-bondong datang ke kampus tersebut. Bagi perguruan tinggi swasta ini adalah sarana promosi secara tak langsung, sekaligus mengalihkan cara-cara promosi konvensional yang hanya bermain lewat brosur.

Selama ini banyak peneliti kesenian daerah dan tradisi lokal sangat direpotkan dalam hal pengambilan data. Semakin langkanya pelaku seni dan lokasi berkembangannya kesenian daerah yang terpencah di sejumlah tempat, menjadikan kesenian daerah semakin terpinggirkan. Kampus multikultural bisa menjadi pusat data bagi sejumlah peneliti. Peran sebagai mediator yang akan menjembatani komunikasi antara pelaku seni dan para peneliti juga bisa dimainkan. Dengan demikian kampus multikultural akan berperan maksimal untuk merevitalisasi kesenian lokal.

Kesimpulan

Banyaknya perguruan tinggi yang memproklamasikan diri sebagai kampus multikultural memiliki efek positif bagi publik. Slogan tersebut menyadarkan masyarakat kita betapa pentingnya menerima dan menghayati keragaman budaya di sekitar kita. Perguruan tinggi adalah elemen masyarakat terdepan dalam merawat kebhinekaan, sebab di sana terletak calon pemimpin masa depan. Sekadar slogan mungkin belum cukup. Perguruan tinggi dengan label kampus multikultural harus membangun infrastruktur yang memenuhi syarat bagi predikat itu. Infrastruktur yang dimaksud tidak hanya infrastruktur fisik dalam bentuk bangunan yang mencerminkan keragaman semata. Yang lebih penting dan sangat mendesak bagi kampus multikultural adalah menyiapkan infrastruktur sosial-budayanya. Manusianya harus dibangun terlebih dulu.

Seberapa sanggup civitas akademika dalam menyiapkan diri sebagai pribadi yang patut menjadi teladan adalah tolok ukurnya. Keteladanan itu diwujudkan dalam bentuk kesanggupan melayani tanpa membedakan bagi semua golongan tanpa terkecuali. Kampus

multikultural harus memberikan ruang yang sama, baik kepada mayoritas maupun minoritas. Kelompok-kelompok yang dianggap paling minoritas yang selama ini sulit mendapatkan ruang berekspresi harus ditempatkan yang setara dengan mayoritas. Jika ini dilakukan, maka di situlah letak daya saing kampus multikultural.

Referensi

- [1] Alam, Wawan Tunggul (Ed). "Pidato Pertama tentang Pancasila, 1 Juni 1945 oleh Bung Karno." *Bung Karno, Menggali Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- [2] W.H. Rassers. *Civa dan Buddha di Kepulauan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- [3] Arif, Syaiful. *Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Depok: Penerbit Koekoesan, 2010.
- [4] Rosariyanto SJ, F. Hasto. "Visi Politik Pembebasan Gereja Berhadapan dengan Kolonialisme." *Orientasi Baru, Jurnal Filsafat dan Teologi* No. 11, pp. 41-52, 1998,
- [5] Alisjahbana, Sutan Takdir. *Perjuangan Tanggung Jawab dalam Kesusasteraan*. Cet. 2. Jakarta Pustaka Jaya. 1984.
- [6] Muji Sutrisno. *Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Hujan Kabisat, 2008.
- [7] Laksono, P.M. "Pendidikan Humaniora." *Pendidikan Bebas: Menuju Pribadi Mandiri*. Yayasan De Britto, pp. 53-64, 1999,
- [8] "Indonesia's Place Along the Spectrum of Global Religious Restriction." 4 November 2010.
<https://www.pewforum.org/2010/11/04/indonesias-place-along-the-spectrum-of-global-religious-restriction/>
- [9] Litle, David, John Kelsay, Abdulaziz A. Sachedina. *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1997.
- [10] Ellberg, Robert (Ed). *Gandhi on Christianity*. Yogyakarta: LKiS. 2004.
- [11] Mulder, Neil. *Ruang Batin Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- [12] Dewantara, Ki Hadjar. *Pendidikan*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Majelis Persatuan Luhur Taman Siswa, 2004.

- [13] Sutrisno, Muji. *Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Hujan Kabisat, 2008.
- [14] Sutomo, Greg. *Krisis Seni Krisis Kesadaran*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- [15] Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Cet. 21. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Membangun Masyarakat Berkebudayaan Bermutu Melalui Pendidikan Multikultural

Gatot Sarmidi ¹

Pengantar

Di masa lalu pendidikan di Indonesia bercirikan keseragaman. Pendidikan tersebut berlandaskan pada Kebudayaan Nasional yang mencakup puncak-puncak keunggulan kebudayaan-kebudayaan daerah yang telah berkembang secara turun-temurun. Sebagai akibat dari penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada monokultural tersebut ternyata rentan konflik. Atas alasan itu perlu dirancang model pendidikan yang mewadahi banyak budaya yang lebih harmonis. Konsep pendidikan multikultural menjadi pilihan strategis dalam rangka mengelola pendidikan yang lebih aman dari konflik.

Sebagai sebuah strategi pengelolaan pendidikan yang harmonis, pendidikan multikultural perlu dipahami, dikembangkan dan dihargai. Pada lembaga pendidikan yang menaungi masyarakat yang memiliki berbagai macam latar budaya yang berbeda beda etnis, asal kelompok sosial, latar ekonomi, identitas, dan psikologis, pendidikan multikultural sebaiknya diterapkan dan dapat dipahami bersama untuk mewujudkan masyarakat berkebudayaan yang bermutu tinggi dengan keunggulan yang handal, mampu berdaya saing, dan tidak mudah terpancing konflik.

Dalam rangka membangun masyarakat berkebudayaan unggul, pendidikan multikultural merupakan kekuatan yang bernilai untuk membangun karakter maju, kreatif, jujur dan berbudi pekerti baik. Pada awalnya, gagasan tentang pendidikan multikultural hanya berguna untuk tujuan peredaman konflik sosial pada masyarakat majemuk (*cultural pluralism*) lebih lanjut dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai kesadaran terhadap kesamaan derajat, sikap demokratis, toleransi, dan rasionalitas pemahaman lintas budaya

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

(cross cultural understanding)). Dalam konteks pendidikan, gagasan tersebut dirancang melalui pengembangan kurikulum terpadu berlandaskan pendidikan multikultural.

Pada dasarnya, pendidikan multikultural berakar pada pendidikan berkebudayaan. Pengertian kebudayaan hampir dijumpai pada aktivitas sehari-hari. Secara sederhana budaya mencakup sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem pencaharian hidup, dan sistem teknologi peralatan [1]. Demikian luas wujud budaya. Wujud budaya sebagai kompleks gagasan, nilai, dan norma sebagian besar bersifat mengharuskan atau melarang. Budaya itu bersifat normatif, menghendaki agar perilaku menjadi pola tertentu yang dipatuhi dan dilaksanakan baik sebagai *univers*, *spesialitas*, maupun *alternatif*. Tetapi, pola perilaku tersebut dalam perkembangannya bersifat dinamis, dikembangkan, dipatuhi atau sebaliknya ditinggalkan, termasuk di dalamnya wujud kebudayaan sebagai kompleksitas aktivitas pola perilaku masyarakat atau wujud kebudayaan sebagai benda-benda artefak hasil karya manusia.

Budaya sendiri mencakup adat-istiadat, pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan kebiasaan masyarakat, organisasi produksi, struktur keluarga, kekerabatan, tata norma dan tata nilai. Segala ciptaan dan tatanan perilaku manusia yang indah atau buruk, yang serba adap atau tidak merupakan kebudayaan. Budaya yang diikuti oleh warga masyarakat secara menyeluruh disebut *univers*. Sementara, budaya yang hanya diikuti oleh sekelompok masyarakat tertentu disebut *spesialitas*. Begitu pula, budaya yang diikuti oleh sekelompok warga masyarakat tertentu karena pilihannya yang mengatasi pilihan atas unsur budaya serupa disebut *alternatif*.

Setiap budaya memiliki karakteristik. Karakteristik budaya merupakan sesuatu yang umum sekaligus spesifik. Setiap individu yang berbudaya memiliki ciri tertentu dalam kelompok yang juga memiliki ciri tertentu. Budaya itu merupakan sesuatu yang bisa dipelajari, diwariskan atau diturunkan dari generasi ke generasi

berikutnya serta bisa dikembangkan sebagai bentuk hasil inovasi, transformasi, dan kreasi. Di antara itu, Yaqin (2005:8) menyebutkan budaya sebagai: (1) simbol, (2) bentuk yang melengkapi sesuatu yang alami, (3) atribut individu sebagai anggota kelompok masyarakat, (4) model, dan (5) hasil adaptasi. Sedang Liliweri meninjau budaya dari segi karakter kelompok budaya berdasarkan perbedaan etnis, mencakup (1) keunikan peragai budaya, (2) perasaan satu komunitas, (3) perasaan etnosentris, (4) status keluarga karena keturunan, dan (5) berdiam dalam teritorial tertentu[2].

Selanjutnya, Yaqin menjelaskan bahwa budaya memiliki sejumlah karakter khusus di antaranya (1) sesuatu yang general dan sekaligus spesifik, (2) sesuatu yang bisa dipelajari, (3) sebuah simbol, (4) dapat membentuk sesuatu yang alamiah, (5) sesuatu yang dapat dilakukan bersama menjadi atribut bagi individu atau kelompok, (6) sebagai model, dan (7) bersifat adaptif[3]. Budaya juga memiliki wilayah, di antara lokal, nasional, regional, dan internasional sehingga muncul istilah kultur dan subkultur. Salah satu karakter budaya adalah dapat dipelajari. Oleh karena itu budaya berkembang melalui proses pembelajaran atau pendidikan, baik melalui inkulturasi maupun sosialisasi. Dalam konteks budaya, ada beberapa istilah yang perlu didiskusikan dalam membicarakan masyarakat multikultural, di antaranya etnosentrisme dan relativisme budaya, prejudis dan stereotipe, dan diskriminasi.

Secara operasional, pendidikan multikultural memerlukan sumber belajar yang jamak bagi pembelajar (*multiple learning environment*). Pendidikan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik secara akademis atau kebutuhannya secara sosiokultural [4]. Kemajemukan dalam konteks pendidikan multikultural secara jujur perlu diakui dengan lapang dada dan dikelola dengan cermat untuk dihargai keberadaannya dengan cara saling menghormati satu dan lainnya [5].

Perubahan sosial ekonomi mempengaruhi perbedaan bangsa dan negara. Perubahan ini digambarkan sebagai globalisasi yang

mempengaruhi pada pengurangan pada jarak, hubungan lebih kuat perbedaan antara wilayah geografis. Juga, mobilitas masyarakat dan arus kemajuan yang lebih pesat bersamaan itu arus migrasi baru dan keberagaman. Walaupun migrasi dan keberagaman sebenarnya fenomena manusia sejak zaman purbakala. Hal itu berdampak pada kesetaraan antara penduduk setempat dengan pendatang. Akhirnya, muncul perlakuan diskriminatif yang memicu konflik dan kekerasan. Dalam konteks pendidikan, kekerasan yang umum adalah menjauhkan orang-orang yang berbeda. Pengucilan tersebut dalam konteks pendidikan ditafsirkan sebagai kekerasan dan dimaknai sebagai penindasan psikologis. Oleh karena itu, kekerasan tidak membantu memecahkan masalah. Setiap kekerasan bergeser dan menghasilkan bentuk kekerasan baru yang lama-lama larut dalam kondisi konflik. Asimilasi atau pembaruan dua perbedaan budaya dengan ciri hilangnya kekhasan budaya asli hingga membentuk budaya baru digunakan sebagai penyikapan terhadap dampak keberagaman budaya. Hal itu, Agustian menyebutnya sebagai metode, yakni metode segregasi untuk menyikapi keberagaman budaya. Dalam konteksnya, terdapat orang-orang yang berbeda etnis, bahasa, budaya, dan agama yang dipisahkan oleh kelompok dominan. Model peleburan (*melting pot*) lebih dikenal yang pada dasarnya mirip dengan prinsip demokrasi. Perbedaan budaya digambarkan untuk membentuk suatu budaya yang seharusnya dapat berlaku di semua wilayah. Semua orang yang berdampingan hidupnya karena berbeda budaya, dengan budaya masing-masing tetapi tidak saling peduli dan tidak saling mengganggu. Pengkondisian seperti ini biasa disebut dalam konsep pendidikan sebagai model *salad bowl* [6].

Pendidikan multikultural hadir karena masalah manusia, yakni keberadaan manusia ditindas karena perbedaan. Dalam pandangan pendidikan multikultural, manusia saling dimuliakan, dan dipandang sama atau setara. Mereka saling bisa bekerja sama walaupun di antaranya berbeda ras, agama, gender, cara pandang, dan suku

bangsa sehingga mereka dapat menghargai perbedaan budaya di antaranya.

Dalam pendidikan multikultural terdapat kesetaraan mendapatkan perlakuan pendidikan meskipun di antara mereka terdapat perbedaan sosial dan budaya. Sebagai proses, pendidikan multikultural bukan aktivitas *one-shot*. Pendidikan multikultural adalah kehidupan yang memandang ada kebebasan dan keadilan yang dapat dicapai sebagai idealisme manusia. Pendidikan multikultural dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan dipandang sebagai strategi yang melibatkan lebih dari satu budaya, ras, etnis, agama, dan gender, dan bukan pendidikan yang hanya berlaku sesaat atau berlaku sekarang.

Pembahasan

Pendidikan multikultural lebih cocok diterapkan pada masyarakat yang berbeda budaya. Pada masyarakat yang ada di wilayah hunian warga dengan banyak perbedaan di antara mereka, status sosial, strata sosial, etnis, budaya menentukan keberadaan di antara mereka. Pendidikan multikultural memiliki terapan untuk menunjang mutu masyarakat dalam berbudaya dan berpendidikan. Kekuatan pendidikan multikultural terletak pada efektivitas mengakomodasi dominasi kekuasaan suatu etnis dan budaya. Beberapa teknik bisa dilakukan dan dilaksanakan dalam pendidikan multikultural. Di antaranya, akulturasi ganda dan proses pemajemukan budaya. Pendidikan multikultural berbeda dengan enkulturasi. Pendidikan multikultural lebih menekankan pada proses memperoleh pengetahuan untuk mengontrol orang lain demi keharmonisan kehidupan. Enkulturasi lebih menekankan pada integrasi struktural.

Kemajemukan (pluralitas), keberagaman (kebhinekaan atau diversitas), kebermacam-macam (multiformis), dan kepelbagaian (heterogenitas) dalam masyarakat dan budaya adalah keniscayaan. Kenyataan itu secara jujur dan lapang dada terjadi dalam

pembentukan bangsa dan negara sejak zaman dahulu. Walaupun, banyak faktor yang membuat perbedaan-perbedaan itu menjadi berdampak buruk karena muncul arogansi, kebencian, kesombongan, keminderan, ketidakadilan, dominasi, pengarusutamaan, hegemoni, banyak hal hingga ada penolakan, pengabaian, pengucilan, peminggiran (marjinalisasi), pelecehan, kekerasan simbolik, prasangka buruk, kata kata bernada benci, pengabaian, penyesalan, cekcok, pembiaran, dan pemojokan. Kesetaraan pendidikan menumbuhkan sikap kritis terhadap intoleransi kehidupan. Dari sinilah timbul emansipasi sosial dalam konteks pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural merupakan langkah untuk tidak mengingkari, menyembunyikan, menghancurkan, mengabaikan, menghilangkan, bahkan memusnahkan kemajemukan dan keberagaman budaya. Pendidikan multikultural adalah usaha agar masing masing individu yang berbeda dapat hidup bersama (*life together*) secara damai dan harmoni. Mereka bisa hidup damai di antara kemajemukan dan kebhinnekaan yang saling mengerti, kooperatif, kolaboratif, memiliki kesatuan suka cita, serta mutual intelligibility.

Pendidikan multikultural bertentangan dengan konsep pendidikan yang mengupayakan atau merekayasa ketunggalan (monolitas), kesatu-samaan (homogenitas), dan keseragaman (unformitas) masyarakat dan kebudayaan. Dalam bingkai heterogenitas, pluralisme, dan multikulturalisme bukan penunggalan, penyatuan, dan penyeragaman masyarakat dan kebudayaan. Konsep pendidikan multikultural prinsipnya membangun sekaligus mewujudkan saling pengertian dalam konteks merdeka belajar. Dalam pendidikan tersebut tercipta toleransi, kebersamaan, kerukunan, kerja sama, dan sinergi di tengah-tengah perbedaan dalam kelompok atau multikultural grup.

Semangat multikulturalisme terdapat dalam kemampuan belajar hidup bersama yang selaras, serasi, dan harmonis (*learning to life together*). Dalam masyarakat yang majemuk bahkan multilingual

serta berdasarkan semangat hidup bersama dalam kehidupan bersama di dalamnya ada kesadaran multikultural (*multicultural awareness*) dan perilaku multikultural (*multicultural behavior*). Keduanya dalam konteks pendidikan multikultural ditumbuhkan untuk memantapkan keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara. Utamanya dalam konteks penumbuhkembangan pendidikan multikultural di Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. Caranya dengan menguatkan pemahaman dan semangat serta tindakan perantauan budaya (*passing over*). Secara terpadu, pemahaman lintas budaya dan pembelajaran lintas budaya (*learning a cross culture*) disematkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah sebagai piranti belajar hidup bersama yang harmonis.

Program pendidikan multikultural dikemas dengan beberapa arah dan orientasi serta tujuan yang strategis. Tujuan pendidikan multikultural di antaranya membantu peserta didik agar memiliki keunggulan berbudaya. Pendidikan multikultural dimanfaatkan untuk menciptakan peserta didik dalam (1) memahami diri dan kelompoknya di masyarakat, (2) memiliki sikap hormat dan mampu menghargai budaya dalam konteks kebhinekaan, multietnis, dan sosio-historis, (3) memecahkan masalah konflik sosial yang dipicu oleh prasangka dan sikap-sikap yang kurang menguntungkan karena terlalu primordial dan etnosentris, (4) memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, sejarah, bahasa, dan psikologis yang menjadi penyebab polarisasi etnis, bias gender, pemojokan karakter, ketimpangan sosial, dan keterasingan etnis, (5) meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah-masalah rutin berdasarkan isu-isu sosial budaya melalui proses demokratis dan inkuiri dialogis, (6) mengkonseptualisasi dan menginspirasi visi masyarakat tentang kehidupan berbudaya dan adat istiadat yang adil, bebas, dan lebih baik, dan (7) mengembangkan jati diri yang bermakna bagi banyak orang.

Pendidikan multikultural diuraikan dalam unsur-unsur kebudayaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap strategis dalam konteks membangun kehidupan berkebudayaan yang unggul.

Uraian konseptual, asumsi teoritis dan implementasi teoretis tindakan mendidik (*educational endeavors*) digunakan untuk mengembangkan pendidikan. Secara teoritis pengembangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan akademis yang substansi pembelajarannya digali dan diarahkan pada khasanah sosial budaya yang esensial, misalnya suku, agama, ras, tradisi, kearifan lokal, dan masyarakat serta perspektif gender.

Pewarisan budaya berlangsung melalui suatu transmisi sosial yang disebut proses belajar mengajar. Sedangkan perawatan budaya berlangsung melalui proses penciptaan termasuk di dalamnya industri kreatif, ekonomi kreatif, inovasi teknologi, improvisasi kebudayaan, dan berbagai revisi terhadap pola hidup, gaya hidup, dan tata nilai. Dalam konsep pendidikan multikultural proses belajar dan mengajar diumpamakan sebagai upaya penumbuhkembangkan di luar (*ekstergestasi*) dan proses pewarisan pola perilaku instingtif diumpamakan sebagai proses pengandung (*uterogestasi*).

Pengembangan dan pewarisan kehidupan dalam konteks pendidikan multikultural bersifat kompleks. Perbedaan makna budaya disebabkan oleh perbedaan disiplin dalam memandang dan mengulas secara konstan. Deskripsi budaya dicermati, dipahami, dan dianggap penting dalam konsep kunci untuk melihat pendidikan dalam perspektif multikultural. Budaya bermakna bagi semua orang. Budaya juga bernilai sepanjang waktu. Budaya bernilai untuk merespon kompleksitas pengalaman dalam hubungannya dengan kondisi kehidupan masyarakat dimana masyarakat tersebut memiliki perbedaan-perbedaan dan kesamaan kepercayaan, pandangan, sikap, dan tingkah laku budaya. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan-perbedaan dan kesamaan budaya diekspresikan secara verbal dan nonverbal, diantaranya melalui mimik, gestur, cara berpakaian, simbol-simbol, sejarah, arsitektur, aturan seks, protokoler, hubungan kekuasaan, properti, musik, seni, sastra, tari, pertunjukan, makanan, olah raga, perayaan, pesta, hiburan, mitos, dan pengaturan kesehatan.

Semakin kompleks lingkungan budaya dalam masyarakat maju. Usia, kelas sosial, perbedaan etnis, dan orientasi seks menjadi faktor yang secara evolutif berkembang di sana. Faktor-faktor itu sementara dan berbeda-beda. Dalam masyarakat yang budayanya sudah maju, budaya tidak dipahami sebagai koleksi, praktik, dan tradisi kepercayaan yang pasif. Kedinamisan budaya menjadi ciri dari masyarakat tersebut.

Pada masyarakat yang maju, hakikat budayanya berubah senantiasa memiliki kebaruan-kebaruan karena masing-masing unsur budayanya saling mempengaruhi dan menginterferensi satu dan lainnya. Pemahaman budaya dalam masyarakat yang sudah maju mengharuskan setiap individu di dalamnya untuk senantiasa terus belajar. Dalam masyarakat tersebut diharuskan memiliki kemampuan berinovasi dan menyesuaikan diri dalam keragaman budaya. Baik dalam kelompok belajar, kelompok kerja, dan kelompok sosial yang berbeda budayanya membaur satu dan lainnya karena di dalamnya menyimpan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan satu dan lainnya. Budaya dipahami secara alami dan bersama-sama dipersepsi dan dihasilkan oleh individu atau kelompok.

Dalam mengembangkan pemahaman, perilaku, dan arti hidup berbudaya, model pengembangan pendidikan multikultural diperlukan sebuah konsep pembelajaran yang dirancang khusus. Model pembelajaran tersebut didesain berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik yang didasarkan pada konsep budaya majemuk atau pluralitas budaya. Pendidikan multikultural merupakan prosedur untuk melembagakan filosofi kebhinekaan berbudaya.

Pada awalnya, pendidikan multikultural dipengaruhi oleh doktrin yang memusatkan pandangan atas ras berdasarkan biologis. Secara sosiologis dan antropologis, pendidikan multikultural menghubungkan kategori ras dan kebudayaan sebagai identitas ketika antiras muncul. Akibatnya, muncul paham yang mendiskreditkan ras. Namun, paham itu berubah karena hadirnya beragam keturunan ras yang menghasilkan identitas budaya etnis. Paham multikulturalisme

diinternalisasi dalam setiap tatanan negara dan bangsa. Multikulturalisme menghancurkan keaslian bangsa-bangsa. Versi berbeda multikultural sedang terjadi pada masyarakat kota tempat lahirnya masyarakat kosmopolitan. Budaya kota merupakan bentuk eksagrasi sekaligus segregasi kebudayaan. Di satu pihak mengakui heterogenitas etnis dan ras, namun sisi lain membiarkan minoritas hidup dalam suasana kosmopolitan itu.

Multikulturalisme dan pluralisme merupakan suatu nilai. Penganjur multikulturalisme berargumentasi bahwa multikulturalisme merupakan cara menuju toleransi dan demokrasi politik. Di atasnya, karena perbedaan nilai tumbuh konflik. Multikulturalisme juga merupakan layanan demi *human being*. Pandangan ini melihat manusia itu sama sehingga tidak ada alasan membeda-bedakan manusia karena faktor biologis kecuali menjadikan kebudayaan sebagai faktor perekat. Agar melindungi perbedaan budaya, kebutuhan ini dapat dipuaskan.

Program pendidikan multikultural dapat dilaksanakan dan dikembangkan. Praktik terhadap penegasan kemajemukan budaya dan masyarakat menjadi bagian dari kebijakan terhadap pendidikan multikultural. Yang sebenarnya, pendidikan multikultural itu merupakan ikhtiar untuk memperkecil adanya gesekan-gesekan serta ketegangan-ketegangan karena perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Dalam hal ini, ada transformasi nilai dalam pendidikan multikultural, yakni transformasi pendidikan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, memuliakan manusia, menghargai perbedaan identitas diri, dan menghargai kehidupan yang melandaskan perbedaan-perbedaan cara pandang dan konsep kearifan lokal antar ras, etnis, dan budaya.

Berasal dari penerjemahan konsep, multikulturalisme dan pluralisme berkaitan dengan program pembelajaran yang dikembangkan. Pendidikan multikultural merupakan program pendidikan yang menyediakan lingkungan ganda bagi peserta didik. Lingkungan yang didesain tersebut disesuaikan dengan kebutuhan

akademis dan sosial peserta didik. Caranya: (1) menentukan standar kompetensi akademis yang mengacu pada konsep dasar nilai persatuan dan kesatuan yang demokratis mendasarkan pada keadilan, kebebasan, persamaan derajat dan saling menghargai dalam keberagaman budaya, (2) mengembangkan kompetensi sosial untuk menumbuhkan pemahaman atas latar belakang dan keberadaan pada budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat, (3) mengembangkan kompetensi berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*) secara akademis berupa kemampuan analitis dan kemampuan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah sosial budaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari melalui proses demokrasi, inkuiri, dan dialogis, dan (4) membantu mengonseptualisasikan dan menginspirasi kesamaan derajat dalam masyarakat secara demokratis dengan tujuan untuk membuat masyarakat memiliki kondisi berkebudayaan yang lebih bermutu.

Sebagaimana membangun masyarakat berkebudayaan yang bermutu didasari pada konsep masyarakat dan kebudayaan sebagai gejala yang manusiawi. Artinya bukan merupakan gejala alam. Masyarakat dan budaya bersifat bentukan atau gejala buatan, yakni hasil kreasi dari perjalanan hidup manusia dan kehidupannya di dunia. Penerjemahan fakta manusia bukan fakta alam dan kebendaan pemertahanan dan kelangsungan hidup dikembangkan dalam masyarakat melalui budayanya.

Masyarakat dan kebudayaan didasari dan ditandai oleh adanya kebersamaannya, keterikatan bersama, kesepakatan bersama, dan kelembagaan. Tanpa hadirnya kebersamaan, keterikatan bersama, kesepakatan bersama dan kesepakatan secara serempak dan terpadu niscaya masyarakat dan kebudayaan tidak terbentuk. Apabila kumpulan manusia hanya memiliki kebersamaan, apalagi kebersamaan secara kebetulan dan sesaat tanpa adanya keterikatan, kesepakatan, kelembagaan, mereka hanya crowd atau biasa dianggap sebagai kerumunan massa. Mereka tidak dianggap sebagai masyarakat.

Sesungguhnya, masyarakat dan kebudayaannya saling mengkondisikan dan membutuhkan. Prakondisi itu dalam masyarakat biasa disebut *conditio sine qua non* bagi keberadaan kebudayaan. Begitu juga, kebudayaan menjadi *conditio sine qua non* bagi keberadaan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, sering kali ditemukan anggapan yang diasosiasikan antara kebudayaan dengan bangsa dan negara. Dalam pandangan lebih tua, kebudayaan merupakan bawaan turun temurun (*heredity culture*). Dalam pandangan itu, tidak peduli kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat multikultural dalam prinsip multikulturalisme.

Sebenarnya, multikulturalisme merupakan pemahaman yang sederhana tentang budaya yang berbeda-beda yang ada dalam satu lingkungan kebudayaan. Kebudayaan yang berbeda-beda dalam masyarakat tersebut seharusnya dapat diterima oleh banyak orang tanpa pertimbangan demi terciptanya keseimbangan hidup dan kesetaraan sosial. Berbeda sekali dengan keseimbangan demi kekuasaan atau kesetaraan politik. Konsep multikulturalisme masuk dalam kurikulum universitas atau lembaga pendidikan yang didalamnya memiliki masyarakat pendidik atau mahasiswa yang datang dari beragam latar belakang etnis bahkan dari macam-macam ras yang ada di seluruh dunia.

Sebelum meningkatkan mutu masyarakat dalam berbudaya, kiranya perlu dikembangkan terlebih dahulu kompetensi berkomunikasi lintas budaya. Komunikasi tersebut dirancang untuk memahami makna hidup bersama dan berbudaya dengan cara memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan berbudaya melalui kebiasaan-kebiasaan dalam melakukan kegiatan berkomunikasi. Pada dasarnya, sebutan komunikasi lintas budaya (*cross culture communication*) digunakan sebagian ahli komunikasi dengan sebutan komunikasi antarbudaya (*intercultural communication*).

Perbedaan komunikasi antarbangsa dalam pergaulan antarbangsa konteks kewilayahan dan ras menentukan pembicaraan

tentang bagaimana perilaku, kebiasaan, norma-norma berkomunikasi ditentukan. Perbandingan fenomena kebudayaan yang satu dengan fenomena kebudayaan yang lainnya bisa dilakukan tanpa pembatasan konteks geografis, ras, atau etnis (*generally refers to comparing phenomena across cultures*). Contoh, kajian lintas budaya tentang peran perempuan di masyarakat yang berbeda kebudayaannya.

Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kegiatan kebudayaan. Umumnya, keterkaitan komunikasi lintas budaya dan komunikasi multikultural difokuskan pada konteks komunikasi antarbangsa tanpa adanya usaha pembentukan budaya baru sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi antarbudaya.

Semua orang berkomunikasi dengan konteks budayanya. Mereka dapat berkomunikasi antarpribadi, antar kelompok, dalam konteks komunikasi publik, komunikasi massa dan beragam konteks. Semua itu menunjukkan bahwa semua perilaku komunikasi manusia dipengaruhi oleh kebudayaan. Komunikasi merupakan bagian dari perilaku berbudaya, bagian dari perilaku kelompok atau budaya tertentu sebagai sebuah lensa kebudayaan yang digunakan untuk memandang situasi budaya yang ada.

Dalam pemahaman multikultural pengetahuan lokal dan pengetahuan tradisional perlu dipahami dalam berkomunikasi. Pengetahuan lokal merupakan wawasan yang berharga dalam pemahaman masyarakat multikultural. Tanpa mengenal pengetahuan lokal dan tradisional, orang akan gagap budaya. Begitu juga dengan kode-kode verbal dan kode-kode nonverbal. Komunikasi verbal manusia terdiri atas dua jenis utama, berbicara (*speech*) dan menulis (*writing*). Jenis simbol verbal, yakni oral, written, dan digital. Dalam komunikasi ini perlu dikuasai, yakni sisi semantis, sintaksis, pragmatik, denotasi, dan konotasi. Sementara kode-kode nonverbal biasanya melibatkan makna bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal bisa disengaja atau tidak disengaja. Isyarat nonverbal berbasis pada budaya. Kadang pesan nonverbal lebih dipercaya, dan pesan ini sering

ambigu untuk ditafsirkan sehingga rentan terjadi konflik. Bentuk kode verbal bisa waktu (kronemik), sentuhan (haptik), penampilan benda-benda (bentuk, warna, tekstur, suhu), kinesik (postur, ekspresi wajah dan mata/okulesik, gerakan, pose), ruang dan teritorial (proksemik, misalnya jarak intim, personal, sosial, publik), jenis-jenis parfum atau wewangian (olfaktik) dan paralinguistik (isyarat dan kualitas vokal).

Di samping komunikasi dalam konteks multikultural adalah pembicaraan tentang nilai dan menilai dalam konteks berbudaya. Nilai pada konteks umum lebih dipahami sebagai keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai didasarkan pada patokan normatif. Tata norma digunakan untuk mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya. Salah satu cara menentukan yang digunakan untuk menjelaskan adalah cara memperbandingkannya dengan fakta. Jika seseorang berbicara tentang fakta, ia maksudkan sebagai sesuatu yang ada dan berlangsung begitu saja. Lalu ketika ia berbicara tentang nilai, ia maksudkan sesuatu yang berlaku, yaitu sesuatu yang memikat dan menghimbau. Fakta ditemui dalam konteks deskripsi, semua unsurnya dapat dilukiskan satu demi satu. Uraian itu pada prinsipnya dapat diterima banyak orang. Dalam hal ini, nilai berperan dalam suasana apresiasi. Sementara, penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang.

Dalam konteks multikultural di Indonesia, dalam keberadaannya, Indonesia memiliki budaya yang beragam. Keberagaman itu unik karena budaya di Indonesia dapat disatukan dari berbagai ragam etnis di dalamnya. Negara Indonesia belum tentu bisa menyatukan semua kebudayaan tersebut dengan baik dan menjamin setiap kebudayaan menjalin hubungan yang baik antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Masyarakat Indonesia dengan cirinya itu memiliki masalahnya yang terletak pada kerukunan hidup dan harmonisasi. Jangankan budaya yang berbeda, masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama pun masih bisa terjadi konflik. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut agar negara

Indonesia dengan multikulturalismenya bisa disatukan tanpa adanya konflik antar individu, antar golongan atau kelompok, antar etnis dan antar kebudayaan. Ungkapan bersatu kita teguh berarti apapun masalah yang dihadapi, apapun yang menghalangi, kalau masyarakatnya dapat bersatu, bersama-sama maju, dan bergotong-royong untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah pada masyarakat multikultural akan bisa diatasi dengan mudah dan dengan bersatu, kita menjadi teguh. Sedangkan bercerai kita runtuh, kalau dihadapi sebagai sesuatu sendirian, tanpa bantuan orang lain, maka masalah tersebut akan sulit untuk diselesaikan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan, dengan kata lain Indonesia merupakan negara multikultural. Sebagai negara yang masyarakatnya beragam kebudayaan atau yang disebut sebagai masyarakat multikultural, masyarakat Indonesia memang terdiri atas dua kelompok atau lebih secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah. Masyarakat Indonesia memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain pada kenyataannya walaupun ada kesamaan dalam konteks kenegaraan. Sebagai masyarakat multikultural dapat dilihat bahwa dalam lingkup luas merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya.

Latar belakang (*historis*), dan keterbukaan terhadap kebudayaan luar serta kondisi geografis, merupakan faktor utama yang mendorong terbentuknya multikulturalisme. Menciptakan struktur sosial yang terbagi dalam lembaga yang bersifat non komplementer, kurang mengembangkan konsensus diantara anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. Dalam konteks ini, multikulturalisme masyarakat pasti memunculkan sifat-sifat tertentu dalam kelompok masyarakat yang ada. Sifat-sifat tersebut dapat terjadi segmentasi ke dalam

bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang berbeda satu sama lain.

Pendidikan adalah suatu usaha sadar manusia dalam mempersiapkan suatu hal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam hal ini, pendidikan yang harus kita kaji adalah pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada generasi muda agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, terbiasa hidup berdampingan dalam keragaman watak dan kultur, agama dan bahasa, menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas atau minoritas, dan dapat bersama-sama membangun kekuatan bangsa sehingga diperhitungkan dalam percaturan global dan *nation dignity* yang kuat.

Perubahan kehidupan manusia Indonesia yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi memperbesar jurang sosial antara kelompok atas dan kelompok bawah. Adanya perpindahan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi yang menyebabkan adanya pertemuan yang sering dan intens antara kelompok dengan budaya yang berbeda. Semakin terbukanya daerah-daerah pedesaan. Berbagai konflik sosial-budaya yang muncul akhir-akhir ini memperlihatkan adanya kesalahpahaman budaya yang sangat besar antar-kelompok yang bertikai. Menghapus mitos dan tafsiran sejarah yang tidak menguntungkan bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan pendekatan multikultural harus didasarkan pada tiga prinsip. Pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Kedua, keragaman budaya dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Ketiga, budaya di lingkungan

pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar para pemuda.

Pendidikan moral juga harus ikut dikemas dalam pendidikan multikultur. Dalam membentuk perilaku moral seseorang, proses belajar memegang peranan penting. Untuk itu, pengaruh lingkungan sebagai tempat melakukan proses belajar sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral. Sayangnya, pendidikan moral dan pembentukan moral tidak lagi menjadi komitmen. Orientasi dan perilaku moral dikesampingkan dan digantikan oleh kecerdasan pikiran, keahlian dan berbagai perilaku tampil di lapisan luar.

Dalam pendidikan multikultur, nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan perlu ditanamkan. Kelompok tertentu diharapkan tidak merasa lebih tinggi dari kelompok lain. Untuk itu, kerja belajar kooperatif dan kolaboratif dikembangkan secara aktif dalam memberikan kesadaran akan kesetaraan dan kebersamaan tersebut. Kegiatan seperti itu akan membiasakan untuk berinteraksi dengan kelompok lain yang memiliki perbedaan. Kondisi ini memaksa seseorang untuk lebih memahami kelompok lain maupun orang lain agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Kesadaran nilai kemanusiaan juga menjadi hal yang penting. Pemahaman akan adanya eksistensi manusia secara utuh juga diperlukan. Memahami manusia dengan keberadaannya perlu menyadari bahwa manusia memiliki kemerdekaan yang perlu dihargai.

Dari sekian banyak pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dilakukan generasi muda adalah mengenyam pendidikan multikultural yang lebih agar tercipta hubungan sosial-budaya yang lebih baik. Sebagaimana dasar dari pendidikan multikultural dan multikulturalisme adalah untuk meminimalkan konflik kepentingan. Pada dasarnya, dalam diri manusia secara inheren memiliki hasrat dan keinginan yang disebut dengan ambisi walaupun kepentingan yang satu dan lainnya berbeda takaran. Kepentingan dan hasrat bertautan erat sebagai sesuatu yang diartikan untuk meraih keuntungan bagi dirinya. Dalam perspektif

sosial atau dalam lokus sosial, kepentingan sebagai sebuah kesadaran komunal (*communal consciousness*) ditujukan untuk meraih keinginan bersama.

Sudah jelas telah disampaikan bahwa Indonesia sebagai negara yang multikultur di dunia sudah wajar pendidikan multikultural menjadi persoalan dan pemikiran di negeri ini. Sebagai negara multikultur menjadi catatan penting di sini, guru-guru di Indonesia secara profesional tidak hanya dituntut bisa menguasai bidang ilmu dan mata pelajaran yang diajarkan itu saja tetapi ia juga berperan sebagai pendidik yang mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Guru di Indonesia yang ideal adalah guru yang humanis, menghargai pluralisme, toleran, profesional, dan demokratis. Begitu juga lembaga pendidikan semestinya dalam memajukan dan menciptakan bangsa dan masyarakat yang kuat, cerdas dan berkualitas memiliki visi dan misi untuk menegakkan dan menghargai demokrasi, pluralisme, dan humanisme. Sebagai terapan dari semua itu, pendidikan karakter bagi siswa diarahkan pada terciptanya generasi yang berkompentensi dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, memiliki kedisiplinan yang tinggi, jujur, toleran, berperilaku baik dalam kesehariannya, hormat, santun, manusiawi, dan demokratis.

Sebuah diskusi dalam pembahasan tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural adalah globalisasi dan budaya lokal. Di kalangan akademisi, globalisasi telah memberi warna dan erat hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial. Seperti masyarakat, golongan, dan budaya. Konsep global yang ditawarkan beriringan antara kecenderungan untuk melihat mana masyarakat Barat kepada dunia Timur. Pada awal diskusi budaya, untuk konteks pembangunan di Indonesia pada saat itu mengonsepan pembangunan budaya sebagai bagian dari wacana pembangunan di antara negara-negara berkembang. Di samping urusan pendidikan dalam konteks budaya fenomena itu juga melibatkan urusan politik, ekonomi, agama, atau teknologi, serta mencakup ranah kehidupan masyarakat dan budaya

yang lebih luas. Makna lain, globalisasi di dunia pendidikan dan kebudayaan diartikan sebagai sebuah proses tatanan masyarakat universal yang tidak mengenal batas wilayah. Masalah multikultural menjadi masalah baru dalam konteks budaya, pendidikan, dan masyarakat. Dalam konteks ini masalah budaya global berbenturan dengan masalah budaya lokal. Sebagai suatu tatanan tertentu muncul kemudian yang ditawarkan kepada masyarakat dari negara-negara lain, pendidikan budaya disadari atau tidak telah menjadi panutan dan kiblat bagi bangsa-bangsa di penjuru dunia.

Pemahaman globalisasi dan pendidikan multikultural menandakan kesimpangsiuran pengertian dan proses yang rumit. Dalam pembahasan masalah ideologi pendidikan untuk negara-negara multikultural seperti Indonesia seakan kesulitan dalam menentukan kebakuan pendidikan dalam memaknai kondisi tersebut. Di samping banyaknya isme-isme yang memiliki kesamaan maksud dengan globalisasi, seperti Westernisasi, Modernisasi, Liberalisasi, Internasionalisasi. Secara garis besar paham-paham tersebut merupakan bagian dari proses globalisasi. Karena dalam pembicaraan pendidikan, masyarakat dan budaya semua paham itu satu dengan lainnya saling berkaitan. Sebagai dampaknya, kehadiran globalisasi dalam konteks pendidikan dan kebudayaan telah membawa beberapa pengaruh baik positif atau negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Secara menyeluruh pengaruh itu berdampak pada aspek politik, ekonomi, ideologi, dan sosial budaya.

Dalam konteks pengkajian pendidikan multikultural, awalnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejak lama juga strategi pendidikan multikultural dipelajari di negara-negara maju dan kajian ini awalnya digunakan dalam kajian-kajian interkultural dan multikultural. Studi pendidikan multikultural awalnya ditujukan agar populasi mayoritas dapat toleran pada imigran baru sebagai kontrol sosial politik yang diperlukan oleh penguasa kepada warganya agar negara stabil dan aman. Namun, tujuan itu semakin lama semakin menipis dan akhirnya

difokuskan pada pengkajian pendidikan yang humanis, demokratis, dan pluralistis. Sebagaimana pendidikan budaya dalam konsep umum, budaya global dan masyarakat multikultural menjadi sebuah proses yang pada akhirnya campur aduk. Apalagi, proses tersebut juga dihadapkan pada budaya masa dan budaya pop yang bersifat global (*global pop culture*), yaitu budaya tren dalam suatu wilayah atau region yang kemudian dipopulerkan hingga ke taraf dunia atau ruang lingkup global.

Arus global berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya. Arus globalisasi begitu cepat masuk ke masyarakat luas, sebagaimana masuk ke negara-negara berkembang karena beberapa faktor diantaranya pengaruh teknologi dan media informasi. Keduanya, berkembang pesat mempengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, berbagai bentuk dan kepentingan informasi dapat tersebar luas sehingga dalam interaksi dan komunikasi skala dunia, ruang makin dipersempit dan waktu semakin dipersingkat. Beragam bentuk yang ditawarkan dan disuguhkan karena faktor globalisasi. Mulai dari Ideologi, segala kepentingan yang berhubungan dengan politik, ekonomi, hiburan nilai-nilai, dan gaya hidup.

Globalisasi telah meminimalkan perlindungan terhadap budaya lokal. Begitu juga dengan proses liberalisasi pasar dan perdagangan luas di banyak negara berkembang. Akibatnya, masyarakat yang ada sekarang lebih memilih budaya dan suguhan hidangan global dibanding menerima dan menghidupkan tradisi serta budaya warisan nenek moyang mereka. Suatu hal yang sulit dihindari karena menjamurnya media-media dan prasarana lainnya berupa film, sastra, siaran satelit, internet, koran, majalah yang semakin menysihkan budaya lokal.

Pendidikan multikultural ditawarkan sebagai kebijakan dalam praktik pendidikan. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa pendidikan multikultural mengacu pada pendidikan yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang

dikaitkan dengan kelas, gender, status sosial ekonomi, kondisi fisik, budaya dan ras sebagai sikap untuk melihat keunikan eksistensi manusia tanpa melihat perbedaannya. Pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan sekaligus strategi budaya dengan menonjolkan kekuatan pada perbedaan latar belakang peserta didik. Sebagai sebuah kebijakan, pendidikan multikultural mendasarkan pada prinsip saling menghormati dan saling berpartisipasi dalam mewujudkan pendidikan yang demokratis.

Dalam pendidikan multikultural, pembelajaran difokuskan pada konsep pendidikan yang membebaskan. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural memberikan ketahanan pada peserta didik dalam pengambilan keputusan dan keterampilan sosial. Sekaligus, melalui konsep pendidikan ini peserta didik dibantu kemandirian dan karakternya agar mampu membangun jati diri dan sikap positif atas perbedaan kelompok dan interaksi lintas budaya. Peserta didik dikembangkan melalui pendidikan multikultural agar dapat berpartisipasi dalam kebebasan kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Dalam pembelajaran berbasis multikultural tersebut, diberikan terobosan baru agar peserta didik mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka buruk yang berpotensi konflik dan kekerasan (violensi) dengan mengedepankan proses interaksi sosial yang humanis.

Pendidikan multikultural dalam implementasinya mengedepankan dimensi-dimensi pembelajaran multikultural. Dimensi-dimensi itu, diantaranya meliputi pengintegrasian materi pembelajaran (*content integration*), kesetaraan pendidikan (*equitable pedagogy*), pengurangan prasangka (*prejudice reduction*), konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*), dan pemberdayaan budaya sekolah serta struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Melalui dimensi-dimensi itu pembelajaran multikultural dapat diintegrasikan secara kontekstual dan diimplementasikan sesuai dengan model kurikulum yang sedang dikembangkan.

Kesimpulan

Pendidikan multikultural ditanamkan dan dimulai dari diri sendiri, tidak dikembangkan pada konsep belajar yang dikungkung oleh sikap-sikap yang etnosentris. Pendidikan multikultural dilaksanakan secara terpadu, sistematis, konseptual, dan komprehensif yang dilandaskan pada kurikulum pendidikan yang demokratis dengan pengembangan kompetensi yang utuh dari segi kognisi, afeksi, dan psikomotor. Pendidikan multikultural mendorong masyarakat berkebudayaan yang bermutu. Dalam konteks pembelajaran, pendidikan multikultural memegang peranan dalam menumbuhkembangkan harmonisasi hidup, pembelajaran kooperatif, pembentukan karakter baik yang mandiri, jujur, berdaya saing tinggi, menyukai kedamaian, kreatif, berwawasan luas, demokratis, toleran, dan religius.

Referensi

- [1] Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi, Pokok-pokok Etnografi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- [2] L, Alo. *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- [3] Y, Ainul. *Pendidikan Multikultur. Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- [4] T, Dewa Komang. Pembentukan Watak Melalui Pendidikan Multikultural. Dalam I Darma Pastika dan I Nyoman Darma Putra Ed. 2005 *Wibawa Bahasa*. Denpasar: Bali Mangsi, 2005.
- [5] Rasiyo. *Berjuang Membangun Pendidikan Bangsa. Pijar-Pijar Pemikiran dan Tindakan*. Malang Kayutangan, 2005.
- [6] A, Murniati. *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015

Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Bilingualisme dalam Masyarakat yang Multilingual dan Multikultural

Rusfandi ¹

Pendahuluan

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, ada peralihan bentuk atau pola lingkungan bermasyarakat dari yang disebut *monocultural society* menuju *multicultural society*. Orang tidak lagi tinggal/hidup dalam lingkungan masyarakat yang secara budaya *homogen* melainkan *heterogen*, dimana orang dari berbagai macam latar belakang etnis dan budaya hidup atau berbaur. Fakta ini juga berimplikasi pada bagaimana masyarakat tersebut menggunakan bahasa. Orang dituntut tidak hanya mampu menggunakan satu bahasa (*monolingual*), tetapi lebih dari satu bahasa, *bilingual* dan bahkan *multilingual*.

Dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, peran bahasa yang menyanggah predikat sebagai bahasa ‘lingua-franca’, seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sangatlah penting sebagai bahasa penghubung diantara orang-orang dengan berbagai latar belakang bahasa *native*. Dalam konteks menggunakan bahasa seperti ini, *intelligibility* atau keterpahaman dan bukan *native-like competence* atau kemampuan menggunakan bahasa serupa dengan pembicara asli dari bahasa penghubung tersebut (walaupun ini sifatnya *preferable*) menjadi sangat penting, karena komunikasi dilakukan dengan mayoritas orang yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua atau ketiga. Kita mengenal beberapa dialek bahasa Inggris yang digunakan di beberapa negara seperti Malaysian English, Singapore English, Indian English, dan African English. Walaupun terdapat perbedaan, secara umum terdapat *intelligibility* yang baik antara dialek-dialek bahasa Inggris tersebut diatas dengan ‘standar’ British

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

dan American English. Dengan kata lain, tujuan utama penggunaan bahasa Inggris, terutama dalam konteks Asia Tenggara, tidaklah untuk hidup atau tinggal di negara dimana masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa native. Sehingga pengetahuan tentang budaya dan kemampuan linguistik secara menyeluruh tentang bahasa Inggris tidak secara mutlak dibutuhkan. Dengan kata lain, penyesuaian terhadap budaya - budaya lokal dan regional (semisal di kawasan Asia Tenggara) perlu dilakukan tanpa mengurangi aspek keterpahaman (*intelligibility*) dalam penggunaan bahasa Inggris dalam tingkat internasional.

Adalah sebuah fakta bahwa bahasa Inggris menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Bahasa Inggris menjadi bahasa asing pertama yang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah menengah dan universitas, serta menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam ujian akhir nasional (UAN). Hal ini sangatlah beralasan mengingat bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebegitu pentingnya, bahasa Inggris pada saat ini, sudah mulai dikenalkan kepada anak pada tingkat sekolah dasar (SD) dan bahkan pada taman kanak-kanak (TK). Walaupun demikian, banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris siswa Indonesia masih jauh dari memuaskan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurweni and Read [1] misalnya menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa Indonesia semester pertama, dalam penelitian mereka, menguasai kurang dari 1500 kata, jumlah penguasaan kata yang jauh dari *threshold level* untuk mampu membaca teks berbahasa Inggris secara mandiri yaitu antara 3000 sampai 5000 kata.

Rendahnya tingkat penguasaan kata dalam bahasa Inggris ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor dan pastinya kompleks. Dalam tulisan ini, penulis tidak bermaksud untuk membahas faktor-faktor tersebut secara detail; melainkan, mencoba mengkritisi dan

mendiskusikan permasalahan pembelajaran bahasa Inggris dalam perspektif bilingualism, yaitu perspektif orang yang mempunyai dan menggunakan atau memproses dua atau lebih bahasa dalam lingkungan masyarakat yang pada umumnya adalah juga bilingual dan multilingual. Menurut pemahaman penulis, baik sebagai seorang praktisi pendidikan maupun peneliti, ada dua hal yang perlu dievaluasi kembali terkait pembelajaran bahasa Inggris secara umum di Indonesia; (1) penekanan yang terlalu berlebihan terhadap *monolingual standard*, baik dalam hal kemampuan berbahasa (*linguistic competence*) ataupun dalam pengetahuan tentang budaya dari pembicara asli (*native speakers*) bahasa Inggris; dan (2) pengecilan peran bahasa pertama (bahasa Indonesia) dan interaksi antara bahasa pertama dan bahasa kedua dalam pembelajaran bahasa kedua tersebut, yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris.

Konsep Bilingualisme Menurut Francois Grosjean

Menurut Grosjean [2] *bilingualism* adalah penggunaan dua bahasa atau lebih; sedangkan bilingual adalah orang yang menggunakan dua bahasa atau lebih dalam kehidupan sehari-hari mereka. Grosjean membedakan dua pandangan berbeda tentang konsep dari bilingualism: *the monolingual fractional view* dan *the bilingual wholistic view*. Pandangan pertama menekankan pengklasifikasian dan evaluasi kemampuan berbahasa (*language proficiency*) dari bilinguals tersebut. Dalam perspektif ini, orang yang dikatakan bilingual seharusnya mempunyai kemampuan berbahasa yang terpisah dan seimbang antara bahasa pertama (L1) dan bahasa kedua (L2) mereka. Dalam hal ini, bilingual adalah mereka yang mempunyai kemampuan berbahasa *native-like* (setara pembicara asli) dalam dua bahasa atau lebih, walaupun bilingual tersebut menggunakan bahasa-bahasa tersebut untuk tujuan dan konteks yang berbeda-beda. Dengan kata lain, seorang bilingual harus mampu bersikap layaknya seorang monolingual yang disertai dengan

kemampuan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan satu dari dua atau lebih sistem bahasa yang mereka miliki ketika mereka butuhkan.

Sebaliknya, pandangan kedua, *the bilingual wholistic view* melihat seorang bilingual tidak semata-mata dari kemampuan (*proficiency*) dalam menggunakan kedua bahasa mereka, melainkan lebih menekankan pada bagaimana seorang bilingual tersebut menggunakan kedua bahasa atau lebih mereka, yang lebih banyak didasarkan pada tujuan, konteks, dan interlocutor dari penggunaan bahasa-bahasa tersebut. Menurut Grosjean [2], level kemampuan dari bilinguals dalam menggunakan bahasa-bahasa mereka berinteraksi secara dinamis dengan berbagai macam tujuan, konteks, dan interlocutor ketika menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Dengan kata lain, kemampuan seorang bilingual dalam menggunakan kedua bahasanya sangatlah bergantung pada konteks dan tujuan dari menggunakan bahasa tersebut. Sehingga, sangatlah mungkin, menurut Grosjean, bagi seorang bilingual untuk mempunyai kemampuan berbahasa yang tidak berimbang antara bahasa pertama dan kedua mereka yang disebabkan oleh konteks dan tujuan menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Di negara seperti Singapura dan Malaysia dimana bahasa Inggris telah menjadi bahasa kedua (*second language*), terutama diantara generasi muda mereka yang tinggal di daerah perkotaan, *English native-like accent* (logat mirip dengan pembicara asli bahasa Inggris) bukan menjadi tujuan utama dalam penggunaan bahasa Inggris karena orang menggunakan bahasa Inggris lebih pada tujuan sebagai media penghubung komunikasi dengan orang lain yang pada umumnya juga bukan pembicara asli bahasa Inggris. Fakta bahwa mereka tidak memiliki aksen dan pengucapan (*pronunciation*) layaknya *English native speakers* tidaklah berarti bahwa bahasa Inggris mereka *inferior* dan oleh karena itu tidak pantas disebut bilingual. Hal ini karena konteks dan tujuan dari menggunakan bahasa tersebut yang menentukan *appropriateness* (tepat atau tidaknya) dalam menggunakan bahasa tersebut.

Karena alasan ini, menurut *wholistic view of bilingualism*, kemampuan berkomunikasi dalam menggunakan bahasa (*communicative competence*) tidak dapat diukur atau dievaluasi dari perspektif atau konsep monolingual karena bilingual bukanlah kombinasi dari dua monolinguals (orang yang mampu menggunakan hanya satu bahasa). Bilinguals seharusnya dipandang secara utuh berdasarkan *repertoire* bahasa mereka secara total, sekaligus juga faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi mereka dalam menggunakan bahasa. *Cross-linguistic transfer* antara bahasa-bahasa yang mereka miliki baik itu *forward* (dari L1 ke L2) ataupun *backward* (dari L2 ke L1) sangatlah memungkinkan bagi seorang bilingual dalam memproses bahasa. Oleh karena itu, kemampuan mereka dalam dua bahasa atau lebih mungkin saja berbeda dengan apa yang dimiliki monolingual disebabkan oleh konteks dan tujuan penggunaan bahasa.

Walaupun secara teoritis *the wholistic view of bilingualism* nampaknya menawarkan perspektif yang lebih baik dalam memandang bilingual ketika menggunakan bahasa-bahasa yang dimilikinya, *the monolingual concept of bilingualism* masih secara luas dipraktekkan pada saat ini. Bagaimana pembelajaran bahasa kedua diberikan dan dievaluasi di banyak tempat di dunia ini masih secara kuat dipengaruhi oleh *the monolingual concept of bilingualism*. Pembelajaran bahasa kedua masih diberikan dan dievaluasi dengan menitikberatkan pada pembelajar bahasa kedua untuk dapat memiliki kemampuan berbahasa yang setara dengan pembicara asli bahasa tersebut. Dengan kata lain, sedikit penekanan diberikan pada konteks, tujuan, interaksi antara bahasa pertama dan kedua, dan faktor-faktor sosial yang lain yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi penggunaan bahasa kedua dalam masyarakat yang multilingual dan multikultural.

Grosjean [2] menyebutkan beberapa masalah terkait dengan *the monolingual concept of bilingualism*. Pertama, pandangan ini mengabaikan fakta bahwa mayoritas orang di belahan dunia yang

mampu menggunakan dua bahasa atau lebih namun tidak memiliki *language proficiency* yang seimbang diantara bahasa-bahasa yang dimilikinya tersebut. Mereka menggunakan bahasa-bahasa tersebut dalam konteks-konteks yang berbeda menurut kebutuhan mereka sehari-hari.

Kedua, *the monolingual concept of bilingualism* tidak secara proporsional mendeskripsikan bagaimana bilingual memproses bahasa-bahasa tersebut, karena pandangan ini menggunakan standar monolingual ketika mengevaluasi sukses atau tidaknya dan produktif atau tidaknya ketika bilingual menggunakan bahasanya. Pandangan ini juga memberikan konsiderasi minimal terhadap kemungkinan interaksi antara bahasa-bahasa yang dimiliki oleh bilingual ketika mereka memproses bahasa-bahasa tersebut. Dalam perspektif yang tradisional ini, bilingual dipandang sebagai orang yang memiliki *language processing system* yang terpisah untuk setiap bahasa yang dimilikinya dan sistem-sistem ini dianggap selalu *standby* tanpa mempertimbangkan bagaimana sistem-sistem tersebut berinteraksi, *merge* (bercampur), dan saling mempengaruhi. Bilingual selalu dianggap mampu menonaktifkan satu sistem ketika mengaktifkan sistem yang lain. Sehingga, *cross-linguistic* dan *cross-conceptual transfer* antara dua bahasa atau lebih dipandang sebagai hal yang bersifat *accidental* (kebetulan) dan bahkan abnormal.

Masalah lainnya terkait dengan *the monolingual concept of bilingualism* adalah bahwa pandangan ini begitu *influential* (berpengaruh) sehingga bilingual tersebut mempunyai persepsi negatif tentang pembelajaran dan kemampuan bahasa kedua mereka. Bilingual sering menilai kompetensi bahasa kedua mereka *inadequate* (tidak baik/layak) karena kemampuannya tidak setara atau menyamai pembicara bahasa asli tersebut sehingga bilinguals sering mengalami *lack of confidence* (kurang percaya diri) ketika menggunakan bahasa keduanya. Bukannya menghargai apa yang mereka capai atau bisa lakukan dengan bahasa keduanya, bilinguals seringkali *stigmatized*

(menganggap dirinya buruk atau rendah) dengan apa yang mereka tidak bisa lakukan dengan bahasa kedua mereka. Grosjean [2] memberikan sebuah analogi, *hurdler* (pelari gawang), *sprinter* (pelari cepat), dan *high jumper* (pelompat tinggi) untuk menunjukkan bagaimana bilinguals tidak dapat secara proporsional dibandingkan dengan monolinguals. Seorang *sprinter* dan *high jumper* fokus hanya pada satu skill atau ketangkasan; sedangkan seorang *hurdler* mengkombinasikan dua ketangkasan. Biasanya, seorang *hurdler* tidak melompat setinggi seorang *high jumper* dan juga tidak berlari secepat seorang *sprinter*. Akan tetapi, adanya fakta-fakta ini tidaklah kemudian bisa disimpulkan bahwa seorang *hurdler* tadi adalah atlet buruk dibandingkan dengan kedua atlet lainnya itu. Mereka hanya berbeda. Berdasarkan analogi ini, menurut Grosjean, bilingual dan monolingual tidak mempunyai dasar untuk dibanding-bandingkan. Oleh karena itu, mengevaluasi bilingual dari perspektif monolingual tidak sesuai keduanya adalah fenomena yang berbeda. Sehingga, bilingual harus dipandang atau diperlakukan secara utuh dan unik karena mereka bukanlah dua orang monolingual yang tidak komplet.

Konsep Multicompetence Menurut Vivian Cook

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Grosjean [2], Cook [3], Cook [4], Cook [5], Cook [6] mendorong peneliti dan guru bahasa untuk melihat *bilingual learners* (pembelajar bahasa kedua) dari sudut pandang keunikan dari bilinguals itu sendiri dan tidak dari perspektif *monolingual standard*. Menurut Cook, ini penting untuk dilakukan karena hal ini akan berdampak pada bagaimana bilingual learners dievaluasi terkait dengan apa yang bisa dan tidak bisa mereka capai dalam proses belajar bahasa kedua mereka. Walaupun bilingual learners mungkin mencoba untuk memiliki kemampuan berbahasa kedua setara dengan pembicara asli bahasa tersebut, mereka bukanlah *imitators* (peniru) dari *native speakers* tersebut, karena secara konsep mereka memproses bahasa secara berbeda dan

menggunakan bahasa tersebut di konteks yang berbeda dengan pembicara asli dari bahasa tersebut.

Oleh karena itu, Cook [6] menawarkan konsep *multicompetence* yang ia definisikan sebagai “knowledge of two languages in one mind” (p. 17). Menurut Cook, bilinguals mempunyai L1, L2 *interlanguage* (jenis pemahaman tentang bahasa kedua yang dihasilkan dari proses pembelajaran dari L2 tersebut yang tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh pembicara asli dari bahasa tersebut), dan proses-proses mental yang lain yang terhubung dengan *interlanguage* mereka. Ketiga aspek ini adalah bagian dari *internal language processing mechanism* dari bilingual yang didefinisikan oleh Cook sebagai *Multicompetence*. Akan tetapi, walaupun L2 mereka terhubung dalam sistem, L2 tersebut berada di luar proses internal bahasa yang dimiliki oleh bilinguals atau pembelajar bahasa kedua tersebut. Bahasa tersebut adalah bahasa *native* orang lain. Oleh karena itu, walaupun mereka menggunakan bahasa kedua, versi dari bahasa tersebut akan berbeda dengan pembicara asli dari bahasa tersebut. Sama halnya dengan Grosjean [2], Cook menyatakan bahwa seorang bilingual tidak mempunyai sistem terpisah untuk memproses dua bahasa atau lebih yang dimilikinya, dimana satu sistem diperuntukkan untuk bahasa A dan yang lainnya dikhususkan untuk bahasa B. Seorang bilingual tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh bahasa yang satu ke yang bahasa yang lain, karena pengetahuan tentang kedua bahasa tersebut secara konseptual saling berinteraksi dalam otak/pikiran mereka. Sehingga, dia tidak dapat secara penuh menonaktifkan satu bahasa ketika mengaktifkan bahasa lainnya. Sebuah indikasi jelas tentang bagaimana dua bahasa atau lebih tersebut aktif adalah munculnya *code-switching* (alih kode), *code-mixing*, dan sebagainya; walaupun menurut Grosjean [2], Grosjean [7], Grosjean [8], penggunaan fenomena linguistik ini banyak dipengaruhi oleh *language modes*, konteks, dan tujuan menggunakan bahasa tersebut.

Karena ketidakmampuan untuk secara total menonaktifkan satu bahasa ketika memproses bahasa lainnya ini, menurut Cook [6], bilingual mempunyai bahasa pertama (L1) dan bahasa kedua (L2) yang berbeda dari monolinguals dari masing-masing bahasa tersebut. Hal ini beralasan karena kedua bahasa yang mereka miliki saling berinteraksi dalam proses mental berbahasa mereka, dan hal ini akan mempengaruhi sedikit banyak luaran bahasa baik dalam L1 maupun L2. Sangatlah mungkin bagi bilingual untuk *cross-transfer* pengetahuan linguistik mereka dari L1 ke L2 maupun dari L2 ke L1. Kemungkinan *cross-linguistic transfer* ini telah ditunjukkan dalam beberapa hasil penelitian [9-11] dalam bidang *second language writing*. Secara umum, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu (jenis pembelajaran *L2 writing*, *L2 level proficiency*, etc.), transfer dua arah baik dari L1 ke L2 maupun L2 ke L1 dalam hal kemampuan menulis sangat memungkinkan.

Tidak seperti the monolingual concept of bilingualism yang sering menggambarkan bilingual sebagai monolingual yang tidak utuh atau sempurna, *multicompetence* memandang bahwa dengan mempunyai kemampuan untuk menggunakan dua bahasa atau lebih adalah sebuah aset. Mempunyai kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih seringkali dikaitkan dengan kemampuan *metalinguistic awareness* yang baik [12], yang didefinisikan oleh Richards and Schmidt [13] sebagai kemampuan linguistik yang diperoleh oleh seseorang melalui proses analisis dan refleksi terhadap dua bahasa atau lebih yang dimiliki. Dengan kata lain, bilingual tidak bertindak dan meniru *native speakers*; melainkan mereka memproses bahasa yang mereka miliki berdasarkan pada perspektif mereka sendiri.

Perubahan Status Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Internasional

Adalah sebuah fakta bahwa bahasa Inggris telah menjadi sebuah bahasa internasional. Status baru ini didapat oleh bahasa Inggris tidaklah dikarenakan oleh jumlah native speakernya yang

banyak; melainkan karena jumlah orang yang mempelajari dan menggunakannya sebagai bahasa kedua dan seterusnya terus berkembang. Dengan kata lain, penyebaran bahasa Inggris yang begitu luas tidak secara fundamental disebabkan oleh proses migrasi dari native speakernya; melainkan disebabkan oleh apa yang disebut Brutt-Griffler [14] “macroacquisition”, dimana orang memperoleh atau mempelajarinya dengan tujuan untuk memfasilitasi mereka dalam komunikasi dengan banyak orang dengan latar belakang bahasa dan budaya berbeda. Menurut McKay [15], walaupun dalam perkembangan awalnya bahasa Inggris disebarkan oleh proses migrasi dari native speakernya yang pada akhirnya membentuk negara-negara baru dengan masyarakat yang *monolingual* dan *monocultural* seperti halnya USA, Australia, dan New Zealand, perkembangan bahasa Inggris pada masa sekarang lebih banyak disebabkan oleh meningkatnya jumlah orang yang mempelajarinya dengan tujuan mendapatkan “its magical power” sebagai alat komunikasi internasional, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Akan tetapi, tidak seperti perkembangan awalnya dimana bahasa Inggris membentuk masyarakat monolingual dan monokultural, perkembangannya pada masa sekarang cenderung menciptakan masyarakat yang multilingual dan multikultural. Menurut McKay [15], status baru dan semua faktor sosial yang mendukungnya memberikan implikasi pedagogis yang signifikan pada bagaimana bahasa Inggris itu sendiri dipelajari dalam masyarakat yang bilingual atau multikultural.

Implikasi yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Tidak seperti halnya mereka yang tinggal dalam masyarakat dengan *native* bahasa Inggris, banyak pembelajar bahasa Inggris terutama mereka yang menggunakannya sebagai *foreign language* (bahasa asing) atau *second language* (bahasa kedua) mungkin mempunyai tujuan berbeda dalam mempelajarinya. Secara umum, mereka akan menggunakan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dalam konteks masyarakat yang multilingual. Mereka mungkin menggunakannya sebagai media untuk bertukar informasi

dengan orang lain tentang negaranya untuk tujuan, misalnya, perdagangan, tourism, dan pendidikan.

Implikasi yang kedua bertautan dengan hubungan antara bahasa dan budaya dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau bahasa kedua. Implikasi ini pada dasarnya berhubungan dengan implikasi sebelumnya yang dijelaskan diatas. Karena tujuan utama dalam mempelajari bahasa Inggris baik sebagai bahasa asing maupun bahasa kedua tidaklah untuk bersosialisasi dan tinggal di negara dengan *native* bahasa Inggris, sehingga tidaklah perlu untuk mengadopsi budaya *native* bahasa Inggris sebagai *norm* atau standar dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Menurut Nault [16], mengadopsi apa yang disebut dengan *English native cultural norms* seperti UK dan USA dalam proses pembelajaran bahasa Inggris secara luas adalah problematik, menyesatkan, dan tidak adil. Bersifat problematik karena bahasa Inggris tidak digunakan sebagai alat komunikasi hanya di dua negara tersebut. Pada saat ini, bahasa Inggris banyak digunakan oleh orang di banyak negara dan di berbagai konteks dimana budaya yang digunakan adalah budaya lokal atau jika tidak adalah budaya internasional itu sendiri. Sementara di beberapa negara seperti India dan Singapura bahasa Inggris telah di-*nativised* atau dimodifikasi berdasarkan budaya lokal, situasi sosial, dan terlepas dari bangsa dan budaya aslinya [17], banyak negara mewajibkan warganya belajar bahasa Inggris sebagai lingua franca sehingga mereka mampu berkomunikasi secara internasional. Sehingga dalam perspektif ini bahwa pengadopsian budaya *native* Inggris dalam pembelajaran bahasa Inggris baik sebagai bahasa kedua atau asing adalah kurang tepat.

Alasan lainnya adalah hal ini bersifat menyesatkan. Pengadopsian budaya *native* Inggris dalam proses pembelajaran ESL atau EFL secara keliru mengisyaratkan bahwa pembelajar ESL/EFL hanya akan menggunakan bahasa tersebut dengan pembicara asli bahasa Inggris, dan tidak akan pernah menggunakan bahasa Inggris

dengan pembicara asli bahasa Inggris di luar konteks negara dengan bahasa native bahasa Inggris, atau tidak akan pernah menggunakannya dengan sesama non-pembicara asli bahasa Inggris dalam konteks menggunakan bahasa Inggris yang lain. Faktanya adalah pada saat ini, bahasa Inggris sangat sering digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara sesama non-pembicara asli bahasa Inggris di luar konteks negara berbahasa asli bahasa Inggris. Atau kalau tidak, bahasa Inggris digunakan oleh sesama non-pembicara asli dalam negara berbahasa asli bahasa Inggris seperti halnya di Amerika dan Australia.

Masalah berikutnya adalah pengadopsian budaya native Inggris dalam pembelajaran bahasa ESL/EFL secara fundamental tidaklah adil terhadap sedemikian banyak orang di seluruh dunia yang menggunakan bahasa Inggris untuk banyak tujuan dan konteks terlepas dari keinginan untuk mengadopsi budaya native Inggris tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengadopsian *English native cultural norms* dalam pembelajaran ESL/EFL seharusnya dikesampingkan, karena hal tersebut tidak secara utuh merefleksikan tujuan utama berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris itu sendiri secara luas. Oleh karena itu, tujuan pedagogis dari pembelajaran bahasa Inggris terutama dalam konteks ESL/EFL seharusnya lebih ditekankan pada penguasaan kemampuan berbahasa Inggris untuk mengkomunikasikan ide atau budaya kepada orang lain dalam konteks bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Konsep/Persepsi Tentang Pembicara Native dan Non-Native Bahasa Inggris

Secara tradisional, tujuan utama pembelajaran bahasa Inggris baik ESL ataupun EFL adalah mencapai atau memiliki kemampuan setara dengan pembicara native bahasa Inggris. Semua aspek pembelajaran dan pengajaran ESL/EFL dibandingkan dan dievaluasi berdasarkan kemampuan bahasa yang biasanya dimiliki oleh *English*

native speaker. Untuk mencapai tujuan ini, segala usaha telah dilakukan oleh guru bahasa Inggris termasuk penggunaan apa yang disebut dengan *communicative teaching method*, penggunaan materi dan media pembelajaran yang autentik yang merefleksikan budaya *native* Inggris, dan penggunaan bahasa Inggris secara penuh dalam proses belajar mengajar. Semua usaha ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan memberi pengalaman pada siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan perubahan status bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan fakta bahwa orang menggunakan bahasa Inggris untuk memfasilitasi komunikasi dalam konteks bilingual dan multilingual, pencapaian kemampuan setara pembicara *native* Inggris sekarang ini sudah mulai dipertanyakan dan dikritisi oleh banyak pakar dan praktisi pendidikan [e.g. 4, 15].

Dalam bidang *second language acquisition*, beberapa pakar berpendapat bahwa membandingkan pembicara asli dan non-pembicara asli dalam hal kemampuan linguistik mereka adalah sama seperti membandingkan buah apel dan tomat [4], sesuatu yang sebetulnya tidak dapat dibandingkan. Cook [4], dalam teori 'Multicompetence' nya menyatakan bahwa *native* dan *non-native speaker* tidak dapat dibandingkan secara seimbang karena secara konseptual masing-masing mempunyai cara yang berbeda dalam memproses bahasanya. Menurut Cook, seorang bilingual bukanlah dua monolingual dalam satu tubuh. Bilinguals tidak memiliki dua sistem bahasa yang terpisah; melainkan mereka mempunyai sebuah sistem bahasa yang *merged*, yaitu penggabungan dari dua bahasa yang dikuasainya. Bahasa pertama (L1) dan bahasa kedua (L2) dari bilinguals tidak akan pernah bisa sama dengan bahasa dari monolinguals kedua bahasa tersebut. Hal ini karena bahasa L1 dan L2 mereka saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut bisa positif, negatif, dan bahkan bisa dua-duanya. Berdasarkan rasional ini, Cook [3], Cook [4], Cook [18], Cook [19] menganggap bahwa L1 dan L2 dari bilinguals secara fundamental berbeda dengan apa yang dimiliki oleh monolinguals.

Sehingga menurut teori ini, berharap bahwa pembelajar bahasa kedua untuk mencapai apa yang disebut sebagai L1 native-like competence adalah sebuah kemustahilan karena, seperti yang telah dijelaskan di atas, monolinguals dan bilinguals memproses kemampuan berbahasanya secara berbeda.

Secara pedagogis, adalah kurang bijak apabila memandang *native speaker dan native-like competence model* sebagai basis sebuah tujuan pembelajaran [15]. Dalam hal kualitas, memilih atau mempekerjakan seorang guru bahasa Inggris hanya semata-mata berdasarkan dia adalah seorang native speaker adalah sebuah keputusan yang kurang tepat. Hal ini karena menjadi seorang native speaker bahasa Inggris tidaklah berarti bahwa dia mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang proses belajar mengajar. Oleh karena itu, menurut Kirkpatrick [20], dari pada mempermasalahkan native atau tidak native-nya seorang guru bahasa Inggris, hal yang lebih penting adalah bagaimana dia mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam mengajar bahasa Inggris terutama dalam merespon terhadap status baru bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dalam konteks masyarakat yang bilingual dan multilingual. Dalam kondisi-kondisi tertentu, guru bahasa Inggris yang bilingual justru, menurut McKay [15], lebih baik dari guru bahasa Inggris yang monolingual. Karena mereka bilingual, mereka lebih mampu melihat bagaimana bahasa kedua yang sedang dipelajari sesuai dengan konsep atau kemampuan linguistik yang dimiliki oleh siswa. Guru bahasa Inggris yang bilingual cenderung lebih memahami tentang varietas lokal bahasa Inggris yang digunakan oleh orang dalam konteks masyarakat tertentu. Sehingga, secara logis, mereka lebih mampu untuk mengajar bahasa Inggris yang cocok dengan standar bahasa Inggris lokal masyarakat tersebut. Disamping itu, mereka memiliki pengetahuan budaya lokal yang tentunya dapat meningkatkan intelligibility atau keterpahaman dari bahasa Inggris yang digunakan dalam komunitas tersebut.

Dalam hal sumber atau materi pembelajaran, adopsi dari *native speaker model* juga problematik. Secara tradisional, buku teks yang digunakan dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris menggunakan apa yang disebut *target language culture topics* atau topik-topik dengan budaya bahasa target yang dalam hal ini adalah budaya Inggris. Topik-topik tersebut sengaja dipilih oleh guru sebagai media untuk lebih meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Akan tetapi, jika tujuan utama mempelajari bahasa Inggris adalah untuk mampu berkomunikasi atau mengkomunikasikan masyarakat dan budayanya kepada orang lain dalam konteks masyarakat yang bilingual dan multilingual nampaknya tidak ada alasan logis untuk menggunakan topik-topik dengan target budaya Inggris dalam buku-buku teks tersebut. Sangatlah mungkin bahwa penggunaan *English culture topics* akan membuat mereka semakin bingung karena topik-topik tersebut tidak pernah digunakan dalam konteks berkomunikasi mereka. Sehingga, akan lebih penting untuk menggunakan topik-topik budaya lokal dalam proses belajar mengajar. Kirkpatrick [20] menyarankan dalam konteks Indonesia, buku teks bahasa Inggris seharusnya dikembangkan dengan menggunakan topik-topik budaya lokal Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, dengan berbagai macam tujuan seperti perdagangan, pendidikan, kepariwisataan, dan sebagainya. Pemahaman terhadap budaya dari negara-negara ini sangatlah penting untuk secara sukses berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa Inggris.

Alasan penting berikutnya untuk mengesampingkan adopsi dari *native speaker model* adalah terkait dengan isu kemampuan pragmatik [Kasper, 1997 as cited in 15]. Menurut Kasper, dalam hal pragmatic appropriateness (kesesuaian pragmatik), native speakers tidaklah homogen tetapi heterogen. Walaupun mereka berasal dari budaya yang sama, mereka mungkin juga memiliki atau mengetahui standar kepantasan yang berbeda dalam menggunakan bahasanya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti pendidikan, profesi,

status sosial, dan sebagainya. Disamping itu, menurut Kasper, 1997 [as cited in 15], tujuan mencapai native-like competence dalam bahasa kedua kadang tidak *feasible* atau tidak mungkin bagi pembelajar bahasa kedua. Hal ini disebabkan oleh “maturational constraints” atau batasan-batasan usia terutama pada pembelajar bahasa kedua yang sudah dewasa (p. 12). Aspek-aspek bahasa seperti fonologi dan sintaksis mungkin sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dicapai dalam pembelajaran bahasa keduanya. Disamping itu, akan timbul juga *clash of pragmatic appropriateness* atau benturan kepantasan pragmatik antara L1 dan L2 dalam perspektif pembelajar bahasa kedua tersebut. Walaupun beberapa aspek dari tindak tutur bisa saja dianggap selaras dengan L2, aspek-aspek lainnya mungkin tidak sesuai sama sekali dengan L1, dan seterusnya.

Kritik Terhadap Pembelajaran Bahasa Inggris di Indonesia

Ada dua hal yang menurut penulis perlu dilakukan pengkajian ulang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris secara umum di Indonesia. Pertama adalah penekanan yang terlalu berlebihan terhadap *monolingual standard*, baik dalam hal kemampuan berbahasa (*linguistic competence*) ataupun dalam pengetahuan tentang budaya dari pembicara asli (*native speakers*) bahasa Inggris. Hal ini bisa terlihat dari bentuk atau jenis tes yang umum digunakan dalam mengevaluasi kemampuan bahasa Inggris. Secara umum, ada dua bentuk tes yang sering digunakan di Indonesia, yaitu TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Walaupun tidak semua pembelajar bahasa Inggris di Indonesia mempunyai keinginan untuk studi, bekerja, atau tinggal di negara-negara yang berbahasa *native* Inggris, TOEFL sangat sering digunakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di Indonesia. Tes TOEFL atau yang setara dengan TOEFL atau TOEP juga sering digunakan sebagai media untuk menyeleksi siswa masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jarang sekali atau mungkin tidak pernah ditemukan tes yang didesain khusus untuk

mengukur kemampuan berbahasa Inggris dalam konteks komunikasi seperti di Indonesia atau bahkan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Walaupun demikian, sebagai seorang praktisi pendidikan penulis juga tidak menyarankan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia secara keseluruhan tercerabut dari *English native norms*, karena hal ini akan berimplikasi terhadap *intelligibility* atau keterpahaman dari bahasa Inggris yang digunakan. Contoh, akan sangat penting bagi pembelajar bahasa Inggris di Indonesia untuk memahami perbedaan antara suara atau fonem /θ/ dalam kata 'three /θri:/' yang merupakan konsonan dengan kategori *voiceless interdental fricative*, dan fonem /t/ dalam kata 'tree /tri:/' yang merupakan konsonan dengan kategori *voiceless alveolar plosive*, karena hal ini akan mempengaruhi makna. Aspek *intelligibility* seharusnya menjadi prioritas dalam pembelajaran bahasa Inggris, bukan kemampuan berbahasa Inggris setara dengan pembicara aslinya.

Kedua adalah pengecilan peran bahasa pertama (bahasa Indonesia) dan interaksi antara bahasa pertama dan bahasa kedua dalam pembelajaran bahasa kedua tersebut, yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris dan segala permasalahannya sering tercerabut dari pembelajaran bahasa Indonesia dan permasalahannya, seperti contoh dalam aspek pembelajaran literasi atau baca dan tulis. Permasalahan menulis siswa dalam bahasa Inggris, misalnya dalam mengembangkan ide atau gagasan dan aspek-aspek yang bersifat konseptual dan non konseptual lainnya, seringkali dilihat secara terpisah dari permasalahan serupa ketika mereka menulis dalam bahasa Indonesia. Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis bisa ditransfer antar bahasa. Penelitian yang dilakukan oleh Jiang and Kuehn [21] misalnya, menemukan bahwa *late immigrant learners* (siswa dengan latar belakang kemampuan literasi yang cukup baik dalam bahasa pertamanya) di Amerika dapat mentransfer kemampuan literasi

tersebut ketika belajar dalam bahasa keduanya (bahasa Inggris). Mereka memperoleh skor lebih baik dibandingkan dengan *early immigrant learners* (siswa dengan dengan latar belakang kemampuan literasi relatif lebih rendah dalam bahasa pertamanya) dalam beberapa tes yang mengukur kemampuan kognitif dan *academic skills* setelah selama tiga bulan belajar bahasa Inggris. Penelitian yang dilakukan oleh Rusfandi [11] juga menemukan konsistensi penggunaan *argument-counterargument structures* dalam esai argumentatif mahasiswa jurusan bahasa Inggris semester enam dalam bahasa Indonesia (L1) dan bahasa Inggris (L2), khususnya pada mahasiswa yang sudah mencapai kemampuan bahasa Inggris level *intermediate* atau di atasnya. Hasil dari penelitian-penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kemampuan konseptual dalam literasi bersifat interdependen dan dapat ditransfer antar bahasa. Oleh karena itu, permasalahan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia terutama pada aspek literasi haruslah dilihat sebagai interaksi yang kompleks dari permasalahan pembelajaran dalam bahasa kedua (bahasa Inggris) dan bahasa pertama (bahasa Indonesia). Sehingga pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut juga harus diupayakan dari dua sisi yaitu dari aspek pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri dan juga juga dari aspek pembelajaran bahasa Indonesia.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa: pertama, pembelajaran bahasa Inggris yang lebih menekankan *English native speaker norms* bukanlah konsiderasi pedagogis yang baik dan juga sebuah tujuan pembelajaran yang tidak “realistis”. Kedua, Pembelajaran bahasa Inggris seyogyanya dilihat sebagai sebuah interaksi pembelajaran yang kompleks yang melibatkan permasalahan pembelajaran baik dalam bahasa Inggris itu sendiri dan juga dalam bahasa Indonesia. Ketiga, upaya pembenahan baik dari sisi teoritis dan praktis yang mengedepankan *intelligibility* dalam pembelajaran bahasa Inggris seyogyanya mulai dan terus dilakukan.

Referensi

- [1] A. Nurweni and J. Read, "The English vocabulary knowledge of Indonesian university students," *English for Specific Purposes*, vol. 18, no. 2, pp. 161-175, 1999.
- [2] F. Grosjean, *Studying bilinguals*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- [3] V. Cook, "Evidence for multicompetence," *Language Learning*, vol. 42, no. 4, pp. 557-591, 1992.
- [4] V. Cook, "Going beyond the native speaker in language teaching," *TESOL Quarterly*, vol. 33, no. 2, pp. 185-209, 1999.
- [5] V. Cook, "Background to the L2 user," in *Portraits of the L2 user*, V. Cook, Ed. Buffalo, New York: Multilingual Matters, 2002, pp. 1-28.
- [6] V. Cook, "Multi-competence: Black hole or wormhole for second language acquisition research?," in *Understanding second language process*, Z. Han, E. S. Park, A. Revesz, C. Combs, and J. H. Kim, Eds. Buffalo, New York: Multilingual Matters, 2008, pp. 16-26.
- [7] F. Grosjean, "Living with two languages and two cultures," in *Cultural and language diversity and the deaf experience*, I. Parasnis, Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 20-37.
- [8] F. Grosjean, *Bilingual: Life and reality*. Cambridge: Harvard University Press, 2010.
- [9] O. Garcia, "Writing backwards across languages: The inexpert English/Spanish biliteracy of uncertified bilingual teachers," in *Developing advanced literacy in first and second languages*, M. J. Schleppegrell and M. C. Colombi, Eds. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2002, pp. 245-259.
- [10] I. Kecskés and T. Papp, *Foreign language and mother tongue*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
- [11] Rusfandi, "Transfer of L2 English rhetorical structures of writing to L1 Indonesian by Indonesian EFL learners," PhD Dissertation, School of Languages and Comparative Cultural Studies, The University of Queensland Australia, Brisbane, 2013.
- [12] E. Bialystok, "Metalinguistic dimensions of bilingual language proficiency," in *Language processing in bilingual children*, E.

- Bialystok, Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp. 113-140.
- [13] J. C. Richards and R. Schmidt, "Longman dictionary of language teaching and applied linguistics " in *Longman dictionary of language teaching and applied linguistics*, 3 ed. London: Longman, 2002.
- [14] J. Brutt-Griffler, *World Englishes: A study of its development*. Clevedon: Multilingual Matters, 2002.
- [15] S. L. McKay, "Toward an appropriate EIL pedagogy: Re-examining common ELT assumptions," *International Journal of Applied Linguistics*, vol. 13, no. 1, pp. 1-22, 2003.
- [16] D. Nault, "Going global: Rethinking culture teaching in ELT contexts," *Language, Culture and Curriculum*, vol. 19, no. 3, pp. 314 - 328, 2006.
- [17] M. Hyde, "The teaching of English in Morocco: The place of culture," *ELT Journal*, vol. 48, no. 4, pp. 295-304, 1994.
- [18] V. Cook, "The poverty-of-the-stimulus argument and multicompetence," *Second Language Research*, vol. 7, no. 2, pp. 103-117, 1991.
- [19] V. Cook, "Introduction: The changing L1 in the L2 user's mind," in *Effects of the second language on the first*, V. Cook, Ed. Buffalo, New York: Multilingual Matters, 2003, pp. 1-18.
- [20] A. Kirkpatrick, "Teaching English Across Cultures: What do English language teachers need to know to know how to teach English," *English Australia Journal*, vol. 23, no. 2, pp. 20-36, 2007.
- [21] B. Jiang and P. Kuehn, "Transfer in the academic language development of post-secondary ESL students," *Bilingual Research Journal*, vol. 25, no. 4, pp. 653-672 Available: Retrieved from <http://search.proquest.com.ezproxy.library.uq.edu.au/docview/222011297/fulltextPDF?accountid=14723>

Relativitas Bahasa dan Budaya Dalam Komunikasi Global

Teguh Sulisty¹, Nara Sari², Oktavia Widiastuti³

Pengantar

Dalam komunikasi global, berinteraksi dengan komunitas lintas budaya merupakan hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari. Interaksi tersebut pasti saling mempengaruhi satu sama lain. Namun di lain pihak, di dunia saat ini secara masif terdapat banyak perbedaan atau konflik terkait ras dan etnis [1]. Sebagian group etnis menganggap dirinya lebih hebat dibanding yang lain (etnosentrisme) yang menimbulkan konflik berbasis ras dan etnis. Sebagian masyarakat pemilik budaya tertentu menganggap mereka sebagai pemimpin peradaban dan penentu kebijakan global. Menurut [2], interaksi antar kelompok masyarakat seharusnya lebih terbuka pada perbedaan. Hal ini bertujuan agar tercipta kondisi saling memahami bahwa seseorang tidak boleh menilai orang lain yang berasal dari budaya yang berbeda menggunakan sudut pandang budayanya sendiri. Selain itu, interaksi akan berjalan dengan baik karena mereka menganggap memiliki posisi yang sama. Lalu bagaimanakah hubungan antara komunikasi yang notabene menggunakan bahasa harus juga melibatkan unsur budaya selain pola pikir?

Bahasa dan budaya laksana dua sisi mata uang logam yang saling melengkapi. Bahasa merupakan salah satu produk budaya dan bahasa digunakan untuk menyampaikan hasil budaya dalam komunitas sendiri maupun komunitas lainnya. Budaya merupakan seperangkat system, nilai-nilai, ide, kepercayaan, dan ideologi yang dimiliki oleh sekelompok individu yang disebut masyarakat [3]. Sedangkan [1] mendefinisikan budaya sebagai perilaku, kepercayaan, dan norma-norma sosial yang ada pada sebuah kelompok tertentu [4].

^{1,2,3} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

mengingatkan bahwa hubungan antara bahasa dan budaya sangat kompleks. Ditinjau dari sosio-kultural, penggunaan bahasa dan identitas budaya berhubungan atau diimplementasikan seperti tercermin pada tindakan seseorang. Sedangkan [5] menambahkan adanya hubungan timbal balik antara relativitas bahasa dan relativitas budaya. Jadi dalam hal ini, sangat jelas adanya kaitan erat yang tidak terpisahkan antara bahasa dan budaya dalam suatu komunikasi.

Namun salah satu hal yang perlu kita pahami dalam berkomunikasi adalah relativitas budaya di mana semua keyakinan, adat istiadat, dan etika bersifat relatif bagi setiap individu atau masyarakat tergantung konteks sosialnya sendiri. Hal ini berarti penilaian benar atau salah atau layak atau tidak layak bersifat *culture-specific*. Suatu hal yang dianggap benar oleh sekelompok masyarakat karena sudah membudaya di kalangan mereka mungkin dianggap kurang benar atau salah oleh sekelompok orang di luar budaya tersebut. Jadi pada hakekatnya, budaya itu bersifat relatif, spesifik, dan tidak universal. Hal ini yang kadang menjadi kendala dalam komunikasi apabila masing-masing menganggap budaya mereka yang paling benar [4]. Oleh sebab itu, kita perlu *open-minded*, memahami bahwa perbedaan adalah hal wajar dan kita harus memiliki *sense of respects* pada yang lain. Untuk itulah, [6] mengingatkan agar kita menyadari betapa pentingnya menumbuhkan sikap empati dalam pergaulan multikultural agar tercipta komunikasi lintas budaya yang baik, dan sebenarnya multikulturalisme merupakan konsep hidup bagi bangsa Indonesia [3]. [4] juga menyarankan agar individu belajar memahami komunikasi lintas budaya tidak hanya berusaha memahami budaya orang lain, tapi juga melibatkan usaha bagaimana individu membentuk persepsi budaya orang lain dari sudut pandang budayanya sendiri. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan *cross-cultural understandings* (saling memahami antara budaya yang berbeda) yang pada akhirnya dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dan saling memahami.

Di lain pihak, terkait dengan relativitas budaya, bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dua fungsi utama. Pertama, bahasa memadukan sistem pengetahuan dan kepercayaan sebagai dasar tingkah-laku budaya. Kedua, bahasa menjadi sarana transmisi dan transformasi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya [5]. Jadi ada keterkaitan bahasa dan budaya dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, apabila seseorang belajar bahasa asing atau bahasa kedua (L2), maka dia harus juga berusaha memahami kultur penutur asli agar ungkapan atau bahasa yang ia gunakan dapat diterima dan dipahami, baik secara struktur maupun kultur (budaya).

Dalam teori relativitas bahasa, disebutkan bahwa *every language is unique structurally and culturally* (setiap bahasa itu unik, baik secara struktur maupun kultur). Bahasa Inggris, sebagai salah satu bahasa internasional-*lingua franca*, paling banyak dipakai ketika beberapa individu berkomunikasi lintas budaya maupun lintas bangsa atau global[7]. Mengingat Bahasa Inggris dipakai secara global dalam komunikasi dunia, maka terjadi pemakaian bahasa ini secara masif melibatkan penutur dari latar belakang budaya yang berbeda (multikultur). [8] mengingatkan bahwa multikulturalisme laksana dua sisi mata pedang, sehingga dalam konteks pemerolehan bahasa kedua (L2) perlu dikembangkan pula pemahaman tentang *cultural diversity*, yaitu keragaman budaya sehingga tercapai pemahaman yang dinamis, lebih aktif, dan kontekstual dalam menyikapi perbedaan. Oleh sebab itu, mereka perlu memahami budaya penutur asli Bahasa Inggris yang unik selama proses pemerolehan dan pembelajaran Bahasa Inggris. Apalagi saat ini komunikasi juga tanpa batas karena kemajuan teknologi memungkinkan individu melakukan komunikasi secara *online*, baik tulisan maupun lisan.

Kenyataan di atas memunculkan pentingnya berbagai upaya yang dinamis dalam membantu siswa bagaimana mereka dapat menguasai Bahasa Inggris yang dapat diterima secara struktur dan kultur (*structurally and culturally accepted*). Perlu dikembangkan kurikulum dan silabus yang memudahkan pemerolehan Bahasa Inggris

dalam konteks komunikasi global dengan melibatkan budaya penutur Bahasa Inggris yang berbasis multikultur. Artikel ini mencoba mengulas bagaimana peran relativitas bahasa dan budaya dalam komunikasi global saat ini dan di masa mendatang, khususnya tentang hubungan antara bahasa dan budaya dalam perolehan Bahasa Inggris (L2). Harapannya adalah Bahasa Inggris dapat diajarkan secara baik agar siswa dapat berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut yang diterima secara struktur maupun kultur (budaya), baik ungkapan *verbal* maupun *nonverbal*.

Relativitas bahasa

Banyaknya bahasa di dunia ini menunjukkan bahwa budaya juga beraneka ragam. Dalam hal ini bahasa merupakan salah satu produk sebuah budaya. Pemerolehan bahasa juga bersifat *human-specific* karena hanya berlaku di kalangan manusia di mana bahasa tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti binatang [7]. Hal ini juga menunjukkan bahwa hanya manusia yang memiliki budaya karena mereka dikarunia akal dan perasaan. Oleh sebab itu, manusia memerlukan komunikasi dengan komunitasnya bahkan di luar komunitas mereka untuk menyampaikan informasi, gagasan, maupun perasaan. Di sinilah peran bahasa menjadi sangat penting sebagai media untuk menjalin interaksi dengan lingkungan sosialnya.

Setiap bahasa bersifat unik, sehingga tidak ada dua bahasa di dunia ini yang sama. Kalaupun ada kemiripan, itu hanya menunjukkan rumpun bahasa, seperti antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu. Relativitas bahasa tercermin pada struktur bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lain. Dalam Bahasa Inggris, misalnya, dikenal adanya bentuk kata kerja yang berbeda tergantung pada subyek dan waktu (*tense/time signal*). Sedangkan Bahasa Indonesia tidak membedakan kata kerja karena beda subyek atau waktu. Namun demikian, Bahasa Indonesia memiliki tingkat kesantunan dalam berkomunikasi. Misalnya, kata *die* perlu diterjemahkan dengan cara berbeda, seperti gugur, tewas, mati, meninggal, wafat atau berpulang

tergantung konteksnya. Dalam hal ini [5] menegaskan bahwa “kesantunan ada dalam setiap bahasa, tetapi aktualisasinya mungkin berbeda secara lintas-bahasa”. Artinya bahwa setiap bahasa memiliki struktur dan kultur yang unik yang mungkin sangat berbeda dengan bahasa yang lain.

Berikut adalah contoh pemakaian kata kerja Bahasa Inggris yang berbeda sebagaimana diilustrasikan di Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Perbandingan Penggunaan Kata Kerja dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

No.	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
1	Dia selalu menulis buku harian.	<i>She always writes a diary.</i>
2	Mereka selalu menulis buku harian.	<i>They always write a diary.</i>
3	Mereka sedang menulis buku harian.	<i>They are writing a diary.</i>
4	Mereka menulis buku harian tadi pagi.	<i>They wrote a diary this morning.</i>
5	Mereka sudah menulis buku harian sejak setahun yang lalu.	<i>They have written a diary since last year.</i>

Tabel 1 menunjukkan bagaimana kata ‘menulis’ dalam Bahasa Indonesia memiliki lima pola yang berbeda dalam Bahasa Inggris (*writes, write, writing, wrote, dan written*) karena memiliki subyek dan *time signal* yang berbeda. Selain itu, beberapa kekhasan Bahasa Inggris adalah adanya bentuk tunggal (*singular*) dan jamak (*plural*) untuk menunjukkan jumlah suatu benda yang dapat dihitung (*countable noun*). Adanya variasi kata depan ‘di’ atau *preposition* (at, in, on, over dll), serta masih banyak keunikan Bahasa Inggris yang tidak ada dalam Bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya relativitas setiap bahasa, yaitu bahasa memiliki struktur tersendiri. Jadi dalam hal ini perlu dipahami kesamaan dan perbedaan struktur antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Guru atau dosen diharapkan memberikan alasan yang logis tentang perbedaan struktur dengan memberikan contoh-contoh yang kontekstual agar siswa memahami betul bahwa perbedaan itu memang nyata adanya. Penelitian oleh [9] menunjukkan bahwa analisis kontrastif tata bahasa dua bahasa

memberikan kontribusi positif terhadap pembelajaran bahasa kedua (L2).

Relativitas Budaya

Selain relativitas bahasa, satu hal lain yang perlu kita pahami dalam perolehan bahasa kedua adalah relativitas budaya penutur asing. Budaya setiap golongan masyarakat tertentu berbeda walaupun masih ada beberapa kesamaan pula. Oleh sebab itu, budaya bersifat unik atau relatif, dan dalam kajian ini disebut dengan relativitas budaya, termasuk budaya penutur asing Bahasa Inggris. Sebuah ilustrasi yang jelas terkait penggunaan bahasa yang melibatkan konteks budaya adalah penggunaan kata '*rice*' dalam Bahasa Inggris. Kata '*rice*' memiliki padanan kata 'padi, gabah, beras, atau nasi' dalam Bahasa Indonesia tergantung konteksnya. Oleh sebab itu, kalimat "I am hungry. I need rice" harus diterjemahkan "Saya sangat lapar. Saya ingin makan nasi". Kata 'nasi' tidak boleh diterjemahkan 'gabah' karena orang Indonesia tidak makan gabah tetapi nasi, walaupun kata *rice* juga bermakna 'gabah'. Secara struktur atau *literal meaning* dianggap benar, tapi secara arti (*pragmatics*) sangat tidak cocok. Hal ini sangat beralasan kenapa kata *rice* hanya tunggal di Bahasa Inggris namun diterjemahkan secara variatif di dalam Bahasa Indonesia adalah karena unsur budaya. Orang Inggris tidak makan *rice* (nasi), tapi orang Indonesia tidak dapat lepas dari budaya makan nasi sebagai makanan pokok. Oleh sebab itu, orang Inggris tidak perlu mencari kata lain untuk menunjukkan kata gabah, padi, dan seterusnya karena *rice* bukan bagian dari budaya mereka (*culturally away*).

Contoh lain relativitas budaya adalah penggunaan tangan kanan dan kiri dalam kehidupan sehari-hari. Budaya penutur asli Bahasa Inggris, misalnya Amerika, tidak membedakan antara menggunakan tangan kiri atau kanan sewaktu memberikan sebuah benda pada orang lain. Bahkan seorang mahasiswa dapat memberikan sebuah buku pada dosennya dengan menggunakan tangan kiri tanpa ada rasa khawatir dianggap tidak sopan. Namun hal ini tidak dapat

dilakukan di dalam budaya Indonesia. Memberikan sesuatu dengan tangan kanan dianggap baik dan sopan. Sedangkan menggunakan tangan kiri dianggap kurang baik atau tidak sopan. Kalaupun terpaksa menggunakan tangan kiri, biasanya diawali dengan ungkapan “permisi” atau “maaf”. Oleh sebab itu, biasanya orang tua dalam mengajari putra-putrinya akan mengatakan “Ayo pakai tangan bagus”, di mana ungkapan ini berarti si anak harus menggunakan tangan kanan. Sedangkan kalau si anak menerima sesuatu dari tangan orang tua dan dia menggunakan tangan kiri, maka si orang tua biasanya mengatakan “Ayo mana tangan bagusnya?” Tentu saja dalam hal ini si anak diajari sebuah norma bahwa tangan kanan berarti bagus dan tangan kiri kurang baik dalam hal memberikan atau menerima sesuatu dari orang lain. Oleh sebab itu, dalam budaya Indonesia kadang kita menyebut kelompok yang baik dengan golongan kanan tetapi golongan yang jahat dengan istilah golongan kiri. Jadi, relativitas budaya menentukan ungkapan-ungkapan *verbal* yang diucapkan karena menurut Duranti *language is a mirror of culture* (bahasa merupakan cermin budaya)[5].

Sementara itu, untuk ungkapan *nonverbal*, yaitu mengungkapkan sesuatu tanpa menggunakan bahasa lisan atau tulis namun dengan gerakan tubuh atau *body language*, *facial expression*, atau *gesture*, budaya Amerika dan Indonesia memiliki cara tersendiri. Bahkan di beberapa budaya di dunia juga memiliki ungkapan *nonverbal* yang sangat berbeda pula. Jadi ungkapan ‘*your body speaks*’ banyak variasi dan cara di dunia ini. Contoh jabat tangan lintas budaya juga beraneka ragam. Salah satu contoh dalam *nonverbal language* adalah cium tangan (*sungkem*) seorang anak kepada orang tua atau siswa kepada guru. Budaya sungkem hanya ada di Indonesia, dan hal ini tidak ditemukan di budaya Amerika (*cultural bound*). Perbedaan semacam ini memungkinkan timbulnya kesalahpahaman karena adanya perbedaan. Oleh sebab itu, Solehuddin dan Budiman [2] menyarankan agar interaksi antar kelompok masyarakat seharusnya lebih terbuka terhadap perbedaan. Darling-Hammond, *et al* [10] justru

menyarankan agar individu dapat berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda (multikultur) agar mereka belajar menghargai perbedaan selama berinteraksi dengan orang lain. Yılmaz [11] berpendapat bahwa sikap positif individu terhadap multikulturalisme berdampak pada sikap baik ketika berinteraksi dan lebih terbuka terhadap perbedaan. Jadi intinya adalah pentingnya sikap toleran terhadap perbedaan yang ada dalam komunikasi global lintas budaya yang bersifat multikultur.

Cultural Misunderstanding dan Cross Cultural Understanding

Cultural misunderstanding merupakan kegagalan individu dalam memahami budaya orang lain selama berinteraksi dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda. *Cultural misunderstanding* terjadi ketika seseorang menilai budaya lain secara sepihak dengan menggunakan norma atau standar yang dia miliki selama ini. Salah satu contoh *cultural misunderstanding* adalah terkait tatapan mata. Di beberapa negara, termasuk Indonesia menunduk adalah reaksi yang sopan ketika seorang anak dimarahi orang tua. Tetapi budaya lain, misalnya Amerika, memiliki pemahaman yang berbeda. Si anak dianggap tidak menghargai orang tua [12] karena bagi mereka menatap orang yang mengajak kita bicara berarti memberi respek atau perhatian. Untuk itulah Catana [13] menyarankan agar dalam komunikasi lintas budaya kita harus berusaha memahami dan memberikan respek terhadap perbedaan budaya sehingga kita merasa nyaman dan berkomunikasi dengan baik.

Dalam hal ini penting sekali bagi seseorang yang akan berkomunikasi dengan orang berbeda budaya atau hendak pergi ke suatu tempat dengan budaya yang berbeda untuk mempelajari budaya tempat yang akan dituju. Dengan demikian, dia memiliki bekal yang cukup untuk menghindari *cultural misunderstanding* karena dia menyadari adanya potensi perbedaan. Selain itu, interaksi antar kelompok masyarakat seharusnya lebih terbuka terhadap perbedaan [2] sehingga tercipta saling memberi respek dan memahami.

Kegagalan tersebut apabila tidak disikapi dengan bijak, biasanya memunculkan penilaian atau sikap tertentu seiring dengan intensitas komunikasi lintas budaya, seperti *culture shock*, *stereotype*, sampai dengan *intercultural conflict*. Sikap atau penilaian tersebut dapat bersifat individual maupun group. Hal ini biasanya terjadi akibat kurangnya informasi atau ketidakmampuan individu dalam memfilter informasi yang dia terima. Selain itu, keadaan ini dapat pula terjadi karena ketidakmampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Sikap ini juga mungkin terjadi akibat terlalu menyanjung tinggi budayanya sendiri sehingga memandang budaya orang lain secara sepihak atau tidak obyektif. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa perkembangan dan pembelajaran individu dapat terbentuk melalui komunikasi atau interaksi dengan orang lain [10].

Culture shock (gegar budaya) adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak nyaman atau terkejut ketika menemukan sesuatu yang baru dalam komunikasi lintas budaya atau mengunjungi suatu tempat baru. Dengan kata lain, budaya baru yang dia lihat dan alami tidak sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan selama ini [14]. Selain itu, Pujiyanti dan Zuliani [12] mendefinisikan “*culture shock as the trauma you experience when you move into a culture different from your home culture*” (gegar budaya merupakan trauma yang dialami seseorang ketika berada di tempat baru dengan budaya yang berbeda dengan budayanya sendiri). *Culture shock* yang umum terjadi adalah ketika seorang pendatang baru merasa budaya setempat tidak sesuai dengan kebiasaannya di tempat lama.

Sebuah ilustrasi berikut dapat menggambarkan bagaimana *culture shock* terjadi. Beberapa siswa dari Australia yang mendapatkan kesempatan pertukaran mahasiswa dan belajar di Indonesia, harus sarapan ala Indonesia dengan sepiring nasi beserta sayur dan lauk pauk plus segelas air putih. Mereka mungkin saja akan merasa tidak nyaman karena kebiasaan mereka makan pagi atau *breakfast* dengan mengkonsumsi beberapa potong roti atau biskuit dan segelas susu.

Tentu saja perubahan kebiasaan makan pagi ini dapat membuat mereka merasa tidak nyaman bahkan merasa trauma. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengalami guncangan, ketidaknyamanan, dan perasaan negatif tertentu karena berada pada suatu budaya yang baru [15]. Namun apabila mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan baru, mereka dapat mengurangi *culture shock* atau bahkan menikmati pengalaman budaya baru.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Poedjiastutie [16] menunjukkan fakta bahwa beberapa mahasiswa dari luar negeri yang belajar di Indonesia (Kota Malang) mengalami *culture shock*. Beberapa dari mereka merasakan kebingungan, ketidaknyamanan, frustrasi, bahkan depresi. Untuk itulah mereka memerlukan keterbukaan terhadap perbedaan budaya dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya yang baru dalam interaksi lintas budaya. Mereka juga perlu terus berinteraksi dengan lingkungan baru dan memperluas jaringan pertemanan agar dapat memiliki konsep baru, yaitu bagaimana merasa nyaman di dunia yang baru. Belford [17] mengatakan, "*the process of adaptation and adjustment in a host country is challenging and social interaction and friendship play a significant role in supporting international students through their cross-cultural transitions and adjustment process*" (proses adaptasi dan penyesuaian diri terhadap budaya baru sangat menarik dan hubungan atau pertemanan sosial memiliki peranan yang penting dalam membantu mahasiswa asing dalam usaha mereka melakukan adaptasi). Tentu saja dengan memahami bahwa bila dua budaya bertemu pasti ada perbedaan dan kesamaan karena setiap budaya tiap negara itu berbeda [18]. Selanjutnya mereka harus mengembangkan *sense of respects* (rasa hormat) pada orang dan budaya lain sehingga terbentuk *cross culture understanding*.

Stereotype merupakan permasalahan lain yang mungkin dialami seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain yang berasal dari budaya yang berbeda. [19] menegaskan bahwa *stereotypes can be*

thought of as trait associations for a particular social group. These trait associations contribute to our overall attitude and its members are deemed to possess the same variation of a particular trait regardless of the actual within group variation that might exist (stereotype adalah penilaian bahwa masyarakat tertentu memiliki sifat dan kebiasaan tertentu pula atau menyamaratakan satu group masyarakat tertentu dengan identitas yang sama). Menurut Engineering [14], stereotype menggiring orang untuk menilai seseorang atau sekelompok masyarakat secara tidak adil atau tidak obyektif dan cenderung menyesatkan (misleading).

Suatu penilaian dengan menyatakan bahwa orang Amerika adalah begini, orang Indonesia begitu, sedang orang India menyukai sesuatu adalah contoh *stereotype*. Dalam hal ini penilaian tersebut juga terdengar *generic claim* (menyamaratakan). Kita tidak boleh lupa bahwa setiap individu memiliki kesukaan, karakter, maupun sifat yang mungkin berbeda dengan kelompoknya. Piller [20] menyarankan agar kita tidak menilai suatu budaya dari sudut pandang satu budaya karena hanya mempersempit cara pandang kita dan mengkerdilkan pemahaman kita terhadap budaya lain. Sebaliknya, Yilmaz [11] menyarankan agar kita memiliki sikap positif terhadap multikulturalisme yang dapat berdampak baik ketika berinteraksi dengan orang lain dengan menerima karakter orang lain yang majemuk. Untuk itulah, dalam komunikasi global, kita harus bersifat bijak dengan menggunakan bahasa yang sopan serta berperilaku yang baik, tidak mudah menilai seseorang hanya berdasar etnisnya atau asal-usulnya. Tidak kalah pentingnya dalam menghindari *stereotype* adalah kita harus belajar memahami karakter maupun kebiasaan lawan bicara kita agar *intercultural communication* (komunikasi dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda) dapat berjalan dengan baik.

Sebagai akibat dari *culture shock* dan *stereotype* yang tidak dapat disikapi dengan baik, memungkinkan munculnya *intercultural conflict*. Engineering [14] menjelaskan bahwa "*intercultural conflict*

can be thought of as both individual and cultural" (*intercultural conflict* dapat melibatkan ranah individu dan sosial budaya). Konflik jenis ini biasanya berasal dari kesalahan berkomunikasi (*miscommunication*) karena beda budaya memungkinkan perbedaan dalam tata cara berkomunikasi. Namun demikian, Stadler [21] berpendapat "*conflict is a natural by-product of communication. Conflicts usually arise from a misalignment in opinions and / or goals, appear regularly in all types of interpersonal communication. Therefore, this should be considered as a normal process of interaction, even in intracultural communication*". Untuk itulah, *intercultural conflict* dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam interaksi di masyarakat, baik yang memiliki budaya yang sama atau berbeda. Namun demikian, konflik harus dikelola atau ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan. Mengingat setiap budaya memiliki keunikan tersendiri, maka potensi konflik selalu terbuka. Jadi sangat dirasa perlu untuk memahami bagaimana menghindari konflik, atau setidaknya meminimalisir potensi konflik. Untuk itulah kita perlu memahami dan menanamkan *cross cultural understanding* (CCU) dalam komunikasi lintas budaya.

Cross cultural understanding, menurut Pujiyanti dan Zuliani [12], adalah memahami orang lain dari sudut pandang budaya orang itu sendiri. Welsh [22] menegaskan "*learning an L2 automatically results in intercultural understanding*" (ketika kita mempelajari bahasa kedua, kita juga mempelajari bagaimana memahami budaya yang berbeda). Hal ini sangat beralasan karena bahasa merupakan cermin budaya. Ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, maka bahasa yang kita gunakan harus benar secara struktur maupun kultur (budaya) agar interaksi kita dengan orang lain dapat berjalan dengan baik. CCU juga dapat meminimalisir kesalahan berkomunikasi dan membekali seseorang pemahaman yang baik dalam berkomunikasi lintas budaya agar terhindar dari *cultural misunderstanding*. Jadi, *cross-cultural understanding is needed wherever there are cultural differences* (CCU sangat diperlukan ketika

ada perbedaan budaya). Simanjuntak dan R. Fitriana [15] memberikan tips bagaimana mengembangkan CCU agar kita terhindar dari *cultural misunderstanding* yang meliputi empat hal.

a. *Explore the definitions of culture*

Perlunya memahami makna budaya dalam berkomunikasi termasuk di dalamnya bagaimana hubungan antara bahasa dan budaya. Bahasa merupakan cermin budaya yang harus dijunjung tinggi ketika berinteraksi dengan orang lain, khususnya orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi dalam konteks ini, kita perlu memahami budaya kita sendiri sebelum berusaha memahami budaya orang lain.

b. *Discuss how language reflects micro culture, such as at a restaurant, at work, a bank, etc.*

Perlunya memahami bagaimana bahasa digunakan secara mikro atau dalam konteks tertentu. Dalam hal ini penggunaan kosa kata khusus mungkin beberapa berbeda dengan kosa kata umum. Misalkan, kata bunga secara umum adalah *flower*. Namun untuk istilah bunga bank, kita tidak boleh menggunakan istilah *flower of bank* tetapi *interest*. Atau hal lain yang perlu diajarkan adalah *table manner* (adap kesopanan makan di depan orang lain/restaurant atau hotel). Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi.

c. *Explore cross-cultural similarities and differences*

Memahami persamaan dan perbedaan antara dua budaya yang berbeda adalah sangat penting agar pemakai bahasa kedua juga memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga diharapkan individu mampu menghasilkan bahasa yang dapat diterima secara kultur atau budaya.

d. *Promote tolerance of differences*

Setelah memahami adanya persamaan dan perbedaan antara budaya yang berbeda, individu diharapkan mampu

menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan. Jadi individu tidak lagi menilai orang lain dari sudut pandang budayanya sendiri tapi juga dari sudut pandang budaya orang lain. Apabila jiwa ini sudah ada, maka *cross cultural understanding* dapat diterapkan dalam komunikasi lintas budaya.

Keempat langkah tersebut diharapkan dapat membekali individu dalam berkomunikasi lintas budaya, mengingat bahasa tidak dapat dilepaskan dari budaya pengguna bahasa itu sendiri. Belford [17] percaya "*Intercultural communication competence is part of 'culture learning' and it contributes to building relationships and maintaining interpersonal involvement*". Jadi intinya adalah belajar bahasa kedua (L2) juga berarti berusaha memahami budaya penutur asli bahasa tersebut, sehingga individu dapat berkomunikasi lintas budaya dengan baik dan penuh percaya diri.

Makna Ungkapan Lintas Budaya

Bahasa sebagai cermin budaya menggiring kita untuk memahami betapa pentingnya berbahasa dengan menggunakan kesepakatan budaya. Oleh sebab itu, suatu ungkapan dapat diartikan berbeda tergantung sudut pandang budaya. Misalkan, "*assalamualaikum*" adalah salam yang berasal dari Arab Saudi yang diucapkan ketika seseorang bertemu dengan orang lain atau mengawali perkuliahan atau acara tertentu. Namun di negara Amerika ucapan yang dipakai adalah *good morning, good day, good afternoon*, atau *good evening* tergantung waktu terjadinya interaksi. Namun bagi beberapa guru atau dosen di Indonesia yang beragama Islam, mereka sudah terbiasa mengucapkan "*assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua*". Ini nampaknya kompromi yang dilakukan ketika mengetahui bahwa *audience* atau yang diajak berbicara memiliki latar belakang agama yang berbeda. Bagi orang Indonesia, kompromi semacam ini adalah hal lumrah dan mudah ditemui di mana-mana. Contoh ucapan salam tersebut merupakan implementasi

berkomunikasi dengan mengedepankan pentingnya konteks budaya atau *culture specific expression* [5].

Contoh ungkapan lain yang bersifat konteks budaya adalah “hujan”. Di Indonesia, hujan kadang dianggap negatif sebagaimana tercermin pada peribahasa “Panas setahun dihapus hujan sehari”. Menurut kamus, peribahasa tersebut berarti kebaikan yang banyak hilang karena kesalahan yang sedikit. Dalam konteks ini, hujan dikonotasikan dengan kesalahan. Sangat mungkin apabila peribahasa tersebut diterjemahkan secara literal akan dipahami secara lain oleh budaya yang berbeda. Seseorang dari Libya (dulu teman kuliah S3 saya) sangat senang ketika hujan tiba karena anaknya suka bermain air hujan. Hal ini dikarenakan hujan selalu ditunggu di negara tersebut karena setahun rata-rata hanya turun hujan 3 sampai dengan 4 kali saja. Bisa dibayangkan, perbedaan alam juga mempengaruhi budaya dan sudut pandang terhadap “hujan”.

Ungkapan yang bersifat lintas budaya, berdasarkan contoh di atas merupakan hal-hal yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, kadang individu salah memahami suatu ungkapan atau keliru dalam membuat suatu terjemahan. Sebuah kalimat yang diambil dari sebuah lirik lagu “Namun hatiku tetap selembut salju” merupakan suatu ungkapan dengan meminjam budaya lain. Sehingga apabila lirik tersebut diterjemahkan dalam Bahasa Inggris secara literal akan berbunyi “*But my heart is still as soft as snow*”. Kalimat tersebut mungkin akan dimaknai oleh individu yang tinggal di daerah yang bersalju dengan sedikit tanda tanya karena dia tahu bahwa salju itu tidak selalu lembut. Nampaknya penulis lagu ingin mengungkapkan perasaannya secara elegan dengan meminjam kata salju. Padahal tepung pasti jauh lebih lembut, tetapi mengganti kata salju dengan tepung nampaknya kurang ‘berwibawa’ walau secara konteks lebih tepat. Di sinilah peran *licentia poetica* atau kebebasan berekspresi dalam sebuah karya sastra sehingga pencipta lagu bebas menggunakan istilah yang dia kehendaki.

Oleh sebab itu, alih bahasa suatu ungkapan berbasis budaya harus memperhatikan padanan yang sepadan, walau kadang dipaksakan karena tiadanya padanan yang sesuai (*cultural bound*). Peribahasa “di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung” menggambarkan pentingnya individu menjaga perilakunya ketika berada di tempat orang lain. Penerjemahan langsung atau literal dalam hal ini kurang dapat dipahami oleh penutur asli Bahasa Inggris. Jadi mencari padanan dengan menerjemahkan kalimat tersebut menjadi “Do as romans do while you are in Rome” merupakan terjemahan yang sepadan dalam konteks arti maupun pesan yang disampaikan. Di sini diperlukan kejelian sebelum menerjemahkan suatu kalimat ke dalam bahasa lain.

Contoh percakapan berikut menunjukkan penggunaan kosakata “egg” yang secara harfiah berarti “telur” yang salah dipahami oleh B secara kontekstual.

A: *I am proud of you. You are a good egg.*

B: *Sorry, I am not an egg, but a young man.*

B menerjemahkan kata “egg” sebagai telur, sehingga ungkapan A (penutur asli Bahasa Inggris) yang bermaksud memuji B (siswa Indonesia yang belajar Bahasa Inggris) ditanggapi secara salah. Sebenarnya kalimat “*You are a good egg*” disini berarti “Kamu orang yang baik”, bukan “kamu adalah telur yang baik”. Jadi makna “egg” harus diterjemahkan secara kontekstual, bukan secara literal atau harfiah. Dalam hal ini, konteks budaya sangat mempengaruhi ungkapan yang kita gunakan dalam komunikasi. Oleh sebab itu, cerita anak-anak, misalnya, antara konteks dua budaya juga berbeda. Di Indonesia cerita fabel banyak didominasi oleh simbol “kancil”, sedangkan cerita di Amerika misalnya ada cerita tentang “*three pigs*” (tiga babi). Hal ini menunjukkan kedekatan budaya dan cerita. Sebagian besar kultur di Indonesia tidak menggunakan binatang babi sebagai simbol cerita karena bagi sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas muslim babi yang percaya binatang tersebut haram untuk dimakan. Namun binatang kancil mudah ditemukan di Indonesia

sehingga dipakai simbol dalam cerita. Di sinilah keunikan bahasa dan budaya ketika digunakan untuk komunikasi lintas budaya.

Pengajaran Bahasa Inggris dengan Melibatkan Budaya (Intercultural Contents)

Upaya memahami adanya hubungan yang sangat erat antara bahasa dan budaya dengan memperhatikan contoh-contoh di atas, timbul satu pertanyaan besar “Bagaimana mengajar Bahasa Inggris bagi siswa atau mahasiswa?” Ada jawaban singkat atas pertanyaan tersebut yaitu mempelajari bahasa kedua (L2) berarti mempelajari budaya penutur asli bahasa tersebut. Jadi dalam hal ini ada dua fokus, yaitu struktur Bahasa Inggris dan kultur (budaya) penutur asli Bahasa Inggris.

Secara struktur, sebagaimana sempat disinggung di pembahasan awal, *structurally English is unique* (secara struktur Bahasa Inggris memiliki keunikan tersendiri). Apabila berbicara dalam konteks di Indonesia, maka perlu membandingkan antara struktur Bahasa Inggris dengan struktur Bahasa Indonesia. Tujuan utamanya adalah mencari persamaan dan perbedaan struktur dua bahasa tersebut, dan bagaimana kedua bahasa tersebut saling mempengaruhi. Individu yang mempelajari Bahasa Inggris sebagai L2, merasakan pengaruh bahasa ibu (*mother tongue/L1*) sangat dominan sekali. Menurut [23], “*The first language has been long considered the villain in second language learning, the major cause of a learner’s problems with the new language*” (bahasa ibu ditengarai membawa pengaruh yang besar sekali dalam pembelajaran bahasa kedua yang menyebabkan masalah dalam penguasaan bahasa kedua). [24] berpendapat bahwa “*proponents of Contrastive Analysis (CA) claim that where the first and second language rules are not the same, errors are likely to occur as a result of interference between the two languages*” (CA mengklaim bahwa apabila ada perbedaan struktur antara dua bahasa, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan atau *errors* akibat pengaruh satu dengan yang lainnya).

Namun demikian, *errors* tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam pembelajaran Bahasa Inggris secara keseluruhan. Seorang dosen atau guru dapat menganalisis mengapa *errors* dilakukan mahasiswa dan sekaligus menganalisa dari mana *errors* itu berasal dan bagaimana cara membantu mahasiswa agar tidak melakukan *errors* serupa terulang kembali. Jadi dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa investigasi terhadap *errors* bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu *diagnostic* dan *prognostic*. *Diagnostic* adalah mencari akar permasalahan sumber *errors*. Sementara itu *prognostic* adalah membuat perencanaan untuk memecahkan permasalahan *errors* yang dihadapi siswa sehingga guru atau dosen dapat memodifikasi materi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa.

Sebuah ilustrasi di Tabel 1 di atas dapat dijadikan contoh bagaimana membandingkan struktur kedua bahasa tersebut. Dalam konteks ini, guru maupun dosen dapat memperkirakan kesalahan *grammar*/struktur yang kemungkinan besar akan dilakukan anak didik. Oleh sebab itu, guru atau dosen dapat memahami akar permasalahan yang dihadapi anak didik sekaligus mencari jalan keluar bagaimana memperbaiki masalah tersebut (*prognostic*). Jalan keluar tersebut dapat berupa silabus yang memenuhi kebutuhan siswa, kegiatan yang bervariasi, metode pembelajaran, maupun materi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.

Selain menyiapkan kegiatan yang berfokus pada struktur bahasa, pembelajaran Bahasa Inggris harus mempertimbangkan unsur budaya atau *cultural contents*. Dalam hal ini ada tiga jenis muatan kultur: kultur lokal (*local*), kultur asing (*target*), dan campuran (*intercultural contents*) [25]. Siswa perlu diberi muatan kultur lokal dan kultur bahasa target agar mereka dapat melihat perbedaan dan persamaan dua budaya tersebut. Dengan kata lain, *intercultural contents* diharapkan dapat membuka wawasan siswa bahwa perbedaan bukan suatu hambatan tapi kesempatan bagi siswa untuk menambah ilmu. Dalam jangka panjang, diharapkan siswa dapat menerima perbedaan sebagai keniscayaan dalam komunikasi lintas

budaya dan mengembangkan respek pada orang maupun budaya lain. Hal ini disarankan juga oleh Solehuddin dan Budiman[2], serta Minbaeva, dkk [8] agar siswa dapat memahami multikulturalisme dalam komunikasi global dengan dinamis, aktif, dan kontekstual dalam menyikapi perbedaan.

Memberikan cerita Bawang Putih Bawang Merah sebagai muatan kultur lokal dan Cinderella sebagai muatan kultur bahasa target dapat menambah pemahaman siswa bahwa kebenaran bersifat universal. Setiap budaya percaya bahwa yang baik pasti menang dan yang jahat pasti kalah. Selain itu, contoh bagaimana pesta pernikahan di Indonesia dan *wedding party* di budaya barat dilakukan, dapat menambah pengetahuan siswa bahwa kedua pesta tersebut memiliki tujuan yang serupa tapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Pola-pola mencari kesamaan dan perbedaan sangat mungkin menjadi bahan pembelajaran Bahasa Inggris yang baik. Welsh [22] mengatakan bahwa apabila siswa menjadi warga dunia (*global citizens*) dan agen perubahan di masa mendatang, mereka tidak hanya memahami budaya lain tapi ikut terlibat dalam komunikasi multi budaya atau global. Mereka akan merasa percaya diri dan nyaman karena memiliki pengetahuan yang cukup serta sikap yang dewasa dengan memberi respek pada orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda.

Perlu juga diberikan contoh-contoh ungkapan dalam Bahasa Inggris yang mengandung muatan budaya, seperti ucapan selamat. Dalam budaya Indonesia, ucapan perayaan idul fitri biasanya diungkapkan seperti "Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon Maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidzin" dengan disertai gambar ketupat atau masjid. Namun, ucapan idul fitri dalam Bahasa Inggris biasanya diucapkan dengan singkat "*Happy eid Mubarak*" atau "*Happy eid al-fitri*". Perbedaan ini perlu dijelaskan kepada siswa agar mereka paham bahwa budaya yang berbeda menghasilkan ungkapan yang berbeda pula. Selain itu, gambar ketupat merupakan budaya Indonesia sehingga tidak ada dalam ucapan Bahasa Inggris (*cultural bound*). Dengan demikian siswa tidak hanya tahu perbedaan dan persamaan

dalam membuat ucapan tapi juga menghargai perbedaan tersebut dan memberi respek pada budaya lain.

Kesimpulan

Relativitas bahasa dan budaya merupakan cerminan dari keberagaman masyarakat secara global yang bersifat multikultur. Oleh sebab itu, suatu ungkapan individu merupakan cerminan budaya yang menjadi atribut bagi dirinya karena bahasa dan budaya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Adanya keberagaman budaya, apabila tidak disikapi dengan bijak, dapat menimbulkan *cultural misunderstanding* berupa *culture shock*, *stereotype*, bahkan *conflict*. Namun apabila keberagaman itu dapat dikelola dengan baik karena memiliki *cross cultural understanding*, maka individu akan memiliki wawasan yang luas. Dia dapat berkomunikasi dengan orang lain lintas budaya dengan penuh percaya diri dan baik.

Cross cultural understanding dapat dilakukan dengan cara memahami arti budaya, memahami bahasa dalam konteks (*micro culture*), memahami persamaan dan perbedaan lintas budaya, dan mengembangkan jiwa toleran terhadap perbedaan. Untuk itulah, pembelajaran Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua harus mempertimbangkan *intercultural contents* (perpaduan antara budaya lokal dan budaya target). Dengan demikian, komunikasi lintas budaya (global) dapat berjalan dengan baik karena siswa tidak hanya mendapat bekal yang cukup dari segi struktur tapi juga kultur atau budaya.

Referensi

- [1] N. Tan and S. Li, "Multiculturalism in Healthcare: A Review of Current Research into Diversity Found in the Healthcare Professional Population and the Patient Population," *Int. J. Med. Students*, vol. 4, no. 3, pp. 112–119, 2016, doi: 10.5195/ijms.2016.163.
- [2] M. Solehuddin and N. Budiman, "Multicultural competence of

- prospective preschool teachers in predominantly Muslim country," *Cakrawala Pendidik.*, vol. 38, no. 3, pp. 438–451, 2019, doi: 10.21831/cp.v38i3.25033.
- [3] Wasino, "Indonesia: From Pluralism To Multiculturalism," *Paramita - Hist. Stud. J.*, vol. 23, no. 2, pp. 148–155, 2013, doi: 10.15294/paramita.v23i2.2665.
- [4] H. Dart, "Encouraging Interculturalism," *ET Forum*, 2012, [Online]. Available: americanenglish.state.gov/english-teaching-forum.
- [5] E. Kadarisman, *Mengurai Bahasa Menyibak Budaya*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2009.
- [6] N. Shapira, "Utilizing Television Sitcom to Foster Intergroup Empathy Among Israeli Teachers," vol. 22, no. 3, pp. 1–23, 2020.
- [7] V. Fromkin, R. Rodman, and N. Hyams, *An Introduction to Language*, Ninth Edit. Boston: WADSWORTH CENGAGE Learning, 2011.
- [8] D. Minbaeva, S. Fitzsimmons, and C. Brewster, "Beyond the double-edged sword of cultural diversity in teams: Progress, critique, and next steps," *J. Int. Bus. Stud.*, vol. 52, no. 1, pp. 45–55, 2021, doi: 10.1057/s41267-020-00390-2.
- [9] Q. Xiao and P. Widodo, "Contrastive Analysis of Particles in Chinese and Indonesian Language," *Litera*, vol. 18, no. 3, pp. 361–378, 2019, doi: 10.21831/ltr.v18i3.24223.
- [10] L. Darling-Hammond, L. Flook, C. Cook-Harvey, B. Barron, and D. Osher, "Implications for educational practice of the science of learning and development," *Appl. Dev. Sci.*, vol. 24, no. 2, pp. 97–140, 2020, doi: 10.1080/10888691.2018.1537791.
- [11] F. Yilmaz, "Multiculturalism and multicultural education: A case study of teacher candidates' perceptions," *Cogent Educ.*, vol. 3, no. 1, 2016, doi: 10.1080/2331186X.2016.1172394.
- [12] U. Pujiyanti and F. R. Zuliani, *Cross Cultural Understanding : a Handbook To Understand Others ' Cultures*. 2014.
- [13] S. E. Catana, "Teaching Cross-cultural Communication Issues – A Way of Successfully Integrating into the Multicultural Knowledge Society," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 128, pp. 343–348, 2014, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.168.
- [14] R. T. Engineering, *Intercultural Communication*. Bangalore: Ray Technology University Campus.

- [15] D. Simanjuntak and R. Fitriana, "Culture Shock, Adaptation, and Self-Concept of Tourism Human Resources in Welcoming the New Normal Era," *Society*, vol. 8, no. 2, pp. 403–418, 2020, doi: 10.33019/society.v8i2.200.
- [16] D. Poedjiastutie, "Culture Shock Experienced By Foreign Students Studying At Indonesian Universities," *TEFLIN J. - A Publ. Teach. Learn. English*, vol. 20, no. 1, p. 25, 2015, doi: 10.15639/teflinjournal.v20i1/25-36.
- [17] N. Belford, "International students from Melbourne describing their cross-cultural transitions experiences: Culture shock, social interaction, and friendship development," *J. Int. Students*, vol. 7, no. 3, pp. 499–521, 2017, doi: 10.5281/zenodo.569941.
- [18] M. Asaf, R. Shachar, V. Tohar, and A. Kainan, "Forum : Qualitative Social Research From Superteacher to a Super Teacher : The Career Development of Teacher Educators," vol. 9, no. 3, 2008.
- [19] S. R. Khan, T. Benda, and M. N. Stagnaro, "Stereotyping From the Perspective of Perceivers and Targets," *Online Readings Psychol. Cult.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2012, doi: 10.9707/2307-0919.1043.
- [20] I. Piller, "Monolingual ways of seeing multilingualism," *J. Multicult. Discourses*, vol. 11, no. 1, pp. 25–33, 2016, doi: 10.1080/17447143.2015.1102921.
- [21] S. Stadler, *Conflict, Culture, and Communication*. New York: Taylor & Francis Ltd, 2019.
- [22] A. Welsh, "Promoting a Respect For Difference Through Language Teaching," *TEFLIN J.*, vol. 25, no. 2, pp. 233–242, 2014.
- [23] H. Dulay, *Language Two*. Oxford: Oxford University Press, 1982.
- [24] D. Nunan, "Second Language Acquisition," in *The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages*, R. Carter and D. Nunan, Eds. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp. 87–92.
- [25] B. Y. Cahyono, *Teaching English by Using Culture Contents*. Malang: State University of Malang Press.

Konvensi Naratif Novel Kearifan Lokal Sastra Indonesia Soedjijono¹

Pengantar

Seseorang yang mengapresiasi puisi mesti berbekal teori puisi. Jika dia mengapresiasi soneta atau pantun, sebagai 2 genre puisi, dia tidak cukup berbekal teori puisi yang bersifat umum. Dia mesti memahami konvensi poetik yang bersifat khas genre soneta atau pantun. Analog dengan ilustrasi tersebut, jika seseorang mengapresiasi novel dia mesti berbekal teori fiksi naratif. Jika dia mengapresiasi novel genre tertentu, katakanlah novel detektif, dia mesti memahami konvensi naratif yang khas novel detektif, selain dia berbekal teori fiksi naratif yang bersifat umum. Konvensi naratif yang khas pada *genre* novel, yang di dalam artikel ini disebut novel kearifan lokal, belum pernah dibuat orang. Konvensi naratif inilah yang coba akan dikonstruksi berbasis kajian terhadap 4 (empat) novel kearifan lokal: *Ibu Sinder* (Pandir Kelana), *Para Priyayi* (Umar Kayam), *Pasar* (Kuntowijoyo), *Pengakuan Pariyem* (Linus Suryadi) dengan menggunakan pembacaan fenomenologis (*phenomenological reading*), analisis intrinsik, ekstrinsik, dan historis secara simultan.

Selama ini, teori fiksi naratif yang berkembang dalam studi sastra di Indonesia dan menjadi perbendaharaan pengetahuan teoritis para siswa adalah teori naratif dari Barat. Tulisan S. Tasrif perihal cerita pendek dapat dijadikan contoh nyata. Dengan mengambil rujukan buku *Craft of the Short Story*, Tasrif menyatakan, cerita pendek yang lengkap mempunyai *ingredients*: (1) *theme*, (2) *plot*, *trap*, atau *dramatic conflict*, (3) *character delineation*, (4) *suspense and foreshadowing*, (5) *immediacy* dan *atmosphere*, (6) *point of view*, (7) *limited focus* dan *unity*" [1]. Dalam makalahnya pada Simposium Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia (1966) M. Saleh Saad menyatakan bahwa secara umum unsur yang membangun struktur cerita rekaan adalah: (a) alur; (b) penokohan; (c) latar; (d) pusat pengisahan [2]. Tiga unsur naratif yang dipaparkan Saleh Saad dalam

¹ Pasca Sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

makalahnya itu mirip dengan apa yang dipaparkan buku *Theory of Literature* tentang tiga unsur naratif yang digunakan dalam kritik analisis novel [3]

Sementara itu, buku *Memahami Cerita Rekaan* yang memaparkan teori naratif dan dimaksudkan “sebagai buku pegangan bagi mahasiswa” jelas diadopsi dari teori naratif Barat, meskipun dalam menjelaskan istilah-istilah tertentu “menggunakan khazanah sastra kita sendiri”[4] Demikianlah, S. Tasrif, M. Saleh Saad, Panuti Sudjiman (dan juga kebanyakan pengarang yang lain) dalam menjelaskan teori naratif tidak didasarkan pada hasil studi karya sastra Indonesia, melainkan dengan cara mengadopsi teori naratif dari Barat. Padahal, seperti ditegaskan Wellek & Warren, “*Obviously, literary theory is impossible except on the basis of a study of concrete literary works. Criteria, categories, and schemes cannot be arrived at in vacuo.*”[3] Memang ada anggapan, bahwa teori sastra merupakan sarana yang bersifat universal, karena itu teori sastra Barat (juga teori naratif) sah digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan mengapresiasi sastra di mana saja, juga di Indonesia.

Dalam studi sastra, istilah konvensi memiliki beberapa makna. *Pertama*, kesepakatan tersirat antara pengarang dan audiens terkait dengan penggunaan medium artistik untuk merepresentasikan realitas; misalnya, penggunaan tiga dinding pada panggung prosenium dipahami sebagai ruang berdinding empat. *Kedua*, ciri-ciri yang menonjol dan berulang-ulang muncul pada unsur struktur sastra; misalnya, perulangan unsur tokoh, alur, versifikasi, diksi, gaya, dsb. *Ketiga*, kode-kode yang terdapat pada setiap genre sastra yang diasimilasikan dengan realitas pada kebudayaan masyarakat; misalnya, jenis binatang yang jorok dalam cerita rakyat diasimilasikan dengan lapisan sudra dalam kebudayaan masyarakat tertentu [5]. Sementara itu, Teeuw menyatakan istilah konvensi masuk dalam bidang studi sastra dari dunia hukum lewat ilmu-ilmu sosial. Mula-mula, konvensi diartikan sebagai lembaga, aturan sosial, sesuatu yang disetujui anggota masyarakat. Kemudian, konvensi masuk bidang studi sastra lewat gerakan Romantik pada abad ke-19. Dalam studi sastra, konvensi dipahami bukan merupakan suatu sistem yang beku dan ketat, tetapi merupakan sistem yang luwes dan dinamis. Ada konvensi

sastra yang bersifat sangat umum berlaku pada semua genre sastra. Ada pula konvensi yang sangat khas dan spesifik berlaku pada sub-genre, jenis, atau golongan sastra tertentu [6].

Dari penjelasan Abrams dan Teeuw di atas dapat dipahami, bahwa konvensi sastra merupakan ciri yang spesifik dan menonjol yang berulang terjadi pada unsur struktur sastra, bersifat umum maupun khusus, serta merupakan sistem yang luwes dan dinamis. Jika konvensi sastra itu terjadi pada genre naratif, maka disebut konvensi naratif. Temuan Watt dalam kajian 5 (lima) novel Inggris pada abad ke-18 dapat dianggap sebagai konvensi naratif yang terdapat pada genre novel Barat [7]. Dengan memperhatikan konvensi naratif yang tipikal pada struktur novel, Hawthorn membedakan 15 jenis novel: *the picaresque novel*, *the epistolary novel*, *the historical novel*, *the satirical novel*, *the bildungsroman (novel of formation or education)*, *the roman a clef (novel with a key)*, *the tendensroman (thesis novel)*, *the roman noir (gothic novel)*, *the roman-fleuve*, *the roman feuilleton*, *science fiction*, *the nouveau roman (new novel)*, *metafiction*, *faction*. [8] Dengan mengidentifikasi konvensi naratif yang tipikal dan spesifik pada struktur sejumlah novel sastra Indonesia yang terbit pada akhir abad XX, kita dapat mengatakan adanya jenis novel kearifan lokal.

Novel Bertendensi Kejawaan

Perkembangan novel sastra Indonesia selama abad XX menunjukkan ciri yang dinamis. Novel-novel Marah Rusli dan Merari Siregar memperlihatkan adanya, penggabungan 3 (tiga) tradisi: tradisi mereka sendiri, tradisi sastra Melayu lama, dan tradisi dari pembacaan cerita-cerita dalam bahasa Belanda [9]. Dengan kata lain, novel-novel Marah Rusli dan Merari Siregar menggabungkan tradisi naratif Nusantara dan tradisi naratif Barat. Penggabungan berbagai tradisi naratif dalam novel ini sesuai dengan sinyalemen Teeuw, "*The creation of the novel in modern Indonesian literature is a complicated phenomenon which certainly cannot be reduced to a single source.*"[10] Fenomena ini bukan hanya terjadi pada tahun 1920-an tetapi juga pada dekade-dekade selanjutnya.

Perkembangan berikutnya, menurut Umar Junus, novel *Belunggu* (Armijn Pane) adalah puncak dari novel-novel sebelum PD-

II. Hal ini tampak pada struktur novel yang tidak melanjutkan tradisi bercerita, tetapi menyajikan berbagai persoalan yang terjalin secara integral. Novel diselesaikan secara ambiguous, sehingga kesimpulannya diserahkan pada pemahaman pembaca masing-masing. Novel-novel Pramoedya yang terbit setelah *Belenggu*, menurut Umar Junus, tidak memiliki pembaharuan struktur. Pembaharuan Pramudya terletak pada memperkenalkan tokoh sebuah keluarga atau tokoh kolektif. Selain itu, Pramudya menggunakan keadaan tipikal sebagai latar belakang novelnya. Perkembangan yang penting, adalah novel-novel Iwan Simatupang, yang menurut Umar Junus, merupakan puncak perkembangan novel-novel Indonesia sesudah *Belenggu*. Iwan memutuskan hubungan dengan cara bercerita tradisional. Tokoh tidak penting, dan digantikan dunia. Struktur novel membayangkan keadaan yang dilukiskannya, sehingga struktur novel merupakan bagian integral dari cerita itu sendiri. Iwan mengaku, bahwa di dalam dua novelnya (*Merahnya Merah* dan *Ziarah*), ia menerapkan *nouveau roman*, jenis novel sastra Perancis mutakhir dengan tokohnya Alain Robbe-Grillet. Novel Iwan adalah bentuk novel esei, novel masa depan, novel tanpa pahlawan, tanpa tema, tanpa moral [11]

Hiruk pikuk mengadopsi tradisi naratif Barat ini pudar pada tahun 1970-an. Teeuw melihat adanya fenomena baru dalam perkembangan novel Indonesia, yakni lahirnya novel-novel bertendensi kejawaan. Tendensi kejawaan itu tampak pada novel-novel NH Dini yang mengungkapkan norma-norma dan gagasan budaya Jawa yang halus, sopan, lembut. Tendensi kejawaan pada cerita-cerita Danarto tampak dalam mengungkapkan tema, motif, dan nilai tipikal Jawa dengan menyajikan mistisisme panteistik Jawa tradisional dalam bentuknya yang ekstrim. Menurut Teeuw, novel-novel yang mengungkapkan kerangka pikir Jawa dan diresapi nilai-nilai Jawa masih terbit pada tahun 1980-an, di antaranya tampak pada novel *Burung-burung Manyar* (1981), *Pengakuan Pariyem* (1981), *Ronggeng Dukuh Paruk* (1982), *Lintang Kemukus Dini Hari* (1985), *Jantera Bianglala* (1986)[12].

Dalam tulisannya yang bertajuk *Javanistic Tendencies in Recent Indonesian Literature* Teeuw mencatat beberapa ciri yang

spesifik dan menonjol sebagai berikut: pertama, novel-novel tersebut menggunakan latar cerita Jawa. Di dalamnya terdapat permasalahan hubungan fisiologis dan biologis, dunia simbolik, alam dan lingkungan yang menyajikan dunia kejawaan, yakni dunia yang penuh sasmita, tanda, simbol, dan sejenis elemen etnografi. Kedua, adanya falsafah Jawa. Ada kesadaran bahwa kehidupan merupakan sebuah *pakem*, manusia memainkan peranan seperti tokoh wayang kulit, hidup harus '*nrima ing pandum*'. Manusia harus mencoba dan mendapatkan harmoni, keseimbangan roda yang berputar dalam sejarah, dan menolak ekstremitas. Nurani kehidupan tak pernah bergeser dari kedudukannya yang di tengah. Ketiga, koherensi sosial sangat kuat pada kehidupan orang-orang di sebuah desa kecil. Ada kesadaran psikologis pada tokoh protagonis wanita, bahwa menjadi isteri seorang laki-laki adalah mulia. Keempat, novel mengungkapkan visi budaya masyarakat tentang nilai dan norma dalam dunia modern. Ada kebenaran historis dan sosiologis tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kelima, novel mengungkapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu keseimbangan dan harmoni, antara keinginan individu dan kewajiban sosial.[12]

Novel Kearifan Lokal

Terinspirasi oleh novel-novel yang menunjukkan gejala kecenderungan kejawaan dengan sejumlah ciri spesifik dan tipikal sebagaimana dikemukakan Teeuw, kajian ini mencoba memahami novel-novel tersebut sebagai refleksi nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Itulah sebabnya, untuk sementara novel-novel jenis ini disebut novel kearifan lokal. Menurut John Haba, kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi budaya. Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan merupakan elemen penting untuk memperkuat kohesi sosial di antara warga masyarakat. Secara umum, kearifan lokal memiliki ciri dan fungsi berikut ini; (1) sebagai penanda identitas sebuah komunitas; (2) sebagai elemen perekat kohesi sosial; (3) sebagai unsur budaya yang tumbuh dari bawah, eksis dan berkembang dalam masyarakat; bukan unsur budaya yang dipaksakan dari atas; (4) berfungsi memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas;

(5) dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground*; (6) mampu mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi dan mekanisme bersama untuk mempertahankan diri dari kemungkinan terjadinya gangguan atau pengrusakan solidaritas kelompok sebagai komunitas yang utuh dan terintegrasi. [13]

Dari paparan di atas dapat dipahami, bahwa kearifan lokal adalah seluruh gagasan, nilai, pengetahuan, aktivitas, dan benda-benda budaya yang spesifik dan dibanggakan yang menjadi identitas dan jati diri suatu komunitas atau kelompok etnis tertentu. Novel kearifan lokal adalah novel yang merefleksikan dan atau merepresentasikan kebijakan masyarakat setempat atau komunitas atau kelompok etnis tertentu. Perkembangan sejarah novel sastra Indonesia pada dasawarsa 1960 ditandai dengan munculnya novel-novel Iwan Simatupang, yakni novel yang diakui oleh pengarangnya sebagai “terapan *nouveau roman* yang kelewat berani” atau sebagai “gejolak novel subyektif arus kesadaran baru, seperti Sartre, Camus, dan Robbe-Grillet”. Novel Iwan telah memutuskan hubungan dengan tradisi bercerita yang terdapat dalam novel-novel sebelumnya. Jadi, secara sadar dan sengaja, di dalam novel-novelnya Iwan menerapkan atau mengadopsi teknik naratif novel Barat, tercerabut dari teknik naratif keindonesiaan atau kenusantaraan. Menyadari hal tersebut, lahirnya novel-novel kearifan lokal dapat dipahami sebagai reaksi terhadap novel-novel Iwan yang tidak memiliki kepekaan dan kebanggaan jati diri nasional.[9][11]

Mengkonstruksi Konvensi Naratif Novel Kearifan Lokal

Bagaimanakah strategi yang tepat, adil, dan obyektif mengapresiasi novel kearifan lokal? Apresiasi tidak cukup berbekal teori naratif yang bersifat umum. Secara general, setiap karya naratif memiliki 3 (tiga) unsur struktur, “*plot, characterization, setting*” [3]. Namun, rincian dan spesifikasi setiap unsur itu sangatlah beragam sesuai dengan konvensi pada setiap sub-genre. Konvensi alur, karakterisasi, latar yang berlaku pada novel detektif, novel sosial, novel psikologis, novel keluarga bersifat spesifik dan tipikal. Pemahaman tentang konvensi yang khas inilah yang sering diabaikan

apresiator. Pentingnya memahami konvensi ini ditegaskan oleh Teeuw bahwa faktor-faktor yang ikut menentukan karya sastra sebagai gejala semiotik adalah konvensi bahasa dan konvensi sastra [6]. Sementara itu, Culler menegaskan, pembaca sastra harus memiliki kompetensi kesastraan yang memadai, yakni, “*a set of conventions for reading literary texts.*” [14]

Mengabaikan pentingnya konvensi kesastraan yang spesifik dan tipikal dalam aktivitas membaca sastra (termasuk novel) dapat berakibat fatal dan tragis. Novel *Para Priyayi*, yang termasuk novel mutakhir Umar Kayam misalnya, telah diperlakukan secara tidak adil dan tidak obyektif, karena pembaca hanya mengacu pada prinsip, kategori, kriteria novel Barat dan mengabaikan keberadaan novel tersebut sebagai novel kearifan lokal yang memiliki konvensi kesastraan yang spesifik dan tipikal. Ignas Kleden melihat novel mutakhir Umar Kayam “cenderung bergerak ke arah yang semakin sosiologis, tipologis, sebuah kecenderungan yang dianggapnya mengarah kepada kegagalan sebuah karya sastra.” Atau, Faruk secara pribadi “merasakan pula adanya kemunduran karya-karya Pak Umar Kayam mutakhir dibandingkan dengan karya-karyanya yang terdahulu.” [15]

Pembacaan yang lebih adil dan obyektif terhadap novel *Para Priyayi* tampak pada pembacaan Budi Darma sebagaimana dinyatakan berikut ini. “Sebagai novel yang lahir karena kepedulian, dengan sendirinya *Para Priyayi* membawa aspirasi. Acuan aspirasi adalah kekokohan jati diri. Salah satu cara untuk mengkokohkan jati diri adalah melihat ke masa lampau, melakukan penilaian kembali terhadap nilai-nilai lama, kekuatannya, dan kelemahan-kelemahannya” “Novel yang berbobot dengan sendirinya akan mengungkapkan jati diri, langsung atau tidak.” [16] Dua hasil pembacaan yang bertolak belakang atas novel yang sama. Budi Darma di satu pihak dan di pihak lain Ignas Kleden dan Faruk. Hal ini disebabkan, Budi Darma bersikap terbuka mengapresiasi konvensi-konvensi yang spesifik pada *Para Priyayi* sebagai kekuatan novel ini. Sementara Kleden dan Faruk menerapkan standar dan kriteria konvensi naratif Barat.

Dalam artikel ini, karena berbagai keterbatasan yang ada, novel kearifan lokal yang akan dianalisis hanya 4 (empat) novel: *Pasar*,

Para Priyayi, Ibu Sinder, Pengakuan Pariyem. Pembacaan terhadap 4 (empat) novel ini dilakukan dengan memperhatikan pembacaan fenomenologis, analisis intrinsik, ekstrinsik, dan historis secara simultan. Pembacaan fenomenologis atau pembacaan interpretatif untuk menafsirkan dan menemukan fenomena literer yang sebenarnya, terjadi proses dialogis antara subyek dan obyek atau antara pembaca dan karya sastra. Analisis intrinsik dilakukan terhadap unsur formal yang secara langsung membentuk struktur naratif, yakni unsur latar, tokoh, dan alur. Analisis ekstrinsik dilakukan terhadap semua faktor relevan yang ada di dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap novel, seperti konvensi sastra, konvensi bahasa, semesta, dan nilai-nilai [6].

Analisis historis dilakukan terhadap segala hal yang berkenaan dengan sejarah perkembangan penciptaan naratif sastra Indonesia. Dengan pembacaan fenomenologis, analisis intrinsik, ekstrinsik, dan historis secara simultan dihasilkan konvensi naratif novel kearifan lokal yang menampak secara berturut-turut berupa fenomena naratif literer meliputi 6 (enam) unsur novel dengan spesifikasi yang tipikal. Keenamnya adalah: pengarang, bahasa, latar, tokoh, peristiwa dan gagasan dengan cirinya yang khas.

Pertama, pengarang. Sebelum membaca karya sastra, pertama kali yang menampak adalah nama pengarangnya. Hal ini analog dengan sebelum menyaksikan pentas wayang kulit, hal pertama yang diketahui oleh penonton adalah dalangnya. Di dalam teks novel, pengarang adalah narator, orang yang berkisah. Posisi pengarang di dalam novel dapat di mana saja sesuai dengan yang diinginkan: terlibat di dalam cerita, di luar cerita, menjadi tokoh, tidak menjadi tokoh, dsb. Di dalam novel, pengarang menjadi narator yang mengisahkan cerita dari awal hingga akhir. Posisi narator bebas berada dalam cerita.

Narator di dalam novel *Para Priyayi* (selanjutnya disingkat **PRI**) menempati posisi tokoh, karena seluruh novel **PRI** dikisahkan oleh sekian banyak tokoh, bukan hanya seorang tokoh. Episode “Lantip” dikisahkan oleh tokoh Lantip; episode “Hardojo” dikisahkan oleh tokoh Hardojo; episode “Sastrodarsono” dikisahkan oleh tokoh Sastrodarsono; episode “Nugroho” dikisahkan oleh tokoh Nugroho,

dsb. Di dalam novel *Pasar* (selanjutnya disingkat **PAS**) narator berada di luar cerita, seakan-akan narator berada di tengah-tengah para pembaca, menyapa pembaca dengan kata ganti persona kedua “**engkau**” atau dengan menggunakan kalimat perintah.

- (1) Kalau **engkau** terpelajar, dan tinggal di kota kecamatan itu, **berhubunganlah** dengan Pak Mantri Pasar (p.1)[17]
- (2) Kalau **engkau** menghitung, burung-burung dara yang berkeliaran masih jauh lebih banyak dari pada orang-orang itu (p.2)[17]
- (3) **Tunggulah** duduk perkaranya! (p.3)[17]

Dalam novel *Ibu Sinder* (selanjutnya disingkat **SIN**), narator berada di luar cerita. Dalam novel *Pengakuan Pariyem* (selanjutnya disingkat **PAR**) narator adalah tokohnya sendiri, dalam hal ini tokoh Pariyem. Yang menjadi pertanyaan, mengapa narator dalam novel kearifan lokal adalah tokoh? Salah satu jawaban berasal dari ajaran etika Jawa, bahwa orang tidak boleh menggunjing orang lain, apalagi membicarakan kejelekan-kejelekannya, itu perbuatan yang sangat tercela. Hal ini seperti diungkapkan tokoh Pariyem, “Dan *ngrasani* jelek-jelek salah seorang undangan sangat tercela.” [18]

Dalam mengkaji novel-novel kearifan lokal, membahas kedudukan pengarang di dalam cerita tidaklah signifikan. Hal yang lebih penting adalah memahami pengarangnya. Dalam tradisi kesastraan di Jawa, ada konvensi mengapresiasi sastra bersifat kepujanggaan, artinya kualitas sastra dikaitkan dengan kemasyhuran dan reputasi sang pujangga. Sastra yang berisi ramalan (*jangka*) dari Jayabaya dan Ronggowarsito diapresiasi kebesarannya. Sastra yang berisi ajaran etika (*wedha*) dari Mangkunegara IV atau Pakubuwono IV diapresiasi keunggulannya. Sastra kidung yang berisi ajaran ketuhanan (*mistik*) dari wali sanga diapresiasi kesakralan dan daya magisnya. Dengan kata lain, sastra tidak dapat dipisahkan dari pengarangnya, sebagaimana orang tidak dapat memisahkan antara pentas wayang kulit dan dalangnya. Sebelum menonton wayang kulit, orang sudah bertanya siapa dalangnya, untuk menentukan sikapnya apakah akan menonton pentas atau lebih baik tinggal di rumah.

Kearifan lokal Jawa mengajarkan, syarat bagi pujangga harus memiliki 8 (delapan) *kalimpadan*, *mumpuni ing kawruh*, memiliki, menguasai, pandai segala ilmu: (1) *paramengsastra* (ahli dalam bahasa dan sastra); (2) *paramengkawi* (ahli dalam bidang karang-mengarang); (3) *awi carita* (pandai bercerita yang mengasyikkan); (4) *mardawa lagu* (ahli dalam bidang tembang dan *gendhing*); (5) *mardawa basa* (mahir memakai bahasa yang indah sehingga mempengaruhi emosi pembacanya); (6) *mandraguna* (mahir dalam hal kesenian); (7) *nawung kridha* (halus perasaannya sehingga dapat memahami keinginan dan gerak batin orang lain); (8) *sambegana* (hidupnya terpuji). Jika delapan syarat tadi terpenuhi, maka seorang pujangga akan memiliki kelebihan dapat mendengar *akacawakya* atau *akacacabda*, suara dari langit, sabda Tuhan tentang kejadian atau peristiwa yang masih rahasia, sehingga pujanga dapat menulis ramalan tentang hal yang bakal terjadi di masa mendatang [19].

Apabila gagasan tentang pujangga di atas diadopsi dan diadaptasi dalam kegiatan mengkaji novel kearifan lokal, maka pembahasan unsur pengarang ditujukan kepada kejauharian pengarang, seberapa luas dan mendalam pengetahuan dan pengalaman hidup pengarang, mencakup bidang filsafat, ilmu, teknologi, kebudayaan, kesenian yang tercermin dalam karya sastranya atau dari dokumen riwayat hidupnya. Pemahaman tentang kejauharian pengarang ini dapat membantu pembaca dalam mengapresiasi hasil karya sastra seorang pengarang secara lebih tepat.

Dalam novel **PRI**, kejauharian Umar Kayam pada pengetahuan yang luas dan mendalam perihal proses transformasi budaya di Indonesia, mulai dari akhir abad ke-19 hingga dekade-dekade akhir abad ke-20. Dalam novel **PAR**, kejauharian Linus Suryadi pada pengetahuannya yang mendalam tentang falsafah hidup, sikap hidup, adat istiadat, nilai etika dan moral yang berlaku pada kalangan priyayi dan *wong cilik* yang diamalkan secara sadar dan ikhlas sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Dalam novel **SIN**, kejauharian Pandir Kelana pada pengetahuannya yang mendalam tentang gambaran kehidupan dan sikap hidup keluarga priyayi menghadapi perkembangan zaman, dari zaman pendudukan Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan serta detil-detil

kehidupan sosial komunitas prostitusi di Yogyakarta dalam perkembangan zaman. Dalam novel **PAS**, kejauhan Kuntowijoyo pada kontras kehidupan masyarakat priyayi dan *wong cilik* dengan segala latar belakang budaya, gagasan, dan nilainya.

Hal *kedua* yang perlu dikaji adalah reputasi pengarang yang menjadi identitasnya. Reputasi Joyoboyo pada ramalannya. Reputasi Ronggowarsito pada lukisan zaman edannya. Reputasi Mangkunegoro IV pada ajaran etikanya. Reputasi Umar Kayam pada observasinya yang tajam dan akurat dalam menggambarkan model kehidupan keluarga sebagai akibat dari proses transformasi budaya dan pengaruh situasi kehidupan politik serta antisipasinya pada kehidupan yang akan datang. Reputasi Linus Suryadi pada karya prosa liriknya. Reputasi Pandir Kelana pada lukisan kehidupan dengan latar belakang sejarah. Reputasi Kuntowijoyo pada lukisan kehidupan yang menyiratkan, merefleksikan, dan merepresentasikan gagasan dan pemikirannya yang cerdas dan besar. Demikianlah, kajian terhadap unsur pengarang difokuskan pada: (a) kejauhan pengarang; (b) reputasi pengarang.

Kedua, bahasa. Unsur kedua yang muncul pada saat membaca novel adalah bahasa. Pengetahuan kesastraan kearifan lokal Jawa mengajarkan bahwa dalam membicarakan karya sastra, perlu dipahami adanya dua jenis bahasa, bahasa keseharian (*basa lumrah*) dan bahasa indah (*basa endah*) (p.15)[19]. Bahasa keseharian adalah bahasa yang hidup, realistis, kontekstual, langsung. Bahasa indah adalah bahasa yang dipercantik dan diolah dengan memperhatikan kaidah-kaidah seni bahasa dalam menggunakan kosa kata, menyusun kalimat, maupun makna konotatif atau simbolik yang dihasilkannya sehingga mengesankan. Penggunaan bahasa keseharian dan bahasa indah dalam sastra ini analog dengan bahasa dalam pentas wayang kulit. Bahasa nyanyian dalang (*suluk*), bahasa deskripsi (*janturan*), bahasa kisah (*cariyos*), dialog dalam tembok istana lazimnya menggunakan bahasa indah. Tetapi, bahasa adegan pembantu raja (tokoh Cangik dan Limbok), bahasa adegan abdi satriya (tokoh Semar, Gareng, Petruk, Bagong), bahasa raksasa, bahasa menantang perang, lazimnya menggunakan bahasa keseharian.

Dalam novel-novel kearifan lokal, bahasa keseharian tampak dalam dialog yang realistis dan hidup di dalam masyarakat,

penggunaan ekspresi dan ungkapan yang spesifik dan kontekstual sesuai dengan latar belakang komunitas atau kelompok masyarakat.

(1) Lha ini lho, *Kakang* Atmokasan, putri *panjenengan* pun *genduk* Siti Aisah. *Tole* Darsono. ya ini adikmu Siti Aisah. *Sama dikenalkan saja, ya?* *Kakang* Atmokasan, *moso borong*, terserah *panjenengan*, ya ini putri *panjenengan* yang masih bodoh. Sekolah juga cuma tamat sekolah desa ditambah satu tahun *ngenger* Ndoro Nyonyah Administratur pabrik gula Balong. Sedikit-sedikit bisa bahasa Belanda *een, twee, drie*. Tapi oh, dia masih bodoh, masih bodoh (p.42)[20]

(2) Maaf *Ngger*, aku pernah menanyakan tentang bakal perjalanan hidupmu di kelak kemudian hari kepada seorang tua. Kehidupanmu akan penuh suka, tapi juga tidak luput dari duka (p.27)[21]

(3) Kasan Ngali melotot. “Apa katamu! Mau membela. Kerugian uang tidak ada. Ini menghina. Tidak sudi makan tidak apa, tetapi jangan dibuang macam itu. Perempuan jalang! Lonte!”(p.214)[17]

(4) Ya, ya., Raden Bagus Ario Atmojo namanya Betapa bikin *kesengsem* banyak *wanodya* Lha, *bagaimana tidak?* Dia punya *katuranggan* Raden Gatutkaca. Gantheng tapi lembut. *Kalem* tapi pun *sembada* (pp.34-35)[18]

Sementara itu, bahasa indah terdapat pada penggunaan bahasa figuratif atau juga penggunaan ungkapan yang memiliki gagasan dan nilai kearifan lokal.

(1) *Wanagalih* adalah sebuah ibu kota kabupaten (p.1)[20]

(2) Itu yang Pakde ingin dapat. Wahyu kekuasaan untuk *memayu hayuning bawana*, untuk terus mengusahakan keselamatan jagad (p.6)[20]

(3) Tentang *sangkan paran ing dumadi*, dari mana kita datang dan hendak kemana kita ini menuju (p.85)[20]

(4) Pak Mantri sampai lama memutar kepala ke kanan, ke kiri. Dan dari mulutnya timbul penyesalan kepada orang itu. “Jo, biarlah. *Wani ngalah dhuwur wekasane*. Ingatlah itu!. Sekarang kita kalah, belum berarti besok kita kalah juga. Sebab, *salah*

seleh, siapa bersalah, akan menyerah kalah. Percayalah!
(p.151)[17]

Pada kutipan (1) di atas, kata *Wanagalih* adalah sebuah *wangsalan*, sebuah jenis bahasa figuratif berupa teka-teki yang maknanya diisyaratkan sesuai dengan bunyi bahasa yang ada. Kalimat "*Jenang gula, aja lali marang aku*" (*Jenang gula, jangan lupa kepada saya*) adalah kalimat yang menggunakan figurasi bahasa *wangsalan*. Dalam ungkapan biasa, kalimat tersebut berbunyi "*Aja lali marang aku*" (*Jangan lupa kepada saya*). Untuk menghasilkan bahasa yang indah, ditambah dengan kata *jenang gula* (*jenang gula*), menjadi "*Jenang gula, aja lali marang aku*" Penjelasannya sebagai berikut: *jenang gula* bernama *glali*. Kata *glali* mengisyaratkan kata *lali* (*lupa*), karena kata *glali* dan *lali* memiliki kesamaan suku kata berbunyi *li*. Kata *wanagalih* adalah sebuah figurasi bahasa *wangsalan*. Penjelasannya sebagai berikut. Kata *wana* berarti hutan; kata *galih* berarti bagian tengah atau inti kayu. Inti dari hutan adalah *wit-witan* (*pepohonan*), artinya tanpa pepohonan (*wit-witan*) maka hutan (*wana*) tidak ada. Jadi, jawaban atas kata *wanagalih* adalah *wit-witan*, dan kata ini mengisyaratkan kata *Ngawi*, sebuah kota kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan dengan kota *Sragen* di Jawa Tengah. Contoh penggunaan bahasa keseharian dan bahasa indah (*figuratif*) ini masih dapat diperbanyak.

Tampak istimewa adalah bahasa dalam novel **PAR** yang diakui *Linus Suryadi* sebagai novel prosa lirik. Mengapa hal itu dilakukan pengarang? Salah satu jawaban adalah bahwa dalam sejarah kesusastraan Jawa, sebagian besar pustaka karya sastra Jawa ditulis dalam bentuk puisi (*tembang*), dan jarang karya sastra ditulis dalam bahasa prosa (*gancaran*). Kesusasteraan identik dengan karya puisi. Menurut pandangan kearifan lokal Jawa, karya *gancaran* tidak termasuk dalam kesusasteraan, betapa pun indahny kitab itu ditulis. Kesusasteraan Jawa dalam bentuk prosa baru ditulis oleh *Ronggowarsito* setelah mendapat pengetahuan dari para sarjana Belanda (pp.9,10)[22]

Sebagai sebuah novel prosa lirik, bahasa novel **PAR** banyak menggunakan gaya bahasa repetisi sehingga menimbulkan efek ritmis dan euphonis.

(1) Ya, ya., Pariyem saya
Maria Magdalena Pariyem lengkapnya
“Iyem” panggilan sehari-harinya
dari Wonosari Gunung Kidul
Sebagai babu nDoro Kanjeng Cokro Sentono
Di nDalem Suryamentaraman Ngayogyakarta
Priyagung asli-tulen seratus persen
dari dalam kraton Mataram Ngayogyakarta (pp.30-31)[18]

Demikianlah, kajian terhadap unsur bahasa dalam novel kearifan lokal difokuskan pada penggunaan (a) bahasa keseharian; (b) bahasa indah.

Ketiga, latar merupakan unsur yang muncul dalam membaca novel kearifan lokal adalah latar. Hal ini tampak pada episode I novel **PRI** berjudul “Wanagalih,” episode I novel **SIN** berjudul “Warung Climen,” kalimat pertama novel **PAR** berbunyi, “Pariyem nama saya, lahir di Wonosari Gunung Kidul pulau Jawa. Tapi kerja di kota pedalaman Ngayogyakarta” Pada novel **PAS**, meskipun episode I berupa angka (juga episode-episode berikutnya), namun judul novel itu (*Pasar*) sudah menunjukkan tempat.

Latar adalah tempat, waktu, zaman, situasi, suasana, kejiwaan di dunia kehidupan tokoh. Latar dapat bersifat geografis, fisikal, spasial, temporal, historis, sosial, kultural. Dalam sastra, latar berfungsi struktural dan simbolik, mengungkapkan dan memperkaya makna yang tersirat. Mengapa dalam novel kearifan lokal, unsur latar menjadi judul episode I atau judul novel? Pemikiran kearifan lokal Jawa menyatakan, bahwa kehidupan manusia sepenuhnya terletak dan berada di dalam lingkungan. Untuk itu, perlu menjaga keteraturan kehidupan lingkungan. Keteraturan itu merupakan refleksi dari konsep sistem kepercayaan Jawa, bahwa kehidupan yang terkoordinasikan antara manusia dan alam sekitarnya merupakan sistem kehidupan yang didambakan. Dalam pengertian simbolis, kesatuan atau

koordinasi ini dipahami sebagai hubungan harmonis antara *jagad gedhe* (makrokosmos, alam semesta) dan *jagad cilik* (mikrokosmos, manusia) (pp.8,9)[23]. Apabila hubungan harmonis antara alam semesta dan manusia telah tercipta, alam akan memberikan *ngalamat*, peringatan simbolik bagi manusia tentang peristiwa atau bencana yang bakal terjadi agar manusia selamat dan terhindar dari bahaya. Munculnya unsur latar sebelum unsur tokoh dalam mengapresiasi novel kearifan lokal, dijelaskan berikut ini.

Dalam mitos di Jawa, dikisahkan bahwa pada waktu Pulau Jawa belum bernama Jawa, pulau tersebut masih menjadi satu dengan Pulau Sumatra, Madura, dan Bali. Pada waktu itu, Pulau Jawa masih sepi belum dihuni manusia [24]. Dalam pandangan filsafat kejawaan, gambaran bahwa alam semesta sudah terbabar terlebih dahulu sebelum adanya manusia, ditunjukkan dalam pentas wayang kulit. Pada mulanya adalah suasana *awang-uwung*, suasana hampa, sunyi-sepi tidak ada ciptaan apapun, yang dalam pentas wayang kulit diwujudkan berupa *geber* (layar putih). Kemudian, tercipta alam fisik, yang dalam pentas diwujudkan berupa wayang *gunungan* (gunung). *Gunungan* menggambarkan terciptanya alam semesta atau makrokosmos atau hal-hal yang bersifat keduniawian [25]. Hubungan antara makrokosmos (alam semesta) dan mikrokosmos (manusia) sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Unsur utama makrokosmos berupa udara, api, air, dan tanah terdapat pada fisik manusia berupa nafas, panas tubuh, zat cair dalam tubuh, dan badan manusia. Bahkan, unsur fisik juga berpengaruh pada psikologi dan karakter manusia.

Jika, pemikiran kearifan lokal tentang *jagad gedhe* dan *jagad cilik* serta hubungan antara dua *jagad* itu diadopsi dan diadaptasi dalam mengkaji unsur latar dalam novel kearifan lokal, terdapat 2 (dua) jenis latar: latar luar dan latar dalam. Latar luar adalah dunia (*jagad*) di luar lingkungan hidup manusia, seperti latar alam, latar fisik, latar waktu, latar sosial, latar budaya, latar sejarah. Latar dalam adalah dunia (*jagad*) di dalam lingkungan hidup rumah tangga, seperti ruangan, situasi dan suasana kehidupan keluarga. Di antara latar luar dan latar dalam terdapat hubungan fungsional dan makna. Dalam novel **PRI**, latar luar adalah zaman pendudukan Belanda, pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, peristiwa sejarah G30S/PKI, budaya

masyarakat Wanagalih dan sekitarnya, situasi kehidupan fisik dan spiritual masyarakat Wanagalih, gambaran kehidupan masyarakat kota metropolitan Jakarta, Sunnybrook (Amerika) dsb. Latar dalam adalah situasi dan suasana kehidupan rumah tangga Sastrodarsono, anak-anak dan cucu-cucu Sastrodarsono. Dalam novel **PAS**, latar luar adalah situasi dan suasana kehidupan masyarakat di sekitar pasar Gemolong. Latar dalam adalah rumah, budaya kehidupan rumah tangga Pak Mantri (budaya priyayi) dan Kasan Ngali (budaya wong cilik). Dalam novel **PAR**, latar luar adalah lingkungan fisik, kehidupan sosial-budaya kota Yogyakarta, pranata sosial-budaya keluarga bangsawan, Wonosari (Gunung Kidul). Latar dalam adalah rumah, situasi, suasana, psikologi keluarga nDoro Kanjeng Cokro Sentono. Dalam novel **SIN**, latar luar adalah zaman pendudukan Belanda, pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, lingkungan masyarakat pabrik gula Madugondo. Latar dalam adalah situasi dan suasana kehidupan rumah tangga Ibu Sinder. Kuatnya hubungan antara latar luar dan latar dalam tampak dalam penggambaran novel **PAR, PAS, PRI, SIN** dipengaruhi oleh situasi sejarah dan budaya masyarakatnya.

Keempat yaitu tokoh. Unsur keempat yang muncul dalam novel kearifan lokal adalah tokoh. Hal ini tampak pada episode II dalam novel **PRI** yang berjudul “Lantip”. Episode II dalam novel **PAS** dimulai dengan kalimat, “SITI ZAITUN tidak terlalu bodoh sebenarnya...” Episode III novel **SIN** berjudul “Jenar Cebol Kepalang” artinya orang Jepang yang kulitnya kuning (*jenar*), tubuhnya pendek (*cebol*) yang gagal menjajah (*kepalang*). Tokoh adalah pelaku yang hidup dan melakukan aktivitas dalam novel. Tokoh dalam novel kearifan lokal dapat diapresiasi berdasarkan watak dan peranannya dalam kehidupan.

Watak tokoh dalam kearifan lokal Jawa terdapat pengetahuan tentang karakter orang yang disebut ilmu *katuranggan*. Kata *katuranggan* berasal dari kata *turangga* (kuda) berarti ilmu untuk mengetahui watak kuda. Pengetahuan ini meluas untuk mengetahui watak wanita sehingga ada ilmu *katurangganing* wanita dengan memperhatikan ciri-ciri fisiknya: kepala, rambut, dahi, hidung, telinga, mata, bibir, leher, warna kulit, paha, betis, jari, caranya berjalan, dsb. Sekarang, ilmu itu juga berkembang untuk mengetahui watak

seseorang. Watak atau karakter seseorang tidak terlepas dari pengaruh unsur *jagad gedhe* (makrokosmos) terhadap *jagad cilik* (mikrokosmos) atau unsur alam semesta terhadap unsur tubuh manusia.

Penjelasan hubungan antara unsur alam dan watak manusia sebagai berikut. Pemahaman watak manusia dimulai dari unsur alam semesta (makrokosmos): udara, api, air, tanah. Unsur makrokosmos ini sinkron dengan unsur mikrokosmos (tubuh manusia): nafas, panas/suhu tubuh, darah/cairan tubuh, badan fisik. Alam semesta memiliki 4 (empat) warna pokok yang sinkron dengan 4 (empat) unsur makrokosmos dan 4 (empat) unsur mikrokosmos: putih, merah, kuning, hitam. Selanjutnya ada 4 (empat) watak dasar manusia: halus, kuat, lembut, keras. Empat watak dasar ini dapat muncul secara murni atau berupa kombinasi dari watak dasar.

Unsur Makrokosmos /Alam Semesta	Unsur Mikrokosmos /Tubuh	Warna Alam	Potensi Watak
Udara	Nafas	Putih	Halus
Api	Panas tubuh	Merah	Kuat
Air	Cairan tubuh	Kuning	Lembut
Tanah	Badan	Hitam	Keras

Eratnya hubungan antara unsur alam dan unsur tubuh manusia tampak dalam kenyataan, jika salah satu atau semua unsur tubuh tidak menjaga hubungan harmonis dengan alam, maka tubuh akan sakit, dan jika salah satu atau semua unsur tubuh kembali ke asalnya atau kembali ke alam, maka tubuh akan mengalami kematian. Dengan mengacu pada hubungan antara unsur makrokosmos dan mikrokosmos, maka watak manusia ada 4 (empat) jenis. Sebagaimana disebutkan pada tabel, watak itu baru merupakan potensi. Bagaimana watak tumbuh dan berkembang, sangat tergantung pada proses pendidikan (informal, formal) dan pengaruh lingkungan (keluarga, masyarakat). Potensi watak halus jika dididik secara salah atau hidup dalam lingkungan keluarga/masyarakat yang jelek, bisa tumbuh menjadi watak yang tidak halus.

Potensi watak halus, memiliki kecenderungan sikap jujur, bersih, pintar, cerdas, menyukai hidup suci, menghindari perilaku dosa, lebih tertarik pada ilmu pengetahuan atau hal-hal yang bersifat spiritual, dan tidak suka dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Jika dididik atau hidup dalam lingkungan yang baik, akan tumbuh sebagai pribadi yang berakhlakul karimah. Tetapi jika salah ditangani, kehalusannya akan menjerumuskan ke hal-hal negatif, seperti menipu, acuh tak acuh terhadap lingkungan masyarakat, membanggakan kepintarannya (*adiguna*). Potensi watak kuat memiliki kecenderungan karakter kuat pikiran dan pendirian. Potensi ini cenderung ingin dominan, menjadi pemimpin yang berkuasa. Jika ditangani secara benar, potensi ini menjadi pribadi yang kuat, teguh pendirian, menjadi pemimpin yang ideal. Jika pendidikan atau lingkungannya salah, potensi ini menjadikan sifat ingin menang sendiri, preman, haus kekuasaan, membanggakan kekuatannya (*adigang*).

Potensi watak lembut memiliki kecenderungan sikap kasih sayang, lembut tutur kata dan sikapnya, mencintai keindahan, menjadi seniman, hangat dalam persahabatan. Tetapi jika dididik dan hidup dalam lingkungan salah, akan tumbuh menjadi watak hedonis, mencari kenikmatan hidup duniawi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah moral, membanggakan kecantikan/ketampanan dirinya (*adidhiri*). Potensi watak keras memiliki kecenderungan sifat kerja keras, giat berusaha, pecandu kerja (*workaholic*), ulet, banyak inisiatif, suka pada tugas yang menantang. Jika mendapat pendidikan dan lingkungan yang jelek, tumbuh menjadi pemalas, berwatak serakah, materialistis, dan membanggakan kekayaannya (*adigung*).

Keempat watak dasar ini tidak selalu tampak jelas dan ekstrim. Ada kemungkinan terjadi kombinasi watak, seperti warna juga dapat bercampur, hitam dan merah, kuning dan hitam, dsb. Maka akan terjadi kombinasi watak, misalnya halus dan keras, halus dan kuat, halus dan lembut, keras dan kuat, keras dan lembut, dsb. Dalam novel **PAR**, tokoh Pariyem berwatak lembut, tetapi juga pekerja keras. Dalam pergaulan dia menyenangkan, maka dia disayang oleh keluarga nDoro Kanjeng Cokro Sentono. Kelembutannya menjadikan banyak lelaki terpikat, termasuk Raden Bagus Ario Atmojo, anak bendornya. Tatkala dihamili Raden Bagus Ario Atmojo, Pariyem bersikap lembut,

menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Dalam novel **PAS**, Kasan Ngali berwatak keras dan kuat. Dia menyombongkan kekayaan hartanya dan ingin menguasai banyak wanita, juga kepada Zaitun, gadis pegawai Bank Pasar. Sementara itu, Pak Mantri Pasar berwatak kuat tetapi juga lembut. Sebagai mantri pasar dia memiliki kekuasaan tunggal, tetapi dia juga santun, dan dengan ikhlas menjadikan Paijo (tukang sapu pasar) sebagai penggantinya jika dia sudah pensiun. Karena wataknya yang lembut dan halus, dia tidak pernah membuka konflik fisik dengan Kasan Ngali, musuh satu-satunya dalam hidupnya.

Konfliknya ditransformasi menjadi konflik psikis. Dalam novel **PRI**, Sastrodarsono berwatak halus, lembut, dan keras. Dia sadar akan dirinya sebagai priyayi yang harus berperilaku halus dan lembut merepresentasikan budaya halus keraton. Tetapi, dia juga pekerja keras karena warisan budaya orang tuanya sebagai petani, sehingga selain menjadi guru dia juga bertani. Kelembutan Sastrodarsono tampak pada sikapnya yang menaruh belas kasih kepada Wage (kemudian diberi nama Lantip), mendidiknya, sehingga Lantip menjadi lelaki yang berhasil secara akademik dan status sosial, meskipun ayah Lantip seorang *bromocorah*. Dalam novel **SIN**, ibu Sinder berwatak lembut, tetapi juga pekerja keras, terutama setelah ditinggal mati sinder Suprpto (suaminya). Kelembutannya pula yang menjadikan dia dapat hidup dan bergaul secara harmonis di kampung Gandekan di tengah-tengah komunitas PSK yang kasar dan tak mengenal kaidah-kaidah etika dan moral. Demikianlah, berdasarkan pengetahuan kearifan lokal, watak tokoh dalam novel dibedakan menjadi 4 (empat) jenis watak utama: halus, kuat, lembut, dan keras. Namun dalam kenyataannya, terjadi kombinasi dua atau tiga di antaranya. Demikianlah, analisis watak tokoh menurut teori naratif Barat seperti watak bulat atau datar, watak kompleks atau simpel menjadi tidak signifikan.

Kelima, peranan tokoh. Pengetahuan kearifan lokal Jawa mengajarkan, setiap orang memiliki peranan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Penggambaran peranan tersebut dalam kehidupan secara jelas tampak dalam dunia wayang kulit. Ada sejumlah jenis tokoh: dewa, bidadari, pendeta, raja, ksatria, panakawan, emban, raksasa, laskar seberang, pujangga. Setiap jenis

tokoh itu menyanggah peranan tertentu sebagai: pelindung, penggoda, penasihat, pelestari, pembela, pengawal, pengabdian, penguji, pesaing, pemikir. Itulah peranan makhluk hidup untuk mengisi kompleksnya kehidupan masyarakat dan alam semesta. Dengan demikian, analisis jenis tokoh menjadi tokoh utama atau bawahan, protagonis atau antagonis, seperti yang ada pada teori naratif Barat tidaklah tepat. Alasannya, setiap tokoh memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan, agar kehidupan menjadi laras dan seimbang. Isi kehidupan tidak dapat dipahami sebagai utama atau bawahan, protagonis atau antagonis. Raja tidak dapat dipahami lebih utama dari pada ksatria, sebab jika tidak ada ksatria raja tidak dapat menjadi penguasa. Raksasa tidak dapat dipahami sebagai antagonis, sebab jika tidak ada raksasa ksatria tidak dapat menguji kesaktiannya.

Dalam novel **PAR**, tokoh nDoro Kanjeng Cokro Sentono dengan isteri dan dua orang anaknya berperanan sebagai pelestari dunia keraton Mataram Ngayogyakarta. Tokoh Pariyem berperanan sebagai pengabdian yang melayani dan menyediakan segala keperluan majikannya. Bahkan, dalam melayani majikannya Pariyem juga melayani kebutuhan seksual Raden Bagus Ario Atmojo. Kejadian itu dihayati oleh Pariyem sebagai salah satu bentuk pengabdian yang tulus. Peristiwa yang dialami Pariyem bukanlah suatu aib, tetapi justru menegaskan adanya lembaga selir. Sebagai pengejawantahan peranan melestarikan dunia keraton yang halus di luar tembok keraton, rumah tangga nDoro Kanjeng Cokro Sentono tidak pernah digoyang konflik. Semua permasalahan keluarga diselesaikan secara kelembagaan dan akal sehat, bukan dengan emosi dan kekerasan. Dalam novel **PAS**, tokoh Pak Mantri Pasar berperanan sebagai pelestari budaya halus, sementara Kasan Ngali adalah pesaing dengan budaya kasarnya. Kedua sistem budaya itu tidak dapat didamaikan.

Kehalusan Pak Mantri diisyaratkan oleh pakaian Pak Mantri yang serba putih-bersih, tindak tanduknya yang lembut dan santun. Kekasaran Kasan Ngali tampak dalam tutur katanya yang suka mengumpat, sikapnya yang keras dan emosional. Itulah sebabnya, dua tokoh yang bersaing itu tidak pernah dipertemukan secara frontal mulai dari awal hingga akhir novel **PAS**. Dalam novel **PRI**, tokoh Sastrodarsono dan isterinya berperanan sebagai pelestari budaya

tradisional priyayi yang halus dan memiliki komitmen tinggi pada nilai-nilai etika dan moral kepriyayian. Lantip yang ikut keluarga Sastrodarsono semula berperan sebagai pengabdian tetapi kemudian berperan sebagai pengawal untuk menyelesaikan persoalan yang rumit dalam keluarga tersebut. Mari (cucu Sastrodarsono yang menikah dengan Marijan dari lapisan *wong cilik*) dan Anna (cucu buyut Sastrodarsono yang hamil pranikah dengan anak Cina) berperan sebagai penguji keteguhan Sastrodarsono dan isterinya dalam melestarikan budaya kepriyayian. Endang Rahayu Prameswari (gundik Tommi) berperan sebagai pengoda.

Eko (cucu buyut Sastrodarsono yang menikah dengan Claire) berperan sebagai pesaing dengan budaya Amerika. Dalam novel **SIN**, tokoh Ibu Sinder berperan sebagai pelestari budaya ningrat dalam perubahan zaman: pendudukan Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan. Kesetiaan Ibu Sinder (yang sudah menjanda) pada suaminya tampak dalam penolakannya terhadap lamaran Darsosugondo seorang duda. Peranan tokoh tidak selalu tetap dalam keseluruhan naratif. Dalam wayang kulit, dewa yang berperan sebagai pelindung dapat berubah menjadi penguji. Dalam novel **PRI**, tokoh Lantip yang semula menjadi pengabdian dapat berubah menjadi pengawal. Dengan mengacu pada dunia wayang kulit, peranan tokoh dalam novel kearifan lokal dapat diapresiasi sebagai: pelindung, pengoda, penasihat, pelestari, pembela, pengawal, pengabdian, penguji, pesaing, pemikir.

Keenam, peristiwa. Unsur naratif berikutnya adalah peristiwa, yakni kejadian yang diakibatkan oleh aktivitas tokoh baik secara individual maupun dalam interaksinya dengan tokoh lain. Peristiwa ini bukan peristiwa sosial, peristiwa sejarah, atau peristiwa alam. Peristiwa dalam novel kearifan lokal difungsikan untuk menciptakan efek emotif dan penahanan alur.

Efek Emosi

Abrams menyatakan bahwa karya sastra dapat menciptakan 3 (tiga) efek pada audiens. Ketiga efek tersebut adalah "*aesthetic pleasure, instruction, or kinds of emotion*" (p.39)[5] Kearifan lokal Jawa mengajarkan, ada 4 (empat) macam emosi dalam hidup manusia yang

digambarkan lewat adegan emotif pagelaran wayang kulit. Keempat adegan tersebut adalah: adegan *greget*, *nges*, *sem* dan *banyol*. (p.222)[26]. Adegan *greget* = adegan menegangkan, adegan *nges* = adegan mengharukan, adegan *sem* = adegan romantis, adegan *banyol* = adegan humor. Sebagai contoh, adegan *greget* ada dalam adegan perang, adegan *nges* ada dalam adegan kematian, adegan *sem* ada dalam adegan percintaan, adegan *banyol* ada dalam adegan *panakawan*. Sebenarnya masih ada satu adegan dalam wayang kulit yang hanya dikisahkan dalang, dan tidak pernah digelarkan, yakni adegan pesta makan besar yang disebut *andrawina* atau *kembul bojana andrawina* sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan.

Dengan mengacu pada pemikiran di atas, ada 5 (lima) macam peristiwa emotif dalam novel kearifan lokal. Kelima peristiwa emotif tersebut adalah peristiwa menegangkan, peristiwa mengharukan, peristiwa romantis, peristiwa humor, peristiwa menyenangkan. Peristiwa menegangkan ada dalam pertikaian, konflik, kekerasan. Peristiwa mengharukan ada dalam kejadian yang merawankan hati, iba, kasihan, menyayat, mengesankan yang tak terduga, baik karena kejadian itu menyedihkan atau membahagiakan. Peristiwa romantis ada dalam percintaan atau kemesraan. Peristiwa humor ada dalam kejadian menggelikan, jenaka, lucu. Peristiwa menyenangkan ada dalam kejadian yang menggembirakan, melegakan, memuaskan, membahagiakan. Dalam novel **PRI**, peristiwa menegangkan terjadi tatkala Sastrodarsono bertikai dengan Tuan Sato (penguasa Jepang) gara-gara Sastrodarsono tidak mau *saikere kita ni muke*, membungkukkan badan untuk menghormat kaisar Jepang, dan Sastrodarsono ditempeleng Tuan Sato. Peristiwa mengharukan terjadi dalam kematian Ngadiyem (ibu Lantip) yang meninggal karena makan jamur beracun.

Peristiwa romantis terjadi dalam kemesraan Anna dan Boy di sebuah penginapan. Peristiwa humor terjadi tatkala di rumah Sastrodarsono, Sunandar akan memperkosa Paerah (pembantu Sastrodarsono) pada sore hari. Paerah menolak dan berteriak-teriak, dan Sunandar membuat alibi bahwa Paerah kesurupan sehingga menggegerkan seluruh keluarga. Peristiwa menyenangkan terjadi karena Sastrodarsono lulus dari pendidikan guru di Madiun dan dia

diangkat sebagai guru bantu SR.. Itulah awal keluarga petani Sastrodarsono naik menjadi keluarga priyayi (*priyayi alit*). Dalam novel **PAR** peristiwa mengharukan terjadi dalam “persidangan” kehamilan Pariyem. Keputusannya, Raden Bagus Ario Atmojo harus bertanggung jawab atas kehamilan Pariyem, dan bayi yang dikandung Pariyem nantinya akan menjadi anggota sah keluarga bangsawan nDoro Kanjeng Cokro Sentono.

Alur

Alur cerita merupakan penataan atau jalinan peristiwa-peristiwa yang dilakukan atau dialami tokoh dalam suatu urutan waktu. Peristiwa apa saja dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut dijalin menjadi sebuah cerita adalah bersumber pada pengalaman hidup manusia dalam interaksinya dengan diri sendiri, masyarakat, lingkungan, bahkan dengan Tuhannya dalam rentang waktu masa hidupnya. Kearifan lokal Jawa mengajarkan perjalanan hidup manusia terdiri atas 3 (tiga) masa utama: masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Dalam *pakem* pagelaran wayang kulit, ketiga masa itu dipentaskan dalam 3 (tiga) babak: babak I (pukul 21.00-24.00); babak II (pukul 24.00-03.00) dan babak III (pukul 03.00-06.00). Ketiga babak tersebut diisi dengan adegan, peristiwa, atau kisah yang telah dibakukan. Sebagai sebuah seni drama-teater yang penuh dengan konflik, Babak I diisi dengan adegan perang *ampyak* atau perang gagal yang diiringi *gamelan slendro pathet 6*.

Adegan ini melambangkan masa remaja yang berperang melawan berbagai rintangan dan gagal mencapai cita-cita. Babak II diisi dengan adegan *perang kembang*, perang seorang ksatria melawan tiga raksasa hutan: Buta Rambut Geni, Buta Terong, Buta Cakil yang diiringi *gamelan slendro pathet 9*. Adegan ini melambangkan masa dewasa dalam kehidupan manusia yang berperang melawan kecenderungan negatif nafsunya, yakni nafsu amarah (dilambangkan Buta Rambut Geni), nafsu supiyah (dilambangkan Buta Terong) dan nafsu aluamah (dilambangkan Buta Cakil). Babak III diisi dengan adegan *perang brubuh*, perang besar melawan musuh yang diiringi *gamelan slendro pathet manyuro*. Adegan ini melambangkan masa tua dalam kehidupan manusia yang

berperang melawan segala musuh untuk mencapai cita-cita dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran (pp.310-327)[25]

Ketiga babak dalam pentas wayang kulit tersebut jika merupakan jalinan alur cerita menghasilkan bagian awal (*wiwitan/purwa*), bagian tengah (*tengah/madya*), dan bagian akhir (*pungkasan/wasana*). Tiga bagian utama alur cerita ini merepresentasikan pemahaman tentang konsep waktu. Dalam kearifan lokal Jawa, konsep waktu dipahami bersifat siklis, yakni putaran yang tetap dan “teratur dalam periodisitas-periodisitas” (p.86)[27]. Konsep waktu siklis ini juga disebut “konsep tentang waktu berupa *cakra manggilingan* sesuai dengan hukum karma dalam ajaran Budha.” (p.126)[28]. Kata *cakra manggilingan* berarti roda yang berputar. Pemahaman waktu siklis berarti “tidak berpangkal pada suatu peristiwa historis tertentu” (p.125)[29]. Tiga bagian utama alur cerita ini (awal, tengah, akhir) merupakan “struktur umum alur” Menurut Sudjiman, bagian awal alur cerita berisi: paparan (*exposition*), rangsangan (*inciting moment*), gawatan (*rising action*); bagian tengah alur cerita berisi: tikaian (*conflict*), rumitian (*complication*), klimaks (*climax*); bagian akhir alur cerita berisi: leraian (*falling action*) dan selesaian (*denouement*) (p.30)[4]. Tentu saja, peristiwa yang terdapat pada setiap bagian alur cerita tidak selalu sama dengan apa yang dikemukakan Sudjiman atau dalam pentas wayang kulit.

Novel **PAR** hampir-hampir tidak mengenal konflik. Satu-satunya peristiwa yang menegangkan adalah pertemuan keluarga yang menyidangkan Raden Bagus Ario Atmojo karena menghamili Pariyem. Peristiwa menegangkan itu lebih tepat disebut sebagai sidang klarifikasi dari pada sebagai konflik. Bagian awal novel **PAR** berisi kisah kehidupan Pariyem di desa Wonosari - Gunung Kidul. Bagian tengah berisi kisah Pariyem menjadi pembantu nDoro Kanjeng Cokro Sentono di Yogyakarta. Peralihan bagian awal ke bagian tengah ditandai dengan perpindahan domisili Pariyem dari Wonosari ke Yogyakarta. Bagi akhir dimulai dari kisah Pariyem yang sedang hamil kembali ke Wonosari sampai dengan bayinya lahir. Perpindahan bagian tengah ke bagian akhir ialah sidang klarifikasi kehamilan Pariyem. Novel **PRI** juga tidak membangun konflik menuju klimaks.

Kearifan lokal Jawa mengajarkan, untuk menjaga keharmonisan hidup, jika terjadi konflik, apakah konflik pribadi, keluarga, atau masyarakat, harus diselesaikan dengan cara menghindar, sesuai dengan ungkapan kebijaksanaan hidup “*Ana catur mungkur*” Dalam novel **PRI**, tatkala terjadi pertengkaran suami isteri, Sumini dan Harjono, karena Harjono selingkuh dengan penyanyi keroncong, Sumini *mungkur* (menyingkir), meninggalkan rumahnya di Jakarta pergi ke orang tuanya, Sastrodarsono di Wanagalih. Beberapa hari kemudian, Harjono menyusul isterinya (Sumini) di Wanagalih, dan suami isteri itu berdamai kembali. Pertengkaran hebat terjadi dalam keluarga Tommi. Gara-garanya, Anna (anak Tommi) hamil pranikah dengan Boy (pemuda keturunan Cina). Rencana pernikahan keduanya ditolak Tommi, karena Tommi tidak akan merusak kemurnian trah priyayi Sastrodarsono dengan mengambil menantu pemuda keturunan Cina. Konflik hebat itu diakhiri dengan Tommi menyingkir (*mungkur*), pergi ke rumah Endang Rahayu Prameswari, janda kembang gundik Tommi. Demikianlah, konflik yang terjadi dalam novel **PRI** tidak pernah difungsikan untuk membangun alur mencapai klimaks.

Novel **SIN** juga tidak mengenal konflik dalam membangun alurnya. Bagian awal novel **SIN** mengisahkan masa remaja Ibu Sinder. Bagian tengah mengisahkan kehidupan Ibu Sinder yang menikah dengan sinder Suprpto sehingga mencapai kebahagiaan penuh. Bagian akhir mengisahkan Ibu Sinder sudah menjadi janda, menjalani nasibnya, hingga dia membuka warung “Climen” tidak jauh dari Pesanggrahan Ambarukmo Yogyakarta, sementara Suhono (anak tunggalnya) menetap di Belanda dengan Ivonne (isterinya). Bagian tengah novel **SIN** tidak diisi dengan rangkaian konflik untuk mencapai klimaks, tetapi berupa kebahagiaan penuh yang dialami Ibu Sinder dalam perjalanan hidupnya bersama suaminya (sinder Suprpto).

Novel **PAS** mengenal konflik, yakni konflik psikis, bukan konflik fisik antara Pak Mantri Pasar dan Kasan Ngali. Dua tokoh yang bersaing ini tidak pernah dipertemukan secara fisik-frontal hingga akhir novel. Oleh karena itu, novel **PAS** memiliki alur ganda. Alur I mengisahkan perjalanan hidup Pak Mantri Pasar dan alur II mengisahkan perjalanan hidup Kasan Ngali. Bagian awal alur I mengisahkan Pak Mantri Pasar

sebagai mantri di Pasar Gemolong dengan segala atribut dan gaya hidupnya. Bagian tengah mengisahkan ribut-ribut dan konflik horizontal berkenaan dengan ratusan burung dara piaraan Pak Mantri Pasar yang telah mengganggu sektor kehidupan ekonomi komunitas pedagang pasar, keamanan, pendidikan, bahkan kelembagaan.

Bagian akhir mengisahkan kesadaran Pak Mantri Pasar untuk mengorbankan kesenangan diri (*klangenan*) demi kehidupan bersama dengan merelakan ratusan atau ribuan burung kesayangannya dimusnahkan, hingga kehidupan masyarakat di Pasar Gemolong kembali harmonis. Bagian awal alur II mengisahkan Kasan Ngali, tengkulak gaplek, seorang duda sekian kali, kaya raya, dengan segala gambaran karakter, gaya hidupnya yang urakan dan menarik sebagai sumber berita kasak-kusuk. Bagian tengah mengisahkan keinginan dan manuver Kasan Ngali dengan perbuatannya yang konyol memamerkan kekayaannya untuk menarik perhatian Siti Zaitun, gadis pegawai bank pasar yang cantik jelita, untuk dijadikan isterinya. Bagian akhir mengisahkan kesadaran Kasan Ngali untuk membatalkan keinginan menikahi Siti Zaitun. Dia kembali kepada “filsafat hidup”-nya sebagai tengkulak gaplek, “Untuk makan sate kambing tidak perlu memelihara kambing di rumah; lebih praktis dan ekonomis njajan di warung gule-sate.”

Demikianlah, konvensi tahapan alur yang diadopsi dari teori naratif Barat seperti dikemukakan Sudjiman di antaranya memiliki unsur “*conflict, complication, climax*” (p.30)[4] ternyata gagal diterapkan untuk menganalisis alur novel kearifan lokal. Hukum kausalitas pada alur yang disarankan Forster, dengan contohnya yang termasyhur, “*The king died, and then the queen died of grief*” (p.93)[30] tidaklah signifikan. Ajaran kearifan lokal Jawa memahami konsep waktu pada alur bersifat siklis yang tidak berpangkal pada suatu peristiwa historis tertentu. Kenyataan tersebut mengisyaratkan perlunya diciptakan sarana analisis alternatif yang lebih sesuai untuk mengkaji kekhasan alur novel kearifan lokal. Penataan peristiwa dalam alur tidak selalu sesuai dengan hukum sebab-akibat, karena teknik demikian mengesankan penerapan teknik sebab-akibat dalam pengembangan paragraf karangan ilmiah. Analisis alur cerita cukup dengan memahami bagian awal, tengah, akhir dengan berbagai

kemungkinan variasinya, dengan tidak memaksakan katalisator konflik atau hukum sebab-akibat sebagai kriteria bagi alur yang baik. Mengadopsi dan menerapkan secara sewenang-wenang teori naratif Barat dalam mengapresiasi dan menganalisis alur novel kearifan lokal merupakan tindakan yang tidak adil, tidak proporsional, tidak objektif, tidak kondisional, dan tidak menghargai warisan kearifan lokal yang adiluhung.

Keenam, gagasan. Unsur terakhir novel kearifan lokal adalah gagasan, yakni konsepsi, ide, wawasan, pandangan, pemikiran, keyakinan yang tersirat di dalam cerita. Dalam kearifan lokal Jawa dikenal sebutan "*liding dongeng*" yakni gagasan, amanat, atau inti sari dongeng. *Liding dongeng* yang tersirat dalam dongeng disampaikan pengisah pada akhir cerita. Dalam pentas wayang kulit, *liding dongeng* itu tidak dinyatakan secara eksplisit oleh dalang. Penonton, sesuai dengan daya apresiasi masing-masing, diberi kebebasan untuk mencari (*nggoleki*) apakah gagasan atau pesan yang tersirat dalam pentas wayang semalam suntuk itu. "Perintah" untuk mencari (*nggoleki*) gagasan atau pesan diwujudkan dalam adegan pentas wayang golek.

Gagasan yang tersirat dalam novel dapat diinterpretasikan atau dipahami lewat unsur yang membangun struktur novel, seperti bahasa, latar, tokoh, peristiwa, alur, atau dari pernyataan-pernyataan eksplisit pengarang. Sementara itu, sumber gagasan dapat berasal dari nilai-nilai atau ajaran religi, pemikiran filosofis, kearifan lokal, atau renungan pribadi. Gagasan yang tersirat dalam novel **PRI** adalah kehidupan masyarakat dalam setiap masa atau zaman memiliki pranata budayanya sendiri. Zaman terus beredar, maka masyarakat juga terus berkembang. Pranata untuk masyarakat terdahulu tidak selalu sesuai untuk masyarakat berikutnya. Budaya priyayi tradisional telah roboh, bersama dengan robohnya pohon nangka di depan rumah Sastrodarsono. Kemudian berlaku budaya modern, yang memungkinkan Marie (cucu Sastrodarsono) menikah dengan Maridjan, lelaki dari keluarga lapisan *wong cilik*, atau Anna (cucu buyut Sastrodarsono) yang menikah dengan Boy pemuda keturunan Cina; atau Eko (cucu buyut Sastrodarsono) berkebangsaan Indonesia, berkulit sawo matang, beragama Islam, menikah dengan Claire, gadis

berkebangsaan Amerika, berkulit putih, dan beragama Yahudi. Kisah-kisah dalam novel **PRI** menggambarkan kejadian riil yang terjadi di Jawa, sebagaimana telah diramalkan para pujangga. (1) "*Jaman owah gingsir*" (Zaman terus berubah, seperti yang terjadi pada pengalaman hidup Sastrodarsono); (2) "*Wanita ilang susilane*" (Kaum wanita kehilangan nilai etika, seperti yang terjadi pada cucu-cucu Sastrodarsono); (3) "*Gajah kelangan sratine*" (Gajah kehilangan pawangnya, budaya adiluhung telah kehilangan pendukungnya, seperti terjadi pada budaya tradisional priyayi Jawa yang kehilangan pendukung).

Gagasan yang tersirat dalam novel **PAR** adalah kehidupan masyarakat dapat tercapai harmonis dan damai, jika setiap pribadi mau mengorbankan kepentingan pribadinya untuk mendukung dan melestarikan pranata budaya masyarakat yang telah baku dan diakui adiluhung. Selain daripada itu, nasib dan perjalanan hidup tokoh Pariyem sesuai dengan kiasan, "*Kere mungguh bale*" (Pengemis naik ke balai, orang dari lapisan *wong cilik* menjadi selir bangsawan). Gagasan yang tersirat dalam novel **SIN** adalah sikap pasrah pada kehendak nasib dan mampu menghanyutkan diri (*ngeli*) pada perputaran zaman. Ibu Sinder yang berasal dari keluarga bangsawan mampu bertahan hidup dan mampu menikmati hidup dalam perubahan zaman, meskipun pada awalnya hidup penuh kemewahan sebagai isteri sinder pabrik gula yang sangat dihormati, kemudian harus hidup di tengah-tengah komunitas PSK, dan akhirnya membuka warung makan kecil-kecilan (*climen*). Apa yang dialami Ibu Sinder persis seperti kiasan, "*Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati*" (Tunggul pohon jarak berkembang biak, tunggul pohon jati mati).

Ibu Sinder yang keturunan bangsawan (*tunggak jati*) jatuh status sosialnya menjadi pemilik warung kecil. Gagasan yang tersirat dalam novel **PAS** adalah beragamnya kebudayaan dalam masyarakat. Ada budaya halus (budaya Pak Mantri Pasar), ada budaya kasar (budaya Kasan Ngali) yang hidup berdampingan, dan tidak saling membinasakan. Masing-masing budaya berfungsi memenuhi kebutuhan komunitasnya. Selain daripada itu, kisah yang terjadi pada Pak Mantri Pasar sesuai dengan ramalan pujangga, "*Pasar bakal ilang kumandhange*" (Pasar akan kehilangan gemanya). Pasar, bukan hanya

kehilangan gaung ramainya (*tumawon*), tetapi juga pejabatnya kehilangan wibawa. Dalam novel **PAS**, Pak Mantri Pasar kehilangan wibawa, karena didemo para pedagang pasar dan bahkan Kasan Ngali berani mendirikan pasar tandingan di halaman rumahnya.

Kesimpulan

Bagian kesimpulan ini menyajikan beberapa hal yang penting. Novel kearifan lokal, sebagai salah satu jenis novel yang lahir pada dekade-dekade akhir abad XX, memiliki konvensi naratif khas dan perlu diteliti dengan menerapkan pendekatan analisis yang tepat. Dengan pembacaan fenomenologis terhadap novel-novel tersebut berbasis konvensi dan nilai-nilai kearifan lokal, diperoleh pemahaman, konvensi naratif novel yang muncul secara berturut-turut adalah: (a) pengarang; (b) bahasa; (c) latar; (d) tokoh; (e) peristiwa; (f) gagasan. Unsur pengarang mencakup: kejauharian pengarang dan reputasi pengarang. Unsur bahasa mencakup: penggunaan bahasa keseharian dan bahasa indah. Unsur latar mencakup latar luar dan latar dalam. Unsur tokoh mencakup: watak tokoh (watak halus, kuat, lembut, keras) dan peranan tokoh (pelindung, penggoda, penasihat, pelestari, pembela, pengawal, pengabdian, penguji, pesaing, pemikir). Unsur peristiwa meliputi: peristiwa emotif (menegangkan, mengharukan, romantis, humor, menyenangkan) dan tahapan alur (bagian awal, tengah, akhir). Unsur gagasan (*liding dongeng*) meliputi esensi gagasan dan sumber gagasan. Gagasan berasal dari ajaran religi, pemikiran filsafat, nilai-nilai kearifan lokal, dan renungan pribadi pengarang.

Konvensi naratif yang dikonstruksi dari novel kearifan lokal seperti dideskripsikan di atas digunakan sebagai acuan teoritis dalam mengapresiasi genre novel kearifan lokal. Namun, konvensi naratif tersebut dapat disikapi sebagai alternatif. Artinya, konvensi naratif tersebut digunakan sebagai acuan teoritis dalam mengapresiasi genre novel non-kearifan lokal di luar teori naratif Barat yang sudah dikenal selama ini. Temuan kekhasan konvensi naratif novel kearifan lokal dapat digunakan sebagai awal studi yang menyeluruh untuk membangun teori naratif sastra Indonesia berbasis tradisi sastra adiluhung bangsa Indonesia dari generasi terdahulu hingga kini. Novel-

novel kearifan lokal perlu dijadikan materi utama dalam pembelajaran apresiasi novel agar siswa/mahasiswa mengenal dan mengapresiasi novel-novel sastra Indonesia yang menerapkan konvensi naratif keindonesiaan, yang berbeda secara signifikan dari konvensi naratif Barat. Konvensi naratif novel kearifan lokal dapat memperkaya kompetensi kesastraan (*literary competence*) siswa/mahasiswa, sehingga mereka lebih bersikap objektif dan adil dalam mengapresiasi berbagai jenis novel sastra Indonesia.

Referensi

- [1] M. Lubis, *Teknik Mengarang*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan PP dan K, 1955.
- [2] L. Ali [ed], *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: Gunung Agung, 1967.
- [3] R. Wellek & A. Warren, *Theory of Literature*. England: Penguin Books, 1976.
- [4] P. Sudjiman, *Memahami Cerita Rekaan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1988.
- [5] M.H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms*. Fort Worth: Holt, Rinehart & Winston, Inc, 1988.
- [6] A. Teeuw, *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- [7] I. Watt, *The Rise of the Novel*. London: Penguin Books, 1977.
- [8] J. Hawthorn, *Studying the Novel*. London: Edward Arnold, 1989.
- [9] U. Junus, *Perkembangan Novel-Novel Indonesia*. Kuala Lumpur: University Malaya, 1974.
- [10] A. Teeuw, "Translation, Transformation, and Indonesian Literary History" dalam CD Grijns & SO Robson [eds] *Cultural Contact and Textual Interpretation*, Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1983.
- [11] D.N. Toda, *Novel Baru Iwan Simatupang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- [12] A. Teeuw, "Javanistic Tendencies in Recent Indonesian Literature" dalam Tenggara no. 21/22, Kuala Lumpur, 1988.
- [13] I. Abdullah [ed], *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- [14] J. Culler, 1977. *Structuralist Poetics*. London: Routledge & Kegan Paul, 1977.
- [15] A. Salam [ed], *Umar Kayam dan Jaring Semiotik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- [16] B. Darma, "Novel dan Jati Diri" Makalah dalam Simposium Sastra, 12-13 April, 1993. Depok: Fakultas Sastra UI, 1993.
- [17] Kuntowijoyo, *Pasar*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama, 1994.
- [18] L. Suryadi, *Pengakuan Pariyem*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- [19] S. Padmosoekotjo, *Ngengrengan Kasusastran Jawa I*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1958.
- [20] U. Kayam, *Para Priyayi*, Jakarta: Grafiti, 2001.
- [21] P. Kelana, *Ibu Sinder*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- [22] S. Darnawi, *Pengantar Puisi Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1964.
- [23] F. Ali, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- [24] Purwadi & H. Wijaya, *Sejarah Asal-Usul Tanah Jawa*. Yogyakarta: Persada, 2004.
- [25] R.M.S. Hadikoesoemo, *Filsafat Kejawen*. Jakarta: Yudhagama Corporation, 1985.
- [26] S.D. Damono, *Novel Jawa Tahun 1950-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.
- [27] J. Sumardjo, *Arkeologi Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- [28] Simuh, *Sufisme Jawa*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- [29] R. Subagya, *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981
- [30] E.M. Forster, *Aspects of the Novel*. Harmondsworth: Penguin Books, 1971

Revitalisasi Bahasa Indonesia dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Rahutami¹

Pengantar

Penggunaan bahasa merupakan masalah yang seringkali dianggap remeh, karena tidak memberikan efek langsung berupa produk yang dapat langsung diterapkan. Namun bila dilihat pada fakta yang terjadi di masyarakat, permasalahan yang timbul akibat penggunaan bahasa mencapai jumlah yang dapat dikatakan besar. Bahkan, dapat dikatakan permasalahan penggunaan bahasa merupakan penyebab pecahnya ikatan bangsa. Permasalahan yang muncul pada umumnya dilatarbelakangi oleh perbedaan pemaknaan terhadap bahasa yang digunakan. Masalah yang lain adalah penggunaan bahasa digunakan untuk menyerang orang lain yang merupakan saudara sebangsanya. Kesadaran inilah yang semakin menipis di masyarakat.

Padahal, kesadaran tentang pentingnya bahasa telah ditanamkan oleh para pemuda menjelang kemerdekaan, yakni Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda telah menyadari bahwa persatuan bangsa dapat dibangun apabila terdapat kesatuan bahasa. Kesatuan bahasa inilah yang membangun mental anak bangsa untuk merasa sepenanggungan. Kesatuan bahasa inilah yang menyatukan berbagai perbedaan suku, perbedaan ekonomi, perbedaan pendidikan, ataupun perbedaan sosial. Apakah hal itu hanya akan menjadi sejarah yang hanya untuk dikenang? Apakah sejarah tersebut tidak menjadi pembelajaran terbaik untuk menyatukan bangsa Indonesia dalam membangun negara ini.

Penggunaan bahasa selama ini diserahkan kepada pendidik. Sementara peran orang tua dan pemerintah semakin menipis seiring dengan penggunaan teknologi dan tuntutan kebutuhan hidup yang

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

dianggap semakin sulit. Permasalahan penggunaan bahasa merupakan masalah bersama bagi warga bangsa ini. Diperlukan kesatuan pemikiran dan bahasa para pembina bahasa, baik sekolah, orang tua, maupun pemerintah untuk mengatasi permasalahan di masyarakat akibat penggunaan bahasa. Suwardi Suryaningrat menyatakan bahwa pendidikan seorang anak menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Guru-guru bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa guru bahasa daerah tidak akan mencukupi dan menguasai untuk mengatasi penggunaan bahasa secara luas. Mereka mempunyai batas waktu, ruang, kesempatan, dan pengawasan terhadap penggunaan anak didiknya. Oleh sebab itu, para guru bahasa harus berpikir kritis dan kreatif dalam mengembangkan bahan pembelajarannya. Bahan pembelajaran bukan hanya ditujukan untuk pencapaian target pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pencapaian sikap berbahasa yang baik. Pada beberapa tahun terakhir, kambing hitam dari pembelajaran sikap berbahasa adalah ujian nasional (UN) yang dianggap hanya mengulas pengetahuan berbahasa. Pada saat ini pemerintah sudah menetapkan bahwa penilaian kebahasaan dan kesastraan berada di tangan guru melalui penilaian berbasis sekolah. Ketetapan ini harus dijadikan pemicu untuk memulai pembelajaran budi pekerti melalui pembelajaran berbahasa dan bersastra.

Pembelajaran yang dilakukan selama di sekolah tidak mencukupi. Peran serta orang tua untuk menerapkan penggunaan bahasa yang baik sangat diperlukan. Bahasa bukanlah masalah semata terkait dengan pengetahuan bahasa dan keterampilan. Penguasaan itu tidak akan bermakna jika tidak diikuti dengan pembiasaan. Keluarga dan masyarakatlah yang harus membantu untuk menerapkan penggunaan bahasa yang baik. Selama ini bahasa yang baik dimaknai sebagai penggunaan bahasa yang sesuai kaidah Bahasa Indonesia baku. Pemahaman tersebut kurang tepat. Penggunaan bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yakni berbahasa dengan baik dan berbahasa yang benar.

Berbahasa dengan baik adalah penggunaan bahasa yang dapat menciptakan komunikasi sesuai situasi dan kondisi; sementara berbahasa dengan benar adalah penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa baku. Penerapan keduanya tidak selalu bersamaan. Berbahasa dengan benar merupakan tuntutan dalam menggunakan bahasa dalam situasi resmi dan untuk membahas permasalahan secara ilmiah. Sementara, berbahasa yang baik merupakan tuntutan untuk menjaga hubungan baik, saling menghormati, dan menimbulkan pemikiran positif di antara pelibat komunikasi.

Peran pemerintah sebagai pemimpin masyarakat diharapkan bukan hanya terkait pada penentuan kebijakan pendidikan dan kebijakan pembinaan bahasa Indonesia. Dibutuhkan kesadaran bersama di kalangan para pemimpin untuk menggunakan bahasa yang baik, baik ketika menyampaikan gagasan pribadi maupun mewakili kelompoknya. Kepala Balai Bahasa Jawa Timur menyampaikan pada koordinasi pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa media massa bersama jurnalis media cetak, elektronik, dan Diskominfo Kota Batu di Commad Center, Balai Kota Among Tani, menyampaikan bahwa penggunaan bahasa merupakan contoh masyarakat [1]. Demikian pula para pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakatnya. Penggunaan bahasa di kalangan atas, baik pemerintah maupun perwakilan rakyat, secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk berbahasa. Penggunaan bahasa di kalangan politisi dan pemerintah yang seringkali kurang baik sehingga memicu konflik antar-kubu. Hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan penggunaan bahasa secara pragmatis dalam propaganda politik yang terdapat dalam media sosial [2].

Pembahasan ini bertujuan untuk mengajak kepada pihak-pihak terkait untuk mengembalikan keberadaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia bukan sekedar identitas, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehingga mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan Bahasa Indonesia yang

baik benar-benar harus digunakan oleh semua elemen masyarakat, sehingga konflik sosial dapat dihindari.

Ketertiban Berbahasa

Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan informasi menjadi lebih mudah diakses oleh semua masyarakat. Tidak semua informasi dapat dibendung dan disaring dengan baik, meskipun sudah dipagari dengan UU IT. Sementara tingkat pemahaman masyarakat beragam, sehingga informasi informasi dapat berefek positif maupun negatif. Efek positif terjadi apabila informasi diterima oleh pihak yang dapat memanfaatkan kebaikan, sementara efek negatif terjadi pihak penerima kurang mampu menangkap dan memanfaatkan informasi untuk kemaslahatan bangsa. Penyampaian informasi harus mempertimbangkan penggunaan bahasa yang “baik”. Bagaimana penggunaan bahasa yang “baik”? Berikut pandangan tentang penggunaan bahasa yang baik.

Keberhasilan proses komunikasi melibatkan faktor-faktor pemengaruh. Faktor utamanya adalah bahasa yang merupakan media vital untuk berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang kurang tidak tertib dapat menyamarkan/mengaburkan semua faktor yang lain. Niat yang baik, pesan yang bermakna, pelibat yang pandai, atau petutur yang cerdas dapat menjadi kabur, apabila bahasa yang digunakan tidak mampu menggambarkan berbagai faktor tersebut. Dibutuhkan keterampilan berbahasa yang baik untuk dapat menunjukkan faktor-faktor yang berada di balik penggunaan bahasa.

Penggunaan bahasa dalam proses komunikasi melibatkan tiga (3) pihak, yakni: penutur, petutur, dan pihak yang dituturkan. Posisi penutur, petutur, dan yang dituturkan perlu ditempatkan secara tepat untuk dapat menjalin hubungan baik. Masalah timbul apabila terdapat ketidaktepatan pemosisian masing-masing pelibat komunikasi. Leech telah menunjukkan cara untuk menjaga hubungan baik dengan pemosisian pelibat komunikasi yang tepat melalui maksim-maksim kesantunan berbahasa, yakni: maksim kebijaksanaan (*tact maxim*),

maksim kedermawanan (*generosity maxim*), maksim penghargaan (*approbation maxim*), maksim kesederhanaan (*modesty maxim*), maksim permufakatan (*agreement maxim*), dan maksim simpati (*sympathy maxim*) [3]. Maksim-maksim tersebut memenuhi tuntutan budaya Indonesia yang dikenal santun.

Maksim kebijaksanaan menuntut bahwa penutur bertindak meminimalkan kerugian bagi orang lain; maksimalkan keuntungan bagi orang lain. Yang dimaksud kerugian adalah penggunaan kata yang tidak menyenangkan sehingga petutur merasa rugi melakukan komunikasi dengan penutur. Pelanggaran terhadap maksim ini banyak ditemukan dalam media sosial, misalnya dengan memberi julukan atau menempatkan lawan bicara pada posisi terpojok. Meskipun berbentuk gurauan, pelanggaran ini dalam jangka panjang dapat menjadi bulian yang mengakibatkan lawan tutur kehilangan jati dirinya. Maksim kedermawanan adalah tuntutan terhadap penutur untuk mengutamakan petutur daripada dirinya. Penggunaan maksim ini menunjukkan bahwa si penutur mempunyai banyak kelemahan dibanding lawan tuturnya. Petutur yang ditempatkan sebagai pihak yang dipentingkan dapat membuat penghargaan terhadap kerja keras yang dilakukan oleh penutur dan berimplikasi pada pembelaan terhadap penutur. Contoh, sebutan Dewa Catur. Sebutan Dewa Catur menempatkan petutur mempunyai keterampilan yang tinggi dibandingkan orang lain.

Maksim penghargaan merupakan penggunaan bahasa yang menempatkan petutur sebagai pihak yang terhormat, bukan memuji diri sendiri. Banyak pembuat konten maupun komentator media sosial melakukan pelanggaran terhadap maksim ini. Alasan mereka antara lain adalah menyatakan hal yang sebenarnya, mengoreksi, menyatakan tidak suka, ataupun berupa tindakan iseng. Tanpa disadari ungkapan yang kasar dan merendahkan pihak lain dapat menimbulkan rasa anti dalam diri petutur. Maksim kesederhanaan adalah meminimalkan pujian kepada diri sendiri dan memaksimalkan cacian pada diri sendiri. Akhir-akhir ini banyak pembuat konten yang

melakukan pelanggaran terhadap maksim ini. Mereka menunjukkan kemewahan dan pujian terhadap barang-barang yang dimilikinya. Pelanggaran ini tanpa disadari berefek buruk, yakni kebencian terhadap pihak-pihak yang mempunyai kemewahan. Alih-alih terinspirasi untuk bekerja keras, dimungkinkan memicu kejahatan pada pihak yang diunggulkan.

Maksim permufakatan merupakan maksim yang disarankan ketika pelibat komunikasi bermaksud menjalin hubungan baik. Pelibat tuturan dimungkinkan mempunyai pandangan dan pemikiran yang berbeda. Kesepakatan untuk menghindari pembahasan yang berseberangan merupakan perwujudan maksim permufakatan. Tidak berarti bahwa pembahasan dengan sudut pandang yang berbeda tidak boleh dilakukan. Namun, perlu kesepakatan untuk saling menghormati pandangan masing-masing, karena setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda ketika proses pembentukan pandangan. Terakhir, maksim simpati yakni meminimalkan antipati kepada orang lain. Maksim ini merupakan konsekuensi yang harus dipertimbangkan ketika pelibat komunikasi mempunyai pandangan atau berada dalam posisi yang berbeda. Antipati muncul didasari oleh rasa tidak suka atau tidak setuju tentang kondisi pihak yang lain. Apabila telah mempunyai rasa antipati seharusnya penutur harus mengontrol dirinya untuk berada pada posisi netral. Terkait dengan penggunaan media sosial, maka host harus bersikap profesional menjalankan pekerjaannya.

Pada dasarnya maksim-maksim kesantunan berbahasa mengarahkan penutur untuk menempatkan petutur ataupun yang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Strategi ini tidak berarti bahwa penutur adalah pihak yang rendah, tetapi justru mempunyai posisi yang lebih tinggi, karena kemampuannya mengontrol dirinya untuk berperilaku bijak, pandai atau santun. Seseorang yang bijak selalu dapat menempatkan dirinya untuk tidak memperbesar konflik. Orang yang pandai selalu dapat menemukan pemecahan dari masalah yang dihadapinya. Dia tidak perlu berkata kasar atau selalu menemukan cara untuk menyampaikan pikirannya sehingga petutur

dapat menerima pesannya. Sementara, orang yang santun adalah orang yang mampu menghormati atau menghargai orang lain. Ini sejalan dengan pendapat Chazawi yang menyatakan bahwa santun adalah nilai-nilai positif yang dicerminkan dalam perilaku dan perbuatan positif. [4]

Pengguna bahasa yang baik hanya dapat diproduksi oleh penutur yang memang mempunyai dasar pemikiran dan perasaan yang positif. Seorang penutur yang dalam benaknya positif akan melahirkan bahasa yang baik. Sebaliknya, penutur yang di benaknya telah tersimpan hal-hal negatif akan memproduksi bahasa yang kurang baik. Bahasa adalah ekspresi pikiran dan perasaan penutur. Sepintar apapun seseorang menata bahasanya, pasti terdapat “ekspresi” yang sebenarnya dari kondisi kejiwaannya. Dapat dikatakan bahasa berada pada kesadaran dan ketidaksadaran penutur. Yang dimaksudkan bahwa bahasa sebagai bagian kesadaran, ditunjukkan oleh pemilihan kata dan penataan kalimat sesuai dengan situasi dan kondisi penggunaan bahasa. Sementara, bahasa sebagai bagian ketidaksadaran adalah bahwa pemilihan dan penataan bahasa sangat dibatasi oleh perbendaharaan bahasa yang dimiliki oleh penutur.

Kajian penggunaan bahasa sebenarnya telah banyak dilakukan, antara lain Mulyana dan Iskandar meneliti penggunaan bahasa harian Kompas pasca pelantikan Jokowi sebagai presiden [5]. Harian Kompas disarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih menunjukkan kenetralan, sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Contoh lain adalah penggunaan bahasa di youtube. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Deddy Corbuzier dalam podcast Close the Door. Ketika berbicara dengan Aldi Taher, Deddy Corbuzier, menggunakan bahasa yang memojokkan, meskipun ekspresi wajah yang ditampakkan berupa senyum.

(1) Nah, ini dia orangnya yang loe bilang maksiat-maksiat.....
Jangan liat saya, liat dia dong. [6]

Kalimat-kalimat pada kutipan (1) disampaikan oleh Deddy C., ketika pertama kali membuka perbincangan dengan Aldi T. Deddy

secara langsung memberikan pernyataan yang memojokkan, sehingga ekspresi Aldi T. tidak berada pada posisi yang nyaman. Awalan kalimat-kalimat tersebut menunjukkan perasaan Deddy yang kurang bersahabat. Sikap tersebut dapat dilihat dari perbincangan Deddy dengan tamu lain, yang juga kurang menyetujui sikap dan pernyataan Aldi. Berbeda dengan pembukaan perbincangan yang dilakukan oleh Deddy kepada tamu yang lain, misalnya Ade [7]. Armando. Berikut kutipannya.

(2) Bang Ade Armando. Apa kabar Bro?

(3) Saya mau belain Atta Halilintar... Boleh dong!...Sesama sahabat artis, sesama teman artis, sesama publik figur. ... Saya mau belain Atta (suaranya lemah). Daripada nyindir-nyindir.Penjelasan saya dulu dong!

Awal perbincangan dengan menanyakan kabar menunjukkan sikap Deddy yang lebih bersahabat. Meskipun, kalimat selanjutnya Deddy menyatakan bahwa dia bersikap berseberangan, yakni membela rekan-rekan artisnya. Namun, tampak bahwa Deddy menunjukkan penghormatannya kepada Ade A. Penggunaan beberapa kata yang diulang-ulang menunjukkan bahwa Deddy tidak bermaksud menunjukkan pertentangannya secara langsung. Deddy secara perlahan mengantarkan pikirannya. Tindakan Deddy ini dimungkinkan karena dia mengetahui status Ade sebagai dosen Ilmu Komunikasi, sehingga harus memilih bahasa yang tepat dalam situasi demikian.

Saat ini penggunaan bahasa yang kasar sudah mulai dianggap biasa. Herawati menyatakan bahwa saat ini penggunaan gaya sarkasme sudah biasa (sering) dalam bahasa pergaulan [8]. Meskipun, tidak jarang seseorang menggunakan strategi pengingkaran terhadap bentuk bahasa yang telah diproduksinya. Dia menyatakan bahwa bahasa yang digunakannya tidak menunjukkan maksud sebenarnya. Memang hal itu dapat terjadi, tetapi pengingkaran tersebut dapat ditelusuri dengan mengkaji penggunaan bahasa secara umum. Pengingkaran tersebut dapat diterima apabila penggunaan bahasa yang diingkari hanya berlaku pada sebagian dari penggunaan bahasa

kesehariannya. Cara lain adalah menggunakan analisis pada pemilihan dan penataan bahasa secara mendalam.

Diksi dan Karakter

Diksi merupakan kajian tentang pemilihan kata yang terdapat dalam suatu teks, baik lisan maupun tulis. Penggunaan diksi selalu bertujuan. Artinya, pemilihan sebuah kata selalu ditujukan untuk mencapai sesuatu. Tujuan dapat bersifat positif maupun negatif. Kaitan diksi dan tujuan tersebut melatar belakangi pembahasan hubungan diksi dan karakter, terutama dalam media sosial yang telah menjadi kebutuhan masyarakat dunia, khususnya Indonesia.

Media sosial sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat telah mengenal dan menggunakan media sosial, baik usia, sosial, ekonomi, ataupun pengelompokan lain. Bahkan, balita atau nenek/kakek pun sudah tidak asing memegang gadget. Apabila pada masa sebelum ini, di waktu-waktu luang banyak ditemukan kelompok-kelompok “diskusi”. Namun saat ini lebih mudah menemukan pengguna media sosial di semua ruang masyarakat. Para pengguna tersebut telah memiliki akun-akun, baik instagram, twitter, facebook, wa, atau youtube. Media yang mudah dioperasikan adalah youtube dan wa.

Melalui youtube, pengguna gadget mendapatkan berbagai informasi yang relatif tidak memerlukan dana yang besar. Hanya perlu membeli paket data, maka semua kebutuhan informasi dapat diperoleh. Bahkan, seringkali informasi yang tidak diperlukan pun didapat, dengan disediakannya menu-menu youtube. Tambahan lagi, “kebebasan” menelusuri internet telah dipermudah dengan pembelajaran daring. Para generasi pembelajar dapat menggunakan alasan sedang mencari bahan belajar untuk dapat mengakses informasi selain materi pembelajaran. “Kebebasan” ini acapkali menjadi kelengahan orang tua untuk mengawasi konten yang dibuka oleh anak-anaknya.

Permasalahan yang timbul bukan hanya konten yang ditampilkan, tetapi juga penyampaian konten. Bukan hal yang asing

lagi, penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh pengisi konten. Implikasinya, munculnya bentuk bahasa yang baru secara meluas. Bahasa gaul ini bukan hanya digunakan untuk kalangan yang sekelompok/sekomunitas para generasi muda, tetapi juga digunakan pada kelompok yang lebih tua atau situasi resmi. Hal ini menyiratkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia di sekolah sudah samar ketercapaiannya.

Permasalahan yang mendominasi penggunaan bahasa adalah pemilihan kata. Bahasa gaul memunculkan kosakata baru yang kreatif. Hal ini wajar, karena pembentuk bahasa gaul adalah generasi muda yang memang sedang pada masa suka dan sering menguji coba segala sesuatu yang berada di lingkungannya. Misal, kata anjing, anjay, atau anjir yang pernah viral dan menjadi perbincangan di masyarakat. Dipandang dari kreativitas berbahasa, kata tersebut tidak bermasalah. Permasalahan akan timbul apabila kata-kata tersebut digunakan secara tepat. Penggunaan yang tepat apabila digunakan dalam situasi sangat akrab atau digunakan oleh partisipan kelompok/komunitas terbatas.

Namun, prinsip penggunaan kata gaul tidak dipahami oleh semua pengguna bahasa, terutama kelompok anak-anak. Mereka merasa keren dan modern karena menggunakan kata-kata yang banyak digunakan dalam media berbasis teknologi. Anak-anak ketika berbicara dengan lingkungannya, bukan hanya yang untuk kelompok yang setara. Mereka menggunakan kata-kata gaul ketika berbicara dengan kelompok lain, misalnya, kakak, sepupu, bahkan guru. Misal, karena merasa akrab dengan gurunya, anak menggunakan sebutan "bro".

Tuturan-tuturan di kalangan remaja pun, cenderung diselingi oleh kata-kata kasar tanpa kecanggungan. Kemungkinan, mereka tidak memahami makna dari kata-kata yang disebutkan. Penggunaan kata-kata tersebut telah ternaturalisasi dalam percakapan-percakapan di kalangan anak muda. Sebagai contoh, penggunaan kata shit 'tahi' ketika mereka jengkel terhadap pihak tertentu, baik itu temannya

ataupun dosen yang dianggap memojokkannya. Bahkan, para mahasiswa pun tidak jarang menggunakan kata-kata kasar dengan “kebanggaan” sebagai bentuk kemenangan dan dominasi terhadap pihak lain. Hal ini dapat dengan mudah ditemukan pada bahasa orator demo mahasiswa. Kata-kata yang seringkali diucapkan antara lain adalah penggunaan nama hewan atau identitas buruk untuk melabeli pihak lain, misal: tikus, babi, kebo, maling, atau bajingan.

Para orator tersebut, seringkali, terbawa emosi untuk meluapkan pikiran dan perasaan menentang pihak tertentu. Para pendemo melupakan jati dirinya sebagai mahasiswa yang notabene adalah komunitas akademisi yang seharusnya lebih menggunakan “otak” daripada menggunakan “otot”. Pendapat umum seringkali menguasai pemikiran mahasiswa, bahwa perbuatan buruk tidak selalu dapat dikomunikasikan dan akan lebih ditanggapi dengan cara yang buruk. Umumnya, mereka memang berhasil menguasai dan menundukkan pihak yang didemo dengan menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan, tanpa menyadari bahwa hal itu tidak efektif. Mengapa demikian? Karena tidak seorang pun di dunia ini menerima penghinaan atau perendahan yang diterimanya. Akibatnya, tuturan negatif hampir selalu mendapat respon kata negatif pula. Respon yang buruk pada dasarnya menunjukkan bahwa kualitas diri perespon dan pihak yang direspon sama saja, sama buruknya.

Sebaliknya, tuturan yang halus dan menghargai dapat membuat seseorang mengikuti dan menerima argumen yang disampaikan pihak lain. Tuturan yang halus menimbulkan penerimaan, karena tidak bersifat menyerang. Meskipun, isi bahasa merupakan kritik, petutur tidak bersikap menolak. Hal ini karena petutur akan menggunakan logikanya daripada perasaannya. Penggunaan bahasa demikian banyak ditemukan pada bahasa sastra atau lagu yang mengajak untuk mengalami peristiwa bersama-sama. Maka tidak mengherankan kalau acapkali pendengar lagu bersedia menerima saran yang diberikan tanpa syarat. Pembaca novel juga banyak

terinspirasi pemikiran penulis walaupun di awal membaca terjadi pergolakan batin [9].

Cara yang santun malah dapat menimbulkan efek yang efektif untuk mengkritisi pihak lain. Pihak lain ditempatkan pada posisi sejajar sebagai rekan yang sedang mendapat masukan. Dengan demikian, pemaparan berbagai kelemahan yang ditentang dianggap sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan kualitas kinerja atau kualitas diri seseorang. Sebagai contoh, kritik kinerja seseorang yang buruk dinyatakan dengan empati atau peduli terhadap kerja keras yang belum berhasil. Seringkali, masyarakat menganggap kritik setara dengan menjatuhkan, padahal seseorang yang melakukan kritik adalah orang yang telah menyumbangkan pikiran dan perasaannya untuk mempedulikan kinerja orang lain. Oleh sebab itu, pengkritik seharusnya mendapat ucapan terimakasih karena bersedia meluangkan waktu dan tenaganya demi orang lain. Ada ungkapan bahwa teman terbaik kita adalah musuh kita yang telah bersedia memperhatikan dan mempedulikan diri dan kinerja kita. Tentu saja untuk memaknai musuh sebagai teman membutuhkan kesabaran dan kelapangan dada untuk menerima perbedaan pendapat.

Sebenarnya masalah yang terkait dengan pembentukan kata dan kata kasar adalah masalah kesantunan berbahasa. Beberapa fenomena yang terkait dengan itu adalah penempatan posisi yang sejajar pada status yang berbeda. Tanpa bermaksud menyatakan bahwa status tertentu “gila hormat’ dan membedakan “kasta” dengan pihak yang lain, sering ditemui mahasiswa menyamakan status dengan dosen atau pihak lain yang lebih tua. Sebagai contoh, mahasiswa mengirimkan pesan melalui Whatsapp menulis Balas! di akhir pesan. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menuntut dosen untuk membalas pesan yang dikirimkan. Sementara, pihak yang berkepentingan adalah mahasiswa. Dalam budaya timur, hal tersebut mengindikasikan ketidaksopanan mahasiswa. Untuk itu, sangat diperlukan pemberian wawasan tentang perbedaan budaya antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Hal lain adalah pembentukan kata yang seringkali tanpa sadar dilakukan mahasiswa, yakni membentuk kata dengan menggunakan afiks {-in} dialek Melayu Jakarta, ketika berbicara dengan dosennya. Misal, Maaf bu ngingatin aja kalo ibu besok harus ngajar di kelas kami. Kata ngingatin menunjukkan bahwa mahasiswa dan dosen berada pada posisi yang setara. Akhiran {-in} digunakan untuk status yang setara pada bahasa pergaulan. Sementara, posisi dosen dan mahasiswa tidak dapat disetarakan meski hubungannya dekat dan akrab.

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter anak bangsa Indonesia, tidak dapat melupakan bahasa sebagai alat komunikasi. Pendidikan karakter perlu diterapkan melalui pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai media latihan berpikir dan bersikap. Sebagai contoh, karakter jujur bukan berarti menyampaikan segala sesuatu secara gamblang tanpa melakukan pemilihan bahasa yang tepat. Kejujuran harus diiringi oleh sikap toleransi terhadap pandangan orang lain. Kebenaran sudut pandang tidak dapat disamakan antara orang satu dengan orang lain, karena perbedaan latar belakang pemikiran.

Pembelajaran bahasa bukan hanya terkait dengan pengetahuan bahasa tetapi lebih pada keterampilan berbahasa. Penguasaan pengetahuan bahasa hanya berada di level kognitif, sementara keterampilan berbahasa berkaitan dengan pengetahuan yang ditunjang oleh sikap positif dan keterampilan memilih dan menentukan lingkungan penggunaan bahasa yang baik. Pembelajaran bahasa yang benar dapat meningkatkan kualitas diri secara positif.

Pembentukan Karakter melalui Bahasa

Upaya mengatasi dan mengantisipasi permasalahan penggunaan bahasa di masyarakat, maka diperlukan penanganan menggunakan prinsip-prinsip strategi stilistika. Strategi stilistika merupakan upaya untuk mendayagunakan pilihan satuan lingual

untuk tujuan tertentu. Sejalan dengan tujuan menangani penggunaan kata-kata kasar, berikut dipaparkan strategi stilistika yang meliputi: (1) penggunaan kata yang diperjuangkan, (2) pemilihan kata, dan (3) pembentukan kata.

Berdasarkan hasil penelitian Rahutami, satuan lingual mempunyai daya untuk mempersuasi pihak lain melalui penggunaan kata atau penataan satuan lingual tertentu [10]. Penggunaan kata tertentu yang berulang dapat menanamkan konsep tertentu pada pihak yang terlibat dalam peristiwa tuturan. Kata yang berulang-ulang digunakan merupakan perwujudan dari strategi “kata yang diperjuangkan”. Menurut Santoso [11], konsep “kata yang diperjuangkan” adalah kata yang diusahakan ditanamkan atau dinaturalisasikan ke dalam pikiran pada individu masyarakat melalui berbagai aktivitas agar menjadi bagian dari kehidupan individu dan masyarakat, serta dipercayai sebagai bagian penting bagi kehidupannya.

Hal tersebut sesuai dengan hipotesis Worf dan Sapir yang dikutip oleh Scenker bahwa pikiran manusia ditentukan oleh sistem klasifikasi dari bahasa tertentu yang digunakan manusia [12]. Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan hipotesis ini, dunia mental orang Indonesia berbeda dengan dunia mental orang Inggris karena mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan bahasa dapat mempengaruhi mental pengguna bahasa tersebut. Sebaliknya mental seseorang dapat mempengaruhi penggunaan bahasa seseorang. Widhiarso menyatakan bahwa bahasa yang diproduksi oleh manusia juga dipengaruhi oleh cara manusia memandang dunia dan juga sebaliknya.

Penggunaan kata-kata kasar, kata tidak sopan, dan makian, secara rutin/kontinyu dapat mempengaruhi cara pandang penutur terhadap dunia yang ada di hadapannya. Sebaliknya, cara pandang seseorang dapat mempengaruhi pemilihan dan penataan bahasa karena menjadi sumber pemroduksian, yang pada tahap selanjutnya membentuk sikap dan perilaku kasar. Cara pandang dilandasi oleh

kognisi yang dinyatakan Lucy sebagai sekumpulan konsep dan prosedur yang hadir dalam aktivitas individu yang berkaitan dengan perilaku verbal seperti berkata, mendengar dan berpikir secara verbal [13].

Terkait dengan penggunaan kata kasar yang awalnya digunakan sebagai 'daya tarik' bagi pihak-pihak tertentu (content creator). Para pembuat konten tersebut berlomba-lomba menarik pemirsa untuk menjadi pengikut (subscriber) dengan hal-hal yang baru dan viral. Tanpa disadari, penggunaan bahasanya menimbulkan efek penanaman dan naturalisasi ke dalam pikiran seseorang sebagai hal yang penting dan melekat dalam dirinya. Konsep ini dalam perilaku religius dapat dilihat dari kegiatan berzikir. Dengan berdzikir, maka pelaku zikir menanamkan konsep asmaul husna, kalimat thayyibah atau sholawat sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Penanaman konsep-konsep itu tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pelaku zikir.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengantisipasi terjadinya penanaman konsep kata-kata kasar pada generasi muda, maka pihak yang terkait, baik itu orang tua, pendidik, maupun pemerintah harus mengendalikan tingkat keseringan keterlibatan anak-anak dengan tayangan yang kurang baik atau dipenuhi dengan kata-kata kasar. Pengurangan itu dapat berupa pendampingan dan pengawasan orang tua atau terhadap materi-materi informasi yang diserap oleh anak. Misal, dengan menanyakan atau melarang anak-anak untuk melihat tayangan informasi yang dipenuhi oleh kata-kata kasar.

Pengawasan dan pendampingan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap penggunaan bahasa dan makna dari kata-kata yang digunakan oleh content creators. Ketidaktahuan terhadap makna kata itu yang menyebabkan mereka menggunakan kosakata tertentu secara berulang-ulang. Sementara pengulangan itu dapat menjadi kebiasaan, sehingga ketika mereka tahu maknanya pun, mereka sudah sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut.

Guru Bahasa Indonesia seharusnya mewaspadaai gejala-gejala penggunaan bahasa yang kurang tepat, yang pada akhirnya memahamkan konsekuensi penggunaan bahasa yang kurang baik.

Siswa atau generasi muda perlu memahami fungsi pemilihan dan penataan bahasa. Secara umum pemilihan dan penataan bahasa berfungsi mengunggulkan atau menyamakan, dan menunjukkan kelompok atau individu (Rahutami, 2016). Kedua fungsi tersebut pada dasarnya merupakan cerminan kepercayaan (belief) penutur terhadap pihak terkait. Seorang penutur yang berkeyakinan bahwa suatu hal, konsep, orang tertentu mempunyai keunggulan/kelemahan. Penutur yang meyakini keunggulan akan menempatkannya pada posisi tinggi dan mempunyai kelebihan. Sebagai contoh, kata ksatria Jawa menunjukkan bahwa jiwa yang luhur dan postur tubuh gagah seperti halnya keturunan para bangsawan Jawa.

Sebaliknya, untuk pihak yang dianggap mempunyai kelemahan atau kekurangan, disamakan kelebihan yang melekat padanya. Sebagai contoh, pelacur merupakan istilah yang diberikan pada perempuan yang tidak bermoral karena menjual dirinya pada semua lelaki yang mampu membelinya. Dalam hal ini, kelebihan yang dimiliki oleh sosok yang disebut pelacur akan disamakan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Siswa harus mampu memilih dan menentukan penggunaan bahasanya telah meninggikan orang lain atau menjatuhkan status orang lain. Bahasa yang digunakannya juga dapat menunjukkan status atau posisi dirinya juga

Fenomena penggunaan bahasa dalam status wa tanpa disadari telah membuka sisi pribadi seseorang. Postingan yang menunjukkan kegalauan, misalnya, telah menginformasikan kepada orang lain bahwa penutur sedang bermasalah. Apabila, penutur terlalu sering memposting masalah dirinya, dapat berimbas penilaian orang lain bahwa si penutur orang yang lemah hati, kurang tegar, atau banyak mengeluh. Sebaliknya, penutur yang banyak mengunggah gambaran diri yang percaya diri, menasehati, atau menunjukkan keunggulannya dapat menimbulkan respon kesombongan. Sehingga

ketika dia mengalami masalah maka banyak orang tidak mempercayai. Hal penting adalah bahwa semua unggahan merupakan catatan digital yang tidak dapat dihapus dengan mudah. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa secara bijak perlu dipahami kepada siswa.

Di sisi lain, ungkapan seorang penutur dapat menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Acapkali pengguna bahasa kurang menyadari hal tersebut. Penyebutan nama diri, misal: saya/aku, Ratna menunjukkan penonjolan diri seseorang. Penonjolan ini dapat berefek negatif atau positif, tergantung pada penerimaan masyarakat. Sementara, penyebutan nama kelompok, misal: orang Madura juga dapat dimaksudkan untuk membentuk kelompok pendukung. Penggunaan yang kurang bijak dapat menimbulkan antipati pada kelompok yang lebih besar, walaupun itu adalah perilaku individu.

Sebagai contoh, ketika ada laki-laki beretnis Madura membunuh seorang gadis Dayak. Baik pelaku maupun korban mempunyai nama pribadi. Masalah menjadi meluas menjadi permusuhan antar-etnis, yang memunculkan wacana pembayaran denda yang harus dibayarkan oleh kelompok etnis Madura. Masalah pembubuhan yang awalnya berlatar belakang pribadi berubah menjadi permasalahan kelompok. Kebijakan pemilihan nama diri baik sebagai individu atau kelompok harus benar-benar dipahami oleh pembelajar.

Pihak pemerintah perlu mengendalikannya dengan menggunakan regulasi tentang tayangan atau informasi yang dianggap dapat menyebarkan pengaruh buruk ke masyarakat. Selama ini tindakan tersebut belum berjalan dengan maksimal. Meskipun Veronica Utami, Head of Marketing Google Indonesia, mengatakan bahwa terdapat sistem login yang dapat mengendalikan usia para pengguna youtube; ataupun dengan sistem flag terhadap video yang dianggap kurang layak tonton; tetapi nyatanya hal tersebut tidak menghalangi remaja dapat melihat tontonan tersebut. Apalagi flag dilakukan hanya jika terdapat komplain. Sementara para remaja

terlanjur “menikmati” tontonan tersebut, sehingga diragukan melakukan complain. Sebaliknya, orang tua tidak mungkin menilai dan melakukan complain tayangan yang sudah menjamur seperti itu.

Kesimpulan

Pembinaan karakter bangsa merupakan tugas keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketiganya harus bersinergi agar dapat berhasil. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemikiran tentang regulasi yang perlu disempurnakan, sehingga terbuka akses terbukanya arus informasi yang deras dapat diatasi dengan baik. Kebebasan berpendapat dan bersuara hendaknya selalu berada pada pola persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat harus peduli perkembangan anak bangsa, bukan hanya mendahulukan kepentingan pribadi semata. Keluarga pun harus lebih menjaga terhadap perkembangan karakter anak-anaknya. Perlu pemahaman penerapan agama yang lebih komprehensif.

Referensi

- [1] Balai Bahasa Jatim. 2019. <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id/2019/10/03/lenovo-introduces-its-best-entertainment-tablets-yet/> online 3 Oktober 2019.
- [2] Nugraheni, F. 2017. “Penggunaan Bahasa Dalam Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Karakter Bangsa”. *Stilistika*, Vol. 3, No. 1, 2017:1-18,
- [3] Leech, G.N. (1983). *Principles of Pragmatics*. New York: Longman
- [4] Chazawi, A. (2007). *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- [5] Mulyana, A., D. Iskandar. “Kecenderungan Penyajian Isu Politik Dalam Berita Harian Kompas Pasca Pelantikan Presiden Jokowi Periode Desember 2014”. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercubuana, Jakarta <https://media.neliti.com/media/publications/237527-kecenderungan-penyajian-isu-politik-dala-c8807aed.pdf>
- [6] maksiat Loe Maksiat Loe!!- Dinar Candy - Aldi Taher -Deddy Corbuzier Podcast.

- <https://www.youtube.com/watch?v=D02U94YCI5s> diunggah 25 April 2021.
- [7] ATTA HALILINTAR ANDA KELEWATAN!!TEGAS ADE ARMANDO BICARA - Deddy Corbuzier Podcast. <https://www.youtube.com/watch?v=F0MTsTlboK4> diunggah 27 April 2021
- [8] Herawati, Ida. 2017. "Media Sosial Berdampak Pada Ekspresi Kebahasaan Masyarakat (Tanggapan Masyarakat Melayu Terhadap Pernyataan Effendi Simbolon di Media Sosial) Social Media Impact To Society Language Expressions (Malay Society Respond To The Effendi Simbolon's Statement On Social Media)". *Tuah Talino* Tahun XI Volume 11 Edisi Mei 2017 ISSN 0216-079X Balai Bahasa Kalimantan Barat
- [9] Laursen, D., Swingwood, A. 1972. *The Sociology of Literature*. Mac Gibbon and Kee.
- [10] Rahutami. 2016. Konstruksi Ideologi Karya Sastra melalui Strategi Wacana. Kajian Linguistik terhadap Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer. Disertasi. Tidak diterbitkan.
- [11] Santoso, A. 2018. Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa. Bandung: Mandar Maju
- [12] Widhiarso, Wahyu. 2005. "Pengaruh Bahasa terhadap Pikiran. Kajian Hipotesis Benyamin Whorf dan Edward Sapir". diakses dari [file:///D:/ARTIKEL/hubungan antara bahasa dan pikiran.pdf](file:///D:/ARTIKEL/hubungan%20antara%20bahasa%20dan%20pikiran.pdf) pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 20.23 WIB.
- [13] Natsir, Muhammad. 2010. Bahasa dan Pikiran. Diakses dari <http://digilib.unimed.ac.id/482/1/Fulltext.pdf> pada tanggal 28 Nopember 2016.



CHAPTER III :

INTEGRASI SAINS DALAM PENDIDIKAN NILAI

Berdayakan Keterampilan Berpikir Selama Pembelajaran Sains Demi Masa Depan Kita

Prof. Dr. AD. Corebima, M.Pd ¹

Pengantar

Bagaimana pelaksanaan pengkajian sains untuk memberdayakan manusia? Jawabannya adalah mengkaji sains sebanyak-banyaknya & sedalam-dalamnya untuk mengungkap informasi sebanyak-banyaknya & sedalam-dalamnya. Bagaimana melaksanakan pengkajian sains sebanyak-banyaknya & sedalam-dalamnya? Jawabannya berupaya melakukan pemberdayaan berpikir pada pembelajaran. Makalah ini ditulis atas dasar urutan berpikir bahwa pemberdayaan berpikir selama pembelajaran akan berdampak terhadap pengkajian sains sebanyak-banyaknya & sedalam-dalamnya, sehingga informasi yang terungkap sebanyak-banyaknya & sedalam-dalamnya; dan informasi yang terungkap sedemikian diyakini berpotensi besar memberdayakan manusia.

Naskah ini juga ditulis atas dasar pertimbangan bahwa pemberdayaan berpikir selama pembelajaran akan sangat mendukung tujuan hakiki pendidikan, yaitu membebaskan atau memerdekakan anak manusia. Alasan dasarnya adalah bahwa hanya dengan kemampuan berpikir yang sudah berkembang, setiap anak manusia akan lebih mampu menempatkan dirinya menjadi pribadi yang bebas dan merdeka, yang akan mempengaruhinya dalam bersikap dan bertindak.

Fakta tentang Pemberdayaan Berpikir yang tidak/kurang Diperhatikan

Pada 19 Desember 2009 di Universitas Negeri Makassar (UNM), seorang dosen bercerita tentang suatu pengalaman putrinya, yang menempuh ujian IPA SD di sesuatu kelas. Satu butir tes yang ditanyakan adalah “sebutkan satu contoh daun tumbuhan yang

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

digunakan sebagai pewarna alami". Jawaban yang ditulis oleh putri dosen itu adalah **daun suci**, tetapi jawaban itu disalahkan oleh guru hanya karena pada buku murid, contoh daun yang digunakan sebagai pewarna alami adalah **daun pandan**. Pengalaman semacam itu ternyata pernah kami alami pada tahun 1971 di saat memprogram sesuatu mata kuliah. Kuliah itu disampaikan dengan cara mahasiswa menyalin/mencatat bahan kuliah yang dibacakan dosen. Pada saat ujian, jawaban atas pertanyaan yang diajukan harus tepat sama kata demi kata dengan bahan kuliah yang sudah disalin selama perkuliahan. Apabila jawaban tidak tepat sama dengan yang sudah disalin maka jawaban itu diturunkan skornya atau bahkan disalahkan sama sekali.

Dua contoh pengalaman sebagaimana yang telah dikemukakan tsb. sebenarnya memperlihatkan dengan gamblang betapa kedua pembelajaran yang terkait dengan pengalaman-pengalaman itu, sama sekali tidak berkepentingan untuk memberdayakan keterampilan berpikir termasuk keterampilan metakognitif pebelajar, sadar atau tidak sadar. Berapa banyak pembelajaran di SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK yang tidak berkepentingan memberdayakan keterampilan berpikir termasuk keterampilan metakognitif pebelajar? Berapa banyak pembelajaran perkuliahan masa kini, yang juga tidak berkepentingan memberdayakan keterampilan berpikir termasuk keterampilan metakognitif pebelajar? Harapan kita adalah pembelajaran semacam itu tidak banyak lagi; di lain pihak ada juga bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa pembelajaran di sekolah menengah (SMP dan SMA) memang kurang atau berkepentingan memberdayakan keterampilan berpikir pebelajar [1].

Berikut ini dikemukakan beberapa pengalaman lain, yang juga membuktikan keterampilan berpikir termasuk pemberdayaannya memang kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian kita. Pada bulan Maret 2011, terkait satu perkuliahan yang saya kelola di S2 Prodi Pendidikan Biologi PPS UM, ada dua mahasiswa diketahui mengambil naskah ujian untuk dicopy, pada hal tindakan itu dilarang. Kedua mahasiswa itu adalah guru sekolah menengah. Makna yang terungkap dari kejadian itu adalah bahwa guru yang mahasiswa itu malas, tidak terbiasa berupaya berpikir secara benar atau bahkan tidak terampil berpikir; jalan keluar yang ditempuh dalam menyiapkan diri

menghadapi ujian adalah mengumpulkan soal termasuk dengan cara “mencuri” sekalipun, dan selanjutnya soal-soal itu dipelajari khususnya yang terkait jawaban-jawabannya. Berapa banyak guru yang memiliki pola pikir, kebiasaan atau perilaku semacam itu? Apakah guru-guru semacam itu cukup diyakini memiliki kepentingan memberdayakan keterampilan berpikir siswa di kala mengajar?

Beberapa waktu lalu di awal Mei 2011 sewaktu mereview diskusi mahasiswa S2 (yang guru) RSBI sekolah menengah pada perkuliahan statistik deskriptif (Prapasca), saya mengucapkan pernyataan analogis demikian: **“ternyata masih banyak sekrap yang longgar”** terkait pemahaman mereka sebelumnya (tentang statistik deskriptif yang seharusnya sudah diketahui pada perkuliahan di S1). Para guru ternyata kebingungan tidak dapat menangkap makna pernyataan itu, bahkan tidak langsung mudah memahaminya sekalipun saya telah berupaya menjelaskan makna pernyataan dalam bentuk analogi itu. Dalam hal ini salah satu makna yang mudah tampak, adalah bahwa para mahasiswa yang guru itu tidak terbiasa berpikir analogis; rupanya mereka hanya terbiasa berpikir dalam alur sederhana. Apabila benar demikian, bagaimana mungkin meyakini guru-guru semacam itu berkepentingan memberdayakan keterampilan berpikir siswa selama melaksanakan tugas pembelajaran mereka sebelumnya?

Pada pertengahan April 2011 saya mendapat cerita pengalaman belajar seorang anak MI dalam persiapan menghadapi ujian. Informasi itu diceritakan oleh ibu dari anak yang bersangkutan (yang merupakan salah seorang kolega dosen). Anak itu belajar langsung dipandu oleh indikator-indikator yang terdapat pada silabus (pola ini tampaknya disarankan oleh guru mungkin secara langsung atau tidak langsung). Sekilas terlihat bahwa pola belajar ini sangat terarah dan terukur, tetapi bila dicermati pola ini sebenarnya sangat mekanis, sangat sempit perspektifnya, dan hanya berkepentingan agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang langsung berhubungan dengan tiap indikator. Oleh karena itu mudah diduga bahwa pembiasaan pola belajar itu akan berdampak terhadap pemberdayaan keterampilan berpikir; keterampilan berpikir sulit berkembang. Berapa banyak anak-anak bangsa yang memiliki pola belajar semacam itu?

Mari kita cermati juga contoh rumusan masalah penelitian pada salah skripsi mahasiswa S1 (yang demi sopan santun identitasnya tidak ditunjukkan lebih lanjut). Pada skripsi itu dirumuskan empat butir permasalahan, yaitu: 1). apakah penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar biologi siswa kelas X-A SMA *Omega*? 2). apakah penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas X-A SMA *Omega*? 3). bagaimana model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar biologi siswa kelas X-A SMA *Omega*? 4). bagaimana model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas X-A SMA *Omega*? Perhatikan butir-butir permasalahan itu terlihat jelas bahwa permasalahan-permasalahan itu sesungguhnya tidak perlu dikaji lagi, apapun alibinya, karena sudah demikian banyak referensi termasuk yang berupa hasil penelitian telah melaporkan jawaban atas permasalahan-permasalahan itu. Berapa banyak skripsi para mahasiswa S1 kita, yang mengkaji permasalahan penelitian skripsinya semacam itu, padahal semestinya kajian semacam itu tidak perlu lagi.

Berikut ini kita perhatikan contoh rumusan masalah penelitian salah satu tesis mahasiswa S2 tanpa menunjukkan identitasnya yang lengkap. Pada tesis itu dirumuskan dua butir permasalahan, yaitu: 1). Apakah pemanfaatan lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep keanekaragaman tumbuhan pada siswa? 2). Apakah pemanfaatan lingkungan sekolah dapat meningkatkan kemampuan siswa mengerjakan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) secara berkelompok? Perhatikan butir-butir permasalahan tesis itu terlihat jelas bahwa karakter permasalahan-permasalahan itu sama sebagaimana yang terkait dengan permasalahan skripsi S1 tadi, sekalipun tanpa didasari oleh alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan. Berapa banyak tesis para mahasiswa S2 kita, yang mengkaji permasalahan tesisnya semacam itu?

Kita cermati juga contoh rumusan masalah penelitian salah satu disertasi mahasiswa S3, juga tanpa memperlihatkan identitasnya secara lengkap. Pada disertasi itu dirumuskan enam butir permasalahan, dan lima butir permasalahan itu yaitu: 1). apakah model pembelajaran kooperatif berpengaruh terhadap hasil belajar

(aspek kognitif, keterampilan proses, dan sikap) siswa kelas II SMA di *Nusa Barung*? 2). apakah modul yang berwawasan STM berpengaruh terhadap hasil belajar (aspek kognitif, keterampilan proses, dan sikap) siswa kelas II SMA di *Nusa Barung*? 3). apakah model pembelajaran kooperatif bermodul berwawasan STM berpengaruh terhadap hasil belajar (aspek kognitif, keterampilan proses, dan sikap) siswa kelas II SMA di *Nusa Barung*? 4). apakah model pembelajaran kooperatif bermodul berwawasan STM berpengaruh terhadap tingkat kognitif siswa SMA di *Nusa Barung*? 5). apakah model pembelajaran kooperatif bermodul yang berwawasan STM berpengaruh terhadap keterampilan kooperatif siswa kelas II SMA di *Nusa Barung*? Butir-butir permasalahan itu juga memperlihatkan dengan jelas karakter permasalahan yang sama dengan karakter permasalahan skripsi dan tesis yang telah dikemukakan sebelumnya; dan berapa disertasi para mahasiswa S3 kita, yang mengkaji permasalahan disertasinya semacam itu, padahal seperti diketahui bersama pada disertasi sangat dituntut adanya temuan baru.

Dari butir permasalahan, mari kita arahkan perhatian ke pembahasan hasil penelitian. Pertama kali kita cermati contoh pembahasan hasil penelitian salah satu skripsi mahasiswa S1, tanpa menyebutkan identitas lengkap skripsi itu. Contoh pembahasan yang ditampilkan ini dibatasi hanya sebatas satu hingga dua paragraf. Dalam hubungan ini disebutkan ***“Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa kelas X-A SMA Omega pada pelajaran Biologi sudah tercapai karena sudah mencapai standar minimal ketuntasan belajar klasikal yang ditetapkan oleh Depdiknas yaitu >85% siswa di dalam kelas mencapai daya serap >60 (berdasarkan SKM biologi kelas X SMA Omega). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif model jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan hasil penelitian Husen (2004), Ariyani (2004), Tsaniyah (2005) dan Rahayu (2005)”***. Pada paragraf berikutnya dikatakan bahwa ***“Pembelajaran kooperatif jigsaw yang menuntut masing-masing anggota kelompoknya untuk menguasai materi dan mengajarkan kepada kelompoknya mendorong siswa untuk lebih bersungguh-sungguh dalam membangun konsepnya. Siswa mempunyai kesempatan dalam model pembelajaran kooperatif jigsaw untuk mengkonstruksi***

konsep atau pengetahuannya melalui kegiatan tutor sebaya (peer tutoring). Kegiatan tutor sebaya sejalan dengan teori elaborasi kognitif. Konsep materi akan tertinggal lama dengan cara memberikan penjelasan kepada teman-temannya (Afriadi, 2005). Hasil penelitian Slavin (1995) menunjukkan bahwa tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar, baik untuk tutor maupun tutee.” Cara pembahasan yang terlihat pada paragraf-paragraf lain pada dasarnya juga tidak berbeda. Pembahasan yang ditampilkan ini hanya mengulang kembali paparan hasil penelitian yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, serta menyitir kembali referensi terkait (sejalan/tidak sejalan), tidak/kurang disertai **penjelasan referensial** tentang apa sebab munculnya hasil penelitian semacam itu. Berapa banyak skripsi mahasiswa S1 kita yang memiliki cara pembahasan hasil penelitian seperti itu? Orang patut menduga bahwa jumlah skripsi-skripsi semacam itu sangat mungkin tidaklah sedikit.

Contoh pembahasan hasil penelitian yang berkenaan dengan penelitian tesis akan dikemukakan lebih lanjut. Berikut ini ditunjukkan satu paragraf pembahasan hasil penelitian dari salah satu tesis mahasiswa S2 (anonim); disebutkan ***“Hasil analisis pada setiap siklus menunjukkan ada kemajuan tentang pemahaman konsep keanekaragaman tumbuhan oleh siswa. Hal ini terlihat pada perolehan hasil postes siswa dari siklus I, siklus II dan siklus III yang telah diuraikan pada bab IV. Bila dilihat dari ketuntasan belajar siswa secara klasikal, berarti bila kelas telah terdapat 85% yang telah mencapai daya serap di atas 65 %, atau nilai 6,5 (Depdikbud,, 1994). Merujuk pada ketentuan tersebut pada siklus I, ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 71,79 %, siklus II 84,62 %, dan siklus III sebesar 94,87 %”***. Pada paragraf selanjutnya dikatakan bahwa ***“Hasil temuan peneliti ini sesuai dengan pendapat Arief (1996) yang menyatakan penggunaan media dalam bentuk asli akan lebih bermakna bagi anak didik dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan biologi, dibandingkan dengan media dalam bentuk model, gambar atau sketsa. Temuan peneliti ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zubaedah (1997) yang menyatakan banyaknya ragam tumbuhan merupakan sumber daya alam yang patut dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar sehingga”*** Cara pembahasan pada paragraf-paragraf lain juga tidak jauh

berbeda. Melihat bahasan hasil penelitian semacam itu, tampak jelas bahwa cara pembahasannya tidaklah berbeda dengan cara pembahasan pada skripsi yang telah dikemukakan. Berapa banyak tesis mahasiswa S2 kita yang memiliki cara pembahasan hasil penelitian sedemikian?

Berikut ini dikutip contoh pembahasan hasil penelitian dari salah satu disertasi mahasiswa S3 (anonim); disebutkan ***"Hasil analisis kovarian multivariate (MANCOVA) menunjukkan model pembelajaran kooperatif pengaruhnya lebih positif terhadap aspek kognitif daripada pembelajaran nonkooperatif. Hal ini dapat dijelaskan karena dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap anggota kelompok dituntut bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya, karena penghargaan untuk kelompok didasarkan atas sumbangan skor yang diperoleh dari masing-masing anggota. Dengan demikian setiap siswa termotivasi untuk belajar, saling mendorong, dan saling membantu antaranggota kelompok untuk belajar secara optimal. Adanya motivasi tersebut dapat mendorong siswa belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa [2]. Hal ini sesuai dengan Joyce, et al (1992:67) yang menguraikan bahwa adanya sinergi dapat menghasilkan suatu motivasi*"** Cara pembahasan pada paragraf-paragraf lain pada dasarnya juga seperti itu. Cara pembahasan pada disertasi ini terlihat sudah lebih baik dibanding cara pembahasan pada skripsi dan tesis yang telah dikemukakan. Namun demikian apakah cara pembahasan pada disertasi lain juga semacam itu? Adalah sangat memprihatinkan jika jumlah disertasi mahasiswa S3 kita yang memiliki cara pembahasan hasil penelitian seperti pembahasan pada skripsi dan tesis tsb, memang benar-benar banyak.

Setelah memperhatikan karakter permasalahan maupun cara pembahasan hasil penelitian pada skripsi mahasiswa S1, tesis mahasiswa S2, disertasi mahasiswa S3, terlihat jelas bahwa kenyataan seperti itu terjadi karena kurangnya bacaan, dan/atau karena rendahnya kemampuan/keterampilan berpikir. Akibat kurangnya bacaan dan rendahnya kemampuan/keterampilan berpikir, sangat mudah dipahami jika orang memang tidak tahu bahwa sesuatu permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian, memang benar-benar belum diteliti, atau tahu kalau sudah diteliti tetapi tidak terampil

berpikir bahwa hal itu masih perlu diteliti lagi karena alasan/pertimbangan tertentu.

Apabila memang tidak tahu bahwa permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian itu sudah diteliti, maka penelitian itu akan menjadi kegiatan duplikasi yang kurang/tidak bermanfaat dan bahkan merupakan pemborosan; apalagi penelitian baru itu tidak banyak mengungkap informasi sebanyak yang diungkap penelitian-penelitian sebelumnya. Di lain pihak jika tahu bahwa permasalahan itu sudah diteliti tetapi tidak terampil menemukan permasalahan baru/lanjutan, maka penelitian itu juga berpeluang besar hanya menjadi kegiatan duplikasi sebagaimana yang telah disebutkan.

Memperhatikan cara pembahasan hasil penelitian pada skripsi mahasiswa S1, tesis mahasiswa S2, disertasi mahasiswa S3, (apabila yang semacam itu ternyata banyak), maka sangat logis jika penelitian-penelitian itu tidak akan mampu menghasilkan informasi-informasi baru, yang semestinya menjadi target utama suatu kegiatan penelitian ilmiah. Kegiatan penelitian-penelitian semacam itu juga hanya merupakan duplikasi serta pemborosan; dan jika demikian maka kapan kita berpeluang ikut berperan menjadi pelaku-pelaku pengembangan IPTEK; lebih lanjut kapan kita berpeluang ikut berperan aktif menjadikan ilmu khususnya sains bermanfaat bagi kemaslahatan manusia? Kita akan dapat selamanya menjadi kelompok **underdog** karena kurang terampil berpikir, yang lambat tetapi pasti bergerak menuju titik frustrasi, karena tidak memiliki kebanggaan sebagai suatu negara bangsa modern; dan akibat frustrasi kita akan memasuki kondisi ketidakpastian yang berdampak macam-macam.

Bahwa kita akan dapat selamanya menjadi kelompok **underdog**, hal itu tentu terkait juga dengan berbagai hal lain; dan akumulasi berbagai hal itulah yang akan dapat menjadi sebab atau memperbesar peluang kita menjadi kelompok **underdog** seperti tersebut. Salah satu hal lain itu misalnya yang terkait dengan pola rekrutmen siswa baru kita yang akan memasuki jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah terutama yang diterapkan oleh kelompok sekolah negeri. Pola rekrutmen siswa baru yang diterapkan adalah yang mengacu kepada **MPL (Minimal Passing Level)**. Implementasi pola rekrutmen siswa semacam itu berdampak hak asasi jutaan (mungkin) anak bangsa dilanggar setiap tahun, karena tidak

diperkenankan mengenyam pendidikan baik yang menjadi haknya. Dampak karambol selanjutnya adalah bahwa tidak mustahil berjuta-juta anak bangsa tidak berkesempatan diberdayakan; sudah berapa tahun fenomena semacam ini berlangsung? Berjuta-juta anak bangsa dipaksa berada pada kelompok yang terpinggirkan; dan tentu saja hal ini berpotensi sangat besar meningkatkan peluang kita menjadi kelompok **underdog** di tengah-tengah pergaulan antar bangsa.

Memberdayakan Keterampilan Berpikir selama Pembelajaran Sains

Development of thinking skills is not a natural occurrence, an accidental outcome of experience, or an automatic byproduct of study in a subject area (de Sanchez, in 1995; Taba, 1965, as cited in Beyer, 1987). It requires deliberate, continuing instruction and practice in order to develop it to its full potential (Arons, 1979; Kirby & Goodpaster, 1999; Perkins, 1985, as cited in Beyer, 1987; Thoms, 1998). Unfortunately, the traditional instruction paradigm, a 50-minute lecture intended to disseminate information, cannot fulfill critical thinking objectives (Bar & Tagg, 1995), and critical thinking will not take place if a student goal is simply "an exit score from school necessary to enter a professional course, (which only) involves surface approaches to learning with (inappropriate) assessment-driven learning." (Aldred & Aldred, 1998, 654). Itulah kutipan dari [3] yang memperlihatkan bahwa keterampilan berpikir perlu diberdayakan secara sengaja dan terencana. Apakah pada kerja/kegiatan pembelajaran yang kita jalankan selama ini, hal itu sudah disadari dan diupayakan secara sengaja dan terencana? Mari kita lakukan refleksi dan menjawab pertanyaan itu masing-masing.

Di lingkup proses pembelajaran dalam kelas, saat ini telah diketahui berbagai strategi pembelajaran yang berpotensi memberdayakan kemampuan berpikir siswa. Beberapa strategi pembelajaran yang berpotensi memberdayakan kemampuan berpikir adalah pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran berbasis masalah, *cooperative learning*, dan *project based learning*. Alasan atau penjelasan yang berhubungan dengan potensi pemberdayaan kemampuan berpikir tersebut akan dikemukakan lebih lanjut.

Pembelajaran berbasis *inkuiri* juga merupakan suatu konsep yang sangat luas. Strategi pembelajaran *inkuiri* adalah salah satu

strategi berbasis inkuiri disamping strategi lain yang secara tekstual mungkin tidak disebutkan demikian. Secara umum memang strategi pembelajaran berbasis inkuiri mengutamakan proses penemuan untuk memperoleh pengetahuan, dan salah-satu tujuannya adalah agar para siswa memiliki pola pikir dan cara kerja ilmiah layaknya seorang ilmuwan [4]. Pada pembelajaran berbasis inkuiri, proses pembelajaran berlangsung mengikuti metodologi sains, sehingga para siswa belajar bagaimana menjadi ilmuwan yang selalu menganalisis dan menangani informasi. Secara spesifik terkait langsung dengan strategi pembelajaran inkuiri, dinyatakan bahwa strategi tersebut berpotensi memberdayakan kemampuan berpikir siswa sebagaimana yang dikemukakan [5] [6] [7] [8] juga melaporkan bahwa potensi strategi pembelajaran inkuiri meningkatkan kemampuan berpikir siswa SMP (yang berkemampuan tinggi dan rendah) pada pembelajaran biologi ternyata masih lebih rendah dibanding potensi Pembelajaran Berdasarkan Masalah; tetapi potensinya meningkatkan pemahaman konsep ternyata masih lebih tinggi dibanding pembelajaran berdasarkan masalah. Pada peringkat SMA, [9] melaporkan bahwa strategi pembelajaran inkuiri berpotensi memberdayakan keterampilan berpikir para pebelajar; sedangkan pada peringkat SD, Widyastuti (2007) juga melaporkan demikian.

[10] menyatakan bahwa Pembelajaran Berdasarkan Masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah dan keterampilan intelektual. [11] juga mengemukakan hal yang sama dengan menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan masalah dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis, serta menghadapkan siswa pada latihan untuk memecahkan masalah. [12] mengemukakan bahwa pembelajaran berdasarkan masalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa, melatih keterampilan memecahkan masalah, dan meningkatkan penguasaan materi pembelajaran. Demikian pula, Wheeler (2002) mengatakan bahwa belajar berdasarkan masalah adalah belajar berpikir tentang masalah kehidupan riil di sekitar siswa; dan Duch, Allen, serta White (2002) berpendapat bahwa pembelajaran berdasarkan masalah menyediakan kondisi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis maupun analisis, serta memecahkan masalah kompleks dalam

kehidupan nyata. Berkenaan dengan Pembelajaran Berdasarkan Masalah [13] melaporkan atas dasar hasil penelitiannya bahwa pada pembelajaran biologi di SMA kemampuan strategi tersebut terhadap pemberdayaan berpikir siswa jauh lebih tinggi dibanding kemampuan *direct instruction*. [14] melaporkan bahwa Pembelajaran Berdasarkan Masalah yang digabung strategi metakognitif paling besar pengaruhnya terhadap kemampuan pemecahan masalah dibanding Pembelajaran Berdasarkan Masalah maupun pembelajaran konvensional. Pada peringkat SMP, [8] juga melaporkan bahwa Pembelajaran Berdasarkan Masalah juga berpotensi besar memberdayakan keterampilan berpikir para pebelajar.

Diantara 101 alasan penggunaan pembelajaran kooperatif yang dikemukakan [15], atas dasar review hasil penelitian-penelitian, terlihat adanya alasan yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif meningkatkan kemampuan berpikir siswa (*Smith, 1984*); dan bahwa pembelajaran kooperatif meningkatkan kemampuan penalaran siswa [16] demikian pula bahwa pembelajaran kooperatif mengembangkan kemampuan pemecahan masalah sains (Kulik & Kulik, 1979). Dari antara macam-macam tipe pembelajaran kooperatif, tidak mustahil ada yang berpotensi memberdayakan kemampuan berpikir lebih tinggi dibanding yang lain. Seperti diketahui tipe-tipe pembelajaran kooperatif antara lain: STAD, Jigsaw, GI, TGT, TAI, NHT, Snowballing, TPS, CIRC, LT, dan CI. Terkait potensi pemberdayaan berpikir, [13] melaporkan bahwa pembelajaran kooperatif GI lebih berpotensi memberdayakan kemampuan berpikir siswa (SMA) dibanding pembelajaran kooperatif STAD. Melalui penelitian eksperimen di SMP, Corebima dkk. (2005) melaporkan bahwa pembelajaran kooperatif TPS maupun jigsaw yang masing-masingnya digabung dengan pembelajaran berpola PBMP berpotensi besar memberdayakan keterampilan berpikir para pebelajar dibanding pembelajaran konvensional. Masih terkait pembelajaran kooperatif, pada penelitian eksperimen pembelajaran IPA Biologi di SMP, [17] melaporkan bahwa pembelajaran kooperatif GI lebih berpotensi memberdayakan keterampilan berpikir para pebelajar dibanding Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Di lain pihak pada penelitian eksperimen pembelajaran biologi di SMA, [1] melaporkan bahwa potensi pembelajaran kooperatif TPS yang digabung dengan STAD, TPS

serta STAD memiliki potensi yang lebih besar dalam memberdayakan kemampuan berpikir kritis dibanding pembelajaran konvensional. Demikian pula pada penelitian eksperimen pembelajaran IPA biologi di SMP, [18] melaporkan bahwa potensi pembelajaran kooperatif script yang digabung dengan strategi metakognitif serta pembelajaran reciprocal teaching yang digabung dengan strategi metakognitif maupun pembelajaran kooperatif script, lebih tinggi dibanding pembelajaran reciprocal teaching maupun yang konvensional. Atas dasar penelitian eksperimen pembelajaran IPA biologi di SMP, [19] melaporkan bahwa pembelajaran kooperatif snowballing paling berpotensi memberdayakan keterampilan berpikir kritis, dibanding pembelajaran kooperatif Number Head Together maupun yang konvensional.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, pada *Project Based Learning*, pembelajaran dirancang agar pebelajar dapat melakukan penyelidikan atau tugas lain secara mandiri dalam pola proyek. Pada pembelajaran semacam ini para pelajar memiliki keleluasaan merancang dan melaksanakan rencana pembelajarannya. Dengan demikian para pebelajar terus menerus dituntut untuk berpikir tinggi termasuk berpikir kreatif. Pembelajaran kooperatif GI memang lazim dilakukan dalam pola proyek. Di peringkat Perguruan Tinggi S1, [20] melaporkan bahwa ***Project Based Learning*** lebih tinggi potensinya memberdayakan keterampilan berpikir tinggi (analisis, evaluasi, dan mencipta) para pebelajar dibanding pembelajaran konvensional pada perkuliahan Avertebrata. Di lain pihak pada penelitian eksperimen pembelajaran biologi di SMA, [21] melaporkan bahwa Project Based Learning terbukti jauh lebih berpotensi memberdayakan keterampilan berpikir kritis dibanding pembelajaran konvensional.

Selain strategi-strategi pembelajaran yang direkomendasikan atau yang terkait dengan pembelajaran kontekstual yang berpotensi memberdayakan kemampuan berpikir pebelajar, sebenarnya ada juga strategi atau pola pemberdayaan lain yang berpotensi. Berikut ini akan dikemukakan 3 macam strategi/pola pembelajaran-pembelajaran yang berpotensi semacam itu. Ketiga strategi/pola pembelajaran itu adalah pembelajaran dengan peta konsep, pembelajaran dengan pola PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan), dan

pembelajaran dengan pola **RQA (Reading Questioning and Answering)**.

Pada pembelajaran dengan peta konsep, pebelajar membangun keterkaitan antara berbagai konsep bahan pembelajaran. Para pelajar dapat membangun keterkaitan-keterkaitan itu secara individual maupun secara berkelompok. Melalui strategi pembelajaran semacam itu sebenarnya para pebelajar selalu digiring untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antar konsep, bahkan antar di berbagai jenjang, dari yang paling umum ke yang paling khusus. Melalui peta konsep para pelajar dapat membangun pemahaman yang bersifat konseptual, dan dengan demikian para pelajar dapat mencapai hasil belajar kognitif atas, yaitu berpikir kreatif. Pembelajaran dengan peta konsep memegang peranan penting dalam belajar bermakna. Pembelajaran dengan peta konsep ini (berkelompok) yang dikemukakan oleh David Brown, antara lain mengacu kepada *meaningfull learning* Ausubel. Terkait pembelajaran dengan peta konsep dilaporkan bahwa pembelajaran kontekstual dengan peta konsep dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi para pelajar SMP [22] dilaporkan pula bahwa pembelajaran kontekstual dengan peta konsep berkelompok pada siswa berkemampuan awal tinggi berpengaruh paling baik meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pebelajar. Melalui PTK telah dilaporkan juga sebelumnya bahwa peta konsep dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan hasil belajar siswa SMA, serta meningkatkan persentase ketuntasan belajar [23].

Pada pembelajaran lain yang juga sudah terbukti sangat memberdayakan kemampuan berpikir siswa adalah pembelajaran berpola PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan). Pembelajaran berpola PBMP ini disebut juga berpola TEQ (*Thinking Empowerment by Questioning*). Pola pembelajaran ini saya kembangkan sejak tahun 1985 dan sampai sekarang masih terus dikaji melalui berbagai penelitian, baik penelitian skripsi mahasiswa S1 (Biologi Universitas Negeri Malang, Biologi Universitas Negeri Surabaya, Kimia Universitas Negeri Malang, dan Geografi Universitas Negeri Malang), tesis S2 (IPA Universitas Negeri Surabaya), Disertasi (Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang), maupun penelitian-penelitian profesional dosen berupa PTK maupun penelitian

eksperimental, baik penelitian berdana DIK maupun yang berdana besar *multiyears* yang tergolong riset unggulan. Hasil penelitian yang terkait pembelajaran berpola PBMP serta hal-hal lain yang terkait sudah disosialisasikan dalam dua makalah nasional (di Yogyakarta dan di Malang) dan tiga makalah di Malaysia (Kualalumpur dan Pulau Pinang).

Penelitian-penelitian yang dilakukan terkait pembelajaran berpola PBMP di Biologi Universitas Negeri Malang antara lain oleh [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]. Sebagian penelitian itu tergolong PTK, akan tetapi sebagian lagi adalah penelitian eksperimen; sebagian mengkaji pengaruh pembelajaran berpola PBMP (termasuk yang digabung dengan strategi pembelajaran yang lain) terhadap kemampuan berpikir maupun pemahaman konsep, tetapi sebagian mengkaji hubungan antara kemampuan berpikir dan pemahaman konsep, dan sebagainya. Terkait pengaruh pembelajaran berpola PBMP tersebut (pada PTK maupun penelitian eksperimen), lebih dari 90% terbukti melaporkan potensi pemberdayaan berpikir yang demikian tinggi. Terkait penelitian eksperimen disertasi di SMP, [32] melaporkan bahwa pembelajaran IPA Biologi yang menggunakan PBMP terbukti paling berpotensi memberdayakan kemampuan penalaran para pebelajar, dibanding pembelajaran yang menggunakan pertanyaan pebelajar, pembelajaran yang menggunakan kartu-kartu pertanyaan yang disiapkan guru maupun pembelajaran konvensional.

Pada pembelajaran berpola PBMP, tidak ada proses pembelajaran yang berlangsung secara informatif; seluruhnya dilakukan melalui rangkaian atau jalinan pertanyaan yang telah dirancang secara tertulis. Pada pembelajaran yang didukung oleh kegiatan praktikum sekalipun, pola pembelajaran itu tetap dipertahankan, sekalipun untuk operasionalisasi kegiatan praktikum dibutuhkan pula perintah-perintah teknis. Gramatika Bahasa Indonesia yang digunakan harus selalu benar. Pertanyaan tentang hal yang sama, dapat diulang dan dirumuskan dari sudut pandang berbeda-beda; dan satu konsep & subkonsep dikaji sebanyak-banyaknya sesuai dengan tingkat perkembangan dari yang bersifat umum ke yang khusus atau sebaliknya (asalkan konsisten) dalam alur

pikir yang logis berurutan. Struktur lembar siswa (LS) adalah: Pengantar, Sediakan, Lakukan (kegiatan Diskusi/Kerja Kelompok/Demonstrasi dan Renungan), Pikirkan, Asesmen, dan Arahan.

Pelaksanaan pembelajaran berupa PBMP ternyata sejalan dengan gagasan pembelajaran IPA dari [52] yang masih terkait dengan *teaching science the way student learn*. Dikatakan bantulah mereka berpikir, bantulah mereka merumuskan pertanyaan, bantulah mereka mencari jawaban pertanyaan; kata operatif adalah bantulah dan bukan buatlah atau ceritakan, karena peserta didik harus menjadi partisipan pada pembelajarannya, dan bukan hanya sebagai penerima keinginan guru. Demikian pula pembelajaran berupa PBMP tersebut, sejalan dengan premis yang menyatakan bahwa peserta didik dapat belajar lebih banyak jika kita tidak banyak mengajarkan mereka. Sebagaimana diketahui [53] premis tersebut merupakan dasar teknik pembelajaran kooperatif (diberi nama pendekatan “*mind-son*”).

Melihat dampaknya, pembelajaran berupa PBMP ternyata juga memenuhi makna belajar yang dikemukakan [54]. Dikatakan bahwa kita dapat mendefinisikan belajar sebagai akuisisi dan internalisasi pengetahuan dan keterampilan. Dampak pelaksanaan pembelajaran berupa PBMP yang terbukti sangat membantu perkembangan penalaran peserta didik tersebut ternyata sama dengan dampak pembelajaran yang mengandalkan instruksi yang berupa permasalahan sebagaimana yang dilaporkan [55]. Dikatakan bahwa peserta didik yang mengalami pembelajaran semacam itu lebih unggul menguasai pengetahuan serta lebih mampu memahami proses-proses ilmiah jika dibandingkan dengan peserta didik pada pembelajaran yang mengandalkan pendekatan pembelajaran/buku yang tradisional. Dampak pembelajaran berupa PBMP seperti tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh [7]. Dikatakan bahwa pemikiran kritis dapat dikembangkan melalui aktivitas yang tepat semacam pengajuan pertanyaan ataupun pendekatan inkuiri.

Pola atau strategi pembelajaran **RQA (Reading, Questioning and Answering)**. telah saya kembangkan dan implementasikan sejak 2007, dan sudah pernah dikaji melalui suatu penelitian eksperimental untuk penulisan tesis salah seorang dosen Pend. Biologi UNM bimbingan saya. Sintaks strategi pembelajaran RQA adalah berupa a)

penugasan membuat pertanyaan substansial tertulis tentang sesuatu topik atau subtopik; penugasan membuat pertanyaan dapat didahului dengan pembuatan ringkasan bila diperlukan, b) penugasan menjawab pertanyaan yang telah dibuat secara tertulis, c). Penugasan mempresentasikan ringkasan (jika ada), pertanyaan dan jawaban yang telah dibuat dalam rangka diskusi. Tiap produk penugasan dikumpulkan untuk dinilai. Penugasan pada strategi RQA tsb. dapat dilaksanakan secara individual maupun berkelompok. Di akhir perkuliahan dosen memberikan kesempatan bertanya kepada para mahasiswa tentang segala materi yang telah didiskusikan, dan menjelaskannya.

Pola/strategi pembelajaran RQA sangat diyakini berpotensi memberdayakan keterampilan berpikir tinggi, karena hasil penelitian eksperimental Bahri telah mengungkap potensi pembelajaran itu memberdayakan keterampilan metakognitif, dibandingkan potensi pembelajaran konvensional yang mengandalkan ceramah. Sebagaimana diketahui, keterampilan metakognitif dan keterampilan berpikir tinggi saling berhubungan [56].

Memberdayakan Keterampilan Metakognitif selama Pembelajaran Sains

Pemberdayaan keterampilan metakognitif selama pembelajaran dapat dilakukan melalui pembiasaan strategi belajar metakognitif kepada para pelajar, maupun melalui implementasi strategi pembelajaran yang sesuai. Dalam hubungan ini perlu digaris-bawahi bahwa strategi belajar yang dimaksud disini berbeda dari strategi pembelajaran. Konsep strategi belajar metakognitif disini adalah strategi yang digunakan peserta didik atau pebelajar dalam kegiatan pembelajarannya, sedangkan sebagaimana lazimnya strategi pembelajaran diimplementasikan oleh guru selama proses pembelajaran.

1. Pemberdayaan Keterampilan Metakognitif selama Pembelajaran melalui Strategi Belajar

Para pebelajar dapat diajar atau dilatih strategi-strategi belajar metakognitif untuk membantu keberhasilan kegiatan pembelajarannya. Menurut [57] atas dasar Scraw & Moshman (1995), pebelajar dapat diajari strategi-strategi untuk mengakses sendiri

pemahamannya, memperkirakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari sesuatu, serta memilih suatu rencana efektif untuk belajar atau menyelesaikan masalah. Dinyatakan pula bahwa strategi bertanya terbukti efektif untuk mengajarkan keterampilan metakognitif, yang terkait **siapa, apa, dimana, dan bagaimana**. Dikemukakan lebih lanjut atas dasar Thomas & Robinson (1972), Mastropieri & Scruggs (1992), Schumacher & Deshler (1992), strategi belajar yang menolong para pelajar untuk belajar secara umum maupun program yang berhasil menolong pebelajar untuk belajar strategi *learn how to learn* antara lain **note-taking, underlining, summarizing, outlining** dan **mapping**, serta **memorizing**,

Ada perbedaan mendasar antara strategi kognitif dan strategi metakognitif: strategi kognitif membantu anak mencapai sasaran melalui aktivitas yang dilakukan, sedangkan strategi metakognitif membantu anak memberikan informasi mengenai aktivitas atau kemajuan yang dicapai [58]. Strategi metakognitif dan strategi kognitif dapat saja tumpang tindih. Jelaslah bahwa strategi kognitif digunakan untuk menolong seseorang mencapai suatu tujuan tertentu (misalnya memahami sesuatu naskah, sedangkan di lain pihak strategi metakognitif digunakan untuk memastikan/meyakinkan (*ensure*) bahwa tujuan itu telah dicapai [59]. Pengalaman-pengalaman metakognitif biasanya mendahului atau mengikuti suatu kegiatan kognitif, dan sering muncul bilamana kegiatan kognitif gagal.

[60] menyatakan bahwa strategi metakognisi adalah strategi yang digunakan untuk mengetahui proses kognitif seseorang dan caranya berpikir tentang bagaimana informasi diproses. Dalam hubungan ini menurut [61], strategi metakognitif dasar adalah: (a) menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan terdahulu, (b) memilih strategi berpikir secara sengaja, dan (c) merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses berpikir.

Strategi untuk mengembangkan tingkah laku metakognitif menurut [6] adalah: (a) identifikasi apa yang kamu ketahui dan yang tidak kamu ketahui, (b) memperbincangkan berpikir, (c) membuat jurnal berpikir, (d) perencanaan dan pengaturan diri, (e) mewawancarai proses berpikir, dan (f) evaluasi diri. Di lain pihak, [62] melaporkan bahwa “*A process used to develop and assess metacognition is described using the example of writing*”. Demikian

pula sekalipun didasarkan pada kajian yang terkait pengetahuan komputer, berikut ini dikemukakan keterampilan-keterampilan metakognitif khusus yang perlu ditambah (diberdayakan). Keterampilan-keterampilan itu adalah *mental models and awareness, analogical transfer, problem decomposition and organization, and hierarchical organization* [63].

2. Memberdayakan Keterampilan Metakognitif melalui Strategi Pembelajaran

Melatih anak menguasai keterampilan metakognitif bisa dilakukan sedini mungkin, antara lain dengan meminta anak bercerita tentang pengalaman yang baru dialami, termasuk bisa juga melemparkan pertanyaan-pertanyaan sederhana misalnya tentang bacaan yang baru dibaca [58].

Terkait strategi pelatihan metakognitif, menggunakan “*training approach*” maupun “*relationship to lesson content*”. (<http://www.usak.ca/education/coursework/80papers/adkins.SEC/.H TM>). Dinyatakan lebih lanjut bahwa strategi pelatihan metakognitif dapat tercakup atau terintegrasi dalam suatu pelajaran dan dapat diajarkan secara terpisah; dan dalam hubungan dengan perancangan isi pelajaran, strategi pelatihan itu dapat tergantung atau tidak tergantung kepada isi pelajaran. Oleh karena itu dikenal *embedded content-dependent strategies, embedded content-independent strategies, detached content-dependent strategies, dan detached content-dependent strategies*.

Sangat sering terjadi bahwa pengajaran metakognitif terjadi/berlangsung dalam program pengajaran berstrategi kognitif [59]. Dewasa ini sudah dilaporkan beberapa strategi pembelajaran yang berpotensi memberdayakan keterampilan metakognitif. Berikut ini dikemukakan laporan tentang potensi beberapa strategi pembelajaran itu dalam memberdayakan keterampilan metakognitif.

- a. Pada pembelajaran berbasis masalah, guru menggabung (dapat) ide inkuiri, metakognisi, dan modeling, dengan cara memodelkan ide inkuiri yang metakognitif [64]. Berikut ini ditunjukkan satu contoh perangkat pertanyaan inkuiri metakognitif.
 - a “*What do I know about this situation that would help me solve the problem?*”
 - b “*What do I need to find out?*”

- c *“How could I find out?”*
- d *“Is this like any other problem situation I’ve been in before?”*
- e *“Is any part of the problem situation the same or similar?”*
- f *“What is my goal? What am I trying to accomplish?”*
- g *“What steps will I have to take to reach my goal? What are my subgoals?”*

Jika pertanyaan-pertanyaan itu dibaca secara keras oleh guru (dimodelkan), maka pada saat itu ketiga ide tadi akan tergabung. Terkait pembelajaran berbasis masalah dan inkuiri, [24] melaporkan bahwa kedua strategi pembelajaran tersebut memiliki potensi memberdayakan keterampilan metakognitif siswa SMA yang tidak berbeda signifikan, tetapi lebih berpotensi dibanding strategi-strategi pembelajaran seperti seperti TPS, TPS + PBMP, dan jigsaw.

2. [65] melaporkan bagaimana dia menggunakan peta konsep untuk menolong para pebelajar dewasa menjadi lebih sadar dan memahami proses belajarnya.
3. [66] menggunakan strategi-strategi *self-regulated learning* untuk menolong para perawat memperbaiki keterampilan metakognitif, sehingga mereka dapat berfungsi lebih efektif.
4. [65], [66] dan [67] sama-sama memperlihatkan bagaimana pembelajaran konstruktivistik yang menekankan refleksi diri dan konstruksi (pembentukan) pengetahuan dapat berperan terhadap keterampilan metakognitif.
5. *How can metacognition be taught? Different approaches will suit different age levels, contexts and the personal preferences of educators. The two examples are: Structured discussion linked to a story and Introduction to a model of thinking.*
6. Pemecahan masalah dan kegiatan penelitian pada seluruh subyek memberi kesempatan untuk pengembangan strategi-strategi metakognitif [6].
7. Keterampilan metakognitif terbukti dapat juga dibelajarkan melalui strategi pembelajaran kooperatif, sekalipun perlu diperhatikan interaksi faktor-faktor tertentu [68]. Pembelajaran-pembelajaran kooperatif mendorong atau memberdayakan perkembangan pembelajaran metakognitif [69]. Alasannya adalah karena strategi-strategi pembelajaran itu terpusat atau

bersangkut paut langsung dengan proses pembelajaran, yang meliputi evaluasi kerja kelompok oleh tiap anggota kelompok, demikian pula asesmen dan perbaikan interaksi sosial, maupun upaya-upaya untuk memperbaiki penampilan tiap anggota kelompok. Sebagai contoh misalnya, *Scripted Cooperation*, suatu pembelajaran kooperatif yang dikembangkan terdiri dari 5 komponen generik, terbukti berguna pada proses metakognisi; kelima komponen generik itu adalah:

- a) membagi teks (naskah) menjadi bagian-bagian diskrit dan bermakna,
- b) dua anggota dari suatu pasangan membaca bagian demi bagian dari teks itu pada suatu waktu,
- c) meminta satu anggota mengingat dan menyebutkan kembali rincian informasi secara tepat,
- d) meminta anggota kelompok lain dari pasangan itu untuk memantau rincian informasi yang disebutkan kembali tersebut untuk mendeteksi kesalahan ataupun kemungkinan adanya informasi yang hilang (kegiatan pada butir 3 dan 4 dilakukan secara bergantian untuk seluruh teks),
- e) dua anggota pasangan itu mengungkap informasi ini dengan metode-metode yang dapat mencakup pengembangan analogi dan pemunculan gambaran-gambaran atau makna.

Terkait potensi pembelajaran kooperatif memberdayakan keterampilan metakognitif, Costa dan O'Leary mengidentifikasi beberapa kajian yang memperlihatkan bahwa para siswa dapat mempelajari keterampilan-keterampilan metakognitif lebih baik, bilamana bekerja dalam kelompok-kelompok kooperatif. Demikian pula [16] juga mengidentifikasi beberapa alasan praktis mengapa pembelajaran kooperatif, khususnya yang menggunakan pendekatan kontroversi konstruktif, mendorong atau memberdayakan metakognisi siswa. Sebagaimana yang telah dikemukakan, [24] juga melaporkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif TPS, jigsaw, bahkan TPS yang dipasangkan dengan strategi pembelajaran PBMP terbukti juga berpotensi memberdayakan keterampilan metakognitif siswa SMA. Pada pembelajaran biologi di SMA, [70] melaporkan bahwa pembelajaran kooperatif TPS yang digabung dengan strategi

- belajar metakognitif, terbukti lebih berpotensi memberdayakan keterampilan metakognitif pebelajar, dibanding pembelajaran konvensional, pembelajaran kooperatif jigsaw, TPS, serta jigsaw yang digabung strategi belajar metakognitif. Demikian pula pada pembelajaran biologi di SMA, [71] melaporkan bahwa pembelajaran kooperatif TPS yang digabung dengan strategi belajar metakognitif, terbukti lebih berpotensi memberdayakan keterampilan metakognitif pebelajar, dibanding pembelajaran jigsaw yang digabung dengan strategi belajar metakognitif, pembelajaran jigsaw, maupun yang konvensional.
8. *Reciprocal teaching*, suatu metode untuk menolong siswa yang tidak mampu mempelajari strategi-strategi metakognitif untuk membaca, juga sudah terbukti berhasil diterapkan pada orang dewasa yang tidak mampu.
 9. Pada pembelajaran biologi di SMA, [72] melaporkan bahwa pembelajaran reciprocal teaching, gabungan reciprocal teaching dan pembelajaran jigsaw, serta pembelajaran jigsaw, terbukti lebih berpotensi memberdayakan keterampilan metakognitif pebelajar, dibanding pembelajaran konvensional. Demikian pula pada pembelajaran IPA biologi di SMP, [18] menyatakan bahwa reciprocal teaching yang digabung dengan strategi belajar metakognitif terbukti paling berpotensi memberdayakan keterampilan metakognitif pebelajar, dibanding pembelajaran kooperatif script yang digabung dengan strategi belajar metakognitif serta reciprocal teaching (yang menempati urutan kedua), maupun pembelajaran kooperatif script dan yang konvensional di urutan ketiga dan keempat.
 10. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembelajaran RQA pada perkuliahan biologi umum di UNM terbukti memiliki potensi memberdayakan keterampilan metakognitif yang lebih tinggi dibanding potensi pembelajaran konvensional yang mengandalkan ceramah. Memperhatikan sintaks strategi pembelajaran RQA seperti yang telah disebutkan, sangat beralasan bahwa strategi pembelajaran ini berpotensi besar memberdayakan keterampilan metakognitif. Alasannya adalah bahwa agar dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan substansial tentang sesuatu topik atau subtopik, seseorang

pebelajar terlebih dahulu harus cermat membaca materi terkait, meringkas atau merangkum untuk menangkap makna utama atau substansial. Lebih lanjut atas dasar makna utama yang telah ditangkap itu barulah para pebelajar siap menyusun pertanyaan-pertanyaan substansial, dan tentu saja juga mudah merumuskan jawabannya. Potensi RQA untuk memberdayakan keterampilan metakognitif pebelajar secara teoritik akan semakin besar, manakala pelaksanaan sintaks pembelajaran tsb. berlangsung secara berkelompok. Sebagaimana diketahui pembelajaran kooperatif pada umumnya berpotensi memberdayakan keterampilan metakognitif para pebelajar [68].

Pengalaman Berupaya Memberdayakan Keterampilan Berpikir termasuk khususnya Keterampilan Metakognitif Mahasiswa selama Perkuliahan

Sejak lama saya ditugasi membina mata kuliah Genetika I, Genetika II, Teknik Analisis Biologi Molekuler (TABM) dan Biometri di S1 Jurusan Biologi FMIPA, maupun Genetika dan Statistik Inferensial di S2, serta Desain dan Analisis data, Seminar Kajian & Analisis, dan Studi Mandiri 2 di S3 Prodi Pendidikan Biologi PPS Universitas Negeri Malang. Selama memfasilitasi perkuliahan-perkuliahan itu, saya selalu berupaya agar keterampilan berpikir termasuk khususnya keterampilan metakognitif para mahasiswa pada strata-strata tersebut diberdayakan. Berikut ini dikemukakan pengalaman berupaya memberdayakan keterampilan berpikir khususnya keterampilan metakognitif selama perkuliahan Genetika I, Genetika II serta TABM pada S1.

1. Pengalaman Terkait Perkuliahan Genetika I dan Genetika II S1 Biologi dan Pendidikan Biologi

Pada perkuliahan Genetika I dan Genetika II, strategi pembelajaran utama yang digunakan untuk perkuliahan teori adalah **RQA (Reading, Questioning and Answering)**. Selain penerapan strategi pembelajaran RQA, pada kedua perkuliahan itu

diimplementasikan juga strategi belajar berupa tugas meringkas (*summarizing*).

Dalam hubungan dengan upaya memberdayakan keterampilan metakognitif para pebelajar perkuliahan genetika I dan genetika II dengan atau melalui strategi pembelajaran RQA seperti tsb., jelas terlihat bahwa upaya pemberdayaan keterampilan metakognitif sengaja dilakukan melalui implementasi strategi kognitif, dan dalam hal ini terintegrasi dalam suatu pelajaran, yang tidak tergantung kepada isi pelajaran. Sebagaimana yang telah dikemukakan, Osman dan Hannafin (1992) memang menyatakan bahwa pemberdayaan keterampilan metakognitif dapat dilakukan terintegrasi dalam suatu mata pelajaran, dan bisa juga tidak tergantung kepada isi pelajaran.

Tugas meringkas yang juga diterapkan pada perkuliahan genetika I dan genetika II, dilaksanakan terkait dengan topik atau subtopik berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing (Inggris). Hasil tugas meringkas itu dipresentasikan untuk didiskusikan oleh seluruh peserta kuliah. Penugasan membuat ringkasan itu dapat juga digabung dengan penugasan membuat pertanyaan yang terkait dengan strategi pembelajaran RQA. Apabila demikian maka hasil penugasan yang dikumpulkan adalah dua macam, yaitu ringkasan serta pertanyaan dan jawabannya; dan kedua hasil penugasan itu sama-sama dipresentasikan untuk didiskusikan.

Memperhatikan pelaksanaan tugas meringkas sebagaimana yang telah dikemukakan, sangat diyakini bahwa pola pembelajaran semacam ini juga sangat berpotensi memberdayakan keterampilan metakognitif para pebelajar. Sebagaimana yang telah dikemukakan, meringkas atau *summarizing* adalah salah satu strategi belajar yang dapat memberdayakan keterampilan metakognitif pebelajar. Potensi itu diyakini semakin besar tatkala tugas meringkas itu dilaksanakan bergabung dengan strategi pembelajaran RQA.

Sebagaimana diketahui tugas meringkas bukan tergolong strategi pembelajaran, tetapi tergolong strategi belajar yang dijalankan para pebelajar. Pada pendapat kami tugas meringkas,

sekalipun juga memperlihatkan karakter strategi kognitif, tetapi lebih tepat tergolong strategi metakognitif. Dengan demikian penggunaan tugas membuat ringkasan pada kedua perkuliahan itu, sebenarnya merupakan upaya pemberdayaan keterampilan metakognitif melalui strategi metakognitif.

Perkuliahan genetika I dan genetika II S1 di Jurusan Biologi Universitas Negeri Malang dilengkapi dengan kegiatan praktikum berkelompok (jumlah anggota kelompok antara 2-3 orang) dalam pola proyek. Kegiatan praktikum dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan sendiri oleh tiap kelompok yang bersangkutan, apakah di pagi, siang atau bahkan sore hingga malam hari, pada hari kerja ataupun pada hari libur. Dalam hal ini praktikum dilaksanakan seolah sebagai proyek penelitian.

Berkenaan dengan praktikum genetika I dan genetika II itu, tidak disediakan petunjuk praktikum. Oleh karena itu atas dasar gambaran umum dan singkat yang diterima, tiap kelompok praktikum akan menetapkan sendiri judul, permasalahan, tujuan, prosedur kerja, serta cara analisis data, di bawah koordinasi para asisten. Atas dasar kerja praktikum tiap kelompok akan menyusun laporan praktikum dalam pola atau karakter suatu laporan penelitian.. Laporan praktikum itu lebih lanjut dipresentasikan dalam forum seminar yang sengaja diadakan untuk kepentingan itu. Atas dasar presentasi tsb. berlangsunglah diskusi yang melibatkan seluruh kelompok.. Pada akhirnya laporan-laporan praktikum dikumpulkan untuk dinilai.

Memperhatikan karakter pelaksanaan praktikum perkuliahan genetika I dan genetika II semacam itu, sangat jelas terlihat bahwa para pebelajar selalu "dipaksa" untuk berpikir tinggi. Oleh karena itu sebenarnya sarana pelaksanaan praktikum seperti itu sangat berpotensi memberdayakan keterampilan metakognitif pebelajar, sebagaimana yang tampak pada pola pikir [56], keterampilan berpikir tinggi dan keterampilan metakognitif saling berkaitan.

2. Pengalaman Terkait Perkuliahan Teknik Analisis Biologi Molekuler (TABM) S1 Biologi

Strategi pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan TABM bukanlah RQA sebagaimana yang diterapkan pada perkuliahan genetika I dan II. Pada perkuliahan yang pertama strategi pembelajaran yang digunakan adalah **Direct Instruction** atau **DI**. Pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya tidak digunakan satu atau lebih dari satu strategi pembelajaran yang memiliki identitas nama tertentu sekalipun memiliki sintaks yang jelas. Dalam hal ini perkuliahan yang akan datang (satu minggu berikutnya) selalu didahului pemberian tugas berkelompok untuk membuat makalah berupa informasi teoritik dan informasi aplikatif terkait dengan setiap topik maupun tiap teknik kajian molekuler; sebagian kelompok ditugasi menulis makalah teoritik, sedangkan kelompok lainnya menulis makalah aplikasinya. Sebagai contoh misalnya dalam hubungannya dengan teknik kajian molekuler yang menggunakan RFLP, sebagian kelompok menyusun makalah teoritik RFLP, sedangkan kelompok lainnya menyusun makalah tentang aplikasi teknik kajian RFLP pada tumbuhan, hewan, dan mikroba.

Rujukan penulisan makalah teoritik maupun yang aplikatif adalah yang berupa hasil akses dari internet ataupun sumber-sumber lain; khusus yang berkenaan dengan penulisan makalah aplikatif, rujukan dari internet ataupun sumber lain itu, adalah yang berupa laporan hasil penelitian. Hasil pelaksanaan tugas oleh tiap kelompok berupa makalah lebih lanjut dipresentasikan dan didiskusikan.

Pada satu bulan terakhir dari masa perkuliahan para pebelajar ditugasi menulis proposal penelitian molekuler secara berkelompok. Penugasan pertama berupa curah gagasan/ide tentang penelitian tsb. yang diajukan secara tertulis, dipresentasikan dan didiskusikan. Atas dasar masukan yang diperoleh, tiap kelompok mengembangkan penulisan proposal untuk diserahkan dalam selang waktu satu minggu ke depan. Proposal-proposal yang sudah diserahkan selanjutnya dipresentasikan dan didiskusikan pada perkuliahan-perkuliahan

terakhir. Atas dasar masukan-masukan selama presentasi dan diskusi, tiap kelompok melakukan perbaikan penyempurnaan untuk selanjutnya diserahkan.

Perkuliahan TABM yang kami ampu di Jurusan Biologi Universitas Negeri Malang tidak dilengkapi dengan pelaksanaan praktikum sebagaimana halnya dengan perkuliahan genetika I dan genetika II. Kenyataan itu disebabkan karena kendala sarana dan prasarana. Oleh karena itu di akhir semester perkuliahan ini dilengkapi dengan kunjungan kerja ke laboratorium molekuler yang dapat meragakan kajian molekuler dengan teknik molekuler tertentu.

Pola pelaksanaan perkuliahan TABM sebagaimana yang telah dipaparkan diyakini sangat berpotensi memberdayakan keterampilan berpikir khususnya keterampilan metakognitif para pebelajar. Melalui perkuliahan semacam itu para pebelajar memang "dipaksa" dan dilatih untuk berolah pikir khususnya olah pikir tinggi, yang pada gilirannya akan memberdayakan keterampilan metakognitif sebagaimana yang dinyatakan oleh [56].

Pengalaman Memberdayakan Keterampilan Berpikir Mahasiswa melalui Proses Pembimbingan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi.

Setiap kali membimbing penulisan karya tulis skripsi, tesis dan disertasi selama ini saya selalu sangat menggaris-bawahi kerangka berpikir. Oleh karena itu biasanya saya berupaya membiasakan para mahasiswa terlebih dahulu merancang kerangka tulisan bagian demi bagian, sebelum mulai menulisnya. Dalam hal ini biasanya konsultasi pertama kali masih terbatas pada kerangka yang dirancang terkait bagian demi bagian itu. Apabila kerangka sesuatu bagian (misalnya suatu bab) sudah baik maka proses penulisan itu siap dilakukan, dan hasil tulisan itu bab itu akan memasuki tahap konsultasi selanjutnya. Secara teoritik pola pembiasaan penulisan semacam itu diyakini juga berpotensi memberdayakan keterampilan berpikir, khususnya melatih mahasiswa terbiasa berpikir mengikuti sesuatu kerangka atau sistematika yang runtut dan baik.

Catatan Penting Terakhir

Mari kita berdayakan keterampilan berpikir anak bangsa melalui pembelajaran sains dengan keyakinan bahwa jika keterampilan berpikir sudah diberdayakan, para anak bangsa akan lebih berpotensi mempelajari sains sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya, demi kemaslahatan hidup manusia. Di lain pihak kita juga menjadi lebih yakin bahwa dengan keterampilan berpikir yang sudah diberdayakan, para anak bangsa akan lebih mampu menjadi manusia bebas, merdeka dan menjadi diri mereka sendiri, bukan menjadi orang lain. Dalam hubungan ini mari kita renungkan **puisi pembebasan Khalil Gibran** berikut ini, karena demikianlah anak-anak memang berbeda dari orang tuanya, dan tentu saja berbeda dari gurunya.

Anak-anakmu

Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu

Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri

Mereka terlahir melalui engkau tapi bukan darimu

Meskipun mereka ada bersamamu tapi mereka bukan milikmu

Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu

Karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri

Engkau bisa merumahkan tubuh-tubuh tapi bukan jiwa mereka,

Karena jiwa-jiwa itu tinggal di rumah hari esok, yang tak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi

Engkau bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka sepertimu

Karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu

Engkau adalah busur-busur tempat anak-anakmu menjadi anak-anak panah yang hidup diluncurkan

Sang pemanah telah membidik arah keabadian, dan ia meregangkanmu dengan kekuatannya sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh
Jadikanlah tarikan tangan sang pemanah itu sebagai kegembiraan
Sebab ketika ia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka ia juga mencintai busur yang telah diluncurkannya dengan sepenuh kekuatan.

Referensi

- [1] Muhfahroyin, "Pengaruh Strategi Pembelajaran Integrasi STAD & TPS dan Kemampuan Akademik terhadap Hasil Belajar Kognitif Biologi, Kemampuan Berpikir Kritis, dan Keterampilan Proses Siswa SMA di Kota Metro," PPS Universitas Negeri Malang, 2009.
- [2] R. . Slavin, *Educational Psychology: Theory into Practice*. Boston: Allyn & Bacon, 1997.
- [3] O.-S. Tan, *Enhancing Thinking Through Problem Based Learning Approaches*. Singapore: Thomson Learning, 2004.
- [4] N. R. Council, "Explore Inquiri and The National Science Education Standard. A Guide for Teaching and Learning," 2000.
- [5] A. . Lawson, "Development of Reasoning Among College Biology Student A Review of Research," *JCST*, vol. XXI (6) Ma, pp. 338–344, 1992.
- [6] S. Blakey, "Developing Metacognition," *Clear. Inf. Resour. Syracuse*, vol. NY:ED 3272, 1990.
- [7] L. . Crow, "The Nature of Critical Thinking," *J. Coll. Sci. Teach.*, vol. November, pp. 114–116.
- [8] I. G. A. N. Setiawan, "Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Strategi Inkuiri dan Pembelajaran Berdasarkan Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir dan Hasil Belajar Biologi Siswa SMP di Kecamatan Buleleng Bali," FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [9] Irwandi, "Pengaruh pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Biologi Melalui Strategi Inkuiri dan Masyarakat Belajar Pada Siswa dengan Kemampuan Awal Berbeda Terhadap Kecakapan Hidup, Minat, dan Hasil Belajar Kognitif di SMAN Kota Bengkulu," PPS Universitas Negeri Malang, 2007.

- [10] I. M. Nur M, *Pengajaran Berdasarkan Masalah*. Surabaya: Unesa University Press, 2000.
- [11] D. Hastings, "Case Study: Problem Based Learning and The Active Classroom," 2001.
- [12] S. W. Thomson, "Essential Components of Problem Based Learning for The K-12 Inquiry Science Instruction," 1998. <https://searchyahoo.com/search?p=problem+based+learning>.
- [13] Arnyana, "Pengembangan Model Belajar Berdasarkan Masalah dipandu Strategi Kooperatif serta Pengaruh Implementasinya terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pada Pelajaran Ekosistem," PPS Universitas Negeri Malang, 2004.
- [14] Paidi, "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi yang Mengimplementasikan PBL dan Strategi Metakognisi, serta Efektivitasnya terhadap Kemampuan Metakognisi, Pemecahan Masalah, dan Penguasaan Konsep Biologi Siswa SMA di Sleman Yogyakarta," PPS Universitas Negeri Malang, 2008.
- [15] T. . Lord, "Reasons for Using Cooperative Learning in Biology Teaching in Biology Teaching," *Am. Teach.*, vol. 63 (1), pp. 30–36, 2001.
- [16] E. . Johnson, *Contextual Teaching and Learning*. California: Corwin Press Inc, 2002.
- [17] Raharjo, "Pengembangan Strategi Pengajaran Berpusat Pada Siswa Terhadap Perkembangan Pola Berpikir Tinggi dan Rendah Hasil Belajar Siswa SMP," Universitas Negeri Malang, 2008.
- [18] Z. Warrouw, "Pengaruh Pembelajaran Metakognitif dengan Strategi Kooperatif Script dan Reciprocal Teaching Pada Kemampuan Akademik Berbeda, terhadap Kemampuan & Keterampilan Metakognitif, Berpikir Kritis, Hasil Belajar Biologi Siswa, serta Retensinya di SMPN Manado," PPM Universitas Negeri Malang.
- [19] E. Maasawet, "Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif Snowballing dan NHT Pada Sekolah Multi Etnis Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis, Hasil Belajar Kognitif Sains Biologi dan Sikap Sosial Siswa SMP Samarinda," PPS Universitas Negeri Malang, 2009.
- [20] E. Indrawati, "Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Tingkat

- Kemampuan Akademik terhadap Hasil Belajar Kognitif dan Kecakapan Hidup Mahasiswa Biologi FMIPA UM,” PPS Universitas Negeri Malang.
- [21] S. Mahanal, “Pengaruh Penerapan Perangkat Pembelajaran Deteksi Kualitas Sungai dengan Indikator Biologi Berbasis Proyek Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA di Kota Malang,” PPS Universitas Negeri Malang, 2009.
- [22] Makrina Tindangen, “Implementasi Pembelajaran Kontekstual Peta Konsep Biologi SMP Pada Siswa Berkemampuan Awal Berbeda di Kota Malang dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan Hasil Belajar Kognitif,” PPS Universitas Negeri Malang, 2006.
- [23] Chotimah, “Penggunaan Peta Konsep dalam Tatahan Belajar Tuntas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Konsep Sistem Ekskresi Siswa Kelas II SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang,” PPS Universitas Negeri Malang, 2004.
- [24] H. S. Corebima, A.D., Susilo, H., “Pengembangan Model Pembelajaran IPA Biologi SMP Konstruktivistik Kontekstual Berorientasi Life Skill dengan Pola PBMP di Kota dan Kabupaten Malang,” 2006.
- [25] P. Zubaidah, “Penerapan Pola PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Penalaran) pada Mata Kuliah Botani Tumbuhan Rendah untuk Menunjang Perkembangan Penalaran Formal Mahasiswa,” 2001.
- [26] E. S. S. dan S. Z. Sunarmi, “Pengembangan Penalaran Formal Mahasiswa dengan Penerapan Pola PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan) pada Mata Kuliah Botani Tumbuhan Tinggi di Jurusan Biologi UM,” 2001.
- [27] W. Jamilah, “Penerapan PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan) pada Siswa dengan Gaya Belajar Visual, Auditorial, dan Karakteristik terhadap Prestasi Belajar dan Tingkat Penalaran Siswa Kelas I SLTPN 2 Mojokerto,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2002.
- [28] F. Kusumastuti, “Penerapan Strategi Pembelajaran PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan),” Universitas Negeri Malang, 2002.
- [29] M. A. Maududi, “Pengaruh Penerapan Pembelajaran dengan Pola

- Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) Terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Kelas 1 SLTPN 2 Krucil Probolinggo,” 2002.
- [30] F. Rahmawati, “Hasil Belajar Biologi dengan Metode Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dan Metode Non PBMP pada Siswa yang Berkemampuan Awal Berbeda,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2002.
- [31] P. M. Junaidi, “No Title,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2003.
- [32] Hasruddin, “Penggunaan Pertanyaan dalam Tatanan Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Penalaran dan Hasil Belajar Biologi Siswa SMPN Kota Malang,” PPS Universitas Negeri Malang, 2004.
- [33] A. W. Hadiningtyas, “Penerapan Pola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dengan Model Student Team Achievement Division (STAD) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir dan Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas III SMPN 1 Lawang,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [34] P. U. Hasanah, “Peningkatan Kemampuan Berpikir dan Hasil Belajar Siswa Melalui Pola PBMP Metode Think Pair Share Pada Mata Pelajaran Biologi di SMP Negeri 1 Tumpang,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [35] D. E. Jayasastri, “Penerapan Pola Pembelajaran dengan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) Berbasis Peta Konsep Untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 2 SMP Islam Al-Ma’arif Singosari,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [36] K. Ma’arif, “Penerapan Pola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dengan Metode Guided Discovery Pada Mata Pelajaran Biologi Untuk Meningkatkan Penalaran dan Hasil Belajar Siswa Kelas 3 SMPN 1 Kepanjen,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [37] M. Makhdum, “Upaya Peningkatan Kemampuan Analisis, Sintesis dan Prestasi Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Pola PBMP dengan Kombinasi Metode Struktural Numberen Heads Together Pada Mata Pelajaran Biologi di SMA Negeri 2 malang,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [38] R. Melati, “Pengembangan Penalaran dan Hasil Belajar Melalui

- Penerapan Pola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) Metode Snowballing Pada Siswa Kelas 1 Semester 1 SMP Negeri 22 Malang,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [39] I. Oktrianawati, “Penerapan Pola PBMP dengan Metode Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi dan Hasil Belajar Siswa Biologi Kelas II SMP Shalahudding Malang,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [40] E. Susanti, “Penerapan Pembelajaran Berpola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) Melalui Team Accelerated Instruction (TAI) Untuk Meningkatkan Penalaran dan Hasil Belajar Siswa,” 2005.
- [41] Siti Umaroh, “Penerapan Pola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) Melalui Pembelajaran Kooperatif Model Jigsaw Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas II B SMPN 1 Pakisaji Malang,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [42] Yusi Anggriani, “Penerapan Pola PBMP Melalui ‘Cooperative Learning’ Model TGT (Teams Games-Tournament) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas III SMP Laboratorium UM,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [43] Shirley Diah Puspa Chandra, “Penerapan Pembelajaran Pola PBMP Menggunakan Strategi Kooperatif Model GI (Group Investigation) Terhadap Hasil Belajar Biologi dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 1 SMP Negeri 1 Bululawang,” FMIPA Universitas Negeri Malang, 2005.
- [44] Novita Ika Mariana, “Pengaruh Penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dengan Metode Jigsaw Terhadap Kemampuan Berpikir dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Islam Al Maarif 01 Singosari Malang,” 2006.
- [45] Iis Nikmatul Jannah, “Pengaruh Penerapan Pola PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan) dengan Metode Think Pair Share Terhadap Kemampuan Berpikir dan Hasil Belajar Siswa Berkemampuan Tinggi dan Rendah Pada Pembelajaran IPA Biologi Kelas VIII SMPN 1 Tumpang Kabupaten Mal,” 2006.
- [46] Sri Rahayu Rohmawati, “Pengaruh Pola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dengan Metode Jigsaw Terhadap Kemampuan Berpikir dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII

- Berkemampuan Tinggi dan Rendah di SMP Shalahuddin Malang,” 2006.
- [47] Anik Rini Yuanita, “Hubungan Antara Kemampuan Berpikir dan Hasil Belajar Pada Pembelajaran Biologi dengan Pola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dan Think Pair Share (TPS) di SMPN 18 Malang,” 2006.
- [48] G. Lumban, “Hubungan Antara Thinking Skill dan Academic Skill dengan Hasil Belajar Kognitif Pada Pembelajaran Biologi yang Menggunakan Pola Pembelajaran Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dalam Strategi Kooperatif Think Pair Share (TPS) di SMPN 22 Malang,” 2006.
- [49] N. Vivilia, “Pengaruh Penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dengan Metode Think Pair Share (TPS) Terhadap Pencapaian Kecakapan Akademik dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII SMPN 11 Malang,” 2006.
- [50] L. Muniroh, “Academic Life Skill Siswa Berkemampuan Tinggi dan Rendah Pada Pembelajaran IPA Biologi yang Menggunakan Pola PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan) dengan Strategi Jigsaw Pada Kelas VII SMPN 1 Bululawang Kabupaten Malang,” 2006.
- [51] P. Puspitasari, “Hubungan Antara Academic Life Skill (Kecakapan Akademik) dan Hasil Belajar Pada Pembelajaran Biologi dengan Pola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dan Think Pair Share (TPS) di SMP Negeri 1 Kepanjen,” 2006.
- [52] D. Bunce, “The Quite Revolution in Science Education Teaching Science The Way Students Learn,” *J. Coll. Sci. Teach.*, vol. XXV (3), pp. 169–171, 1996.
- [53] R. Ahern, “Applying Inquiry-Based and Cooperative Group Learning Strategies to Promote Critical Thinking,” *J. Coll. Sci. Teach.*, pp. 203–207, 1999.
- [54] D. . Woods, “Teaching & Learning: What Can Research Tell Us?,” *J. Coll. Sci. Teach.*, vol. XXV (3), pp. 229–232, 1996.
- [55] D.-S. Y. R.E & Huang, “An Alternative Approach to College Science Education for Nonscience Majors,” *J. Coll. Sci. Teach.*, vol. November, pp. 90–100, 1994.
- [56] D. . K. E. P.D, *Strategies for Teachers*. Boston: Allyn and Bacon, 1996.

- [57] R. . Slavin, *Educational Psychology*. Boston: Allyn and Bacon, 2000.
- [58] Kompas, “Waspada Kesulitan Belajar Pada Anak,” *12 Februari*, 2006.
- [59] J. . Livingston, “Metacognition: An Overview,” 1997. <http://www.gse.buffalo.edu/fas/shuel/cep564/metacog.htm>.
- [60] R. . Arends, *Classroom Instruction and Management*. New York: The Mc Grow Hill Company, Inc, 1997.
- [61] M. . Dirkes, “Metacognition: Students in Charge of Their Thinking,” vol. EJ 329 760, 1985.
- [62] R. . Liebler, “Assessing for Metacognition Competencies in an Adult Degree Completion Program Access to Quality and Success: Applying Principles of Good Practice AHEA 2000 Conference Proceedings,” *Adult High. Educ.*, vol. ED 446214, 2000.
- [63] W. . S. T.Blum, “Enhancing an Object Oriented Curriculum: Metacognitive Assessment and Training,” 1999.
- [64] J. . Howard, *Metacognitive Inquiry*. School of Education Elon University, 2004.
- [65] B. . W. Daley, “Facilitating Learning With Adult Students Through Concept Mapping,” *J. Contin. High. Educ.*, vol. 50, pp. 121–131, 2002.
- [66] R.Kuiper, “Enhancing Metacognition Through The Reflective Use of Self-Regulates Learning Strategies,” *J. Contin. Educ. Nurs.*, vol. 33, pp. 278–287, 2002.
- [67] M. . Peters, “Does Constructivist Epistemology Have a Place in Nurse Education,” *J. Nurs. Educ.*, vol. 39, pp. 166–170, 2000.
- [68] C. . McDonald, “Fomenting Metacognitive Skills Through Cooperative Learning in a Scientific Concept Learning Task Using Hypermedia,” Vanderbilt University.
- [69] N. Green, “What The Research Says About Cooperative Learning.”
- [70] Y. Miranda, “Pembelajaran Metakognisi dalam Strategi Kooperatif TPS dan Jigsaw serta Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa di SMAN Kalimantan Tengah,” PPS Universitas Negeri Malang, 2008.
- [71] S. Amnah, “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif TPS, Jigsaw, Kombinasi dengan Strategi Metakognitif dan Kemampuan Akademik terhadap Kesadaran Metakognitif, Keterampilan Metakognitif dan Hasil Belajar Kognitif Siswa di SMAN Kota

- Pekanbaru Riau,” PPS Universitas Negeri Malang, 2009.
- [72] Suratno, “Pengaruh Strategi Kooperatif Jigsaw dan Reciprocal Teaching Terhadap Keterampilan Metakognisi dan Hasil belajar Biologi Siswa SMA Berkemampuan Atas dan Bawah di Jember,” PPS Universitas Negeri Malang, 2009

Character Building Dalam Era Merdeka Belajar Romadhon ¹

Pengantar

Sejak awal berdirinya Republik yang kita banggakan ini, para pendiri bangsa telah menetapkan bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan dalam label pendidikan, sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 31 yang berbunyi “pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, dan pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran Nasional. Sementara, pada pasal 32 ditegaskan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional”.

Sebagaimana kita ketahui, pendidikan secara konstitusional merupakan tanggungjawab pemerintah sebagaimana amanah dalam UUD 1945. Pemerintah menyiapkan regulasi dan anggaran. Sementara pendidikan secara moral merupakan tanggungjawab kita bersama. Bagi siapa pun yang terdidik memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam memajukan pendidikan kita. Pendidikan tak terlepas dari proses pembentukan karakter yang akan menghasilkan generasi emas tahun 2045. Maka, tak bisa dipungkiri keberadaan penguatan karakter menjadi keniscayaan dalam perjalanan panjang pendidikan di Republik ini.

Memasuki era merdeka belajar, *character building* terus menjadi isu sentral dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan perubahan zaman, proses pendidikan mengalami revolusi yang tak bisa dihindari. Revolusi yang dimaksudkan adalah revolusi belajar yang dalam istilah Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim adalah Merdeka Belajar. Konsep merdeka belajar sebenarnya sejalan dengan *khittah* pendidikan kita yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yakni mengembangkan pendidikan karakter sebagaimana tujuan pendidikan nasional dalam mewujudkan manusia merdeka.

Perubahan zaman terus memberikan dampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pembentukan sekaligus pengembangan karakter. Pengembangan karakter tak

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

tergantikan oleh siapa dan apapun, termasuk teknologi yang akhir-akhir ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Karakter akan terus hidup dan menghidupi perjalanan bangsa ini. Maka perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh komponen bangsa agar rumah kita 'Indonesia' tak mengalami degradasi moral seiring derasnya arus perkembangan teknologi dewasa ini. lalu, seberapa penting pembangunan karakter bagi bangsa ini? Apakah karakter dirasa sudah cukup melalui pendidikan yang kerap kali mengalami bongkar pasang kebijakan? Bagaimana karakter tetap bertahan di era merdeka belajar? Inilah esensi kita 'menjemput' karakter sebagaimana yang telah dibangun oleh pendiri bangsa.

Urgensi Karakter Untuk Indonesia Maju

Karakter menjadi pondasi utama dalam percaturan bangsa-bangsa. Bahkan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Sunaryo Kartadinata dalam pengantar Buku 'Character Matters-Persoalan Karakter' yang ditulis Thomas Lickona, menegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa menjadi salah satu perhatian kuat pemerintah, sepatutnyalah disambut dengan baik dan dirumuskan langkah-langkah sistemik dan komprehensif untuk implementasinya dalam proses pendidikan.

Pendidikan karakter bukanlah kebijakan baru dalam dunia pendidikan melainkan telah termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dikembangkan dalam bingkai utuh sistem pendidikan nasional dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan yang mulia dalam membentuk karakter bangsa, perlu dipahami secara komprehensif dan sistematis dengan melihat beberapa poin yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional tersebut, antara lain; **Pertama, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.** Artinya, tujuan pendidikan yang pertama ini menunjukkan bahwa iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa adalah faktor penting yang sangat berpengaruh

terhadap kualitas sumber daya manusia unggul. Apalagi dalam Pancasila yang merupakan dasar Negara kita yakni sila pertama juga berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan agama menjadi penting karena jika membangun hubungan manusia dengan Tuhan-Nya baik, maka hubungan sesama manusia juga akan membaik. Jika tujuan ini tercapai maka suatu bangsa akan memiliki calon penerus dengan sumber daya manusia yang baik (unggul-beradab). Maka menjadi penting mengedepankan nilai agama sebagai pondasi pengembangan karakter dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Artinya Tujuan pendidikan nasional yang kedua ini berkaitan dengan manusia yang memiliki sifat berbeda-beda (multikultural). Setiap individu memiliki sifat yang berbeda, dan perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik antar individu. Jika nilai-nilai agama tidak lagi menjadi ruh dalam kehidupan ini. Lembaga pendidikan menjadi kawah candradimuka dalam pengembangan karakter menjadi manusia seutuhnya yang mengedepan akhlak mulia. Oleh karena itu, akhlak mulia (karakter-beradab) adalah salah satu solusi untuk menghindari konflik antar individu. Membentuk manusia yang berakhlak mulia harus diterapkan pada pendidikan di level terendah hingga tertinggi. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih baik dengan adanya akhlak mulia.

Tujuan yang Ketiga yakni menjadi manusia yang cakap. Tujuan pendidikan selanjutnya adalah menjadi manusia yang cakap. Hal ini sangat penting sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Selama atau setelah mengenyam pendidikan, seorang peserta didik harus memiliki suatu kecakapan tertentu. Tentu cakap disini harus dilihat dari berbagai aspek, misalnya cakap dalam menulis dan membaca, cakap dalam berkomunikasi dan ber-medsos-ria merupakan keharusan peserta didik bahkan seluruh stakeholder bangsa dalam kemajuan teknologi ini. Kemampuan tersebut tentunya dapat membuat seseorang memahami dan dapat menyampaikan agar mampu hidup berdampingan di tengah kehidupan keberagaman ini. Perpecahan kerap kali dimulai dari ketidakmampuan menyampaikan pesan sehingga berpotensi salah paham yang berakibat terjadinya gesekan antar pihak. Peran guru (pendidik) menjadi sentral

pembentukan manusia yang cakap dan beradab di era kesemrawutan media sosial agar kehidupan berbangsa tak lagi dihantui berbagai ujaran yang diselimuti emosional. Hal inilah yang perlu dikedepankan dalam pendidikan karakter yakni membentuk manusia yang cakap dan beradab.

Keempat, menjadi manusia yang kreatif. Definisi kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kreatif merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Cakap berurusan dengan kreatif, kreatif dalam bertindak, mampu menyelesaikan persoalan, bahkan menghadirkan sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Kreativitas dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan, misalnya dengan pembelajaran yang menarik, diskusi kelompok maupun presentasi. Orang yang kreatif cenderung memiliki inisiatif yang kuat dalam melihat masalah/problem disekitarnya, bahkan mampu menghadirkan ide/gagasan yang dapat menjadi solusi dalam melihat persoalan, bahkan orang yang kreatif dapat mengembangkan pikiran untuk mengerjakan hal-hal menarik. Menurut Mihaly Csikszentmihalyi, dalam artikel [1], yang dilansir kompas.com, menyebutkan ada 8 ciri-ciri seseorang dikatakan kreatif:

1) Penuh energi tapi fokus

Orang kreatif cenderung memiliki energi berlebih, baik fisik maupun mental. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam menekuni sesuatu yang menarik perhatiannya, dan terus antusias sepanjang waktu. Hal itu bukan berarti orang kreatif hiperaktif. Mereka cenderung imajinatif, ingin tahu banyak hal, diam-diam berpikir, dan merenungkan hal yang menarik minat mereka.

2) Cerdas tapi Naif

Studi pada 2013 mengungkap, orang kreatif umumnya cerdas. Namun, orang dengan IQ yang terlalu tinggi belum tentu kreatif. Hal itu sejalan dengan penelitian Csikszentmihalyi. Dia menyimpulkan, orang kreatif umumnya

memiliki IQ dengan batas 120. Tapi, pemilik IQ di atas 120 belum tentu lebih kreatif ketimbang yang IQ-nya di bawah 120. Menurut dia, kreativitas melibatkan sisi naif dan kekanak-kanakan. Dengan perasaan tersebut, umumnya orang kreatif bisa mempertahankan rasa kagum, ingin tahu, dan bisa melihat dunia dengan sudut pandang segar.

3) Suka Bermain-main tapi Disiplin

Masih menurut Csikszentmihalyi yang mengutarakan, bahwa hobi bermain-main adalah ciri khas kreativitas. Namun, ada sifat bertolak belakang yang dimiliki orang kreatif, yakni tekun. Ketika mengerjakan sesuatu, orang kreatif cenderung menunjukkan tekad dan kemauan keras. Mereka bisa bekerja berjam-jam sampai rela begadang hingga mendapat hasil yang memuaskan. Orang kreatif disebut punya kesadaran, kreativitas yang sesungguhnya adalah gabungan antara bersenang-senang dan kerja keras.

4) Pemimpi tapi Realistis

Orang kreatif cenderung suka melamun dan membayangkan berbagai kemungkinan. Mereka bisa tenggelam dalam imajinasi dan fantasi, tapi tetap berpijak pada kenyataan. Orang kreatif pun kerap digambarkan sebagai pemimpi yang realistis. Tak pelak, banyak orang kreatif dari kalangan ilmuwan sampai seniman yang hadir menawarkan solusi yang imajinatif untuk suatu permasalahan. Awalnya, banyak orang menganggap solusi tersebut sebagai ide yang penuh fantasi dan tidak relevan pada kondisi saat ini. Namun, sebenarnya solusi tersebut dibuat melampaui keseharian saat ini dan bisa menciptakan realitas baru.

5) Campuran ekstrovert dan introvert

Beberapa orang terperangkap dalam satu jenis kepribadian, ekstrovert atau introvert. Padahal, menurut Csikszentmihalyi, orang kreatif membutuhkan gabungan dua

tipe kepribadian ini. Studi juga telah menunjukkan, pemilik gabungan kepribadian ekstrovert dan introvert cenderung stabil secara emosional. Orang kreatif bisa punya banyak teman, pandai bergaul, terkadang juga perlu waktu untuk sendiri. Berinteraksi dengan orang lain dapat menghasilkan ide dan inspirasi. Sedangkan merenung digunakan untuk mengeksplorasi ide kreatif.

6) Tak Silau dengan Suatu Pencapaian

Orang yang sangat kreatif memang memiliki rasa bangga dengan apa yang sudah mereka capai. Tapi, mereka cukup sadar diri dengan posisinya. Mereka menaruh rasa hormat pada orang lain yang lebih dulu menelurkan inovasi sebelumnya. Sehingga, banyak orang kreatif yang tidak silau pada pencapaiannya di masa lalu. Mereka cenderung fokus pada ide dan pekerjaan yang akan datang.

7) Konservatif tapi Punya Sisi Pemberontak

Orang kreatif adalah pemikir out-of-the-box. Mereka cenderung tidak suka dengan tatanan formal, terkadang sampai memberontak kemapanan. Tapi Csikszentmihalyi percaya, sebelum mengutarakan gagasan di luar kelaziman, orang kreatif cenderung ikut arus terlebih dahulu. Menurut dia, kreativitas perlu bersifat tradisional, mampu merangkul masa lalu, namun tetap menyisipkan kebaruan dalam suatu ide. Orang kreatif dapat bersikap konservatif, namun mereka sadar inovasi perlu mengambil risiko.

8) Objektif dan Tidak Anti Kritik

Orang kreatif cenderung sangat mencintai dan bersemangat dengan apa yang mereka tekuni. Kendati sangat bersemangat, mereka tetap mau mendengarkan masukan jika ada hal yang perlu diperbaiki. Orang kreatif biasanya objektif, kritis, tapi tetap bisa menerima kritik. Mereka bisa memisahkan ego dan kebutuhan peningkatan kapasitas diri.

Kelima, menjadi manusia yang mandiri. Mandiri adalah keadaan dimana seorang individu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian dapat diterapkan dalam kehidupan pembelajaran di kelas, contohnya adalah kejujuran dalam mengerjakan ujian. Sikap jujur adalah sikap dasar bagi siapa pun dalam menjalani kehidupan ini, karena hanya dengan kejujuranlah, semua urusan mampu diselesaikan dengan baik dengan hasil yang memuaskan, baik bagi si pelaku maupun bagi orang lain yang merasakan efek positif dari sikap jujurnya, semua kalangan akan mendapatkan manfaatnya [2]. Sementara, Supardi yang dikutip dalam buku Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Tahun 2018 [3], ia menegaskan dengan karakter kemandirian tersebut peserta didik dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain.

Manusia yang mandiri akan terlatih dengan berbagai keadaan. Sehingga tujuan pendidikan ini dimaksudkan agar peserta didik terlatih secara mandiri sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. Kompleksitas problem ditengah masyarakat multikultural ini membuat para guru harus lebih bijak dalam membangun kemandirian peserta didik yang *notabene* heterogen. Bersikap inklusif merupakan salah satu cara dalam merawat kemandirian dengan mengedepankan kejujuran sebagai pondasi utama dalam beraktifitas.

Keenam, menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung Jawab. Tujuan pendidikan selanjutnya adalah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dalam hal kehidupan berdemokrasi perlu adanya batasan-batasan yang membatasi kebebasan individu dalam bernegara. Tujuan pendidikan ini juga dapat diterapkan dalam suasana pembelajaran, misalnya dengan diskusi tanya jawab dengan membahas berbagai topik. Itulah beberapa tujuan pendidikan nasional Bangsa Indonesia menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona [4].

Dari ulasan tujuan pendidikan nasional mempertemukan titik pembentukan karakter bahwa menjadi manusia Indonesia seutuhnya tak lepas dari rel tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan karakter mengatur tata kelakuan manusia pada aturan khusus, hukum, norma, adat kebiasaan dalam bidang kehidupan sosial manusia yang memiliki pengaruh sangat kuat pada sikap mental manusia secara individu dalam aktivitas hidup. Sikap mental sebagai unsur penggerak untuk kelakuan manusia, memberikan reaksi terhadap lingkungan alam, dan sosial.

Secara etimologis karakter, Sujanto mendefinisikan karakter sebagai pribadi jiwa yang menyatakan dirinya dalam segala tindakan dan pernyataan, dalam hubungannya dengan bakat, pendidikan, pengalaman, dan alam sekitarnya. Purwanto mengartikan karakter lebih umum dari pada sikap, sifat, dan tempramen. Ia menyimpulkan bahwa sikap, sifat, dan temperamen termasuk ke dalam watak/karakter. Sementara, menurut beberapa ahli berpendapat, antara lain:

1) I. R Pudjawijatna yang mengatakan bahwa watak atau karakter adalah seluruh aku yang ternyata dalam tindakannya terlibat dalam situasi, jadi memang dibawah pengaruh dari pihak bakat, tempramen, keadaan tubuh, dan lain sebagainya dan karakter dapat dipengaruhi dan dididik.

2) Lickona menyebutkan dengan artian yang sederhana mengenai pendidikan karakter, yaitu sebuah pendidikan yang dilakukan untuk memenuhi isi jiwa peserta didik dengan karakter yang bermoral serta berakhlak baik sehingga terwujud peserta didik berkarakter yang berpotensi [5].

Kurikulum Karakter di Era Merdeka Belajar (RI. 4.0)

Saat ini kita sedang berada di Era Revolusi Industri ke empat atau lebih dikenal dengan istilah Era RI 4.0, menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi sebanyak empat kali. Dimana Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad 18 sekitar tahun 1784 revolusi industri terjadi di

inggris, yaitu penemuan mesin uap dan mulailah menggantikan pekerjaan manusia. Kemudian pada akhir abad ke-19 revolusi industri kedua terjadi, bagaimana mesin yang dihasilkan menggunakan listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara universal. Setelah itu, pada tahun 1970 menjadi jawaban pada revolusi industri ketiga, yakni penggunaan teknologi komputer. Industri yang berikutnya yaitu 4.0, bagaimana istilah tersebut lahir di Jerman tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Negara Jerman memiliki sebuah kepentingan yang besar terkait bagian dari kebijakan pembangunan yang disebut *High-Tech Strategy 2010*. Kebijakan itu bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur [6].

Pada era globalisasi ini identik dengan era sains dan teknologi. Para saintis (ilmuan) telah memberikan kontribusi yang besar kepada kesejahteraan umat manusia. Namun disisi lain, menjadikan manusia kehilangan jati diri (karakter) dan pegangan hidup seperti; (1) nilai-nilai etika dan spiritual keagamaan, (2) nilai-nilai luhur bangsa, (4) nilai sosial-kultural, dan (4) nilai filsafat hidup [7].

Revolusi Industri 4.0 memiliki potensi manfaat yang besar namun juga memiliki tantangan yang besar jika tidak bijak dalam menghadapi, maka akan menjadi ancaman besar bagi kehidupan manusia. Di era yang serba ada dan canggih ini manusia semakin dimanjakan oleh teknologi, manusia semakin berfikir dengan serba instan, dengan begitu karakter manusia semakin tergerus oleh zaman. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, namun sebisa mungkin kitalah yang mengendalikan teknologi.

Sehingga era industri 4.0 menjadi *disruption*/problem manusia yang tidak bijak dalam menghadapi era ini. Dengan mudahnya akses internet, banyak tontonan yang tidak layak menjadi tuntunan bagi masyarakat khususnya peserta didik yang masih mencari jati diri. Hampir semua sibuk dengan *handphone* masing-masing karena ingin mengekspresikan dirinya di sosial media. Dengan begitu, *handphone* dengan akses internet lebih di Tuhan-kan dari pada tuhan nya, guru

yang seharusnya dihormati dalam pendidikan menjadi teman tanpa batas, akhirnya tidak ada sopan santun yang tertanam dalam peserta didik. Karena hilangnya karakter/akhlak mulia dalam diri manusia. Akibat kemajuan teknologi, begitu cepatnya penyebaran dan langkah yang diambil manusia bisa menjangkau lingkup yang amat luas dengan hitungan detik [8].

Maka gelombang industri 4.0 mampu mengubah beberapa hal dalam pendidikan diantaranya; *On Demand* munculnya jasa-jasa pendidikan dan keterampilan, aplikasi-aplikasi yang mobile dan responsif, layanan konten tanpa batas. Pembelajaran di era teknologi mampu merubah cara pandang hidup dan mampu membawa kita pada interaksi dunia yang positif dan bahkan juga negatif [9]. Jika teknologi yang mampu memberikan apa saja yang diinginkan manusia secara instan lebih dihargai dibanding peran guru sebagai pusat belajar dalam menuntut ilmu. Maka dengan fenomena tersebut seharusnya masyarakat atau peserta didik harus lebih ditingkatkan dalam spiritualitas melalui habituasi sehingga mampu menghantarkan pada karakter baik dan beradab.

Kurikulum merupakan komponen penting yang tak terpisahkan dalam pembentukan karakter. Kurikulum memuat berbagai nutrisi dalam mengembangkan proses pembelajaran dengan segala potensi peserta didik. Menurut Edward A. Krug dalam bukunya *The Secondary School Curriculum* yang dikutip Moh. Yamin [10] menyatakan bahwa kurikulum dipandang sebagai cara dan upaya guna mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, ia membedakan tugas mengenai perkembangan anak dan tanggungjawab lembaga pendidikan lainnya, seperti rumah tangga, lembaga agama, masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu Krug kemudian membatasi kurikulum pada pengajaran dalam kelas atau kegiatan tertentu di luar pengajaran, seperti bimbingan dan konseling, kegiatan pengabdian masyarakat, serta pengalaman kerja yang berkaitan dengan pelajaran dan perkemahan. Lebih lanjut, Moh. Yamin menguraikan pendapat

Krug yang menyatakan bahwa kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan.

Sementara itu, Ronald C. Doll (1964) menjelaskan bahwa kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik dibawah arahan dan bimbingan sekolah. Senada dengan Ronald C. Doll, Rosyada [11] kemudian menguraikan bahwa pengalaman yang diperoleh peserta didik dari program-program yang ditawarkan sekolah sangat variatif, tidak sebatas pembelajaran dalam kelas, tetapi juga lapangan tempat mereka bermain di sekolah, di kantin, ekstrakurikuler, bahkan bus sekolah. Kurikulum adalah jantung pendidikan (*curriculum is the heart of education*). Oleh karena itu, sudah seharusnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP-K-13), saat ini, memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan kurikulum masa sebelumnya [12].

Marlina [13] dalam artikelnya menyatakan bahwa saat ini kurikulum pendidikan yang berkarakter diorientasikan untuk pembentukan karakter peserta didik. Perubahan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum itu sendiri (*inherent*), bahwa kurikulum yang berlaku harus dilakukan peningkatan dengan mengutamakan kebutuhan peserta didik. Guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum dituntut menjadi guru yang mampu meramu kurikulum 2013 secara tepat yaitu proses penilaian dan kompetensi mampu meningkatkan kompetensi siswa untuk menghasilkan lulusan mampu menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Guru harus menyadari bahwa pendidikan sangat penting untuk menjawab tantangan global, dan siswa harus bertanggungjawab dalam menuntut ilmu untuk membentuk pendidikan karakter yang menjadi tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 membentuk siswa melakukan pengamatan/observasi, bertanya dan bernalar terhadap ilmu yang diajarkan.

Siswa diberi mata pelajaran berdasarkan tema yang terintegrasi agar memiliki pengetahuan tentang lingkungan,

kehidupan, dan memiliki pondasi pribadi tangguh dalam kehidupan sosial serta kreativitas yang lebih baik. Pendidikan karakter mengatur tata kelakuan manusia pada aturan khusus, hukum, norma, adat kebiasaan dalam bidang kehidupan sosial manusia yang memiliki pengaruh sangat kuat pada sikap mental (mental attitude) manusia secara individu dalam aktivitas hidup. Sikap mental sebagai unsur penggerak untuk kelakuan manusia, memberikan reaksi terhadap lingkungan alam, dan sosial. Perilaku manusia dapat dipengaruhi langsung oleh alam pikiran/jiwa manusia dalam menghadapi lingkungan. Mentalitas manusia merupakan suatu nilai karakter yang berkembang dalam diri manusia secara perorangan dan dipedomani oleh struktur nilai yang mengakar dan melembaga dalam masyarakat. Misalnya satuan pendidikan, dalam satuan pendidikan terbentuk sistem nilai sebagai pedoman perilaku seluruh komunitas satuan pendidikan yang merupakan orientasi nilai (value orientation) komunitas satuan pendidikan dalam kehidupan satuan pendidikan dan diluar satuan pendidikan.

Hal lain dalam menyikapi pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 belakangan ini yang menjadi sorotan adalah perkembangan teknologi yang semakin tak terbendung, semua seolah-olah bergantung pada internet. Setiawan [14] seorang Psikolog lulusan Universitas Airlangga, dalam bukunya menyebutkan zaman industri datang dan mendefinisikan ulang makna pendidikan. Zaman industri membutuhkan orang-orang dengan kemampuan standar untuk menjalankan pabrik dan mesin birokrasi. Kebutuhan tidak bisa dipenuhi oleh pendidikan zaman agraris yang beragam dan sesuai kebutuhan lokal masing-masing. Zaman industri menciptakan model pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan zamannya, yang kita kenal sebagai sekolah.

Kemudian ia mempertegas, internet datang dan menawarkan cara belajar yang berbeda. Anak-anak mengakses internet, mendapatkan pengetahuan, dan belajar dengan cara yang mereka sukai. Berbeda dengan di sekolah, mereka bisa memilih topik yang

mereka sukai. Apalagi muncul dengan pembelajaran daring yang dapat diikuti oleh anak-anak. Dengan internet belajar tidak lagi terbatas pada ruang-ruang kelas, tidak lagi terbatas pada batas-batas kurikulum, tidak lagi terbatas pada sumber pengetahuan tunggal, tidak dinilai oleh ujian terstandar. Belajar terjadi ketika terbentuk jejaring antara pembelajar, sumber pengetahuan, dan masyarakat. Inilah esensi kita sedang berada di Era Revolusi Industri 4.0 yang istilah lainnya disebut Era Disrupsi.

Berdasarkan penjelasan Ristekdikti dalam [15] Ciri-ciri Era Disrupsi dapat dijelaskan melalui **(VUCA)** yaitu Perubahan yang masif, cepat, dengan pola yang sulit ditebak (**Volatility**), Perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian (**Uncertainty**), Terjadinya kompleksitas hubungan antar faktor penyebab perubahan (**Complexity**), Kekurangjelasan arah perubahan yang menyebabkan ambiguitas (**Ambiguity**). Pada Era ini teknologi informasi telah menjadi basis atau dasar dalam kehidupan manusia termasuk dalam bidang pendidikan di Indonesia, bahkan di dunia saat ini tengah masuk ke era revolusi sosial industri 5.0.

Pada Era Revolusi Industri 4.0 beberapa hal terjadi menjadi tanpa batas melalui teknologi komputasi dan data yang tidak terbatas. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). [15] saat ini pemerintah tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan *Making* Indonesia 4.0. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan *Making* Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030 [6]. Peningkatan

kualitas SDM merupakan salah satu bagian dari 10 prioritas dalam melaksanakan program *making* Indonesia 4.0.

SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan *Making* Indonesia 4.0. Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada **STEAM** (**Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics**), menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Indonesia akan bekerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah asing untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan, sekaligus memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global untuk memanfaatkan ketersediaan SDM dalam mempercepat transfer kemampuan.

Lalu, beberapa pakar menyatakan bahwa fokus keahlian bidang Pendidikan abad 21 saat ini meliputi; *creativity, critical thinking, communication dan collaboration* atau yang lebih dikenal dengan istilah 4Cs. Di era disrupsi seperti saat ini, dunia pendidikan dituntut mampu membekali para peserta didik dengan keterampilan abad 21 (21st Century Skills). Keterampilan ini adalah keterampilan peserta didik yang mampu untuk bisa berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi [15]. Selain itu, keterampilan mencari, mengelola dan menyampaikan informasi serta terampil menggunakan informasi dan teknologi. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 ini meliputi: *Leadership, Digital Literacy, Communication, Emotional Intelligence, Entrepreneurship, Global Citizenship, Problem Solving, Team-working*.

Tidak hanya bagi peserta didik, Guru dan dosen pun harus harus siap menghadapi keterampilan ini. Bagaimana mungkin kita menuntut peserta didik untuk mampu memiliki keterampilan abad 21 jika guru atau dosen belum siap. Lalu, bagaimana peran guru dan dosen dalam mengembangkan karakter di era merdeka belajar (RI. 4.0) ? Mau tidak mau guru dan dosen harus memiliki *core* kompetensi yang kuat, memiliki soft skill antara lain: *Critical Thinking*, kreatif,

komunikatif dan kolaboratif. Peran guru dan dosen sebagai teladan karakter, menebar *passion* dan inspiratif. Inilah peran yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Memiliki *educational competence*, kompetensi dalam penelitian, kompetensi dalam dunia usaha digital, kompetensi dalam era globalisasi, Interaksi dalam pembelajaran. Dalam fungsinya interaksi pembelajaran, guru dan dosen harus mampu membangun *atmosphere* yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik, yang meliputi: *needs for competence* setiap peserta didik butuh merasa bisa, interaksi pembelajaran harus mampu membuat peserta didik merasa bisa.

Oleh karena itu, menurut Mulia [16] dalam opininya berpendapat bahwa yang dapat dilakukan adalah reorientasi kurikulum di perguruan tinggi, khususnya pada program studi keguruan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas calon tenaga pendidik di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan era revolusi 4.0. ia memaparkan lebih lanjut, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam reorientasi kurikulum [17]. **Pertama**, mengembangkan literasi baru (data, teknologi, sumber daya) karena literasi lama (membaca, menulis, matematika) sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di era revolusi 4.0. Literasi data artinya calon pendidik harus pandai membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital dan menerapkannya ke dalam teknologi. Literasi teknologi artinya calon pendidik mampu memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi (Coding, Artificial Intelligence, & Engineering Principles). Literasi sumber daya bertujuan agar peserta didik dengan berbagai latar belakang mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda (dalam maupun luar negeri).

Kedua, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan pengembangan diri yakni untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim sesuai yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 12 dan 13 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Ketiga, mewajibkan *entrepreneurship* dan *internship* untuk menjadi kapasitas dasar yang dimiliki oleh peserta didik. *Entrepreneurship* bertujuan agar peserta didik dapat menemukan peluang dan membuat usaha yang bersifat inovatif dengan menggunakan teknologi yang sudah maupun belum tersedia. Sedangkan *internship* memiliki manfaat agar peserta didik dapat merasakan dan mengetahui proses kerja disuatu perusahaan agar dapat diimplementasikan dalam perkuliahan.

Reorientasi kurikulum diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencetak calon tenaga pendidik yang lebih berkualitas, beradab dan profesional untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia yakni membentuk generasi emas di tahun 2045. Menjadi guru di abad 21 perlu mengembangkan segala potensi agar mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam menjawab tantangan era RI. 4.0 ini.

Dalam buku “Pembelajaran Abad 21” [18], *International Society for Technology in Education* membagi keterampilan guru abad 21 menjadi lima kategori, antara lain:

1) **Mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik**, dengan indikator diantaranya, sebagai berikut:

- a. Mendorong, mendukung dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif.
- b. Melibatkan peserta didik dalam menggali isu dunia nyata (*real word*) dan memecahkan permasalahan otentik menggunakan *tool* dan sumber-sumber digital.
- c. Mendorong refleksi peserta didik menggunakan *tool* kolaboratif untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman, pemikiran, perencanaan konseptual dan proses kreatif peserta didik.

- d. Memodelkan konstruksi pengetahuan kolaboratif dengan cara melibatkan diri belajar dengan peserta didik, kolega, dan orang-orang lain baik melalui aktivitas tatap muka maupun melalui lingkungan virtual.

2) **Merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan *assesment* di era digital**, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang tepat mengintegrasikan *tools* dan sumber digital untuk mendorong belajar dan kreativitas peserta didik.
- b. Mengembangkan lingkungan belajar yang kaya akan teknologi yang memungkinkan semua peserta didik merasa ingin tahu dan menjadi partisipan aktif dalam menyusun tujuan belajarnya, mengelola belajarnya sendiri dan mengukur perkembangan belajarnya sendiri.
- c. Melakukan kustomisasi dan personalisasi aktivitas belajar yang dapat memenuhi strategi kerja gaya belajar dan kemampuan menggunakan *tools* dan sumber-sumber digital yang beragam.
- d. Menyediakan alat evaluasi formatif dan sumatif yang bervariasi sesuai dengan standar teknologi dan konten yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi proses belajar peserta didik maupun pembelajaran secara umum.

3) **Menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital**, dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru.
- b. Berkolaborasi dengan peserta didik, sejawat, dan komunitas menggunakan *tools* dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi peserta didik.

- c. Mengkomunikasikan ide/gagasan secara efektif kepada peserta didik, orang tua, dan sejawat menggunakan aneka ragam media digital.
 - d. Mencontohkan dan memfasilitasi penggunaan secara efektif dari pada *tools* digital terkini untuk menganalisis, mengevaluasi dan memanfaatkan sumber informasi tersebut untuk mendukung penelitian dan belajar.
- 4) **Mendorong dan menjadi model tanggungjawab dan masyarakat digital**, dengan indikator sebagai berikut:
- a. Mendorong, mencontohkan, dan mengajar secara sehat, legal dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital, termasuk menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual dan dokumentasi sumber belajar.
 - b. Memenuhi kebutuhan pembelajar yang beragama dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan akses yang memadai terhadap *tools* digital dan sumber belajar digital lainnya.
 - c. Mendorong dan mencontohkan etika digital tanggung jawab interaksi sosial terkait dengan penggunaan teknologi informasi.
 - d. Mengembangkan dan mencontohkan pemahaman budaya dan kesadaran global melalui keterlibatan/partisipasi dengan kolega dan peserta didik dari budaya lain menggunakan tool komunikasi dan kolaborasi digital.
- 5) **Berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional**, dengan indikator sebagai berikut:
- a. Berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran.

- b. Menunjukkan kepemimpinan dengan mendemonstrasikan visi infusi teknologi, berpartisipasi dalam pengembalian keputusan bersama dan penggabungan komunitas dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan teknologi kepada orang lain.
- c. Mengevaluasi dan merefleksikan penelitian-penelitian dan praktek profesional terkini terkait dengan penggunaan efektif daripada *tools* dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan pembelajaran.
- d. Berkontribusi terhadap efektivitas, vitalitas dan pembaharuan diri terkait dengan profesi guru baik di sekolah maupun dalam komunitas.

Di samping itu, tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru memasuki abad 21 tidaklah mudah. Guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan empat pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk dunia pendidikan yakni; 1) *Learning to know*; 2) *Learning to do*; 3) *Learning to be*; 4) *Learning to live together*.

Jika dicermati keempat pilar tersebut menuntut seorang guru untuk kreatif, bekerja secara tekun dan harus mampu dan mau meningkatkan kemampuannya. Berdasarkan tuntutan tersebut seorang guru akhirnya mau tidak mau harus berperan lebih aktif, kreatif, dan responsif atas perubahan zaman. Karena guru memiliki peranan penting yang juga strategis dalam mengimplementasikan segala kebijakan yang beririsan dengan kurikulum, termasuk penguatan karakter dengan segala dinamikanya.

Karakter Dalam Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam perjalanan pendidikan Indonesia identik dengan kebijakan yang dilahirkan setiap orde. Seorang penguasa memiliki cara dan strategi berlainan dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Setiap penguasa mempunyai konsep di setiap fase

sehingga melahirkan gaya kepemimpinan berbeda. Tak terkecuali dalam merumuskan kebijakan dunia pendidikan. Sepanjang kebijakan pendidikan dilahirkan oleh pemerintah akan selalu bertujuan memberikan dukungan citra politik yang baik kepada penguasa [10].

Sudiarja [19] menekankan pendidikan bertujuan untuk mengajar, memanusiakan, dan mengarahkan anak didik agar mencapai akhir yang sempurna. Tujuan itu membentuk generasi berkarakter menjadi manusia merdeka. Dalam mencapai itu, kemudian dirumuskan dalam kebijakan kurikulum. Kurikulum harus berbicara atas nama kepentingan dan kebutuhan peserta didik, baik secara khusus maupun umum. Menurut Indratno [20], mengatakan bahwa kurikulum harus memiliki identitas kerakyatan. Dalam arti, benar-benar memperjuangkan khalayak (peserta didik) dalam konteks sosial, budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Para pakar pendidikan berpendapat, kurikulum mampu disebut humanis ketika memberikan nilai-nilai toleransi dan solidaritas antar sesama. Memperkuat kesadaran diri agar bisa memberikan ruang antar setara sesama sebagai manusia yang juga harus dihormati dan dihargai. Kurikulum humanis akan membawa praktik pendidikan yang juga memberikan pencerahan. Zuchdi [21] berpendapat ada beberapa hal penting supaya sebuah kurikulum mengandung beberapa nilai humanis, antara lain;

1. Kebutuhan dan kepentingan dilapangan bisa dituangkan dalam maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh gagasan besar pembentukan kurikulum tersebut. Hal ini sangat penting demi menciptakan kurikulum yang bisa bersinggungan secara nyata dengan kehidupan peserta didik.
2. Berupaya maksimal dan optimal dalam mempertegas tujuan kemanusiaan dalam kurikulum. Dengan demikian, akan melahirkan kurikulum yang searah dengan kehidupan.
3. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD 1945 dan pancasila harus masuk dalam kurikulum, sebab ini sangat mendukung dalam pelaksanaan kurikulum yang

sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia ke depan.

4. Perlu nya memasukkan konsep dasar mengenai pembentukan moralitas dan karakter bangsa yang kuat.

Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan para pemangku kebijakan di republik ini. Mengingat, kurikulum adalah jantung arah dunia pendidikan kita dalam mewujudkan manusia yang maju dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Kurikulum humanis tidak hanya berbicara nilai-nilai yang harus diserap para peserta didik. Pendekatan pembelajaran humanis harus memandang manusia sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidup. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga hidup orang lain. Pendekatan yang lebih tepat digunakan dalam pembelajaran humanis adalah pendekatan dua arah, yakni reflektif, dan ekspresif. Pendekatan dua arah tersebut mengajak peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Pendekatan reflektif mengajak anak didik untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Sementara, pendekatan ekspresif mengajak peserta didik untuk menunjukkan potensi diri.

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek RI) yang digagas oleh Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim. Pasalnya, penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Mendikbud pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta

didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya, yakni survei karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan oleh peserta didik.

Esensi kemerdekaan berpikir, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Menurut Nadiem, Mendikbud RI, pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan *outing class*, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompotensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing.

Dengan demikian, nuansa pendidikan semestinya diupayakan agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk selalu berpikir mandiri dan kritis dalam menemukan jati dirinya. Dalam konteks ini, yang terpenting bukanlah memberikan pengetahuan positif yang bersifat *taken for granted* kepada peserta didik, melainkan bagaimana mengajarkan kepada peserta didik agar memiliki kekuatan bernalar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan transfer keilmuan. Dalam hal ini, peserta didik dianggap sebagai subyek utama bukan hanya sekadar objek dari sebuah proses pendidikan.

Berbagai kalangan telah banyak mengingatkan pendidikan di era RI. 4.0, salah satu [22] dalam bukunya “Pendidikan yang Berkebudayaan” terutama dalam menumbuhkan karakter. Ia

memaparkan, urgensi pendidikan untuk menanamkan kapabilitas nilai karakter justru menjadi penting dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi baru yang bersifat hadir dimana-mana. Perubahan teknologi itu, terlebih dengan bobot besar biasanya memperlihatkan sifat “dua muka”: positif dan negatif, peluang dan ancaman. Oleh karena itu, Doktor lulusan Australian National University dengan judul disertasi “Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20”, menegaskan dalam memasuki Revolusi Industri 4.0 kita perlu memiliki kesiapan dan kewaspadaan tingkat tinggi, yang kita hadapi bukan hanya peluang-peluang, kemudahan-kemudahan, dan kebebasan hidup yang lebih menjanjikan, tetapi juga potensi ancaman dehumanisasi baru yang ditimbulkan oleh kapitalisme pengawasan.

Kendati berbagai ancaman dan peluang, keberadaan *character building* terus digaungkan ditengah merdeka belajar yang terus digalakkan. Hal ini tidak boleh terlupakan disaat konsep merdeka belajar menjadi kebijakan, maka karakter terus ditumbuhkembangkan. Lickona [5] pun menumbuhkan nilai inti karakter, antara lain; keberanian (courage), keadilan (justice), kebaikan hati (benevolence), rasa terima kasih (gratitude), kebijaksanaan (wisdom), mawas diri (reflection), rasa hormat (respect), tanggungjawab (responsibility), dan pengendalian diri (temperance). Nilai karakter juga perlu diinsersi dalam setiap pelajaran/mata kuliah agar penumbuhan nilai itu menjadi pembiasaan yang akan membudaya dalam kebijakan kurikulum apapun dan kapan pun. Maka, bukan menjadi mustahil kebijakan merdeka belajar akan seirama dengan pengembangan (bukan sekedar pembentukan) karakter sebagai jawaban akan keresahan moral (demoralisasi) yang dihadapi bangsa dalam memajukan Indonesia untuk mewujudkan generasi emas 2045.

Referensi

- [1] Afifah, Mahardini Nur. *8 Ciri-ciri Orang Kreatif Menurut Psikologi Positif*. Diakses <https://health.kompas.com/read/2020/06/07/080800768/8-ciri-ciri-orang-kreatif-menurut-psikologi-positif?page=all>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2021
- [2] Yani, Helmi. Ed. Halim, Abdul Fathani. 2017. *Pendidikan Karakter Hidup dengan Energi Positif, Menjadi Pribadi Lebih Baik*. Malang: Genius Media
- [3] Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi-Edisi Revisi*. Jakarta
- [4] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [5] Lickona, Thomas. 2016. *Character Matters-Persoalan Karakter*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- [6] Prasetyo, H dan W. Sutopo. 2018. *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*. Jurnal Jati Undip: Jurnal Teknik Industri, vol. 13, No. 1, pp. 17-26, Mar. 2018. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26> diakses pada tanggal 13 Maret 2021
- [7] Maragustam. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*. Yogyakarta: Pascasarjana FTIK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- [8] Kasali, Rhenald. (2017). *Disruption: Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [9] Rahmawati, Intan. 2019. *Hubungan Pandangan Aliran Progresivisme dan Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Matematika*. Journal Mathematics and Mathematics Education. Volume 2, Nomor 2 Tahun 2019
- [10] Yamin, Moh. 2012. *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press
- [11] Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis. Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media

- [12] Kemendiknas. (2010). Bahan Pelatihan: Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa. Jakarta: Kemdiknas.
- [13] Marlina, Murni Eva. 2013. *Kurikulum 2013 Yang Berkarakter*. JUPIIS. Volume 5, Nomor 2 Tahun 2013
- [14] Setiawan, Bukik. 2016. *Anak Bukan Kertas Kosong*. Jakarta: Panda Media
- [15] Risdianto, Eko. 2019. Analisis Pendidikan Indonesia di Era revolusi Industri 4.0 diakses https://www.researchgate.net/publication/332415017_Analisis_Pendidikan_Indonesia_Di_Era_Revolusi_Industri_4.0 pada tanggal 13 Maret 2021
- [16] Mulia, Annisa N. *Reorientasi Kurikulum Berdasarkan Kebutuhan Era Revolusi 4.0* diakses di: <https://spiritnews.co.id/2018/11/01/reorientasi-kurikulum-berdasarkan-kebutuhan-era-revolusi-4-0/> pada tanggal 13 Maret 2021
- [17] Aoun, J.E. 2017. *Robot-proof: Higher Education in The Age of Artificial Intelligence*. USA: MIT Press.
- [18] Daryanto dan Syaikul K. 2017. *Pembelajaran Abad 21*. Jogjakarta: Gava Media
- [19] Sudiarja, et al. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara; Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: Gramedia
- [20] Indratno, A. Ferry T. 2007. *Kurikulum yang Mencerdaskan visi 2030, dan Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Kompas
- [21] Zuchdi, Darmiyati. 2008. *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- [22] Latif, Yudi. 2020. *Pendidikan yang Berkebudayaan: Teori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*. Jakarta: PT. Gramedia

Pembiasaan Karakter Baik (*Knowing, Acting, and Habit*) Berbasis *Value Clarification Approach*

Romia Hari Susanti ¹

Pengantar

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam pengembangan potensi seseorang. Dengan adanya usaha yang sistematis melalui proses pembelajaran diharapkan seseorang akan memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian yang baik, kekuatan spiritual, dan keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi diri, masyarakat dan lingkungan. “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pasal 1 UU tersebut juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara” [1]. Gambaran umum sosok manusia Indonesia tercermin dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang dihasilkan melalui penyelenggaraan program pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional harus menjadi dasar dalam pengembangan nilai-nilai budaya karakter bangsa di sekolah yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945 dan kebudayaan bangsa Indonesia.

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Karakter menjadi salah satu aspek penting yang dirumuskan dalam program pendidikan Nasional dan diwujudkan melalui program penguatan pendidikan karakter [2]. Karakter yang dikembangkan dalam suatu sistem pendidikan merupakan keterkaitan antara komponen-komponen yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pengembangan karakter baik akan mendorong peserta didik untuk tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya dalam melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar sesuai tujuan hidup. Tahapan pengembangan karakter meliputi tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan (*habit*). Penguatan karakter tidak terbatas pada aspek pengetahuan saja. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang nilai kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) dalam melakukan kebaikan tersebut. Penguatan karakter menjangkau wilayah emosi dan pembiasaan diri yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang dapat membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai moral positif. Paparan gagasan dalam tulisan ini mencoba untuk mengulas upaya pembiasaan karakter (*knowing, acting, and habit*) melalui pendekatan klarifikasi nilai yang dilakukan oleh konselor sebagai salah satu bentuk pemberian layanan bimbingan konseling dalam rangka pembiasaan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.

Pada dasarnya tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Komponen karakter yang baik (*components of good character*) meliputi *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (penguatan emosi) tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Dimensi-dimensi *moral knowing* yang mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan tentang nilai-nilai moral

(*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*). *Moral feeling* adalah penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan karakter ini erat kaitannya dengan bentuk-bentuk sikap yang bisa dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri (*conscience*), percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*emphaty*), cinta kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*). *Moral action* adalah perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Selain itu, ada aspek lain dari karakter yang dapat digunakan untuk memahami apa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan baik (*act morally*) yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*), dan kebiasaan (*habit*).

Di lingkup sekolah, kegiatan penguatan karakter harus melibatkan semua komponen (*stakeholder*), termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri yang meliputi isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pelaksanaan layanan bimbingan konseling, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Hal ini diperlukan agar peserta didik dan warga sekolah yang terlibat dalam sistem pendidikan dapat memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan (moral). Pengembangan karakter melalui layanan bimbingan dan konseling bisa dimulai dengan menanamkan nilai-nilai dasar (*core ethical values*) sebagai basis karakter yang menyentuh kawasan kognitif, afektif, dan perilaku. Penanaman nilai-nilai dasar tersebut diintegrasikan dalam penyelenggaraan program layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem yang menyentuh bidang akademik, bidang pribadi dan sosial, serta bidang karir dengan berbasis karakter.

Sebagai salah satu komponen dalam sistem satuan pendidikan, penyelenggaraan layanan Bimbingan dan konseling berorientasi pada pengembangan karakter positif peserta didik. Penyelenggaraan layanan Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan upaya memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk mencapai perkembangan optimal. Semua peserta didik/konseli berhak mendapatkan layanan bimbingan dan konseling agar potensinya berkembang dan teraktualisasi secara positif yang tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. Bentuk kegiatan fasilitasi dimaksudkan merupakan upaya memperlancar proses perkembangan peserta didik/konseli, karena secara kodrati setiap manusia berpotensi tumbuh dan berkembang untuk mencapai kemandirian secara optimal. Hal ini sesuai dengan pengertian bimbingan dan konseling sebagai bentuk layanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku [1]. Kajian mengenai peran BK dalam meningkatkan berbagai aspek akademik dan non akademik peserta didik telah banyak dilakukan [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11].

Pendidikan memiliki posisi sebagai pemberi masukan pengetahuan tentang moral, nilai, dan kebaikan yang sekaligus memiliki peran sebagai sarana pembentukan karakter anak didik jelas menjadi rujukan penting untuk pembentukan karakter peserta didik yang diharapkan. Salah satu program pendidikan yang dapat disusun untuk kepentingan pembentukan karakter itu sendiri adalah melalui penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Peserta didik yang tumbuh dalam karakter baik, akan cenderung melakukan sesuatu dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Disinilah tugas Bimbingan konseling sebagai upaya menumbuhkan karakter yang dapat mengarahkan dan mengoptimalkan tujuan hidup peserta didik. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang

penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan kepribadian yang positif serta merubah dan memperbaiki perilaku.

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter bukan merupakan hal baru. Pendidikan karakter sebenarnya telah dimulai berabad-abad yang lalu di berbagai negara dengan berbagai macam bentuk. Dalam praksis pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter dilakukan dalam bentuk pelajaran budi pekerti, selain itu juga dilakukan dalam bentuk pendidikan agama dan pendidikan moral, seperti Pendidikan Moral Pancasila, atau Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan.

Banyak terjadi miskonsepsi tentang bentuk penyelenggaraan pendidikan karakter. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa pendidikan karakter identik dengan pendidikan agama yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada pula yang menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan kewarganegaraan, yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki loyalitas tinggi kepada negara, yang setia kepada negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila. Pendidikan karakter sebenarnya bukan hanya “milik” pelajaran tertentu dan diajarkan oleh guru mata pelajaran tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran, konselor, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Karakter sebenarnya adalah ciri kepribadian yang melekat pada diri individu yang bisa diajarkan, dikembangkan dan ditumbuhkan menjadi kebiasaan baik.

Pendidikan karakter pada hakikatnya adalah payung pendidikan budi pekerti, yang bertujuan untuk mengajarkan budi pekerti dan kebaikan-kebaikan (*virtues*), yang pada akhirnya peserta didik dapat mengembangkan sendiri segala kebaikan-kebaikan yang diajarkan, dan menjadi individu yang bermoral, sopan, hidup sehat, bersikap dan berpikir kritis, secara sosial dapat diterima, patuh, “non-

bullying”, dan menjadi warganegara yang bertanggung jawab. Pendidikan karakter mencakup pengembangan aspek sosial-emosional, penalaran kognitif dan moral, keterampilan berpikir kritis, bernalar etis, resolusi konflik dan mediasi, pencegahan kekerasan, serta pendidikan kesehatan. Kebaikan-kebaikan yang diharapkan bisa berkembang melalui pendidikan karakter dikemas menjadi 10 kebaikan sebagai berikut: (1) **Bijak**, yang meliputi: kemampuan mengambil keputusan yang masuk akal, tahu bagaimana menerapkan kebaikan dalam praktek kehidupan, mampu menetapkan mana yang paling penting dalam kehidupan, mampu menerapkan prioritas. (2) **Justice**, yang meliputi: adil, respect, responsibility, Honesty, Courtesy/civility, Tolerance. (3) **Fortitude**, yang meliputi: Courage, Resilience, Patience, Perseverance, Endurance, Self-confidence. (4) **Self-control**, yang meliputi: self-discipline, mampu mengelola emosi dan impuls diri, mampu menunda keinginan-keinginan, tekun, sexual self-control. (5) **Love**, yang terdiri atas: empathy, compassion, kindness, generosity, service, loyalty, patriotism, forgiveness. (6) **Positive attitude**, yang terdiri atas: Hope, enthusiasm, flexibility, sense of humour. (7) **Hardwork**, yang terdiri dari: Initiative, Diligence, Goal setting, Resourcefulness. (8) **Integritas**, yang terdiri dari: Memegang prinsip moral, meyakini kata hati, memegang janji, berperilaku etis secara konsisten, jujur pada diri sendiri. (9) **Gratitude**, yang terdiri dari: memiliki kebiasaan mengucapkan: Terima kasih, bersyukur untuk setiap berkat; bersyukur bahwa dia memiliki kelebihan daripada orang lain; *not complaining*. (10) **Humility**, yang meliputi: Self-awareness, mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki, memiliki dorongan untuk menjadi orang yang lebih baik.

Karakter mengacu pada paduan ciri kepribadian dan tindakan. Jadi, karakter pada dasarnya mengacu pada kualitas personal atau ciri yang baik, yang diharapkan oleh masyarakat, dan ciri baik itu dipakai sebagai tujuan pendidikan. Secara sederhana, karakter mengacu pada “*how good a person is*”. Karakter juga lebih banyak dikaitkan dengan moral. Terkait dengan moral, Lickona [12] menyatakan bahwa aspek

moral yang perlu dikembangkan dalam pendidikan karakter mencakup hal-hal berikut: (1) *Moral sensitivity*, yaitu kemampuan untuk menginterpretasi situasi, dan kesadaran bagaimana tindakan akan berdampak pada orang lain. (2) *Moral judgement*; yaitu keterampilan mengambil keputusan tindakan mana yang secara moral benar atau salah. (3) *Moral motivation*; yaitu sikap mengutamakan nilai moral yang mementingkan orang lain ketimbang diri sendiri. (4) *Moral character*: memiliki kekuatan untuk meyakini, keberanian, persisting, *over implementing skill, having ego strength*.

Ratna Megawangi [13], pendidikan karakter merupakan “sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.” Selanjutnya, Dharma Kesuma, dkk [14] juga mendefinisikan pendidikan karakter sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Senada dengan pendapat di atas, Doni Koesoema A. [15] berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah keseluruhan dinamika relasional antara pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi tersebut semakin dapat menghayati kebebasan sehingga dapat bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka. Zubaedi [16] juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dengan interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan pendidikan karakter sebagai sebuah usaha yang dilakukan secara sadar melalui proses penanaman nilai-nilai atau sikap baik bagi peserta didik yang dapat diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Analisis yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Pedagogia [14] dapat dijadikan sebagai salah satu tinjauan tentang tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional tidak boleh melupakan landasan konseptual filosofi pendidikan dalam menyiapkan generasi masa depan yang dapat bertahan hidup (*survive*) dan berhasil menghadapi tantangan-tantangan perubahan zaman. Pendidikan nasional diharapkan mengembangkan berbagai karakter baik dalam membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, sehingga pendidikan karakter bukan pendidikan akademik semata. Dharma Kesuma [14] menyatakan bahwa ukuran keberhasilan pendidikan yang berhenti pada angka ujian, seperti halnya Ujian Nasional, adalah kemunduran. Dikarenakan kalau hanya proses penilaian yang demikian pembelajaran akan menjadi sebuah proses menguasai keterampilan dan mengakumulasi pengetahuan semata. Senada dengan hal itu, Masnur Muslich [17] mengungkapkan bahwa pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif dan akhirnya ke pengenalan nilai secara nyata. Selanjutnya, Dharma Kesuma [14] mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah antara lain adalah: a) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan, b) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah, dan c) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah lulus dari sekolah). Selanjutnya, Masnur Muslich [17] mengungkapkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta

didik sebagaimana tercantum dalam Standar kompetensi Lulusan, yang antara lain meliputi sebagai berikut: a) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja, b) Memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri, c) Menunjukkan sikap percaya diri, d) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas, e) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional, f) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan dari sumber-sumber lain secara logis, kritis dan kreatif, g) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, h) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, i) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, j) Mendeskripsikan gejala alam dan sosial, k) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, l) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, m) Menghargai karya seni dan budaya nasional, n) Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya, o) Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik, p) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun, q) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat, menghargai perbedaan pendapat, r) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana, t) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah, dan u) Memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi dapat juga disimpulkan bahwa tujuan pendidikan karakter di sekolah bukanlah semata-mata mewarnai kepribadian anak, tapi merupakan proses interaksi alamiah yang didasarkan pada nilai-nilai baik dan kebenaran. Tujuan pendidikan karakter ialah sebagai sebuah proses yang membawa peserta didik untuk memahami dan merefleksi

bagaimana suatu nilai begitu penting untuk diwujudkan dalam perilaku keseharian manusia.

Masnur Muslich [17] menjelaskan bahwa pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat (*knowing, acting* dan *habit*). Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah juga merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik.

Zubaedi, [16] mengungkapkan ada empat cara penyampaian yang disebut dengan penyampaian pendidikan karakter di sekolah, yaitu: a) sebagai mata pelajaran tersendiri: model pendekatan ini dianggap sebagai mata pelajaran tersendiri yang memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain, b) terintegrasi dalam semua bidang studi: Pendekatan ini dalam penyampaiannya secara terintegrasi dalam setiap mata pelajaran, dipilih materi pendidikan karakter yang sesuai dengan tema atau pokok bahasan bidang studi, c) di luar pengajaran: penguatan nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai karakter. Model ini tidak terstruktur dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah, dan d) model gabungan: menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan model di luar pelajaran. Penanaman nilai pengajaran formal terintegrasi bersamaan dengan kegiatan di luar pelajaran. Muchlas Samani [18] menyarankan empat hal upaya pengembangan pendidikan karakter dalam kaitannya pengembangan

diri, yaitu: a) kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilaksanakan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat, misalnya upacara bendera setiap hari senin, piket kelas, shalat berjamaah, berdoa sebelum dan setelah pelajaran, dan sebagainya, b) kegiatan spontan bersifat spontan, saat itu juga, pada waktu keadaan tertentu, misalnya mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana alam, mengunjungi teman sakit atau sedang yang tertimpa musibah, dll, c) keteladanan adalah timbulnya sikap dan perilaku peserta didik karena meniru perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan di sekolah, misalnya kerapian pakaian yang dikenakan, kedisiplinan, tertib dan teratur, saling peduli dan kasih sayang, dan sebagainya, dan d) pengkondisian, menciptakan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kondisi tata ruang yang rapi, kondisi toilet yang bersih, disediakan tempat sampah, halaman sekolah yang rindang.

Upaya pengembangan pendidikan karakter erat kaitannya dengan budaya sekolah, Agus Wibowo [19] menyatakan bahwa kultur atau budaya sekolah dapat dikatakan sebagai pikiran, kata-kata, sikap, perbuatan, dan hati setiap warga sekolah yang tercermin dalam semangat, perilaku, maupun simbol serta slogan khas identitas mereka. Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter dalam budaya sekolah antara lain melalui: a) kelas, melalui proses belajar setiap mata pelajaran atau kegiatan yang dirancang sedemikian rupa, b) sekolah, melalui berbagai kegiatan sekolah yang dirancang sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam Kalender Akademik dan yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah, dan c) luar sekolah, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam Kalender Akademik. Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara

memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan pendidikan karakter adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan pendidikan karakter yang dapat terwujud dengan upaya pengembangan nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran yang ada. Upaya pengembangan pendidikan karakter dilakukan dengan pengembangan diri meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan dan pengkondisian.

Menurut Wibowo [19] " Tidak sulit menemukan nilai-nilai luhur pendidikan karakter dalam budaya kita. Itu karena bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya luhur ketimuran. Singkatnya nilai-nilai karakter mulia itu dapat kita temukan dalam adat dan budaya hampir di setiap suku bangsa di negeri ini. Seperti dalam adat dan budaya suku Jawa, Sunda, Bugis, Minang, Dayak, Aceh, Asmat dan sebagainya. Nilai-nilai luhur itu merupakan aspek utama yang diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pendidikan karakter". Lokalitas menjadi penting dikedepankan dalam pendidikan karakter, sehingga peserta didik tidak tercabut dari akar dan budayanya. Ini artinya, nilai-nilai luhur yang berasal dari adat dan budaya lokal hendaknya lebih diutamakan untuk diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pendidikan karakter. Menurut Kemdikbud [2] nilai-nilai luhur yang terdapat dalam adat dan budaya suku bangsa kita, telah dikaji dan dirangkum menjadi satu. Berdasarkan kajian tersebut telah teridentifikasi butir-butir nilai luhur yang diinternalisasikan terhadap generasi bangsa melalui pendidikan karakter.

Wibowo [19] menjelaskan bahwa "implementasi pendidikan karakter bisa dilakukan melalui Terintegrasi dalam pembelajaran, terintegrasi dalam pengembangan diri melalui kegiatan

ekstrakurikuler, dan terintegrasi dalam manajemen sekolah". Pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran, artinya pengenalan nilai-nilai, kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dan menginternalisasi nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik dilakukan melalui proses pembelajaran. Dengan demikian kegiatan pembelajaran memiliki tujuan untuk menjadikan peserta didik mampu secara kognitif, terampil dalam kompetensi yang diajarkan dan yang paling penting adalah mampu membawa peserta didik pada karakter yang luhur serta memiliki nilai-nilai moral yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga perlu dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari atau peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai karakter dan menjadikannya kebiasaan positif dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pengembangan diri, artinya berbagai hal yang terkait dengan karakter diimplementasikan dalam kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Diharapkan dari implementasi ini dapat membiasakan peserta didik dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai moral positif, sehingga perlu dilakukan asesmen atau penilaian terhadap perkembangan karakter peserta didik. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam manajemen sekolah artinya berbagai hal terkait dengan karakter dirancang dan diimplementasikan dalam aktivitas manajemen sekolah, seperti pengelolaan Peserta didik, peraturan sekolah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, perpustakaan, pembelajaran, penilaian, informasi serta pengelolaan lainnya.

Penilaian karakter merupakan sebuah bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata dari karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas yang diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran. Berdasarkan pemahaman ini penilaian otentik pada prinsipnya mengukur aktivitas yang dilakukan oleh

peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Berkaitan dengan pendidikan karakter, pendidikan karakter bertujuan agar peserta didik mampu menjadi orang yang berkarakter mulia. Usaha penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai karakter ini harus dilakukan secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran. Penilaian otentik pada dasarnya digunakan untuk mengkreasikan berbagai aktivitas belajar yang bermuatan karakter dan sekaligus mengukur keberhasilan aktivitas tersebut serta mengukur kemunculan karakter pada diri peserta didik. Tujuan pendidikan karakter di sekolah antara lain: a) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengintegrasian nilai-nilai utama berbasis pendidikan karakter dan budaya ke dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta sosialisasi dengan masyarakat, b) Mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya dalam kepemimpinan dan pengelolaan sekolah, c) Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan budaya dalam kegiatan keseharian di lingkungan sekolah.

Dalam penilaian pun, peserta didik sangat memerlukan perlakuan individual. Mereka penting dinilai dari kegiatan dan hasil belajarnya berdasarkan kemampuan dirinya. Karena setiap peserta didik mempunyai perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu bisa dilihat dari latar belakang sosial dan ekonomi keluarganya, minat, harapan, motivasi, kemampuan, perasaan, kreativitas, dan penampilan dalam kegiatan belajar. Untuk hal penilaian ini guru harus benar-benar adil dan otentik. Beberapa pembaharuan yang tampak pada penilaian otentik adalah sebagai berikut: a) Melibatkan peserta didik dalam tugas yang penting, menarik, bermanfaat, dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik, b) Tampak dan terasa sebagai kegiatan belajar bukan tes tradisional, c) Melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan mencakup pengetahuan yang luas, d) Menyadarkan peserta didik tentang apa yang harus dikerjakannya, e) Merupakan alat penilaian dengan latar standar, bukan alat penilaian yang distandarisasikan, f) Berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada

guru, dan g) Dapat menilai peserta didik yang berbeda kemampuan, gaya belajar, dan latar belakang kulturalnya.

Wibowo [19] menyatakan bahwa dalam konteks mikro pada satuan pendidikan, maka program pendidikan karakter perlu dikembangkan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan, b) Melalui semua subjek pembelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui kegiatan kurikuler pada setiap mata pelajaran, kokurikuler dan ekstra kurikuler. Pembinaan karakter melalui kegiatan kurikuler mata pelajaran, misalkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama harus sampai melahirkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*), sedangkan bagi mata pelajaran lain cukup melahirkan dampak pengiring, c) Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan (*value is neither caught nor taught, it is learned*) yang mengandung makna bahwa materi nilai-nilai dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. Tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, atau pun fakta seperti dalam mata pelajaran tertentu, d) Proses pendidikan yang dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip “Tut Wuri Handayani” dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif, e) Menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kepribadian dan kecerdasan. Mengembangkan

pembelajaran berbasis karakter di sekolah, f) Mendukung kegiatan penelitian, pelatihan, dan publikasi ilmiah yang berfokus pada tema-tema pendidikan karakter dan budaya di sekolah, g) Mengimplementasikan budaya akademik, humanis, dan religius di sekolah.

Penilaian karakter merupakan kegiatan penilaian yang didasarkan atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kreativitas, kemampuan, dan hasil belajar karakter peserta didik. Maka dari itu, guru harus mampu mengatur strategi dan mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik guna meningkatkan kualitas prestasi peserta didik. Selain itu, guru berusaha untuk mampu berlaku adil dan mampu menilai atau mengidentifikasi karakteristik positif yang dimiliki peserta didik. Dengan demikian, proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan sekolah pun mampu mencetak peserta didik yang berkualitas dan memiliki daya saing. Hendaknya pendidikan karakter juga dirumuskan di dalam kurikulum, diterapkan pada metode pendidikan, dan dipraktikkan dalam pembelajaran.

Mengacu pada pendapat Budimansyah, dkk [20], model pendidikan karakter dilakukan melalui tiga modus. Pertama, melalui penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kapasitasnya sebagai mata pelajaran yang menjadi menu wajib bagi seluruh peserta didik yang diberikan pada masa-masa awal peserta didik belajar di sekolah. Model yang pertama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan inovasi pembelajaran untuk membina karakter peserta didik. Kedua, mengoptimalkan Layanan Bimbingan Konseling kepada para peserta didik baik dari dalam maupun dari luar jam pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu menyelesaikan masalah dirinya sendiri sehingga tumbuh kesadaran akan segala potensi positif yang dimilikinya. Melalui berbagai pendekatan dan strategi, potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang secara optimal, sehingga

peserta didik memiliki kepercayaan diri untuk berkembang. Ketiga, menyelenggarakan penelitian, pengamatan, sosialisasi, study tour atau perkemahan yang merupakan menu wajib pada masa-masa akhir peserta didik menimba ilmu. Pendidikan karakter melalui semua yang disebutkan diatas dapat mengarahkan peserta didik untuk memantapkan berbagai karakter baik yang telah ditumbuhkan dan dikembangkan di sekolah melalui proses belajar sambil menjalani (*learning by doing*) dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal [21] dijelaskan bahwa pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang diampu oleh konselor sekolah berada dalam konteks tugas “kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan peserta didik (individu) dalam memandu perjalanan hidup mereka melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan”. Terkait dengan kegiatan pendidikan karakter di sekolah konselor sekolah wajib memfasilitasi pengembangan dan penumbuhan karakter serta tanpa mengabaikan penguasaan *hard skills* lebih lanjut yang diperlukan dalam perjalanan hidup serta dalam mempersiapkan karier [22]. Oleh karena itu, konselor sekolah hendaknya merancang dalam program kegiatannya untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan dan penumbuhan karakter pada peserta didik.

Konselor dapat merancang kegiatan yang dilakukan secara mandiri melalui program bimbingan dan konseling, dan juga bersama-sama dengan pendidik lain (guru bidang studi misalnya) secara sinergis yang dirancang melalui program sekolah dengan melibatkan semua pihak *stakeholders*. Berkaitan dengan bentuk kegiatan tersebut, maka layanan yang diberikan oleh konselor sekolah dapat bersifat preventif, kuratif, dan developmental dalam rangka menunaikan fungsi pendidikan dalam mengembangkan karakter peserta didik. Layanan

yang bersifat preventif berarti kegiatan yang dilakukan oleh konselor sekolah bermaksud untuk mencegah agar perilaku peserta didik tidak berlawanan dengan karakter yang diharapkan. Layanan yang bersifat kuratif bermakna bahwa layanan konselor ditujukan untuk mengobati atau memperbaiki perilaku peserta didik yang sudah terlanjur melanggar karakter yang diharapkan. Kegiatan developmental berarti layanan yang diberikan oleh konselor sekolah bermaksud untuk memelihara dan sekaligus mengembangkan perilaku peserta didik yang sudah sesuai agar tetap terjaga dengan baik, tidak melanggar norma, dan juga agar semakin lebih baik lagi perkembangan karakternya. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter memiliki dampak yang positif dalam keberhasilan akademik peserta didik. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Bimbingan dan konseling memiliki peranan penting dalam perkembangan peserta didik dalam aspek psikologis. Konselor (guru pembimbing) memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik memahami dirinya baik kelebihan dan kekurangannya maupun menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Layanan yang diberikan oleh konselor dapat berupa pendekatan psikologis maupun metode pemberian layanan BK yang dilakukan oleh konselor di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik khususnya dalam aspek afektif, sehingga peserta didik diharapkan dapat mengenal dan mengatasi permasalahan-permasalahan dirinya secara baik dan mandiri serta penuh tanggung jawab.

Upaya pemberian layanan bimbingan pribadi dan sosial terkait dengan menanamkan pentingnya akan kesadaran nilai-nilai moral positif masih sebatas pada pemberian layanan informasi, sehingga peserta didik hanya mengetahui apa itu nilai-nilai moral positif dan bukan bagaimana menumbuhkan kesadaran pada diri peserta didik. Proses pemberian bimbingan yang mengutamakan keaktifan konselor membuat peserta didik kurang mengaktualisasikan diri selama bimbingan berlangsung. Terlebih lagi konselor belum dapat menerapkan suatu pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Model pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) dan *innovative learning* bisa digunakan oleh konselor untuk menciptakan suasana bimbingan yang aktif, menyenangkan serta menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya nilai-nilai moral positif, salah satunya adalah dengan menggunakan media metafora dalam teknik klarifikasi nilai. Hal ini didukung oleh paparan dari berbagai pandangan mengenai pendekatan dalam pendidikan karakter. Menurut Hersh [23] yang dikutip oleh Masnur Muslich [17] dijelaskan setidaknya ada lima pendekatan rasional yang sering digunakan oleh para pakar pendidikan dalam upaya pengembangan karakter, yaitu (1) pendekatan pengembangan rasional (2) pendekatan pertimbangan, (3) pendekatan klarifikasi nilai (4) pendekatan moral kognitif dan (5) pendekatan perilaku sosial. Selain itu juga Elias [24] juga menjelaskan seperti yang dikutip Masnur Muslich [17] mengklasifikasikan berbagai teori yang berkembang dalam rangka penanaman nilai moral positif menjadi tiga, yakni (1) pendekatan kognitif, (2) pendekatan afektif, (3) pendekatan perilaku klasifikasi yang berpatokan pada kajian psikologis, yaitu perilaku, kognisi, dan afeksi.

Pendekatan Klarifikasi Nilai

Teknik klarifikasi nilai (*values clarification*) memberi penekanan pada usaha membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran

mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri khususnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moral positif yang membentuk karakter mulia. Banks [25] mengemukakan bahwa klarifikasi nilai sebagai proses belajar yang dilakukan dengan cara menggali, memperjelas nilai-nilai dan menetapkan rencana tindakan yang didasarkan kepada pemahaman dan pengetahuannya terhadap nilai-nilai yang dianutnya. Teknik ini memberi penekanan pada nilai yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang. Hal yang sangat dipentingkan dalam penggunaan teknik klarifikasi nilai adalah mengembangkan keterampilan peserta didik dalam melakukan proses menilai. Dalam proses klarifikasi nilai, peserta didik terlibat secara aktif, peserta didik mengembangkan pemahaman dan pengenalannya terhadap nilai-nilai pribadi, mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Peran pembimbing atau konselor adalah sebagai fasilitator yang bertugas merangsang dan mendorong peserta didik.

Setiap orang memiliki sejumlah nilai, baik yang jelas atau terselubung, disadari atau tidak. Klarifikasi nilai (*value clarification*) merupakan teknik mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses menilai (*valuing process*) dan membantu peserta didik menguasai keterampilan menilai dalam bidang kehidupan yang kaya nilai. Penggunaan model ini bertujuan, agar para peserta didik menyadari nilai-nilai yang mereka miliki, memunculkan dan merefleksikannya, sehingga para peserta didik memiliki keterampilan proses menilai. Teknik klarifikasi nilai merupakan teknik pengajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik. Karakteristik Teknik Klarifikasi Nilai sebagai suatu model dalam strategi pembelajaran sikap adalah proses penanaman nilai yang dilakukan melalui proses analisa nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri peserta didik kemudian menyelaraskan dengan nilai-nilai yang hendak ditanamkan (*knowing, acting and habit*). adalah model pendidikan nilai, dimana siswa dilatih untuk menemukan, memilih,

menganalisis, memutuskan, dan mengambil sikap sendiri atas nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Siswa dibantu menjernihkan, memperjelas, atau mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya. Misalnya, siswa dibantu menyadari nilai hidup yang sebaiknya diutamakan dan dilaksanakan lewat pembahasan kasus-kasus hidup yang sarat dengan konflik nilai atau moral.

Dalam praktik pelaksanaan penanaman nilai-nilai moral positif sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan karakter peserta didik, konselor atau guru yang berperan sebagai fasilitator meminta siswa mendiskusikan secara kelompok pendapat mereka tentang contoh kasus yang diberikan dan nilai yang terkandung dalam kasus tersebut. Menurut Djahiri sebagaimana yang dikutip oleh Tukiran Taniredja [27], dkk mengemukakan ada beberapa bentuk penerapan teknik klarifikasi nilai yang dapat diaplikasikan, yaitu: a) Menganalisa suatu kasus yang kontroversial, suatu cerita yang dilematis, mengomentari kliping, membuat laporan dan kemudian dianalisis bersama, b) Menggunakan matrik, pada pengaplikasian teknik klarifikasi nilai ini peserta didik diajarkan membuat daftar baik-buruk, daftar tingkat urutan, daftar skala prioritas, daftar gejala kontinum, daftar penilaian diri sendiri, dan daftar membaca perkiraan orang lain tentang diri kita, c) Pengaplikasian teknik klarifikasi nilai dengan menggunakan kartu keyakinan, kartu sederhana ini berisikan, pokok masalah, dasar pemikiran positif negatif dan pemecahan pendapat siswa yang kemudian diolah dengan analisis yang melibatkan sikap siswa terhadap masalah tersebut, d) Pengaplikasian teknik klarifikasi nilai melalui teknik wawancara, cara ini melatih keberanian siswa untuk mampu mengklarifikasi pandangannya kepada lawan bicara dan menilai secara baik, jelas dan sistematis, e) Teknik inkuiri nilai dengan pertanyaan yang acak random, dengan cara ini siswa berlatih berpikir kritis, analitis, memiliki rasa ingin tahu dan sekaligus mampu merumuskan berbagai hipotesis/ asumsi, dan berusaha mengungkap suatu nilai atau sistem nilai yang ada atau dianut, atau yang menyimpang.

Metode klarifikasi nilai adalah suatu langkah yang sistematis untuk membantu siswa mengkaji nilai-nilai yang ada pada dirinya. Siswa dapat memilih nilai yang sesuai dengan keyakinan, dapat merencanakan tindakan yang akan dilakukan serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dalam perilaku sehari-hari (*knowing, acting and habit*). Menurut Rath [28] dalam Muslich [17], tahapan klarifikasi nilai meliputi: a) Pengenalan dan pemahaman, melakukan eksplorasi terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa. Dapat dilakukan dengan cara membuat daftar (*list*) nilai apa saja yang dianutnya. Kemudian konselor menanyakan sejauh mana nilai-nilai itu mempengaruhi tingkah laku siswa, b) Memilih, memilih dengan bebas berbagai nilai yang dikehendaki siswa, hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi keluasan sistem nilai yang dimilikinya, menilik diri dalam menentukan mana sistem nilai keyakinannya yang menguntungkan dan mana yang merugikan dirinya baik secara pribadi, sosial, maupun religius. Dalam memilih nilai dari berbagai alternatif, siswa mencari dan menemukan sumber-sumber informasi nilai yang umum diyakini orang, khususnya orang-orang berarti, dan mendiskusikannya bersama konselor. Setelah mengadakan pertimbangan tentang berbagai akibatnya, siswa berupaya mendiskusikannya secara internal (*membatin*), melakukan pertimbangan nilai, bahkan perdebatan internal (*disputing*) mengenai keuntungan dan kelemahan sistem nilai tertentu, c) Menghargai (*prizing*), Setelah siswa memilih nilai yang telah diyakini, siswa diajak untuk menghargai pilihannya tersebut dengan cara merasa bahagia atau gembira dengan pilihannya dan mau mengakui pilihannya itu di depan umum, d) bertindak, Siswa diajarkan membuat keyakinan nilai tegas dan mencoba berbuat serta berinteraksi menurut sistem nilai pilihannya, serta nilai tersebut dilakukan berulang-ulang sebagai suatu pola tingkah laku dalam hidup, dan e) refleksi, Membuat refleksi diri terhadap pilihan nilainya, pengalaman yang dirasakan, apakah ia merasa nyaman dengan pilihan nilainya. Melaksanakan evaluasi apakah ia sudah merasa puas dengan pilihannya, hal-hal apa yang

dirasa belum sesuai, apakah diperlukan revisi terhadap pilihan nilainya.

Adapun tahap-tahap teknik klarifikasi nilai yang dapat digunakan dalam menumbuhkan dan mengembangkan karakter positif peserta didik sebagai bentuk *treatment* dirinci sebagai berikut :

a. Pengenalan dan pemberian motivasi

Mengawali kegiatan *treatment* dengan motivasi untuk pembinaan hubungan baik. Peneliti/konselor dapat memberikan kegiatan pendahuluan, seperti permainan atau bermain peran, yang dapat memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan *treatment*. Tujuan utama dalam tahap pembinaan hubungan baik adalah untuk saling mengenal dan mengetahui identitas masing-masing anggota kelompok, mengembangkan kepercayaan sehingga memunculkan pemahaman dari masing-masing anggota *treatment*. Hasilnya siswa sangat rileks pada saat kegiatan ini berlangsung dan mereka juga bersedia untuk menyebutkan hasil pekerjaan kepada siswa lain sehingga hubungan antara peneliti dengan siswa kelompok *treatment* juga tidak lagi tegang. Selain itu konselor yang bertindak sebagai fasilitator juga memberikan kontrak perilaku agar anggota *treatment* dapat bertanggung jawab untuk mengikuti *treatment* yang diberikan sampai selesai sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dan gambaran mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa pada pertemuan berikutnya serta tugas yang harus dikerjakan.

b. Memilih (*choosing*) nilai

Memilih dengan bebas berbagai nilai yang dikehendaki siswa, hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi keluasan sistem nilai yang dimilikinya, menilik diri dalam menentukan mana sistem nilai keyakinannya yang menguntungkan dan mana yang merugikan dirinya baik secara pribadi, sosial, maupun religius. Memilih nilai dari berbagai alternatif, siswa mencari dan menemukan sumber-sumber informasi nilai yang umum diyakini orang, khususnya orang-orang berarti, dan mendiskusikannya bersama konselor

sebagai fasilitator. Setelah mengadakan pertimbangan tentang berbagai akibatnya, siswa berupaya mendiskusikannya secara internal (membatin), melakukan pertimbangan nilai, bahkan perdebatan internal (*disputing*) mengenai keuntungan dan kelemahan sistem nilai tertentu. Tahap ini peneliti memberikan berbagai pilihan alternatif kepada siswa sebagai bahan pertimbangan untuk mengasah kesadaran siswa akan nilai-nilai karakter positif.

c. Menghargai nilai (*prizing*)

Setelah siswa memilih nilai yang telah diyakini, siswa diajak untuk menghargai pilihannya tersebut yaitu dengan meyakini dan mau mengakui pilihannya itu di depan umum dengan cara meminta siswa membacakan hasil pekerjaannya di depan siswa yang lain. Pada tahap ini siswa diajak mendiskusikan pilihan alternatif yang sudah dipilih dengan meminta siswa memberikan alasan pemilihan alternatif tersebut beserta pertimbangan resiko yang ada.

d. Bertindak (*acting*)

Siswa diajarkan membuat keyakinan nilai-nilai karakter positif dengan tegas dan mencoba berbuat serta berinteraksi menurut sistem nilai pilihannya. Nilai tersebut dilakukan berulang-ulang sebagai suatu pola tingkah laku dalam hidup. Tahap ini membantu siswa untuk bisa memikirkan serta mengira-ngira kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi jika alternatif tersebut dilakukan, hambatan yang mungkin ditemui dan bagaimana mengatasinya sehingga memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas dan kemantapan hati untuk melakukan alternatif yang sudah dipilih dalam kehidupan sehari-hari.

e. Refleksi dan evaluasi

Membuat refleksi diri terhadap pilihan nilainya, menganalisis pengalaman yang dirasakan, apakah ia merasa nyaman dengan pilihan nilainya. Bagaimana menyelesaikan hambatan yang muncul sebagai dampak dari pilihan nilainya, dan melaksanakan

evaluasi apakah ia sudah merasa puas dengan pilihannya, hal-hal apa yang dirasa belum sesuai, apakah diperlukan revisi terhadap pilihan nilainya terkait dengan pengalaman yang diceritakan oleh siswa.

Teknik klarifikasi nilai dianggap efektif untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai moral positif peserta didik menjadi kebiasaan karakter baik karena klarifikasi nilai memiliki tujuan membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta orang lain, membantu siswa agar mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur terhadap orang lain, berhubungan dengan nilai moral diri sendiri, membantu siswa agar mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, untuk memahami perasaan, nilai-nilai moral, dan pola tingkah laku mereka sendiri [29].

Kesimpulan

Penggunaan klarifikasi nilai berupa diskusi kasus atau suatu permasalahan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya nilai karakter baik (*knowing, acting and habit*) ini memiliki manfaat bagi siswa dan konselor. Bagi siswa penggunaan klarifikasi nilai ini bermanfaat untuk menstimulasi pikiran yang memungkinkan siswa dapat menyilangkan gagasan-gagasan sehingga kesadarannya menjadi meningkat, dapat memperluas pandangan siswa untuk membuat alternatif dalam melakukan setiap perbuatan dan siswa mengetahui bahwa setiap tingkah laku yang diperbuat sesuai nilai yang dipilihnya memiliki resiko sehingga menimbulkan kesadaran bahwa segala tingkah laku harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan bagi konselor, penggunaan klarifikasi nilai dapat dijadikan sebagai variasi teknik yang bermanfaat dalam memberikan layanan bimbingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai karakter baik (*knowing, acting and habit*).

Tahap-tahap yang ada dalam teknik klarifikasi nilai membantu siswa untuk menetapkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada

nilai-nilai yang mereka miliki. Sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling, klarifikasi nilai mengajarkan pada siswa untuk tahu mengapa dan bagaimana membuat keputusan. Peneliti tidak menetapkan keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh siswa ataupun memilhkan alternatif yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa belajar memperkirakan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul berkenaan dengan alternatif-alternatif nilai yang dipilih. Sehingga dapat diartikan bahwa teknik klarifikasi nilai dengan pemberian kasus yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral positif sebagai dasar pengembangan karakter dapat membantu siswa fokus pada masalah moral antara benar dan salah yang harus dihadapkan kepada siswa sebagai kenyataan. Klarifikasi nilai menekankan pertimbangan menyangkut nilai-nilai moral positif yang diwujudkan sebagai karakter baik dan menjadi pembiasaan positif dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.

Referensi

- [1] Depdiknas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas. 2003.
- [2] Kemdikbud. Panduan Penguatan Pendidikan Karakter pada Jenjang Pendidikan Dasar. Jakarta: Kemdikbud. 2017.
- [3] Bolu-Steve, F., & Oredugba, O. O. Influence of Counselling Services on Perceived Academic Performance of Secondary School Students in Lagos State. *International Journal of Instruction*, 10(2), 211–228. 2017.
- [4] Epstein, J., & Van Voorhis, F. School Counselors' Roles in Developing Partnerships with Families and Communities for Student Success. *Professional School Counseling*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.5330/prsc.14.1.m6070358408g9227>. 2010.
- [5] Holland, M. M. Trusting Each Other: Student-Counselor Relationships in Diverse High Schools. *Sociology of Education*, 88(3), 244–262. 2015.
- [6] Kimotho, F. W., Njoka, J. N., & Gitumu, M. W. Impact of Guidance and Counseling Services on Students' Discipline a Case of Public

- Secondary Schools in Eastern Kenya. *Kenya Journal of Educational Planning Economics and Management*, 11(1). 2011.
- [7] Mau, W.-C. J., Li, J., & Hoetmer, K. Transforming High School Counseling: Counselors' Roles, Practices, and Expectations for Students' Success. *Administrative Issues Journal: Connecting Education, Practice, and Research*, 6(2), 83–95. 2016.
- [8] Nduta, M. M., & Gichuho, C. M. The Role of Guidance and Counselling in Curbing Student Indiscipline in Secondary Schools in Kambaa Division, Kiambu County, Kenya. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 3(9), 790–793. 2014.
- [9] Onyango, P. A., Aloka, P. J., & Raburu, P. Effectiveness of Guidance and Counseling in the Management of Student Behaviour in Public Secondary Schools in Kenya. *International Journal of Applied Psychology*, 8(1), 6–11. 2018.
- [10] Muslihati, M. Peran Bimbingan dan Konseling dalam Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 4(3), 101-108. <https://doi.org/10.17977/um001v4i32019p101>. 2019.
- [11] Romia Hari Susanti, "Meningkatkan Kesadaran Tanggung Jawab Siswa SMP Melalui Penggunaan Teknik Klarifikasi Nilai", *JKI*, vol. 1, no. 1, pp. 38-46, Nov. 2015.
- [12] Lickona, T. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam. 2009.
- [13] Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter; Solusi yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Bogor: Indonesia Heritage F. 2004.
- [14] Dharma Kesuma, dkk. *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.
- [15] Doni Koesoema, A. *Pendidikan Karakter di Zaman Keblinger*. Jakarta: Grasindo. 2009.
- [16] Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- [17] Masnur Muslich. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- [18] Muchlas Samani dan Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.

- [19] Agus Wibowo. Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- [20] Budimansyah, Dasim, dkk. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Bandung : Genesindo. 2010.
- [21] ABKIN. Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta: ABKIN. 2007.
- [22] ABKIN & ILO. Panduan Pelayanan Bimbingan Karir: Bagi Guru Bimbingan dan Konseling Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: ILO. 2011.
- [23] Hersh, *et al.* Model of Moral Education. New York: Longman Inc. 1980.
- [24] Awad, Elias M & Hassan M Ghaziri. Knowledge Management, 2004, New Jersey: Pearson Education, Inc
- [25] Banks, J.A. Teaching strategies for the social studies. New York: Longman Burns, Anne. 1999.
- [26] Djahiri, Ahmad Kosasih. Dasar-dasar Umum Metodologi dan Pengajaran Nilai-nilai Moral VCT. Bandung: IKIP Bandung. 1994/1995.
- [27] Tukiran Taniredja. Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif. Alfabeta: Bandung. 2014.
- [28] Rath, L.E., Harmin, M. & Simon, S.B. 1978. *Values and Teaching: Working with Values in the Classroom, Second Edition*. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- [29] Superka, D.P., dkk. 1976. *Values Edition Source Book*. Colorado: Social Science Education Consortium, Inc.

Motivasi Belajar Siswa SD di Saat Pandemi COVID-19

Arief Rahman Hakim¹, Sholihah²

Pengantar

Pendidikan adalah hal wajib yang harus diterapkan oleh seluruh negara. Berawal dari pendidikan yang diterapkan bagi seluruh warga masyarakat inilah, merupakan dasar dari generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa yang semakin banyak diharapkan dapat memajukan bangsanya. Maka dari itu setiap negara selalu berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas dan mengembangkan program-program pendidikan yang ada di negaranya melalui berbagai aspek pendukung yang memiliki tujuan untuk menunjang kemajuan generasi penerus bangsanya.

Sama halnya dengan di negara kita, perkembangan dan kualitas pendidikan di Indonesia mendapatkan perhatian penting dari pemerintah. Pemerintah berharap melalui jenjang pendidikan, masyarakat diharapkan memiliki wawasan yang berguna membantu masyarakat untuk menghadapi tantangan dimasa depan. Pendidikan memiliki arti sebagai pengembangan paradigma dari segi intelektual, dimana melalui paradigma ini mengatakan bahwa peserta didik diupayakan memiliki kesiapan mental dan kemampuan teori yang berguna untuk dijadikan bekal masa depan [1]. Melalui pendapat yang dikemukakan oleh ahli tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat karena dengan pendidikan masyarakat dapat memiliki bekal ilmu yang dapat digunakan untuk kehidupannya.

Mengingat pentingnya perkembangan pendidikan untuk masyarakat, pemerintah gencar memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diterapkan. Pentingnya peningkatan kualitas

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

² SDN Putat Kidul 2

pendidikan bagi masyarakatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pengetahuan masyarakat menjadi lebih luas, dan terbuka. Agar pendidikan berjalan dan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan semestinya, pemerintah merancang pendidikan yang harus ditempuh oleh masyarakat. Rancangan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam sebuah lembaga yang bernama sekolah, dengan adanya peran pendidik sebagai seorang yang nantinya bertugas untuk melakukan proses pembelajaran bersama peserta didik baik di dalam atau di luar kelas.

Proses pembelajaran yang ada di sekolah tidak akan pernah lepas dari peran serta pendidik selaku orang yang berperan penting untuk menyampaikan dan mengajarkan pembelajaran kepada peserta didiknya di sekolah [2]. Perkembangan diri pada setiap peserta didik selama berada di sekolah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pendidik karena dengan memantau dan memahami perkembangan peserta didik, pendidik dapat mengarahkan bakat dan minat yang dirasa sejalan dengan kemampuan peserta didiknya [3]. Maka dari itu pendidik memiliki peran penting bagi peserta didiknya untuk memberikan ilmu pengetahuan serta mengarahkan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar penting bagi pendidik untuk selalu berinteraksi dengan para peserta didiknya. Selain itu diwajibkan bagi pendidik memperhatikan rentang usia peserta didik sehingga pembelajaran yang diterima dapat tersampaikan dengan baik karena sesuai dengan jenjangnya. Hal ini tertera dalam Undang-Undang pemerintah No.14 Tahun 2005 mengenai tentang Pendidik dan Dosen menyatakan bahwa seseorang pendidik profesional memiliki amanat tugas utama yang wajib untuk dilakukan yaitu untuk mengajar, membimbing, mendidik, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar atau setara dengan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),

dan pendidikan menengah setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah tugas dari seorang pendidik [4]. Proses pembelajaran yang dilakukan pendidik dengan peserta didik tidak semata-mata terjadi begitu saja, melainkan diwajibkan bagi pendidik untuk memperhatikan terlebih dahulu jenjang peserta didik, merencanakan pembelajaran, dan pendidik dapat memulai pembelajaran di kelasnya.

Kasus pandemi yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease* (Covid-19) di bumi memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan suatu negara, diantaranya terjadi pada sektor pendidikan. *World Health Organization* (WHO) menyarankan agar menghentikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan massa untuk sementara waktu. Pembelajaran dilaksanakan dengan meminimalisir adanya kontak fisik antara pendidik dengan peserta didik, ataupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya.

Sejak pandemi ini merebak di Indonesia beberapa cara telah dilakukan oleh pemerintah. Melalui surat edarannya, pihak Kemendikbud memberikan instruksi kepada seluruh sekolah dan perguruan tinggi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan mahasiswa untuk belajar dari rumah masing-masing. Penutupan sekolah serta universitas yang terdapat di Indonesia mempunyai akibat untuk peserta didik ataupun mahasiswa [5]. Upaya ini diharapkan supaya lembaga pembelajaran tidak melaksanakan segala bentuk kegiatan. Kebijakan karantina ataupun *lockdown* dilakukan untuk membatasi adanya interaksi yang melibatkan banyak orang.

Pada masa pandemi Covid-19 ini proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Berdasarkan pada penelitian [6] pada masa pandemi Covid-19, diterapkan sebuah model pembelajaran baru yaitu model pembelajaran daring (dalam jaringan) yang mana peserta didik melakukan pembelajaran dari rumah melalui telepon seluler, laptop maupun komputer. [7] penggunaan teknologi digital memungkinkan

peserta didik dan pendidik berada di tempat yang berbeda selama proses pembelajaran. [8] Pembelajaran berbasis online merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh [9] menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Pembelajaran tematik secara online ini juga diterapkan di sekolah dasar yang berada di Kabupaten Malang, meskipun tetap ada keluhan dari orang tua peserta didik atau pendidik sendiri mengenai efektivitas dari pembelajaran tersebut.

Pembelajaran tematik menggambarkan pendidikan yang mengintegrasikan beberapa muatan mata pelajaran ke dalam bentuk tema. Tujuannya adalah memberikan informasi yang utuh kepada peserta didik sesuai dengan tema yang dipelajari [10]. Kepala Sekolah SDN Putat Kidul 2 menerangkan bahwa pembelajaran tematik bukanlah pembelajaran yang mudah disampaikan secara *online*. Kesiapan antara peserta didik, pendidik, serta orang tua bisa mempengaruhi proses pendidikan. Akibat yang akan terjadi adalah menurunnya motivasi peserta didik dalam belajar.

Motivasi belajar yang dimiliki peserta didik dapat membantu peserta didik mengikuti jalannya proses pembelajaran. Arti kata dari motivasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah salah satu perilaku yang cenderung timbul dalam diri setiap manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan melalui usaha yang dilakukan [11]. Sebuah perilaku manusia yang mengalami perubahan setelah melalui berbagai pengalaman dan banyak melakukan latihan disebut dengan belajar [12]. Berdasarkan pendapat tersebut motivasi belajar adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam diri manusia untuk melakukan sebuah perubahan yang ada pada dirinya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Motivasi merupakan daya yang ada pada setiap orang dan menjadi daya dorong utama bagi orang untuk melakukan latihan guna mencapai tujuan yang wajar [13]. Motivasi belajar yang terdapat pada peserta didik sangat menarik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Motivasi merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan sifat belajar [14]. Ini karena peserta didik akan berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh jika mereka memiliki inspirasi yang tinggi. Kehadiran pembelajaran berbasis online akan mempengaruhi peserta didik sekolah dasar. Sebelum pandemi COVID-19, peserta didik belum pernah mengalami pembelajaran online, namun sejak diberlakukannya aturan belajar dari rumah, pembelajaran yang diterapkan mempengaruhi motivasi peserta didik dalam belajar.

Penelitian ini difokuskan pada motivasi belajar peserta didik selama pandemi COVID-19 secara *online*. Penelitian ini menggambarkan motivasi belajar peserta didik sekolah dasar dalam pembelajaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Sehingga dapat menjadi informasi serta pesan bagi pendidik dan wali murid.

Pembahasan

Pandemi COVID-19 berdampak pada semua bangsa, bahkan Indonesia. Efeknya adalah pemberlakuan belajar dari rumah untuk menghentikan penyebaran infeksi COVID-19. Setelah COVID-19 masuk ke Indonesia pemerintah daerah dan provinsi membuat berbagai macam strategi [15]. Strateginya adalah meniadakan pembelajaran tatap muka secara langsung dan menggantikannya dengan pembelajaran berbasis *online*. Pembelajaran berbasis *online* diberlakukan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pembelajaran *online* merupakan pembelajaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung [16]. Kemajuan teknologi pada abad ini semakin pesat. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya perkembangan gawai di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, pengguna gawai tidak

hanya orang-orang dewasa saja. Namun, banyak anak usia dini maupun orang tua memiliki gawai. Gawai memiliki banyak fungsi bagi penggunaannya, antara lain untuk bekerja, berkomunikasi, maupun hiburan. Di masa pandemi ini, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara langsung sehingga diterapkannya sistem pembelajaran daring. Pada pembelajaran daring, gawai digunakan sebagai salah satu alat bagi pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang berupa modul, video, kuis dan sebagainya.

Pembelajaran daring merupakan salah satu upaya pendidikan formal yang diselenggarakan secara terpisah antara pendidik dengan peserta didiknya sehingga memanfaatkan teknologi yang dapat menghubungkan keduanya Meidawati dalam [16]. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari pembelajaran daring yaitu dapat diakses di berbagai tempat. Pembelajaran daring tidak mengharuskan adanya pertemuan secara langsung antara peserta didik dengan pendidik. Berdasarkan pernyataan tersebut, pembelajaran daring merupakan salah satu pembelajaran yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang dengan pesat sehingga dapat menghubungkan pihak pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran ini juga memungkinkan untuk dilakukan ketika pendidik dan peserta didik berjarak jauh.

Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah yang mana antara pendidik dan peserta didik berada di lokasi yang terpisah sehingga memanfaatkan teknologi telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Pembelajaran daring ini diterapkan sejak adanya anjuran untuk tetap di rumah saja untuk menghindari pandemi covid-19. Adapun tujuan dari penerapan pembelajaran daring yaitu untuk memberikan layanan pembelajaran yang efektif dan interaktif pada peserta didik dengan memanfaatkan jaringan teknologi yang ada sehingga dapat menjangkau peserta didik secara merata [17].

Adanya pandemi Covid-19 ini membawa perubahan pada sistem pembelajaran di Indonesia. Namun, penerapan pembelajaran

daring ini membawa beberapa manfaat seperti yang diungkapkan oleh Meidawati dalam [16], membangun komunikasi dan diskusi antara pendidik dan peserta didik, antar peserta didik dapat melakukan diskusi tanpa perantara pendidik, memudahkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, menjadi salah satu sarana untuk ujian maupun kuis, pendidik dapat memberikan materi dengan mudah menggunakan gambar, video, maupun file, memudahkan pendidik untuk membuat bahan ajar dan evaluasi dimana saja dan kapan saja tanpa batas waktu.

Hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa siklus belajar yang terjadi di sekolah dasar Kabupaten Malang mengalami perubahan. Belajar tidak perlu dilakukan di sekolah tapi bisa dilakukan di mana saja. Pengaturan yang diberikan oleh dinas pendidikan setempat adalah melakukan proses pembelajaran dari rumah, hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Hal ini sesuai dengan penilaian [18] yang menyatakan bahwa belajar merupakan siklus sosial karena adanya keterkaitan antara individu dengan lingkungannya dalam menyikapi kebutuhan hidup. Artinya, belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu dilakukan di sekolah.

Hal ini sesuai dengan penilaian [19] yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis online atau pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada seperti internet. Pemanfaatan gadget, PC ataupun perangkat lain harus terhubung dengan jaringan internet untuk mempermudah interaksi antara peserta didik dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan pendidik.

Terlaksana sebuah pembelajaran yang bermakna, yaitu ketika pelaksanaan proses pembelajaran terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik. Maksud dari hal ini yaitu pendidik memberikan materi-materi kepada peserta didik dengan cara menjelaskan bukan hanya dengan pemberian tugas. Dengan adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang sedang dipelajari.

Pendidik dan peserta didik harus tersambung dalam proses pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring harus ada sebuah alat dan forum yang berisi anggota kelas beserta pendidik. Pembelajaran *online* juga dilaksanakan di sekolah dasar melalui bimbingan orang tua di rumah. Melalui pemanfaatan teknologi dalam inovasi tersebut pembelajaran di musim pandemic dapat dilaksanakan dengan baik. Aplikasi yang dapat dimanfaatkan peserta didik dan pendidik diantaranya adalah *google meet*, *google classroom*, *video conference*, *live chat* atau telepon dan *whatsapp group*.

Pemanfaatan inovasi aplikasi-aplikasi tersebut untuk mempermudah peserta didik dalam belajar. Sesuai dengan [20] pembelajaran berbasis *online* merupakan pengembangan instruktif yang mencakup komponen inovasi data dalam menyelesaikan pembelajaran. Pembelajaran berbasis *online* merupakan pembelajaran yang dilakukan dari jarak jauh menggunakan teknik pembelajaran yang pelaksanaannya terpisah dari aktivitas belajar. Akan tetapi hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa sebagian besar sekolah dasar yang ada di Kabupaten Malang melakukan pembelajaran hanya melalui *whatsapp group* dengan sumber belajar adalah buku tema sebagai buku pegangan atau *literasi* peserta didik.

Pembelajaran *online* dengan hanya menggunakan perangkat tersebut memiliki beberapa kendala. Kendala yang disampaikan narasumber seperti penyampaian informasi atau materi dari pendidik ke peserta didik kurang maksimal, karena proses pembelajaran lebih dominan pada pemberian tugas. Pembelajaran terpaku pada pemberian tugas. Seorang pendidik seharusnya memberikan pemahaman materi kepada peserta didik dengan menggunakan media-media yang mendukung. Sehingga dalam pembelajaran daring ini, peserta didik mampu memahami materi dengan baik dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan maksimal.

Disamping itu, tugas yang diberikan pendidik kepada peserta didik pengumpulannya tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan karena koneksi internet yang kurang stabil atau *handphone* bermasalah sehingga tugas terlambat terkirim dan kuota internet habis.

Penugasan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik akan materi yang dipelajari peserta didik secara mandiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat [21] penilaian dalam proses pembelajaran yang dilakukan pendidik harus selalu dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian keberhasilan peserta didik. Kegiatan penilaian juga merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang sudah disampaikan.

Langkah pembelajaran berbasis tema yang dilakukan secara online dapat mengembangkan kemandirian peserta didik. Karena pendidik dalam hal ini hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Hal ini sesuai [22] bahwa pembelajaran berbasis tema lebih menekankan keaktifan peserta didik sehingga mereka memperoleh wawasan dan kesiapan dalam menemukan informasi atau materinya sendiri. Kemampuan peserta didik dalam belajar secara mandiri juga tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan orang tua untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh anaknya masing-masing.

Proses pembelajaran secara *online* juga mengalami beberapa kelemahan atau kekurangan. Kekurangan dalam pembelajaran berbasis *online* ini mencakup persyaratan untuk kerangka kerja yang baik, dan membutuhkan banyak biaya. Keadaan geologis rumah peserta didik juga sangat mempengaruhi kemudahan akses internet [23].

Proses pembelajaran yang dilakukan secara online sedikit banyak akan mempengaruhi peserta didik dalam belajar. Terutama dalam hal motivasi belajar yang dialami peserta didik. mengingat dukungan dari dalam diri seseorang peserta didik berbeda beda dan bergantung pada berbagai sudut pandang yang ada. Motivasi memiliki arti kata motif yaitu dorongan dari dalam diri individu guna melakukan

kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada aktivitas belajar, motivasi merupakan sebagai segala dorongan di dalam diri peserta didik yang mengakibatkan, bertanggung jawab, keberlangsungan serta memberi masukan terhadap proses belajar, sehingga tujuan bisa dicapai oleh peserta didik tersebut [24].

Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, penting bagi pendidik untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Melalui motivasi arah proses belajar dapat berjalan dengan baik dan melalui motivasi seseorang akan memiliki beberapa pilihan yang mengarah pada kegiatan positif saat melakukan kegiatan belajar [25]. Pada dunia pendidikan motivasi dapat memberikan semangat bagi peserta didik saat melakukan kegiatan pembelajaran. Melalui motivasi pula perilaku peserta didik dapat terbentuk menjadi lebih baik lagi.

Motivasi seseorang bersumber dari diri sendiri (*intrinsik*) dan bersumber dari luar (*ekstrinsik*). Motivasi intrinsik adalah “motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik sendiri”[26]. Individu didorong untuk berperilaku menuju tujuan tertentu tanpa adanya faktor pendorong eksternal. Sehingga motivasi intrinsik adalah motivasi yang termasuk dalam situasi belajar yang berasal dari kebutuhan dan tujuan siswa itu sendiri atau dengan kata lain motivasi intrinsik tidak memerlukan rangsangan dari luar tetapi berasal dari peserta didik itu sendiri.

Motivasi ekstrinsik adalah “motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan atau dorongan dari luar” [27]. Motivasi ekstrinsik sangat dibutuhkan peserta didik dalam belajar karena kemungkinan terjadinya perubahan kondisi peserta didik dan juga faktor lain seperti kurangnya minat dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik harus saling menambah dan memperkuat agar individu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Membangun dan mengkondisikan semangat belajar dengan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan seorang pendidik. Tidak hanya pendidik yang

membutuhkan motivasi saat melakukan kegiatan pembelajaran tetapi peserta didik juga memerlukan motivasi saat mengikuti proses pembelajaran. Ada lima alasan pentingnya motivasi untuk peserta didik yaitu menyadarkan peserta didik akan pentingnya belajar, memberitahukan pentingnya tekun saat belajar, memberikan arah yang sejalan pada saat kegiatan belajar, membangkitkan semangat belajar peserta didik, dan memberikan gambaran kepada peserta didik dari penting belajar untuk bekal masa depan peserta didik [28].

Saat proses pembelajaran akan dimulai, penting bagi pendidik untuk memotivasi dirinya terlebih dahulu. Ketika pendidik dapat membangun motivasi diri terlebih dahulu pada dirinya maka semangat yang ada pada pendidik saat akan mengajar akan terlihat saat kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat menularkan rasa semangat pada peserta didik untuk siap mengikuti pembelajaran. Berdasarkan pentingnya motivasi bagi pendidik dan peserta didik maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa penting bagi pendidik untuk membangun motivasi untuk dirinya sendiri agar semangat tersebut dapat tertular ke peserta didiknya, selain itu pendidik tidak pernah lupa untuk selalu menekankan kepada para peserta didik akan pentingnya belajar sebagai bekal masa depan peserta didiknya.

Hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa selama ini peserta didik masih tetap memenuhi dan mengikuti proses kegiatan pembelajaran *online*. Ketika peserta didik mengalami kesulitan, peserta didik akan bertanya kepada pendidik, proses seperti ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki perhatian dan keteguhan dalam belajar. Indikator motivasi belajar menurut [29] adalah ketekunan, keuletan, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar atau menyelesaikan tugas.

Motivasi seseorang dapat terlihat dalam berbagai kata, yaitu keinginan, kemauan, minat, tekad, dorongan, kebutuhan dan cita-cita [30]. Sehingga fungsi motivasi dalam belajar yang ditunjukkan oleh peserta didik tersebut merupakan dorongan dalam diri yang timbul pada proses pembelajaran yang berlangsung. Respon peserta didik

dalam belajar dan menanyakan beberapa permasalahan yang belum mereka pahami merupakan bentuk perhatian yang ditunjukkan akan materi yang disampaikan oleh pendidik.

Aspek perhatian adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan pemilihan rangsangan yang berasal dari sekitar lingkungannya [18]. Motivasi seseorang juga dapat terlihat dari aspek hubungan. Aspek relasi merupakan aspek yang memiliki makna dalam hubungan antara peserta didik dan pendidik. Menarik atau tidak merupakan signifikansi dalam hubungan antara pendidik dan peserta didik. Selain itu, motivasi juga dilihat dari aspek kepercayaan diri yang dimiliki peserta didik. Keyakinan terhadapnya dapat membuat peserta didik memiliki motivasi yang baik, motivasi yang baik atau sebaliknya. Ketika semua hal telah diperoleh, hasil akhirnya adalah aspek kepuasan. Kepuasan yang dimiliki seseorang dalam hal belajar sehingga dapat merangsang motivasi belajar. Motivasi peserta didik merupakan hasil dorongan dari pendidik dan orang tua. Selama COVID-19 orang tua memiliki peran untuk mengontrol aktivitas peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat [31] yang menyatakan bahwa motivasi belajar timbul karena faktor eksternal atau faktor dari luar dirinya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat [32] yang menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan daya dorong utama pada peserta didik yang menyebabkan latihan-latihan belajar, menjamin keselarasan kegiatan pembelajaran dan memberikan pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar berperan penting dalam memberikan energi atau kegairahan dalam belajar, sehingga peserta didik yang terpacu kuat memiliki energi yang besar untuk melakukan kegiatan belajar.

Peran serta pendidik dan orang tua sangatlah dibutuhkan dalam pembelajaran secara *online*. Seorang pendidik berperan penting memimpin dan menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Agar tujuan dari pembelajaran yang telah dirancang dapat tercapai dengan baik perlu adanya motivasi yang tinggi baik melalui

pendidik dan melalui peserta didik [25]. Terdapat tiga alasan pentingnya motivasi bagi pendidik [33] yaitu:

- a. Menciptakan, meningkatkan dan menjaga semangat belajar
- b. Mengerti dan memahami bentuk-bentuk motivasi
- c. Meningkatkan peran pendidik saat berada di kelas sebagai pendidik, pemimpin, penasehat, teman diskusi, dan fasilitator.

Peran serta orang tua dalam pembelajaran secara online sangatlah besar. Keluarga adalah berkumpulnya orang-orang yang terdiri dari berbagai orang, memiliki hubungan antar manusia, ada ikatan, komitmen, dan kewajiban di antara orang-orang tersebut [34]. Keluarga memiliki peran penting dalam membina karakter anak. Keluarga juga dipandang sebagai suatu lembaga (fondasi) yang dapat menjawab persoalan-persoalan, khususnya kebutuhan untuk peningkatan wataknya dan kemajuan umat manusia.

Peran orang tua dalam pendidikan menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya, di antara peran orang tua dalam pendidikan adalah sebagai pendidik. Orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya dengan mengoptimalkan perkembangan seluruh potensi yang dimiliki seorang anak, baik aspek afektif, kognitif maupun psikomotorik. Kedua orang tua sebagai motivator. Meliputi motivasi intrinsik atau dorongan yang berasal dari hati, dan motivasi ekstrinsik atau dorongan yang berasal dari luar diri (lingkungan). Ketiga orang tua berperan sebagai fasilitator. Selain terpenuhinya kebutuhan dasar anak ketika belajar, orang tua juga perlu memberikan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis, dan buku agar proses belajar berjalan dengan baik. Keempat orang tua sebagai pembimbing. Sebagai orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan fasilitas dan biaya sekolah. Tetapi anak-anak juga membutuhkan bimbingan dari orang tuanya.

Keberhasilan peserta didik dalam proses belajarnya tidak dapat terlepas dari adanya motivasi yang menjadi penggerak dan pendorong peserta didik agar dapat menjalankan kegiatan dan proses

belajarnya. Motivasi tersebut dapat berasal dari dalam diri peserta didik (intrinsik) dan motivasi dari luar (ekstrinsik). Dari kedua motivasi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan peserta didik, meskipun yang lebih utamanya adalah motivasi dalam diri peserta didik tetapi motivasi dari luar atau ekstrinsik tetap menjadi faktor yang ikut mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik.

Tugas orang tua dalam memotivasi belajar anak adalah mengontrol waktu belajar dan teknik belajar bagi anak, memperhatikan perkembangan kemampuan skolastik anak, memperhatikan peningkatan karakter yang menggabungkan cara pandang, etika dan perilaku anak, memperhatikan kegiatan di sekolah.

Ada beberapa cara dapat dilakukan oleh orang tua untuk memotivasi anak-anak dalam belajar. Motivasi yang diberikan bisa melalui pemberian perhatian kepada anak. Perhatian yang diberikan orang tua kepada anak dapat mempengaruhi motivasi belajarnya. Misalnya, ketika anak-anak pulang dari sekolah, orang tua harus bertanya apa yang mereka lakukan di sekolah. Selanjutnya adalah pemberian hadiah. Pemberian hadiah sering dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anak jika anak berhasil dalam menyelesaikan suatu tindakan. hadiah ini dapat mendorong anak-anak untuk lebih giat dalam belajar. Selanjutnya adalah pemberian penghargaan, penghargaan diberikan oleh orang tua untuk memberikan dukungan dari dalam diri anak.

Kesimpulan

Motivasi belajar seorang anak di dalam pembelajaran berbasis tema selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa peserta didik memiliki motivasi dalam belajar. Hal ini ditunjukkan dengan reaksi yang diberikan saat mendapatkan masalah dalam pembelajaran atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik. Motivasi belajar peserta didik selama masa pandemi juga disebabkan oleh dukungan dari luar, khususnya dari orang tua yang mendampingi dan pendidik

sehingga peserta didik mampu untuk berkonsentrasi meskipun mereka belajar di rumah.

Peran orang tua dalam pendidikan akan menentukan keberhasilan bagi pendidikan anak-anaknya yaitu pendidik, pendorong dan fasilitator. Peran orang tua sangat besar dalam membina, mendidik, memotivasi, dan membesarkan anak hingga menjadi sukses. Dengan pemberian perhatian, pemberian hadiah, dan pemberian penghargaan dapat mempengaruhi motivasi belajar anak sehingga peran orang tua sebagai panutan bagi anak untuk membina dan mengajarkan anak tentang sifat terpuji dan tercela, keteladanan kisah-kisah para rasul dan sahabatnya, shalat, puasa dan doa sehari-hari, kemudian peran orang tua sebagai fasilitator anak menyediakan semua kebutuhan anak demi menunjang kenyamanan dan proses belajar anak, dan peran orang tua sebagai motivator anak berperan untuk menguatkan anak untuk giat belajar dan terus termotivasi sehingga anak mendapatkan nilai yang baik. Peran orang tua sangat dibutuhkan bagi anak untuk mendorong anak lebih semangat dalam proses belajar karena dengan adanya dorongan itu anak akan termotivasi dan jiwa anak akan tersentuh karena kasih sayang orang tua kepada anak selalu ada.

Referensi

- [1] T. Kadi, R. Awwaliyah, U. Nurul, and J. Paiton, "Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian," vol. 01, no. 02, pp. 144–155, 2017.
- [2] E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- [3] M. Nurmasyitah, Sulaiman, "Peran Guru Dalam Pelaksanaan Manajemen Kelas," *J. Ilm. Pendidik. Guru Sekolah. Dasar*, vol. 2, no. 1, pp. 105–114, 2017.
- [4] Esti, "Pengelolaan Kelas Di Sekolah Dasar," Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- [5] A. R. Setiawan, "Lembar Kegiatan Literasi Sainifik Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Corona Virus 2019 (COVID-19)," *Edukatif (Jurnal Pendidikan)*, vol. 2, 2020.

- [6] W. A. F. Dewi, "Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di," vol. 2, no. 1, pp. 55–61, 2020.
- [7] N. B. Milman, *Distance Education*, Second Edi., vol. 6. Elsevier, 2015.
- [8] J. L. Moore, C. Dickson-Deane, and K. Galyen, "E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?," *Internet High. Educ.*, vol. 14, no. 2, pp. 129–135, 2011.
- [9] D. Zhang, J. L. Zhao, L. Zhou, and J. F. Nunamaker, "Can e-learning replace classroom learning?," *Commun. ACM*, vol. 47, no. 5, pp. 75–79, 2004.
- [10] N. Hidayah, "Pembelajaran Tematik Integratif di Sekolah Dasar," *Terampil Pendidik. dan Pembelajaran Dasar*, vol. 2, no. 1, pp. 34–49, 2015.
- [11] E. Susanti, "Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Bidang Studi Fiqih di MI Negeri 2 Kota Bengkulu," Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.
- [12] M. Audina, B. Surbakti, and B. Hutahaean, "Minat dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia," vol. 2, pp. 56–64, 2019.
- [13] N. S. Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- [14] Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- [15] Y. Pujilestari, "Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid -19," *Bul. Huk. Keadilan*, vol. 14, 2020.
- [16] A. E. Pohan, *Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah*. Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2020.
- [17] L. Sofyana and A. Rozaq, "Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis Whatsapp pada Kelas Karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun," *Janapati*, vol. 8, no. 1, 2019.
- [18] Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- [19] N. K. S. Astini, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-19," *J. Lemb. Penjaminan Mutu STKIP Agama Hindu Amlapura*, vol. 11, no. 2, pp. 13–25, 2020.
- [20] Y. Fitriyani, I. Fauzi, and M. Sari, "Motivasi Belajar Mahasiswa Pada

- Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19,” *Profesi Pendidik. Dasar*, vol. 1, pp. 121–132, Jul. 2020.
- [21] Z. Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2012.
- [22] Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- [23] E. W. Pratiwi, “Dampak Covid-19 Terhadap Pembelajaran Online di Sebuah Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia,” *Perspektif Ilmu Pendidikan.*, vol. 34, no. 1, 2020.
- [24] E. I. Muawanah and A. Muhid, “Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Selama Pandemi Covid – 19 : Literature Review,” *J. Ilm. Bimbing. Konseling Undiksha*, vol. 12, no. 1, pp. 90–98, 2021.
- [25] Kompri, *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- [26] O. Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bumi Aksara, 2004.
- [27] Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- [28] V. Winarsih, *Psikologi Pendidikan*. Medan: Latansa Press, 2009.
- [29] H. Uno, *Teori motivasi dan pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- [30] M. N. Purwantoro, *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- [31] Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- [32] Winkel, *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- [33] A. Emda, “Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran,” vol. 5, no. 2, 2017.
- [34] R. Jhonson and R. Lenny, *Keperawatan keluarga*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.

Integrasi *Augmented Reality* Dalam Pembelajaran

Aloysius Duran Corebima¹, Badrud Tamam², Bea Hana Siswati³

Pengantar

Augmented reality (AR) merupakan teknologi mengkombinasikan obyek nyata dengan obyek virtual, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata, dan terintegrasi obyek virtual dalam bentuk 3 dimensi [1]. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa AR tidak hanya terbatas hanya pada indra penglihatan, tetapi juga dapat diterapkan pada semua indra, seperti indra pendengaran, sentuhan, dan indra penciuman. Unsur nyata dan virtual dipadukan sehingga bias terjadi interaksi antara pengguna dengan dunia virtual [2]. Menurut Milgram's [3], *augmented reality* merupakan jenis "*mixed reality*" di mana obyek digital dimasukkan ke dalam lingkungan nyata (lihat Gambar 1). Cuendet, Bonnard, Do-Lenh, & Dillenbourg, [4] berpendapat bahwa "AR mengacu pada teknologi yang memproyeksikan materi digital ke objek dunia nyata". Dengan demikian AR berfungsi untuk melengkapi realitas tetapi tidak menggantikan sepenuhnya.



Gambar 1. *Reality–Virtuality Continuum* [3]

Augmented Reality, memungkinkan pengguna melihat dunia nyata melalui obyek virtual. Hal ini terjadi karena *augmented reality* memungkinkan untuk menautkan obyek virtual secara *real time*. Objek virtual dapat mencakup teks, gambar diam, klip video, suara, model 3D, dan animasi. Benda-benda virtual ini akan dianggap hidup berdampingan dalam lingkungan nyata [5].

Augmented Reality dapat diwujudkan melalui perangkat

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

² Universitas Trunojoyo

³ Universitas Jember

seluler yang canggih. Obyek virtual ditampilkan menggunakan satu set perangkat teknologi. Menurut Azuma [6] dan Billinghurst e[2], ada beberapa persyaratan dasar komponen *hardware* yang dapat diintegrasikan AR di dalamnya, yaitu: terdapat video kamera untuk menangkap gambar, ruang penyimpanan yang memadai untuk obyek virtual, spesifikasi prosesor untuk menampilkan obyek 3D secara *realtime*, dan *interface* memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek.

Menurut Johnson [7] dan Carlson & Gagnon [8], sistem *augmented reality* dapat berupa berbasis penanda atau berbasis tanpa penanda (*marker-based* atau *markerless-based*). Aplikasi berbasis penanda (*marker-based*) terdiri dari booklet untuk menyiapkan informasi penanda (*marker*), perangkat untuk membaca *marker* dan memperoleh informasi dari booklet atau kartu. Aplikasi berbasis tanpa penanda (*markerless-based*) memerlukan sistem pelacakan yang melibatkan sistem penentuan posisi global (GPS), kompas, dan perangkat pengenalan gambar. Menurut Cheng & Tsai [9] *marker-based* berpotensi untuk meningkatkan kemampuan spasial, keterampilan praktis, dan pemahaman konseptual siswa, sedangkan *location-based AR* mendukung kegiatan ilmiah berbasis penyelidikan.

Terkait jenis AR menurut klasifikasi Wojciechowski & Cellary [10] ada 3 jenis AR yaitu 1) AR berbasis penanda, 2) AR tanpa penanda, dan 3) AR berbasis lokasi. AR berbasis penanda didasarkan pada penggunaan penanda. Penanda adalah label yang berisi pola berwarna atau hitam putih yang dikenali atau didaftarkan oleh aplikasi AR melalui perangkat kamera untuk mengaktifkan peristiwa. Misalnya, menampilkan gambar 3D di layar perangkat yang terletak di posisi yang sama dengan penanda. AR tanpa penanda didasarkan pada pengenalan bentuk objek. Di lain pihak AR berbasis lokasi menyajikan informasi sesuai dengan lokasi geografis pengguna.

Menurut Cabero & Barroso [11] AR dapat dibedakan berdasarkan pada aktivator AR yang digunakan: 1) *position markers*; 2) *geolocation*; and 3) *QR codes*. Pada jenis pertama, gambar 3D, video, atau animasi ditautkan dengan *marker* yang dicetak dengan menggunakan aplikasi software khusus. *Marker* kemudian disorot menggunakan kamera sehingga obyek virtual dapat ditampilkan. Pada jenis AR kedua, AR dibantu geolokasi, yakni mengintegrasikan AR, GPS,

Search Visual Systems (CVS), dan *mapping* (SLAM). Melalui aplikasi ini, pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan lain dari lokasi mereka pada titik tertentu. Pengguna bisa memperoleh gambar fisik tempat atau superimposisi lapisan virtual informasi secara *real time* tentang tempat terdekat, sejarah lingkungan, peristiwa, dan lain-lain melalui menggunakan kamera perangkat seluler. Jenis AR ketiga menggunakan kode QR. Pengguna dapat berinteraksi melalui kode dua dimensi berbentuk persegi yang dapat menyimpan berbagai informasi alfanumerik. QR kemudian dibaca menggunakan aplikasi pembaca QR yang dipasang pada perangkat seluler sehingga informasi yang disajikan dapat ditampilkan.

Sistem AR memiliki tiga komponen utama yaitu: 1) *tracking system*, komponen ini merupakan proses penentuan posisi dan orientasi obyek, 2) *Graphic system*, merupakan komponen untuk menggambarkan obyek-obyek virtual pada tempat yang sesuai, dan 3) tampilan system, yakni tampilan hasil penggabungan dunia nyata dengan gambar virtual yang dikirimkan ke pengguna [12]. Terdapat empat tahapan dalam menjalankan AR, yaitu: 1) penangkapan gambar menggunakan perangkat *video-capture* seperti kamera, 2) identifikasi gambar, 3) pengolahan gambar, dan 4) visualisasi gambar [13].

Potensi AR dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

AR memiliki potensi yang besar dalam memberikan pengalaman belajar secara kontekstual, eksplorasi, dan *discovery* terkait dengan informasi di dunia nyata [7] AR telah diimplementasikan dalam beragam disiplin keilmuan dan hasilnya menunjukkan bahwa implementasi AR dalam kegiatan pembelajaran lebih berpotensi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Dalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi AR menghasilkan pengalaman belajar yang kaya dan bermakna, mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik, serta meningkatkan pembelajaran kolaboratif [14]. Hal ini mendorong para peneliti untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam bidang-bidang seperti biologi, kimia, matematika, kedokteran, sejarah, teknik, dll. [15] Peneliti-peneliti tersebut menguji potensi teknologi AR dan keefektifannya pada pengalaman belajar peserta didik dengan cara membuat perbandingan antara metode AR dengan metode pembelajaran

tradisional lainnya. Beragam kajian terkait AR melaporkan bahwa implementasi AR dalam pembelajaran memiliki dampak positif. Hasil kajian AR dan keuntungan implementasi AR yang sudah dilakukan ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keuntungan AR dalam pembelajaran

<i>Author</i>	Keuntungan AR
Chiang, Yang, & Hwang [16], Ferrer-Torregrosa, Torralba, Jimenez, Garc'ia & Barcia [17]	Meningkatkan prestasi belajar
Liu & Chu [18], Di Serio et al.[19], Jara et al. [20], Bujak et al. [21], Chang et al. [22], Chiang et al. [16], Ferrer-Torregrosa et al. [17], Di Serio et al. [19]	Meningkatkan motivasi belajar
Zhang, Sung, Hou & Chang [23], Bursztyn et al.,[24]; Habig, [25].	Meningkatkan minat belajar
Sin & Zaman [26], Carlson & Gagnon [8], Chang & Hwang [27], Lin & Chen [28], Faridi, Tuli, Mantri, Singh, & Gargrish [29],	Meningkatkan keterampilan berpikir kritis
Valimont et al. [30], Vincenzi et al. [31],Macchiarella, Liu, Gangadharan, Vincenzi, & Majoros [32], Fidan & Tuncel [33],	Meningkatkan retensi siswa
Ucelli et al. [34], Bressler & Bodzin [35], Chen, Chi, Hung, & Kang [36]	Meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran
Bressler & Bodzin [35], Küçük, Kapakin & Gökteş [37], Cheng [38], Atici-Ulusu, Ikiz, Taskapilioglu, & Gunduz [39] dan Lai, Chen, & Lee [41]	Meminimalisasi beban kognitif
Wu et al.,[14]; Redondo, Fonseca, Sánchez, & Navarro., [41]	Meningkatkan pembelajaran kooperatif
Brandt et al. [42], Kamarainen et al. [43], Di Serio et al. [19], Cai et al. [44], Jamali et al. [45], Saltan & Arslan, [46]	Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran

Tabel 1 menunjukkan bahwa AR telah diadaptasi dan diterapkan dalam proses pembelajaran. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi AR memiliki potensi yang signifikan dalam proses pembelajaran. AR memiliki manfaat yang jelas baik bagi siswa maupun guru. Beberapa hasil studi di atas menunjukkan berbagai keuntungan AR dalam proses pembelajaran. Hasil studi membuktikan bahwa AR berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lebih lanjut, melalui AR siswa menjadi lebih terlibat selama proses pembelajaran.

Sebagian besar hasil studi juga menunjukkan bahwa implementasi AR memperoleh umpan balik positif dari peserta didik. Kesimpulannya, integrasi AR dalam pembelajaran memiliki potensi yang besar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Dengan bantuan teknologi AR, pembelajaran akan lebih interaktif, lebih kontekstual karena AR mampu memvisualisasikan konsep, terutama yang tidak bisa dilihat oleh indera. Selain itu, siswa dapat berinteraksi dengan konten virtual melalui AR.

Urgensi Integrasi *Augmented Reality* pada Pembelajaran

Dalam struktur Kurikulum 2013, TIK menjadi sarana pembelajaran pada semua mata pelajaran. Artinya, TIK tidak lagi sebagai mata pelajaran, namun keterampilan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi mutlak digunakan untuk kelancaran proses pembelajaran. Menurut Niess [47], TIK banyak mempengaruhi bagaimana cara manusia hidup, bertindak, dan belajar mengajar. AECT [48] mengemukakan bahwa makna teknologi adalah alat, metode atau proses dan sumber yang digunakan sesuai dengan situasi pembelajaran. Hal ini memiliki makna bahwa integrasi teknologi mampu memfasilitasi berlangsungnya proses belajar yang efektif dan efisien, serta mendorong kinerja guru dalam proses pembelajaran. Menurut Guerrero [49], TIK memainkan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yalçin & Çelikler [50], kita sudah memasuki era digital dimana pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat cepat sebagai salah satu dampak kemajuan TIK.

Teknologi harus diintegrasikan ke dalam implementasi kurikulum agar dapat meningkatkan proses belajar internal siswa,

kualitas proses pembelajaran, dan mengurangi peran guru sebagai satu-satunya sumber belajar. UU Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi terkait teknologi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah secara profesional dan prosedural. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam kurikulum mikro harus dilakukan guru agar proses pembelajaran efektif sehingga pembelajaran menjadi optimal. Menurut Roblyer, Edwards, dan Havriluk [51], TIK sudah digunakan di berbagai situasi termasuk dalam sistem pendidikan dan dapat membantu efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, teknologi wajib diintegrasikan ke dalam pembelajaran atau sebuah kurikulum sekolah.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak permasalahan yang muncul terutama di sekolah-sekolah untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang menekankan penggunaan perangkat TIK dalam pembelajaran. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kesiapan guru dan ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran seperti jumlah komputer, jaringan internet, listrik dan lain-lain.

Salah satu teknologi yang berkembang saat ini adalah *smartphone*. *Smartphone* merupakan salah satu tren komunikasi yang paling banyak ditemui, dinamis dan canggih dengan beragam fitur yang terus berkembang. *Smartphone* merupakan ponsel yang menjalankan sistem operasi yang lengkap dengan fungsi yang sama dengan komputer (Alfawareh & Jusoh, [52]; Alosaimi, Alyahya, Alshahwan, Al Mahyijari, & Shaik, [53]; Anshari et al., [54]; Morphitou, [55]).

Farley et al. (2015) mengidentifikasi bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak memiliki atau memiliki akses ke *smartphone* (<5%) dan kebanyakan siswa memiliki lebih dari satu *smartphone*. Saxena et al.[56] dalam kajiannya menyebutkan bahwa sekitar 93,23% siswa di India memiliki *smartphone*. Rung, Warnke & Matteos [57] menyatakan bahwa 91,5% responden di Australia memiliki *smartphone* dan 89,2% mengakses data melalui internet. Kajian Anshari et al., [54] menunjukkan bahwa generasi muda memiliki ketergantungan terhadap *smartphone* dalam hal penggunaan internet dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa *smartphone*. Machmud [58] menyatakan bahwa hampir semua siswa

di Indonesia memiliki *smartphone*. Kajiannya menunjukkan bahwa hanya sekitar 6.8% siswa yang tidak memiliki *smartphone*.

Menurut Buck et al.[59] teknologi *Smartphone* memainkan peran sangat penting bagi pembelajar abad 21. Teknologi *Smartphone* merupakan bagian integral dalam kehidupan abad 21 [60]. *Smartphone* memiliki peran vital karena banyaknya keuntungan yang dapat dimanfaatkan (Alosaimi et al., [53]; [52]; Anshari et al., [54]).

Pemanfaatan *smartphone* juga berpotensi untuk dikembangkan dalam bidang pendidikan [61]. Aplikasi pendidikan yang terdapat dalam *smartphone* juga menciptakan peluang potensial untuk pembelajaran, mengembangkan siswa yang lebih terlibat dalam pembelajaran, dan dapat memberikan solusi mudah terhadap masalah-masalah yang ditemukan [55]. Melalui *smartphone*, siswa dapat melakukan koneksi internet yang memungkinkan pemanfaatannya dalam beragam tujuan (Anshari et al., [54]; Esmaeili, Eydgahi, & Amanov, [62]). Beberapa penelitian juga mendukung bahwa *smartphone* dapat memberdayakan siswa untuk dapat mengakses informasi dalam 24 jam selama mereka terhubung dengan internet [63].

Perkembangan teknologi tersebut diatas menuntut adanya transformasi dan modernisasi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran agar dapat merancang dan memberikan lingkungan belajar yang realistis, otentik, menarik, dan sangat menyenangkan [64]. Proses pembelajaran harus sejalan dengan perkembangan teknologi agar memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Salah satu media pembelajaran yang dapat memanfaatkan *smartphone* adalah *augmented reality*. Menurut Quintero et al.[65], perangkat yang paling banyak digunakan untuk aplikasi AR adalah perangkat seluler atau *handheld devices*. Kemajuan perkembangan perangkat seluler juga telah menyebabkan peningkatan minat dalam pengintegrasian perangkat seluler dan aplikasi AR. Pengintegrasian AR di perangkat seluler saat ini berkembang pesat. *Augmented Reality* (AR) merupakan salah satu teknologi baru yang memiliki potensi dan berdampak pada pembelajaran.

Augmented Reality memiliki potensi untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik untuk mengeksplorasi materi dari berbagai

perspektif yang berbeda, dan telah terbukti sangat berguna untuk mengajarkan materi pelajaran yang tidak mungkin dialami siswa secara langsung di dunia nyata [66]. Teknologi AR membantu pelajar terlibat dalam eksplorasi otentik di dunia nyata, dan penggunaan objek virtual seperti teks, video, dan gambar merupakan elemen tambahan bagi peserta didik untuk melakukan penyelidikan lingkungan dunia nyata melalui AR [67]. Klopfer dan Squire [68] menjelaskan bahwa penggunaan AR memungkinkan peserta didik untuk mengalami fenomena ilmiah yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata (misalnya mengamati langsung proses reaksi kimia). Liu dkk. [69] memperkenalkan sistem AR yang dirancang agar siswa dapat melihat tata surya secara virtual di meja kelas atau memvisualisasikan proses fotosintesis.

Terkait transformasi dan modernisasi dalam pembelajaran, Resnick [70] menyatakan bahwa minimal ada tiga hal penting yang harus dipikirkan untuk modernisasi pendidikan, yaitu: *How people learn*, *what people learn*, dan *where and when people learn*. Mengacu pendapat Resnick [70], *How people learn*, terkait dengan bagaimana siswa belajar. Kurikulum 2013 menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Disini teknologi *augmented reality* mengambil peran penting bagaimana siswa dapat belajar mandiri melalui media AR. *What people learn*, hal ini terkait dengan apa yang siswa pelajari. Disini, AR mengambil peran penting untuk dapat membawa lingkungan ke dalam kelas melalui obyek virtual. AR menampilkan konsep-konsep abstrak tersebut melalui modeling 3D ataupun dalam bentuk video maupun animasi. Siswa dapat berinteraksi dengan obyek yang dipelajari akan merasa lebih dekat dengan materi. *Where and when people learn*, terkait dengan ruang dan waktu siswa dapat belajar. Hal ini mengarah pada proses pembelajaran yang bisa dilakukan tidak hanya di kelas. Melalui AR, siswa diharapkan mampu belajar secara mandiri di rumah ataupun dimana saja. Belajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu sehingga siswa dapat belajar dimana saja.

AR juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan seperti minimnya peralatan TIK di sekolah. AR juga dapat mengatasi permasalahan jaringan internet. Hal ini disebabkan AR dapat dikembangkan secara *offline*. Siswa dapat menjalankan aplikasi AR

tanpa adanya koneksi internet. Lebih lanjut, AR juga bisa menanggulangi resiko kehilangan data. Hal ini dikarenakan semua informasi dan media dapat ditampilkan dalam bentuk cetak.

Selain permasalahan-permasalahan teknis di atas, AR juga mampu menjawab permasalahan-permasalahan akademis terkait pencapaian tujuan pembelajaran. AR dapat menyajikan konten melalui representasi objek 3D yang berpotensi mampu menyentuh peserta didik dari beragam modalitas belajar dan menyebabkan pembelajaran yang lebih bermakna. Hal ini juga sudah dijabarkan pada Tabel 1 pada sub bab sebelumnya.

Paparan di atas memberikan suatu penegasan bahwa AR sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Integrasi AR dalam pembelajaran dapat membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, lebih mudah dan cepat memahami materi, dan meningkatkan retensi siswa pada konsep biologi melalui visualisasi 3D, video, dan animasi yang tersedia dalam buku. Melalui AR, siswa dapat merasa dekat dengan materi pelajaran karena siswa dapat berinteraksi melalui obyek 3D. Hal ini terjadi karena AR mampu memvisualisasikan sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Menurut Mustaqim [71], penggunaan AR sangat berguna sebagai media pembelajaran interaktif dan nyata secara langsung dan meningkatkan minat peserta didik. Wiratmojo & Sasonohardjo [72] menyatakan bahwa penggunaan media belajar dapat membangun motivasi dan semangat dalam belajar, minat dan keinginan belajar, dan membawa pengaruh secara psikologis. Lebih lanjut disebutkan bahwa proses pembelajaran dan penyampaian pesan akan menjadi lebih efektif.

Referensi

- [1] Azuma, R., Bailiot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., & MacIntyre, B. (2001). Recent Advances in Augmented Reality. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 21(6), 34–47.
- [2] Billinghurst, M., Kato, H., & Poupyrev, I. (2001). The MagicBook: A Transitional AR Interface. *Computers & Graphics*, 25(5), 745–753.
- [3] Milgram P, Takemura H, Utsumi A, Kishino F (1994) Augmented reality: a class of displays on the reality-virtuality continuum. *SPIE*

- proceedings: telemanipulator and telepresence technologies*, Boston, MA
- [4] Cuendet, S., Bonnard, Q., Do-Lenh, S., & Dillenbourg, P. (2013). Designing augmented reality for the classroom. *Computers & Education*, 68, 557–569. doi:10.1016/j.compedu.2013.02.015
- [5] Bower, M., Howe, C., McCredie, N., Robinson, A., & Grover, D. (2014) Augmented Reality in education – cases, places and potentials. *Educational Media International*, 51(1), 1-15, <https://doi.org/10.1080/09523987.2014.889400>
- [6] Azuma, R., T (1997) A Survey of Augmented Reality,” *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*. 6(4), 355-385
- [7] Johnson, L., Levine, A., Smith, R., & Stone, S. (2010). Simple augmented reality. *The 2010 Horizon Report*, 21-24. Austin, TX: The New Media Consortium.
- [8] Carlson, K. J., & Gagnon, D. J. (2016). Augmented Reality Integrated Simulation Education in Health Care. *Clinical Simulation in Nursing*, 12(4), 123–127. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2015.12.005>
- [9] Cheng, K.-H., & Tsai, C.-C. (2013). Affordances of Augmented Reality in Science Learning: Suggestions for Future Research. *Journal of Science Education and Technology*, 22(4), 449–462. <https://doi.org/10.1007/s10956-012-9405-9>
- [10] Wojciechowski, R., & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners' attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. *Computers & Education*, 68, 570–585. doi:10.1016/j.compedu.2013.02.014
- [11] Cabero, J., & Barroso, J (2016) The educational possibilities of Augmented Reality. *New Approaches In Educational Research*, 5(1), 44-50, <https://doi.org/10.7821/naer.2016.1.140>
- [12] Rakacita, G. (2011). *Pengembangan Teknologi Augmented Reality Sebagai Penunjang Industri Musik Indonesia*. Repository Universitas Gunadarma
- [13] Glockner, H., Jannek, K., Mahn, J., & Theis, B. (2014). *Augmented reality in logistics: Changing the way we see logistics - a DHL perspective*. (online) https://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/csi_augmented_reality_report_290414.pdf
-

- [14] Wu, H.-K., Lee, S. W.-Y., Chang, H.-Y., & Liang, J.-C. (2013). Current Status, Opportunities and Challenges of Augmented Reality In Education. *Computers & Education*, 62, 41–49. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.024>
- [15] Pantelić, A., & Vukovac D.P. (2017). *The development of educational augmented reality application: a practical approach*. In international conference of education, research and innovation.
- [16] Chiang, T.-H.-C., Yang, S.-J.-H., & Hwang, G.-J. (2014). An Augmented Reality-based Mobile Learning System to Improve Students' Learning Achievements and Motivations in Natural Science Inquiry Activities. *Educational Technology & Society*, 17 (4), 352–365.
- [17] Ferrer-Torregrosa, J., Torralba, J., Jimenez, M. A., García, S., & Barcia, J. M. (2015). ARBOOK: Development and Assessment of a Tool Based on Augmented Reality for Anatomy. *Journal of Science Education and Technology*, 24(1), 119–124. <https://doi.org/10.1007/s10956-014-9526-4>
- [18] Liu, T.-Y., & Chu, Y.-L. (2010). Using ubiquitous games in an English listening and speaking course: Impact on learning outcomes and motivation. *Computers & Education*, 55(2), 630–643. doi:10.1016/j.compedu.2010.02.023
- [19] Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an Augmented Reality System on Students' Motivation for a Visual Art Course. *Computers & Education*, 68, 586–596. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.002>
- [20] Jara, C. a., Candelas, F. a., Puente, S. T., & Torres, F. (2011). Hands-on experiences of undergraduate students in Automatics and Robotics using a virtual and remote laboratory. *Computers & Education*, 57(4), 2451–2461. doi:10.1016/j.compedu.2011.07.003
- [21] Bujak, K. R., Radu, I., Catrambone, R., MacIntyre, B., Zheng, R., & Golubski, G. (2013). A psychological perspective on augmented reality in the mathematics classroom. *Computers & Education*, 68, 536–544. doi:10.1016/j.compedu.2013.02.017
- [22] Chang, K.-E., Chang, C.-T., Hou, H.-T., Sung, Y.-T., Chao, H.-L., & Lee, C.-M. (2014). Development and behavioral pattern analysis

- of a mobile guide system with augmented reality for painting appreciation instruction in an art museum. *Computers & Education*, 71, 185–197. doi:10.1016/j.compedu.2013.09.022
- [23] Zhang, J., Sung, Y.-T., Hou, H.-T., & Chang, K.-E. (2014). The Development and Evaluation of an Augmented Reality-based Armillary Sphere for Astronomical Observation Instruction. *Computers & Education*, 73, 178–188. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.01.003>
- [24] Bursztyn, N., Shelton, B., Walker, A., & Pederson, J. (2017). Increasing undergraduate interest to learn geoscience with GPS-based augmented reality field trips on students' own smartphones. *GSA Today*, 27(6), 4–10. <https://doi.org/10.1130/GSATG304A.1>
- [25] Habig, S. (2019). Who can benefit from augmented reality in chemistry? Sex differences in solving stereochemistry problems using augmented reality. *British Journal of Educational Technology*, bjet.12891. <https://doi.org/10.1111/bjet.12891>
- [26] Sin, A. K., & Zaman, H. B. (2010). Live Solar System (LSS): Evaluation of an Augmented Reality book-based educational tool. *2010 International Symposium on Information Technology*. doi:10.1109/itsim.2010.5561320
- [27] Chang, S. C., & Hwang, G. J. (2018) Impacts of an Augmented Reality-Based Flipped Learning Guiding Approach on Students' Scientific Project Performance and Perceptions. *Computers & Education*, 125, 226-239. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.007>
- [28] Lin, P.-H., & Chen, S.-Y. (2020). Design and Evaluation of a Deep Learning Recommendation Based Augmented Reality System for Teaching Programming and Computational Thinking. *IEEE Access*, 8, 45689–45699. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2977679>
- [29] Faridi, H., Tuli, N., Mantri, A., Singh, G., & Gargrish, S. (2020). A framework utilizing augmented reality to improve critical thinking ability and learning gain of the students in Physics. *Computer Applications in Engineering Education*. <https://doi.org/10.1002/cae.22342>

- [30] Valimont, B. (2002). *The Effectiveness of an Augmented Reality Learning Paradigm* [Thesis: Unpublish]. Department of Human Factors & Systems Embry-Riddle Aeronautical University.
- [31] Vincenzi, D. A., Valimont, B., Macchiarella, N., Opalenik, C., Gangadharan, S. N., & Majoros, A. E. (2003). The Effectiveness of Cognitive Elaboration Using Augmented Reality as a Training and Learning Paradigm. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting* (Vol. 47, pp. 2054–2058). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- [32] Macchiarella, N. D., Liu, D., Gangadharan, S. N., Vincenzi, D. A., & Majoros, A. E. (2005). Augmented reality as a training medium for aviation/aerospace application. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 49, 2174–2178.
- [33] Fidan, M., & Tuncel, M. (2019). Integrating augmented reality into problem based learning: The effects on learning achievement and attitude in physics education. *Computers & Education*, 142, 103635. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103635>
- [34] Ucelli, G., Conti, G., De Amicis, R., & Servidio, R. (2005). Learning using augmented reality technology: Multiple means of interaction for teaching children the theory of colours. In M. Maybury, O. Stock, & W. Wahlster (Eds.), *Intelligent Technologies for Interactive Entertainment* (pp. 193–202). https://doi.org/10.1007/11590323_20
- [35] Bressler, D. M., & Bodzin, A. M. (2013). A Mixed Methods Assessment of Students' Flow Experiences during a Mobile Augmented Reality Science Game: Flow Experience with Mobile AR. *Journal of Computer Assisted Learning*, 29(6), 505–517. <https://doi.org/10.1111/jcal.12008>
- [36] Chen, Y.-C., Chi, H.-L., Hung, W.-H., & Kang, S.-C. (2011). Use of Tangible and Augmented Reality Models in Engineering Graphics Courses. *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice*, 137(4), 267–276. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)EI.1943-5541.0000078](https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000078)
- [37] Küçük, S., Kapakin, S., & Göktaş, Y. (2016). Learning anatomy via mobile augmented reality: Effects on achievement and cognitive load: Learning Anatomy. *Anatomical Sciences Education*, 9(5), 411–421. <https://doi.org/10.1002/ase.1603>

- [38] Cheng, K.-H. (2017). Exploring Parents' Conceptions of Augmented Reality Learning and Approaches to Learning by Augmented Reality With Their Children. *Journal of Educational Computing Research*, 0735633116686082.
- [39] Atici-Ulusu, H., Ikiz, Y. D., Taskapilioglu, O., & Gunduz, T. (2019, April 19). *Gender-related effects of the augmented reality glasses on cognitive load*. 9 th International Conference on Research in Engineering, Science and Technology, France.
- [40] Lai, A.-F., Chen, C.-H., & Lee, G.-Y. (2018). An augmented reality-based learning approach to enhancing students' science reading performances from the perspective of the cognitive load theory: Augmented reality-based science learning. *British Journal of Educational Technology*, 50(1), 232–247. <https://doi.org/10.1111/bjet.12716>
- [41] Redondo, E., Fonseca, D., Sánchez, A., & Navarro, I. (2013). New Strategies Using Handheld Augmented Reality and Mobile Learning-teaching Methodologies, in Architecture and Building Engineering Degrees. *Procedia Computer Science*, 25, 52–61. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.11.007>
- [42] Brandt, H., Georgsen, M., Nielsen, B. L., & Swensen, H. (2011). *Augmented Reality for Science Education*. Retrieved from https://www.ucviden.dk/ws/files/32050386/Augmented_Reality_for_Science_Education.pdf
- [43] Kamarainen, A. M., Metcalf, S., Grotzer, T., Browne, A., Mazzuca, D., Tutwiler, M. S., & Dede, C. (2013). EcoMOBILE: Integrating Augmented Reality and Probeware with Environmental Education Field Trips. *Computers & Education*, 68, 545–556. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.018>
- [44] Cai, S., Wang, X., & Chiang, F.-K. (2014). A Case Study of Augmented Reality Simulation System Application in a Chemistry Course. *Computers in Human Behavior*, 37, 31–40. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.018>
- [45] Jamali, S. S., Shiratuddin, M. F., Wong, K. W., & Oskam, C. L. (2015). Utilising Mobile-Augmented Reality for Learning Human Anatomy. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 197, 659–668.

- [46] Saltan, F. & Arslan, Ö. (2017). The Use of Augmented Reality in Formal Education: A Scoping Review. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(1). <https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00628a>
- [47] Niess, M. L. 2005. Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. *Teaching and Teacher Education*, 21(5), 509-523. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.03.006>.
- [48] AECT, 2004. Defenisi Teknologi Pendidikan satuan Tugas Defenisi dan Terminologi AECT : Seri Pustaka teknologi pendidikan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- [49] Guerrero, S. (2010). Technological pedagogical content knowledge in the mathematics classroom. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 26(4), 132-139
- [50] Yalçın, M., & Çelikler, D. (2011). The effect of computer-assisted applications in the teaching and learning of "Matter and Heat" subject. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 42(273-290).
- [51] Roblyer, M.D, Jack, E. & Anne, H.M. (1997). Integrating educational technology into teaching. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- [52] Alfawareh, H. M., & Jusoh, S. (2014). Smartphones usage among university students: Najran University case. *International Journal of Academic Research*, 6(2), 321–326. <https://doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.48>
- [53] Alosaimi, F., Alyahya, H., Alshahwan, H., Al Mahyijari, N., & Shaik, S. (2016). Smartphone addiction among university students in Riyadh, Saudi Arabia. *Saudi Medical Journal*, 37(6), 675–683. <https://doi.org/10.15537/smj.2016.6.14430>
- [54] Anshari, M., Alas, Y., Hardaker, G., Jaidin, J. H., Smith, M., & Ahad, A. D. (2016). Smartphone habit and behavior in Brunei: Personalization, gender, and generation gap. *Computers in Human Behavior*, 64, 719–727. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.063>
- [55] Morphitou, R. N. (2014). The use of smartphones among students in relation to their education and social life. In *Interactive Mobile*

- Communication Technologies and Learning (IMCL), 2014 International Conference on* (pp. 315–319). IEEE.
- [56] Saxena, P., Gupta, S. K., Mehrotra, D., Kamthan, S., Sabir, H., Katiyar, P., & Sai Prasad, S. V. (2017). Assessment of digital literacy and use of smart phones among Central Indian dental students. *Journal of Oral Biology and Craniofacial Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jobcr.2017.10.001>
- [57] Rung A, Warnke F, Matteos N. Investigating the use of Smart phones for learning purposes by Australian Dental Students. *JMIR mHealth*. 2014;**2**(2):1–8.
- [58] Machmud, K. (2018) The Smartphone Use in Indonesian Schools: The High School Students' Perspectives. *Journal of Arts & Humanities*, 07(03), 33-40. <https://doi.org/10.18533/journal.v7i3.1354>
- [59] Buck, J. L., McInnis, E., & Randolph, C. (2013). The new frontier of education: The impact of smartphone technology in the classroom. In *2013 ASEE Southeast Section Conference*.
- [60] Fullwood, C., Quinn, S., Kaye, L. K., & Redding, C. (2017). My Virtual friend: A qualitative analysis of the attitudes and experiences of Smartphone users: Implications for Smartphone attachment. *Computers in Human Behavior*.
- [61] Feng, Y., Worrachananun, M., & Lai, I. K.-W. (2015). Students' Preferences and Intention on Using Smartphone Education Applications (pp. 109–112). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISET.2015.30>
- [62] Esmaeili, M., Eydgahi, A., & Amanov, I. (2015). Perceptions of students toward utilizing smartphone in the classroom. In *122nd ASEE Annual Conference & Exposition*. Seattle: American Society for Engineering Education.
- [63] Vavoula G; Pachler, N; Kikulska-Hulme A, (2009), *Researching Mobile Learning Frameworks, Tool And Research Designs*, New York, Peter Lang
- [64] Kirkley, S. E., & Kirkley, J. R. (2004) *Creating Next Generation Blended Learning Environments Using Mixed Reality, Video Games and Simulations*. *Techtrends*, 9(3), 42-89.
- [65] Quintero, J., Baldiris, S., Rubira, R., Cerón, J., & Velez, G. (2019). *Augmented Reality in Educational Inclusion. A Systematic*

- Review on the Last Decade. *Frontiers in Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01835>
- [66] Shelton, B. & Hedley, N. (2002) *Using augmented reality for teaching earth-sun relationships to undergraduate geography students*. In The First IEEE International Augmented Reality Toolkit Workshop. Darmstadt Germany.
- [67] Dede, C. (2009). Immersive interfaces for engagement and learning. *Science*, 323(5910), 66–69. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1167311>.
- [68] Klopfer, E., & Squire, K. (2008). Environmental detectives: the development of an augmented reality platform for environmental simulations. *Educational Technology Research and Development*, 56(2), 203–228. <http://dx.doi.org/10.1007/s11423-007-9037-6>.
- [69] Liu, W., Cheok, A. D., Mei-Ling, C. L., & Theng, Y.-L. (2007). *Mixed reality classroom: Learning from entertainment*. Paper presented at the proceedings of the 2nd international conference on digital interactive media in entertainment and arts, Perth, Australia.
- [70] Resnick, M. (2002) Rethinking Learning in the Digital Age. Dalam Porter, M. E., Sachs, J. D., dan McArthur, J. W. The Global Information Technology Report 2001- 2002: Readiness for the Networked World.
- [71] Mustaqim, I. (2016). Pemanfaatan Augmented Reality sebagai media pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 13(2), 174–183.
- [72] Wiratmojo, P. & Sasonohardjo (2002). *Media Pembelajaran Bahan Ajar*. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Pertama, Lembaga Administrasi Negara

Pembentukan Karakter Kreatif Siswa Melalui Kreativitas *Problem Solving*

Dr. Sri Hariyani, M.Pd ¹

Pengantar

Bagian penting dalam belajar matematika adalah *problem solving*. Pada hakikatnya *problem solving* bukan sekedar mendapatkan hasil akhir, melainkan menekankan pada proses untuk mendapatkan hasil akhir, oleh karenanya diperlukan suatu kreativitas. Pada kenyataannya, implementasi *problem solving* di sekolah terjebak pada pola pikir imitatif yang justru diciptakan oleh lingkungan belajar siswa sendiri. Siswa diminta menyelesaikan suatu masalah matematika dengan menggunakan pola pikir analogi tanpa memperhatikan nilai kreativitas siswa. Semestinya pola pikir analogi yang terbentuk kemudian dilanjutkan pada pembentukan kreativitas siswa melalui penyusunan alternatif penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas *problem solving* memuat beberapa tahapan, meliputi: tahapan eksplorasi (*exploration*), siswa memiliki kemampuan berpikir analisis sehingga dapat merumuskan informasi pada masalah dan tujuan yang ingin dicapai; tahapan pembentukan ide (*idea generated*), siswa memiliki kemampuan imajinatif sehingga dapat mengerucutkan masalah, menemukan inti masalah, dan menggambarkan visualisasinya; dan tahapan justifikasi (*justification*), siswa memiliki kemampuan berpikir inovatif dengan membuat alternatif penyelesaian.

Tahapan kreativitas *problem solving* yang dilalui oleh siswa diharapkan dapat membentuk karakter kreatif, yaitu siswa yang memiliki kemampuan berpikir divergen, imajinatif, dan inovatif. Kemampuan berpikir divergen adalah berpikir terbuka terhadap segala alternatif ide atau penyelesaian yang bisa dimunculkan, dan mampu mengaitkan antara bagian masalah yang satu dengan bagian masalah yang lain, sehingga dapat diketahui keseluruhan masalah secara jelas. Kemampuan imajinatif adalah kemampuan seseorang dalam membuat penggambaran situasi masalah untuk mendapatkan solusi.

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Kemampuan berpikir inovatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa ide yang telah ada dan menjadikannya sebagai sesuatu yang baru. Berdasarkan pengertian kemampuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki karakter kreatif adalah siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mampu mengembangkan sesuatu yang sederhana menjadi bernilai, dan memiliki daya produktivitas tinggi yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karakter kreatif yang dimiliki oleh siswa menjadikan siswa menyukai aktivitas yang menantang, menarik, dan menyenangkan. Selain itu, siswa kreatif mampu menunjukkan daya inisiatif, kaya imajinasi, percaya diri, dan mandiri. Dengan demikian karakter kreatif menjadikan siswa mampu melihat masalah sebagai suatu tantangan untuk diselesaikan dengan mengeksplorasi semua alternatif penyelesaian yang potensial untuk menciptakan cara-cara baru yang inovatif.

Implementasi pembelajaran matematika di kelas cenderung dilakukan secara monoton, strategi pembelajaran yang dilakukan tidak variatif, terjadi pengulangan strategi pembelajaran tertentu secara terus-menerus. Hal ini menjadikan siswa kurang tertarik untuk belajar lebih mendalam. Ini berarti materi yang telah ditransfer kepada siswa tidak memotivasi siswa untuk masuk tahap *problem solving* lebih lanjut. Dalam kondisi demikian, sekalipun siswa berada pada tahap *problem solving* maka siswa menjadi kurang tertantang dalam menyelesaikan masalah, daya kreativitas siswa tidak muncul. Siswa tidak mampu bernalar dalam menentukan penyelesaian suatu masalah, tetapi meniru penyelesaian yang dicontohkan [1]. Contoh sederhana penjumlahan bilangan bulat, siswa diminta mengerjakan penjumlahan bilangan bulat $135 + 142 = \dots$. Siswa menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan pola pikir imitatif sesuai contoh penyelesaian yang diberikan oleh guru, siswa menuliskan penyelesaian sebagai berikut: $\frac{135142}{277} +$. Penyelesaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut tidak salah, namun tidak nampak kreatif. Kreativitas dalam *problem solving* ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam memunculkan alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian yang dapat dimunculkan seperti, $135 + 142 = (100 + 30 + 5) + (100 + 40 + 2) = (100 + 100) + (30 + 40) + (5 + 2) = 200 + 70 + 7 =$

277. Kasus lain pada contoh persamaan linier dua variabel, siswa diminta menyelesaikan $13x + 31y = 54$ dan $31x + 13y = 34$. Barangkali hal pertama yang terpikirkan oleh siswa adalah strategi penyelesaian persamaan linier dua variabel dengan menggunakan cara substitusi atau eliminasi. Sedikit siswa yang berpikir kreatif, keluar dari kotak strategi penyelesaian yang umum dilakukan seperti, penyelesaian dengan cara menjumlahkan kedua persamaan linier dua variabel sehingga diperoleh $44x + 44y = 88$.

Pengulangan situasi belajar siswa yang demikian tentu akan menyebabkan daya kreativitas siswa menurun. Jadi tidak mengherankan apabila siswa diminta menentukan penyelesaian masalah, hal yang terpikir oleh siswa pertama kali adalah rumus matematika yang sesuai untuk soal tersebut [2], bukan konsep matematika yang bisa diterapkan. Ingatan siswa terhadap rumus matematika menunjukkan bahwa siswa bisa dalam *problem solving* pada soal terkait yaitu dengan cara menghafal. Berbeda halnya apabila siswa mampu mengingat konsep matematika yang bisa diterapkan pada soal terkait. Ingatan siswa terhadap konsep matematika menunjukkan bahwa siswa mampu belajar secara bermakna. Daya kreativitas siswa yang cenderung menurun merupakan indikasi bagi terciptanya kondisi yang kurang kondusif bagi pengembangan potensi peserta didik menjadi pribadi yang cakap dan kreatif, sesuai tuntutan UU No. 20 Sisdiknas tahun 2003. Kebiasaan belajar dengan mengandalkan kemampuan menghafal hanya akan menjadikan kerja otak melemah dan menjadi cepat lelah, sehingga tertanam pada diri siswa bahwa belajar matematika sangat melelahkan dan bahkan membosankan.

Dyer, dkk [3] mengatakan bahwa kemampuan kreativitas siswa lebih dapat dimunculkan melalui lembaga pendidikan dibandingkan kecerdasan yang dominan bersifat genetik. Daya kreativitas mampu memotivasi siswa untuk melakukan eksplorasi secara mendalam, memunculkan pertanyaan kritis, melakukan penalaran dengan membuat pengaitan antara unsur masalah yang satu dengan unsur masalah yang lain, melakukan eksperimen dan membuat penyelesaian secara komprehensif. Kreativitas siswa dalam *problem solving* ditandai dengan munculnya alternatif penyelesaian sebagai bentuk inovasi penyelesaian masalah, yaitu adanya penyelesaian lain yang berbeda.

Kreativitas dalam *problem solving* juga dipengaruhi oleh lingkungan belajar siswa. Guru semestinya berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Ini berarti siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreasi dalam menentukan penyelesaian berbeda dari penyelesaian yang biasa ditampilkan. Dalam hal ini, guru berupaya memunculkan kepercayaan diri siswa. Dengan demikian siswa tidak lagi terjebak pada pola berpikir standar (*commonly thinking*), yaitu pola berpikir yang hanya menggunakan keterampilan algoritma dasar. Diharapkan siswa mampu menerapkan pengalaman tentang proses matematis dalam mengembangkan lingkup pengetahuan matematika (NCTM, 2020).

Kreativitas merupakan hak dasar manusia dalam bentuk aktualisasi diri [5]. Perilaku aktualisasi diri diantaranya berupa pengalaman mencoba sesuatu yang baru, bekerja keras, dan bertahan dan adaptif dalam segala situasi hingga tercapai tujuan. Pada dasarnya aktualisasi diri merupakan kemampuan fleksibilitas diri terhadap berbagai situasi yang dihadapi, termasuk kesediaan diri keluar dari zona nyaman, terbuka dan siap terhadap perubahan dan konsekuensinya. Keluar dari zona nyaman menjadikan siswa mampu memunculkan alternatif penyelesaian (kreatif) [6]. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri menyebabkan siswa dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Semakin besar ambisi terhadap pemenuhan aktualisasi diri, maka akan semakin besar pula potensi yang dapat dimaksimalkan.

Penelitian sebelumnya tentang kreativitas dikaji oleh [7], bahwa kreativitas ditandai oleh adanya kebaruan (*originality*). Sesuatu yang kreatif haruslah baru (*original*). Kreativitas juga diartikan sebagai transformasi. Transformasi merupakan terobosan melalui cara pandang terhadap suatu masalah secara mendetail [8]. Transformasi dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu yang kompleks menjadi lebih sederhana. Siswa yang kreatif akan mampu mengubah masalah yang terlihat kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, sehingga dapat ditentukan strategi penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini difokuskan pada kreativitas *problem solving* yang dapat membentuk karakter kreatif siswa. Adapun signifikansi penelitian ini adalah perlunya

menerjemahkan kreativitas *problem solving* pada matematika pada pembentukan karakter yang positif bagi perkembangan siswa.

Pembahasan

Instrumen penelitian diberikan kepada subyek penelitian, selanjutnya disebut subyek. Subyek adalah siswa SMPN di kota Malang. Sebelum diberikan kepada subyek, terlebih dahulu instrumen diberikan kepada guru untuk diselesaikan. Penyelesaian instrumen oleh guru ditetapkan sebagai penyelesaian konvensional. Penyelesaian konvensional merupakan penyelesaian rutin yang diajarkan oleh guru kepada siswa dengan menggunakan langkah-langkah *problem solving*/penyelesaian soal sesuai aturan kurikulum yang berlaku. Apabila subyek mampu menyelesaikan instrumen penelitian di luar cara konvensional yang telah ditetapkan, dan penyelesaian instrumen tersebut benar secara konseptual dan prosedural, maka subyek tersebut dikatakan mampu berpikir kreatif. Hal ini didasarkan pendapat Darn (2012), bahwa salah satu aspek mental *emotional intelligence* dalam berpikir kreatif diantaranya adalah "*breaking free of routine*".

Metode penelitian ini menggunakan metode *think alouds*. Subyek menuliskan langkah-langkah penyelesaian sambil bersuara untuk memaparkan langkah penyelesaian, menceritakan semua yang dipikirkannya berkaitan dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil tersebut. Subyek sangat kooperatif, sehingga peneliti tidak kesulitan berkomunikasi dengan subyek. Subyek sangat percaya diri, hal ini terlihat dari suara yang terdengar keras ketika melakukan *think alouds*. Subyek memberikan alternatif penyelesaian di luar penyelesaian konvensional yang ditetapkan.

Pada tahapan eksplorasi (*exploration*), subyek berusaha memahami masalah dengan menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting pada soal, yaitu (1) Iswanto menginginkan kaleng-kaleng tersebut terisi penuh; (2) Iswanto mengambil beberapa kaleng dan menuangkan isinya pada kaleng-kaleng yang lain; (3) Iswanto hanya membutuhkan 5 kaleng untuk menjadikan kaleng yang lain terisi penuh; dan (4) ternyata isi masing-masing kaleng yang ada sekarang bertambah tepat $\frac{1}{5}$ dari isi kaleng semula, seperti pada Gambar 1.

Petunjuk Soal: Selesaikan soal cerita berikut dengan menggunakan banyak cara (minimal dua cara) !

Iswanto adalah pengusaha susu kedelai. Suatu hari Iswanto menuangkan 60 liter susu kedelai seluruhnya ke dalam kaleng-kaleng dengan volume yang sama. Ternyata isi di dalam masing-masing kaleng belum penuh. Iswanto menginginkan kaleng-kaleng tersebut terisi penuh, sehingga Iswanto mengambil beberapa kaleng dan menuangkan isinya pada kaleng-kaleng yang lain. Iswanto hanya membutuhkan 5 kaleng untuk menjadikan kaleng yang lain terisi penuh. Kelima kaleng yang telah kosong selanjutnya disingkirkan.

Ternyata isi masing-masing kaleng yang ada sekarang bertambah tepat $\frac{1}{5}$ dari isi kaleng semula. Tentukan banyak kaleng sebelum pengambilan !

Gambar 1. Subyek mengeksplorasi masalah dengan menggarisbawahi kalimat-kalimat penting pada soal (ditunjukkan oleh penanda)

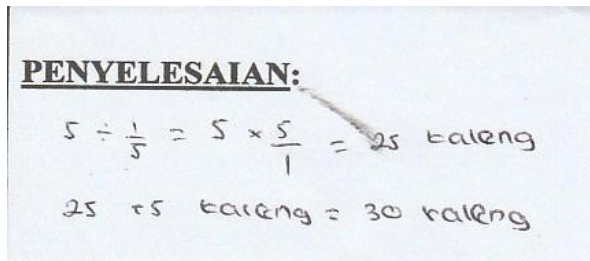
Subyek menyatakan kembali situasi masalah menggunakan bahasanya sendiri,

Diketahui Iswanto menginginkan kaleng-kalengnya terisi penuh, *makanya* dia mengambil beberapa kaleng lalu menuangkan isinya pada kaleng yang lain, dan ternyata ia hanya membutuhkan 5 kaleng biar kaleng yang lainnya itu terisi penuh. *Pas* diisi ternyata bertambah $\frac{1}{5}$ dari isi semula.

Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut, subyek membuat interpretasi bahwa kaleng-kaleng yang lain akan menjadi penuh jika bertambah $\frac{1}{5}$ dari isi semula, interpretasi ini diperkuat dengan mengatakan, “menambah $\frac{1}{5}$ berarti $5 : \frac{1}{5}$, *biar* tahu berapa jumlah kaleng aslinya”.

Pada tahapan pembentukan ide (*generating idea*), subyek berupaya mengerucutkan masalah dan menemukan unsur inti masalah. subyek menemukan unsur inti masalah dan mengaitkannya

dengan konsep operasi pembagian pada pecahan seperti pada Gambar 2. berikut.



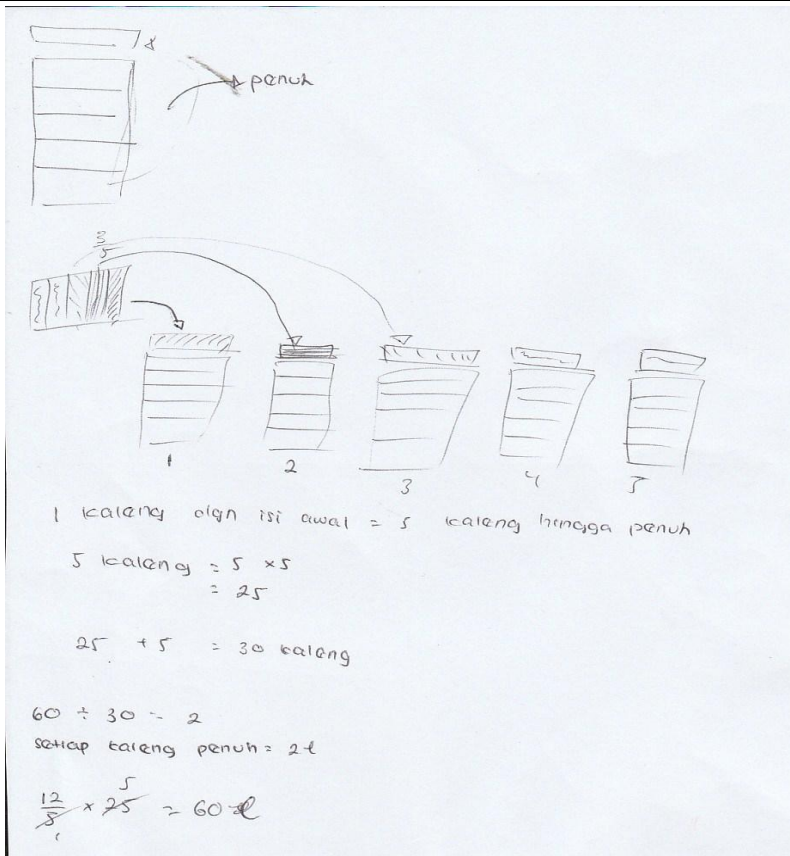
The image shows a handwritten solution on a piece of paper. At the top, the word "PENYELESAIAN:" is written in bold, underlined capital letters. Below it, the first line of the solution is the equation $5 \div \frac{1}{5} = 5 \times \frac{5}{1} = 25$ kaleng. The second line of the solution is the equation $25 + 5 \text{ kaleng} = 30 \text{ kaleng}$. A pencil is visible in the background, pointing towards the first line of the solution.

Gambar 2. Penyelesaian ke-1 soal matematika oleh subyek

Subyek membagi 5 dengan $\frac{1}{5}$ dengan menuliskan " $5 \div \frac{1}{5}$ ", subyek mampu melakukan operasi pembagian pada bilangan pecahan, operasi pembagian diubah menjadi operasi perkalian, dengan cara menukar bilangan yang semula di posisi pembilang pada pecahan kedua menjadi berada di posisi penyebut, demikian juga sebaliknya menukar bilangan yang semula di posisi penyebut pada pecahan kedua menjadi berada di posisi pembilang " $5 \div \frac{1}{5} = 5 \times \frac{5}{1}$ ". Pada operasi perkalian pada pecahan, subyek membagi hasil perkalian 5 dengan 5 dengan 1, sehingga diperoleh hasil "25 kaleng". Subyek mengemukakan hasil akhirnya sebagai berikut, "tadi *kan* yang diambil 5, berarti awal-awalnya itu 25 ditambah 5 kaleng sama dengan 30 kaleng".

Pada hasil yang diperoleh, subyek menyertakan satuan "kaleng" di belakang bilangan 25. Karena yang diminta dalam soal adalah banyak kaleng sebelum pengambilan, maka subyek menjumlahkan 25 dengan 5, jadi hasil akhirnya adalah 30 kaleng.

Pada tahapan justifikasi (*justification*), subyek menyusun cara ke-2 untuk menyelesaikan instrumen penelitian. Subyek memeriksa kembali solusi yang dihasilkan dan menyusun cara penyelesaian ke-2 seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Cara penyelesaian ke-2 oleh subyek

Subyek mengilustrasikan kalimat soal dengan menggunakan gambar. Ilustrasi gambar yang dibuat digunakan oleh subyek untuk mempermudah dalam merancang penyelesaian ke-2. Subyek membuat ilustrasi gambar satu kaleng penuh susu kedelai. Subyek melanjutkannya dengan mengatakan, “kan bertambah $\frac{1}{5}$, biar gampang ini dibagi 5 dulu (subyek menggambar 5 kaleng), kan tambah $\frac{1}{5}$ jadi penuh”. Subyek mengartikan situasi masalah bahwa keseluruhan isi satu kaleng susu kedelai tersebut habis dan dituangkan tepat $\frac{1}{5}$, kemudian subyek menggambar lima kaleng.

kalau misalnya kaleng yang tadi dituangkan ke kaleng yang pertama ini, *biar* nambah $\frac{1}{5}$, berarti *tinggal* sisa $\frac{4}{5}$. Dituang ke kaleng ke-2, berarti berkurang $\frac{1}{5}$ lagi, berarti sisa $\frac{3}{5}$. Setiap dituangkan berkurang $\frac{1}{5}$, ini berarti satu kaleng bisa mengisi 5 kaleng yang lain.

Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, subyek membuat kesimpulan dengan menggunakan konsep perbandingan. Kemudian subyek menuliskan, “1 kaleng dengan isi awal = 5 kaleng hingga penuh”, Jika satu kaleng susu kedelai dapat mengisi lima kaleng susu kedelai yang lain hingga penuh, maka kelima kaleng susu kedelai dapat mengisi kaleng-kaleng yang lain dengan menuliskan “5 kaleng = $5 \times 5 = 25$ ”. Subyek meninjau kembali tujuan yang ingin dicapai dengan mengatakan, “*kan* tadi dikurangi dengan 5 *biar* kaleng yang lain terisi penuh, berarti awalnya itu $25 + 5 = 30$ kaleng”, sehingga diperoleh banyak kaleng susu kedelai sebelum pengambilan adalah 30 kaleng.

Subyek mampu melihat keseluruhan situasi masalah dengan meninjau 60 liter susu kedelai untuk pengecekan kembali langkah penyelesaian. Pada awalnya subyek agak kesulitan menuliskan cara pengecekan ulang langkah penyelesaian. Selanjutnya subyek mengecek kebenaran hasil yang didapatkan (30 kaleng) seperti dalam kotak yang dibuat oleh peneliti. Subyek membuat alasan pembenaran dengan mengkaitkan 60 liter susu kedelai dan 30 kaleng yang diperoleh. Subyek membagi 60 dengan 30 diperoleh hasil 2 dengan menuliskan, “ $60:30 = 2$ ”. Subyek menyimpulkan “jadi masing-masing kaleng berisi susu kedelai sebanyak 2 liter” dengan menuliskan “setiap kaleng penuh = 2 liter”. Subyek tampak kebingungan dengan menunjukkan kesalahan ucapan berkali-kali, subyek menjumlahkan 2 dengan pecahan ($\frac{1}{5} \times 2 = \frac{2}{5}$), sehingga diperoleh $\frac{12}{5}$. Kemudian subyek mengalikan $\frac{12}{5}$ dengan 25 dan menuliskan, “ ~~$\frac{12}{5} \times 25^5 = 60$~~ liter, (seharusnya tidak menambahkan satuan liter). Jadi diperoleh 60 liter. Dengan mengecek volume susu kedelai pada

keadaan saat ini (setelah pengambilan 5 kaleng) tetap 60 liter seperti yang dikemukakan di awal kalimat tugas matematika. Dengan demikian subyek berkesimpulan bahwa jawabannya 30 kaleng adalah benar.

Subyek mampu melihat keseluruhan situasi masalah dengan meninjau 60 liter susu kedelai untuk pengecekan kembali langkah penyelesaian. Pada awalnya subyek agak kesulitan menuliskan cara pengecekan ulang langkah penyelesaian. Selanjutnya subyek mengecek kebenaran hasil yang didapatkan (30 kaleng). Subyek membuat alasan pembenaran dengan mengkaitkan 60 liter susu kedelai dan 30 kaleng yang diperoleh. Subyek membagi 60 dengan 30 diperoleh hasil 2 dengan menuliskan, " $60:30 = 2$ ". Subyek menyimpulkan "jadi masing-masing kaleng berisi susu kedelai sebanyak 2 liter" dengan menuliskan "setiap kaleng penuh = 2 liter". Subyek tampak kebingungan dengan menunjukkan kesalahan ucapan berkali-kali, subyek menjumlahkan 2 dengan pecahan ($\frac{1}{5} \times 2 = \frac{2}{5}$), sehingga diperoleh $\frac{12}{5}$. Kemudian subyek mengalikan $\frac{12}{5}$ dengan 25 dan menuliskan, " $\frac{12}{5} \times 25 = 60 \text{ liter}$, (seharusnya tidak menambahkan satuan liter). Jadi diperoleh 60 liter. Dengan mengecek volume susu kedelai pada keadaan saat ini (setelah pengambilan 5 kaleng) tetap 60 liter seperti yang dikemukakan di awal kalimat tugas matematika. Dengan demikian subyek berkesimpulan bahwa jawabannya 30 kaleng adalah benar.

Subyek penelitian menggunakan kemampuan bernalarnya untuk menyelesaikan instrumen penelitian. Subyek mengaitkan antar gagasan pada kalimat soal matematika dan menarik simpulan berdasarkan kaitan gagasan-gagasan tersebut. Adapun diagram hasil konstruksi konsep subyek dimaksudkan untuk menggambarkan penggunaan konsep oleh subyek. Konstruksi konsep subyek dibedakan menjadi *categorical construction* dan *compositional construction*.

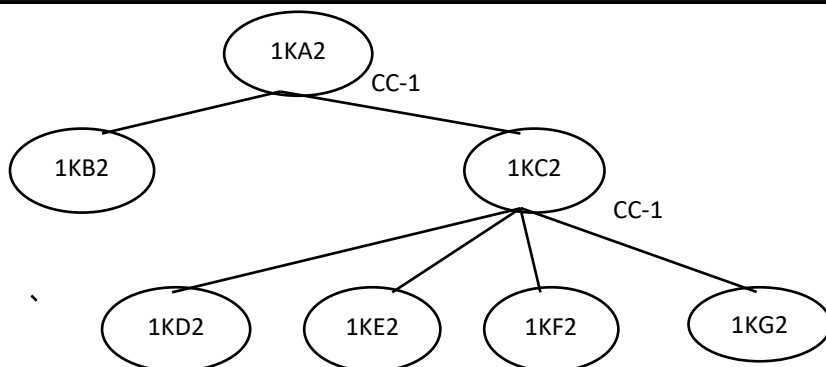


Diagram 1. Diagram konstruksi konsep penyelesaian ke-1 oleh subyek

Keterangan:

1KA2 : konsep bilangan, konsep baru yang dikonstruksi secara kategorikal (*categorical construction*) menjadi konsep bilangan bulat (1KB2) dan konsep pecahan (1KC2)

1KB2 : konsep bilangan bulat

1KC2 : konsep pecahan, konsep baru yang dikonstruksi secara kategorikal (*categorical construction*) menjadi operasi penjumlahan pada pecahan (1KD2), operasi pengurangan pada pecahan (1KE2), operasi perkalian pada pecahan (1KF2) dan operasi pembagian pada pecahan (1KG2)

1KD2 : operasi penjumlahan pada pecahan

1KE2 : operasi pengurangan pada pecahan

1KF2 : operasi perkalian pada pecahan

1KG2 : operasi pembagian pada pecahan

CC-1 : *categorical construction*

: ada keterkaitan

Diagram konstruksi konsep penyelesaian ke-2 oleh subyek ditunjukkan oleh Diagram 2.

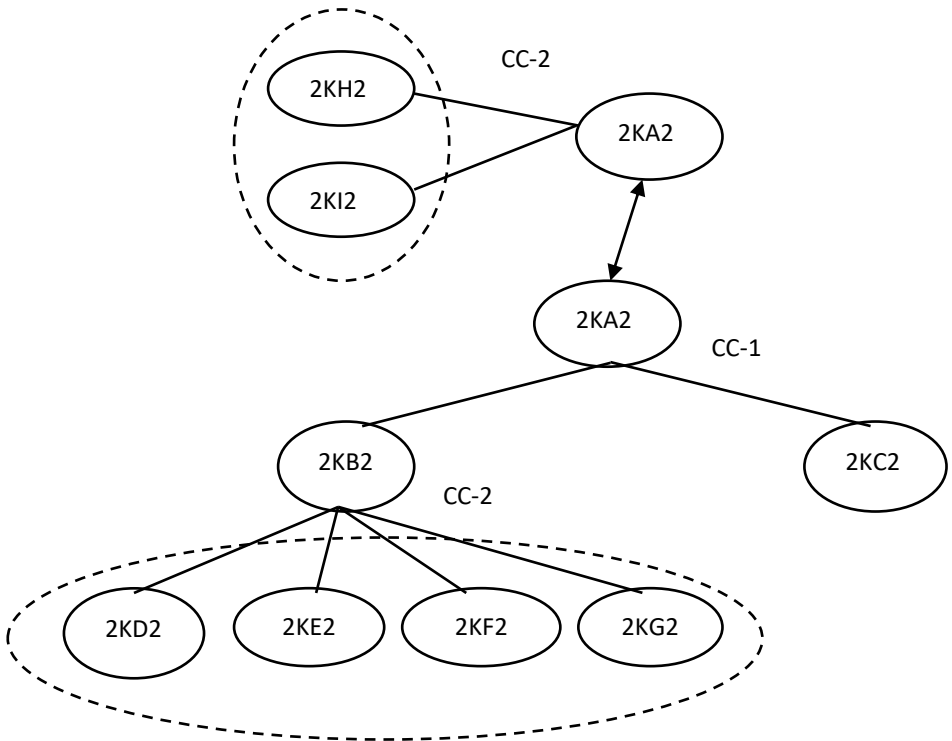


Diagram 2. Diagram konstruksi konsep penyelesaian ke-2 oleh subyek
Keterangan:

- 2KA2 : konsep perbandingan, konsep baru yang dikonstruksi secara kategori (*categorical construction*) menjadi konsep perbandingan senilai (2KB2) dan konsep perbandingan berbalik nilai (2KC2)
- 2KB2 : konsep perbandingan senilai, konsep baru yang dikonstruksi secara komposisi (*compositional construction*) dari besaran sejenis (2KD2), suku perbandingan pertama (2KE2), suku perbandingan kedua (2KF2), dan konsep sifat perkalian silang: jika $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ maka $ad = bc$ (2KG2)
- 2KC2 : konsep perbandingan berbalik nilai

2KD2	:	besaran sejenis
2KE2	:	suku perbandingan pertama
2KF2	:	suku perbandingan kedua
2KG2	:	konsep sifat perkalian silang: jika $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ maka $ad = bc$
2KH2	:	dua nilai atau lebih dari besaran sejenis
2KI2	:	dinyatakan dalam bentuk $a : b$ atau $\frac{a}{b}$
CC-1	:	<i>categorical construction</i>
CC-2	:	<i>compositional construction</i>

Tabel 1. Deskripsi berpikir kreatif oleh subyek penelitian

Tahapan	Deskripsi
Tahapan Eksplorasi (<i>Exploration</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Subyek memahami masalah dengan membuat penanda pada kalimat soal "(1) Iswanto menginginkan kaleng-kaleng tersebut terisi penuh; (2) Iswanto hanya membutuhkan 5 kaleng untuk menjadikan kaleng yang lain terisi penuh; (3) Kelima kaleng yang telah kosong selanjutnya disingkirkan; (4) Ternyata isi masing-masing kaleng yang ada sekarang bertambah tepat $\frac{1}{5}$ dari isi kaleng semula". ■ Subyek menggambarkan situasi masalah dengan membahasakan kembali kalimat yang ditandai.
Tahapan Pembentukan Ide (<i>generating idea</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Subyek menemukan unsur inti masalah dan merumuskan model matematika <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> $5 : \frac{1}{5} = 5 \times \frac{5}{1}$ $25 + 5 = 30$ </div>
Tahapan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Subyek mengembangkan penyelesaian dengan alternatif penyelesaian ke-2 dengan membuat ilustrasi gambar.

(Justification
)

- Berdasarkan ilustrasi gambar, Subyek menuliskan
 $1 \text{ kaleng dengan isi awal} = 5 \text{ kaleng hingga penuh}$
 $5 \text{ kaleng} = 5 \times 5 = 25$
- Subyek mengecek kembali kebenaran jawaban dengan menuliskan

$$60 : 30 = 2$$
$$\text{setiap kaleng penuh} = 2 \text{ l}$$
$$\frac{12}{5} \times 25 = 60 \text{ liter}$$

Penyelesaian I
direct applied transformation

- Subyek menggunakan konsep operasi pembagian pecahan yang langsung diterapkan untuk menyelesaikan soal matematika.

Penyelesaian II
indirect applied transformation

Konstruksi
Konsep

- Subyek menggunakan konsep perbandingan dengan ilustrasi gambar, perbandingan dinyatakan dengan pecahan yang dikonstruksi secara komposisi. Kemudian merumuskan formula kalimat “1 kaleng dengan isi awal = 5 kaleng hingga penuh”. Dalam hal ini subyek menggunakan konsep perbandingan yang dikonstruksi secara kategori (perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai), sehingga diperoleh penyelesaian soal matematika.

Sebelum penelitian dilakukan, subyek telah diajarkan konsep persamaan linier oleh guru, tetapi subyek tidak menggunakan konsep persamaan linier dalam menyelesaikan instrumen. Subyek menggunakan konsep bilangan bulat, konsep pecahan dan konsep perbandingan untuk menghasilkan penyelesaian. Dalam *problem*

solving, pemahaman pernyataan atau unsur masalah menjadikan memori tentang informasi yang relevan akan dipanggil kembali. *Problem solver* yang rendah dalam elaborasi cenderung menghasilkan ketepatan dan efektivitas pembentukan pemahaman terhadap pernyataan atau unsur masalah yang rendah pula [9]. Menurut Teori Axelrod (1973), ketika *schema* lama tidak ditemukan, maka subyek akan menggunakan *schema* sebelumnya yang identik/relevan atau subyek akan menggunakan *schema* berbeda. Dalam kasus ini, subyek menggunakan *schema* sebelumnya yang identik/relevan. Hal ini berarti kemampuan berpikir kreatif dapat memunculkan penggunaan *schema* yang identik/relevan, bergantung pada tingkat elaborasi subyek terhadap konsep matematis berkaitan dengan masalah tersebut. Semakin tinggi elaborasi, maka semakin luas pembentukan *schema* yang identik/relevan.

Pembentukan karakter kreatif bagi siswa yang mampu berpikir kreatif diantaranya adalah siswa mampu berpikir divergen. Berpikir divergen berarti berpikir terbuka terhadap segala alternatif ide atau penyelesaian yang bisa dimunculkan untuk mendapatkan tujuan. Untuk dapat menghasilkan ide atau penyelesaian yang luas, diperlukan informasi sebanyak mungkin, termasuk informasi yang dianggap tidak relevan. Berpikir divergen merupakan cara kerja otak kanan untuk mengeksplorasi berbagai pilihan penyelesaian, termasuk pilihan penyelesaian yang rentan dengan resiko tinggi [11], sehingga diperoleh solusi yang tak biasa. Pilihan penyelesaian mungkin belum ada sebelumnya, atau bahkan dipandang aneh. Terdapat empat unsur berpikir divergen, yaitu elaborasi, *fluency*, *flexibility*, dan *originality* [12]. Elaborasi adalah penambahan atau pengembangan produk atau ide. *Fluency* merupakan penciptaan banyak ide yang memperkaya kuantitas solusi potensial. *Flexibility* yaitu penciptaan persepsi atau kategori beragam sebagai dasar terbentuknya ide. *Originality* merupakan penciptaan ide baru, tidak biasa, unik, berbeda atau belum pernah ada sebelumnya.

Pembentukan karakter kreatif yang lain bagi siswa adalah kemampuan imajinasi. Kemampuan imajinasi menjadikan siswa mengingat tentang gambaran pengalaman sebelumnya, dan menciptakan kemungkinan konsep yang lengkap dan bermakna tentang pembentukan kaitan antar unsur masalah [13]. Siswa yang memiliki imajinasi tinggi terkadang memerlukan banyak waktu untuk menekuni sesuatu yang menarik perhatian, dan terus antusias sepanjang waktu. Siswa imajinatif memiliki ambisi yang tinggi, menganggap masa depan berbeda dengan masa sekarang. Mereka menganggap selalu ada perubahan, itulah sebabnya selalu muncul ide baru yang bersifat dinamis. Hal yang tidak ditemui pada seseorang yang menganggap hidupnya monoton.

Pembentukan karakter kreatif lainnya yaitu inovatif. Perilaku inovatif meliputi: eksplorasi terhadap kesempatan/peluang, pembentukan ide baru, implementasi perubahan, dan penerapan pengetahuan baru/peningkatan proses perilaku [14]. Inovatif merupakan aktivitas mengeksplorasi segala kemampuan diri untuk menciptakan sesuatu yang baru, positif dan bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat di lingkungan sekitar. Berpikir inovatif memerlukan unsur elastisitas yang tinggi dengan batasan norma dan agama, produktivitas yang tinggi tanpa henti, dan sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, serta originalitas yang murni/tidak mencuri atau mengakui kreativitas orang lain.

Perilaku inovatif sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Perilaku inovatif menunjukkan ciri-ciri: tidak merasa puas dengan pencapaian saat ini; senantiasa mengeksplorasi lingkungan dan mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan baru; tanggap terhadap kebutuhan diri dan menjadi pribadi yang proaktif memprakarsai proyek baru; memiliki pandangan yang jauh ke depan; memiliki ide-ide yang tak biasa, serta mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin; melampaui batas kenyamanan, berani mencoba, dan berani pula menanggung kegagalan; mengubah lingkungan kerja sesuai dengan kebutuhan, sering melakukan

perjalanan guna memperoleh inspirasi ide-ide brilian; memiliki ketertarikan pada hal-hal yang aneh, berani untuk tampil beda, dan juga berani bertindak; dapat mempertahankan ide yang dimiliki serta tidak terpengaruh dengan cara pandang orang lain; terbuka bagi setiap perubahan, mampu melakukan adaptasi atau penyesuaian, serta mampu menyajikan berbagai solusi dan gagasan; mampu menyambungkan atau melihat hubungan dari unsur-unsur yang terputus; dapat merenungkan berbagai pertimbangan sebelum mengambil suatu keputusan; mampu perseptif terhadap sesuatu serta dapat membedakannya, tetap merasa nyaman meski dalam situasi kacau (*chaos*), serta tidak terburu-buru dalam membenarkan suatu ide atau gagasan yang muncul; berusaha untuk terus mencari pengetahuan secara kontinu dan juga menyeimbangkan setiap informasi yang terkumpul serta menyelaraskan tindakan; mampu memilih antara pemikiran divergen dengan konvergen serta memiliki intuisi untuk melakukan analisis; berusaha menyeimbangkan pemikiran dari setiap individu, mampu membuka dan mencari dukungan; mengomunikasikan gagasan secara efektif serta mampu menerjemahkan sesuatu yang abstrak ke dalam bahasa yang penuh arti; merefleksi hal-hal yang dianggap mengecewakan atau tidak diinginkan, mampu belajar dengan cepat dari umpan balik yang diberikan kepadanya; dan bekerja keras, tekun serta memiliki komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Problem solving pada penelitian ini menggunakan 3 tahapan penyelesaian masalah, yaitu eksplorasi (*exploration*), pembentukan ide (*generating idea*) dan justifikasi (*justification*). Ketiga tahapan tersebut dideskripsikan sebagai berikut: (1) Pada tahapan eksplorasi (*exploration*), siswa memahami pernyataan masalah dengan merumuskan informasi pada soal dan tujuan yang ingin dicapai. Siswa membuat penanda pada kalimat soal. Siswa menginterpretasikan kalimat soal yang ditandai dengan menggunakan bahasa sendiri; (2)

Pada tahapan pembentukan ide (*generating idea*), siswa tidak mampu menemukan *schema* lama yang sesuai. Ini berarti siswa tidak mampu mengingat cara konvensional yang telah diajarkan guru sebelumnya. Penyelesaian konvensional menggunakan konsep persamaan linier satu variabel. Untuk mendapatkan penyelesaian masalah, siswa menggunakan *schema* sebelumnya yang identik/relevan. Dalam hal ini, siswa menggunakan konsep pecahan, konsep perbandingan dan konsep bilangan bulat; dan (3) Pada tahapan justifikasi (*Justification*), siswa mendapatkan jawaban masalah pada soal matematika. Siswa mengecek kembali kebenaran jawaban dengan meninjau kembali situasi masalah. Siswa mengembangkan penyelesaian soal matematika dengan membuat alternatif penyelesaian.

Pada dasarnya tahapan eksplorasi, pembentukan ide dan justifikasi tidak berbeda dengan tahapan-tahapan pemecahan masalah yang lain. Akan tetapi, pada tahapan pembentukan ide (*generating idea*), siswa yang berpikir kreatif memiliki karakteristik tersendiri. Adapun karakteristik tersebut meliputi: (1) siswa yang berpikir kreatif mampu menghasilkan kreativitas; (2) siswa yang berpikir kreatif menggunakan *schema* berbeda untuk menghasilkan penyelesaian; (3) siswa yang berpikir kreatif tepat dalam pemilihan simbol; (4) siswa yang berpikir kreatif menggunakan daya nalar; dan (5) siswa yang berpikir kreatif mampu mengaktifkan kemampuan non intelektual.

Kreativitas *problem solving* berpengaruh pada pembentukan karakter kreatif siswa, yaitu: siswa mampu berpikir divergen, yaitu siswa cenderung memiliki pikiran terbuka; siswa memiliki daya imajinasi tinggi, yaitu siswa memiliki ambisi dan dinamis terhadap perubahan; dan siswa memiliki perilaku inovatif, yaitu siswa senang melakukan eksplorasi dan memiliki daya produktivitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang bisa diberikan yaitu: 1. Guru hendaknya mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dalam arti siswa diberikan kesempatan yang luas untuk menunjukkan kreativitasnya. Guru tidak perlu

mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan yang berupaya mengarahkan pemikiran siswa pada pola imitatif, apalagi “memaksa” siswa menyelesaikan masalah seperti penyelesaian yang dicontohkannya; dan, 2. Masalah yang diberikan kepada siswa hendaknya masalah yang mampu membuat siswa senang, fokus dan tertantang untuk mencari penyelesaiannya, sehingga diharapkan muncul ide-ide kreatif (perspektif baru) untuk mendapatkan penyelesaian yang diharapkan. Apabila cara berpikir ini telah menjadi suatu kebiasaan, kelak diharapkan terbentuk manusia yang berani membuat terobosan dan menghasilkan inovasi baru sehingga kualitas hidupnya meningkat.

Referensi

- [1] O. Kolehmainen and P. Boije, “Graphic Design,” in *Learning by Developing - New Ways to Learn Proceedings of the 2012 Conference on Creativity in Higher Education*, 2013, pp. 26–36, Accessed: May 08, 2021. [Online]. Available: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/167225/ISJ_vol_2_no_3_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y#page=28.
- [2] S. Yuan, “Incorporating Pólya’s Problem Solving Method in Remedial Math,” *J. Humanist. Math.*, vol. 3, no. 1, pp. 96–107, Jan. 2013, doi: 10.5642/jhummath.201301.08.
- [3] J. (Professor of strategy) Dyer, H. B. Gregersen, and C. M. Christensen, *The innovator’s DNA : mastering the five skills of disruptive innovators*. The United States of America: Harvard Business School Publishing, 2011.
- [4] “National Council Of Teachers Of Mathematics (NCTM) 2020 Standards For Secondary Level,” 2020. Accessed: May 09, 2021. [Online]. Available: https://www.nctm.org/uploadedFiles/Standards_and_Positions/CAEP_Standards/2020Option1InstructionsSecondary-NCTM.pdf.
- [5] C. Luzinski, “Transformational leadership,” in *Journal of Nursing Administration*, Dec. 2011, vol. 41, no. 12, pp. 501–502, doi: 10.1097/NNA.0b013e3182378a71.
- [6] S. Darn, “Thinking Outside The Teacher’s Box,” *Humanising Lang. Teach.*, vol. 14, no. 6, 2012, Accessed: May 09, 2021. [Online].

- Available: <http://hltmag.co.uk>.
- [7] M. A. Runco, *Creativity*. 2014.
- [8] M. Lou Maher, T. Veale, R. Saunders, O. Bown, and N. South Wales, *Proceedings of the Fourth International Conference on Computational Creativity edited by ICCO 2013 sydney australia*. 2013.
- [9] J. Carifio, "Updating, Modernizing, and Testing Polya's Theory of [Mathematical] Problem Solving in Terms of Current Cognitive, Affective, and Information Processing Theories of Learning, Emotions, and Complex Performances," *J. Educ. Hum. Dev.*, vol. 4, no. 3, pp. 105–117, Sep. 2015.
- [10] R. Axelrod, "Schema Theory: An Information Processing Model of Perception and Cognition Schema Theory: An Information Processing Model of Perception and Cognition*," *Source Am. Polit. Sci. Rev.*, vol. 67, no. 4, pp. 1248–1266, 1973, [Online]. Available: <http://www.jstor.org/stable/1956546>.
- [11] W. Shen, B. Hommel, Y. Yuan, L. Chang, and W. Zhang, "Risk-Taking and Creativity: Convergent, but Not Divergent Thinking Is Better in Low-Risk Takers," *Creat. Res. J.*, vol. 30, no. 2, pp. 224–231, Apr. 2018, doi: 10.1080/10400419.2018.1446852.
- [12] J. S. Puryear, T. Kettler, and A. N. Rinn, "Relationships of personality to differential conceptions of creativity: A systematic review," *Psychol. Aesthetics, Creat. Arts*, vol. 11, no. 1, pp. 59–68, Feb. 2017, doi: 10.1037/aca0000079.
- [13] P. H. Lin, Y. M. Huang, and C. C. Chen, "Exploring Imaginative Capability and Learning Motivation Difference Through Picture E-Book," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 63416–63425, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2875675.
- [14] J. de Jong and D. N. Den Hartog, "Innovative Work Behavior: Measurement and Validation," *Zoetermeer*, Nov. 2008.

Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Sains: Laboratorium Virtual

Sudi Dul Aji ¹, Muhammad Nur Hudha ²

Pengantar

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau lebih khusus pembelajaran fisika tak lepas dari peran laboratorium. Pembelajaran fisika meliputi 3 aspek, yaitu **Produk** meliputi teori, konsep, hukum dan pengetahuan yang menyertai, **Proses** berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh melalui keterampilan proses, kemudian **Sikap Ilmiah** berkaitan dengan keingintahuan siswa yang didasarkan pada kebenaran ilmiah. Untuk Produk, Proses dan sikap ilmiah dapat dikembangkan melalui kegiatan laboratorium. Pembelajaran di laboratorium memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung pembelajaran dan memberikan penekanan pada aspek proses dan konsep fisika [1]. Laboratorium merupakan tempat untuk melakukan praktikum maupun pelatihan ilmiah secara terkendali yang berhubungan dengan fisika, biologi, kimia dan bidang ilmu lainnya. Laboratorium juga memberikan keterampilan kerja ilmiah, memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah, memupuk rasa ingin tahu, serta membina rasa percaya diri dan penemuan yang didapat dalam proses pengamatan di laboratorium [2]. Dalam kegiatan laboratorium siswa dilatihkan beberapa aspek keterampilan ilmiah seperti mengamati, menggolongkan, mengukur, berkomunikasi, menafsirkan data, dan bereksperimen secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir anak dan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum [3]. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran di laboratorium adalah ketersediaan alat dan tenaga laboran. Ketersediaan ini sangat menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran di laboratorium.

Namun kegiatan memanfaatkan laboratorium dalam beberapa

^{1,2} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

bulan ini sedikit terhambat karena disebabkan wabah virus yang melanda seluruh dunia. Virus ini menyebabkan kegiatan pembelajaran tatap muka menjadi ditiadakan. Pembelajaran IPA sebaiknya harus tetap menarik walaupun dalam kondisi pandemi SARS-CoV-2 ini. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam pembelajaran IPA. Meskipun dalam pandemi ini, pembelajaran IPA harus tetap menekankan pada pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah, dan juga meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Hal ini tentu juga akan berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium. Jika hal ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan berimplikasi terhadap rendahnya penguasaan konsep fisika siswa terlebih dalam aspek psikomotorik siswa. Masalah lain juga ditemukan dalam proses pembelajaran yaitu, bahan ajar praktikum yang diberikan pada siswa hanya mengandung materi dan ada beberapa gambar dua dimensi sehingga membuat siswa menjadi sulit dalam memahami materi, bosan serta kurang berimajinasi sehingga akan berdampak pada rendahnya minat belajar serta rendahnya hasil belajar siswa. Terkait hal ini diupayakan adanya solusi sebagai alternatif pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran fisika. Solusi tersebut diantaranya berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi.

Pembahasan

Pemilihan penggunaan teknologi dan alat bantu dalam mengajar atau alat peraga pendidikan serta penggunaan media pembelajaran yang ada di sekolah sudah mulai disesuaikan dengan tingkat perkembangan teknologi. Semua peralatan mengajar baik media maupun perlengkapan pembelajaran yang lainnya di sekolah disesuaikan dengan kurikulum seperti materi pelajaran, metode pelajaran, metode dan tingkat kemampuan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran [4].

Adanya perkembangan Teknologi Informasi membawa dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Akibat perkembangan teknologi informasi akan

terciptanya terobosan berbagai media baru yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Salah satu inovasi pembelajaran di pendidikan fisika adalah pengembangan dan penggunaan laboratorium virtual. Dalam perkembangannya banyak kita jumpai bahwa laboratorium yang dimanfaatkan tidak hanya berbentuk nyata, namun juga banyak memanfaatkan laboratorium virtual. Dalam laboratorium virtual dapat berupa media pembelajaran yang berisi simulasi praktikum menyerupai praktikum di laboratorium nyata namun dengan pengoperasian berbasis teknologi.

Pembelajaran laboratorium dengan pemanfaatan teknologi yang tepat adalah dengan laboratorium virtual. Pemilihan media laboratorium ini adalah karena laboratorium virtual dapat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi siswa sekolah, baik itu sekolah umum dan kejuruan. Artinya aspek kognitif, psikomotor, dan karakter siswa dapat berkembang dengan pembelajaran laboratorium virtual ini [5]. Selain itu pembelajaran virtual juga dapat meningkatkan motivasi siswa [6]. Pembelajaran virtual juga akan memanfaatkan strategi *blended learning*. Karena jika hanya menggunakan virtual saja dikhawatirkan tidak akan maksimal dalam pembelajaran fisika. Strategi *blended learning* yang diterapkan pada proses belajar mengajar dapat berpengaruh positif dalam proses pembelajaran [7]. Siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan psikomotorik untuk praktek mereka.

Laboratorium virtual merupakan serangkaian alat-alat laboratorium yang berbentuk perangkat lunak komputer berbasis multimedia interaktif, yang dioperasikan dengan komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium secara nyata [8]. Penggambaran yang dimaksud berupa alat dan bahan yang digunakan di laboratorium nyata dibuat sedemikian rupa dengan perangkat lunak (*software*) tertentu sehingga dapat diamati menyerupai kegiatan praktikum di laboratorium nyata. Mahasiswa dapat berinteraksi untuk melakukan berbagai simulasi praktikum baik biologi, fisika atau kimia meskipun mahasiswa tidak bersentuhan langsung dengan peralatan

dan bahan-bahan misalnya bahan kimia. Walaupun laboratorium virtual tidak secara nyata mengajak mahasiswa melakukan langkah-langkah praktikum, tetapi laboratorium virtual sebagai media pembelajaran dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai langkah-langkah dan hasil dari suatu pengujian [6] [9]. Terdapat beberapa kriteria dalam pembelajaran virtual, antara lain:

- a) Pembelajaran virtual harus dibentuk sedemikian rupa agar memberikan ruang informasi yang luas untuk mahasiswa.
- b) Mahasiswa aktif dan menjadi pelaku dalam pembelajaran virtual.
- c) Pembelajaran virtual tidak hanya dilakukan jarak jauh (*video conferencing*), bisa juga dengan tatap muka di dalam kelas.
- d) Pembelajaran virtual dapat memadukan teknologi dengan beberapa pendekatan pedagogi yang berbeda agar menjadikan proses pembelajaran lebih bervariasi.

Laboratorium virtual dapat menjadikan proses pembelajaran yang lebih menarik, lebih interaktif, efisiensi dalam waktu mengajar, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Manfaat dari pembelajaran menggunakan laboratorium virtual, yaitu:

- a) Laboratorium virtual merupakan media dan alat bantu yang cukup efektif bagi para peneliti, mahasiswa maupun dosen atau guru untuk memahami metode ilmiah dengan melakukan praktikum.
- b) Laboratorium virtual dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan sekaligus pengantar praktikum yang sebenarnya atau untuk mendemonstrasikan topik fisika/IPA yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, kompleks dan rumit.
- c) Laboratorium virtual dapat mengantisipasi terhadap laboratorium nyata yang belum siap dan belum memadai.
- d) Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh keterampilan ekstra yang diinginkan melalui laboratorium virtual.
- e) Laboratorium virtual dapat mengurangi keterbatasan waktu. Maksudnya mahasiswa memiliki waktu yang cukup agar paham dalam praktikum meskipun pembelajaran di kelas telah selesai.

- f) Laboratorium virtual dapat mengurangi hambatan secara geografis, jika terdapat mahasiswa yang berlokasi jauh dari pusat pembelajaran.
- g) Laboratorium virtual dapat mengurangi masalah ekonomis. Hal ini seperti tidak membutuhkan bangunan laboratorium, alat-alat dan bahan- bahan seperti pada laboratorium konvensional. Meskipun laboratorium konvensional tetap dibutuhkan dan tidak menggantikannya.
- h) Laboratorium virtual dapat meningkatkan kualitas praktikum. Hal ini karena memungkinkan kegiatan praktikum dapat diulang untuk memperjelas keraguan dalam pengukuran di laboratorium.
- i) Laboratorium virtual dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran fisika/IPA, karena mahasiswa akan semakin lama menghabiskan waktunya dalam laboratorium virtual tersebut berulang-ulang.
- j) Laboratorium virtual dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan saat praktikum, Hal ini karena mahasiswa tidak berinteraksi dengan alat dan bahan (kimia) yang nyata.

Selain itu menurut seorang ahli bernama Robeck [10], pembelajaran menggunakan media virtual memberikan banyak manfaat untuk pelajar karena dapat meningkatkan aktivitas pelajar. Mahasiswa dapat mengaplikasikan keterampilan proses sains, menemukan, berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah dan pemahaman konsep. Laboratorium virtual memiliki peranan yang semakin penting yaitu efektivitas praktikum menggunakan laboratorium virtual hampir sama dengan efektivitas praktikum di laboratorium nyata dan menyimpulkan peran penting media laboratorium virtual dalam mengembangkan prestasi akademik, memberikan pemahaman konsep ilmiah dan memodifikasi kesalahpahaman konsep [11].

Kesimpulan

Laboratorium virtual dapat menjadi media atau alat untuk membantu dosen atau guru maupun instruktur dalam melaksanakan

praktikum di sekolah. Dengan pemanfaatan media ini, praktikum yang berbasis virtual dapat dilakukan. Namun, pemanfaatan laboratorium virtual ini tidak ditujukan untuk menggantikan peran dari laboratorium nyata atau konvensional, melainkan laboratorium virtual digunakan sebagai media atau alat dalam pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran laboratorium. Laboratorium virtual dapat memberikan alternatif yang efektif dan efisien dalam mengantisipasi kesiapan laboratorium konvensional dari sarana dan prasarana yang belum cukup memadai. Dengan melakukan pengamatan walaupun dalam bentuk virtual, laboratorium virtual ini dapat memberikan pemahaman konsep kepada mahasiswa ke arah yang realitas dan menarik. Mahasiswa juga dapat lebih memahami pengetahuan dan konsep-konsep fisika/IPA yang bersifat abstrak agar menjadi lebih mudah dipahami dan dapat melakukan praktikum dengan laboratorium virtual tersebut seolah seperti nyata. Dapat disimpulkan bahwa laboratorium virtual ini merupakan fasilitas laboratorium yang dapat dirancang dalam bentuk *software* berisikan praktikum pada topik bahasan tertentu yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan teknologi secara virtual atau online [9].

Referensi

- [1] Gunawan, A. Harjono, and H. Sahidu, "Pengembangan Model Laboratorium Virtual Berorientasi Pada Kemampuan Pemecahan Masalah Bagi Calon Guru Fisika," *Pros. Semin. Nas. Fis. dan Pendidik. Fis.*, vol. 6, no. 1, pp. 232–237, 2015, [Online]. Available: jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/fisika/article/view/7782%0A.
- [2] Mustaji, *Pemanfaatan Laboratorium dalam Pembelajaran dengan Pendekatan Sains*. Jakarta: UNIMAL Press, 2009.
- [3] F. Sinardi, *Menguji Kualitas Barang: Suatu Alternatif Model Pembelajaran Sains dalam Pendidikan Sains yang Humanistik*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- [4] B. Aryani, P. R., Akhlis, I., & Subali, "Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbentuk Augmented Reality pada Peserta Didik untuk Meningkatkan Minat dan Pemahaman Konsep IPA," *Unnes Phys. Educ. J.*, vol. 8, no. 2, pp. 91–101, 2019.

- [5] Rina Mirdayanti and Murni, "Kajian Penggunaan Laboratorium Virtual Berbasis Simulasi Sebagai Upaya Mengatasi Ketidaksiediaan Laboratorium," *Visipena J.*, vol. 8, no. 2, pp. 323–330, 2017, doi: 10.46244/visipena.v8i2.415.
- [6] Sutrisno, *Kreatif Mengembangkan Aktivitas Pembelajaran Berbasis TIK*. Jakarta: GP Press, 2012.
- [7] K. L. Donohoe, N. S. Yunker, L. Morgan, Y. Min, and P. H. Patel, "An active-learning laboratory on respiratory devices," *Curr. Pharm. Teach. Learn.*, vol. 7, no. 4, pp. 434–442, 2015, doi: 10.1016/j.cptl.2015.04.014.
- [8] E. Imron, *Merancang Media Virtual Berbasis Flash*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- [9] Sutrisno, *Pengantar Pembelajaran Inovatif*. Jakarta: GP Press, 2011.
- [10] Isjoni and Ismail, *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafin Persada, 2008.
- [11] Z. Tatli and A. Ayas, "Effect of a Virtual Chemistry Laboratory on Students' Achievement," *Educ. Technol. Soc.*, vol. 16, no. 1, pp. 159–170, 2013.

Kepala Sekolah dan Pengembangan Profesional Guru: Kontradiksi antara Persepsi dan Praktik

Umiaati Jawas¹

Pengantar

Studi empiris telah menunjukkan bukti-bukti bahwa budaya profesional guru merupakan salah satu faktor yang ditemukan berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme guru harus menjadi upaya yang ditekankan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Studi ini dirancang dalam studi survei melalui penyebaran kuesioner kepada 57 kepala sekolah di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Malang untuk mengukur persepsi kepala sekolah tentang tingkat kepentingan praktik pengembangan profesional guru dan frekuensi mereka dalam memfasilitasi praktik tersebut. *Output* dari uji korelasi *Spearman's rho* menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara persepsi tingkat kepentingan dan frekuensi praktik dalam memfasilitasi pengembangan profesional guru. Artinya tingkat kepentingan yang diberikan pada praktik ini tidak didukung oleh frekuensi yang setara dari praktik tersebut. Kontradiksi ini mengandung makna bahwa dalam pandangan kepala sekolah, pengembangan profesional guru masih dianggap lebih sebagai konsep daripada upaya nyata dalam peningkatan hasil belajar siswa melalui peningkatan profesionalisme guru.

Pembahasan

Peran guru tidak pernah berhenti menjadi sebuah tantangan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pembelajaran siswa yang akuntabel dan berkualitas. Dengan banyak perubahan dalam demografi masyarakat dan kemajuan teknologi sekarang ini,

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

para guru dihadapkan pada tugas-tugas yang menjadi lebih sulit dari sebelumnya dalam mendidik siswa sambil tetap mengikuti perubahan tersebut. Padahal, prestasi belajar siswa menjadi salah satu tolak ukur kinerja guru. Kecenderungan tersebut cukup dapat dimengerti karena guru memiliki interaksi yang paling langsung dan terus menerus dengan siswa, di samping kontrol substansial mereka atas apa yang diajarkan dan pembentukan iklim sekolah untuk pembelajaran. Oleh karena itu, secara praktis tersirat bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sudut pandang guru tentang pembelajaran yang berkualitas akan mengarah pada peningkatan prestasi siswa. Implikasi tersebut telah dibuktikan oleh berbagai studi empiris [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Pengembangan Profesional Guru

Pengembangan Profesional Guru (PPG) pada dasarnya adalah program yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajarannya. OECD [7] mendefinisikan PPG sebagai praktik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru dalam kegiatan mengajar. Literatur telah menunjukkan bahwa PPG mempromosikan pengetahuan, keterampilan, dan kinerja guru [8], [9], [10]; kemandirian guru [11]; kepuasan kerja [12]; iklim sekolah yang positif [11], [13]; dan pembelajaran siswa [1], [14]. Karenanya, banyak gerakan reformasi sekolah yang menganggap partisipasi guru dalam PPG sangat penting untuk mengubah keyakinan dan kebiasaan praktik guru, pembelajaran siswa, dan implementasi kebijakan pendidikan [15].

Studi empiris juga telah menunjukkan bahwa PPG yang berhasil adalah pengajaran yang mendasar, kolaboratif, dan mendukung, dan merekomendasikan cara-cara alternatif pembelajaran guru [9], [16], [17], [18], [19], [20]. Hasil-hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa PPG dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kompetensi guru, efikasi diri dan motivasi terkait pekerjaan [21], [22]. Selain itu, PPG yang berhasil juga

membantu guru memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran interaktif dengan anggota sekolah, yang secara berurutan meningkatkan pembelajaran siswa [6], [2], [4]. Dalam konteks ini, PPG akan melatih guru untuk menjadi pemrakarsa pengetahuan, praktisi yang reflektif, dan peneliti yang kompeten [23], [24].

Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Profesional Guru

Karena guru bekerja di bawah kewenangan kepala sekolah, kesempatan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan keprofesian akan subyektif terhadap pandangan kepala sekolah tentang PPG dan pentingnya kegiatan tersebut dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Studi empiris saat ini telah menunjukkan bahwa implementasi program PPG untuk praktik pengajaran cukup bermasalah dan seringkali memiliki keberhasilan yang terbatas terutama dalam periode yang ekstensif [9], [25]. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyematan PPG di organisasi sekolah sangat penting untuk memaksimalkan pencapaian dan keberlanjutannya [26], [27], [28]. Hasil-hasil penelitian telah menekankan relevansi kondisi tempat kerja untuk penerapan PPG yang berkelanjutan bergantung pada waktu yang memadai, sumber daya, dan budaya kolaboratif dan bagaimana hal ini diterapkan oleh kepala sekolah [26], [29]. Oleh karena itu, kepala sekolah memainkan peran yang penting dalam hal ini [30], [31].

Para ahli berpendapat bahwa peningkatan tingkat sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia (akses ke pengetahuan), sumber daya materi (uang dan waktu), dan sumber daya sosial (komunitas belajar) merupakan faktor penentu partisipasi guru dalam program PPG [32]. Kepala sekolah memainkan peran langsung dan tidak langsung dalam menyediakan sumber daya organisasi ini [33], [34], [35]. Selain itu, sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa PPG harus dijadikan sebagai salah satu tugas dalam pekerjaan sebagai guru dan harus dilaksanakan secara terus menerus dan intensif dan

tidak dilakukan secara singkat dan sporadis . Ini sekali lagi menyoroti peran penting kepala sekolah dalam mengkoordinasikan sumber daya organisasi untuk mendukung PPG. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengatur peluang untuk mengikuti PPG, menyediakan sumber daya yang sesuai, dan menetapkan prioritas untuk pembelajaran guru [2], [36], [37]. Kesimpulannya, dukungan yang berarti dari kepala sekolah sangat penting dalam mempromosikan pembelajaran guru melalui PPG.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa pengembangan profesional guru sangat menentukan keberhasilan kepala sekolah. Jika guru didorong dan didukung untuk menjadi profesional dalam pekerjaannya, maka akan berdampak besar tidak hanya pada kualitas pembelajaran di sekolah tetapi juga terhadap kompetensi kepemimpinan kepala sekolah. Teori tindakan implisit di balik PPG adalah bahwa jika kepala sekolah mendukung keterlibatan guru dalam pengalaman belajar berkualitas tinggi, maka guru akan meningkatkan kualitas praktik mengajar di kelas mereka, dan dengan demikian, meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan kesuksesan sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu, memfasilitasi pengembangan profesional bagi guru telah diakui sebagai salah satu karakteristik kepemimpinan yang efektif.

Hasil-hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah agen utama dalam keberhasilan dan keefektifan penerapan kondisi untuk budaya komunitas belajar [38], [39], [40], [41], [42]. Karenanya, kepala sekolah semakin bertanggung jawab untuk menciptakan peluang untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan profesional bagi para guru sebagai aspek kunci dari peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah [23]. Para ahli telah menunjukkan perlunya penelitian untuk memahami bagaimana kepala sekolah melibatkan guru dalam kesempatan belajar profesional yang bermakna. Artikel ini berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan dalam konteks lokal Indonesia; khususnya artikel ini memberikan gambaran tentang persepsi kepala sekolah di Sekolah Menengah Atas

di Kabupaten Malang tentang tingkat kepentingan PPG dan seberapa sering mereka memfasilitasi para guru di sekolahnya untuk mengikuti program-program PPG.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dalam penelitian survei kuantitatif yang berfokus pada pola, keteraturan, sebab dan akibat [43]. Hal ini didorong oleh pentingnya generalisasi dan replikasi temuan [44], [45], [43]. Survei memberikan deskripsi kuantitatif atau numerik tentang tren, sikap, pendapat, keyakinan, bakat, kemampuan, atau pengetahuan dari suatu populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut [44], [43]. Penelitian ini menggunakan survei kuesioner yang bersifat lintas bagian (*cross sectional*) yang disebarkan kepada kepala Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Malang. Survei yang bersifat lintas bagian ini mengumpulkan data pada suatu titik waktu dari populasi sampel yang telah ditentukan sebelumnya [46], [43].

Item kuesioner dibangun dalam pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup memungkinkan responden untuk memilih tanggapannya dari sejumlah pilihan yang diberikan oleh peneliti sehingga mereka memberikan konsistensi tanggapan yang lebih besar [46]. Item kuesioner dikonstruksi dalam bentuk *checklist* dan soal tipe skala *Likert*. Pertanyaan dalam bentuk *checklist* untuk menanyakan karakteristik demografis responden. Pertanyaan tipe skala *Likert* untuk mengukur persepsi kepala sekolah terhadap tingkat kepentingan PPG dan frekuensi pelaksanaan PPG bagi guru yang difasilitasi oleh kepala sekolah. Untuk mengukur reliabilitas, kuesioner diujicobakan kepada kelompok independen kepala sekolah. Kuesioner disebarkan melalui Internet menggunakan *Qualtrics Survey Software*. Hasil Koefisien *Alpha Cronbach* untuk kuesioner penelitian ini adalah 0,948. Yang berarti kuesioner tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden penelitian.

Dari tujuh puluh empat (74) kuesioner yang dibagikan kepada kepala sekolah, lima puluh tujuh (57) kuesioner yang telah diisi dikembalikan (tingkat respons 77 persen).

Tabel 1 Karakteristik Demografis Responden

Kriteria		Persentase (%)
Tipe Sekolah	SMA Negeri	19
	MA Negeri	4
	SMK Negeri	7
	SMA Swasta	30
	MA Swasta	19
	SMK Swasta	21
Jenis Kelamin	Laki-laki	75
	Perempuan	25
Usia	40-49 tahun	39
	50-59 tahun	61
Gelar Kependidikan	Strata Satu (S1)	60
	Magister (S2)	40
Lama menjadi Kepala Sekolah	Kurang dari 5 tahun	42
	Lebih dari 5 tahun	58

Seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1, terdapat lebih banyak kepala sekolah dari sekolah menengah atas swasta yang berpartisipasi dalam survei (30 persen). Hal tersebut mencerminkan jumlah yang lebih banyak dari sekolah menengah atas tipe ini dibandingkan dengan tipe sekolah menengah atas yang lain di Kabupaten Malang. Data juga menunjukkan lebih banyak kepala sekolah laki-laki (75 persen) daripada perempuan (25 persen). Jumlah kepala sekolah yang berusia 50-59 tahun (61 persen) lebih banyak dibandingkan dengan kepala sekolah yang berusia 40-49 tahun (39 persen). Dalam hal gelar pendidikan, ada lebih banyak kepala sekolah dengan gelar sarjana Strata Satu (60 persen). Karena setiap periode jabatan berlangsung

selama lima tahun, 58 persen dari para kepala sekolah berada dalam periode kedua atau lebih dari masa jabatan mereka.

Output statistik deskriptif menunjukkan distribusi kumpulan data yang miring dan relatif datar. Perbedaan antara *mean* (M) juga terlalu kecil untuk menunjukkan perbedaan. Oleh karena itu, analisis median digunakan. Median diharapkan memberikan jawaban yang lebih khas dan akurat. Mempertimbangkan distribusi set data yang miring dan relatif datar, uji korelasi non-parametrik (Spearman's rho) digunakan untuk analisis korelasi.

Temuan Penelitian

Persepsi Pentingnya Praktik PPG

Tabel 2 menunjukkan *output* statistik tentang persepsi kepala sekolah tentang tingkat kepentingan praktik PPG. Tingkat kepentingan praktik PPG oleh kepala sekolah berkisar antara 5,00 (penting) sampai 6,00 (sangat penting). Secara umum bisa disimpulkan dari hasil *output* statistik ini bahwa kepala sekolah yang menjadi responden penelitian ini mempersepsikan praktik PPG sebagai sesuatu yang sangat penting.

Tabel 2 Persepsi Kepala Sekolah tentang Pentingnya Praktik PPG

Praktik	Output Statistik					
	N	Min	Max	Mean	Median	Std. Deviation
Praktik PPG	57	5.00	6.00	5.65	6.00	.48

Frekuensi Praktik Pelaksanaan PPG

Tabel 3 menunjukkan *output* statistik untuk frekuensi praktik pelaksanaan PPG yang difasilitasi oleh kepala sekolah bagi guru-guru di sekolah masing-masing. Frekuensi praktik berkisar dari 4,00 (terkadang) hingga 6,00 (selalu). Hasil *output* statistik tentang frekuensi praktik memberikan gambaran rentang yang cukup besar: 4 (terkadang) ke 6 (selalu).

Tabel 3 Frekuensi Praktik Pelaksanaan PPG

Praktik	Output Statistik					
	N	Min	Max	Mean	Median	Std. Deviation
Praktik PPG	57	4.00	6.00	5.49	6.00	.68

Korelasi antara Persepsi Kepala Sekolah tentang Pentingnya Praktik PPG dan Frekuensi Praktik Pelaksanaan PPG

Output dari uji korelasi *Spearman's rho* pada Tabel 4 menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara persepsi kepala sekolah tentang tingkat kepentingan praktik PPG dan frekuensi praktik pelaksanaan PPG yang difasilitasi oleh kepala sekolah bagi guru-guru di sekolah masing-masing. Artinya, tingkat kepentingan yang diberikan kepala sekolah terhadap Praktik PPG tidak didukung oleh frekuensi praktik yang setara dalam pelaksanaan PPG bagi guru yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Tabel 4 Korelasi antara Tingkat Kepentingan Praktik PPG dan Frekuensi Praktik Pelaksanaan PPG

	Praktik PPG
Correlation Coefficient	-.168
Sig. (2-tailed)	.212
N	57

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi antara persepsi kepala sekolah tentang tingkat kepentingan praktik PPG dengan frekuensi praktik pelaksanaan PPG yang difasilitasi oleh kepala sekolah bagi guru di sekolah masing-masing. Temuan ini cukup bertentangan dengan asumsi penelitian ini tentang linearitas antara persepsi tingkat kepentingan praktik pelaksanaan PPG dan frekuensi praktik pelaksanaan PPG. Ketika sebuah praktik tertentu dianggap penting, tentu akan diikuti dengan peningkatan frekuensi pelaksanaan

praktik tersebut. Namun, hasil uji korelasi di atas menunjukkan bahwa tingginya persepsi terhadap tingkat kepentingan praktik PPG tidak didukung oleh frekuensi yang setara dalam pelaksanaannya.

Diskusi

Hasil *output* statistik di atas khususnya uji korelasi yang menunjukkan kontradiksi antara tingkat kepentingan praktik PPG dengan frekuensi praktik pelaksanaan PPG yang difasilitasi oleh kepala sekolah dapat dianalisa dari beberapa faktor penyebab. Rendahnya frekuensi praktik PPG dapat disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keahlian kepala sekolah untuk melaksanakan praktik tersebut. Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 memberikan otonomi kepada kepala sekolah dalam mengelola sekolah, mereka telah terbiasa menjadi pelaksana kebijakan pemerintah yang bersifat terpusat [47], [48], [49]. Di masa lalu, sekolah-sekolah di Indonesia tidak diberikan kesempatan untuk menciptakan ide dan strategi perbaikan [50]. Kondisi ini membuat banyak kepala sekolah tidak terbiasa mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan yang diperlukan karena mereka terus mengandalkan arahan dari atasan mereka dari pusat [47], [48], [49]. Selain itu, kurangnya minat kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru telah mengurangi tanggung jawab kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran [51], [52], [53]. Budaya kondisi kerja seperti ini sangat mungkin menjadi penyebab kontradiksi antara persepsi kepala sekolah tentang pentingnya praktik pelaksanaan PPG dengan frekuensi praktik pelaksanaan PPG yang difasilitasi kepala sekolah bagi guru di sekolah masing-masing.

Hubungan penting antara kepemimpinan kepala sekolah dan pengembangan profesional guru telah diakui dalam studi empiris yang tak terhitung banyaknya. Kesimpulannya menunjukkan manfaat timbal balik untuk hubungan tersebut. Pimpinan sekolah yang berhasil adalah mereka yang secara konsisten mendukung perbaikan di sekolahnya dan membekali gurunya dengan kualitas yang dibutuhkan agar perbaikan tersebut terjadi. Etos kerja guru telah terbukti sangat

dipengaruhi oleh bagaimana kepala sekolah memimpin dan menekankan pada pengajaran sekolah. Gagasan ini menyebabkan munculnya kepemimpinan instruksional dalam paradigma kepemimpinan sekolah.

Di bawah gerakan profesionalisasi guru, model kepemimpinan instruksional, ini lebih berfokus pada pengaruh tidak langsung kepala sekolah pada pertumbuhan guru dengan melibatkan guru dalam pertumbuhan profesional mereka sendiri dan mempromosikan kepemimpinan guru. Salah satu aspek penting dalam memahami bagaimana teori komunitas belajar diberlakukan di sekolah adalah memperhatikan peran kepala sekolah dalam menetapkan kondisi dan iklim untuk menumbuhkan budaya komunitas belajar. Penelitian internasional cenderung mengabaikan hubungan antara pemimpin sekolah dan guru yang mengikuti praktik PPG [54].

Konsep kepemimpinan instruksional dikembangkan melalui gerakan sekolah yang efektif tahun 1980-an dan diasumsikan kepala sekolah sangat penting untuk mempromosikan pengetahuan guru tentang pembelajaran siswa [55], [34]. Konseptualisasi kepemimpinan instruksional telah berkembang dari langsung, perspektif otoriter menjadi tidak langsung, perspektif kolaboratif. Rekonseptualisasi ini selaras dengan gerakan untuk memprofesionalkan pengajaran.

Diakui secara luas bahwa kepala sekolah memainkan peran penting dalam mengatur dan mendukung pengembangan profesional guru (misalnya [56], [38], [57], [58], [59]). Memang pengembangan komunitas belajar profesional [60], atau budaya belajar [61], [72], [73] tampaknya membutuhkan kepemimpinan proaktif dari kepala sekolah [74], [75], [57], [76], [77]. Dengan demikian, para peneliti yang telah menyelidiki bagaimana kondisi tempat kerja mempengaruhi keterlibatan guru dalam pembelajaran profesional produktif menyoroti kontribusi kepemimpinan sekolah [75], [92], [78], [79], [77], [80], [59].

Kesimpulan ini kembali menunjukkan sentralitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai katalisator untuk pembelajaran profesional di sekolah [81]. Beberapa praktik kepemimpinan yang bersifat relasional berkontribusi pada pengembangan norma yang mendukung pembelajaran guru [82], [75], [83], [84], [85], [77]. Selain itu, praktik kepemimpinan yang bersifat instrumental ditujukan untuk

mengembangkan sistem dan proses yang memberikan dukungan nyata untuk pembelajaran guru [61], [57], [78], [79], [72], [80], [73]. Hasil penelitian telah menemukan bahwa pernyataan ini juga berlaku di sekolah-sekolah Asia Timur di mana aturan hierarki dan guru biasanya lebih enggan untuk keluar dari peran yang ditetapkan secara formal [61], [79], [64], [83], [72], [80], [66].

Selain itu, selama 30 tahun terakhir, pernyataan tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pembelajaran guru (misalnya [82], [57], [84]) telah berpindah dari asumsi normatif ke kesimpulan yang didukung secara empiris. Kemanjuran hubungan konseptual ini, misalnya, disorot dalam meta-analisis studi tentang efek kepemimpinan utama. Robinson, Lloyd, dan Rowe [81] menyimpulkan bahwa partisipasi dan dukungan kepala sekolah untuk pengembangan profesional guru adalah satu-satunya cara yang paling berpengaruh di mana kepemimpinan sekolah mempengaruhi pembelajaran siswa. Temuan penting ini mendorong para peneliti untuk mencari pemahaman yang lebih halus tentang bagaimana para pemimpin menciptakan kondisi seluruh sekolah yang mendorong pembelajaran produktif guru (misalnya [75], [92], [78], [79], [64], [77], [80], [73]).

Dalam literatur, pengertian budaya kondisi kerja sering dikaitkan dengan membangun budaya sekolah bersama, bertujuan untuk visi bersama, budaya kolaborasi, iklim pembelajaran profesional dan pengambilan keputusan kolektif [65], [66]. Badan penelitian yang luas telah menyarankan pentingnya sumber daya dan dukungan untuk guru agar kegiatan PPG yang diikuti berhasil [32]. Kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk mengatur peluang praktik PPG bagi guru, menyediakan sumber daya yang sesuai, dan menetapkan prioritas untuk pembelajaran guru [2], [36], [37]. Namun, bukti empiris masih terbatas mengenai apakah kepemimpinan kepala sekolah benar-benar meningkatkan partisipasi guru dalam praktik PPG. Selain itu, efek kepemimpinan dapat berbeda tergantung pada bagaimana praktik PPG dijalankan.

Beberapa studi menunjuk pada proses pengambilan keputusan di sekolah yang menggarisbawahi nilai pengambilan keputusan kolektif. Menurut Imants dan van Veen [67], memanfaatkan keahlian yang diperoleh guru selama PPG dalam proses pengambilan keputusan sekolah dapat menyebabkan

keterlibatan yang lebih besar. Selain itu, PPG terbukti lebih efektif ketika guru dari sekolah atau tim yang sama berpartisipasi bersama dalam praktik PPG [68], [28]. van Veen dkk [28] menyimpulkan bahwa PPG harus menargetkan seluruh tim sekolah dan bukan guru individu. Praktik PPG diberikan kepada semua guru dimana semua harus berpartisipasi. Sistem inklusivitas ini memungkinkan tiga jenis komunikasi: interaksi, umpan balik dan diskusi antara rekan kerja [28]. Selain itu, PPG di mana seluruh guru berpartisipasi dapat mengarah pada tanggung jawab bersama: guru merasa bahwa mereka bertanggung jawab bersama untuk proses pembelajaran di sekolah [69], [70].

Namun, generasi terbaru dari penelitian menekankan bahwa lokakarya dalam jabatan dan program gelar mewakili visi yang sempit yang tidak perlu dari praktik pembelajaran profesional untuk guru [21]. Para peneliti malah mengusulkan bahwa pembelajaran guru yang signifikan terjadi dalam konteks pekerjaan yang tertanam, kolaboratif, praktik berbasis sekolah [71], [86], [29], [87], [88]. Dimensi sosial dari pembelajaran guru ini [89] mengharuskan untuk membentuk ulang model-model norma yang berlaku di sekolah dari yang bersifat privasi, individualisme, dan tradisi untuk menjadi yang bersifat kolegialitas, kolaborasi, dan eksperimentasi [82], [85], [76], [84], [73].

Sayangnya, karena 1) kurangnya kesamaan visi tentang apa yang dimaksud dengan pengajaran yang sangat baik, 2) data yang berguna terbatas tentang kebutuhan pengembangan guru; dan 3) kegagalan untuk memprioritaskan peran dan keterampilan para pemimpin dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar guru dan siswa, banyak sekolah tidak fokus pada mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilaksanakan praktik PPG. Kurangnya visi bersama ini meluas dari pengajaran dalam-jabatan hingga persyaratan untuk masuk ke dalam profesi dan pelatihan guru pra-jabatan. Negara seharusnya memiliki berbagai standar pengajaran profesional yang dimaksudkan untuk memberikan panduan seputar elemen-elemen yang mendasari pengajaran berkualitas tinggi, penilaian kompetensi guru yang bervariasi yang digunakan untuk menentukan masuk ke dalam profesi, dan berbagai kriteria dan proses persetujuan program persiapan pendidik.

Data berguna yang terbatas tentang kebutuhan pembangunan juga menjadi penghalang untuk terlibat secara bermakna dalam analisis berbasis kebutuhan untuk praktik PPG. Di masa lalu, alat dan metode yang digunakan sekolah untuk mengamati dan mengevaluasi praktik mengajar guru menghasilkan sedikit informasi yang berharga tentang kebutuhan praktik PPG masing-masing guru. Oleh karena itu dibutuhkan pemberlakuan lebih ketat sistem evaluasi guru yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan memberikan kejelasan yang lebih spesifik seputar praktik pengajaran yang baik dan penilaian yang lebih baik tentang di mana letak kebutuhan guru untuk mengikuti praktik-praktik PPG.

Namun, meskipun sistem evaluasi guru dalam masa kerja baru memiliki potensi untuk memberikan data yang lebih baik kepada pembuat keputusan — dari data observasi kelas hingga data siswa, seperti portofolio, penilaian formatif, dan survei — informasi ini belum tersebar luas untuk digunakan untuk menginformasikan diperlukan praktik PPG bagi guru. Hal ini disebabkan salah satunya karena sistem evaluasi baru pada awalnya dirancang dan dioperasionalkan untuk akuntabilitas guru lebih dari pada dukungan dan karenanya telah difokuskan pada penilaian kinerja secara keseluruhan daripada menunjukkan kinerja pengetahuan atau praktik tertentu. Juga disebabkan karena sistem ini telah gagal untuk mengidentifikasi banyak variasi dalam penilaian keseluruhan, beberapa mungkin kesulitan untuk membedakan kinerja pada elemen individu dari praktik mengajar yang dilakukan guru.

Alasan lain mengapa data tidak dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan pengajaran adalah karena kepala sekolah belum menjadikan pengembangan guru sebagai fokus utama dari perannya sebagai pemimpin sekolah, meskipun peran kepala sekolah semakin penting untuk membantu memastikan keberhasilan siswa. Pertama, pada tingkat dalam jabatan, pimpinan sekolah masih sering dievaluasi terutama pada pengelolaan operasional sekolah sehari-hari mereka, bukan pada kemampuan mereka untuk mengevaluasi guru dan membantu mereka berkembang. Dan banyak pemimpin sekolah tidak diperlengkapi dengan baik untuk mengidentifikasi kebutuhan individu guru dan sekolah, apalagi memasangkannya dengan peluang pengembangan berkualitas tinggi, tanpa pengembangan substansial

sendiri. Sebagian besar kepala sekolah tumbuh dalam sistem yang tidak ada visi bersama, berbasis bukti atau bahasa seputar pengajaran yang sangat baik. Karenanya, tanpa pelatihan dan dukungan, kebanyakan pemimpin hanya dapat berspekulasi tentang seperti apa proses belajar mengajar yang berkualitas tinggi.

Tetapi mengapa kepala sekolah tidak dilatih untuk mengidentifikasi praktik PPG berbasis kebutuhan sebagai bagian dari proses sebagai pemimpin sekolah? Pertama, negara umumnya menetapkan standar rendah untuk menjadi kepala sekolah yang tidak memerlukan demonstrasi kompetensi sebagai pemimpin instruksional bagi guru. Menganalisis data untuk menentukan kebutuhan atau merekomendasikan praktik pengembangan berdasarkan data kebutuhan di seluruh sekolah, tingkat kelas, dan mata pelajaran tidak pernah menjadi persyaratan. Selain itu, proses perekrutan kepala sekolah tidak berfokus pada kemampuan pimpinan sekolah untuk mendukung pengembangan guru. Selain itu, pemerintah mengadopsi kebijakan gaji yang terutama didasarkan pada masa kerja dan kredensial pasca pendidikan strata satu. Persyaratan gaji mungkin tampak tidak terkait dengan keterampilan pemimpin, tetapi fokus pada gelar tambahan untuk mendapatkan peningkatan kompensasi menyebabkan banyak kepala sekolah hanya mencari bayaran untuk mendaftar di program gelar yang bersifat administratif. Hal ini mengakibatkan sebagian besar kepala sekolah yang terdaftar di program administratif tidak peduli apakah pelatihan yang mereka terima cukup mempersiapkan mereka untuk menjadi kepala sekolah yang kompeten karena mereka tidak berniat untuk mengejar peran itu. Tidak mengherankan, banyak dari program ini gagal mempersiapkan pemimpin sekolah untuk menilai sekolah secara keseluruhan dan mengidentifikasi kebutuhan individu guru, menyampaikan umpan balik yang berarti, atau menyarankan praktik PPG yang selaras.

Kesimpulan

Frekuensi praktik dalam memfasilitasi kegiatan PPG dapat menunjukkan kepentingan implisit yang diberikan oleh kepala sekolah yang dapat mempengaruhi bagaimana guru memandang pengaruh praktik tersebut terhadap kinerja mengajar mereka. Frekuensi praktik

dalam memfasilitasi kegiatan PPG secara tidak sadar membangun budaya di dalam sekolah tentang praktik PPG ini. Selain itu, frekuensi praktik menunjukkan bahwa perilaku kepala sekolah dapat secara signifikan menentukan apa yang menurut guru berpengaruh. Studi empiris mengungkapkan bahwa perilaku kepala sekolah mempengaruhi perilaku guru dan bagaimana guru melaksanakan tugasnya [90], [91]. Oleh karena itu, penting bagi kepala sekolah untuk mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap kinerja guru dan konsekuensi tindakan tersebut terhadap kemajuan peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah mereka yang berujung pada peningkatan hasil belajar siswa.

Referensi

- [1] Jacob, R., Hill, H., & Corey, D. "The impact of a professional development program on teachers' mathematical knowledge for teaching, instruction, and student achievement." *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 10(2), 379–407. 2017.
- [2] McLaughlin, M. W., & Talbert, J. E. *Building school-based teacher learning communities: Professional strategies to improve student achievement* (Vol. 45). New York: Teachers College Press. 2006.
- [3] Panero, N. S., & Talbert, J. E. *Strategic inquiry: Starting small for big results in education*. Cambridge, MA: Harvard Education Press. 2013.
- [4] Stoll, L., & Louis, K. S. *Professional learning communities: Divergence, depth and dilemmas*. Maidenhead: Open University Press/McGraw Hill. 2007.
- [5] Villegas-Reimers, E. *Teacher professional development: An international review of the literature*. Paris: UNESCO: International Institute for Educational Planning. 2003.
- [6] Hord, S. M. *Professional learning communities: Communities of continuous inquiry and improvement*. Austin, TX: South-west Educational Development Laboratory. 1997.
- [7] OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development). *TALIS 2013 results: An international perspective on teaching and learning*. Paris: OECD Publishing. 2014.
- [8] Babinski, L. M., Amendum, S. J., Knotek, S. E., Sánchez, M., & Malone, P. "Improving young english learners' language and

- literacy skills through teacher professional development: A randomized controlled trial." *American Educational Research Journal*, 55(1), 117–143. 2018.
- [9] Desimone, L. M. "Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures." *Educational Researcher*, 38, 181–200. 2009.
- [10] Garet, M. S., Porter, C. A., Desimone, L., Birman, F. B., & Yoon, K.-S. "What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers." *American Educational Research Journal*, 38(4), 915–945. 2001.
- [11] Butler, D. L., Schnellert, L., & MacNeil, K. "Collaborative inquiry and distributed agency in educational change: A case study of a multi-level community of inquiry." *Journal of Educational Change*, 16(1), 1–26. 2015.
- [12] Ma, X., & MacMillan, R. B. "Influences of workplace conditions on teachers' job satisfaction." *The Journal of Educational Research*, 93(1), 39–47. 1999.
- [13] Hargreaves, A. Sustainable professional learning communities. In L. Stoll & K. S. Louis (Eds.), *Professional learning communities: Divergence, depth and dilemmas* (pp. 181–195). New York: Open University Press. 2007.
- [14] Panero, N. S., & Talbert, J. E. *Strategic inquiry: Starting small for big results in education*. Cambridge, MA: Harvard Education Press. 2013.
- [15] Villegas-Reimers, E. *Teacher professional development: An international review of the literature*. Paris: UNESCO: International Institute for Educational Planning. 2003.
- [16] Desimone, L. M., & Pak, K. "Instructional coaching as high-quality professional development." *Theory Into Practice*, 56(1), 3–12. 2017.
- [17] Gersten, R., Dimino, J., Jayanthi, M., Kim, J. S., & Santoro, L. E. "Teacher study group: Impact of the professional development model on reading instruction and student outcomes in first grade classrooms." *American Educational Research Journal*, 47(3), 694–739. 2010.
- [18] Guskey, T. R. "Professional development and teacher change." *Teachers and Teaching Theory and Practice*, 8(3), 381–391. 2002.

- [19] Wei, R. C., Darling-Hammond, L., Andree, A., Richardson, N., & Orphanos, S. *Professional learning in the learning profession*. Dallas, TX: National Staff Development Council. 2009.
- [20] Zepeda, S. J. *Job-embedded professional development: Support, collaboration, and learning in schools*. New York: Routledge. 2015.
- [21] Borko, H. "Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain." *Educational Researcher* 33 (8): 3–15. 2004.
- [22] Gilles, C., Davis, B., & McGlamery, S. "Induction programs that work." *Phi Delta Kappan*, 91(2), 42–47. 2009.
- [23] Hargreaves, A., & Fullan, M. *Professional capital: Transforming teaching in every school*. New York: Teachers College Press. 2012.
- [24] Horn, I. S., & Little, J. W. "Attending to problems of practice: Routines and resources for professional learning in teachers' workplace interactions." *American Educational Research Journal*, 47(1), 181–217. 2017.
- [25] Timperley, H., & Alton-Lee, A. "Reframing teacher professional learning. An alternative policy approach to strengthening valued outcomes for diverse learners." *Review of Research in Education*, 32, 328–369. 2008. <https://doi.org/10.3102/0091732107308968>.
- [26] Cordingley, P. "The contribution of research to teachers' professional learning and development." *Oxford Review of Education*, 41(2), 234–252. 2015.
- [27] Snoek, M., Enthoven, M., Kessels, J. W. M., & Volman, M. "Increasing the impact of a master's programme on teacher leadership and school development by means of boundary crossing." *International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice*, 20(1), 26–56. 2015. <https://doi.org/10.1080/13603124.2015.1025855>
- [28] van Veen, K., Zwart, R., & Meirink, J. "What makes teacher professional development effective? A literature review." In M. Kooy & K. van Veen (Eds.), *Teacher learning that matters: International perspectives* (pp. 3–21). New York, NY: Routledge. 2012.
- [29] Opfer, V. D., and D. Pedder. "Conceptualizing Teacher Professional Learning." *Review of Educational Research* 81 (3): 376–407. 2011.

- [30] Gaikhorst, L., Beishuizen, J. J., Korstjens, I. M., & Volman, M. L. L. "Induction of beginning teachers in urban environments: An exploration of the support structure and culture for beginning teachers at primary schools needed to improve retention of primary school teachers." *Teaching and Teacher Education*, 42, 23–33. 2014. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.04.006>
- [31] James, M., & McCormick, J. "Teachers learning how to learn." *Teaching and Teacher Education*, 25, 973–982. 2009. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.023>
- [32] Akiba, M., Wang, Z. E., & Liang, G. "Organizational resources for professional development: A statewide longitudinal survey of middle school mathematics teachers." *Journal of School Leadership*, 25(March), 252–285. 2015.
- [33] Coburn, C. E. "Collective sensemaking about reading: How teachers mediate reading policy in their professional communities." *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 23(2), 145–170. 2001.
- [34] Marks, H., & Printy, S. "Principal leadership and school performance: An integration of transformational and instructional leadership." *Educational Administration Quarterly*, 39(3)370-397. 2003.
- [35] Talbert, J. E., Mileva, L., Chen, P. R., Cor, M. K., & McLaughlin, M. *Developing school capacity for inquiry-based improvement: Progress, challenges, and resources*. Stanford University, CA: Center for Research on the Context of Teaching. Retrieved March 22, 2019, from <https://crce.ucati.on.stanford.edu/sites/default/files/nv-evaluation-report2010.pdf>. 2010.
- [36] Printy, S. M. "Leadership for teacher learning: A community of practice perspective." *Educational Administration Quarterly*, 44(2), 187–226. 2008.
- [37] Stein, M.K. and Nelson, B.S. "Leadership content knowledge". *Educational Evaluation and Policy Analysis*, Vol. 25 No. 4, pp. 423-448. 2003.
- [38] Fullan, M. *Leading in a culture of change*. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 2001.
- [39] Harris, A. *School Improvement: What's in it for schools?* London, UK: Routledge. 2002.

- [40] Lambert, L. *Building leadership capacity in schools*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 1998.
- [41] Mitchell, C., & Sackney, L. (Eds.) *Profound improvement: Building capacity for a learning community*. Lisse, Netherlands; Exton, PA: Swets & Zeitlinger. 2000.
- [42] Speck, M. *The principalship: Building a learning community*. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall. 1999.
- [43] Scott, D., & Morrison, M. *Key ideas in educational research*. London: Continuum International Publishing Group. 2007.
- [44] Creswell, J. W. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*, 3d edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 2008.
- [45] Lieber, E. "Mixing qualitative and quantitative methods: Insights into design and analysis issues." *Journal of Ethnographic & Qualitative Research* 3, 218-227. 2009.
- [46] Mertler, C., & Charles, C. *Introduction to educational research*, 6th edition. Boston: Pearson education, Inc. 2008.
- [47] Chan, S., & Sam, T. *Analisis SWOT kebijakan pendidikan era otonomi daerah (SWOT analysis of educational policy in the era of regional autonomy)*. Jakarta, Indonesia: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- [48] Irawan, A., Eriyanto, Djani, L., & Sunaryanto, A. *Mendagangkan sekolah: Studi kebijakan MBS di DKI Jakarta (Trading schools: Policy studies of School-Based Management in DKI Jakarta)*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch. 2004.
- [49] Surakhmad, W. "Implikasi manajemen pendidikan nasional dalam konteks otonomi daerah (The implications of national educational management in the context of regional autonomy)." Paper presented in Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan, Hotel Indonesia, 8-10 August 2002. 2002.
- [50] Silverius, S. *Otonomi dan desentralisasi pendidikan (Autonomy and education decentralization)*. In *Selintas pendidikan Indonesia di akhir 2002: 8 isu pendidikan (Brief review of Indonesian education at the end of 2002: 8 educational issues)*. Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan Nasional: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan. 2002.

- [51] Azra, A. *New paradigm of national education: Reconstruction and democratization (Paradigma baru pendidikan nasional: rekonstruksi dan demokratisasi)*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas. 2002.
- [52] Bjork, C. *Indonesian education: Teachers, schools and central bureaucracy*. New York: Routledge. 2005.
- [53] Tilaar, H. *Membenahi pendidikan nasional (Fixing national education)*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Rineka Cipta. 2009.
- [54] Hallinger, P., & Walker, A. "Leading learning in Asia: Emerging empirical insights from five societies." *Journal of Educational Administration*, 55(2), 130–146. 2017.
- [55] Marks, H. M., and K. S. Louis. "Does Teacher Empowerment Affect the Classroom? The implications of Teacher Empowerment for instructional Practice and Student Academic Performance." *Educational Evaluation and Policy Analysis* 19 (3): 245–275. 1997.
- [56] Cravens, X. C. "The Cross-Cultural Fit of the Learning-Centered Leadership Framework and Assessment for Chinese Principals." Unpublished doctoral dissertation, Vanderbilt University, Nashville, TN. 2008.
- [57] Leithwood, K. A. "The Principal's Role in Teacher Development." In *Teacher Development and Educational Change*, edited by M. Fullan and A. Hargreaves, 86–103. London: Falmer. 1992.
- [58] Newmann, F., B. King, and P. Youngs. "Professional Development that Addresses School Capacity: Lessons from Urban Elementary Schools." *American Journal of Education* 108 (4): 259–299. 2000.
- [59] Youngs, P., and M. B. King. "Principal Leadership for Professional Development to Build School Capacity." *Educational Administration Quarterly* 38 (5): 643–670. 2002.
- [60] Vescio, V., D. Ross, and A. Adams. "A Review of Research on the Impact of Professional Learning Communities on Teaching Practice and Student Learning." *Teaching and Teacher Education* 24: 80–91. 2008.
- [61] Hallinger, P., M. S. Lee, and J. Ko. "Exploring the Impact of School Principals on Teacher Professional Communities in Hong Kong." *Leadership and Policy in Schools* 13 (3): 229–259. 2014.
- [62] Qian, H., A. D. Walker, and X. Yang. "Building and Leading a Learning Culture among Teachers: A Case Study of a Shanghai

- Primary School.” *Educational Management Administration & Leadership* 45 (1): 101–122. 2016.
- [63] Thoonen, E. E., P. J. Slegers, F. J Oort, and T. T. Peetsma. “Building School-Wide Capacity for Improvement: The Role of Leadership, School Organizational Conditions, and Teacher Factors.” *School Effectiveness and School Improvement*, 23 (4): 441–460. 2012.
- [64] Clement, M., and R. Vandenberghe. “How School Leaders can Promote Teachers’ Professional Development. An Account from the Field.” *School Leadership and Management* 21 (1): 43–57. 2001.
- [65] Geijssel, F. P., P. J. Slegers, R. D. Stoel, and M. L. Krüger. “The Effect of Teacher Psychological and School Organizational and Leadership Factors on Teachers’ Professional Learning in Dutch Schools.” *The Elementary School Journal* 109 (4): 406–427. 2009.
- [66] Leithwood, K. A., and K. S. Louis. *Linking Leadership to Student Learning*. New York: John Wiley Sons. 2011.
- [67] Slegers, P., E. Thoonen, F. J. Oort, and T. Peetsma. “Changing Classroom Practices: The Role of School-wide Capacity for Sustainable Improvement.” *Journal of Educational Administration* 52 (5): 617–652. 2014.
- [68] Li, L., P. Hallinger, and J. Ko. “Modeling the Effects of Principal Leadership and School Capacity on Teacher Professional Learning in Hong Kong Primary Schools.” *International Journal of Educational Management* 30 (1): 76–100. 2016.
- [69] Liu, S., and P. Hallinger. “Leading Teacher Learning in China: A Mixed Methods Study.” In *How School Leadership Influences Student Learning: The Four Paths*, edited by K. Leithwood, J. Sun and K. Pollock, 279–303. Dordrecht, The Netherlands: Springer. 2017.
- [70] Somprach, K., K. N. Tang, and P. Popoonsak. “The Relationship between School Leadership and Professional Learning Communities in Thai Basic Education Schools.” *Educational Research for Policy and Practice*, 2 (16): 157–175. 2016.
- [71] Robinson, V., Lloyd, C., & Rowe, K. “The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types.” *Educational Administration Quarterly*, 44(5)635-674. 2008.

- [72] Barth, R. S. "Principal-centered Professional Development." Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL. 1985.
- [73] Qian, H., and A. D. Walker. "How Principals Promote and Understand Teacher Development Under Curriculum Reform in China." *Asia-Pacific Journal of Teacher Education* 41 (3): 304–315. 2013.
- [74] Saphier, J., and M. King. "Good Seeds Grow in Strong Cultures." *Educational Leadership* 42 (6): 67–74. 1985.
- [75] Saphier, J., M. King, and J. D'Auria. "Three Strands Form Strong School Leadership." *Journal of Staff Development* 27 (2): 51–57. 2006.
- [76] Wang, T. "School Leadership and Professional Learning Community: Case Study of two Senior High Schools in Northeast China." *Asia Pacific Journal of Education* 36 (2): 202–216. 2016.
- [77] Barth, R. S. *Improving Schools from Within: Teachers, Parents and Principals Can Make the Difference*, Jossey-Bass, San Francisco, CA. Blasé. 1990.
- [78] Liu, S., Hallinger, P. and Feng, D. "Supporting the professional learning of teachers in China: does principal leadership make a difference?", *Teaching and Teacher Education*, Vol. 59, pp. 79-91. 2016.
- [79] Admiraal, W., Kruijer, J., Lockhorst, D., Schenke, W., Sligte, H., Smit, B., Smit, W. "Affordances of teacher professional learning in secondary schools." *Studies in Continuing Education*, 38, 1–18. 2016. <https://doi.org/10.1080/0158037x.2015.1114469>
- [80] Little, J. W. *Professional community and professional development in the learning-centered school*. Arlington, VA: National Education Association. 2006.
- [81] Imants, J., & van Veen, K. "Teacher learning as workplace learning." *International Encyclopedia of Education*, 7, 569– 574. 2010. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-044894-7.00657-6>
- [82] Bubb, S., & Earley, P. "Induction rites and wrongs: The educational vandalism of new teachers' professional development." *Journal of in-service Education*, 23, 345–361. 2006. <https://doi.org/10.1080/13674580500479844>

- [83] Darling-Hammond, L., & Richardson, N. "Teacher learning: What matters?" *Educational Leadership*, 66(5), 46–53. 2009.
- [84] Little, J. W. "Norms of collegiality and experimentation: Workplace conditions of school success." *American Educational Research Journal*, 19, 325–340. 1982. <https://doi.org/10.3102/00028312019003325>
- [85] Kwakman, K. "Factors Affecting Teachers' Participation in Professional Learning Activities." *Teaching and Teacher Education* 19 (2): 149–170. 2003.
- [86] Little, J. W. "Professional Community and Professional Development in the Learning-Centered School." In *Teacher Learning that Matters: International Perspectives*, edited by M. Kooy and K. van Veen, 22–46. London: Routledge. 2012.
- [87] Timperley, H. *Realizing the Power of Professional Learning*. London: McGraw-Hill Education. 2011.
- [88] Webster-Wright, A. "Reframing Professional Development Through Understanding Authentic Professional Learning." *Review of Educational Research* 79 (2): 702–739. 2009.
- [89] Rosenholtz, S. J. *Teachers' Workplace: The Social Organization of Schools*. New York: Longman. 1989.
- [90] Hoy, W., & Miskel, C. (eds). *Educational leadership and reform*. Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing. 2005.
- [91] Opdenakker, M., & Van Damme, J. "Do school context, student composition and school leadership affect school practice and outcomes in secondary education?" *British Educational Research Journal*, 33(2)179-206. 2007.
- [92] Hallinger, P., P. Piyaman, P., and P. Viseshsiri. "Assessing the Effects of Learning-Centered Leadership on Teacher Professional Learning in Thailand." *Teaching and Teacher Education* 67: 464–476. 2017.

Pengembangan Instrumen Pengukuran Kepribadian Mahasiswa Calon Guru

Sudiyono ¹, Danang Aditya Nugraha ²

Pengantar

Mahasiswa calon guru adalah peserta belajar di perguruan tinggi yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi guru masa depan. Untuk itu kepada para mahasiswa tersebut diberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai pendidik dan pembelajar. Salah satu aspek yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang mahasiswa calon guru adalah kepribadian sebagai guru. Kepribadian bagi seorang calon guru menjadi penting karena semua tingkah laku manusia dilatarbelakangi motivasi [1], sedang motivasi itu sendiri merupakan salah satu unsur kepribadian. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni “*tut wuri handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso*” yang dikemukakan oleh [2] sesungguhnya menyiratkan pentingnya aspek kepribadian guru dalam implementasi pendidikan dan pembelajaran.

Borich [3] menyatakan bahwa guru yang efektif adalah pribadi-pribadi yang baik yang mampu menjalankan perannya sebagai model, serta merupakan warga masyarakat ideal yang sekaligus sebagai warga negara yang baik, orang tua yang baik, dan pekerja yang baik. Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, guru diharapkan dapat menjadi model dan teladan bagi murid-muridnya, sekaligus sebagai wakil orang tua dalam mendidik anak-anak di sekolah. Guru yang senantiasa diharapkan adalah pribadi yang jujur, pekerja keras, dermawan, bersahabat, baik budi, menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, disiplin tinggi, berwawasan luas, dan

^{1,2} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

komitmen dengan profesinya. Guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral.

Kepribadian (*personality*) berasal dari bahasa Latin *persona*, yang berarti topeng. Pada zaman Yunani kuno para aktor memakai topeng untuk menyembunyikan identitas mereka, dan juga untuk memerankan tokoh dalam drama. Definisi kepribadian menurut Allport adalah “organisasi dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik [4]. Sedang [5] mendefinisikan kepribadian sebagai “***consistent behavior patterns originating within the individual***” (kepribadian merupakan bentuk asli perilaku individu). [6] mengemukakan bahwa kepribadian mewakili sejumlah karakter setiap individu yang menyebabkan adanya bentuk-bentuk yang konsisten dari suatu perilaku. Menurut [7] kepribadian juga dapat diartikan sebagai segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsang baik yang datang dari dalam dirinya maupun lingkungannya, sehingga corak dan cara kebiasaannya itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas untuk manusia itu

Menurut Suyanto dan D. Hisyam [8], guru harus dinamis dan kreatif dalam mencari dan memanfaatkan sumber-sumber informasi, karena guru tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang paling *well informed* terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang. Kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru akan berkaitan dengan perannya sebagai pendidik dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Menurut Zakiah Darajat dalam [9] kepribadian seorang guru itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya

terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).

William White dalam [10] menjelaskan bahwa,
“The personality of the teacher is the most important factor in a successful teacher. Teachers don’t need to be extremely bright and highly informed individuals, but they need to be critically thinkers about learning. They need to be caring and concerned as opposed to aloof and book centered, they need to be business-like and orderly as opposed it being slipshod and careless; and they need to be enthusiastic, surgent, and full of hope as opposed to being dull and boring”.

Fokus penulisan ini adalah pengembangan instrumen pengukuran kepribadian mahasiswa calon guru yang difokuskan pada tiga dimensi kepribadian yaitu (1) kematangan pribadi, (2) nilai (tata nilai), dan (3) kestabilan emosi. **Kematangan pribadi** menyiratkan kedewasaan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, yang diwarnai dengan rasa tanggung jawab, kejujuran, komitmen, dan kebersihan hati atau dimilikinya akhlak mulia. Kepribadian yang matang menurut Allport memiliki ciri-ciri, antara lain: (1) Ia memiliki kesadaran yang cukup luas tentang diri sendiri dan orang lain. Memiliki rasa kasih sayang yang sehat dan tegas. (2) Ada relasi yang hangat antara diri sendiri dengan orang lain. (3) Memiliki kecenderungan-kecenderungan seks dan kepuasan seks yang sehat dengan partner dan jenis kelamin lain yang dicintainya. (4) Memiliki kestabilan emosional. Orang yang matang kepribadiannya itu sifatnya tenang serta mampu menggunakan nalarnya secara jernih dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapinya. **Tata nilai.** Nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan cara pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik [11]. Nilai dapat diartikan sebagai suatu keyakinan yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan baik - buruk, benar – salah, layak – tidak layak, yang dijadikan pijakan seseorang dalam

melakukan tindakan atau memenuhi kebutuhannya. Di dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, makna nilai yang seharusnya menjadi bagian dari kompetensi guru ini dijabarkan ke dalam salah satu butir kompetensi kepribadian, yaitu “ bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia”. Butir tersebut dijelaskan sebagai: (a) Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender. (b) Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.

Kestabilan emosi menunjuk pada kemampuan untuk mengintegrasikan daya fisik, psikis, emosional, dan spiritualitas secara dinamis dan adaptif terhadap lingkungan sosial budayanya. Orang yang memiliki kestabilan emosi memiliki karakteristik mental yang cenderung mampu meredam dan mengatasi gejala emosional yang meluap-luap dengan menggunakan logika berpikirnya secara jernih.

Menurut [7]), orang yang mampu mengontrol emosi adalah individu yang merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustrasi, depresi, atau stress secara positif atau konstruktif dan tidak destruktif. Kestabilan emosi yang terhubung dengan pribadi *ekstrovert* menurut Eysenck memiliki karakteristik antara lain, kepemimpinan, riang, bersemangat, bersifat tenang, kesiapan mendengarkan, banyak bicara, ramah, dan suka bergaul [6][12]. Stabilitas emosi pada hakikatnya merupakan perwujudan karakteristik individu yang mantap dan memiliki integritas pribadi, bijaksana, stabil, dewasa, dan berwibawa.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengembangan instrumen pengukuran kepribadian guru antara lain: (1) [13] mengembangkan instrumen pengukuran kompetensi mahasiswa calon guru. yang dibatasi pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Khusus tentang kompetensi kepribadian, dijabarkan ke dalam empat indikator, yaitu: (a) kepemilikan kepribadian yang mantap, (b) kedewasaan, (c) akhlak

mulia, dan (d) kemandirian. (2) [14] mengembangkan instrumen kompetensi kepribadian Guru, dengan indikatornya (a) integritas, (b) Kepemimpinan (c) kestabilan emosi, (d). keterbukaan, dan (e) Kemampuan *interpersonal*,. (3) [15], dalam pengembangan instrumen evaluasi afektif untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah menengah umum, menghasilkan instrumen evaluasi afektif dengan indikatornya adalah: pengetahuan tentang: (a) nilai dan sikap, (b) kepemilikan nilai dan sikap, (c) kecenderungan berperilaku (inventori tentang sikap) yang mencerminkan tiga dimensi afektif yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. (4) [16], pada penelitiannya tentang hubungan antara karakteristik "Kepribadian yang Kreatif" dan motivasi ekstrinsik-intrinsik dengan kreativitas, memperoleh temuan adanya korelasi positif antara karakteristik "kepribadian kreatif" dan motivasi ekstrinsik-intrinsik dengan kreativitas. (5) Firat [17], dalam penelitiannya yang dilakukan di *high school* di Turki terhadap 181 subjek, menyimpulkan bahwa seorang guru tidak cukup hanya memiliki karakteristik pedagogik dan profesional untuk dapat menciptakan suasana kelas yang positif, penuh suasana belajar dan mengajar.

Pengembangan instrumen pengukuran kepribadian mahasiswa calon guru sangat penting dilakukan, karena saat ini pengembangan dan penguatan kepribadian mahasiswa calon guru belum dilakukan secara sistemik yang didasarkan pada data yang akurat. Ketiadaan data tentang kepribadian mahasiswa calon guru disebabkan oleh karena tidak dimilikinya instrumen pengukurannya yang baku. Instrumen pengukuran kepribadian ini dapat digunakan sebagai sarana pemetaan kepribadian mahasiswa keguruan, dengan demikian data atau informasi yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam pengembangan dan penguatan kepribadian mahasiswa calon guru. Pengembangan instrumen dilakukan melalui tahapan-tahapan: (1) Analisis Kebutuhan, dilakukan dengan: (a) wawancara, (b) kuesioner, dan (c) konsultasi ahli. (2) Melakukan analisis kritis

terhadap pemilihan aspek-aspek kepribadian hipotetik yang akan dijadikan landasan pengembangan instrumen. (3) Penentuan aspek kepribadian hipotetik, dilakukan dengan menentukan aspek kepribadian yang dianggap penting untuk dikembangkan, beserta indikatornya, (4) Mengembangkan rancangan instrumen. (5) Persiapan uji coba instrumen. (6) Uji coba instrumen pertama dilakukan terhadap sejumlah sampel terbatas sebanyak 50 mahasiswa. (7) Analisis dan revisi, hasil uji coba pertama, konsultasi ahli, dan revisi (8) Uji coba utama, dilakukan pada wilayah populasi dengan subjek 735 responden. Hasil uji coba ini kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen. (9) Produk akhir.

Pembahasan

Langkah-langkah pengembangan instrumen yang ditempuh dimulai dengan melakukan kajian teoritis mengenai konsep kepribadian yang akan diukur. Instrumen pengukuran kepribadian ini dirancang dalam bentuk kuesioner. Pada penulisan ini pembahasan dibatasi pada tiga domain kepribadian yaitu kematangan pribadi, tata nilai, dan kestabilan emosi. Selanjutnya masing-masing faktor tersebut dijabarkan ke dalam indikator masing-masing. Setiap faktor dijabarkan ke dalam empat indikator. Keempat indikator tersebut didiskusikan bersama dengan teman sejawat dan para ahli yang kemudian menghasilkan masing-masing empat descriptor. Masing-masing deskriptor selanjutnya dikembangkan ke dalam butir-butir instrumen. Instrumen pengukuran yang dirancang adalah dalam bentuk kuesioner tertutup dengan empat pilihan jawaban yang disediakan. Setiap butir deskriptor dikembangkan ke dalam lima butir pertanyaan/ Pernyataan, baik pertanyaan positif maupun negatif. Dengan demikian terdapat 60 butir pertanyaan yang telah dibuat.

Pada tahap berikutnya 60 butir pertanyaan tersebut diuji cobakan pada sejumlah sampel. Uji coba pertama sebagai uji coba terbatas dilakukan pada 50 mahasiswa keguruan untuk melihat aspek

keterbacaan instrumen. Uji coba kedua dilakukan pada sampel yang lebih besar yakni 200 mahasiswa yang dipilih secara insidental. Uji coba ketiga dilakukan pada sampel yang berada di lima perguruan tinggi di Jawa Timur dan Bali. Jumlah instrumen yang disebarakan ada 1200, namun yang kembali sekitar 900 dan setelah diseleksi instrumen yang dapat ditindak lanjuti untuk diolah sejumlah 735. Analisis data dilakukan dua tahap yaitu, uji validitas dan reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach memakai program SPSS, dan berikutnya adalah analisis pengujian model menggunakan Lisrel.

Uji validitas dan reliabilitas dengan Cronbach Alpha dilakukan hingga lima putaran untuk mendapatkan butir-butir instrumen yang benar-benar memenuhi syarat. Setelah melalui lima tahap pengujian maka yang didapatkan tersisa 10 butir untuk tiga faktor. Hasil uji analisis faktorial yang didapat disajikan pada tabel 02. Sebagai acuan untuk menentukan validitas butir tes adalah nilai Corrected Item Total Correlation sebesar 0.300. Jadi hanya butir-butir instrumen yang murni nilai Corrected Item Total Correlation > 0.300 yang dipertahankan setelah dilakukan analisis faktor dengan rotasi. Nilai ekstraksi dari analisis faktor dengan rotasi ada di Tabel 03. Sedang nilai reliabilitas tes dapat dilihat pada tabel 02 yakni Cronbach Alpha 0.952 diatas ambang ketentuan 0.700. Tahapan analisis data berikutnya adalah analisis faktor konfirmatori menggunakan Lisrel.

Dari hasil analisis faktor eksploratori terlihat bahwa banyak butir-butir yang terseleksi atau dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi kaidah validitasnya. Hal tersebut diduga karena lemahnya pengawasan saat pengisian kuesioner oleh responden dan juga *timing* penyebaran instrumen yang kurang tepat. Saat disebarkannya instrumen ini, di beberapa perguruan tinggi tempat penelitian ini ada yang sudah memasuki akhir semester dan mahasiswa sudah hampir libur, dan bahkan ada yang sudah libur. Sehingga suasana psikologis responden saat mengisi instrumen pengukuran ini kurang mendukung, hal tersebut juga dapat dilihat dari banyaknya instrumen yang tidak kembali serta instrumen yang pengisiannya tidak lengkap. Hal ini dapat

menjadi bahan pembelajaran sekaligus sebagai dasar untuk penyempurnaan pengembangan instrumen ini oleh peneliti yang lain. Data hasil analisis faktor dengan statistik Cronbach Alpha dapat dilihat pada tabel 02 dan 03 di bawah ini.

**Tabel 01 : Jabaran indikator dan deskriptor instrumen
INDIKATOR DAN DESKRIPTOR KEPERIBADIAN
CALON MAHASISWA KEGURUAN**

No	Indikator	Deskriptor
1	Kematangan pribadi	a. Kemampuan menerima diri sendiri b. Kesiapan menerima tanggung jawab c. Kemampuan mengelola waktu d. Kesediaan mentaati aturan
	Tata Nilai	(2)Kepemilikan rasa toleransi (3)Kekuatan rasa simpati dan empati (4)Pemahaman terhadap norma-norma [1] Ketaatan terhadap aturan
3	Kestabilan emosi	a. Kemampuan mengendalikan diri b. Kemampuan mengatasi gejala emosi c. Kesiapan mendengarkan keluhan orang lain d. Ketenangan dalam menghadapi persoalan

**Tabel 02 : Hasil Uji Alpha Cronbach tahap 5
Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	735	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	735	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.952	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KEMATANGAN PRIBADI9	214.3619	698.043	.409	.951
KEMATANGAN PRIBADI10	214.1347	698.651	.401	.951
KEMATANGAN PRIBADI12	214.3469	700.622	.366	.952
TATA NILAI1	213.5102	704.893	.313	.952
TATA NILAI4	213.5374	699.851	.435	.951
TATA NILAI14	213.7891	696.676	.460	.951
TATA NILAI19	213.9429	696.613	.399	.951
TATA NILAI20	213.7170	698.113	.381	.952
KESTABILAN EMOSI2	214.0313	699.346	.409	.951
KESTABILAN EMOSI9	214.1184	700.273	.329	.952
KESTABILAN EMOSI13	213.5837	698.608	.482	.951

Tabel 02 menampilkan hasil akhir uji Cronbach's Alpha setelah dilakukan proses pengujian sebanyak lima kali dengan menyeleksi butir-butir instrumen yang dianggap tidak valid. Butir-butir instrumen yang dinyatakan valid adalah yang memiliki nilai Corrected item Total Correlation > 0.300. Pada tabel 02 di atas, terlihat bahwa untuk dimensi kematangan pribadi tersisa 3 butir yang valid, tata nilai tersisa 5 butir yang valid, dan kestabilan emosi masih ada 3 butir yang valid. Sedangkan nilai reliabilitas masing-masing butir tes > 0.700 sebagai ambang batas minimal, dan nilai reliabilitas tes secara keseluruhan adalah 0.952.

Tabel 03: Hasil Analisis Faktor Eksploratori

Communalities

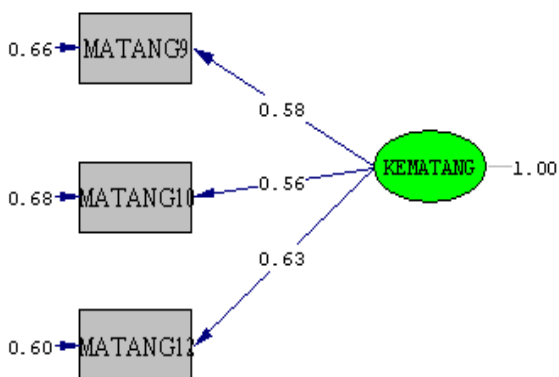
	Initial	Extraction
KEMATANGAN PRIBADI9	1.000	.546
KEMATANGAN PRIBADI10	1.000	.517
KEMATANGAN PRIBADI12	1.000	.632
TATA NILAI1	1.000	.611

TATA NILAI4	1.000	.601
TATA NILAI14	1.000	.545
TATA NILAI19	1.000	.625
TATA NILAI20	1.000	.656
KESTABILAN EMOSI2	1.000	.391
KESTABILAN EMOSI9	1.000	.546
KESTABILAN EMOSI13	1.000	.471

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Hasil pengujian dengan ekstraksi menunjukkan bahwa masing-masing butir yang ada memiliki nilai ekstraksi > 0.300, dengan demikian 11 butir tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan validitasnya

1. KEMATANGAN PRIBADI



Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

Gambar 1 : Hasil uji Confirmatory model dengan Lisrel pada Faktor Kematangan Pribadi

Tabel 04 : Uji Goodness of fit variabel kematangan pribadi

No.	Kriteria	Cut off value	Hasil Uji	Ket
1	Chi square	diharapkan EMOSInya kecil	0	Good fit
2	P-value	≥ 0.05	1.000	Good fit
3	RMSEA	≤ 0.08		Good fit
4	GFI	≥ 0.90		Good fit
5	NFI	≥ 0.90		Good fit
6	NNFI	≥ 0.90		Good fit
7	PNFI	0.60 – 0.90		Good fit
8	CFI	≥ 0.90		Good fit
9	IFI	≥ 0.90	The	fit
10	RFI	≥ 0.90	Model is Saturated	Good fit
11	AGFI	≥ 0.90	, the Fit is Perfect !	Good fit

Resume uji Goodness of Fit pada tabel 04 menunjukkan bahwa faktor Kematangan pribadi yang didukung oleh tiga butir tersebut memiliki model yang Fit, semua kriteria pengujian Godness of Fit menunjukkan hasil yang fit. Oleh karena pada tabel di atas seluruh alat uji goodness of fit yang sudah tergolong GOOD FIT, maka pengujian dapat dilanjutkan. Selanjutnya dilakukan persamaan pengukuran dengan Lisrel sebagai berikut:

Measurement Equations

$$\text{MATANG9} = 0.49 * \text{KEMATANG}, \text{Errorvar.} = 0.47, R^2 = 0.34$$

(0.041)	(0.038)
12.02	12.42

$$\text{MATANG10} = 0.47 * \text{KEMATANG}, \text{Errorvar.} = 0.48, R^2 = 0.32$$

(0.040)	(0.036)
11.77	13.18

$$\text{MATANG12} = 0.51 * \text{KEMATANG}, \text{Errorvar.} = 0.40, R^2 = 0.40$$

(0.041)	(0.037)
12.57	10.59

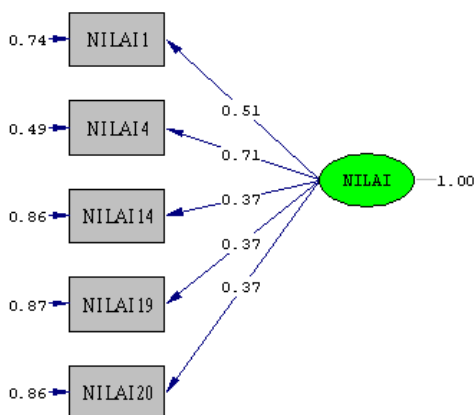
Keterangan : nilai t hitung yang diberi tebal.

MATANG9 = butir 9; MATANG10 = butir 10; MATANG12 = butir 12

Pada output diatas dapat dilihat bahwa butir 9 memiliki t hitung pada seluruh indikator serta *error variance* nya adalah signifikan terhadap variabel latennya masing-masing, sehingga pengujian dapat dilanjutkan.

Berdasarkan *outer loading* untuk faktor **KEMATANGAN PRIBADI**, diketahui bahwa indikator MATANG 9 (butir 9), butir 10 dan butir 12, memiliki *outer loading* dengan t-statistik >1,96 ($\alpha=5\%$), sehingga indikator **KEMATANGAN PRIBADI** yaitu butir 9, butir 10 dan butir 12 tersebut memenuhi validitas konvergen (*convergent validity*), artinya tergolong baik dalam mengukur variabel **KEMATANGAN PRIBADI**. Adapun indikator dengan R^2 yang terbesar adalah indikator butir 12 dengan $R^2 = 0.40$, artinya butir 12 mempunyai pengaruh sebesar 40% terhadap variabel latennya (**KEMATANGAN PRIBADI**), sedangkan butir 10 mempunyai R^2 yang paling kecil yaitu 0.32. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ketiga butir instrumen untuk faktor kematangan pribadi tersebut yakni butir yang dinamai matang 9, matang 10, dan matang 12 terkonfirmasi merupakan butir yang membentuk faktor laten kematangan pribadi.

2.TATA NILAI



Chi-Square=54.99, df=5, P-value=0.00000, RMSEA=0.117

Tabel Uji Goodness of fit Variabel TATA NILAI

No.	Kriteria	Cut off value diharapkan	Hasil Uji	Keterangan
1	Chi square	nilainya kecil	52.19	Bad fit
2	P-value	≥ 0.05	0.000	Bad fit
3	RMSEA	≤ 0.08	0.09	Bad fit
4	GFI	≥ 0.90	0.97	Good fit
5	NFI	≥ 0.90	0.87	Good fit (marginal)
6	NNFI	≥ 0.90	0.76	Bad fit
7	PNFI	0.60 – 0.90	0.44	Bad fit
8	CFI	≥ 0.90	0.88	Good fit (marginal)
9	IFI	≥ 0.90	0.88	Good fit (marginal)
10	RFI	≥ 0.90	0.74	Bad fit
11	AGFI	≥ 0.90	0.91	Good fit

Resume uji Goodness of Fit yang tersaji pada tabel di atas diketahui ada 2 alat uji goodness of fit yang sudah tergolong GOOD FIT, dan 3 yang good fit (marginal), maka pengujian dapat dilanjutkan.

Setelah itu dilakukan persamaan pengukuran dengan Lisrel sebagai berikut:

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

Measurement Equations

Measurement Equations

$$\begin{array}{l} \text{NILAI1} = 0.35 * \text{NILAI}, \text{Errorvar.} = 0.36, R^2 = 0.26 \\ (0.032) \quad (0.024) \\ \mathbf{10.97} \quad \mathbf{14.91} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{NILAI4} = 0.51 * \text{NILAI}, \text{Errorvar.} = 0.26, R^2 = 0.51 \\ (0.037) \quad (0.032) \\ \mathbf{14.06} \quad \mathbf{8.00} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{NILAI14} = 0.30 * \text{NILAI}, \text{Errorvar.} = 0.56, R^2 = 0.14 \\ (0.037) \quad (0.033) \\ \mathbf{8.21} \quad \mathbf{17.36} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{NILAI19} = 0.34 * \text{NILAI}, \text{Errorvar.} = 0.74, R^2 = 0.13 \\ (0.042) \quad (0.043) \\ \mathbf{8.06} \quad \mathbf{17.44} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{NILAI20} = 0.33 * \text{NILAI}, \text{Errorvar.} = 0.69, R^2 = 0.14 \\ (0.041) \quad (0.040) \\ \mathbf{8.21} \quad \mathbf{17.36} \end{array}$$

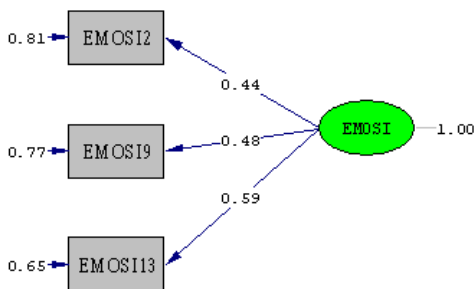
Keterangan: nilai t hitung yang diberi tebal.

Pada output diatas dapat dilihat nilai t hitung pada seluruh indikator serta *error variance* nya adalah signifikan terhadap variabel latennya masing-masing, sehingga pengujian dapat dilanjutkan.

Berdasarkan *outer loading* untuk variabel **TATA NILAI**, diketahui bahwa indikator NILAI 1, NILAI 4, NILAI 14, NILAI 19 dan NILAI 20, memiliki *outer loading* dengan t-statistik >1,96 ($\alpha=5\%$), sehingga indikator **TATA NILAI** yaitu NILAI 1, NILAI 4, NILAI 14, NILAI 19 dan NILAI 20 tersebut memenuhi validitas konvergen (*convergent validity*),

artinya tergolong baik dalam mengukur variabel **TATA NILAI**. Adapun indikator dengan nilai R^2 yang terbesar adalah indikator NILAI 4 dengan $R^2=0.51$, artinya NILAI 4 mempunyai pengaruh sebesar 51% terhadap variabel latennya (**TATA NILAI**). Sedangkan NILAI 19 mempunyai R^2 yang paling kecil yaitu 0.13. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kelima butir instrumen untuk faktor tata nilai tersebut yakni butir tata nilai 1, tata nilai 4, tata nilai 14, tata nilai 19, dan tata nilai 20 terkonfirmasi merupakan butir yang membentuk faktor laten tata nilai.

3.KESTABILAN EMOSI



Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

Tabel Uji Goodness of fit Variabel KESTABILAN EMOSI

No.	Kriteria	Cut off value	Hasil Uji	Ket
		diharapkan		
1	Chi square	EMOSInya kecil	0	Good fit
2	P-value	≥ 0.05	1.000	Good fit
3	RMSEA	≤ 0.08		Good fit
4	GFI	≥ 0.90		Good fit
5	NFI	≥ 0.90		Good fit
6	NNFI	≥ 0.90		Good fit
7	PNFI	0.60 – 0.90		Good fit
8	CFI	≥ 0.90	The Model is	Good fit
9	IFI	≥ 0.90	Saturated,	Good fit
10	RFI	≥ 0.90	the Fit is	Good fit
11	AGFI	≥ 0.90	Perfect !	Good fit

Resume hasil pengujian Goodness of Fit yang tersaji pada tabel di atas diketahui bahwa seluruh alat uji goodness of fit menunjukkan kategori GOOD FIT, maka pengujian dapat dilanjutkan.

Setelah itu dilakukan persamaan pengukuran dengan Lisrel sebagai berikut:

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

Measurement Equations

Measurement Equations

$$\begin{array}{l} \text{EMOSI2} = 0.34 * \text{EMOSI}, \text{ Errorvar.} = 0.50, R^2 = 0.19 \\ (0.044) \qquad (0.035) \\ \mathbf{7.83} \qquad \mathbf{14.26} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{EMOSI9} = 0.43 * \text{EMOSI}, \text{ Errorvar.} = 0.64, R^2 = 0.23 \\ (0.053) \qquad (0.050) \\ \mathbf{8.11} \qquad \mathbf{12.82} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{EMOSI13} = 0.41 * \text{EMOSI}, \text{ Errorvar.} = 0.32, R^2 = 0.35 \\ (0.047) \qquad (0.038) \\ \mathbf{8.74} \qquad \mathbf{8.49} \end{array}$$

Keterangan: nilai t hitung yang diberi tebal.

Pada output diatas dapat dilihat t hitung pada seluruh indikator serta error variance nya adalah signifikan terhadap variabel latennya masing-masing, sehingga pengujian dapat dilanjutkan.

Berdasarkan *outer loading* untuk variabel **KESTABILAN EMOSI**, diketahui bahwa indikator EMOSI2, EMOSI 9 dan EMOSI 13, memiliki *outer loading* dengan t-statistik >1,96 ($\alpha=5\%$), sehingga indikator **KESTABILAN EMOSI** yaitu EMOSI2, EMOSI 9 dan EMOSI 13 tersebut memenuhi validitas konvergen (*convergent validity*), artinya tergolong baik dalam mengukur variabel **KESTABILAN EMOSI**. Adapun indikator dengan R^2 yang terbesar adalah indikator EMOSI 13 dengan $R^2=0.35$, artinya EMOSI 13 mempunyai pengaruh sebesar 35% terhadap

variable latennya (**KESTABILAN EMOSI**). Sedangkan EMOSI2 mempunyai R^2 yang paling kecil yaitu 0.19. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ketiga butir instrumen untuk faktor kestabilan tersebut yakni butir instrumen yang dinamai emosi 2, emosi 9, dan emosi 13 terkonfirmasi merupakan butir yang membentuk faktor laten kestabilan emosi.

Kesimpulan

1. Proses pengembangan instrumen pengukuran kepribadian mahasiswa calon guru yang dilaksanakan melalui tahapan yang baku mampu menghasilkan instrumen yang memenuhi kaidah validitas dan reliabilitas.
2. Hasil pengujian butir eksploratori dengan statistik Cronbach's Alpha yang telah memenuhi kriteria cenderung akan memberikan hasil yang terkonfirmasi pada analisis faktor konfirmatori dengan analisis Lisrel.
3. Dari analisis faktor eksploratori diperoleh hasil sebanyak 11 butir instrumen yang valid dan reliabel untuk ketiga dimensi nilai Corrected-item Total Correlation > 0.300 dan Cronbach's Alpha 0.952 (> 0.7000, masing-masing adalah, 3 butir pada dimensi kematangan pribadi, 5 butir pada dimensi tata nilai, dan 3 butir pada dimensi kestabilan emosi.
4. Dari analisis konfirmatori dengan menggunakan Lisrel diperoleh hasil bahwa 11 butir instrumen yang telah teruji valid dan reliabel dari uji faktor eksploratori terbukti terkonfirmasi merupakan butir-butir instrumen yang membentuk faktor-faktornya.
5. Dimensi kematangan pribadi, butir MATANG 9, MATANG 10 dan MATANG 12, memiliki *outer loading* dengan t-statistik >1,96 ($\alpha=5\%$), dengan MATANG 9 nilai $R^2= 0.34$, MATANG 10 nilai $R^2= 0.34$, dan Matang 12 nilai $R^2 = 0.40$. Dimensi TATA NILAI diketahui bahwa indikator NILAI 1, NILAI 4, NILAI 14, NILAI 19 dan NILAI 20, memiliki *outer loading* dengan t-statistik >1,96 ($\alpha=5\%$). NILAI 1 nilai $R^2=0.26$, Nilai 4 nilai $R^2=0.51$, Nilai 14 nilai $R^2=0.14$, NILAI 19 nilai $R^2=0.13$, dan NILAI 20 nilai $R^2=0.14$, sedangkan untuk dimensi kestabilan emosi dihasilkan, bahwa indikator EMOSI 2, EMOSI 9 dan EMOSI 13, memiliki *outer loading* dengan t-statistik >1,96

($\alpha=5\%$). EMOSI 2 nilai $R^2=0.19$, EMOSI 9 nilai $R^2=0.23$, dan EMOSI 13 nilai $R^2=0.35$.

Referensi

- [1] S. Yusuf and J. Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- [2] M. Yamin, *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- [3] G. . Borich, *Effective teaching methods. Research-Based Practice*. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2007.
- [4] Friedman and Schustack, *Kepribadian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- [5] J. . Burger, *Personality: Theory and research*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1986.
- [6] L. . Pervin, D. Cervone, and O. . John, *Psikologi kepribadian: Teori & Penelitian. (Terjemahan) Edisi Kesembilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- [7] E. B. Hurlock, *Developmental Psychology 3rd Ed*. New Delhi: Mc Graw Hill, 1986.
- [8] Suyanto dan D. Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adi Cita, 2000.
- [9] M. Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- [10] D. Ronda, "Membangun karakter guru yang dicintai anak-anak," Makassar, 2008.
- [11] M. Rokeach, "The nature of human values.," *The nature of human values*. Free Press, New York, NY, US, pp. x, 438–x, 438, 1973.
- [12] L. R. Aiken, *Personality assessment methods and practices*. Seattle: Hogrefe & Huber, 1999.
- [13] Suparji, "Pengembangan konstruk instrumen kompetensi bidang keguruan mahasiswa calon guru sekolah menengah kejuruan," Universitas Negeri Yogyakarta, 2007.
- [14] R. Wijayanti, "Pengembangan instrumen kompetensi kepribadian guru," Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- [15] S. Rejeki, "Pengembangan instrumen evaluasi afektif untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di

- sekolah menengah umum,” Universitas Negeri Yogyakarta, 2003.
- [16] N. T. Pratitis and M. G. Pandin, “Hubungan antara karakteristik “kepribadian yang kreatif” dan motivasi ekstrinsik-intrinsik dengan kreativitas,” *Anima Indonesia. Psychol. J.*, vol. 17, no. 2, 2002.
- [17] F. Açıkgöz, “A study on teacher characteristics and their effects on students attitudes,” *Read. Matrix*, vol. 5, no. 2, pp. 103–115, 2005.

Kajian Penguatan Pendidikan Karakter Sesuai Profil Pelajar Pancasila di Jenjang Sekolah Dasar

Yulianti, S.Pd.I., M.Pd

Pengantar

Saat ini, satuan pendidikan menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mendidik generasi muda agar menjadi generasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Selain membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan akademis dasar, satuan pendidikan menghadapi tantangan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif sebagai salah satu faktor penentu efektivitas kegiatan belajar mengajar dan faktor pendukung peningkatan prestasi belajar. Mengingat besarnya pengaruh lingkungan belajar terhadap proses dan capaian pembelajaran, maka diperlukan kajian penguatan karakter yang tepat untuk memotret/memperoleh gambaran profil pelajar Pancasila sejati di tiap satuan pendidikan. Tantangan lain yang dihadapi satuan pendidikan yaitu pembentukan karakter peserta didik. Peserta didik di Indonesia diharapkan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sebagai upaya untuk membentuk profil pelajar Pancasila, pemerintah mencanangkan program penguatan karakter untuk setiap jenjang pendidikan. Program pendidikan karakter yang disusun dan dilaksanakan dengan baik dapat menjadi cara yang efektif untuk membangun karakter peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya kajian untuk mendapatkan rekomendasi yang harapannya mendapatkan model penguatan karakter peserta didik yang paling tepat untuk diterapkan di di jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan dianggap sebagai pusat tantangan dalam mempersiapkan karakter unggul manusia dan sebagai tolak ukur perkembangan dan kemajuan suatu bangsa[1]. Tujuan pendidikan bukan hanya terfokus pada peningkatan penguasaan pengetahuan [2][3], namun ada perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

sekitarnya dimana individu itu hidup [4], [5], [6].

Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Solusi mengatasi persoalan kelas tidak kondusif dapat dilakukan dengan mengatur settingan kelas, menentukan strategi, gaya komunikasi termasuk memahami psikologis siswa dalam proses belajar supaya bisa belajar efektif. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh Siswa dapat terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya [7][8][9][10].

Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [11].

Pendidikan Nasional berdasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada abad 21 saat ini yang bisa disebut sebagai era pengetahuan, maka tujuan pendidikannya pun adalah; 1) mempersiapkan orang dalam dunia pasang surut, dinamis, *unpredictable* (tidak bisa diramalkan), 2) perilaku yang kreatif, 3) membebaskan kecerdasan individu yang unik, serta 4) menghasilkan inovator. Dengan demikian, model sekolah pada abad ini mengharapkan pendidikan dapat menjadikan individu-individu yang mandiri, sebagai pelajar yang mandiri[12].

Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tidak hanya dikembangkan untuk membentuk pengetahuan atau keterampilan siswa, namun juga membentuk sikap kepribadian atau karakter. Oleh karena itu pendidikan nasional diupayakan untuk membentuk generasi muda yang siap untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya.

Keberhasilan dan kegagalan peradaban suatu bangsa banyak ditentukan oleh karakter warga bangsanya. Dampak adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut memunculkan sikap-sikap yang kurang sesuai dalam kehidupan bermasyarakat (Rachmadayanti, 2017). Karena seiring kemajuan zaman dengan perkembangan ilmu dan teknologi manusia selalu berkembang pada berbagai sektor pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan siswa namun juga memiliki budi pekerti, sopan santun dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Pendidikan karakter intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila.

Problem dasar yang hendak dieksplorasi terkait kajian penguatan pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila di jenjang sekolah dasar. Penelitian yang relevan oleh Utami dkk, (2019) kegiatan ekstrakurikuler membuat sebagai salah satu penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, dari pembelajaran membuat karakter yang dapat dikembangkan pada siswa yaitu ketekunan dan ketelitian[13].

Pancasila saat ini diajarkan secara teoritis dan kurang menarik minat generasi muda, sehingga perlunya inovasi guru dalam membuat permainan yang disukainya dan disukai anak saat ini untuk mudah mempelajari Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia[14].

Menurut Silfia, dkk (2020) faktor pendukung dan penghambat implementasi penguatan pendidikan karakter dalam membangun karakter insan kamil. Faktor pendukung internal; 1) *Stakeholder* yang sudah berkomitmen, 2) Sarana dan prasarana yang memadai, 3) Input

anak yang sudah siap untuk di damping, 4) Finansial yang mendukung. Faktor pendukung dari eksternal; 1) Orang tua yang memotivasi anak-anaknya, 2) Masyarakat sekitar sekolah yang mendukung.

Faktor penghambat internal; 1) Adanya anak-anak yang kurang disiplin atau memerlukan pendampingan khusus. 2) Sarana dan prasarana yang memerlukan pembenahan Ada unsur guru, tata usaha yang belum siap dalam program. Faktor penghambat eksternal; 1) Ada orang tua yang kurang peduli dalam program [15].

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis pendekatan ini sifatnya deskriptif yang akan membahas tentang kajian penguatan pendidikan karakter (PPK) sesuai profil pelajar Pancasila di jenjang sekolah dasar. Studi kasus sekolah dasar di SDN Mulyorejo 3 Kota Malang. Pendeskripsian ini dilakukan untuk menemukan, memahami, menggambarkan, dan mengungkapkan dengan cara menjelaskan kajian PPK berbasis pancasila sejati yang ada di jenjang sekolah dasar melalui berbagai penelusuran kajian pustaka.

Pembahasan

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan proses pembentukan, transmisi, transformasi dan pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila[16]. Sudah tentu karakter anak itu merupakan hasil interaksi antara pembawaan dan lingkungan, sehingga dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang ditekankan bukanlah pembawaan dan lingkungan kulturalnya, namun interaksi keduanya.

Pengembangan karakter dilakukan untuk mengembangkan karakter siswa sekolah dasar sesuai karakter yang baik. Ruang lingkup pendidikan karakter selain di sekolah adalah di keluarga, masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta[17]. Penanaman nilai karakter dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai yang dilakukan oleh guru kelas 1 SDN Mulyorejo 3 teknik penilaian karakter yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu. Pengembangan karakter dilakukan dengan memasukkan konsep karakter pada setiap muatan pembelajaran di satuan kelas. Beberapa pengembangan karakter itu yang dilakukan antara lain: Guru menanamkan nilai kebaikan pada anak dengan

menanamkan konsep diri yang baik kepada anak setiap akan memasuki pelajaran, misalnya pada aktivitas awal bertemu mengucapkan salam dan selama pembelajaran daring ini jika anak bertemu dengan guru di luar sekolah menundukkan kepala dengan menyapa guru bukan berjabat tangan untuk menyikapi terpaparnya covid-19. Guru menggunakan cara yang membuat anak memiliki alasan atau keinginan untuk berbuat baik. Guru memberikan beberapa contoh baik kepada anak mengenai karakter yang sedang dibangun dalam pembelajaran. Guru mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik. Guru melaksanakan perbuatan baik bersama siswa selama pembelajaran daring.

Terdapat lima nilai utama karakter yang menjadi prioritas Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah. Lima nilai karakter tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan, saling mempengaruhi dan saling menentukan dan ditentukan, yakni:

1. Religius.

Karakter religius merupakan cerminan ketaatan manusia terhadap Allah SWT, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku menjalankan syariat Islam, toleransi terhadap ummat yang beragama lain; meliputi tiga aspek, yakni relasi individu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Wujud nilainya berupa cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama lintas agama, anti buli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, melindungi yang kecil dan tersisih.

2. Nasionalis.

Karakter nasionalis nampak dalam pola pikir, sikap dan perilaku setia, peduli, dan menghargai bahasa, lingkungan sosial dan fisik, kebudayaan, ekonomi dan politik bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan. Wujud nilai karakter nasionalis berupa kesediaan menghargai dan menjaga budaya bangsa sendiri, berkorban secara ikhlas, punya prestasi, cinta tanah air, melestarikan lingkungan fisik dan sosial, mentaati aturan hukum yang berlaku, disiplin dan berdedikasi tinggi, menghargai keanekaragaman budaya, suku dan agama.

3. Mandiri.

Karakter mandiri nampak pada pola pikir, sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain, serta mengoptimalkan semua tenaga, pikiran, waktu, biaya untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita. Wujud nilai kemandirian berupa semangat kerja keras, tangguh, memiliki daya berjuang tinggi, professional, kreatif, pemberani, serta bersedia meluangkan waktu sebagai pembelajar sepanjang masa.

4. Gotong Royong.

Karakter gotong royong nampak pada pola pikir, sikap dan perilaku kerjasama dan bahu membahu dalam menyelesaikan persoalan bersama, memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, bersahabat dengan orang lain dan memberi bantuan pada mereka yang miskin, tersingkir dan membutuhkan pertolongan. Wujud nilai gotong royong berupa kesediaan saling menghargai, bekerjasama, taat keputusan, musyawarah mufakat, saling menolong, memiliki solidaritas tinggi, berempati, tidak suka diskriminasi dan kekerasan, serta rela berkorban.

5. Integritas.

Karakter integritas menjadi nilai utama yang melandasi pola pikir, sikap dan perilaku amanah, setia pada nilai-nilai sosial dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggungjawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Wujud nilai integritas berupa kejujuran, cinta pada kebenaran dan keadilan, memiliki komitmen moral, tidak korupsi, bertanggungjawab, menjadi teladan, menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas).

Ciri utama praksis pendidikan karakter adalah adanya otonomi moral yang didukung oleh motivasi internal individu dalam melaksanakan nilai-nilai moral. Dengan demikian, yang menjadi penilai adalah diri sendiri berhadapan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan universal yang terpapar di hadapan individu. Karena itu, seseorang akan keliru menilai kualitas pembentukan karakter seseorang bila hanya melihat dimensi luarnya saja. Ketika pendekatan

ini diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan, lembaga pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter perlu memiliki otonomi moral kelembagaan, yang tampil dalam diri para pelaku pendidikan[18]. Otonomi moral dalam proses penilaian PPK yang dimaksud adalah bahwa sekolah menilai diri sendiri sejauh mana keberhasilan program PPK yang telah mereka lakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan (guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah).

Selama pembelajaran daring keterlaksanaan karakter mandiri pada diri anak kelas rendah masih berkurang, Nampak pada aktivitas video conference siswa masih belum mahir dalam membuka link zoom sehingga perlu adanya pendampingan orang tua atau orang dewasa yang ada di lingkungan rumah saat pembelajaran di mulai. Dan ini menjadi kendala saat para orang tua sedang sibuk waktunya bekerja sehingga anak-anak sering tidak bisa ikut pembelajaran daring melalui link aplikasi zoom yang telah diberikan guru sebelumnya. Ada kendalanya juga saat anak-anak menyalakan mikrofon bersamaan dengan guru menjelaskan pokok materi pada pertemuan tersebut. Sehingga waktu yang dibutuhkan guru dalam mempersiapkan anak siap belajar butuh waktu yang lama di awal dan di akhir saat kegiatan penutup siswa menyalakan mikrofon memberikan sapaan para gurunya sebelum selesai zoom.

Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Menteri Nadiem menjelaskan secara virtual di Jakarta, Kamis (10/12) seminar tema “Generasi Cerdas Berkarakter Indonesia Maju Bermartabat”. Ada enam nilai utama; 1). Bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, 2). Berkebinekaan global, 3). Gotong royong, 4). Kreatif, 5). Kritis, 6). Mandiri. Membentuk karakter peserta didik bukan sekadar membuat anak itu begitu cerdik pandai tetapi harus membuat anak itu menjadi berbudaya dan berkarakter yang baik, jika keenam nilai karakter ditanamkan sedini mungkin akan dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

Penguatan profil pelajar pancasila saat ini penting dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Pembentukan dan penguatan karakter perlu ditanamkan pada peserta didik usia sekolah

dasar sehingga kelak menjadi manusia Indonesia yang memiliki karakter lokal dan berwawasan global [19]. Pramuka salah satu contoh kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyampaikan pesan karakter yang sesuai profil pelajar pancasila, kegiatan tersebut melatih kemandirian pembacanya. Berdasarkan hal tersebut, perlu ada bentuk instrumen untuk mengukur aktivitas nyata peserta didik sebagai perwujudan penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang sekolah dasar (SD).

Pramuka menjadi salah satu kegiatan yang mencerminkan pelajar sejati, sebagai program wajib ada dalam implementasi kurikulum 2013 di setiap satuan Pendidikan tingkat sekolah dasar. "Khusus untuk Pramuka adalah mata pelajaran wajib yang harus ada di mata pelajaran, dan itu diatur dalam undang-undang," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kepada pers di Kantor Wapres, di Jakarta, kemarin." Orientasi pengembangan kurikulum 2013 adalah tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajarannya yang holistic dan menyenangkan. Karakter bebas dan bermain serta sapaan kakak terhadap semuanya pada lingkungan Pendidikan pramuka dinilai tidak akan menjadi masalah dan bisa disesuaikan dengan Pendidikan di sekolah dasar.

Dengan Pendidikan pramuka, hubungan antara murid dan guru lebih bertambah akrab seperti teman sehingga bisa menghilangkan kesan semua. Kegiatan ekstrakurikuler diawasi dan dikendalikan oleh satuan Pendidikan sebagai penyelenggara kegiatan pramuka. Ada beberapa argumen, mengapa pramuka signifikan dalam menunjang pendidikan karakter ini. Pertama, Pramuka dikenal sebagai kegiatan yang menyenangkan. Menyanyi, bermain, tepuk tangan, tali temali, sandi-sandi, penjelajahan adalah beberapa bentuk dari kegiatan Pramuka yang berbasis *fun*, menyenangkan. Kegiatan yang biasanya dilakukan di tempat terbuka ini akan memberi "ruang baru" bagi siswa atas dominasi ruang kelas yang selama ini "membelenggu". Sehingga, dalam kegiatan *outdoor* ini siswa mampu mengekspresikan bakat dan minatnya secara bebas dan gembira.

Kedua, Pramuka adalah salah satu media pendidikan yang berbasis pada pengoptimalan otak kanan siswa. Sebagaimana kita

ketahui bersama bahwa proses pembelajaran di kelas lebih dominan pada pengembangan otak kiri (IQ: *Intellectual Quotient*), sementara pengembangan otak kanan (EQ: *Emotional Quotient*) seringkali mendapatkan porsi yang sangat sedikit. Pramuka adalah wahana pengembangan emosional otak kanan, di mana siswa dilatih untuk berinteraksi, berkomunikasi, kreatif, dan berafiliasi dengan teman-teman lainnya. Di sinilah kemampuan sosial siswa dibangun, sehingga mampu mewujudkan salah satu pilar pendidikan versi Unesco (lembaga PBB yang menangani pendidikan dan kebudayaan), yakni membekali siswa untuk dapat *life together*, hidup bersama dengan damai dan harmonis.

Ketiga, Pramuka melatih mental yang kuat. Melalui Pramuka, siswa dibekali dengan sikap mental yang tangguh seperti disiplin, berani, loyal, bertanggung jawab dan sifat-sifat lainnya, yang terdapat dalam Dasa Dharma (sepuluh bakti) Pramuka. Sikap mental ini barangkali tidak ditemui dalam proses pembelajaran formal. Adalah sebuah kenyataan bahwa ada siswa yang cerdas dan pandai, namun menjadi sosok yang penakut, tertutup, sulit bergaul dan sebagainya. Di sini Pramuka adalah solusi untuk mengatasi persoalan mentalitas siswa tersebut.

Menurut Muhammadi & Hasanah, (2019) faktor penghambat implementasi PPK di sekolah unsur komunikasi dan sumber daya yaitu kurang sinergi antara orang tua dengan sekolah terhadap persiapan dan pelaksanaan program PPK dan belum semua guru memiliki kompetensi mengembangkan metode atau model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan nilai-nilai PPK selaras dengan hasil penelitian[21][1].

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yang ditampilkan dalam kehidupan sehari harinya.

Model aktualisasi penguatan Pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila sejati pada siswa pendidikan dasar bisa

muncul dalam bentuk aktivitas nyata dalam kehidupan sehari-harinya, diantaranya yang tergambar dalam aktivitas pembelajaran selama pandemic di SDN Mulyorejo 3 Kota Malang

- 1). Pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitasnya belajar, awal bertemu guru menundukkan kepala, masuk anak-anak diantar guru bacaan asmaul husna, membaca menghafal memimpin bacaan mengucapkan asmaul husna teman sejawat
- 2). Memahami perbedaan bahasa, suku dan budaya teman sepermainan penerapannya belum tampak karena kebijakan zonasi tempat tinggal anak sekitar sekolah karena tidak ada perbedaan. Ada raport karakter mulai th.pelajaran 2019/2020 secara luring dan saat daring tidak dibuat karena kurangnya bahan untuk penilaian guru kelas.
- 3). Saling membantu teman dalam menjaga kerapian dan kebersihan di kelas. Kolaborasi siswa dan guru biasanya bentuk bantu perawatan kelas dan persediaan handsanitizer serta tempat cuci tangan, dan persiapan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Saat luring pelibatan orang tua kantin sehat, lomba produk sehat masing-masing kelas yang nantinya untuk jadi produk unggulan sekolah. Anak membawa kunir, lengkuas untuk dimanfaatkan tanaman kepentingan sekolah. Pengolahan manisan kencur di kemas dibantu orang tua yang sudah punya usaha dan aktif memproduksi, seperti kunyit instan dan aneka olahan obat tradisional.
- 4). Berani cari cara dalam mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri. Pembelajaran secara daring layanan yang diberikan sekolah melalui video call aplikasi WhatsApp saja karena terbatasnya keterampilan teknologi para guru yang sudah menjelang paripurna meski wifi sudah disediakan pihak sekolah. Sebelum pandemi ada aktivitas pembelajaran ekstrakurikuler melalui ekskul seni lukis, tartil dan lain lain, namun belum terfasilitasi dengan baik terkait sarana dan prasarana di sekolah. Prestasi olahraga seperti sepak takraw sudah dilatih sejak kelas 2 SD dalam kegiatan lomba-lomba

sudah masuk juara 2 se Jawa Timur. Selama pandemi ada surat edaran sehingga dihentikan. Kelanjutan dikoordinir guru olahraga sebagai pelatih sepak takraw di kota Malang. Selain itu ada ekstrakurikuler angklung yang baru berhenti karena kondisi kebijakan sekolah selama pandemi.

- 5). Kemampuan anak bertanya apa yang belum dimengerti, menanggapi banyaknya tugas yang diberikan selama daring. Lomba sains anak yang mengakomodasi para gurunya hingga mengantarkan dan mendampingi ke lokasi lomba.
- 6). Selama pembelajaran daring selain melatih kemandirian siswa dalam mengikuti aktivitas belajar seperti mengerjakan tugas sekolah secara mandiri. Sebagian masih belum nampak sehingga ada buku saku atau penghubung antara guru dan orang tua, terkait aktivitas juga anak mencatat apa yang disampaikan oleh guru dan dari orangtuanya bisa terekam dengan baik.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup warga negara Indonesia. Penerapan nilai-nilai pancasila di kalangan pelajar menjadi hal yang penting dan tidak bisa disepelekan. Hasil wawancara menunjukkan mayoritas para guru sudah memahami implementasi nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, namun ada kesulitan terkait media, metode dan pendekatan yang tepat untuk menanamkan pada peserta didik selama pandemic. Muatan Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) yang terintegrasi pada muatan tematik kadang terkendala waktu yang singkat sehingga para guru kesulitan untuk merumuskan formula yang tepat dalam mengenalkan pelajar pancasila sejati pada diri siswa dan juga guru sebagai penggerak materi yang disajikan dalam kurikulum tematik terpadu di jenjang sekolah dasar. Nilai-nilai Pancasila masih perlu adanya inovasi mempertahankan dalam aktivitas pembelajaran selama daring di sekolah dasar. Melihat keterbatasan kemampuan keterampilan pemahaman dalam teknologi sehingga beberapa guru Nampak menyerah dalam mencari cara memberikan pelajaran yang baik buat siswa supaya bisa tetap survive dengan tantangan zaman teknologi digital yang selama ini menjadi panutan.

Guru sebagai sosok manusia yang menjadi panutan para siswa dan orang tua sedikit banyak akan bergeser atau tergantikan dengan kecanggihan teknologi digital. Saat ini tugas yang diberikan guru mengantarkan meluapnya keingintahuan anak dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai mahaguru dalam menjawab semua tugas sekolah yang diterimanya. Melihat kondisi orang tua juga disibukkan dengan pekerjaan seakan semakin percaya pada fasilitas gadget yang diberikan ke anak sebagai kunci utama dalam belajar mengerjakan tugas sekolah tanpa adanya pendampingan dan pengawasan yang baik selama anak menggunakan atau memakai gawainya.

Ungkapan pepatah; gajah dipelupuk mata tak tampak debu di seberang jalan tampak, ini menggambarkan bahwa untuk menjadi jawaban dari permasalahan atau soal tugas belajar anak bisa menggunakan fasilitas wifi yang pada hakikatnya tanpa pendampingan orang tua atau guru anak bisa kehilangan rasa percayanya karena banyak orang terdekat sebagai sumber belajar justru mencari sumber yang tidak diketahui siapa yang menyampaikan kebenaran dan kesulitannya dalam menyelesaikan permasalahan yang didapatkan. Berdasarkan hasil temuan ada banyak dampak yang didapatkan anak dari fasilitas gawai dan wifi yang diberikan orang tua; diantaranya anak akan berpengaruh ke prestasi akademik yang baik dan sebaliknya bisa berpengaruh negatif karena pengaruh iklan dan ajakan yang menimbulkan rasa percaya anak untuk meniru dan melaksanakan apa yang dilihat dan didengarkan dari media yang dibukanya.

Hal ini sebagai bahan reflektif para guru dan orang tua dalam menggambarkan banyak pelajaran baik yang didapat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang membanjiri berbagai referensi yang nyata dan dapat diakses berbagai waktu. Namun informasi yang disajikan dalam media internet juga dapat merobohkan karakter anak bangsa diantaranya; kurang percaya diri saat menyampaikan ide atau gagasannya secara langsung, malas membaca buku, kurang disiplin dalam mengatur waktu untuk bermain dan belajar, tertutup dengan saran dan masukkan orang tua dan guru, dan juga menimbulkan rasa percaya yang berlebih pada sarana

internet daripada para guru atau orang tuanya sendiri selama di rumah Bersama keluarganya[22].

Beriman dan bertakwa kata kunci pertama sebagai profil pelajar pancasila yang menegaskan akhlak yang baik kepada Tuhannya; aspek spiritual yang jadi pondasi kemajuan moral bangsa. Kedua harus mandiri; guna menentukan makna atau tujuan yang akan dicapainya. Ketiga bernalar kritis; bisa berpikir dari berbagai sudut pandang. Keempat berkebhinekaan global; tidak hanya melihat perbedaan secara nasional, tapi juga di dunia bahwa keragaman itu adalah sebuah kekuatan yang akan menghadirkan solusi- solusi yang akan semakin menguatkan kemanusiaan. Kelima gotong royong; sebagai akar dari budaya masyarakat Indonesia dan Keenam kreatif; selalu ada imajinasi untuk menghadirkan solusi-solusi baru dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupannya.

Pada saat ini strategi dan metode pembelajaran pendidikan karakter dalam proses penanaman karakter kepada peserta didik lebih tepat menggunakan model pembelajaran yang didasarkan pada interaksi sosial dan transaksi[23]. Model pembelajaran interaksi sosial ini dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip:

- a) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam belajar
- b) Mendasarkan pada perbedaan individu
- c) Mengaitkan teori dengan praktik
- d) Mengembangkan komunikasi dan kerja sama dalam belajar
- e) Meningkatkan keberanian peserta didik dalam mengambil resiko dan belajar dari kesalahan
- f) Meningkatkan pembelajaran sambil berbuat dan bermain
- g) Menyesuaikan pelajaran dengan taraf perkembangan kognitif yang masih pada taraf operasi kongkrit.

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada seluruh aspek konstelasi kehidupan, tak terkecuali kompleksitas pada alam sebagai ruang bagi kehidupan manusia. Alam sebagai ruang kehidupan manusia, telah dianggap sebagai objek, sehingga didominasi dan dieksploitasi manusia secara radikal. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pemahaman manusia akan hakikatnya sebagai makhluk multidimensional yang salah satunya ialah memiliki relasi dalam ruang

dan waktu dengan alam, sehingga hal ini berimbas pada kesadaran manusia yang memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga keselarasan, keharmonisan alam yang terabaikan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu adanya sebuah upaya strategis untuk membangun paradigma baru guna menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam melalui proses Pendidikan berbasis ekopedagogik dalam menumbuhkan kesadaran ekologis dan karakter[24]. Sekolah sebagai lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap pembinaan karakter siswa, strategi untuk mencapainya dapat dilakukan melalui pembelajaran terpadu dapat diartikan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa[25].

Perencanaan pembelajaran sangat dibutuhkan kemampuan, keterampilan dan keahlian desainer pembelajaran untuk menganalisis situasi dan keadaan tertentu siswanya. Setiap siswa dan kelompok kelas memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda, sehingga perlakuan yang sama terhadap semua siswa dan kelompok kelas justru akan mengakibatkan kurang maksimalnya proses pembelajaran. Oleh karenanya salah satu tahap penting dalam proses perencanaan pembelajaran yang penting adalah melakukan analisis karakteristik siswa. Dimana karakteristik siswa di tingkat sekolah dasar itu berbeda dengan mereka yang berada pada tingkat sekolah menengah. Pola pikir, persepsi dan cara mengatasi masalah yang mereka tempuh sangat berbeda.

Pada masa anak-anak kecenderungan untuk melakukan imitasi kepada seseorang yang diidolakan sangat besar. Sementara para remaja ingin sekali diakui eksistensi mereka sebagai manusia yang utuh, dewasa dan dapat menentukan jalan hidup sendiri. Masa kanak-kanak adalah masa bermain dan belajar. Beban yang berat pada sekolah terkadang mengurangi hak-hak mereka untuk bermain. Sehingga yang terjadi mereka cenderung malas dan bosan pada saat belajar di dalam kelas, karena mereka menghadapi situasi pembelajaran yang nyaris sama. Oleh karenanya dalam tulisan ini akan membahas tentang pentingnya melakukan analisis kemampuan awal siswa dari perkembangan usia, fisik, psikomotorik, akademik,

dan sikap. Tahap ini dilakukan untuk menjamin bahwa program pembelajaran yang didesain sesuai dengan profil siswa yang akan menempuh proses pembelajaran[26]. Adapun ciri lain dari perkembangan karakter siswa SD di antaranya adalah:

1. Mampu merasakan kasih sayang.
2. Meniru sikap, nilai dan perilaku orang lain.
3. Menghargai, memberikan, dan menerima.
4. Mencoba memahami orang lain di lingkungan sekitar.
5. Anak mulai mengenal sopan santun.
6. Anak mengenal dan mempraktekkan aturan sekolah.
7. Anak mulai mengenal otoritas seperti anak mau diperintah.
8. Anak memahami aturan, norma, dan etika, seperti berdo'a sebelum memulai pelajaran.

Teknologi Informasi yang menjadi trending topik saat ini menjadi sebuah keharusan seluruh komponen masyarakat memanfaatkannya. Seluruh bidang berusaha meningkatkan eksistensi, managerial, administrasi, pemasaran dan brandingnya melalui optimalisasi teknologi informasi. Perkembangan saat ini masyarakat cenderung menggunakan teknologi multimedia dalam upaya menunjang pekerjaannya. Perkembangan teknologi Informasi sebagai bagian dari dunia pendidikan merupakan angin segar bagi guru dalam proses pengembangan kegiatan belajar mengajar. Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia juga merupakan alternatif yang sangat tepat dalam proses memaksimalkan kualitas pendidikan khususnya pembelajaran di sekolah dasar. Melalui pengembangan multimedia Indonesian *culture* dengan menggunakan perangkat lunak *Macromedia Flash 8* ini diharapkan mampu menambah proses pembentukan karakter siswa sekolah dasar dengan lebih mengenal secara audio visual kebudayaan yang ada di Negara tercinta Indonesia yang saat ini anak-anak kita mengalami kemerosotan dalam hal penghayatan nilai-nilai budaya Indonesia[27]. Pembelajaran daring menjadikan siswa lebih tanggap dengan adanya perkembangan teknologi sebagai sarana belajar secara mandiri, namun ada banyak kemudharatan adanya gadget menjadikan anak malas mengerjakan tugas di buku tulis juga mengurangi nilai disiplin karena asyiknya tampilan smartphone yang

menjadikan siswa lupa karena enggan membuka buku sebagai sarana belajar tematik sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada akhir pembelajarannya. Tantangannya bagaimana kegiatan ekstrakurikuler bisa tetap berjalan selama daring, tentukan butuh progress inovasi pembelajaran atau pelatihan yang menyenangkan.

Kesimpulan

Kajian penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila sejati sesuai profil pelajar Pancasila di jenjang sekolah dasar, dapat tergambar dalam proses pembelajaran di sekolah dasar diantaranya melalui kegiatan ekstrakurikuler Pramuka pada masa pembelajaran luring yang mengajarkan peserta didik mengenalkan dasadharma Pramuka yang menegaskan Pramuka itu. 1) bertakwa kepada Tuhan YME; yang dilakukan melalui pembiasaan berdoa pada setiap mengawali dan mengakhiri aktivitas, 2) cinta alam dan kasih sayang kepada sesama manusia; ini nampak pada aktivitas menjalin kerjasama dalam merapikan dan menjaga kebersihan sekolah melalui tugas piket yang dilakukan secara bergantian, 3) patriot yang sopan dan kesatria; menyapa dengan menundukkan kepala dan senyum yang dilakukan siswa pada sesama teman dan guru selama daring, 4) patuh dan suka bermusyawarah; yang disaksikan semua teman dan guru dalam memutuskan kelompok piket kebersihan, 5) rela menolong dan tabah; adanya Jumat Beramal yang dibiasakan setiap minggu sekali, 6) rajin, terampil dan gembira; sebagai wujud misi sekolah menjadi peserta didik yang tekun dalam belajar dan terus berlatih dengan suasana senang Bersama teman, 7) hemat, cermat, dan bersahaja; melalui pembiasaan menyisihkan sedikit uang jajan untuk menabung kegiatan outing kelas setiap akhir semester, 8) disiplin, berani, dan setia, 9) bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10) suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan; sebagai wujud berkebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan mandiri dalam profil pelajar Pancasila.

Referensi

- [1] F. Rokhman, M. Hum, A. Syaifudin, and Yuliati, "Character Education for Golden Generation 2045 (National Character Building for Indonesian Golden Years)," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 141, pp. 1161–1165, 2014, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.05.197.
- [2] I. Suyitno, "The Development of Education on the Character and Culture of," *J. Pendidik. Karakter*, vol. 2, no. February 2012, pp. 1–13, 2012.
- [3] T. T. Phan Hoang and T. Kato, "Measuring the effect of environmental education for sustainable development at elementary schools: A case study in Da Nang city, Vietnam," *Sustain. Environ. Res.*, vol. 26, no. 6, pp. 274–286, 2016, doi: 10.1016/j.serj.2016.08.005.
- [4] D. I. Yuanita, "Model Pengembangan Kurikulum Tematik Integratif Pendidikan Dasar," *J. Pemikir. Keislam.*, vol. 27, no. 1, pp. 188–208, 2016, doi: 10.33367/tribakti.v27i1.265.
- [5] Sabar Budi Raharjo, "Pendidikan Karakter sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia," *J. Pendidik. dan Kebud.*, 2010.
- [6] D. N. Gembongan, "Pengembangan Komik Pendidikan Karakter Kemandirian Di The Development Of Comic For Autonomy Character Education In Sekolah," pp. 354–365, 2018.
- [7] Z. Rahman Hakim and M. Utami Pratiwi, "Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Pada Mata Pelajaran Ips," *Jpsd*, vol. 2, no. 2, 2016.
- [8] Author 1, Author 2, and Author 3, "Title article," *Semin. Nas. Jambore Konseling 3*, vol. 00, no. 00, pp. XX–XX, 2017, doi: 10.1007/XXXXXX-XX-0000-00.
- [9] A. R. Setiawan, "Jurnal basicedu," *J. Basicedu*, vol. 3, no. 2, pp. 524– 532, 2019.
- [10] S. Rabiah, "Pengembangan Materi Ajar Bahasa Makassar berbasis Nilai-Nilai Karakter dan Kearifan Lokal di Sekolah Dasar Kota Makassar," pp. 1–18, 2018, doi: 10.31227/osf.io/s8uv5.

- [11] Sukring, "Pendidik dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta Didik (Analisis Perspektif Pendidikan Islam)," *Tadris J. Kegur. dan Ilmu Tarb.*, vol. 01, no. 1, pp. 69–80, 2016.
- [12] S. Adianto, M. Ikhsan, and S. Oye, *Proses Pembelajaran Kurikulum 2013*, vol. 7. 2020.
- [13] I. W. P. Utami, "Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal di Kelas IV SD Muhammadiyah 1 Kota Malang," *Elem. J. Prodi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin*, vol. 1, no. 1, pp. 18–25, 2019.
- [14] J. Andrew, S. Henry, A. N. Yudhisthira, Y. Arifin, and S. D. Permai, "Analyzing the factors that influence learning experience through game based learning using visual novel games for learning Pancasila," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 157, pp. 353–359, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.08.177.
- [15] J. K. Volume, "SAWABIQ : Jurnal Keislaman Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020 P-ISSN: e-ISSN:," vol. 1, pp. 1–11, 2020.
- [16] I. Anshori, "Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah," *Halaqah Islam. Educ. J.*, vol. 1, no. 2, p. 11, 2017, doi: 10.21070/halaqa.v1i2.1243.
- [17] B. P. Sakti, "Indikator Pengembangan Karakter Siswa Sekolah Dasar," *Magistra*, vol. 29, no. 101, pp. 1–10, 2018, doi: 10.31227/osf.io/pucw9.
- [18] Kemdikbud, "Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter: Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama," [Http://Kemdikbud.Go.Id/](http://Kemdikbud.Go.Id/), no. 021, p. , 2016, [Online]. Available: <http://kemdikbud.go.id/main/?lang=id>.
- [19] C. Kiu Cheung and T. Yan Lee, "Improving social competence through character education," *Eval. Program Plann.*, vol. 33, no. 3, pp. 255–263, 2010, doi: 10.1016/j.evalproplan.2009.08.006.
- [20] S. Muhamadi and A. Hasanah, "Penguatan Pendidikan Karakter Peduli Sesama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Relawan," *J. Pendidikan Agama Islam*, vol. 16, no. 1, pp. 95–114, 2019, doi: 10.14421/jpai.2019.161-06.

- [21] S. E. Andriani, I. Arifin, and A. Nurabadi, "Implementasi Program Penguatan Pendidikan," *J. Adm. dan Manaj. Pendidik.*, vol. 1, pp. 238–244, 2018.
- [22] Y. B. N. F. Hanifa Rizqi, "Hubungan Mata Pelajaran Pancasila Di Sekolah Terhadap Implementasi Pancasila Pada Pelajar," vol. 8719, no. 2006, 2010.
- [23] D. I. S. Dasar, "Pembelajaran Seni Budaya Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Membangun Pendidikan Karakter Siswa Di Sekolah Dasar," *Ritme*, vol. 2, no. 1, pp. 16–25, 2016.
- [24] H. Yunansah and Y. T. Herlambang, "Ecopedagogic Based Education in Raising Ecological Awareness and Developing Character in Elementary School Students," *EduHumaniora | J. Pendidik. Dasar Kampus Cibiru*, vol. 9, no. 1, p. 27, 2017.
- [25] Y. Z. Ansori, "Pembinaan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar," *J. Educ. FKIP UNMA*, vol. 6, no. 1, pp. 177–186, 2020.
- [26] P. Sifat *et al.*, "No Title." F. Ahmadi and Dkk, "Pengembangan Media Edukasi 'Multimedia Indonesian Culture' (Mic) Sebagai Penguatan," *J. Penelitian. Pendidik.*, vol. 34, no. 2, pp. 127–136, 2017



CHAPTER IV :

INTEGRASI SAINS MIKROSKOPIS MENGANTISIPASI VIRUS

Jaringan 5G dan Upaya Meningkatkan Konektivitas

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU ¹

Pengantar

Konvergensi teknologi telekomunikasi dan digital sejak 30 tahun lalu telah melahirkan internet bergerak (*mobile internet*), yang kala itu diawali dengan istilah generasi pertama atau 1G. Kemudian berkembang diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Pada era jaringan 3G, selain bisa menyalurkan sinyal telekomunikasi yang lebih baik, *mobile internet* juga sudah mampu mengirim data berupa konten multimedia serta streaming audio dan video dengan akses lebih cepat dari sebelumnya. Di masa 4G saat ini, daya akses *mobile internet* pun sudah semakin kencang.

Mobile internet dan teknologi pun telah menjadi salah satu faktor disrupsi penyebab perubahan peta dunia usaha, yang dipengaruhi perang antara pelaku usaha tradisional dengan pelaku usaha berbasis digital. Namun, meski 4G terbilang memiliki kecepatan yang cukup baik, teknologi tersebut ternyata masih belum mumpuni mendukung berbagai aplikasi dan terobosan inovasi terbaru yang ada sekarang. Tingginya latensi (jeda antara saat sinyal dikirim dengan tanggapan terhadap sinyal tersebut) menjadi masalah besar untuk aplikasi-aplikasi waktu nyata (*real time*), seperti pada permainan daring (*game online*), kendaraan otonom tanpa sopir, serta berbagai aplikasi interaktif seperti internet taktil. Hanya 5G yang dianggap bisa mengaktifkan internet taktil (teknologi berbasis indera peraba) dengan latensi singkat dan umpan balik yang terasa instan.

Jaringan 5G Menunjang Konektivitas

Dalam lima tahun terakhir, dengan semakin meluasnya cakupan 4G, porsi ekonomi digital semakin berkembang pesat, seiring dengan kemunculan perusahaan unicorn dan decacorn di Tanah Air.

¹ Akademi Bidang Ilmu Komputer dan Komisaris Independen PT Telkom Indonesia

Meski begitu, digitalisasi ekonomi Indonesia masih belum merata. Saat ini baru 86,8 persen desa yang dapat terjangkau oleh 4G, dengan kualitas jaringan bervariasi. Lebih dari 13 ribu desa belum dapat menikmati layanan 4G. Kondisi lebih buruk terjadi pada layanan pita lebar (*broadband*) untuk rumah (*fiber to the home/FTTH*), yang sampai saat ini baru dapat melayani kurang dari 10 juta rumah tangga. Mahalnya investasi dalam mendistribusikan kabel serat optik (*fiber optic*) ke rumah-rumah dan kondisi lanskap di lapangan yang menyulitkan penanaman kabelnya menjadi alasan utama.

Implementasi 5G diyakini dapat menjadi jawaban untuk semua permasalahan tersebut, termasuk bisa mendorong peningkatan penetrasi *broadband* ke rumah-rumah yang saat ini baru mencapai 15 persen dari total rumah tangga. Kecepatan 5G yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 100 kali lebih cepat dari 4G, akan sangat mendukung usaha meningkatkan konektivitas rumahan, baik pada layanan *mobile internet* maupun *broadband*. Itupun tidak hanya untuk keperluan menghadirkan hiburan digital beresolusi tinggi, tetapi juga berbagai aplikasi otomasi rumah, *virtual reality*, dan *smart city*. Pantas saja, berbagai negara maju seperti Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Spanyol, dan beberapa negara lain telah menggelar jaringan 5G ini, serta mendapatkan dampak peningkatan ekonomi yang signifikan.

Hanya, pengimplementasian 5G yang tergolong baru ini masih akan banyak menemui berbagai kendala. Ingat, jaringan 5G memerlukan alokasi spektrum frekuensi yang cukup lebar. Saat ini ketersediaan spektrum frekuensi rendah sangat terbatas, karena sudah banyak digunakan operator seluler dan satelit. Adapun pada spektrum frekuensi tinggi yang masih banyak tersedia, khususnya di gelombang milimeter (*millimeter wave*), memiliki kelemahan keterbatasan jarak. Sehingga pada frekuensi tinggi ini memerlukan koneksi pemancar dalam jarak yang sangat rapat, artinya biaya investasi maupun operasionalnya bakal sangat mahal. Tapi masalah tersebut bisa diatasi dengan pembangunan rekayasa jaringan yang

mengkombinasikan jaringan seluler sebagai penyalur akhir (*last mile*) dan jaringan *fiber optic* sebagai tulang punggung (*backbone*), sekaligus melengkapi pusat-pusat data terdistribusi (*distributed data center*) untuk transit konten.

Kombinasi antara jaringan *fiber optic* sebagai *backbone* dan jaringan *mobile internet* sebagai penyalur akhir merupakan cara yang paling masuk akal untuk meningkatkan persentase jangkauan dan cakupan 5G dengan cepat ke pengguna rumahan. Peningkatan penetrasi ini dianggap perlu karena akan berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi secara signifikan. Setiap peningkatan 10 persen dari cakupan akses terhadap internet akan berdampak positif 0,9-1 persen produk domestik bruto (PDB). Peningkatan penetrasi ini juga bisa mendorong ide-ide bisnis baru yang selama ini sulit diwujudkan karena sejumlah hambatan pada 4G.

Industri komputasi awan (*cloud computing*) misalnya, bisa menjadi lebih prospektif karena mampu mendukung kelahiran industri baru "layanan apa saja (*Everything-as-a-Service/ XaaS*)" yang hanya dibatasi oleh imajinasi dan kreativitas manusia. Platform-platform yang mendukung aktivitas bekerja atau belajar dari rumah selama pandemi ini akan semakin mudah dibuat sempurna, sehingga kantor, tempat belanja, pasar, atau sekolah akan marak berada di *cloud*. Yang lebih menarik, internet taktil yang didukung oleh 5G akan memungkinkan semua kegiatan sekolah dan belajar, termasuk kegiatan praktik, dilakukan secara daring (*online*) dengan sempurna. Bahkan, bisa jadi pembelajaran praktik dilakukan secara masif, seperti halnya pembelajaran teori pada kegiatan sekolah daring. Kualitas gaya belajar baru secara daring yang saat ini terjadi pun bisa semakin semakin lebih baik, sehingga ke depan benar-benar bisa membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa harus pergi ke sekolah atau kampus. Bagi dunia usaha *online* maupun industri digital, selain mendukung moda bekerja dari mana saja, jaringan 5G yang cepat dengan latensi mendekati 0 ms bakal mendukung otomasi yang masif.

Pekerjaan Rumah untuk Pengembangan 5G

Kita sudah membahas berbagai keuntungan dari pembangunan jaringan 5G. Untuk mewujudkan itu semua, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan para pemangku kepentingan. Sahat Hutajulu dan rekan-rekannya, dalam penelitian yang berjudul “*Two Scenarios for 5G Deployment in Indonesia*” menemukan beberapa hal yang harus dilakukan tersebut: pertama, pemerintah sebagai regulator perlu menetapkan regulasi terhadap pemakaian frekuensi radio untuk keperluan 5G ini. Jaringan 5G memerlukan lebar pita yang cukup besar, namun frekuensi tersebut sudah digunakan untuk berbagai keperluan yang tidak terkait dengan 5G oleh sejumlah pihak termasuk operator dan satelit. Tanpa penataan yang benar, investasi 5G tidak akan optimal akibat *bandwidth* yang ideal tidak tersedia. Diperlukan pula pengaturan izin penggunaan frekuensi 5G. Frekuensi yang sedikit ini juga tidak dapat dibagikan kepada terlalu banyak operator, sehingga alokasi frekuensi bagi masing-masing menjadi sangat kecil.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memungkinkan adanya penggunaan infrastruktur secara bersama-sama (*infrastructure sharing*) dalam bidang telekomunikasi. Bukan cuma pada infrastruktur pasif seperti menara atau kabel *fiber optic*, tetapi juga pada infrastruktur aktif seperti jaringan akses radio (*radio access network/RAN*). Lewat adanya kemungkinan *infrastructure sharing* ini maka frekuensi 5G yang sangat terbatas tidak perlu dibagi-bagi terhadap banyak pihak, sehingga porsi bagiannya tidak menjadi kecil-kecil. Melalui *infrastructure sharing*, frekuensi 5G bisa dibagi kepada dua atau tiga operator dengan syarat dapat digunakan bersama. Dengan pemakaian bersama ini, maka pemerintah juga harus menyiapkan berbagai regulasi: keamanan siber, penetapan harga untuk mencegah perang harga, serta integrasi *fixed broadband* dan *mobile broadband*. Aturan dan tata cara penggelaran jaringan 5G sudah harus segera disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penda penggunaannya. Selain

itu, pemerintah juga harus mulai mengakomodasi berbagai aplikasi 5G dalam rancangan-rancangan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi digital seperti *smart city*, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, pusat data, dan program ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan.

Kedua, para operator dan penyedia teknologi, perlu mengembangkan contoh penggunaan (*business case*) jaringan 5G yang spesifik sesuai dengan kondisi objektif Indonesia. Dengan skala spasial yang sangat lebar, besarnya jumlah penduduk, karakteristik pola pemakaian data dan Internet, jenis industri, serta bentuk industrialisasi Indonesia menjadikan kondisi objektifnya berbeda dengan negara-negara lain yang sudah mengimplementasikan 5G. Pengembangan contoh penggunaan yang sesuai akan membantu mendorong suksesnya komersialisasi 5G, sehingga juga menjamin keberlangsungan operator. Adapun bagi penyedia teknologi, menjalin kemitraan strategis jangka panjang dengan operator sangat diperlukan mengingat investasi 5G ini sangat mahal. Melalui kemitraan strategis dengan penyedia teknologi, operator dapat merampingkan biaya sehingga dapat menyediakan jaringan 5G bagi pelanggan di Indonesia dengan harga terjangkau. Rancangan perangkat keras terstandarisasi yang dapat saling tersambung (*interoperable*) dari penyedia teknologi juga penting untuk menekan biaya. Ini memerlukan keterbukaan serta kepatuhan terhadap standar-standar dari penyedia teknologi yang disepakati bersama dengan semua operator. Kemitraan strategis, khususnya dengan penyedia peralatan pelanggan (*customer-premises equipment*) memungkinkan harga peralatan yang mahal dapat disatukan dengan biaya langganan pemakaian.

Ketiga, pengguna layanan -- baik pemerintah, korporasi, maupun masyarakat -- perlu diedukasi bahwa 5G bukan sekedar untuk kesenangan dan kecanggihan. Pemerintah sebagai pengguna layanan pun perlu mempelajari berbagai literasi pengalaman terbaik penggunaan 5G dalam pengelolaan pemerintahan, misalnya untuk *smart city*, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas

hidup warganya. Bagi korporasi pengguna 5G harus mampu menciptakan ide-ide kreatif dalam memanfaatkan jaringannya, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Investasi jaringan 5G untuk industri adalah investasi jangka panjang, sehingga perlu melakukan kajian praktik terbaik dari berbagai negara yang sudah menerapkan 5G untuk industri mereka. Edukasi bagi pelanggan masyarakat umum juga tak boleh terabaikan, supaya mereka memahami dan dapat memanfaatkan jaringan 5G untuk peningkatan produktivitas serta kualitas hidup.

Hal yang tampak jelas masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, operator, penyedia teknologi, termasuk pelanggan sebagai pemangku kepentingan, dalam rangka pembangunan dan pengembangan jaringan 5G di Indonesia saat ini. Tugas bagi para pemangku kepentingan ini pun harus dilaksanakan sesegera mungkin, sehingga nantinya 5G bukan cuma sekadar teknologi baru, tetapi akan menjadi gerbang transformasi menuju ekonomi digital masa depan. Pembangunan jaringan 5G akan membawa bangsa kita ke era kehidupan serba digital yang lebih mumpuni, selaras dengan situasi saat ini yang didorong pandemi COVID-19. Adanya jaringan 5G sangat diharapkan mampu meningkatkan konektivitas guna menyongsong era ekonomi digital yang akan lebih cepat tumbuh, sehingga momentumnya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya.

Pembentukan Karakter Ilmiah Melalui Praktikum Mikrobiologi

Prof.Dr.Dra.Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes¹

Pengantar

Ilmu pengetahuan dihasilkan melalui proses yang sistematis berdasarkan rasio dan pembuktian sehingga karakter utama dari ilmu pengetahuan adalah rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya berdasarkan akal sehat dan akan selalu menggunakan logika untuk mengembangkan keilmuan. Empiris terletak pada kaidah pembuktian dan kejujuran karena ilmu akan berkembang pesat karena didukung sifat yang jujur, kejujuran sangat penting untuk mengembangkan suatu keilmuan. Sistematis yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di bangun berdasarkan langkah-langkah teratur yang dikenal dengan metode ilmiah. Syarat metode ilmiah adalah sistematis, konsisten dan operasional. Tahapan dalam metode ilmiah dimulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, melakukan percobaan dan analisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil penelitian..

Penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pertimbangan dalam bersikap dan bertindak. Sikap yang dilatihkan oleh guru atau dosen dapat digunakan sebagai sarana menanamkan nilai-nilai yang dapat membentuk karakter. Kegiatan praktikum merupakan salah satu bagian dari kegiatan belajar mengajar yang dapat mendorong terbentuknya karakter ilmiah.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman. Perguruan Tinggi memiliki peran strategis untuk menyiapkan lulusan yang kompeten dan siap berkarya untuk mengisi pembangunan negara Indonesia. Para

¹ Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

mahasiswa dituntut sebagai pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet serta berkarakter. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri[1].

Permendikbud No: 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi mengatur tentang kebijakan mengambil hak belajar 3 semester di luar prodi, sehingga memberi kebebasan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu. Program kegiatan kampus merdeka meliputi proyek kemanusiaan, magang praktek kerja, studi proyek independen, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, proyek Desa/KKN tematik, dan pertukaran pelajar [2].

Penelitian atau riset sebagai salah satu program kampus merdeka harus disiapkan sedini mungkin sehingga mahasiswa mampu melakukan penelitian, persiapan yang dilakukan adalah memilih metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat memfasilitasi kegiatan penelitian. Salah satu metode yang tepat untuk memfasilitasi kegiatan riset adalah metode eksperimen, dalam metode ini mahasiswa dilatih untuk melakukan kegiatan praktikum sehingga mahasiswa dikondisikan untuk melakukan kegiatan yang berdasarkan metode ilmiah, apabila mahasiswa sudah menguasai metode ilmiah maka akan mudah untuk melakukan penelitian. Kegiatan praktikum merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan sikap ilmiah karena kegiatan praktikum berdasarkan kaidah ilmiah.

Pada saat ini masih dalam situasi pandemi Covid 19 sehingga proses pembelajaran masih dilakukan secara online, untuk mata kuliah yang ada praktikumnya seperti mata kuliah mikrobiologi harus bisa dicari metode yang efektif dan efisien, salah satunya adalah memanfaatkan lingkungan sebagai media kegiatan praktikum

sehingga mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan praktikum di rumah dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sebagai laboratorium alam yang kaya dan dapat sebagai media belajar yang baik. Pokok bahasan mikrobiologi antara lain membahas tentang bakteri, bakteri hidupnya di tanah, udara, air dan makanan, sehingga kalau akan melakukan kegiatan praktikum tentang bakteri maka dapat memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar karena bakteri bisa diisolasi dari lingkungan.

Proses pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi harus dapat mengembangkan kompetensi dan karakter pada mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki kemampuan yang utuh selain pandai mereka juga memiliki karakter terutama karakter ilmiah karena mahasiswa sebagai kaum akademisi harus memiliki sikap ilmiah. Pembelajaran sains dapat membentuk karakter ilmiah karena dalam proses pembelajaran sains ini mengacu pada kaidah ilmiah. Pembelajaran sains akan memiliki kontribusi dalam pembentukan keterampilan kerja ilmiah, sikap ilmiah dan kemampuan kerja ilmiah.

Karakter memiliki arti tabiat, watak atau sifat-sifat kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan dengan orang lain [3]. Karakter sebagai watak berbeda dengan perilaku. Karakter yang di maksud dalam pokok bahasan ini adalah karakter ilmiah yaitu karakter yang menggunakan, mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan kaidah ilmiah. Karakter dapat terbentuk melalui pengkondisian, salah satu alternatif yang dapat digunakan membentuk karakter ilmiah adalah melalui kegiatan praktikum. Pembentukan karakter ilmiah sangat penting untuk mahasiswa di semua bidang studi.

Pada penelitian terdahulu telah dibahas tentang keterampilan sains yang dapat mendorong terbentuknya sikap ilmiah, muatan karakter dalam keterampilan sains, serta proses keterampilan sains yang mendorong keterampilan ilmiah[4][5][6]. Pada penelitian ini menekankan pada pembentukan karakter ilmiah melalui kegiatan praktikum pada mata kuliah mikrobiologi. Pada penelitian ini

diharapkan ditemukan keterampilan kerja ilmiah dan kemampuan kerja ilmiah setelah mahasiswa melakukan kegiatan praktikum karena merupakan indikator untuk mengukur terbentuknya karakter ilmiah.

Pembentukan karakter dapat dikondisikan dan dibiasakan, dalam proses pembelajaran selain kompetensi lulusan karakter memegang peranan yang sangat penting, apalagi di era global karakter menjadi penciri untuk peradaban bangsa bila karakter bangsa itu baik maka menunjukkan tingginya peradaban bangsa. Kerja keras, disiplin, jujur merupakan bagian dari karakter yang harus dibentuk dalam diri siswa atau mahasiswa selama menempuh pembelajaran, karena karakter terkait dengan sikap dan perilaku maka harus dilatih dan dibiasakan sehingga sifat tersebut menjiwai dalam diri peserta didik. Pendidik harus dapat memilih model pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mendorong terbentuknya karakter peserta didik.

Pemahaman tentang konsep mikroba bagi mahasiswa masih banyak kelemahan karena bentuknya yang mikro dan mahasiswa sering merasa tidak bisa melihat secara langsung, sehingga banyak yang beranggapan konsep tentang mikroba adalah abstrak dan sulit untuk dipelajari, hal ini menjadikan mahasiswa malas, aktivitas dalam mengikuti perkuliahan menurun yang berdampak pada hasil belajar mahasiswa maka perlu dicari solusi pembelajaran yang membuat mahasiswa aktif dan dapat menemukan konsep sendiri tentang mikroba dalam perspektif makroskopis sehingga mahasiswa dapat melihat langsung koloni mikroba tersebut dan tidak lagi menganggap hal yang abstrak serta hanya dengan menggunakan mikroskop untuk mempelajari mikroba. Pembelajaran yang dinilai dapat dijadikan alternatif untuk membentuk karakter ilmiah adalah praktikum mikrobiologi karena praktikum mikrobiologi hanya bisa dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah [7]. Model pembelajaran biologi secara eksperimen dengan kegiatan praktikum merupakan model pembelajaran yang dapat mendorong terbentuknya keterampilan kerja ilmiah dan kemampuan kerja ilmiah yang merupakan indikator terbentuknya karakter ilmiah. Tujuan penelitian ini untuk

mendeskripsikan karakter ilmiah yang terbentuk melalui praktikum mikrobiologi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan selama 8 kali tatap muka bulan maret sampai bulan mei 2021 yang dilakukan dengan memberikan materi mikrobiologi secara online kemudian memberikan tugas praktikum isolasi koloni bakteri di lingkungan. Subyek penelitian adalah mahasiswa pendidikan biologi semester VI Unirow Tuban T.A. 2021/2022 yang menempuh mata kuliah mikrobiologi sebanyak 11 orang. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah membuat instrumen untuk keterampilan kerja ilmiah dan kemampuan kerja ilmiah lalu membuat lembar angket melalui google form yang sesuai dengan indikator terbentuknya karakter ilmiah. Indikator keterampilan kerja ilmiah meliputi kemampuan merencanakan penelitian, mengembangkan pertanyaan penelitian, melakukan tinjauan pustaka, merancang eksperimen, memilih instrument, mengembangkan instrumen dan pengumpulan data survei. Indikator kemampuan kerja ilmiah meliputi : kemampuan observasi, kemampuan mengajukan pertanyaan, kemampuan mengajukan hipotesis, kemampuan mengumpulkan data sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan, kemampuan merumuskan kesimpulan berdasarkan data.

Pembahasan

Program riset merupakan salah satu program kampus merdeka yang sangat penting. Kegiatan Kegiatan riset akademik baik sosial maupun humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Kegiatan riset akademik ini dapat melatih mahasiswa untuk melakukan kegiatan berdasarkan kaidah ilmiah. Mahasiswa harus mempersiapkan diri mempelajari kaidah ilmiah sebelum melakukan riset. Dalam kaidah ilmiah tidak terlepas dari metode ilmiah yang sudah memiliki tahapan tertentu dan sistematis. Mahasiswa harus memiliki kemampuan merumuskan masalah, merumuskan hipotesa, melakukan eksperimen, mencari dan

mengolah data serta menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Kemampuan ini harus dilatih secara kontinyu sehingga mahasiswa dapat melakukan kegiatan riset secara mandiri. Dampak kegiatan riset ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa secara ilmiah.

Sains khususnya biologi merupakan pembelajaran yang seluruh aspek pembelajarannya bertumpu pada proses ilmiah, seperti kegiatan praktikum, mengamati, menganalisis, dan lain-lain. Keterampilan proses sains merupakan salah satu proses ilmiah, pendekatan keterampilan proses sains mengarahkan bahwa untuk menemukan pengetahuan memerlukan suatu keterampilan mengamati, melakukan eksperimen, menafsirkan data, mengkomunikasikan gagasan, dan sebagainya [5]. Kegiatan praktikum ini dikenal juga sebagai model pembelajaran inkuiri dimana siswa dituntut untuk dapat menemukan dan memecahkan masalah dengan kaidah ilmiah [6]. Mikrobiologi merupakan bagian dari disiplin biologi sehingga dalam proses pembelajaran mikrobiologi mengacu pada proses pembelajaran sains. Mikrobiologi adalah salah satu matakuliah wajib bagi mahasiswa biologi semester VI termasuk dalam mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK). Proses keilmuan didapatkan melalui pemberian teori pada kegiatan perkuliahan dan proses keterampilan diperoleh melalui kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum selain memberikan keterampilan juga melatih kemampuan aspek psikomotor sehingga mahasiswa selain terampil juga bisa mengembangkan aspek psikomotor.

Keterampilan proses sains adalah keterampilan dasar yang memfasilitasi pembelajaran dalam ilmu sains, memungkinkan siswa untuk aktif, mengembangkan rasa tanggung jawab, meningkatkan pembelajaran dan metode penelitian. Keterampilan proses sains adalah suatu keterampilan seseorang dalam menggunakan pikiran, nalar dan perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu. Indoshi *et. al* [8] berpendapat bahwa keterampilan proses sains membantu siswa untuk mengembangkan rasa tanggung

jawab dalam pembelajaran serta meningkatkan betapa pentingnya metode penelitian dalam proses pembelajaran.

Keterampilan proses merupakan keterampilan yang kompleks yang digunakan ilmuwan dalam melakukan penelitian ilmiah. Menurut Bundu [9] aspek keterampilan proses meliputi: keterampilan observasi, mengklasifikasi, berkomunikasi, memprediksi, menginferensi, merumuskan hipotesis, menginterpretasi, mengendalikan variabel dan keterampilan merancang eksperimen. Pendekatan keterampilan proses sains mengacu pada kaidah ilmiah yang berlaku. Keterampilan proses sains akan mendorong mahasiswa untuk memiliki keterampilan kerja ilmiah, kemampuan kerja ilmiah dan sikap ilmiah. Keterampilan kerja ilmiah menitikberatkan pada keterampilan mahasiswa untuk melakukan kerja ilmiah, kemampuan kerja ilmiah menitikberatkan pada kemampuan untuk memahami bagaimana untuk melakukan kerja ilmiah, sikap ilmiah menitikberatkan pada sikap ilmiah mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmiah. Proses pembelajaran mikrobiologi dengan model pembelajaran eksperimen dengan metode praktikum diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kerja ilmiah dan keterampilan kerja ilmiah sebagai indikator terbentuknya karakter ilmiah.

Sel mikroba memiliki ukuran yang sangat kecil, banyak mikroba yang terdiri dari satu sel saja (uniseluler), sehingga semua tugas kehidupannya dibebankan pada sel itu. Mikroba ada yang mempunyai banyak sel (multiseluler). Pada jasad multiseluler umumnya sudah terdapat pembagian tugas antara sel atau kelompok selnya, walaupun organisasi selnya belum sempurna[7].

Mikroba di alam secara umum berperanan sebagai produsen, konsumen, maupun reducen sehingga sering disebut sebagai omnivore. Jasad produsen menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik dengan energi sinar matahari. Jasad reducen menguraikan bahan organik dan sisa-sisa jasad hidup yang mati menjadi unsur-unsur kimia (mineralisasi bahan organik), sehingga di alam terjadi

siklus unsur-unsur kimia. Contoh mikroba reduksen adalah bakteri dan jamur (fungi).

Pemahaman merupakan perangkat baku program pendidikan yang merefleksikan kompetensi dan pemahaman muncul dari hasil evaluasi dan refleksi diri sendiri [7]. Pemahaman tentang konsep mikroba bagi mahasiswa masih banyak kelemahan karena bentuknya yang mikro dan mahasiswa sering merasa tidak bisa melihat secara langsung, sehingga banyak yang beranggapan konsep tentang mikroba adalah abstrak dan sulit untuk dipelajari, hal ini menjadikan mahasiswa malas, aktivitas dalam mengikuti perkuliahan menurun yang berdampak pada hasil belajar mahasiswa. Sehingga perlu dicarikan solusi untuk memahami pengetahuan dan membentuk karakter ilmiah. Pembentukan karakter ilmiah ini bisa dikondisikan melalui kegiatan praktikum mikrobiologi karena kegiatan praktikum mikrobiologi ini berdasarkan kaidah ilmiah yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Karakter Ilmiah

Di era globalisasi karakter ilmiah sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan peradaban bangsa sehingga harus mendapat perhatian yang serius oleh lembaga pendidikan terutama mulai di pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi karena sebagai pencetak ilmuwan. Sehingga proses pendidikan tidak hanya menekankan pada penguasaan knowledge tapi juga pada karakter. Penanaman karakter memerlukan suatu proses karena terkait dengan nilai-nilai yang tertanam pada diri individu untuk membentuk suatu karakter. Karakter merupakan tabiat atau watak yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan dengan orang lain.

Tingkah laku manusia merupakan respon dari stimulus yang diberikan oleh lingkungan, respon ini akan dipertahankan selama stimulus yang diberikan merupakan hal yang menyenangkan atau dapat menghindarkan individu dari masalah [3]. Karakter dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk

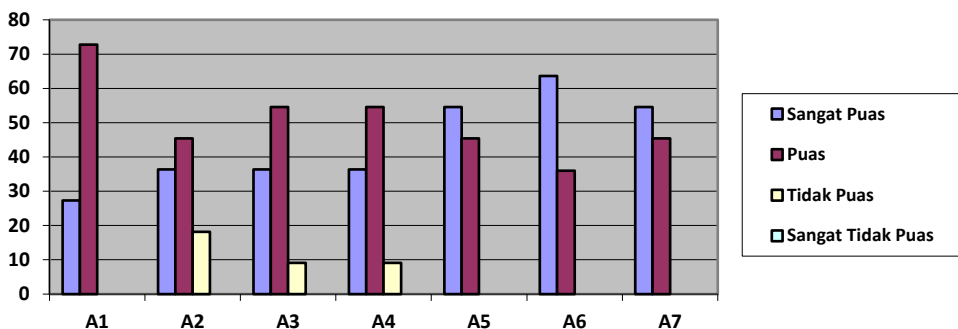
baik karena pengaruh hereditas maupun lingkungan yang membedakan dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari[3].

Pembelajaran sains dapat mengembangkan karakter ilmiah, dengan memasukkan dalam pembelajaran sains dengan model pembelajaran eksperimen melalui kegiatan praktikum maka akan mendukung dalam pembentukan karakter ilmiah. Karakter ilmiah dapat dikondisikan melalui kegiatan praktikum. Penilaian hasil belajar sains dianggap lengkap bila mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Aspek sikap merupakan tingkah laku yang bersifat umum yang dilakukan oleh mahasiswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Karakter ilmiah memiliki peran yang penting dalam menanamkan konsep sains dan konsep sains ini dapat ditemukan dengan melakukan kegiatan praktikum.

Mahasiswa dapat membangun gagasan baru sewaktu melakukan kegiatan praktikum, tapi juga pada kemampuan mahasiswa pada obyek yang dijadikan praktikum. Bila mikroba sebagai obyek praktikum maka mahasiswa harus memiliki pemahaman tentang mikroba tersebut sebelum melakukan kegiatan praktikum. Karakter ilmiah dibedakan dari sekedar sikap terhadap sains karena sikap terhadap sains hanya terpusat pada mahasiswa apakah suka atau tidak suka terhadap pembelajaran sains. Sikap yang positif terhadap pembelajaran sains akan memiliki kontribusi yang tinggi pada pembentukan karakter ilmiah[6].

Pembentukan karakter ilmiah ini bisa dikondisikan dengan kegiatan ilmiah seperti kegiatan praktikum. Dalam kehidupan di kampus kegiatan praktikum merupakan kegiatan yang bisa mempercepat terbentuknya karakter ilmiah karena kegiatan praktikum mengacu pada kaidah ilmiah yaitu rasional, empiris dan sistematis. Pada kegiatan praktikum mahasiswa dikondisikan dan dibiasakan untuk melakukan berbagai aktivitas ilmiah seperti melakukan kegiatan menemukan dan merumuskan masalah, melakukan observasi, merumuskan hipotesis, merancang riset,

melakukan observasi, mencari dan mengolah data dan menarik kesimpulan. Aktivitas ilmiah ini secara perlahan akan membentuk karakter ilmiah yang indikatornya pada terbentuknya keterampilan kerja ilmiah dalam penelitian yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



Gambar 1. Keterampilan Kerja ilmiah Dalam Melakukan Penelitian

Berdasarkan Gambar 1 hasil pengukuran per item menunjukkan bahwa indikator keterampilan melakukan penelitian terdiri atas 7 item indikator penilaian yaitu Kemampuan merencanakan penelitian (A1), Mengembangkan pertanyaan penelitian (A2), Melakukan tinjauan pustaka (A3), Merancang eksperimen (A4), Memilih instrument (A5), Mengembangkan instrumen (A6), dan Pengumpulan data survey (A7). Berdasarkan hasil sebaran angket diketahui bahwa A5, A6 dan A7 menunjukkan frekuensi hasil yang hampir sama, frekuensi tertinggi adalah A6 dengan rata-rata 63,6% mahasiswa sangat puas dalam mengembangkan instrumen, memilih instrumen 54,5%, dan mahasiswa mampu mengumpulkan data 54,5% sedangkan pada A1 mahasiswa puas dengan kemampuan merencanakan penelitiannya dengan angka 72,8%. A2 dan A3 menunjukkan frekuensi yang sama dengan angka sangat puas 36,4%, puas 54,5% dan 9,1% tidak puas dalam melaksanakan tinjauan pustaka dan merancang eksperimen sedangkan hasil A2 menunjukkan bahwa mahasiswa sangat puas

36,5%, puas 45,5% dan tidak puas 18,2% dalam merumuskan rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa mahasiswa cenderung mampu memilih dan mengembangkan instrumen serta mampu menganalisis dan mengumpulkan data. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan merumuskan masalah dan tinjauan pustaka. Dari hasil penelitian ini kegiatan praktikum dapat membentuk karakter ilmiah yang ditunjukkan dari keterampilan kerja ilmiah dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian ini sejalan pendapat Dimiyati [10] dan Agustina, dkk [11] yang menyatakan bahwa aspek mengamati merupakan aspek dasar keterampilan proses sains yang dimiliki seseorang, maka dari hasil penilaian aspek mengamati menunjukkan bahwa dasar keterampilan proses sains yang dimiliki mahasiswa sudah baik. Bila mahasiswa telah memiliki keterampilan proses sains dengan baik maka berdampak pada keterampilan kerja ilmiah karena aspek dalam proses sains memiliki indikator yang tercakup dalam keterampilan kerja ilmiah seperti keterampilan melakukan observasi, keterampilan melakukan penelitian, dan lain-lain yang mana keterampilan ilmiah ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan karakter ilmiah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Indoshi *et.al* [8] dan meningkatkan pentingnya metode penelitian dalam proses pembelajaran

Praktikum Mikrobiologi

Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai organisme yang berukuran mikroskopis. Sedemikian kecilnya sehingga keberadaan mereka hanya dapat dilihat dengan alat yang disebut mikroskop. Dunia mikroorganisme terdiri dari lima (5) kelompok organisme, yaitu: bakteri, protozoa, virus, algae serta cendawan (jamur) mikroskopik. Dengan demikian lingkup mikrobiologi meliputi Bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri, Virologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus, Mikologi yaitu ilmu yang

mempelajari tentang jamur dan algae dan Parasitologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang Parasit [12].

Sel organisme terdiri atas dua golongan utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua tipe sel secara kimiawi adalah serupa, yakni sama-sama memiliki asam nukleat, protein, lipid, dan karbohidrat. Kedua tipe sel tersebut juga menggunakan reaksi kimia yang sama untuk memetabolisme makanan, membentuk protein, dan menyimpan energi. Perbedaan sel prokariotik dari sel eukariotik adalah struktur dinding sel, membran sel, serta tidak adanya organel, yaitu struktur seluler yang terspesialisasi yang memiliki fungsi-fungsi spesifik. Bakteri umumnya berbentuk 1-sel atau sel tunggal atau uniseluler, tidak mempunyai klorofil berkembangbiak dengan pembelahan sel atau biner. Karena tidak mempunyai klorofil, bakteri hidup sebagai jasad yang saprofitik ataupun sebagai jasad yang parasitik. Tempat hidupnya tersebar di mana-mana, yaitu di udara, di dalam tanah, di dalam air, pada bahan-bahan, pada tanaman ataupun pada tubuh manusia atau hewan [13].

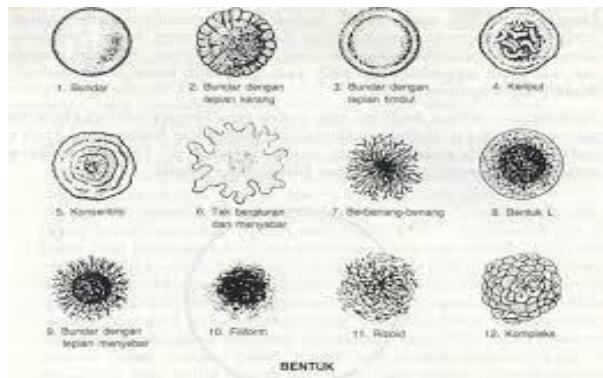
Penemuan tentang beberapa prosedur laboratorium mempunyai dampak luar biasa terhadap perkembangan mikrobiologi. Prosedur laboratorium tersebut antara lain prosedur untuk mewarnai bakteri agar mudah diamati dan teknik untuk membiakkan mikroba di laboratorium. Salah satu teknik untuk membiakkan adalah dengan penggunaan media. Media adalah suatu substrat untuk menumbuhkan bakteri yang menjadi padat dan tetap tembus pandang pada suhu inkubasi. Pada awalnya digunakan gelatin, tetapi akhirnya dianggap tidak memadai karena pada suhu ruang gelatin akan menjadi cair. Kentang dan wortel juga ditinggalkan karena kandungannya kurang nutrien untuk mikroba. Masalah ini teratasi dengan adanya ekstrak ganggang laut yang dinamai agar-agar (agar) yang dapat dilarutkan dalam larutan nutrien dan bila menjadi gel akan tetap berbentuk padat[13].

Praktikum mikrobiologi yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara praktek

terkait dengan pokok bahasan mikrobiologi. Praktikum mikrobiologi ini mengacu pada kaidah ilmiah yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional mengandung makna kegiatan praktikum ini logis dan bisa diterima dengan akal sehat sehingga kegiatan praktikum ini dapat mengembangkan pola pikir ilmiah. Empiris adalah kemampuan membuktikan dan mengandung kaidah kejujuran yang sangat dipentingkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sistematis mengandung makna berdasarkan metode ilmiah yaitu kemampuan untuk merumuskan masalah, merumuskan hipotesa, merancang penelitian, mencari dan mengolah data dan menarik kesimpulan. Dalam praktikum mikrobiologi pokok bahasan isolasi koloni bakteri mahasiswa mempelajari tentang morfologi koloni bakteri dan mengidentifikasi karakteristik koloni bakteri tersebut yang dilihat secara makroskopis. Morfologi makroskopis yaitu bentuk bakteri dengan mengamati karakteristik koloninya pada lempeng agar. Karakteristik koloni dibedakan atas dasar bentuk koloni, ukuran koloni, pinggiran (margin koloni), peninggian (elevasi), warna koloni, permukaan koloni, konsistensi dan pigmen yang dihasilkan koloni. Populasi bakteri tumbuh sangat cepat ketika mereka ditambahkan dan disesuaikan dengan gizi dan kondisi lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Melalui pertumbuhan ini, berbagai jenis bakteri kadang memberi penampilan yang khas. Beberapa koloni mungkin akan berwarna, ada yang berbentuk lingkaran, sementara ada yang bentuknya tidak teratur. Koloni bakteri mempunyai ciri yang berbeda-beda tergantung jenisnya dan mediumnya.

Bentuk koloni bakteri ada yang sirkuler (bulat bertepi) ireguler (tidak beraturan, bertepi) dan yang rhizoid (berbentuk seperti akar dan pertumbuhannya menyebar. Sedangkan dilihat dari tepi atau pinggirannya, koloni bakteri ada yang memiliki tepi yang rata (entire), tepi yang berlekuk (lobate). Tepi yang bergelombang (undulate), tepi yang bergerigi (serrate) dan tepi yang menyerupai benang (filamentous). Jika dilihat dari elevasi atau ketinggian pertumbuhan koloni bakteri, maka bentuk koloni dapat dibedakan menjadi : Koloni

flat, jika ketinggian tidak terukur, nyaris rata dengan medium, raised : ketinggian nyata terlihat, namun rata pada seluruh permukaan, convex, peninggian koloni berbentuk cembung seperti tetesan air dan umbonate jika peninggian koloni berbentuk cembung di bagian tengah lebih menonjol[13] Berikut gambar macam bentuk, tepian dan elevasi bakteri.



Gambar 2. Macam bentuk, tepian dan elevasi bakteri
(Sumber: <http://robi-biologi.blogspot.com/2016/09/koloni-bakteri.html>)[14]

Praktikum mikrobiologi ini selain mampu meningkatkan pemahaman konsep mikrobiologi juga dapat membentuk karakter ilmiah seperti pada gambar 1. Praktikum mikrobiologi dalam penelitian ini adalah isolasi koloni bakteri di lingkungan. Mahasiswa diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang materi isolasi koloni bakteri kemudian diberikan tugas untuk melakukan kegiatan praktikum mikrobiologi. Dalam kegiatan praktikum ini mahasiswa dilatih untuk merumuskan masalah, merumuskan hipotesa, merancang riset, mencari dan mengolah dan menarik kesimpulan. Profil karakter ilmiah yang terbentuk dalam kegiatan praktikum ini dilihat dari indikator kemampuan kerja ilmiah yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Profil Kemampuan Kerja Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Biologi Pada Kegiatan Praktikum Mikrobiologi

No	Indikator Observasi	Skor *				Total
		1	2	3	4	
1	Kemampuan observasi	0(0%)	0(0%)	3(27,27%)	8(72,73%)	11(100%)
2	Kemampuan mengajukan pertanyaan	1(9,09%)	3(27,27%)	2(18,18%)	5(45,45%)	11(100%)
3	Kemampuan mengajukan hipotesis	4(36,36%)	3(27,27%)	2(18,18%)	2(18,19%)	11(100%)
4	Kemampuan mengimpulkan data sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan	0(0%)	0(0%)	7(63,64%)	4(36,36%)	11(100%)
5	Kemampuan merumuskan kesimpulan berdasarkan data	2(18,18%)	2(18,18%)	2(18,18%)	4(36,36%)	11(100%)

* Skor 1 = sangat kurang skor 2 = kurang skor 3= baik
skor 4= sangat baik

Pada tabel 1 profil kemampuan kerja ilmiah mahasiswa pendidikan biologi dalam kegiatan praktikum mikrobiologi tersebut pada umumnya berkategori baik dan yang sangat baik pada kemampuan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan kerja ilmiah (gambar 1) dan profil kemampuan kerja ilmiah (Tabel 1) merupakan indikator terbentuknya karakter ilmiah selama melakukan kegiatan praktikum mikrobiologi. Pada semua aspek kerja ilmiah pada umumnya dalam kategori baik dan dalam kemampuan observasi

dalam kategori sangat baik (72,73%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hamdiyanti dan Kusnadi [15] bahwa terjadi peningkatan pada keterampilan proses sains pada pembelajaran yang berbasis kerja ilmiah pada mata kuliah mikrobiologi, penelitian Utama, dkk, [16] menyatakan terdapat perbedaan kemampuan keterampilan berpikir kritis dan kinerja ilmiah antara siswa yang mengikuti model pembelajaran inkuiri dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung. Sedangkan Jumarni dkk [17] menyatakan model pembelajaran inkuiri yang terbimbing dapat meningkatkan rata-rata keterampilan proses sains 62,93%. Penerapan pembelajaran kontekstual dengan metode praktikum akan sangat membantu dosen untuk menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membentuk hubungan antara pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan pemaknaan sebuah pembelajaran akan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar mahasiswa karena pemahaman terhadap konsep lebih meningkat, seperti dikemukakan oleh Yulaelawati [18]. Dari data tersebut keterampilan kerja ilmiah dan kemampuan kerja ilmiah berdampak positif pada pembentukan karakter ilmiah.

Pembentukan Karakter Ilmiah Melalui Praktikum Mikrobiologi

Pada era globalisasi peningkatan kualitas pendidikan sangat diperlukan terutama di perguruan tinggi karena proses pembelajaran ini tidak hanya sekedar luasnya pengetahuan yang diberikan dosen kepada mahasiswa tapi juga bagaimana mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh sebagai bekal mahasiswa dalam bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau menciptakan pekerjaan setelah mahasiswa lulus dalam menempuh studi di perguruan tinggi [7]. Selain kompetensi mahasiswa perlu mengembangkan sikap, perilaku dan keterampilan. Penajaman kurikulum harus dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat, capaian pembelajaran lulusan harus dirumuskan dengan baik karena menjadi dasar untuk capaian mata kuliah dan capaian sub mata kuliah sehingga pokok dan kajian mata kuliah bisa disusun dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi harus dilengkapi surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat aspek sikap, pengetahuan, keterampilan dan prestasi mahasiswa selama menempuh studi. Sikap ini mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan di standar nasional pendidikan tinggi yang bisa di kembangkan dalam perilaku mahasiswa sehingga mendorong terbentuknya suatu karakter.

Perkembangan dan lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang akan berdampak pada segala aspek apalagi sekarang memasuki era global dimana perubahan sangat cepat dan dinamis . Saat ini masih dalam kondisi COVID 19 yang di berlakukan protokol kesehatan yang merubah model pembelajaran tatap muka (luring) menjadi pembelajaran online (daring), hal ini menuntut inovasi dan kreativitas dalam menentukan model pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran secara online mahasiswa harus dilibatkan secara aktif sehingga terjadi interaksi yang baik antara peserta didik dan pendidik. Pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan dapat mengikuti materi pelajaran yang diberikan dengan baik. Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta didik harus dilibatkan secara langsung, salah metode belajar yang melibatkan secara langsung peserta didik agar memperoleh pengalaman adalah kegiatan praktikum, karena dalam kegiatan praktikum ini peserta didik harus

melakukan kegiatan secara langsung terhadap obyek praktikum tersebut.

Model pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses perkuliahan, pemilihan model yang tepat akan berdampak pada peningkatan proses hasil belajar. Pembelajaran di perguruan tinggi diperlukan model pembelajaran yang dapat menantang mahasiswa untuk berpikir aktif dan kreatif serta melatih mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah[19].

Proses pembelajaran selain bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan juga membentuk karakter sehingga tidak hanya dari segi knowledge tetapi penanaman karakter sangat diperlukan terutama karakter ilmiah.

Karakter ilmiah sangat diperlukan di era global untuk meningkatkan peradaban bangsa baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Pembentukan karakter ilmiah bisa dilakukan melalui pengkondisian dan pembiasaan, karakter ilmiah merupakan tabiat atau watak yang berdasarkan kaidah ilmiah yang bisa diukur dari indikator keterampilan kerja ilmiah (gambar 1) dan kemampuan kerja ilmiah (tabel 1) dari keterampilan kerja ilmiah bisa dilihat dari indikator kemampuan merencanakan penelitian, mengembangkan pertanyaan penelitian, melakukan tinjauan pustaka, merancang eksperimen, memilih instrumen, mengembangkan instrumen, dan pengumpulan data survei. Sedangkan kemampuan kerja ilmiah dapat diukur dari indikator kemampuan kerja ilmiah yang meliputi kemampuan observasi, kemampuan mengajukan pertanyaan, kemampuan mengajukan hipotesis, kemampuan mengumpulkan data sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, dan kemampuan merumuskan kesimpulan berdasarkan data.

Jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad renik. Jasad renik disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil, sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Mata

biasa tidak dapat melihat jasad yang ukurannya kurang dari 0,1 mm. Ukuran mikroba biasanya dinyatakan dalam mikron (μ), 1 mikron adalah 0,001 mm. Sel mikroba umumnya hanya dapat dilihat dengan alat pembesar atau mikroskop, walaupun demikian ada mikroba yang berukuran besar sehingga dapat dilihat tanpa alat pembesar [7]. Peranan mikroba dalam kehidupan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Mikroorganisme yang menguntungkan ini dimanfaatkan di bidang makanan, minuman, pertanian dan kesehatan. Pada bidang makanan dan minuman mikroba membantu dalam proses pembuatan makanan dan minuman melalui fermentasi. Contoh produk makanan dan minuman hasil fermentasi yaitu anggur, keju, dan yogurt. Selain itu mikroorganisme juga dapat dimanfaatkan dalam penanganan limbah melalui bioremediasi. Contohnya yaitu mendegradasi limbah sulfat dari bekas tambang.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik dari unsur biotik maupun abiotik, yang memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Unsur unsur penyusun lingkungan saling berinteraksi membentuk suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan. Salah satu unsur biotik dalam lingkungan yang sering tidak disadari oleh manusia adalah adanya mikroba, hal ini mungkin dikarenakan mikroba adalah makhluk hidup tidak kasat mata.

Keberadaan mikroba, khususnya bakteri bisa sangat luas menginvasi lingkungan manusia. Bakteri bisa hidup bebas di udara, di air, di tanah dan menempel pada benda benda di sekitar kita. Bakteri juga bisa hidup pada kondisi fisik dan kimia lingkungan yang beragam. Berdasarkan manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain, bakteri ada yang bersifat menguntungkan dan ada yang bersifat merugikan (patogen). Untuk bisa melakukan pengamatan terhadap bakteri, maka bakteri perlu diisolasi. Isolasi bakteri dilakukan dengan membiakkan atau menumbuhkan bakteri dalam suatu media. Menumbuhkan bakteri dalam media pertumbuhan sudah umum dilakukan di laboratorium untuk keperluan penelitian atau pembuatan

kultur murni bakteri. Pembuatan media pertumbuhan bakteri di luar laboratorium juga sangat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk memenuhi persyaratan kecukupan nutrisi suatu media agar dapat digunakan untuk mengisolasi dan menumbuhkan bakteri.

Salah satu jenis media yang umum digunakan untuk mengisolasi bakteri adalah media NA (*Nutrient Agar*). Sebuah penelitian dengan judul “komparasi media NA pabrikan dengan media NA modifikasi untuk pertumbuhan bakteri”, dengan menggunakan sumber proteinnya dari ekstrak daging, daging yang digunakan untuk membuat media ini adalah daging ayam broiler, ayam buras, kambing gibus, dan sapi lokal. Hasil penelitian Septian et al [20] media NA modifikasi dengan tingkat pertumbuhan bakteri yang paling baik. Hasil penelitian serupa dari Studi Morfologi Koloni Bakteri Udara Di Lingkungan Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang diteliti oleh Ahmad Walid, dkk [21] didapatkan hasil hampir seluruh koloni berbentuk dasar bulat, tepian rata, berombak, tidak beraturan, berbentuk seperti benang, dan elevasinya rata, timbul dan cembung, dengan warna putih susu dan putih kekuningan.

Pemahaman tentang konsep mikroba bagi mahasiswa masih banyak kelemahan karena bentuknya yang mikro dan mahasiswa sering merasa tidak bisa melihat secara langsung, sehingga dalam mata kuliah mikrobiologi perlu dilakukan kegiatan praktikum mikrobiologi. Pada penelitian ini kegiatan praktikum mikrobiologi yang dilakukan pada pokok bahasan isolasi koloni bakteri. Dalam kegiatan praktikum ini mahasiswa setelah mendapatkan penjelasan materi, pertama-tama menyiapkan alat dan bahan praktikum, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan praktikum isolasi koloni bakteri, mengolah data hasil praktikum, menarik kesimpulan. Setelah itu mahasiswa mempresentasikan hasil praktikum. Dari hasil praktikum dan presentasi praktikum diadakan evaluasi dengan angket untuk mengukur keterampilan kerja ilmiah

dan kemampuan kerja ilmiah sebagai indikator untuk mengukur terbentuknya karakter ilmiah mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan praktikum mikrobiologi dapat membentuk karakter ilmiah mahasiswa berdasarkan indikator keterampilan kerja ilmiah dan profil kemampuan kerja ilmiah. Dari hasil penelitian keterampilan kerja ilmiah dalam kategori mahasiswa puas dalam melakukan penelitian sebesar 72,8%. Hasil keterampilan kerja ilmiah pada indikator keterampilan melakukan penelitian memiliki prosentase yang terbesar hingga dalam hal melakukan penelitian mahasiswa telah memiliki keterampilan yang baik sehingga akan berdampak pada karakter mahasiswa karena dengan terampil melakukan penelitian mahasiswa akan terampil melakukan kerja ilmiah yang ditentukan dalam diri mahasiswa akan tertanam sikap dan nilai-nilai ilmiah yang mana sikap dan nilai ilmiah ini akan menjiwai mahasiswa untuk bersikap ilmiah sehingga karakter ilmiah akan terbentuk pada diri mahasiswa.

Dari hasil penelitian profil kemampuan kerja ilmiah dalam kategori sangat baik dalam kemampuan melakukan observasi (72,73%), hal ini sejalan dengan hasil penelitian Artayasa[22] bahwa proses ilmiah akan berdampak pada keterampilan proses sains salah satu proses keterampilan sains adalah melakukan proses observasi, keterampilan observasi mencakup keterampilan untuk menggunakan segenap alat indera. Untuk mendapatkan informasi tentang suatu obyek. Hasil penelitian ini kemampuan observasi dalam kategori sangat baik sehingga mahasiswa memiliki keterampilan proses sains yang sangat baik yang akan berdampak pada kemampuan proses ilmiah yang mana proses ilmiah ini akan berdampak pada pembentukan karakter ilmiah. Kemampuan kerja ilmiah selain kemampuan observasi yang memiliki kategori sangat baik, kemampuan mengajukan pertanyaan juga dalam kategori sangat baik 45,45% hal ini menunjukkan mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berarti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, rasa ingin tahu merupakan salah satu sikap ilmiah karena penemuan

suatu ilmu melalui penelitian adalah dari rasa keingintahuan, bila mahasiswa memiliki sikap ingin tahu yang tinggi berarti memiliki sifat kepedulian sehingga sikap ini akan memiliki kontribusi dalam terbentuknya karakter ilmiah. Penelitian ini sejalan dengan Kurniawati W, dkk[4].

Kesimpulan

Kegiatan praktikum mikrobiologi mampu membentuk karakter ilmiah diukur dari indikator keterampilan kerja ilmiah dan kemampuan kerja ilmiah. Keterampilan kerja ilmiah yang paling dominan adalah kemampuan melakukan penelitian (72,8%) dan kemampuan kerja ilmiah yang paling dominan adalah kemampuan melakukan observasi (72,73%).

Referensi

- [1] Nurtjahyani SD., 2021. Mengubah Mindset Pelajar Menjadi Pembelajar Di Era Pandemi Covid-19. SuaraKarya.id. Tanggal 26 Februari 2021.
- [2] Arifin S, Muslim M, 2021. Tantangan Implementasi Kebijakan “ Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta. *Jurnal Pendidikan Islam Al Ilmi*. Vol:4 No:1. Hal 1-11.
- [3] Habibi, H. (2021). Membangun Karakter Ilmiah. *LENSA (Lentera Sains): Jurnal Pendidikan IPA*, 2(2), 11–17. <https://doi.org/10.24929/lensa.v2i2.148>
- [4] Kurniawati, W., & Atmojo, S. E. (2017). Pembelajaran Sains Bermuatan Karakter Ilmiah Dengan Alat Peraga Barang Bekas Dan Asesmen Kinerja. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 6(1), 49–59. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v6i1.8866>
- [5] Elvanisi, A., Hidayat, S., & Fadillah, E. N. (2018). Analisis keterampilan proses sains siswa sekolah menengah atas Skills analysis of science process of high school students. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 4(20), 245–252. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jipi/article/view/21426/12225>
- [6] Rustaman, N. Y., & Indonesia, U. P. (n.d.). *Pendidikan dan Penelitian Sains dalam Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat*

Tinggi untuk Pembangunan Karakter Abstrak. 1–36.

- [7] Nurtjahyani, SD.(2013). Peningkatan Pemahaman Konsep Mikroba Dalam Pembelajaran Mikrobiologi Melalui Presentasi Hasil Praktikum Isolasi Mikroba Di Lingkungan Kampus.Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [8] Ongowo, R. O., & Indoshi, F. C. (2013). Science process skills in the Kenya certificate of secondary education biology practical examinations. *Creative Education*, 04(11), 713–717.
- [9] Bundu, P. (2006). Penilaian keterampilan proses, sikap ilmiah dalam pembelajaran sains SD. Depdiknas.
- [10] Dimiyati, Johni. 2016. Pembelajaran Terpadu Untuk Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal dan Sekolah Dasar.Jakarta: Prenadamedia Group Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- [11] Agustina., (2014), Pengaruh Gaya Belajar siswa dengan Hasil Belajar Biologi Siswa SMA. Universitas Negeri: Medan.
- [12] Cappuccino J. G., Sheman Natalie. (2014). *Microbiology: A Laboratory Manual 10th Edition*, Unites States of America: Person. Hal: 153-177
- [13] Meganada HP, Sukini, Yodong.(2017). Mikrobiologi. Bahan Ajar Keperawatan Gigi.
- [14] Sumber: <http://robi-biologi.blogspot.com/2016/09/koloni-bakteri.html>
- [15] Hamdiyati Y, Kusnadi. (2007).Profil Keterampilan Proses Sains Mahasiswa Melalui Pembelajaran Berbasis Kerja Ilmiah Pada Matakuliah Mikrobiologi.Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI.
- [16] Utama Nyoman I, Aryana Aryana Bagus Ida , Swasta Jelantik Bagus Ida.(2014) Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Kinerja Ilmiah Pada Pelajaran Biologi Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Amlapura. *E Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program studi IPA Vol.4.*
- [17] Jumarni Nopri, Jalmo Tri, Yolida Berti.(2014) Pengaruh Penerapan Model Inkuiri Terbimbing Terhadap Ketrampilan Proses Sains Siswa.Open Access Vol 2 No. 1
- [18] Yulaelawaty.(2002). Karakteristik Pembelajaran MIPA Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi.Makalah Disajikan

Pada Seminar Pembelajaran MIPA di FPMIPA IKIP Negeri Semarang 21 Desember 2002.

- [19] Nurtjahyani SD.(2016). Proses Interaksi Berpikir Mahasiswa pada Materi Bakteri dengan Pembelajaran Berbasis Masalah.Vol.13.No.2.
- [20] Septian Rossita, A., Munandar, K., & Komarayanti, S. (2016). Komparasi Media Na Pabrikan Dengan Na Modifikasi Untuk Media Pertumbuhan Bakteri. *Seminar Nasional, 1*, 192–201.
- [21] Walid, A., Novitasari, N., & Wardany, K. (2019). Studi Morfologi Koloni Bakteri Udara Di Lingkungan Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. *Jurnal IPA & Pembelajaran IPA, 3*(1), 10–14. <https://doi.org/10.24815/jipi.v3i1.12974>
- [22] Artayasa IP, Susilo H, Lestari U, Indriwati SE. (2018). Study Implementasi Strategi Inkuiri Melalui Kegiatan Lesson Study Untuk Meningkatkan Kreativitas Pengembangan Media Inovatif IPA Mahasiswa PGSD. Prosiding Seminar Pendidikan Biologi.

Pemanfaatan Serangga Sebagai Bahan Pakan Unggas: Sebuah Review Pustaka

Eko Widodo¹, Enike Dwi Kusumawati² dan Bayu Aji Pradikdo³

Pengantar

Sudah umum diketahui bahwa dalam usaha ternak unggas modern, biaya pakan dapat mencapai 70% dari biaya produksi. Usaha ternak unggas secara intensif ditandai dengan produktivitas yang tinggi (ayam pedaging mencapai berat badan 2 kg dalam waktu 32 hari sedangkan ayam petelur menghasilkan lebih dari 320 butir dalam 1 tahun), seiring dengan input produksi yang memadai untuk menunjang hasil yang tinggi tersebut. Input produksi mencakup bibit, pakan dan manajemen pemeliharaan yang seksama, termasuk pencegahan penyakit.

Sebagai salah satu input produksi usaha ternak unggas yang penting, pakan harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Bahan baku pakan dikelompokkan ke dalam sumber energi, sumber protein baik nabati maupun hewani, hasil samping industri pertanian, sumber mineral dan sumber vitamin. Bahan pakan yang memiliki harga mahal adalah dalam kelompok bahan pakan sumber protein. Untuk pakan unggas, sumber utama protein bersumber dari protein hewani seperti tepung ikan, tepung daging dan tepung tulang, dan protein nabati seperti bungkil kedelai, tepung biji kapas dan tepung gluten jagung. Terkait dengan harga pakan yang mahal, penggunaan bahan pakan alternatif atau bahan pakan non konvensional perlu sekali diupayakan guna menekan biaya produksi.

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati. Salah satu diantaranya

¹ Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang

² Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan, Malang

³ Alumni Program Magister Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang







adalah sebagai negara tropis yang kaya akan aneka ragam serangga yang hidup dan banyak ditemui di hampir seluruh wilayah Indonesia. Istilah serangga dalam entomologi adalah semua yang masuk dalam kelas insekta yang memiliki eksoskeleton berkhitin dan tubuh terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, thorax dan abdomen. Oleh karena itu, istilah serangga dan insekta sering dipertukarkan dan memiliki arti yang sama. Sebenarnya secara alami insekta sudah menjadi makanan bagi khususnya ikan, burung liar dan ayam yang dipelihara bebas. Tetapi, hanya jangkrik (*Gryllidae*) lokal yang dikembangkan sebagai pakan burung berkicau, dan kini banyak pihak mengembangkan *Black Soldier Fly* (BSF), nampaknya serangga lain belum menarik untuk dikembangkan. Hal ini masih menjadi tugas peneliti dan akademisi untuk menggali potensi insekta lokal Indonesia yang akan berpotensi untuk dikembangkan guna mendukung industri peternakan Indonesia. Masalah utama adalah belum tersedianya bahan baku tersebut dalam kuantitas yang cukup dengan supply yang kontinyu untuk secara rutin memasok kebutuhan pabrik pakan.

Dari banyak literatur seperti Józefiak, et al. [1]; Jayaprakash, et al [2]; Khan [3]; Sogari [4] dan banyak lagi, mengulas penggunaan insekta untuk pakan ternak unggas. Tulisan ini mengungkap *updating knowledge* tentang kandungan nutrisi dan pengaruh pemanfaatan insekta pada berbagai ternak unggas.

Insekta sebagai sumber protein dan zat makanan untuk unggas

Konsumsi insekta atau serangga sebagai makanan, manusia (*food*) dan hewan liar (*feed*) telah menjadi praktik umum di banyak budaya selama berabad-abad. Serangga saat ini dikonsumsi dalam berbagai bentuk oleh diperkirakan 2 miliar orang di Afrika, Asia, Amerika Tengah dan Selatan, dan Australia. Tidak hanya karena rasanya yang enak tetapi juga karena kandungan gizi dan menjadi sumber makanan yang murah. Ada sekitar 1500-2000 spesies serangga yang dapat dimakan, sementara bila dibandingkan yang tercatat di

seluruh dunia itu hanya merupakan sebagian kecil dari 1.000.000 spesies serangga yang diketahui sampai saat ini. Secara global, serangga yang paling banyak dikonsumsi adalah serangga yang sudah tersedia (Gambar 1 dan Tabel 1) seperti kumbang (Coleoptera:31%), ulat (Lepidoptera: 18%), lebah, tawon, dan semut (Hymenoptera: 14%), belalang, belalang dan jangkrik (Orthoptera: 13%), jangkrik, wereng, serangga skala, dan serangga sejati (Hemiptera: 10%), rayap (Isoptera: 3%), capung (Odonata: 3%), lalat (Diptera: 2%), dan lain-lain (5%) [5]. Konsumsi serangga tertinggi ada di Afrika, Asia, dan Amerika Latin [6]. Meskipun popularitas serangga di negara berkembang, penerimaan konsumen di negara-negara maju masih sangat rendah, tapi ini mungkin berubah, seperti tren yang terjadi, untuk misalnya dibuat menjadi hidangan sushi[7]. Kandungan protein dari berbagai serangga seperti ilustrasi berikut:

Insect order	Images	Protein content (%)
Coleoptera Beetles, weevils		23–66
Lepidoptera Butterflies, moth		14–68
Hemiptera True bugs		42–74
Hymenoptera Bees, wasps, ants		13–77
Odonata Dragonflies Damselflies		46–65
Orthoptera Grasshoppers Locust, crickets		23–65

Gambar 1. Kandungan protein kasar (% bahan kering) menurut urutan serangga

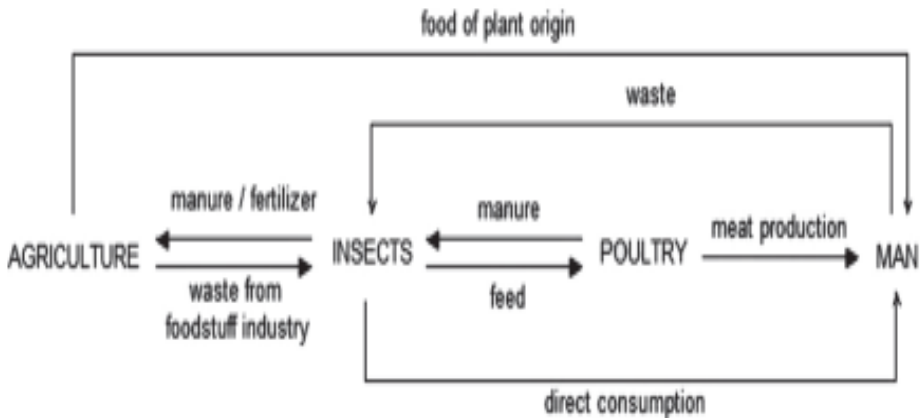
Kandungan protein yang terdapat dalam serangga bisa hingga di atas 50%, maka ini bisa menjadi potensi untuk mengganti atau digunakan sebagai substitusi bahan pakan konvensional pada unggas, khususnya untuk bahan pakan konvensional yang berperan sebagai sumber protein hewani seperti tepung ikan, Meat and bone meal (MBM) dan tepung bulu. Dalam pakan unggas khususnya ayam pedaging, tepung ikan digunakan sebagai sumber protein hewani. Namun permasalahannya adalah sumber protein hewani seperti tepung ikan, MBM dan tepung bulu masih merupakan komoditas impor, sehingga perlu dicari alternatif sumber bahan baku lokal yang dapat dipergunakan sebagai sumber protein hewani pakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung ikan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2009), menyatakan bahwa untuk mengurangi penggunaan tepung ikan sebagai bahan baku pakan dengan substitusi sumber bahan baku alternatif lain seperti: maggot, cacing lumbricus, keong mas, larva serangga, silase ikan dan lain-lain.

Menurut Van Huis (2013), protein yang bersumber pada serangga lebih ekonomis, bersifat ramah lingkungan dan mempunyai peran yang penting secara alamiah. Serangga dilaporkan memiliki efisiensi konversi pakan yang tinggi dan dapat dipelihara serta diproduksi secara massal. Ilustrasi tabel 2 menunjukkan bahwa serangga, khususnya jangkrik memiliki efisiensi produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan ternak.

Tabel 1. Efisiensi Produksi antara jangkrik dan ternak [7]

	Jangkrik	Unggas	Babi	Sapi
Kilogram pakan/kilogram bobot badan	1,7	2,5	5,0	10,0
Bagian dapat dimakan/edible portion (%)	80	55	55	40
Kilogram pakan/kilogram bagian dapat dimakan	2,1	4,5	9,1	25

Disamping itu, budidaya serangga dapat mengurangi limbah organik yang berpotensi mencemari lingkungan (Li et al. 2011). Hal ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Pemanfaatan limbah organik untuk media pembiakan serangga

Betapa serangga memiliki kemampuan memanfaatkan kotoran ternak sebagai limbah organik untuk pertumbuhan serangga dan akan dikonversikan menjadi protein. Faktor lain yang menguntungkan adalah sumber protein berbasis insekta tidak berkompetisi dengan manusia (walaupun publikasi serangga sebagai *edible food* sudah gencar, namun masih banyak bahan pangan lain yang sudah lebih lama dikenal, kemungkinan tingkat konsumsi serangga sebagai bahan pangan tampaknya sulit berkembang) sehingga sangat sesuai untuk digunakan sebagai bahan pakan ternak, khususnya pakan unggas.

Kandungan nutrisi serangga telah banyak dilaporkan, berikut rangkuman kandungan nutrisi untuk berbagai serangga yang dilaporkan peneliti Indonesia

Tabel 2. Kandungan nutrisi serangga hasil penelitian di dalam negeri

	Jangkrik ¹	BSF ²	Belalan g ³	Rayap ³
Protein (%)	67,77	44,26	62,2	35,7
Lemak (%)	23,21	29,65	10,4	54,3
Karbohidrat (%)	5,66	--	15,8	3,5
Energi (Kkal/100g)	296	--	420	656
Asam Amino				
Lisin (%)	3,75	10,65	--	--
Methionin (%)	0,96	--	--	--
Alanin (%)	7,72	25,68	--	--
Histidin (%)	1,51	3,37	--	--
Leusin (%)	5,00	4,76	--	--
Isoleusin (%)	2,78	5,42	--	--
Fenilalanin (%)	2,19	--	--	--
Threonin (%)	2,59	3,16	--	--
Tirosin (%)	4,46	4,15	--	--
Valin (%)	4,17	3,87	--	--
Aspartat (%)	5,49	--	--	--
Glutamat (%)	7,52	--	--	--
Serin (%)	2,79	6,35	--	--
Glisin (%)	4,07	3,80	--	--
Arginin (%)	3,62	12,95	--	--
Prolin (%)	--	16,94	--	--
Sistin (%)	--	2,05	--	--
Sistein (%)	--	2,05	--	--

¹Yelmida A., Sulistyati I.P., Yusnimar (tanpa tahun)
<https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/535/yelmida1.PDF?sequence=1&isAllowed=y>

²Fahmi dkk [8]

³Girsang [9]

Penelitian menarik juga dilaporkan Rachmawati, dkk [10] bahwa kandungan nutrisi BSF yang dipelihara dalam media bungkil inti sawit juga dipengaruhi oleh umur. Hasilnya dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil analisis proksimat kandungan nutrisi tahap larva prepupa BSF [10]

Umur (hari)	Kadar (%)			
	Bahan Kering	Protein Kasar	Lemak Kasar	Abu Kasar
5	26,61	61,42	13,37	11,03
10	37,66	44,44	14,6	8,62
15	37,94	44,01	19,61	7,65
20	39,2	42,07	23,94	11,36
25	39,97	45,87	27,5	9,91

Hasil penelitian di luar negeri tentang kandungan nutrisi serangga di luar yang dilaporkan oleh Józefiak, et al. [1] sebagai berikut:

Tabel 4. Kandungan nutrisi serangga hasil penelitian di Luar Negeri

	Jangkrik ¹	Jangkrik ²	Belalang ³	Rayap ⁴
Protein (%)	58,3	58,30	65,42	46,3
Lemak (%)	10,3	12,00	8,3	30,1
Karbohidrat (%)	--	39,23	--	3,5
Energi (Kkal/100g)	--	177,4	--	578
Khitin (%)	8,7	12,33	8,73	
Asam Amino				
Lisin (%)	4,97	--	3,79	6,97
Methionin (%)	1,93	11,32	1,70	2,08
Alanin (%)	5,55	--	--	--
Histidin (%)	1,94	--	2,79	2,65
Leusin (%)	5,52	17,27	4,95	3,26
Isoleusin (%)	3,09	--	2,61	2,32
Fenilalanin (%)	2,86	13,68	2,06	3,98
Threonin (%)	2,75	--	2,15	3,73
Tirosin (%)	3,94	11,32	2,96	--
Valin (%)	4,42	12,47	3,14	3,86

Aspartat (%)	6,29	--	3,02	--
Glutamat (%)	9,07	--	6,39	--
Serin (%)	3,72	--	2,33	--
Glisin (%)	3,62	--	3,42	--
Arginin (%)	3,68	67,23	3,42	3,63
Prolin (%)	4,50	15,83	3,62	--
Serin (%)	3,72	--	2,33	--
Sistin (%)	1,01	--	0,69	--
Triptophan	--	--	--	0,78

¹⁾Wang et al [11]

²⁾Kipkoech, et al [12]

³⁾Wang et al [13]

⁴⁾Sogbesan and Ugwumba [14]

Newton *et al.* [15] membandingkan persentase kandungan asam amino esensial dan non-esensial dari larva BSF kering yang diberi pakan kotoran sapi potong dan babi. Kandungan asam amino esensial larva BSF yang diberi pakan kotoran sapi potong relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberi pakan kotoran babi, kecuali kandungan treonin dan triptofan. Hal yang sama juga terjadi pada asam amino non-esensial, yaitu kandungan sistin, serin dan asam glutamat pada larva yang diberi pakan kotoran babi relatif lebih rendah. Apabila dibandingkan dengan tepung kedelai, kandungan lisin, leusin, fenilalanin dan treonin larva BSF yang diberi pakan kotoran sapi dan babi tidak berbeda nyata. Meskipun kandungan isoleusin dan arginin lebih rendah daripada tepung kedelai, tetapi kandungan metionin, histidin, valin dan triptofan dalam BSF lebih tinggi.

Pemanfaatan Insekta sebagai Pakan unggas

Aplikasi tepung jangkrik untuk ayam pedaging

Hasil penelitian Giescha dkk [16] mengenai pengaruh penambahan tepung jangkrik (*Gryllus mitratus burm*) dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan (PBB), konversi pakan, indeks produksi *Income Over Feed Cost* disajikan pada Tabel 5. Perlakuan yang

diberikan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan tepung jangkrik untuk mengganti sebagian pakan basal menunjukkan bahwa penggunaan tepung jangkrik hingga 2% meningkatkan pertambahan bobot badan, konversi pakan, indek produksi dan bahkan nilai ekonomisnya.

Tabel 5. Hasil Penelitian Penambahan Tepung Jangkrik Terhadap Penampilan Produksi Ayam Pedaging Umur 15-35 hari [16]

Level	Konsumsi pakan (g/ekor)	Pertambahan Bobot Badan (g/ekor)	Konversi Pakan	Indek Produksi	Income Over Feed Cost (Rp/ekor)
0%	2978 ^a	1751 ^b	1,70 ^b	302 ^b	14.064 ^b
0,5%	2815 ^a	1866 ^b	1,51 ^a	363 ^b	16.416 ^a
1,0%	2744 ^b	1921 ^b	1,43 ^a	395 ^a	17.176 ^a
1,5%	3001 ^a	2093 ^a	1,44 ^a	427 ^a	17.706 ^a
2,0%	3000 ^a	2234 ^a	1,45 ^a	489 ^a	19.478 ^a

Keterangan: Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata ($P < 0,01$).

Penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa tepung jangkrik dapat menggantikan tepung ikan hingga 15% [11], hasilnya sebagai berikut:
Tabel 6. Substitusi tepung ikan dengan tepung jangkrik untuk ayam pedaging

Level substitusi	Konsumsi pakan (g/ekor)	Pertambahan Bobot Badan (g/ekor)	Efisiensi Pakan
0%	568	351	61,8
5%	575	357	62,1
10%	558	352	63,1
15%	576	351	60,9
SEM	9	3	0,008

Uji pencernaan asam amino juga menunjukkan bahwa total asam amino tercerna dari pakan yang mengandung tepung jangkrik lebih tinggi dibandingkan tepung ikan. Hasil pada tabel 6 setidaknya menyarankan bahwa tepung jangkrik dapat digunakan sebagai substitusi tepung ikan tanpa ada efek yang tidak menguntungkan terhadap pertumbuhan ayam pedaging

Pengaruh penggunaan ulat kandang untuk ayam pedaging dan burung puyuh

Ulat kandang (*Alphitobius diaperinus*) adalah serangga yang juga digunakan sebagai pakan burung berkicau. Ulat kandang mengandung protein (41,66%), lemak (20,56) serat kasar (17,09) dan energi metabolis berdasarkan hasil perhitungan 2907 kkal/kg [17]. Pemanfaatan ulat kandang untuk unggas masih jarang, hasil penelitian menggunakan ayam pedaging menunjukkan bahwa ulat kandang dapat digunakan hingga 2% dalam pakan tanpa mempengaruhi penampilan produksinya. Sedangkan pemanfaatan ulat kandang hingga 3% dalam pakan puyuh juga menunjukkan hasil bahwa produksi telur tidak signifikan dipengaruhi oleh level ulat kandang (hingga 3%) dalam pakan walaupun ada kecenderungan produksi telur meningkat dan *Income Over Feed Cost* juga lebih tinggi.

Pengaruh penggunaan belalang dalam pakan ayam pedaging

Kandungan nutrisi belalang sudah dilaporkan dalam tulisan ini, walaupun tidak banyak penelitian tentang penggunaan belalang untuk pakan unggas, Wang et al [13] melaporkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari substitusi penggunaan tepung ikan dengan tepung belalang hingga 15% terhadap penampilan produksi ayam pedaging (seperti pada tabel 7). Hal ini karena pencernaan total asam amino belalang dan tepung ikan hampir sama (94% dan 93%).

Tabel 7. Substitusi tepung ikan dengan tepung belalang untuk ayam pedaging

Level substitusi	Konsumsi pakan (g/ekor)	Pertambahan Bobot Badan (g/ekor)	Efisiensi Pakan
0%	442	270	61,1
5%	451	280	62,1
10%	442	278	62,9
15%	435	271	62,3
SEM	7	5	0,008

Pengaruh penggunaan rayap dalam pakan ayam pedaging

Kandungan nutrisi rayap sudah dilaporkan dalam tulisan ini, walaupun tidak banyak penelitian tentang penggunaan rayap untuk pakan unggas, Sangkara et al [18] melaporkan bahwa rayap sudah digunakan di berbagai daerah di Burkina Faso sebagai bahan pakan unggas lokal, namun tidak ada catatan penampilan produksinya. Baru kemudian, Pousa et al [19] melaporkan bahwa substitusi 2,5% tepung ikan dengan rayap tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam lokal dan *Guenia fowl*.

Pengaruh *Black Soldier Fly* pada ayam pedaging

Berbeda dengan pengaruh serangga yang lain, BSF sudah banyak diteliti. Pengaruh substitusi bungkil kedelai dengan tepung ikan dan BSF dilaporkan oleh Oluokon [20]. Hasil penelitian di Afrika ini menunjukkan BSF dapat menggantikan bungkil kedelai dan tepung ikan dalam pakan ayam pedaging, apalagi hasil persentase karkas menunjukkan berbeda nyata. Hal ini akan berimplikasi terhadap nilai ekonomisnya.

Tabel 8. Substitusi bungkil kedelai dengan tepung ikan atau BSF untuk ayam pedaging [20]

Parameter	Pakan kontrol	Substitusi dengan 5% tepung ikan	Substitusi dengan 5% BSF	Ket
<i>Periode starter</i> (0-5 minggu)				
Konsumsi pakan (g)	1415	1408	1505	TS
Pertambahan bobot badan (g)	385	555	535	*
Konversi pakan	3,7	2,5	2,8	*
<i>Periode finisher</i> (5-10 minggu)				
Konsumsi pakan (g)	2625	3470	3570	*
Pertambahan bobot badan (g)	1180	1490	1480	*
Konversi pakan	2,2	2,3	2,4	TS
Persentase karkas (%)	64,8	68,2	71,0	*

Keterangan: TS: tidak signifikan dan *:signifikan

Hasil lebih baik dilaporkan oleh Onsongo [21], dengan penelitiannya menggunakan kombinasi bungkil kedelai dan tepung ikan yang digantikan dengan tepung BSF pada level hingga 15%. Hasilnya menunjukkan bahwa BSF dapat digunakan dalam pakan ayam pedaging khususnya pada level rendah (5%)

Tabel 9. Substitusi bungkil kedelai dan tepung ikan dengan BSF untuk ayam pedaging [21]

Parameter	Pakan kontrol	Substitusi dengan 5% BSF	Substitusi dengan 10% BSF	Substitusi dengan 15% BSF
Periode Pemeliharaan (0-7 minggu)				
Bobot badan akhir (g)	3071 ^{ab}	3182 ^a	3006 ^b	3033 ^{ab}
Pertambahan bobot badan (g/hari)	69,0 ^{ab}	71,7 ^a	67,6 ^b	68,3 ^{ab}
Konsumsi pakan harian (g)	124,1	126,2	122,9	119,1
Konversi pakan	1,8	1,8	1,8	1,7

Hasil penelitian dari dalam negeri [22] melaporkan bahwa jika tepung ikan dipakai dalam pakan basal, maka penggantian 25% tepung ikan dengan tepung BSF akan memiliki hasil yang mirip dengan pakan kontrol, artinya tepung BSF akan rasional jika dipakai pada level yang rendah untuk substitusi tepung ikan.

Tabel 10. Substitusi bungkil kedelai dengan tepung ikan atau BSF untuk ayam pedaging [22]

Parameter	Pakan kontrol	Substitusi dengan 25% tepung ikan	Substitusi dengan 50% BSF	Substitusi dengan 75% BSF	Substitusi dengan 100% BSF
Periode starter (0-3 minggu)					
Konsumsi pakan (g/hari)	44,83 ^a	44,63 ^a	41,81 ^{ab}	42,36 ^{ab}	39,83 ^b
Pertambahan bobot badan (g/hari)	6,70	6,45	5,64	5,89	6,96

Efisiensi pakan	0,15	0,14	0,14	0,14	0,18
Periode <i>finisher</i> (3-5 minggu)					
Konsumsi pakan (g)	71,44 ^a	70,56 ^a	64,77 ^{bc}	65,71 ^{abc}	60,50 ^c
Pertambahan bobot badan (g)	27,37 ^a	26,18 ^{ab}	23,32 ^b	23,00 ^b	18,70 ^c
Efisiensi pakan	0,38 ^a	0,37 ^a	0,35 ^a	0,35 ^a	0,31 ^b

Penelitian dari Ghana juga menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggantian 9% tepung ikan (100% dalam pakan) dengan tepung BSF tidak berpengaruh terhadap penampilan produksi ayam pedaging dan retensi protein dan lemak [23]. Penelitian lain di Afrika juga menunjukkan bahwa penggantian 100% bungkil kacang tanah dengan tepung BSF tidak berpengaruh terhadap penampilan produksi dan retensi zat makanan [24].

Pengaruh *Black Soldier Fly* pada ayam petelur

Kawasaki et al [25] meneliti substitusi pakan basal dengan 10% larva atau pre-puppa dari BSF menemukan bahwa berat telur meningkat secara signifikan. Tingginya berat kuning telur disebabkan karena tingginya berat putih telur dan tebal kerabang, hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Hasil lain adalah *skor* kuning telur terbaik pada penggunaan larva BSF.

Tabel 11. Pengaruh penggunaan larva dan pre-puppa BSF pada ayam petelur [25]

Parameter	Pakan Kontrol	Larva BSF	Pre-puppa BSF
Konsumsi pakan (g/hari)	79,8	77,5	76,2

Hen Day Production (%)	70,3	70,6	70,7
Berat Telur (g)	48,0 ^a	49,0 ^a	51,1 ^b
Konversi pakan	2,5	2,3	2,2
Bobot Badan (g/ekor)	1231	1235	1329
Berat kuning telur (g)	12,02	12,03	12,56
Berat putih telur (g)	26,79 ^a	27,10 ^a	30,04 ^b
Tebal Cangkang (mm)	0,38 ^a	0,37 ^a	0,43 ^b
Score kuning telur	5,21 ^a	6,28 ^b	5,92 ^{ab}

Penelitian di Malaysia menunjukkan hasil bahwa penggunaan larva pada level yang rendah dapat direkomendasikan untuk ayam petelur [26], walaupun produksi telur agak rendah tetapi telur yang dihasilkan lebih berat, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Pengaruh penggunaan larva BSF pada ayam petelur [26]

Parameter	Pakan Kontrol	5% BSF	1% BSF	SEM	Signifikan
Konsumsi pakan (g/hari)	78,9	79,4	79,8	1,02	TS
Hen Day Production (%)	54,34 ^b	58,77 ^a	49,61 ^c	14,06	***
Berat Telur (g)	47,66 ^a	46,41 ^b	48,05 ^a	3,44	***
Konversi pakan	1,65 ^b	1,71 ^a	1,66 ^b	0,03	**
Pertambahan Bobot Badan (g)	27,63	48,50	28,08	189,16	TS
Haugh Unit (%)	54,542	55,25	54,91	13,01	TS
Tebal cangkang (mm)	0,039 ^a	0,034 ^b	0,035 ^b	0,02	*
Berat Cangkang (g)	4,84 ^a	4,36 ^b	4,57 ^b	0,58	***

Keterangan: TS: tidak signifikan dan *:signifikan ($P<0,05$); **: signifikan ($P<0,01$) dan ***: signifikan ($P<0,001$)

Pengaruh *Black Soldier Fly* pada burung puyuh

Penelitian menggunakan puyuh pedaging Cullere et al. [27] melaporkan bahwa penggantian 10 dan 15% bungkil kedelai melaporkan tidak ada pengaruhnya terhadap penampilan produksi. Walaupun secara umum 15% tepung BF dapat digunakan untuk mengganti bungkil kedelai, tetapi penggunaan level tersebut menyebabkan peningkatan susut masak. Oleh karena itu, disarankan menggunakan level substitusi bungkil kedelai 10% saja.

Tabel 13. Pengaruh penggunaan larva BSF pada puyuh pedaging [27]

Parameter	Pakan Kontrol	10% BSF	15% BSF	SEM	Signifikan
Konsumsi pakan (g/hari)	23,3	24,4	23,4	1,28	TS
Bobot akhir (g pada 28 hari)	222,1	225,3	222,5	5,43	TS
Pertambahan Bobot Badan (g/hari)	8,25	8,40	8,24	0,31	TS
Konversi pakan	2,83	2,90	2,86	0,12	TS
Mortalitas (%)	0,20	0,20	0,00	0,37	TS
Berat karkas (g)	141,5	145,9	142,9	1,64	TS
Persentase karkas (%)	64,1	64,3	64,7	0,34	TS
Susut Masak (%)	24,7 ^b	23,4 ^b	28,1 ^a	0,83	***

Keterangan: TS: tidak signifikan dan ***: signifikan ($P<0,001$)

Pada level yang tinggi 50% dan 100% mensubstitusi *meat and bone meal* Hattab et al [28] melaporkan bobot badan yang lebih tinggi, konsumsi pakan yang lebih rendah dan konversi pakan yang lebih rendah jika puyuh pedaging diberi perlakuan selama 6 minggu.

Pengaruh penggantian tepung ikan dengan tepung BSF pada puyuh petelur dilaporkan oleh Widjastuti et al. [29], hasilnya dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 14. Substitusi tepung ikan dengan BSF untuk puyuh petelur [29]

Parameter	Pakan kontrol	Substitusi dengan 25% tepung ikan	Substitusi dengan 50% BSF	Substitusi dengan 75% BSF	Substitusi dengan 100% BSF
Konsumsi pakan (g/hari)	17,90 ^a	19,08 ^b	19,23 ^b	17,85 ^a	17,18 ^a
Berat telur (g)	9,25 ^a	10,12 ^b	10,12 ^b	9,41 ^a	9,41 ^a
Efisiensi pakan	0,15	0,14	0,14	0,14	0,18
Produksi telur (%)	74,80	75,26	75,19	75,09	74,21
Konversi pakan	2,44 ^a	2,27 ^b	2,33 ^b	2,42 ^a	2,54 ^a

Hal ini menyiratkan bahwa penggunaan tepung BSF dapat mensubstitusi tepung ikan hingga 50% dengan penampilan produksi puyuh petelur yang lebih baik, terutama ditinjau dari berat telur dan konversi pakan. Puyuh adalah ternak yang membutuhkan protein kualitas tinggi untuk mendukung kemampuan tubuhnya melakukan metabolisme zat makanan yang mendukung produktivitasnya.

Pengaruh *Black Soldier Fly* pada ayam yang dipelihara secara *free range* atau *organic system*

Secara alami ternak, khususnya unggas yang dipelihara bebas atau menggunakan umbaran baik dalam *free range system* bahkan sistem tradisional yang dikenal dalam literatur sebagai *scavenging system*, mendapatkan tambahan protein dari alam khususnya dalam bentuk serangga. Tidak hanya belalang, lalat, tapi juga ulat pohon yang sedang tumbang dan berbagai jenis lainnya. Ruhnke et al [30] melaporkan hasil penelitiannya dalam tabel berikut:

Tabel 15. Substitusi tepung ikan dengan BSF untuk ayam petelur *system free range* [30]

Parameter	Perlakuan	Waktu		Signifikan		
		Minggu 1	Minggu 6	Perlakuan	Waktu	Interaksi
Konsumsi pakan (g/ekor)	Kontrol	108,6	94,6	TS	TS	TS
	BSF	107,7	94,3	TS	TS	TS
Produksi telur (%)	Kontrol	95,2	82,8	TS	TS	TS
	BSF	91,7	91,6	TS	TS	TS
Berat telur (g)	Kontrol	67,9	66,9	TS	TS	TS
	BSF	68,1	67,5	TS	TS	TS
Egg Mass (g)	Kontrol	64,7	55,5	TS	TS	TS
	BSF	62,4	61,9	TS	TS	TS
Konversi pakan	Kontrol	2,03	2,00	TS	TS	TS
	BSF	2,04	2,04	TS	TS	TS

Dari tabel ini nampak bahwa tidak satupun parameter yang signifikan pengaruhnya, artinya BSF yang ada di alam dapat berpengaruh terhadap penampilan produksi telur pada ayam ISA BROWN yang dipelihara secara *free range system*. Tetapi peneliti tersebut juga melaporkan bahwa jika tepung BSF diberikan secara *free choice feeding* artinya disediakan dalam tempat pakan khusus maka akan berpengaruh menurunkan secara signifikan berat telur, warna *score* kuning telur, berat cangkang dan juga ketebalan cangkang. Hal ini menyarankan bahwa kondisi alam sudah cukup menyediakan serangga untuk mendukung produksi ternak secara optimal.

BSF dan pemberdayaan peternak unggas skala kecil

Khusus BS, teknologi juga sudah mengarah pada penggunaan defatted BSF atau BSF yang sudah diekstrak atau

dihilangkan/dipisahkan minyaknya. Penggunaan BSf sebagai biodiesel [31] juga sangat menarik bagi peneliti dan diharapkan nantinya dapat menjadi area bisnis baru. Tentu masih perlu dilakukan banyak penelitian untuk mengarah hal tersebut, namun bagi peternak ini juga menjadi peluang untuk menjual minyak/*oil* yang dapat dipisahkan dengan mudah menggunakan alat ekstraksi mekanik yang sederhana.

Budidaya BSF telah dikembangkan pada awalnya oleh pemerintah kota Surabaya dan Sidoarjo untuk menangani masalah sampah di pasar induk Puspa Agro. Kini pemerintah Surabaya juga telah mengembangkan ke Kelurahan Jambangan dan dilaporkan bahwa masyarakat mampu mengolah 2,5 ton sampah setiap bulannya. Bahkan warga ada yang sukses menjadi pengusaha BSF, karena disamping mampu menguraikan sampah organik BSF juga larvanya dapat dijual sebagai bahan pakan ternak maupun ikan. Di salah satu portal e-marketing harga larva BSF kering dijual seharga Rp 40.000,- dalam kemasan 300 gram. Padahal masih memiliki hasil samping berupa pupuk yang juga dapat dimanfaatkan untuk tanaman.

Alangkah bijaksananya jika peternak ayam kampung maupun ayam pedaging skala kecil di masyarakat juga diajari cara budidaya BSF yang relatif mudah ini. Jika ini dapat dilakukan oleh peternak maka akan punya kontribusi mengurangi biaya pakan yang signifikan, sekaligus sampah organik juga akan berkurang. Di tengah situasi bisnis peternakan ayam pedaging maupun petelur, juga ayam kampung karena pengaruh pandemic COVID-19 ini tentu ini menjadi salah satu pilihan. Di berbagai daerah seperti Banyumas [32] dan Tulungagung [33], beberapa program penyuluhan atau pengabdian masyarakat sudah dilakukan. Namun akan lebih bermanfaat jika program tersebut tidak hanya mampu menyelesaikan masalah sampah organik, tetapi juga dapat mendorong perkembangan peternakan di desa.

Kesimpulan

Penambahan insekta dalam pakan unggas patut dipertimbangkan karena merupakan sumber protein (protein tinggi di atas 40%) dan asam amino yang baik bagi ternak. Kandungan energi juga tinggi karena serangga banyak mengandung lemak, tetapi memang khitin dapat menjadi kendala, khususnya jika diberikan dalam level yang tinggi. Hasil penelitian yang telah direview mengindikasikan bahwa tidak ada satupun hasil penelitian yang melaporkan bahwa serangga termasuk tepung BSF yang banyak dikembangkan saat ini menunjukkan efek negatif jika diberikan pada ternak puyuh maupun ayam (baik pedaging maupun petelur). Pengembangan BSF patut didukung karena dapat memanfaatkan limbah organik yang banyak di masyarakat agar dapat digunakan untuk diproduksi dalam skala massal di tingkat peternak maupun industri. Dengan demikian, pemanfaatan BSF sebagai sumber protein alternatif mampu mengurangi biaya produksi dalam industri peternakan tanpa harus menurunkan kualitas pakannya.

Referensi

- [1] Józefiak, D., Józefiak, A., Kierończyk, B., Rawski, M., Świątkiewicz, S., Długosz, J., & Engberg, R. M. (2016). Insects—a natural nutrient source for poultry—a review. *Ann. Anim. Sci*, 16(2), 297-313.
- [2] Jayaprakash, G., Sathiyabarathi, M., & Arokia-Robert, M. (2016). Insects-a natural source for poultry nutrition. *Int. J. Sci. Environ. Technol*, 5, 733-736.
- [3] Khan, S. H. (2018). Recent advances in role of insects as alternative protein source in poultry nutrition. *Journal of Applied Animal Research*, 46(1), 1144-1157.
- [4] Sogari, G., Amato, M., Biasato, I., Chiesa, S., & Gasco, L. (2019). The potential role of insects as feed: A multi-perspective review. *Animals*, 9(4), 1-15.
- [5] van Huis, A., van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G., & Vantomme, P. (2013). Edible Insects. Future Prospects for Food and Feed Security. FAO: Rome, 201 p. Available at: <http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e00.htm>.

- [6] Jongema, Y., (2015). World List of Edible Insects. Laboratory of Entomology, Wageningen University, Wageningen [Online] Available from: <http://www.wageningenur.nl/en/>
- [7] van Huis, A., (2013). Potential of insects as food and feed in assuring food security. *Annu. Rev. Entomol.* 58, 563–583.
- [8] Fahmi MR, Hem S, & Subamia IW. (2007). Potensi maggot sebagai salah satu sumber protein pakan ikan. Dalam: Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Produk Pangan Hewan dalam Rangka Pemenuhan Gizi Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia XXVII. Bogor (Indonesia): Puslitbangnak. hlm. 125-130.
- [9] Girsang, P., (2019). Serangga, Solusi Pangan Masa Depan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 6(2): 69 - 76.
- [10] Rachmawati, Buchori D, Hidayat P, Hem S, & Fahmi MR. (2010). Perkembangan dan kandungan nutrisi larva *Hermetia illucens* (Linnaeus) (Diptera: *Stratiomyidae*) pada bungkil kelapa sawit. *J Entomol Indones.* 7:28-41.
- [11] Wang, D., S. Wei & Chuan. (2005). Evaluation on nutritional value of field crickets as a poultry feedstuff. *Asian-Aust. J. Anim. Sci.* 18(5): 667-670.
- [12] Kipkoech, C., Kinyuru, J. N., Imathiu, S., & Roos, N. (2017). Use of house cricket to address food security in Kenya: Nutrient and chitin composition of farmed crickets as influenced by age. *African Journal of Agricultural Research*, 12(44), 3189-3197.
- [13] Wang, D., Zhai, S. W., Zhang, C. X., Zhang, Q., & Chen, H. (2007). Nutrition value of the Chinese grasshopper *Acrida cinerea* (Thunberg) for broilers. *Animal feed science and technology*, 135(1-2), 66-74.
- [14] Sogbesan, A. O., & Ugwumba, A. A. A. (2008). Nutritional evaluation of termite (*Macrotermes subhyalinus*) meal as animal protein supplements in the diets of *Heterobranchus longifilis* (Valenciennes, 1840) fingerlings. *Turkish journal of fisheries and aquatic Sciences*, 8(1), 149-158.
- [15] Newton GL, Sheppard DC, Watson DW, Burtle GJ, & Dove CR. (2005). Using the Black Soldier Fly, *Hermetia illucens*, as a value-added tool for the management of swine manure. Report of the

- Animal and Poultry Waste Management Center, North Carolina State University. Raleigh (US): North Carolina State University.
- [16] Giescha, B., S. Osfar & I. H. Djunaidi. (2013). Efek penggunaan tepung jangkrik (*Gryllus mitratus burm*) dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging. Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang. <https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/EFEK-PENGGUNAAN-TEPUNG-JANGKRIK-Gryllus-mitratus-burm-DALAM-PAKAN-TERHADAP-PENAMPILAN-PRODUKSI-AYAM-PEDAGING.pdf>
- [17] Allama, H., Sjofjan, O., Widodo, E., & Prayogi, H. S. (2012). Pengaruh penggunaan tepung ulat kandang (*Alphitobius diaperinus*) dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging. Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan, 22(3), 1-8.
- [18] Sankara, F., Pousga, S., Dao, N. C. A., Gbemavo, D. S. J. C., Clottey, V. A., Coulibaly, K., Nacoulma, J.P., Ouedraogo, S., & Kenis, M. (2018). Indigenous knowledge and potential of termites as poultry feed in Burkina Faso. Journal of Insects as Food and Feed, 4(4), 211-218.
- [19] Pousga, S., Sankara, F., Coulibaly, K., Nacoulma, J. P., Ouedraogo, S., Kenis, M., Chrysostome, C., & Ouedraogo, G. A. (2019). Effects of replacement of fishmeal by termites (*Macrotermes sp.*) on the weight evolution and carcass characteristics of local poultry in Burkina Faso. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 19(2), 14354-14371.
- [20] Oluokun, J. A. (2000). Upgrading the nutritive value of full-fat soyabeans meal for broiler production with either fishmeal or black soldier fly larvae meal (*Hermetia illucens*). Nigerian Journal of Animal Science, 3(2).
- [21] Onsongo, V. O., Osuga, I. M., Gachuri, C. K., Wachira, A. M., Miano, D. M., Tanga, C. M., Ekesi, S., Nakimbugwe, D., & Fiaboe, K. K. M. (2018). Insects for income generation through animal feed: effect of dietary replacement of soybean and fish meal with black soldier fly meal on broiler growth and economic performance. Journal of Economic Entomology, 111(4), 1966-1973.
- [22] Dengah, S. P., Umboh, J. F., Rahasia, C. A., & Kowel, Y. H. (2015). Pengaruh penggantian tepung ikan dengan tepung maggot

- (*Hermetia illucens*) dalam ransum terhadap performans broiler. *Zootec*, 36(1), 51-60.
- [23] Atteh, J. O., & Ologbenla, F. D. (1993). Replacement of fish meal with maggots in broiler diets: effects on performance and nutrient retention. *Nigerian Journal of Animal Production*, 20, 44-49.
- [24] Adeniji, A. A. (2007). Effect of replacing groundnut cake with maggot meal in the diet of broilers. *International Journal of Poultry Science*, 6(11), 822-825.
- [25] Kawasaki, K., Hashimoto, Y., Hori, A., Kawasaki, T., Hirayasu, H., Iwase, S. I., Hashizume, A., Ido, A., Miura, C., Miura, T., Nakamura, S., Seyama, T., Matsumoto, Y., Kasai, K. & Fujitani, Y. (2019). Evaluation of black soldier fly (*Hermetia illucens*) larvae and pre-pupae raised on household organic waste, as potential ingredients for poultry feed. *Animals*, 9(3): 98.
- [26] Al-Qazzaz, M. F. A., Ismail, D., Akit, H., & Idris, L. H. (2016). Effect of using insect larvae meal as a complete protein source on quality and productivity characteristics of laying hens. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 45(9), 518-523.
- [27] Cullere, M., Tasoniero, G., Giaccone, V., Miotti-Scapin, R., Claeys, E., De Smet, S., & Dalle Zotte, A. (2016). Black soldier fly as dietary protein source for broiler quails: apparent digestibility, excreta microbial load, feed choice, performance, carcass and meat traits. *Animal*, 10(12), 1923-1930.
- [28] Hatab, M. H., Ibrahim, N. S., Sayed, W. A., & Sabic, E. M. (2020). Potential Value of Using Insect Meal As an Alternative Protein Source for Japanese Quail Diet. *Brazilian Journal of Poultry Science*, 22(1).
- [29] Widjastuti, T., Wiradimadja, R., & Rusmana, D. (2014). The effect of substitution of fish meal by Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) maggot meal in the diet on production performance of quail (*Coturnix coturnix japonica*). *Animal Science*, 57, 125-129.
- [30] Ruhnke, I., Normant, C., Campbell, D. L., Iqbal, Z., Lee, C., Hinch, G. N., & Roberts, J. (2018). Impact of on-range choice feeding with black soldier fly larvae (*Hermetia illucens*) on flock performance, egg quality, and range use of free-range laying hens. *Animal Nutrition*, 4(4), 452-460.

- [31] Kamarulzaman, M. K., Hafiz, M., Abdullah, A., Chen, A. F., & Awad, O. I. (2019). Combustion, performances and emissions characteristics of black soldier fly larvae oil and diesel blends in compression ignition engine. *Renewable Energy*, 142, 569-580.
- [32] Ginanti, A., & Kusuma, T. Y. T. (2021). Implementasi Teknologi Black Soldier Fly Larvae (BSFL) untuk Pengolahan Sampah Organik di Desa Susukan, Banyumas. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 20(2), 103-108.
- [33] Junaidi, J., Mariyono, M., & Yunaning, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Tiudan Tulungagung dalam Mengurangi Sampah Organik dengan Bantuan Lalat Black Soldier Fly. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP)*, 4(1), 20-29.

Hubungan Perubahan Iklim Dengan Penularan Penyakit

Endang Surjati ¹

Pengantar

Tulisan ini didasari oleh studi literatur dari beberapa tulisan penelitian lain. Beberapa tema yang dipergunakan sebagai dasar penulisan sebagai *keyword* yaitu penyakit menular, perubahan iklim, dan faktor-faktor dalam perubahan iklim, faktor lingkungan terhadap kejadian penyakit. Tema-tema terkait kesehatan dan lingkungan pada saat ini masih menjadi diskursus terutama dengan muncul penyakit baru pada suatu wilayah dan juga adanya perbedaan kerentanan wilayah terhadap penularan penyakit [1].

Aktivitas antropogenik baik sengaja maupun tidak berpengaruh terhadap sistem bumi. Aktivitas tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, terutama karbondioksida, metana, dan uap air; dan secara langsung mempengaruhi keseimbangan panas bumi melalui perubahan albode (reflektivitas) dan siklus hidrologi, termasuk dampak presipitasi lokal dan regional [2]. Perubahan iklim tersebut pada gilirannya akan berpengaruh pada kesehatan manusia.

Lingkungan mempunyai peran yang cukup penting dalam terjadinya penularan penyakit. Pengaruh lingkungan tersebut dapat berupa faktor pendukung maupun penghambat terjadinya penularan penyakit. Lingkungan berperan sebagai faktor penghambat akan dapat menghambat terjadinya penularan penyakit. Hal ini karena lingkungan memberikan situasi yang dapat menghambat kelangsungan hidup vektor sebagai penyebab penyakit. Sedangkan lingkungan sebagai faktor pendukung berperan dalam memberikan kondisi yang mampu untuk meningkatkan kelimpahan vektor dan

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

penyakit itu sendiri [3].

Interaksi lingkungan dengan manusia merupakan isu yang banyak dibahas dalam ilmu geografi. Interaksi tersebut terkait dengan pemanfaatan lahan untuk kelangsungan hidup manusia. Dampak pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dikarakteristikan oleh manipulasi dan konsumsi secara besar-besaran sumber daya alam yang ada. Jejak sejarah aktivitas manusia tersebut terkadang juga ditandai dengan runtuhnya sistem produksi yang dipicu oleh penggunaan lahan yang tidak tepat, seringkali dikombinasikan dengan perubahan iklim dan politik-ekonomi yang sangat dinamis. Pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainability Development Goals*) pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia.

Segitiga epidemiologi terdiri dari komponen lingkungan, host dan vektor. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan berperan terhadap kejadian penyakit menular. Lingkungan sebagai faktor yang dapat menimbulkan terjadinya penyakit terutama lingkungan fisik di sekitar manusia. Manusia dapat sebagai host dalam siklus penularan penyakit. Dinamika penularan penyakit seperti saat ini (Covid-19), maka penularan penyakit dapat terjadi dari host ke host tanpa adanya perantara vektor. Vektor bertindak sebagai perantara atau pembawa penyakit, yang keberlangsungannya juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar, terutama perubahan iklim.

Hilangnya areal lahan hutan karena ekspansi pemanfaatan lahan seperti permukiman, pertanian dan industri merupakan aktivitas manusia yang sangat berperan terhadap perubahan iklim global. Ekspansi tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan melepas nitrogen dari pupuk di seluruh daerah aliran sungai dan ekosistem, dan pelepasan gas metana rumah kaca dari peningkatan irigasi dan penggembalaan.

Degradasi lahan tetap menjadi masalah akut secara global. Dalam arti luas, degradasi lahan adalah penurunan stok biofisik lahan, dan hal itu mempengaruhi fungsi ekosistem dan produksi penggunaan lahan. Stok ini termasuk biomassa, tanah, nutrisi tanah dan kapasitas kelembaban, antara lain faktor; dan mempengaruhi regenerasi vegetasi, curah hujan regional, dan keanekaragaman hayati.

Tidak kalah penting dalam perannya terhadap perubahan iklim adalah urbanisasi dan megapolitan. Wilayah perkotaan diasosiasikan dengan sumber berbagai polusi udara dan masalah pencemaran dalam lingkup regional, seperti hujan asam dan kabut fotokimia. Kota juga merupakan kontributor utama polusi udara secara global terkait penipisan ozon dan pemanasan karbon dioksida (CO₂). Dalam wilayah perkotaan, tingkat polusi bervariasi terhadap jarak ke sumber polusi, baik sumber tidak bergerak maupun bergerak (misalnya kendaraan). Pola polusi lokal di kota-kota terutama terkait dengan distribusi kategori LULC yang berbeda, keberadaan badan air dan taman, kepadatan bangunan dan penduduk, pembagian distrik fungsional, tata letak jaringan transportasi, dan penggunaan AC (*Air Conditioner*) [4].

Dengan semakin berkembangnya metode dan teknologi analisis spasial, perhatian terhadap permasalahan penyakit menular dan kesehatan lingkungan juga semakin berkembang [5]. Geografi medis merupakan subdisiplin geografi tradisional difokuskan pada aspek spasial dari ekologi penyakit dan pemberian perawatan kesehatan. Perkembangan teknologi juga menjadi proksi semakin berkembangnya isu-isu terkait dengan metode pengumpulan dan analisis data terkait kasus penyakit dan parameter lingkungan, seperti pengamatan lapangan (misalnya, habitat nyamuk malaria) dan pembuatan peta (misalnya, kluster penyakit, bentang alam). Beberapa teknologi pemetaan yaitu sistem informasi geografis (SIG) dan teknologi penginderaan jauh, teknologi komputer yang dapat menangani data dalam jumlah besar (*big data*), dan program perangkat lunak analisis spasial yang canggih.

Istilah geografi medikal pertama kali diperkenalkan oleh Hunter tahun 1974 [5], merupakan aplikasi dari konsep dan teknik yang terkait dengan permasalahan kesehatan. Awal perkembangan geografis medis dengan munculnya istilah analisis spasial selama "Revolusi Kuantitatif" tahun 1960-an dan 1970-an. Pada tahun 1980, sudah mulai dilakukan penelitian-penelitian dengan mengaplikasikan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh dalam bidang kesehatan lingkungan dengan dalam lingkup konsep dan wilayah yang masih sempit. Sedangkan pada tahun 1990, penelitian-penelitian terkait dengan model difusi geografi dengan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh telah banyak dilakukan.

Permasalahan

Penyakit karena pengaruh lingkungan membentuk pola sebaran yang mengandung ketidakpastian (*uncertainty*). Pola sebaran kasus penyakit mempunyai dimensi spasial dan temporal. Secara spasial sebaran kasus penyakit mempunyai batasan yang dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan, vektor atau penyakit itu sendiri dan manusia (*host*). Oleh karena itu ketersediaan data-data geospasial dalam bidang kesehatan lingkungan sangat penting sekali terutama dalam mendukung strategi pencegahan dan pemberantasan kejadian penyakit.

Pengelolaan kesehatan lingkungan saat ini lebih banyak dilakukan dengan mendasarkan pada kejadian kasus. Demikian juga, strategi pencegahan mempunyai lingkup wilayah yang lebih fokus pada batasan administrasi. Batas-batas administrasi sebagian besar tidak mendasarkan pada batas ekologi. Habitat vektor penyakit dan penyakit berasosiasi dengan kondisi ekologi tertentu. Tulisan ini akan membahas mengenai hubungan perubahan iklim (baik global maupun lokal) dengan kejadian penularan penyakit.

Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai asosiasi penggunaan/tutupan lahan (*Land Use/Land Cover*) dengan suhu permukaan tanah (*Land Surface*

Temperature) telah lama dilakukan, khususnya pada wilayah urban. Proses urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan berperan dalam pengendalian LST. Informasi mengenai perubahan tutupan lahan bermanfaat untuk perencanaan tata ruang untuk menciptakan kota pintar yang tahan terhadap perubahan iklim [1].

Salah satu penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim adalah kasus COVID-19. Peningkatan kasus COVID-19 pada tingkat kelembapan absolut yang berkisar dari 4 hingga 9 gm³ di sebagian besar dunia selama April – Juli 2020 karena kemungkinan besar kesesuaian meteorologis untuk penyebaran COVID-19. Secara umum, faktor meteorologi mungkin tidak berhubungan langsung dengan jumlah wabah. Namun, negara dengan suhu antara 4°C ± 2°C hingga ~ 19° C ± 2° C dan AH: 4 hingga 9gm³ berada pada risiko yang lebih tinggi untuk berjangkitnya COVID-19 meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan (Kumar, 2021).

Pengaruh lingkungan mempunyai dampak sebagai faktor pendorong dan pendukung kejadian penyakit. Strategi pembatasan aktivitas masyarakat yang dimulai pada tanggal 30 Maret, berdampak pada pengurangan sebagian besar polutan ke konsentrasi minimal (Tobias, et. al., 2020). Sebaliknya, daerah dengan nilai kecepatan angin, kelembaban, dan paparan radiasi matahari yang rendah memiliki tingkat infeksi yang tinggi sehingga mendukung kelangsungan hidup virus (Ahmadi, et. al, 2020).

Lingkungan berupa habitat vektor malaria (nyamuk) berkembang selama musim kemarau. Larva *Anopheles gambiae s.l.* dapat bertahan hidup di lumpur basah maupun di air dan ini menjelaskan kelangsungan hidup mereka di lingkungan yang tidak pasti (dengan implikasi untuk pengelolaan). Dari perspektif lahan basah, penting untuk mengidentifikasi habitat pada tahapan immature (telur dan larva) karena habitat ini biasanya merupakan lahan basah dan mendukung pada tahap pertumbuhan larva. Oleh karena itu menyarankan bahwa fokus pengendalian larva pada musim kemarau akan mengurangi populasi nyamuk musim hujan [9]. Sehingga dengan

studi lokal secara detail untuk identifikasi habitat larva membantu dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian mengenai kasus malaria juga dilakukan terhadap kasus migran yaitu yang berawal dari kejadian perjalanan pelancong pada wilayah endemik malaria [10]. Peristiwa tersebut meningkatkan kasus malaria di negara tersebut (Pantai Gading). Namun demikian karena malaria ditularkan oleh vektor serangga, maka lingkungan menjadi penentu utama penyebaran infeksi. Faktor geo klimat (seperti suhu, kelembaban, kualitas air) menentukan keberadaan tempat perkembangbiakan *Anopheles*, kepadatan vektor, tingkat kelangsungan hidup nyamuk dewasa, umur panjang dan kapasitas vektor.

Beberapa penelitian lain menunjukkan hubungan antara faktor lingkungan dan kesehatan manusia. Seperti penelitian yang memunculkan bukti terjadi pengendapan polusi udara maupun polusi lalu lintas dalam tanah yang diketahui berpotensi berdampak pada kesehatan manusia (M.McKinley, et., al., 2020). Polusi udara dan perubahan iklim adalah tantangan global utama bagi kota-kota dan keduanya berdampak besar pada kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi [12]. Penelitian tersebut juga menganalisis hubungan antara emisi gas rumah kaca (GRK), polusi udara, dan tingkat kesehatan masyarakat untuk negara-negara dengan tingkat perkembangan manusia yang berbeda.

Wilayah perkotaan yang diasosiasikan dengan sumber berbagai polusi udara dan masalah pencemaran dalam lingkup regional, seperti hujan asam dan kabut fotokimia [4]. Kota juga merupakan kontributor utama polusi udara secara global terkait penipisan ozon dan pemanasan karbon dioksida (CO₂). Dalam wilayah perkotaan, tingkat polusi bervariasi terhadap jarak ke sumber polusi, baik sumber tidak bergerak maupun bergerak (misalnya kendaraan). Pola polusi lokal di kota-kota terutama terkait dengan distribusi kategori LULC yang berbeda, keberadaan badan air dan taman, kepadatan bangunan dan penduduk, pembagian distrik fungsional, tata letak jaringan transportasi, dan tingkat pembilasan udara (air

flushing rates). Diketahui bahwa tingkat polusi naik dengan kepadatan penggunaan lahan, yang cenderung meningkat menuju pusat kota. Oleh karena itu, secara umum terdapat gradien perkotaan-pedesaan dalam konsentrasi pencemar udara. Misalnya konsentrasi partikel, CO₂, dan ion nitrat (oksida seperti hujan asam) di dalam kota biasanya dua sampai tiga kali lebih tinggi daripada di daerah pinggiran kota dan lima kali lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Polutan membawa dampak pada kesehatan manusia. Hong Kong Environmental Protection Department (EPD 2004), melaporkan bahwa peningkatan 10 µg / m³ pada konsentrasi NO_x, SO₂, partikulat tersuspensi pernapasan (RSP), dan ozon menyebabkan penyakit terkait seperti penyakit pernapasan, paru kronis, dan jantung kardiovaskular meningkat 0,2–3,9%.

Perkembangan analisis spasial terkait dengan penularan penyakit semakin berkembang dengan ditemukannya metode-metode analisis spasial yang bervariasi. Metode perolehan data tidak hanya dilakukan dengan pengamatan lapangan yang membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis semakin banyak dipergunakan karena menawarkan konsep dan teknologi yang baru dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Parameter lahan berupa suhu yang diturunkan dari citra satelit. Kondisi suhu tersebut dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara kondisi suhu dengan jumlah harian total partikulat tersuspensi (TSP) dan sulfur dioksida (SO₂) pada musim dingin di lima lokasi di Roma, Italia [13]. Penelitian tersebut menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara suhu dengan TSP, tetapi berkorelasi negatif yang lemah dengan SO₂. Citra *Advanced Very High Resolution Radiometer* (AVHRR) multitemporal dari Milan, Italia, yang diperoleh pada 12-14 Februari 1993, untuk mempelajari korelasi suhu yang tampak dengan parameter kualitas udara, termasuk TSP dan SO₂.

PJ dan SIG membantu dalam survei lapangan untuk memastikan status habitat larva suatu situs relatif cepat dan survei

area yang luas dengan biaya yang efektif. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi lahan basah sementara di perkotaan subtropis dengan menggunakan jenis-jenis citra penginderaan jauh tertentu. Citra satelit resolusi spasial 1 m dan sistem informasi geografis dipergunakan untuk memperkirakan distribusi spasial habitat larva nyamuk, dengan mempertimbangkan medan, penggunaan lahan, dan air permukaan. Data lingkungan yang diperoleh dari data penginderaan jauh dapat digunakan sebagai prediktor yang baik terkait dengan risiko malaria.

Perolehan data penginderaan jauh dengan menggunakan metode algoritma seperti NDVI (curah hujan, kelembaban, sinar matahari, suhu, ketinggian, penggunaan lahan dan tutupan lahan) dipergunakan untuk menganalisis lingkungan yang berpotensi menguntungkan habitat vektor (nyamuk), untuk perkembangan larva (tempat berkembang biak) dan kelangsungan hidup nyamuk dewasa. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang berhubungan dengan klinis malaria dan epidemi malaria secara autochthonous dan populasi menetap. Variabel cuaca menggambarkan kelebihan air (curah hujan, neraca air positif) secara signifikan terkait dengan peningkatan risiko malaria. Parameter cuaca terkait dengan habitat vektor nyamuk dari rekomendasi WHO, yaitu : maksimum, suhu rata-rata dan minimum, curah hujan, jumlah hari berturut-turut tanpa hujan, evapotranspirasi dan neraca air.

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut: 1) menetapkan tema, 2) menetapkan subjek artikel, 3) mereview artikel (mendukung atau menolak pernyataan) dan 3) analisis. Tujuan pembuatan naskah adalah untuk menganalisis hubungan antara perubahan iklim dengan penyakit menular di tropis dan melakukan studi literatur beberapa penelitian terkait dengan faktor-faktor lingkungan terhadap penyakit menular.

Beberapa penelitian terkait dengan penyakit menular telah dilakukan oleh penulis, terutama yang disebabkan oleh vektor nyamuk yaitu tuberkulosis (TB paru), demam berdarah dan filariasis. Pengaruh

lingkungan penyebab penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk diantaranya suhu, kelembaban, dan curah hujan. Sedangkan TB paru banyak disebabkan oleh pola dan bentuk permukiman di sekitar penderita paru. Pengaruh lingkungan terhadap kejadian kasus penyakit membawa dampak yang signifikan dalam pola sebaran baik dalam dimensi spasial maupun temporal.

Penelitian mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap beberapa kasus penyakit menular (contoh kasus COVID-19). Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan pro dan kontra terhadap rekomendasi adanya pengaruh perubahan iklim terhadap sebaran kasus penyakit menular. Beberapa kasus penyakit berkontribusi pada munculnya perubahan lingkungan. Banyak juga penelitian yang menghasilkan temuan adanya faktor lingkungan yang berperan meningkatkan kepadatan vektor dan penyakit menular.

Tulisan ini akan meneliti hubungan antara perubahan iklim dan penularan penyakit menular terutama di wilayah tropis. Penulis melakukan penelitian studi literatur untuk meningkatkan pemahaman mengenai hubungan perubahan iklim dengan penularan penyakit di wilayah tropis.

Pembahasan

Lokasi di permukaan bumi dapat dinyatakan dengan dua cara yaitu lokasi secara absolut dan relatif. Lokasi absolut merupakan lokasi yang pasti posisinya di permukaan bumi. Lokasi tersebut dapat dinyatakan dengan berdasarkan koordinat geografi dan kartesius. Lokasi dinyatakan secara relatif ketika posisi suatu objek di permukaan bumi dinyatakan berdasarkan posisi objek-objek yang lainnya yang berdekatan. Selain itu lokasi yang dinyatakan secara relatif yaitu didasarkan pada pembagian iklim di dunia.

Perubahan iklim biasanya selalu dikaitkan dengan perubahan unsur-unsur iklim seperti suhu, tekanan, kelembaban, hujan, angin, dan lain-lain terhadap kondisi normalnya. Perubahan unsur-unsur iklim tersebut berpeluang mengakibatkan terjadinya

perubahan zonasi iklim. Klasifikasi Iklim Köppen digunakan untuk menentukan zonasi iklim pada 33 provinsi di Indonesia berdasarkan curah hujan, suhu, dan sebaran vegetasi. Dari data diketahui bahwa rata-rata suhu udara di Indonesia selalu berada di atas 18° C sepanjang tahun, maka Indonesia sudah dapat dipastikan memiliki tipe iklim A. Umumnya wilayah Indonesia mengalami hujan sepanjang tahun yang berarti memiliki tipe iklim hutan hujan tropis (Af). Variasi zona iklim di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kondisi curah hujan daripada suhu udara (Handayani, 2021)

Dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Peningkatan lahan terbangun yang diikuti dengan penurunan jumlah vegetasi di Kota Semarang kemudian menyebabkan naiknya rata-rata suhu permukaan sebesar 2-5°C (Handayani, dkk. 2021). Mitigasi perubahan iklim identik dengan berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi emisi yang bersumber dari gas antropogenik dengan kontributor terbesar yaitu gas CO₂ dari kendaraan bermotor. Terkait dengan hal ini, gangguan yang timbul di wilayah perkotaan terkait perubahan iklim tidak hanya terbatas pada bencana perubahan iklim namun juga gangguan lingkungan yang terjadi secara masif sebagai akibat dari emisi gas rumah kaca khususnya yang berasal dari gas buang kendaraan bermotor.

Hubungan antara perubahan iklim dengan penyakit menular di wilayah iklim hutan hujan tropis

Pandemi penyakit merupakan penyebaran penyakit menular di seluruh dunia yang telah menjadi perhatian serius terutama pada wilayah-wilayah yang rentan terhadap penyakit dan juga pada wilayah yang sebelumnya belum pernah terjangkit suatu penyakit. Penularan penyakit karena faktor lingkungan biasanya lebih sering ditularkan oleh agen atau vektor. Misalnya nyamuk adalah vektor yang bertanggung jawab atas penularan penyakit malaria, demam

berdarah dan filariasis. Identifikasi faktor-faktor, khususnya faktor lingkungan yang dapat dideteksi dari data penginderaan jauh yang sangat berkorelasi dengan wabah penyakit tersebut merupakan aspek penting dalam studi kesehatan lingkungan. Data penginderaan jauh mampu untuk menyajikan data lingkungan dalam lingkup lokal sampai lokal dan mengeksplorasi data permukaan lahan secara *real time* serta *time series*.

Teknologi penginderaan jauh dapat melakukan pemantauan kondisi lingkungan, serta variasi iklim jangka pendek, seperti kejadian El Nino. Data lingkungan tersebut diperlukan untuk memberikan penilaian risiko untuk daerah yang rentan sehingga strategi intervensi dapat digunakan untuk mencegah atau membatasi dampak dari banyak vektor penyakit yang ditularkan. Sistem informasi geografis sebagai sumber basis data (iklim, geografis, dan penyakit) yang digunakan untuk membedakan korelasi antara kumpulan data yang berbeda. Sistem informasi geografis adalah alat yang, jika digabungkan dengan produk yang diturunkan dari satelit, memberikan kerangka kerja untuk mempelajari wabah penyakit [2].

Pandemi *Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh virus korona baru yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan hasil review penelitian diketahui bahwa tindakan ekstrim dari penghentian sebagian ke total mungkin telah mempengaruhi kualitas lingkungan global karena penurunan emisi polutan atmosfer. Hipotesis tersebut telah diuji menggunakan citra satelit, kumpulan data iklim (suhu, dan kelembaban absolut), dan kasus COVID-19 yang tersedia di domain publik. Ada penurunan substansial dalam tingkat nitrogen dioksida (NO_2 : $0,00002 \text{ mol m}^{-2}$), penurunan CO yang rendah ($<0,03 \text{ mol m}^{-2}$), dan penurunan rendah hingga sedang di hotspot utama wabah COVID-19 selama Februari – Maret 2020, yang dapat dikaitkan dengan kegiatan lockdown. Studi literatur memproyeksikan peningkatan cakupan bahaya COVID-19

yang tinggi pada tingkat kelembapan absolut mulai dari 4 hingga 9 gm^{-3} di sebagian besar dunia selama April – Juli 2020 karena kemungkinan terkait dengan kesesuaian meteorologi yang tinggi untuk penyebaran COVID-19. Berdasarkan penelitian tersebut Temuan kami menunjukkan bahwa ada banyak ruang untuk memulihkan lingkungan global dari efek buruk aktivitas antropogenik melalui tindakan penghentian sementara [15].

Penelitian telah membuktikan adanya perubahan tingkat polusi udara selama diberlakukannya lockdown di negara Spanyol selama masa pandemi SARS-CoV-2 (Tobias, et., al., 2020). Polusi udara perkotaan menurun secara nyata tetapi dengan perbedaan substansial di antara polutan seperti NO₂ (-45 hingga -51%), polutan terutama terkait dengan emisi lalu lintas. Penurunan yang lebih rendah diamati untuk PM₁₀ (-28 sampai -31,0%). Sebaliknya, kadar O₃ meningkat (+33 hingga + 57%), kemungkinan karena titrasi O₃ yang lebih rendah oleh NO dan penurunan NO_x dalam lingkungan terbatas. Perbedaan yang relevan dalam meteorologi dari dua periode ini juga dibuktikan. Penurunan rendah untuk PM₁₀ mungkin terkait dengan kontribusi regional yang signifikan dan asal sekunder aerosol halus yang berlaku. Tidak ada tren yang pasti untuk tingkat SO₂ yang rendah, mungkin karena preferensi pengurangan emisi dari pesawat yang paling tidak berpolusi.

Penelitian lain sebaliknya ditemukan adanya pengaruh faktor iklim terhadap penyebaran COVID-19 (Ahmadi, et., al., 2020). Dalam penelitian ini parameter utama meliputi jumlah orang yang terinfeksi COVID-19, kepadatan penduduk, pergerakan intra-provinsi, dan hari infeksi hingga akhir masa penelitian, suhu rata-rata, curah hujan rata-rata, kelembaban, kecepatan angin, dan rata-rata radiasi matahari diselidiki untuk memahami bagaimana parameter ini mempengaruhi penyebaran COVID-19 di Iran? Koefisien korelasi parsial (PCC) dan metode Sobol'-Jansen digunakan untuk menganalisis pengaruh dan korelasi variabel terhadap laju penyebaran COVID-19. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk, pergerakan

intra provinsi berhubungan langsung dengan terjadinya wabah infeksi. Sebaliknya, daerah dengan nilai kecepatan angin, kelembaban, dan paparan radiasi matahari yang rendah memiliki tingkat infeksi yang tinggi sehingga mendukung kelangsungan hidup virus. Beberapa wilayah juga menunjukkan level kerentanan yang signifikan terhadap infeksi karena kepadatan penduduk yang tinggi, pergerakan intra-provinsi dan tingkat kelembaban yang tinggi dibandingkan dengan provinsi di Selatan.

Penelitian yang terkait dengan transmisi vektor dikaitkan dengan faktor-faktor lingkungan terjadinya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk (*Lymphatic*, malaria, demam berdarah), siput (*schistosomiasis*), dan tikus (*Leptospirosis*). Peta sebaran filariasis limfatik telah dibuat dengan mendasarkan pada faktor-faktor lingkungan, seperti suhu, kelembaban, penggunaan lahan, kondisi air permukaan, dan bentuk lahan. Kombinasi fitur lingkungan komposit dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbanyakan inang siput air tawar (Fusco & Wang, 2020). Misalnya, siput air tawar lebih menyukai kehangatan dan kelembaban di habitatnya untuk kondisi perkembangbiakan yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat kelembaban tanah dan kondisi iklim yang baik di daerah yang bersangkutan maka kemungkinan penyebaran dan kepadatan keong yang tinggi di daerah tersebut meningkat. berdasarkan data historis menggunakan survei pemeriksaan darah malam yang berguna untuk mengidentifikasi wilayah berisiko di tingkat mikro.

Hubungan antara kesehatan manusia dan iklim bukanlah sebuah konsep baru, juga bukan subjek baru. Beberapa kesehatan manusia sangat kompleks dan dinamis terkait dengan musim, pola cuaca lokal, dan berbagai faktor lingkungan. Namun, selama 2 dekade terakhir, perkembangan alat dan teknologi modern telah meningkatkan penyelidikan-penyelidikan terhadap peran lingkungan, termasuk cuaca dan iklim, dalam dinamika penyakit menular. Minat ilmiah telah dirangsang lebih lanjut oleh masalah yang berkembang resistensi antibiotik di antara patogen, kemunculan dan kemunculan

kembali penyakit menular di seluruh dunia, potensi ancaman bioterorisme, dan perdebatan tentang perubahan iklim perubahan.

Kekhawatiran atas dampak perubahan antropogenik pada habitat darat dan perairan, perubahan iklim global, telah membantu menelurkan lintas disiplin ilmu yang berkembang sebagai upaya untuk memahami bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi dan mempengaruhi kesehatan manusia.

Negara Indonesia juga tidak terlepas dari adanya permasalahan perubahan global dan dampaknya terhadap penularan penyakit. Wilayah Indonesia membentang pada garis khatulistiwa dari Sabang sampai Merauke. Garis Khatulistiwa atau juga disebut dengan Ekuator merupakan suatu garis imajiner atau garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian yaitu belahan bumi Utara dan belahan bumi Selatan. Garis khatulistiwa dipergunakan sebagai acuan untuk dapat menentukan perbedaan zona-zona iklim di bumi. Negara-negara yang berada pada wilayah di sekitar garis khatulistiwa ini mempunyai iklim tropis (panas). Keadaan cuaca yang rata-rata panas mengakibatkan negara-negara di daerah tersebut beriklim tropis. Iklim tersebut mengakibatkan terjadinya hujan yang disebut dengan hujan hutan tropis. Suhu tropis di khatulistiwa tersebut akan relatif tetap sepanjang tahun, dengan variasi musiman yang didominasi oleh presipitasi.

Semakin dekat pada suatu daerah dengan garis khatulistiwa maka daerah tersebut akan semakin tinggi memiliki keanekaragaman hayati. Namun sebaliknya, semakin jauh dari khatulistiwa semakin rendah keanekaragaman hayatinya. Indonesia merupakan salah satu yang terletak di sekitar khatulistiwa. Hal ini juga dapat dijadikan tolak ukur untuk bisa melihat bagaimana persebaran makhluk hidup yang terdapat di daerah tersebut. Suhu dan kelembaban di sekitar khatulistiwa juga mempengaruhi kondisi ekosistem pada wilayah tersebut. Suhu lingkungan ditentukan oleh banyaknya sinar matahari yang diserap oleh komponen yang menyusun suatu ekosistem. Makhluk hidup mampu bertahan hidup pada kisaran suhu 0⁰ C hingga

40⁰ C. Suhu yang paling ideal bagi kelangsungan hidup makhluk adalah sekitar 27⁰ C. Suhu tersebut dikategorikan dalam suhu hangat dan hampir terjadi sepanjang tahun. Oleh karena itu wilayah di khatulistiwa terdapat hutan yang disebut sebagai hutan hujan tropis.

Selain keberadaan keanekaragaman hayati, konsekuensi logis letak Indonesia di wilayah khatulistiwa adalah munculnya berbagai jenis penyakit yang penularannya dipengaruhi oleh lingkungan (iklim). Di Negara Indonesia juga tersebar keanekaragaman penyakit tropis yang terabaikan, agen penyebabnya dan vektor, serta inang perantara (*host*), dan potensi epidemi (seperti untuk demam berdarah, malaria, filariasis, *schistosomiasis*, *leptospirosis*, rabies anjing dan *leishmaniasis*).

Setiap penyakit yang diproksi oleh faktor lingkungan mempunyai parameter-parameter lahan tertentu yang dapat meningkatkan maupun mengurangi terjadinya penularan penyakit. Secara umum iklim di Indonesia merupakan iklim yang sangat sesuai untuk berkembangnya berbagai penyakit menular tersebut.

Faktor-faktor lingkungan terhadap penyakit menular.

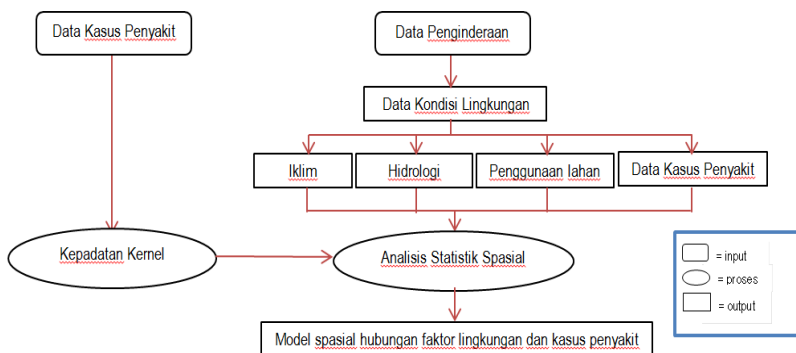
Perubahan lingkungan global telah membawa dampak yang sangat luas baik dalam dimensi spasial maupun temporal. Seperti urbanisasi dan migrasi, membawa perubahan dalam wilayah yang luas dan waktu yang lama. Aktivitas tersebut akan memunculkan bangunan-bangunan dan gedung-gedung baru yang berdampak pada kenaikan suhu permukaan lahan, lebih dikenal dengan *urban heat island*.

Urban heat island (pulau panas perkotaan), adalah wilayah perkotaan (metropolitan) yang jauh lebih hangat daripada daerah pedesaan di sekitarnya. Panas dihasilkan oleh energi dari semua orang, mobil, bus, dan kereta api di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pulau panas perkotaan dibuat di area seperti ini: tempat yang memiliki banyak aktivitas dan banyak orang. UHI terjadi ketika rumah, pertokoan, dan bangunan industri dibangun

berdekatan. Bahan bangunan biasanya sangat bagus dalam mengisolasi, atau menahan panas. Isolasi ini membuat area di sekitar bangunan menjadi lebih hangat.

Polusi udara juga berkontribusi pada UHI, seperti mobil dan pabrik, selalu menghabiskan energi, baik untuk area olah raga, mengemudi, atau hanya menjalani kehidupan sehari-hari. Daerah perkotaan berpenduduk padat, artinya ada banyak orang di ruang kecil. Daerah perkotaan juga dibangun dengan padat, artinya bangunan dibangun sangat berdekatan. Ketika tidak ada lagi ruang untuk area perkotaan untuk berkembang, para arah pengembangan kota cenderung ke atas (vertikal), menciptakan gedung pencakar langit. Semua konstruksi ini berarti pemborosan panas - dan panas yang lepas dari isolasi tidak akan pergi ke mana pun. Itu tetap ada di dalam dan di antara gedung-gedung di sekitar UHI.

Semakin berkembangnya teknologi dan metode analisis spasial, maka penelitian-penelitian terkait lingkungan dan penyakit semakin berkembang pesat. Terutama dalam perkembangan teknologi pemetaan dan analisis spasial. Dengan teknologi pemetaan, maka visualisasi sebaran penyakit baik dalam dimensi spasial dan temporal menjadi lebih menarik dan berdaya guna. Berikut ini pada gambar 1, disajikan salah satu contoh dalam menyusun model spasial hubungan antara lingkungan dan kejadian penyakit.



Gambar 1. Model spasial hubungan faktor lingkungan dan kasus penyakit

Kesimpulan

Demikianlah permasalahan perubahan iklim terhadap kejadian suatu penyakit tertentu masih menjadi diskursus yang terus berkembang, dinamis dan kompleks. Lebih lanjut, sasaran iklim regional, nasional, dan internasional paling efektif ketika pemerintah kota turut serta menjadikan daerah perkotaan fokus utama tata kelola iklim di semua tingkat. Peran para aktor yang berkepentingan dalam aksi-aksi perubahan iklim sangat penting dalam hal ini, baik dalam satu otoritas maupun lintas otorisasi dalam lingkup lokal sampai dengan tingkat global.

Referensi

- [1] F. O. Akinyemi, M. Ikanyeng, and J. Muro, "Land cover change effects on land surface temperature trends in an African urbanizing dryland region," *City Environ. Interact.*, vol. 4, p. 100029, Dec. 2019, doi: 10.1016/j.cacint.2020.100029.
- [2] B. Andrick, B. Clark, K. Nygaard, A. Logar, M. Penaloza, and R. Welch, "Infectious Disease and Climate Change: Detecting Contributing Factors and Predicting Future Outbreaks Ben Andrick, Bennett Clark, Kjell Nygaard, Antonette Logar, and Manuel Penaloza Department of Mathematics and Computer Science and Ronald Welch Inst," pp. 7–9, 1997.
- [3] S. Sabesan, K. H. K. Raju, S. Subramanian, P. K. Srivastava, and P. Jambulingam, "Lymphatic filariasis transmission risk map of India, Based on a geo-environmental risk model," *Vector-Borne Zoonotic Dis.*, 2013, doi: 10.1089/vbz.2012.1238.
- [4] F. M. Danson and S. E. Plummer, *Advances in environmental remote sensing*. 1995.
- [5] D. P. Albert, W. M. Gesler, and B. Levergood, *Spatial Analysis, GIS, and Remote sensing Applications in the Health Sciences*. Chelsea, Michigan: Ann Arbor Press, 2005.
- [6] dan K. Al, Kumar, Kumari, Saikia, Dayanandan, Adhikari, "The dark cloud with a silver lining: Assessing the impact of the SARS COVID-19 pandemic on the global environment," *Sci. Total Environ.*, vol. 732, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139297>.
- [7] A. dan Q. Tobias, Carnerero, Reche, Massague, Via, Minguillon,

- “Changes in air quality during the lockdown in Barcelona (Spain) one month into the SARS-CoV-2 epidemic,” *Sci. Total Environ.*, vol. 726, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138540>.
- [8] dan G. Ahmadi, Sharifi, Dorosti, Ghoushchi, “Investigation of effective climatology parameters on COVID-19 outbreak in Iran,” *Sci. Total Environ.*, vol. 729, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138705>.
- [9] E. T. Mwase *et al.*, “Mapping the Geographical Distribution of Lymphatic Filariasis in Zambia,” *PLoS Negl. Trop. Dis.*, 2014, doi: [10.1371/journal.pntd.0002714](https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002714).
- [10] Texier, “Environmental determinant of malaria cases among travellers,” *Malar. J.*, vol. 87, 2013.
- [11] C. Jennifer M. McKinley, Ute Mueller, Peter M. Atkinson, Ulrich Offerdingera, “investigating the influence of environmental factors on the incidence of renal disease with compositional data analysis using balances,” *Appl. Comput. Geosci.*, vol. 6, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.acags.2020.100024>.
- [12] Liu, “A global perspective on national climate mitigation priorities in the context of air pollution and sustainable development,” *City Environ. Interact.*, vol. 1, 2019, doi: doi.org/10.1016/j.cacint.2019.100003.
- [13] Lal, “The dark cloud with a silver lining: Assessing the impact of the SARS COVID-19 pandemic on the global environment,” *Sci. Total Environ.*, vol. 732, 2020, doi: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139297.
- [14] dan D. I. Handayani, Setiadi, Suryandaru, Ed., *Ketahanan Iklim Perkotaan, Konsep, praktek, instrumen dan tata kelola*. Semarang, 2021.
- [15] P. Kumar and L. Morawska, “Could fighting airborne transmission be the next line of defence against COVID-19 spread?,” *City Environ. Interact.*, vol. 4, no. 2019, p. 100033, 2020, doi: [10.1016/j.cacint.2020.100033](https://doi.org/10.1016/j.cacint.2020.100033).
- [16] B. Fusco, Wang, “Data mining and machine learning approaches for prediction modelling of schistosomiasis disease vectors,” *Int. J. Mach. Learn. Cybern.*, vol. 11, pp. 1159–1178, 2020, doi: doi.org/10.1007/s13042-019-01029-x.

Vaksin Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Virus Hepatitis B

Maris Kurniawati ¹

Pengantar

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peranan rekayasa genetika dalam bidang kesehatan khususnya dalam menangani penyakit Hepatitis B. Salah satu produk rekayasa genetika adalah Vaksin Hepatitis B yang dihasilkan oleh yeast (*Saccharomyces cereviceae*) melalui teknik rekombinan DNA menggunakan hepatitis B surface antigen (HBsAg). Penggunaan vaksin ini telah meluas di seluruh dunia dan terbukti efektif dalam menekan jumlah infeksi virus Hepatitis B (HVB). Jenis vaksin rekombinan yang paling umum digunakan adalah Recombivax HB dan Engerix-B, diberikan secara intramuscular pada bayi yang baru lahir, anak-anak, dan dewasa. Dosis pemberian vaksin sebanyak 3 kali.

Teknologi DNA rekombinan atau sering juga disebut rekayasa genetika merupakan teknologi yang memanfaatkan proses replikasi, transkripsi dan translasi untuk memanipulasi, mengisolasi dan mengekspresikan suatu gen dalam organisme yang berbeda. Biasanya gen dari organisme yang lebih tinggi diekspresikan pada organisme yang lebih rendah. Teknologi ini juga memberikan kesempatan yang tidak terbatas untuk menciptakan kombinasi baru dari gen yang tidak ada pada kondisi normal. Melalui rekayasa genetika, akan dihasilkan kombinasi baru dari materi genetik melalui penyisipan molekul asam nukleat kedalam suatu sistem DNA vektor (plasmid bakteri, virus dan lain-lain) dan kemudian memasukkan vektor ini kedalam suatu inang sehingga akan dihasilkan suatu produk gen dalam jumlah banyak.

Protein rekombinan merupakan protein yang diproduksi oleh sel yang DNA-nya telah dimodifikasi dengan rekombinasi genetik.

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Secara umum sistem produksi yang diadaptasi untuk pembuatan protein rekombinan adalah suatu proses yang berdasarkan pada:

- a. penggunaan vektor ekspresi (yang berfungsi sebagai pembawa gen pengkode protein yang diinginkan dan bertanggung jawab untuk replikasi, transkripsi dan translasinya).
- b. penggunaan sel inang yang melaksanakan instruksi yang disediakan oleh gen tersebut untuk mensintesis gen yang diinginkan
- c. produksi massa protein yang diinginkan dengan menggunakan suatu inducer yang berfungsi untuk menginduksi produksi protein tersebut.
- d. pemisahan dan ekstraksi protein dari kulturnya dilanjutkan dengan purifikasinya.

Rekayasa genetika telah banyak digunakan dalam berbagai bidang diantaranya dalam bidang pertanian (tanaman transgenik), pangan, pembuatan antibiotik, peternakan (kloning hewan), pengolahan limbah, pembuatan protein rekombinan, pembuatan enzim (streptokinase, tre rekombinase), pembuatan hormon (growth hormone) serta pembuatan vaksin (polio, hepatitis B, cacar). Infeksi virus hepatitis B dapat menyebabkan penyakit hati menahun, sirosis dan karsinoma hepatoselular.

Di seluruh dunia diperkirakan ada lebih 200 juta orang sebagai carrier virus hepatitis B. Oleh karena itu, imunisasi diperlukan terutama bagi yang mempunyai resiko infeksi tinggi, antara lain berdasarkan pola epidemiologi, faktor ekonomi, budaya dan lingkungan. Selain itu adanya transmisi perinatal virus hepatitis B di beberapa tempat menunjukkan pentingnya imunisasi bayi, terutama yang lahir dari ibu karier.

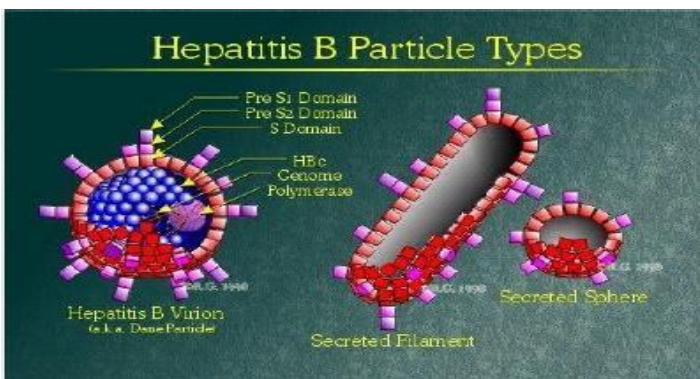
Tujuan vaksinasi hepatitis B antara lain untuk mencegah penyakit klinis dan transmisi virus hepatitis B ke individu lain. Faktor yang mempengaruhi imunogenisitas pada waktu imunisasi antara lain

faktor host dan faktor imunisasi. Faktor host meliputi umur, lingkungan dan genetik, sedang faktor imunisasi meliputi tempat inokulasi, dosis, vaksin dan program imunisasi. Virus hepatitis B hanya hidup di dalam sel dan plasma manusia (dan simpanse). Virus ini tidak dapat berkembang biak pada media biakan standar yang biasa digunakan membiakkan virus untuk pembuatan vaksin konvensional. Kesulitan ini sedikit menghambat perkembangan pembuatan vaksin hepatitis B.

Penyakit Hepatitis

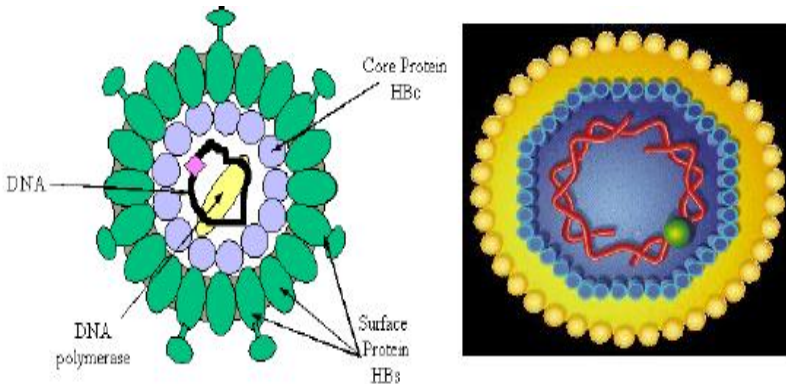
Penyakit Hepatitis B banyak ditemukan di seluruh dunia, terutama di daerah Asia, Afrika, Pasifik Selatan, Amerika Selatan, Timur Tengah. Diketahui bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus Hepatitis setelah ditemukan pada liver mumi anak kecil 500 tahun yang lalu di Korea. Penyakit hepatitis merupakan penyakit infeksi yang menyerang hati dan disebabkan oleh virus hepatitis B (HVB). Virus ini berasal dari genus Orthohepadnavirus, dan familinya adalah Hepadnaviridae.

Mula-mula, virus ini dikenal sebagai serum hepatitis. Bila dibandingkan dengan virus AIDS (HIV), HBV seratus kali lebih ganas dan sepuluh kali lebih banyak menularkan. Di bawah mikroskop elektron, HBV tampak sebagai partikel dua lapis berukuran 42 nm yang disebut partikel Dane.



Gambar 1. Virus Hepatitis B

Lapisan luarnya terdiri atas antigen, yang disingkat HBsAg. Antigen ini membungkus bagian dalam virus yang disebut partikel inti atau core yang berukuran 27 nm. Masa inkubasi HBV kira-kira selama 6 sampai 25 minggu. Virus ini juga tidak dapat tumbuh dalam kultur jaringan, dan memiliki 7 genotip (A–G), serta 9 serotype (ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw4, adrq+, adrq-)



Gambar 2. Struktur Virus Hepatitis B

HBV terdapat dalam semua cairan tubuh dari penderitanya, baik dalam darah, sperma, cairan vagina dan air ludah. Virus ini mudah menular pada orang-orang yang hidup bersama dengan orang yang terinfeksi melalui cairan tubuh tadi. Secara umum, seseorang dapat tertular HBV melalui:

1. Hubungan seksual
2. Penggunaan jarum suntik
3. Penggunaan alat yang terkontaminasi darah dari penderita (pisau cukur, tato, tindik, dsb)
4. 90% berasal dari ibu yang terinfeksi HBV
5. Transfusi darah yang terinfeksi HBV
6. Lewat peralatan dokter gigi dan peralatan dokter bedah, jika sterilisasi peralatannya kurang sempurna

Vaksin Hepatitis

1. Sejarah pembuatan vaksin Hepatitis

Pada tahun 1965, Blumberg dan kawan-kawan di Philadelphia menemukan suatu antibodi pada pasien yang ditransfusi yang berasal dari suku Aborigin Australia, sehingga antigen tersebut dikenal dengan nama Antigen Australia. Pada tahun 1977, Blumberg mendapat hadiah nobel untuk penemuannya itu. Sekarang antigen tersebut dikenal dengan nama hepatitis B surface antigen (HBsAg). Vaksin hepatitis B pertama kali diperkenalkan oleh Krugman dan koleganya pada tahun 1971. Mereka menggunakan serum yang mengandung virus Hepatitis B. Serum diencerkan dan diinaktivasi panas 90°C selama 1 menit. Vaksinasi dilakukan pada 29 orang anak, hasilnya separuh dari anak terlindung dari infeksi Hepatitis B.

Pengembangan vaksin ini selanjutnya menggunakan antigen lain untuk imunisasi aktif yaitu “Hepatitis B surface antigen (HBsAg)”. Vaksin HBsAg ini merupakan partikel yang berukuran 22 nm, diinaktivasi panas, diadsorpsi alum dan bebas dari asam nukleat. Dimurnikan melalui tahap presipitasi, ultra sentrifugasi, gel filtrasi dan afinitas kromatografi.

Tahun 1973 diketahui bahwa HBV dapat menginfeksi simpanse, tahun 1981 dibuatlah vaksin hepatitis B yang berasal dari plasma darah penderita, seiring dengan perkembangan teknologi maka pada tahun 1986 dibuatlah vaksin rekombinan dengan menggunakan yeast *Saccharomyces cereviceae*. Penggunaan vaksin ini secara besar-besaran pada tahun 1991 dan dianjurkan pada bayi yang baru lahir dan tahun 1996 penggunaan vaksin secara umum untuk dewasa.

2. Vaksinasi terhadap Hepatitis B

Vaksin hepatitis B dapat mencegah penyebaran HBV termasuk kanker hati dan sirosis. Vaksin hepatitis B mulai dikomersialkan di Amerika Serikat pada tahun 1982, diproduksi dengan teknik DNA rekombinan pada tahun 1986, dan produksi *second recombinant type*

hepatitis B vaccine pada tahun 1989. Vaksinasi Hepatitis B rutin dilakukan di Amerika sejak tahun 1991 dan dilaporkan terjadi penurunan tingkat infeksi HBV sebanyak 75% pada semua kelompok umur.

Pelaksanaan imunisasi aktif terhadap virus hepatitis B pada manusia, pertama kali dilakukan oleh Krugman dan koleganya tahun 1971 yaitu menggunakan sediaan serum yang diperoleh dari karir virus hepatitis B dan diinaktifasi menggunakan panas. Hasilnya 20 dari 29 anak terlindung dari infeksi virus hepatitis B. Imunitas dijumpai pada anak-anak yang mempunyai antibodi terhadap Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg). Hasil ini memacu perkembangan pembuatan vaksin hepatitis B lebih maju, terutama untuk produksi skala besar dari plasma karier.

3. Pembuatan vaksin Hepatitis B

Vaksin HBsAg yang dimumikan dari plasma karir dan inaktifasi formalin/panas telah diproduksi di beberapa laboratorium. Namun dengan terbatasnya persediaan plasma, perlunya seleksi dan kontrol yang ketat untuk mendapatkan vaksin murni dan bebas sumber infeksi lain, maka pendekatan lain terus dicari. Problem ini akhirnya dapat teratasi dengan pendekatan rekombinan DNA. Salah satu sintesis HbsAg yang telah berhasil dari sel ragi (yeast) rekombinan. Partikel ini memperlihatkan sifat imunogenik pada binatang percobaan; pengujian pada manusia telah berhasil menginduksi anti HBs dan melindungi dari infeksi virus hepatitis B. Saat ini setidaknya ada 3 sumber partikel HBsAg yang digunakan untuk vaksinasi hepatitis B. Terutama HbsAg dimumikan dari plasma karir. Metode ini telah berhasil dan efikasinya tidak disangsikan. Dua sumber lain yaitu melalui pendekatan teknologi rekombinan DNA, dengan memasukan gen virus hepatitis B pengkode HBsAg ke dalam sel ragi dan sel mamalia. Selain itu, HBsAg juga dapat disekresi oleh *E coli*, namun jumlahnya relatif kecil, demikian juga sifat antigeniknya.

a. Virus yang dilemahkan (imunisasi)

Untuk menghasilkan vaksin dibutuhkan HBsAg yang berasal dari virus Hepatitis B, virus diperbanyak dalam medium tertentu sehingga nantinya dihasilkan virus yang tidak menyebabkan penyakit namun mampu merangsang sistem imun. Strain ini selanjutnya dikultur pada kondisi yang sesuai dan virusnya diinaktifkan melalui pemanasan dan proses kimia. Tahapan berikutnya virus yang telah dilemahkan ini diinjeksikan ke dalam tubuh.

b. Vaksin DNA rekombinan

Vaksin hepatitis B yang diproduksi sel ragi rekombinan telah menjalani pengujian keamanan, imunogenisitas dan evaluasi klinis. Hasil menunjukkan bahwa vaksin ini aman, antigenik dan relatif bebas efek samping yang merugikan, bahkan vaksin ini telah dilisensikan dan diproduksi di berbagai negara. Salah satu keuntungan vaksin dari sel ragi dibanding dari plasma yaitu siklus produksinya dapat dikurangi, dan konsistensi dari batch ke batch lebih mudah diperoleh. HBsAg dilepaskan dari sel dengan homogeniser atau *disruption* menggunakan *glass bead*. Pemurnian melalui tahap klarifikasi, ultrafiltrasi, kromatografi dan ultrasentrifugasi serta diabsorpsi dengan alum hidroksida; sebagai pengawet ditambahkan thiomerosal. Karakterisasi partikel dilakukan dengan membandingkan HBsAg dari plasma antara lain meliputi berat molekul, komposisi asam amino, densitas dalam CsCl₂ dan sebagainya. Analisis imunologis menggunakan antibodi monoklonal memperlihatkan vaksin dari plasma dan ragi mengandung epitop yang berperan menginduksi antibodi setelah vaksinasi. Vaksin HBsAg rekombinan juga diproduksi menggunakan sel mamalia yaitu sel *Chinese Hamster Ovary* (CHO). Gen HBsAg dimasukkan ke dalam sel CHO dan sel ini dapat mensintesis dan mensekresikan partikel HBsAg 22 nm. Cell line CHO dapat mensintesis HBsAg 15 mcg/106 sel/hari. Bahkan bila *cell line* ditumbuhkan pada fase stasioner, mereka dapat mensintesis secara terus menerus dan isolasi HBsAg dapat dilakukan berulang-ulang dari supernat biakan sel selama 23 minggu. HBsAg

yang dimurnikan dari supernatan biakan sel CHO terdiri dari partikel 22 nm yang sangat homogen dan identik dengan HBsAg dari serum manusia. Pada percobaan imunogenisitas pada guinea pig, ternyata 50% binatang mempunyai antibodi HBs sesudah imunisasi HBsAg 1,5 µg dari sel CHO dan 2 µg HBsAg dari serum manusia. Pada simpanse, vaksin HBsAg rekombinan dari sel CHO terlihat lebih imunogenik daripada vaksin yang diperoleh dari ragi. Selain itu simpanse yang divaksinasi dengan vaksin dari sel CHO mempunyai respon imun seluler dan binatang yang divaksinasi dengan HBsAg rekombinan (subtype ad) terlindung dari infeksi virus HB subtype ad dan ay.

c. Vaksin dari plasma karier

Penggunaan vaksin hepatitis B yang diekstraksi dari plasma manusia dimulai sejak keberhasilan penelitian Krugman dan koleganya tahun 1971. Mereka menggunakan serum yang mengandung virus hepatitis B. Serum ini mereka encerkan 1:10 dan diinaktivasi panas 90°C selama 1 menit. Vaksinasi dilakukan pada 29 anak, hasilnya lebih dari separuh terlindung dari infeksi hepatitis B. Pengembangan vaksin ini selanjutnya menggunakan antigen lain untuk imunisasi aktif yaitu "Hepatitis B Surface Antigen" (HBsAg). Antigen ini merupakan permukaan virus yang diambil dan dimurnikan dari plasma manusia karier. Vaksin HBsAg ini merupakan partikel 22 nm mumi, diinaktivasi panas, diadsorpsi alum dan bebas dari asam nukleat; dimurnikan melalui tahap presipitasi, ultra sentrifugasi, gelfiltrasi dan afinitas kromatografi. Vaksin HBsAg mempunyai keamanan dan imunogenisitas baik. Setelah mengalami berbagai perbaikan, lebih dari 30 juta dosis telah tersebar didunia dan memperlihatkan keamanan yang menggembirakan. Hal ini dicapai karena ketatnya inaktivasi dan purifikasi untuk memusnahkan sumber infeksi serta pengujian kontrol kualitas untuk menjamin kemurnian produk.

d. Vaksin dari sel yeast dan sel mamalia

Kemajuan di bidang genetika molekuler dan kimia asam nukleat, telah memungkinkan identifikasi dan analisis gen pengkode substansi aktif, transfer diantara organisme dan memproduksinya di bawah kondisi terkontrol. Gen pengkode produk tertentu dapat diisolasi dan dibiakkan untuk memproduksi zat tersebut, dengan cara memasukkan molekul DNA (alami atau sintetik) ke dalam vektor yang sesuai, kemudian dimasukkan ke dalam host.

Teknik rekombinan ini telah membuka jalan untuk mengembangkan produksi vaksin, terutama sumber infeksi yang belum tersedia vaksinya dan untuk meningkatkan vaksin yang ada. Pendekatan baru terhadap perkembangan vaksin ini sangat berharga terutama untuk mikroorganisme/virus yang tidak dapat dibiakkan dengan metoda yang ada, seperti virus hepatitis B. Teknologi rekombinan DNA ini telah berhasil digunakan untuk memproduksi HBsAg dengan berbagai sel antara lain sel prokariot seperti *E. coli* dan *B. subtilis*, sel eukariot seperti sel *S.cerevisiae*, sel CHO dan sebagainya. Vaksin hepatitis B yang diproduksi sel ragi rekombinan telah menjalani pengujian keamanan, imunogenisitas dan evaluasi klinis. Hasilnya menunjukkan bahwa vaksin ini aman, antigenik dan relatif bebas efek samping yang merugikan, bahkan vaksin ini telah dilisensikan dan diproduksi di berbagai negara. Salah satu keuntungan vaksin dari sel ragi dibanding dari plasma yaitu siklus produksinya dapat dikurangi, dan konsistensi dari *batch* ke *batch* lebih mudah diperoleh. Bahkan antigen yang berasal dari sel ragi juga telah dicoba disiapkan dalam bentuk micellar.

Vaksin polipeptida micelle ini di dalam laboratorium dilaporkan lebih antigenik. HBsAg dilepaskan dari sel dengan homogeniser atau *disruption* menggunakan *glass bead*. Pemurnian melalui tahap *clarification*, ultrafiltrasi, kromatografi dan ultrasentrifugasi serta diabsorpsi dengan alum hidroksida; sebagai pengawet ditambahkan thiomerosal. Karakterisasi partikel dilakukan dengan membandingkan HBsAg dari plasma antara lain meliputi berat molekul, komposisi asam amino, densitas dalam $CsCl_2$ dan sebagainya.

Analisis imunologis menggunakan antibodi monoklonal memperlihatkan vaksin dari plasma dan ragi mengandung epitope yang berperan menginduksi antibodi setelah vaksinasi. Vaksin HBsAg rekombinan juga diproduksi menggunakan sel mamalia yaitu sel *Chinese Hamster Ovary* (CHO). Gen HBsAg dimasukkan ke dalam sel CHO dan sel ini dapat mensintesis dan mensekresikan partikel HBsAg 22 nm.

Cell line CHO dapat mensintesis HBsAg 15 mcg/106 sel/hari. Bahkan bila *cell line* imunisasi dengan satu kali inokulasi merupakan salah satu cara vaksinasi yang sangat didambakan terutama untuk vaksinasi massal dengan populasi cukup besar. Saat ini para peneliti telah berusaha mendapatkan vaksin hidup terhadap hepatitis B menggunakan virus vaccinia. Vaksin hidup ini sangat potensial dan telah digunakan untuk memproduksi vaksin hepatitis B, herpes simpleks, rabies dan lain-lain di dalam laboratorium. Percobaan pendahuluan pada kelinci telah menyimpulkan bahwa penggunaan virus vaccinia rekombinan untuk vaksinasi sangat mungkin. Karakteristik biofisik dan biokimia partikel antigenik yang disekresikan oleh virus ini identik dengan HbsAg asli. Kelinci dan binatang laboratorium lain yang diinokulasi dengan virus hibrida ini mampu memproduksi anti-HBs. Simpanse yang divaksinasi dengan virus vaccinia rekombinan terlindung dari infeksi virus hepatitis B. Beberapa keuntungan virus vaccinia rekombinan untuk memproduksi vaksin antara lain biaya produksinya relatif lebih rendah, cara vaksinasi relatif lebih mudah, stabilitas baik, mempunyai shelf life panjang, tidak onkogenik dan tidak bersifat laten.

e. Vaksin polipeptida dan peptida sintetik

Partikel HBsAg 22 nm telah terbukti merupakan imunogen yang baik, namun penelitian lebih lanjut telah memperlihatkan bahwa komponen imunogenik tersebut mungkin merupakan bagian dari HBsAg kompleks. Para ahli akhirnya dapat memperoleh 2 polipeptida dari partikel HBsAg murni. Kedua polipeptida mengandung

determinan antigenik hepatitis B. Pertama berupa polipeptida dengan BM 25.000 – 26.000 (P25) dan bentuk glikosilatnya dengan BM 28.000 – 30.000 (GP 30). Keduanya ternyata merupakan antigen yang efektif. Dari purifikasi peptida ini akhirnya diperoleh antigen dalam bentuk micellar.

Pada pengujian potensi pada mencit, vaksin polipeptida subunit ini ternyata menimbulkan respon antibodi lebih kuat daripada antigen partikel 22 nm utuh. Vaksin ini telah menjalani pengujian keamanan dan efikasi pada primata non manusia dan sedang dikembangkan untuk uji klinis. Vaksin polipeptida micelle ini juga telah dibuat dari HbsAg yang dihasilkan oleh sel ragi dan sel mamalia rekombinan. Keberhasilan isolasi polipeptida p25 dan gp30 dari HbsAg murni dan bukti bahwa polipeptida tersebut mengandung determinan antigen yang mampu menginduksi anti HBs, telah mendorong para ahli untuk mensintesis peptida tersebut secara kimia. Di samping itu, dorongan juga diperkuat dengan keberhasilan peptida sintetik menginduksi antibodi penetral bakteri dan virus tanaman. Vaksin peptida sintetik pertama tersebut dibuat untuk *tobacco mosaic virus*, sesudah mengidentifikasi determinan antigeniknya dan rangkaian asam aminonya. Rangkaian asam amino tersebut ternyata dapat dibuat sintetik dan mampu menginduksi antibodi dalam binatang percobaan. Beberapa laboratorium akhirnya berhasil membuat peptida sintetik yang mengandung rangkaian asam amino identik dengan molekul p25 HBsAg. Respon antibodi terhadap peptida ini muncul 1 – 2 minggu sesudah imunisasi primer dan semua binatang menginduksi antibodi sesudah inokulasi kedua. Mencit yang diimunisasi secara intraperitoneal, menginduksi anti HBs setelah 7 –14 hari inokulasi. Perkembangan vaksin polipeptida yang disintesis secara kimia memberikan banyak keuntungan antara lain dapat memproduksi imunogen yang relatif murah, aman dan uniform secara kimia, sehingga dapat menggantikan vaksin yang ada saat ini, yang relatif kurang murni atau mungkin mengandung determinan antigen mikroba lain.

Kloning Dan Ekspresi Gen Penyandi Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg) Virus Hepatitis B

Di berbagai daerah di Indonesia angka pengidap infeksi VHB kronik cukup tinggi, yaitu berkisar antara 3-20%. Sekitar 30% dari pengidap VHB kronik meninggal karena hepatoma, sehingga dapat diperkirakan bahwa terdapat tiga sampai empat orang yang meninggal akibat infeksi VHB setiap hari.

Usaha mencegah infeksi VHB yang paling rasional dan efektif terhadap infeksi VHB adalah dengan cara vaksinasi, baik vaksinasi aktif, pasif, maupun kombinasi aktif dan pasif. Vaksin hepatitis B konvensional maupun pembuatan sarana diagnostik menggunakan HbsAg alami, yang diperoleh dengan cara memisahkan dari plasma yang berasal dari darah, oleh karena jumlah donor darah yang HbsAg positif semakin terbatas, serta adanya kekhawatiran terhadap keamanan vaksin yang terbuat dari plasma (*plasma derived vaccine*), maka HbsAg rekombinan yang telah dibuat dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, akan semakin penting dan bermanfaat.

Di beberapa negara maju, HbsAg rekombinan sudah berhasil diproduksi dan memperoleh lisensi pertama di Amerika Serikat dan Jerman, namun produksi HbsAg rekombinan dengan cara mengeksplorasi genom VHB isolat lokal hingga saat ini belum pernah dilaporkan di Indonesia.

Proses kloning dan ekspresi gen penyandi hepatitis b surface antigen (HbsAg) virus hepatitis b

a. Ekstraksi Gen-S VHB

DNA-VHB diekstraksi dari serum sampel yang HbsAg dan DNA-VHB positif. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode DNA-Zol (GIBCO-BRL), sesuai dengan prosedur standar.

b. Amplifikasi Gen-S Penyandi HbsAg

Daerah gen-S yang akan diklon ditentukan berdasarkan sekuens genom VHB dari subtipe adw yang dapat diperoleh dari

GenBank. Pasangan primer yang dipergunakan untuk mengisolasi gen-S dikonstruksi berdasarkan sekuens VHB subtype adw menggunakan perangkat lunak Lasergene DNASTar dengan penambahan beberapa basa yang dapat secara spesifik dikenali oleh enzim-enzim restriksi tertentu untuk dapat mengatur orientasinya. Fragmen DNA pengkode HbsAg tersebut diamplifikasi secara *in-vitro* dengan menggunakan *PCR Core System* (Promega). Primer *forward* yang digunakan adalah :5'-TCCCCGGGATCC CCCATGAAGTTGAGGGAGTAGCCC-3' dan sebagai primer *reverse* adalah : 5'-CAGTCAGTCGACGAATTCTTAATGCGGGTCACCATATTCTTGAAC-3'. Sekuens dengan garis bawah adalah sekuens spesifik untuk gen-S yang mengkode HbsAg.

Amplifikasi dilakukan dengan menggunakan mesin Amplitron I (Thermolyne, USA) dalam 50:1 volume reaksi, dengan kondisi PCR yang telah dioptimasi dengan program untuk denaturasi (*denaturation*) 95°C selama 1 menit, untuk penempelan (*annealing*) primer 55°C selama 2 menit, dan untuk ekstensi (*extension*) 72°C selama 3 menit, sebanyak 35 siklus. Penempelan dimulai dengan pengaturan 5°C di bawah T_m (melting temperature) amplifikasi primer sebenarnya. T_m dihitung berdasarkan kandungan GC dan AT yang terdapat pada primer, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $T_m = (G+C) \times 4 + (A+T) \times 2$.

Campuran PCR yang disiapkan terdiri atas 20 mM TrisHCl (pH 8,4), 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl₂, 2,5 unit Taq DNA polymerase, 0,5 M primer forward dan primer reverse 0,2 mM masing-masing dNTPs (dATP, dTTP, dTCP, dGTP dengan konsentrasi equimolar pada pH 7,0) dan DNA template. Produk PCR yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan elektroforesis pada gel agarose 1,5% yang diwarnai dengan ethidium bromide, dan pengamatan dilakukan dengan menggunakan aluminasi sinar UV. Produk PCR yang memperlihatkan band yang spesifik untuk gen-S penyandi HBsAg digunakan untuk kloning.

Hasil yang didapat berupa pita DNA target yang berukuran \pm 1,2 kb yang tampak pada gel agarose 1,5%. Dari isolat VHB yang diperiksa dengan metode ini didapat DNA target dari beberapa isolat saja. Hal ini disebabkan adanya variasi genetik VHB atau adanya kemungkinan mutasi pada selubung VHB.

c. Strategi Kloning

Vektor yang digunakan untuk kloning gen-S penyandi HBsAg yang telah berhasil diamplifikasi adalah vektor pGEM-T (promega). Plasmid GEM-T banyak digunakan karena sudah dalam keadaan terpotong dan prosedur kloning menjadi lebih mudah.

d. Purifikasi Produk PCR

Produk PCR yang menunjukkan pita spesifik untuk gen-S penyandi HBsAg harus dipurifikasi lebih lanjut. Purifikasi langsung dilakukan dengan menggunakan kit Wizard's DNA *preps Purification system* (promega). Pemilihan metode purifikasi gel agarose atau purifikasi langsung sangat tergantung dari hasil *running* pada gel agarose.

e. Prosedur Ligasi

Produk PCR yang telah dimurnikan diligasi pada vektor pGEM-T dengan menggunakan T4 DNA ligase, sehingga menjadi pGEM-T + gen HBsAg. Campuran ligasinya terdiri atas: 5 ml T4 ligation buffer, 1 ml T4 DNA ligase, 1 ml vektor pGEM-T, 2 ml produk PCR, ditambah ddH₂O sampai mencapai volume total 10 ml. Larutan yang telah dicampur diinkubasi pada temperatur 40°C selama 24 jam dan siap digunakan untuk transformasi dengan sel *E. coli* yang telah dibuat kompeten.

Ligasi produk amplifikasi pada vektor plasmid pGEM-T linear yang memiliki satu nukleotida T (timin) yang menggantung (*overhang*) pada ujung 3' DNA plasmid dimungkinkan terjadi dengan efisien, karena adanya nukleotida A (adenin) yang menggantung pada posisi 3' produk amplifikasi gen S, akibat aktivitas perpanjangan yang tak

tergantung template yang merupakan sifat intrinsik enzim DNA polimerase dari *T.aquaticus*.

f. Transformasi pada *E. coli*

Transformasi dilakukan dengan teknik *heat-shock*. Mula-mula dibuat campuran yang terdiri dari 100 ml sel *E. coli* yang sudah kompeten dengan 10 ml campuran ligasi, lalu diinkubasi pada es selama 30-45 menit. Setelah itu dilakukan *heat shock* pada temperatur 42°C selama 90 detik, lalu dimasukkan ke dalam es lagi selama 10 – 15 menit, kemudian ditambah 900 ml medium SOC dan diinkubasi pada temperatur 37°C selama 90 menit dengan digoyang 150 rpm, sehingga siap dikultur pada LB agar. Suspensi diratakan pada LB *agar plate* yang mengandung ampicillin, IPTG dan X-gal. Disediakan plate ganda untuk masing-masing larutan transformasi. Mula-mula plate diinkubasi pada temperatur 37°C pada posisi normal, kemudian dibalik dan diinkubasi selama 16 jam pada temperatur 37°C . Keesokan harinya seleksi koloni transforman dengan identifikasi perbedaan warna putih-biru atau menggunakan metode PCR.

Koloni berwarna biru akibat aktivitas enzim hibrid β -galaktosidase yang sebagian disandi oleh fragmen gen lac Z yang terdapat pada plasmid pGEM-T. Enzim ini terbentuk akibat penambahan IPTG (isopropyl thiogalactopyranoside) pada medium seleksi transforman yang menginduksi aktivitas operon lac, sehingga produk genl tidak dapat mengikat daerah operator pada gen lagZ. Selanjutnya terjadi transkripsi dan translasi protein yang disandi oleh lacZ, yaitu β -galaktosidase hibrid yang akan menghidrolisis X-gal, yang merupakan analog dari laktosa menjadi produk yang berwarna biru. Plasmid pGEM-T yang mengandung DNA insert tampak berwarna putih, akibat terganggunya translasi gen lacZ, sehingga tidak akan membentuk enzim β -galaktosidase hibrid.

g. Seleksi Klon Rekombinan

Seleksi klon rekombinan dapat dilakukan dengan seleksi warna putih biru atau dengan metode PCR menggunakan primer seleksi pGEM-T yang spesifik (Pharmacia). Koloni yang berwarna putih adalah koloni yang membawa plasmid, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut DNA insertnya.

h. Analisis Inseri DNA insert

Koloni putih yang tunggal dipindahkan ke dalam tabung yang telah mengandung 3 ml medium LB dengan loop inokulasi yang steril, dan diinokulasi semalam pada inkubator yang bergoyang sekitar 200 rpm pada temperatur 37°C. Keberadaan DNA insert dapat dideteksi dengan cara: DNA plasmid diisolasi dari masing-masing klon, kemudian diamplifikasi dengan metode PCR menggunakan primer seleksi yang spesifik untuk gen VHB. Hasil yang didapat berupa pita DNA yang berukuran \pm 4,3 kb, dengan PCR seleksi menggunakan pasangan primer tersebut.

i. Deteksi Protein HBsAg Rekombinan

Klon rekombinan dimurnikan dan dibiakkan dalam 100 ml media LB cair yang mengandung ampisilin (100g/ml) dan IPTG (100 mM) selama 5 jam pada 37°C untuk diamati ekspresinya. *E. coli* yang telah dikultur pada media cair ini kemudian dikumpulkan, dan disentrifugasi 4.000 rpm selama 15 menit dengan refrigerator centrifuge. Endapan disuspensi ulang dengan buffer lisis (25 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA pH 8 mengandung 5 mg/ml lisozim untuk kemudian dianalisis dengan SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate-Polyacrilamide Gel Electrophoresis) dan dilanjutkan dengan immunoblotting (Western Blot) dengan menggunakan anti-HBs sebagai antibodi spesifik. Bila terdapat reaksi antigen-antibodi, maka pada membran akan dapat diamati pita protein yang berikatan dengan antibodi spesifik tersebut. Deteksi HBsAg rekombinan juga dilakukan dengan kit ELISA komersial.

Deteksi protein produk ekspresi gen S dengan SDS-PAGE, menunjukkan adanya pita protein berukuran 27 kDa atau 36 kDa pada

endapan yang didapat dari lisat *E. coli* yang membawa pGEM-T + gen S yang ditumbuhkan pada media LB cair mengandung ampisilin dan IPTG. Protein berukuran 27 kDa atau 36 kDa yang terlihat pada pengujian SDS-PAGE sesuai dengan protein HBsAg yang tersusun atas protein pre-S2 dan protein S (small protein) saja dengan berat molekul 24 kDa dan 27 kDa. Small protein disandi oleh gen S, middle protein disandi oleh gen S dan pre-S2, sedangkan large protein disandi oleh gen S, pre-S2 dan pre-S1.

Hasil identifikasi dengan immunoblotting menggunakan antibodi monoklonal anti-HBs sebagai antibodi primer dan goat anti-mouse IgG sebagai antibodi sekunder pada suspensi *E. coli* yang membawa pGEM-T + gen S menunjukkan bahwa sifat antigenitas juga dimiliki oleh protein HBsAg rekombinan yang ditranslasi pada *E. coli*.

Orang-orang yang perlu mendapatkan vaksin

1. Bayi yang baru lahir
2. Anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun yang belum divaksinasi
3. Orang yang memiliki pasangan yang terinfeksi HVB
4. Orang yang sering berganti pasangan
5. Pekerja kesehatan
6. Penderita HIV dan Liver kronik
7. Wisatawan yang akan berkunjung ke daerah endemis

Jenis-jenis vaksin Hepatitis B

Secara umum Ada dua macam vaksin Hepatitis B, yaitu:

- A. Vaksin Hepatitis yang terbuat dari darah manusia yang telah kebal Hepatitis B, disuntikkan kepada orang sehat sekali sebulan sebanyak 3 kali (Immunoglobulin Hepatitis B)
- B. Vaksin Hepatitis yang dibuat dari perekayasa sel ragi (Recombivax HB® dan Engerix-B), diberikan kepada penderita sebulan sekali sebanyak 2 kali, lalu suntikan yang ketiga diberi 5 bulan kemudian.

Vaksin Hepatitis B rekombinan (Recombivax HB)

Recombivax HB® vaccine mengandung antigen Hepatitis B, amorphous aluminum hydroxyphosphate, yeast protein yang diberi formaldehid, dan thimerosal sebagai pengawet. Vaksin Hepatitis B rekombinan ini berasal dari Hepatitis B surface antigen (HBsAg) yang diproduksi dalam sel yeast. Bagian virus yang mengkode HBsAg dimasukkan ke dalam yeast, dan selanjutnya dikultur. Antigen kemudian dipanen dan dipurifikasi dari kultur fermentasi yeast *Saccharomyces cereviceae*, antigen HBsAg mengandung gen *adw* subtype. Proses fermentasi meliputi pertumbuhan *Saccharomyces cereviceae* pada medium kompleks yang mengandung ekstrak Yeast, soy pepton, dextrose, asam amino, dan garam mineral. Protein dilepaskan dari sel yeast melalui pengrusakan sel kemudian dipurifikasi dengan metode fisika dan kimia. Selanjutnya protein dimasukkan ke larutan buffer posfat dan formaldehid, dipercepat dengan menggunakan alum (potassium aluminium sulfat). Vaksin rekombinan ini memperlihatkan kesamaan dengan vaksin yang diperoleh dari plasma darah.

Vaksin Hepatitis B rekombinan (Engerix-B)

Engerix-B merupakan DNA rekombinan yang dikembangkan dan dibuat oleh perusahaan Glaxo Smith Kline Biological. Mengandung antigen permukaan virus Hepatitis B (HBsAg) yang telah dipurifikasi dan dikultur dalam sel *Saccharomyces cereviceae*. HBsAg yang diekspresikan oleh *Saccharomyces cereviceae* dipurifikasi dengan cara fisika-kimia dan aluminium hidroksida. Engerix-B® vaccine mengandung antigen hepatitis B yang telah dimurnikan, aluminium hidroksida, sejumlah yeast protein dan thimerosal yang digunakan dalam proses produksi, serta 2-phenoxyethanol sebagai pengawet.

Dosis pemberian vaksin Engerix-B

Remaja: 0,5 ml vaksin mengandung 10 mcg HBsAg dan 0,25 mg aluminium hidroksida. Formula pediatrik mengandung sodium klorida (9 ml /ml) dan buffer posfat (disodium posfat dyhidrate 0,9 mg/ml; sodium dihidrogenposfat dihidrate 0,71 mg/ml).

Dewasa: 1 ml vaksin mengandung 20 mcg HBsAg dan 0,25 mg aluminium hidroksida. Formula pediatrik mengandung sodium klorida (9 ml /ml) dan buffer posfat (disodium posfat dyhidrate 0,9 mg/ml; sodium dihidrogen fosfatdihidrate 0,71 mg/ml).

Umumnya vaksin hepatitis diberikan pada bayi (sampai usia 12 bulan) melalui injeksi pada otot paha dan lengan atas pada anak-anak. Vaksin Hepatitis B tidak mengandung komponen hidup, aman diberikan kepada bayi yang baru lahir, anak-anak dan orang dewasa. Efek dari pemberian vaksin ini adalah pembengkakan pada daerah injeksi dan demam pada bayi. Pemberian vaksin Hepatitis B pada manusia dapat dikombinasikan dengan vaksin untuk penyakit lain misalnya Twinrx (komb. Hepatitis A) atau Pediarix (diphtheria, pertussis, tetanus dan polio).

Perkembangan vaksin hepatitis B Saat ini pemberian vaksin tidak terbatas hanya pada injeksi ke dalam otot tetapi telah berkembang melalui makanan. Di Amerika Serikat dikembangkan tanaman kentang yang mengandung vaksin Hepatitis B. Penelitian pada tahun 1992 menunjukkan bahwa tanaman tembakau dapat mengekspresikan vaksin hepatitis B dan juga akan dikembangkan penggunaan kedelai dan pisang sebagai vektor vaksin.

Kesimpulan

Hepatitis B merupakan penyakit yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Infeksi hepatitis B berakibat pada timbulnya penyakit bagi penderitanya. Penyakit yang dapat terjadi antara lain sirosis, penyakit hati kronis, dan kanker, sehingga mendorong para ahli untuk terus mengembangkan vaksin hepatitis B. Pengembangan vaksin hepatitis B menjadi lebih menarik dengan kemajuan bidang pendukung yang begitu pesat seperti rekombinan DNA, antibodi monoklonal, sintesis kimia oligopeptida pemrograman komputer, kristalografi, sehingga struktur protein mudah digambarkan dan determinan antigen mudah ditentukan.

Berangkat dari antigen virus yang diekstrak dari plasma manusia karier, vaksin hepatitis B mulai dikembangkan. Antigen yang lebih spesifik diidentifikasi dan diisolasi, sehingga diperoleh partikel HBsAg 22 nm yang mempunyai sifat imunogenik dan dapat digunakan untuk vaksinasi. Karena terbatasnya donor dan rumitnya purifikasi serta keamanan yang masih disangsikan walaupun tak terbukti, para ahli mulai memanfaatkan teknologi rekombinan DNA untuk membuat vaksin hepatitis B. Vaksin rekombinan pertama yang dipasarkan yaitu antigen HbsAg yang diproduksi oleh sel ragi rekombinan. Vaksin ini sudah terbukti manfaatnya. Untuk mencari vaksin yang imunogenik lebih kuat, maka dicoba sel lain sebagai host dan didapatkan sel mamalia *Chinese Hamster Ovary*.

Sel *E. coli* juga dapat mengekspresikan HBsAg, tetapi titernya terlalu rendah. Dengan vaksin yang sudah ada, para ahli masih disibukkan mencari kemungkinan lain untuk memproduksi vaksin ini. Dari hasil analisa HBsAg, didapatkan polipeptida p25 dan bentuk glikosilatnya gp 30 yang mengandung determinan antigen, sehingga dapat digunakan sebagai vaksin. Dengan mengetahui rangkaian asam amino penyusunnya, maka para ahli dapat membuat peptida secara kimia. Dalam berbagai pengujian ternyata peptida sintetik mampu menginduksi antibodi terhadap antigen hepatitis B. Tentu keberhasilan ini sangat menggembirakan, karena bila vaksin ini dibuat secara kimia, maka homogenitas dan kemurniannya tak perlu diragukan.

Vaksin hidup menggunakan virus rekombinan juga telah diuji. Mereka menggunakan virus vaccinia sebagai vektor. Vaksin ini sudah diuji dengan berbagai hewan percobaan dan hasilnya cukup menggembirakan. Apabila pendekatan ini berhasil untuk pembuatan vaksin komersial, tentu akan memberi banyak keuntungan seperti cara inokulasi yang relatif mudah, stabilitas, *shelf – life* dan sebagainya. Selain itu ada lagi pendekatan pembuatan vaksin hepatitis B menggunakan antibodi sebagai imunogen vaksin. Antibodi ini diproduksi dengan mengimmunisasi binatang menggunakan antibodi

yang mengenal virus hepatitis sebagai antigennya. Vaksin ini dikenal dengan istilah Anti-idiotypes. Pada berbagai percobaan, antibodi (imunogen) ini mampu menginduksi respon kekebalan terhadap antigen asli pada mencit dan hamster. Simpanse yang diimunisasi dengan antibodi ini, dapat terlindung dan serangan virus hepatitis B. Gencarnya para ahli mencari vaksin alternatif untuk menggantikan vaksin yang sudah ada bukan berarti vaksin yang ada ini kurang layak digunakan, tetapi untuk mencari vaksin yang paling baik dipandang dari berbagai segi.

Referensi

- [1] Astuti, W., et al, 2001, Kloning dan Ekspresi Gen S Penyandi Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Virus Hepatitis B-Isolat Mataram, Lombok, J. Sains Kesehatan, UGM, Yogyakarta.
- [2] Juniastuti, et al, 2009, *The Relatedness Between Hepatitis B Virus Non-Papuan Blood Donors In Jayapura and the Papuan Clusters*, J. Microbiology, volume 3, number 2, Universitas Airlangga, Surabaya.
- [3] Suhandono, S., et al, 2007, *Construction of Binary Vector with Wound Inducible Promoter for HBsAg Expression: Development of Plant-Based Edible Hepatitis B Vaccine from Indonesian Isolate*, Annales Bogorienses n.s., Vol 11, No 1, ITB, Bandung.
- [4] Naumann, H., et al., 1993, *Identification of a New Hepatitis B Virus (HBV) Genotype from Brazil that Expresses HBV Surface Antigen Subtype adw4*, Journal of General Virology, Justus-Liebig-University, Germany.
- [5] Anonym, 2009. Hepatitis B vaccine (Recombivax HB[®] and Engerix-B[®]). Saskatchewan Ministry Health. <http://www.health.gov.sk.ca/hepatitis-b-tearsheet>.
- [6] Anonim, 2007. Hepatitis B Vaccine. Department of Health and Human Service Center For Disease Control and Prevention. Vis-hep-b.pdf.Chang, Mei-Hwei. 2000.
- [7] Isbago, Widyaningroem, Dyah, 2005. Masa Depan Pengembangan Vaksin Baru. Cermin Dunia Kedokteran. Jakarta.

- [8] Gregory and Jacobson, M. Robert, 2009. *Prevention of Hepatitis B with the Hepatitis B Vaccine*. The new england journal of medicine. N Engl JMed 2004; 351:2832-8.
- [9] Zain dan Lukman, H., 2006. Hepatitis B dan Permasalahannya .http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/orasi_ilmi_ah_dies_natalis_54_2006.pdf

Ironi Pemaknaan Genetika sebagai Ilmu tentang Pewarisan Sifat pada Masa Kini, bahkan di Era Revolusi Industri 4.0

Prof. Dr. Duran Corebima A., M.Pd.¹ & Dr. Bea Hana Siswati, M.Pd.²

Pengantar

Sebagai seorang biarawan ahli biologi, Gregor Johann Mendel melakukan percobaan persilangan pada tanaman Pisum sativum antara tahun 1856-1862. Pada persilangan tsb. Gregor Johann Mendel mengamati 7 ciri tanaman Pisum sativum [1]. Ketujuh ciri tanaman Pisum sativum tsb adalah: tinggi tanaman, bentuk polong, warna polong, bentuk biji, warna biji, posisi bunga, dan warna bunga. Analisis terhadap hasil-hasil persilangan itulah yang menjadi dasar perumusan Hukum Pewarisan Sifat yang terkenal, yaitu Hukum Mendel I dan Hukum Mendel II. Russel [2] juga menyatakan bahwa “The principles of heredity were recognized by Gregor Mendel in the 1860s, the development of the subject began about 1900.”

Pada perkembangannya lebih lanjut, dalam biologi kemudian dikenal satu cabang ilmu baru yang disebut ilmu genetika. Dalam hubungan ini, kata atau istilah genetics (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai genetika) pertama kali dikenal pada tahun 1903 [3]. Pada kenyataannya saat ini ilmu genetika telah berkembang sedemikian rupa, hingga dapat dipandang sebagai suatu ilmu dasar dari biologi. Russel [2] juga menyatakan bahwa “the key discoveries have been made in the past four or five decades”. Berkenaan dengan hal ini mengacu kepada ahli genetika kenamaan Theodosius Dobzhansky, Ayala dan Kiger [4] menyatakan “It is even more certain that nothing in

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

² Universitas Jember

biology is understandable except in the light of genetics”; lebih lanjut dinyatakan secara gamblang bahwa “Genetics is the core biological science”. Pada kenyataannya ilmu genetika terbukti menjadi dasar dari berbagai cabang biologi yang lain, seperti taksonomi, fisiologi, embriologi, biologi sel, biologi molekuler, developmental biology, ilmu perilaku dsb. Ilmu genetika bahkan diketahui ikut menjadi dasar atau digunakan pada ilmu-ilmu lain di luar biologi.

Kajian-kajian di bidang genetika sudah demikian jauh berkembang menjangkau ke level molekuler. Dalam beberapa dasawarsa terakhir kajian ilmu genetika juga sudah bersangkut paut dengan teknologi genetic engineering maupun teknologi DNA rekombinan. Russel [2] menyatakan “Genetics has long been one of the key areas in biology, and in the years since unravelings of DNA mysteries we have seen an unparalleled explosion of knowledge and understanding about genetics and its related disciplines”. Lebih lanjut dikatakan juga oleh Russel [2] bahwa “Not only is knowledge about genetics accumulating rapidly, but its many applications now affect our daily lives and benefit humanity”. Pada era revolusi industri 4.0, sangat diyakini bahwa perkembangan kajian genetika secara umum maupun khususnya yang bersangkut paut dengan teknologi genetic engineering maupun teknologi DNA rekombinan akan semakin jauh dan tidak mustahil semakin spektakuler.

Beberapa informasi tentang sekelumit sejarah ilmu genetika termasuk perkembangannya sudah dikemukakan. Akan tetapi apa sesungguhnya ilmu genetika itu, mari kita simak paparan-paparan terkait lebih lanjut

Arti Ilmu Genetika

Arti ilmu genetika yang akan dipaparkan lebih lanjut adalah yang berasal dari rujukan buku, yang diterbitkan pada era 1950-an,

1970-an, 1980-an, 1990-an, dan 2000-an. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pemaknaan ilmu genetika yang akan dipaparkan ini bahkan sudah melibatkan rujukan yang diterbitkan pada era masa kini bahkan pada era revolusi industri 4.0.

1. Dobzhansky [5] menyatakan bahwa “Genetics is the physiology of inheritance and variation”.
2. Srb Adrian & Owen [6] menyatakan bahwa “Genetics is one of the sciences concerned with increasing our knowledge of why organisms are the way they are”.
3. Stansfield [7] memaknai genetics sebagai “The science of heredity”; dikatakan juga bahwa “the science of heredity is a fundamental discipline in the biological science”.
4. Gardner dan Snustad [8] memaknai genetics sebagai “the science of heredity and variation”.
5. Zubay [9] menyatakan bahwa “The science of genetics is concerned with how biological information is transferred from one generation to the next as well as with how that information is expressed within an organism”.
6. Brown [10] memaknai genetics sebagai “the branch of biology devoted to the study of genes”.
7. Gardner dkk. [11] juga masih memaknai genetics sebagai “the science of heredity and variation”.
8. Russel [2] memaknai genetics sebagai “the science of heredity involving the structure and function of genes and the way genes are passed from one generation to the next”.
9. Querol [12]) memaknai genetics sebagai “science which studies inheritance and its chemical and physiological base”.
10. Klug dan Cummings [13] memaknai genetics sebagai “the branch of biology that deals with heredity and the expression of inherited traits”.
11. Klug dan Cummings [14] juga memaknai genetics

sebagaimana yang dikemukakan pada Klug dan Cummings [13].

Memperhatikan arti-arti genetika yang telah dikemukakan yang mengacu ke 11 rujukan tersebut, terlihat bahwa ternyata 82% diantaranya memaknai genetika sebagai ilmu yang bersangkutan paut dengan pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini jelas sekali terlihat bahwa pemaknaan genetika semacam itu didasarkan langsung kepada percobaan persilangan Gregor Johann Mendel yang melahirkan hukum pewarisan sifat. Pemaknaan genetika semacam itu bahkan ditemukan pada rujukan yang diterbitkan dalam era tahun 2000-an, yang dapat dinyatakan sebagai era masa kini maupun era revolusi industri

4.0. Tepatkah pemaknaan genetika semacam itu yang bertahan hingga ke era masa kini, mari kita simak paparan lebih lanjut.

Bahasan Kajian Ilmu Genetika mengacu ke Berbagai Rujukan

Bahasan kajian ilmu genetika yang akan dipaparkan lebih lanjut, didasarkan atas 10 dari 11 rujukan yang telah ditampilkan pada bagian sebelumnya, di samping pada beberapa rujukan lain, yang akan dikemukakan secara umum. Agar lebih objektif, daftar bahasan di berbagai rujukan itu juga akan dipaparkan apa adanya, sekalipun terkesan agak melelahkan.

1. Bahasan pada Dobzhansky [5]: 1. Organic Diversity, 2. Heredity and Mutation, 3. Mutation in Populations, 4. Selection, 5. Adaptive Polymorphism, 6. Race Formation, 7. Isolating mechanisms, 8. Hybrid Sterility, 9. Species as Natural Units, 10. Patterns of Evolution.
2. Bahasan pada Srb Adrian & Owen [6]): 1. Inherent Patterns in Living Things, 2. Unit of Inheritance, 3. Two or more pairs of Alleles: Independence of Genetic Expression, 4. Two or more

pairs of Alleles: Interactions in Phenotypic Expression, 5. The Impact of Environment, 6. Sex Chromosomes and Sex Linkages, 7. The Vehicles of Inheritance, 8. Life Cycles, 9. Linkage, Crossing over, and Chromosome Mapping, 10. Chromosomal Aberrations and Position Effect, 11. Variations in Chromosome Number, 12. Mutations, 13. Extranuclear Inheritance, 14. Genetic Aspects of Sexuality and Sex Determination, 15. Quantitative Inheritance, 16. Inbreeding and Selection, 17. Genes and Cellular Biochemistry, 18. Genes and Development, 19. The Gene, 20. Heredity in Populations, 21. Genetics and Evolution, 22. Breeding Better Plants, 23. Genetic Aspects of Animal Productivity, 24. Genetics and the Welfare of the Human Individual.

3. Bahasan pada Stansfield [7]: 1. Physical Basis of Heredity, 2. Single Gene Inheritance, 3. Two or more Genes, 4. Genetic Interaction, 5. The Genetic of Sex, 6. Linkage and Chromosome Mapping, 7. Statistical Distribution, 8. Compound Genetic Analysis, 9. Cytogenetics, 10. Cytoplasmic Factors, 11. Quantitative Genetics and Breeding Principles, 12. Population Genetics, 13. Principle of Evolution, 14. The Chemical Basis of Heredity, 15. Genetics of Bacteria and Viruses, 16. Molecular Genetics.
4. Bahasan pada Gardner dan Snustad [8]: 1. Introduction, 2. Mendelian Genetics, 3. Cell Mechanics, 4. Sex Determination and Sex Linkage, 5. Genetic Material: Properties and Replication, 6. Linkage, Crossing over and Chromosome Mapping, 7. Recombination in Bacteria, 8. Gene Expression, 9. Mutation, 10. Genetic Fine Structure, 11. Regulation of Gene Expression and Development, 12. Chromosome Aberrations, 13. Variations in Chromosome Number, 14. Extranuclear Inheritance Mechanisms, 15. Multiple Gene Inheritance, 16. Population Genetics and

- Evolution, 17. Genetics of Behavior.
5. Bahasan pada Zubay [9]: 1. Mendelian View of the Gene, 2. The Chromosomal Basis of Heredity, 3. The Chemical Nature of the Gene, 4. Reactions Involving DNA, 5. Transcription: Synthesis of RNA, 6. Translation: Protein synthesis, 7. Protein structure and Function, 8. Normal and Altered Gene Expression: Detection and Selection of Phenotypes, 9. Mutations: Types of Mutations and Mutagenesis, 10. Mechanisms of Genetic Recombination, 11. Recombinant DNA Methodology, 12. Genetic Analysis of Bacterial Viruses and Plasmids, 13. Mapping the Bacterial Chromosome, 14. Mapping the Eukaryotic Genome: Drosophila and Yeast, 15. Human Genetics: Establishing the Patterns of Inheritance and Gene Mapping, 16. Regulation of Gene Expression in Microorganisms, 17. Regulation of Gene Expression in Bacterial Viruses and Plasmids, 18. Regulation of Gene Expression in Higher Organisms, 19. Developmental Genetics, 20. Evolution and Population Genetics, 21. The Function of Mobile Genetic Elements, 22. Animal Viruses and Cancer.
6. Bahasan pada Brown [10]: 1. The Origin of Genetics and Molecular Biology, 2. Genes are made of DNA, 3. The Structure of DNA, 4. Genes and Biological Information, 5. Transcription, 6. Types of RNA Molecule: rRNA and tRNA, 7. Types of RNA Molecule: mRNA, 8. The Genetic Code, 9. Translation, 10. Control of Gene Expression, 11. Replication of DNA Molecules, 12. Alterations in Genetic Material, 13. Viruses - The Simplest Forms of Life, 14. Prokaryotic Genes, 15. Genes in the Eukaryotic Nucleus, 16. Genes in Eukaryotic Organelles, 17. What Mendel discovered, 18. Mapping Genes on Eukaryotic Chromosomes, 19. Mapping Genes in Bacteria, 20. Gene Cloning and Recombinant DNA Technology.

7. Bahasan pada Gardner dkk. [11]: 1. Introduction, 2. Mendelian Genetics, 3. Cell Mechanics, 4. Sex Determination and Sex Linkage, 5. Genetic Material: Properties and Replication, 6. Structure and Replication of Eukaryotic Chromosomes, 7. Linkage, Crossing Over and Chromosome Mapping, 8. Recombination in Bacteria, 9. Transposable Genetic Elements, 10. Gene Expression, 11. Mutation, 12. Genetic Fine Structure: Classical Genetics, 13. Genetic Fine Structure: Gene Cloning and Sequencing, 14. Regulation of Gene Expression in Prokaryotes, 15. Regulation of Gene Expression and Development in Eukaryotes, 16. Genetic Control of Immune Response, 17. Genetic Control of Cell Divisions: Oncogene and Proto Oncogene, 18. Variation in Chromosome Structure, 19. Variation in Chromosome Number, 20. Extrachromosomal Inheritance, 21. Quantitative Genetics, 22. Population and Evolutionary Genetics, 23. Genetics of Behavior, 24. Genetic Engineering and the Future.
8. Bahasan pada Russel [2]: 1. Viruses, Cells, and Cellular Reproduction, 2. Mendelian Genetics, 3. Chromosomal Basis of Inheritance, Sex Determination, and Sex Linkage, 4. Extensions of Mendelian Genetic Analysis, 5. Linkage, Crossing-over and Gene Mapping in Eukaryotes, 6. Advanced Genetic Mapping in Eukaryotes, 7. Genetic Recombination in Bacteria and Bacteriophages, 8. The Beginnings of Molecular Genetics: Genetic Function, 9. The Structure of Genetic Material, 10. The Organization of DNA in Chromosomes, 11. DNA Replication and Recombination, 12. Transcription, 13. RNA Molecules and RNA Processing, 14. The Genetic Code and the Translation of the Genetic Message, 15. Recombinant DNA Technology and the Manipulation of DNA, 16. Regulation of Gene Expression in Bacteria and Bacteriophages, 17. Regulation of Gene Expression

- and Development in Eukaryotes, 18. Gene Mutations, 19. Chromosome Aberrations, 20. Transposable Genetic Elements, Tumor Viruses, and Oncogenes, 21. Organization and Genetics of Extranuclear Genomes, 22. Quantitative Genetics, 23. Population Genetics.
9. Bahasan pada Klug dan Cummings [13]: 1. Heredity and Phenotype (Cell Division and Chromosomes; Mendelian Genetics; Modification of Mendelian Ratios; Linkage, Crossing Over, and Chromosome Mapping; Chromosome Variation and Sex Determination; Advanced Topics in Transmission Genetics), 2. DNA: The Molecular Basis of Heredity (DNA: Structure and Analysis; DNA: Replication, Synthesis, and Recombination; DNA: Organization in chromosomes and Genes; DNA: Mutation, Repair, and Transposable Elements; DNA: Cloning and Manipulation; DNA: Applications of Recombinant Technology), 3. Gene Expression and Regulation (Storage and Expression of Genetic Information; Proteins: The End Product of Genes; Genetic Regulation in Bacteria and Bacteriophages; Genetic Regulation in Eukaryotes; The Genetics of Cancer), 4. Genetic Analysis (Mutation and Genetic Recombination in Bacteria and Bacteriophages; Extrachromosomal Inheritance; Genetic Control of Development; Genetics of Immunity; Genetics of Behavior; Population Genetics; Evolutionary Genetics).
10. Bahasan pada Klug dan Cummings [14]: 1. Heredity and the Phenotype (An Introduction to Genetics; Mitosis and Meiosis; Mendelian Genetics; Extensions of Mendelian Genetics; Quantitative Genetics; Linkage, Crossing Over, Mapping in Eukaryotes; Genetics Recombination and Mapping in Bacteria and Bacteriophages; Extrachromosomal Inheritance; Sex Determination and Sex Chromosomes; Chromosome Mutations: Variations in Chromosome Number and Arrangement), 2. The

Molecular Basis of Heredity (DNA Structure and Analysis; DNA Replication and Recombination; The Genetic Code and Transcription; Translation and Proteins; Regulation of Gene Expression in Prokaryotes; Regulation of Gene Expression in Eukaryotes; Gene Mutation, DNA Repair, and Transposable Elements, 3. Genomics (Construction and Analysis of DNA Clones; Chromosome Structure and DNA Sequence Organization; Organization of Genes in Chromosomes; Applications and Ethics of Genetic Technology), 4. Genetics of Organisms and Populations (Developmental Genetics; Genetics and Cancer; Genetics and Behavior; Population Genetics; Genetics and Evolution).

Memperhatikan bahasan-bahasan kajian ilmu genetika pada berbagai rujukan yang telah dipaparkan, beberapa hal/informasi penting terkait dapat ditemukan. Beberapa hal/informasi penting terkait itu akan dikemukakan lebih lanjut.

- a. Pada seluruh rujukan (100%) ditemukan adanya bahasan tentang pewarisan sifat, tetapi ternyata hanya merupakan sekelumit kecil bahasan dari keseluruhan bahasan di tiap rujukan.
- b. Hampir seluruh rujukan (80%) tidak atau kurang memperlihatkan adanya sistematika struktur bahasan yang baik, yang berkaitan dengan demikian luasnya bahasan kajian di tiap rujukan.
- c. Topik-topik yang menjadi pokok bahasan cenderung bertambah (baik jumlah maupun cakupannya) pada rujukan-rujukan yang terbitannya menuju ke masa kini, Lebih lanjut, sangat beralasan untuk berpendapat bahwa sejak lebih dari 6 dasawarsa yang lalu, topik kajian ilmu genetika sudah sangat luas.

- d. Lebih dari 3 dasawarsa yang lalu, pada rujukan-rujukan topik yang terkait DNA rekombinan, kloning gen, maupun rekayasa genetika sudah dihadirkan juga sebagai topik-topik bahasan, di samping topik-topik lain.
- e. Sangat beralasan untuk berpendapat bahwa pemaknaan ilmu genetika sebagai ilmu tentang pewarisan sifat, sebenarnya sudah lama tidak relevan lagi dan sangat ironis.

Makna Ilmu Genetika yang Seharusnya

Makna atau arti ilmu genetika apapun seharusnya dapat mencakup semua topik bahasan yang layak dalam lingkup ilmu ini. Dalam hubungan ini apabila ada pemaknaan ilmu genetika yang tidak dapat mencakup semua topik bahasan yang layak (apalagi jika sebagian besar topik bahasan yang layak ternyata tidak tercakup), maka pemaknaan semacam itu tidak dapat dibenarkan. Memperhatikan topik-topik bahasan ilmu genetika yang ditemukan pada rujukan-rujukan yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini akan ditampilkan beberapa penilaian secara garis besar. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar/hampir semua topik-topik bahasan di tiap rujukan, memang benar/layak menjadi topik-topik bahasan dalam ilmu genetika pada era sekarang dan seterusnya. Di samping itu terlihat juga ada topik-topik tertentu di beberapa rujukan, yang pada dasarnya tidak layak tergolong sebagai topik bahasan dalam ilmu genetika. Demikian pula ditemukan adanya topik bahasan tertentu di beberapa rujukan yang lebih tepat menjadi topik bahasan pada rujukan-rujukan ilmu genetika yang lebih terspesialisasi (bukan menjadi topik bahasan pada rujukan ilmu genetika yang umum).

Makna atau arti ilmu genetika yang akan dikemukakan selanjutnya, diyakini dapat mencakup semua topik bahasan yang layak dalam ilmu ini. Demikian pula makna atau arti ilmu genetika

ini diyakini tidak mencakup topik-topik yang memang tergolong tidak layak dikaji dalam ilmu ini; dan juga tidak cukup alasan mencakup topik-topik bahasan genetika yang terspesialisasi. Lebih lanjut pemaknaan ilmu genetika ini akan memberi peluang tercakupnya topik-topik bahasan yang bersifat terstruktur sistematis.

Atas dasar pokok-pokok pemikiran yang telah dipaparkan, ilmu genetika layaknae dimaknai sebagai **“ilmu cabang biologi yang mengkaji materi genetik”**. Jika dimaknai lebih rinci, maka **“genetika merupakan ilmu cabang biologi yang mengkaji materi genetik, yang berkenaan dengan: arti dan ruang lingkup, struktur dan macam materi genetik, reproduksi materi genetik, kerja materi genetik, perubahan materi genetik, materi genetik dalam populasi, dan perekayasaan materi genetik”**.

Mengacu kepada makna ilmu genetika yang baru saja dikemukakan, topik- topik bahasan yang dikaji pada ilmu ini akan dipaparkan lebih lanjut.

1. Arti dan Ruang Lingkup Genetika
2. Struktur dan Macam Materi Genetik
 - a Kromosom
 - b Asam Nukleat
 - c DNA Genomik
 - d RNA GENOMIK
 - e Transposable Genetic Element
 - f Plasmid
 - g Episom
 - h Nuclear Genome
 - i Extranuclear Genome
 - j Bacterial Genome
 - k Viral Genome
3. Reproduksi Materi Genetik

- a Mitosis dan Meiosis
 - b Replikasi Semikonservatif
 - c Rolling Circle Replication
 - d Reverse Transcription
 - e Nuclear Inheritance
 - f Mendelian Inheritance
 - g Extranuclear Inheritance
4. Kerja Materi Genetik
- a Jalur Kerja Materi Genetik menuju Efek Fenotip Biosfer
 - b Transkripsi & Modifikasi Pasca Transkripsi
 - c Macam RNA non Genomik dan Pembentukannya
 - d Translasi (Sintesis Protein)
 - e Kode Genetika
 - f Regulasi Kerja Gen pada Prokariot
 - g Regulasi Kerja Gen dan Perkembangan pada Eukariot
 - h Kontrol Hormonal Ekspresi Gen
 - i Regulasi Kerja Gen Melalui Jalur Alternatif Transcript Splicing
 - j Regulasi Sirkuit Kompleks Ekspresi Gen pada Eukariot
 - k Kontrol Genetik Respon Imun
 - l Kontrol Genetik Pembelahan Sel
5. Perubahan Materi Genetik
- a Mutasi Kromosom karena Perubahan Struktur
 - b Mutasi Kromosom karena Perubahan Jumlah
 - c Mutasi Gen
 - d Efek Mutasi Gen terhadap Fenotipe
 - e Aplikasi Praktis Mutasi Gen
 - f Rekombinasi Gen pada Prokariot dan Bacteriophage

- g Rekombinasi Gen pada Eukariot
 - h Evolusi Materi Genetik
6. Materi Genetik dalam Populasi
- a Frekuensi Gen
 - b Variasi Genetik pada Populasi Alami
 - c Perkawinan Acak & Hukum Hardy Weinberg
 - d Inbreeding & Outbreeding
 - e Perubahan Frekuensi Gen
 - f Ekilibrium Genetik
7. Perekayasaan Materi Genetik & Teknologi Genetik terkait
- a Macam-macam Teknik Rekayasa Genetika
 - b Cloning Gen
 - c PCR
 - d Analisis Urutan DNA
 - e Teknik Analisis Gen
 - f DNA Fingerprint
 - g Human Genome Project

Pemaknaan ilmu genetika sebagaimana yang baru dikemukakan, selama ini sudah sekitar tiga dasawarsa dianut pada perkuliahan ilmu Genetika di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang, tatkala penulis masih mengampu Mata Kuliah tersebut. Materi perkuliahan yang dikaji adalah mengacu kepada topik-topik bahasan tersebut.

Referensi

- [1] Rothwell, N.V. 1983. *Understanding Genetics*. New York - Oxford: Oxford University Press.
- [2] Russel, P.J. 1992. *Genetics*. New York: Harpercollins Publisher Inc.
- [3] Plomin, R. & J.C. Defries & I.W. Craig & P. McGuffin (Ed). 2001. *Behavioral Genetics in the Postgenomic Era*. Washington DC: American Psychological Association.
- [4] Ayala, F.J. & J.A. Kiger. 1984. *Modern Genetics*. Menlo Park,

- California – Reading, Massachusetts – London – Amsterdam -
Don Mills, Ontario - Sydney: The Benjamin/ Cummings
Publishing Company, Inc.
- [5] Dobzhansky, T. 1951. *Genetics and The Origin of Species*. New
York: Columbia University Press.
- [6] Srb Adrian, M. & R.D. Owen. 1952. *General Genetics*. San
Francisco: W.H. Freeman and Company.
- [7] Stansfield, W.D. 1983. *Theory and Problems of Genetics*. New
York - St. Louis – Auckland – Bogota – Guatemala – Hamburg –
Johannesburg – Lisbon –London – Madrid – Mexico –
Montreal - New Delhi – Panama – Paris - San Juan - San Paulo
– Singapore – Sydney – Tokyo - Toronto: McGraw - Hill Book
Company.
- [8] Gardner, E.J. & D.P. Snustad. 1984. *Principles of Genetics*. New York
– Chichester – Brisbane – Toronto - Singapore: John Wiley &
Sons.
- [9] Zubay, G. 1987. *Genetics*. Menlo Park – Reading - Don Mills –
Workingham – Amsterdam – Sydney - Singapore – Tokyo –
Madrid – Bogota – Santiago – San Juan: The
Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.
- [10] Brown, T.A. 1989. *Genetics, A Molecular Approach*. London: Van
Nostrand Reinhold (International) Co. Ltd
- [11] Gardner, E.J. & M.J. Simmons & D.P. Snustad. 1991. *Principles
of Genetics*. New York – Chichester – Brisbane –Toronto -
Singapore: John Wiley & Sons.
- [12] Querol, D. 1992. *Genetic Resources: Our Forgotten Treasure*.
Penang, Malaysia:Third World Network.
- [13] Klug, W.S. & M.R. Cummings. 1994. *Concepts of Genetics*. New
Jersey: Prentice Hall, Inc.
- [14] Klug, W.S. & M.R. Cummings. 2000. *Concepts of Genetics*. New
Jersey: Prentice Hall, Inc.

IDEOLOGI DAN SAINS DALAM INTEGRASI PENDIDIKAN GAGASAN DAN TINDAKAN ILMUWAN MENGANTISIPASI DISRUPSI

Buku ini berisi hal ihwal ilmu pengetahuan yang mau membuka diri, berdialog, dan keluar dari cangkang mistisnya, untuk memiliki beragam kemungkinan menjadi lebih mudah diterima, memiliki daya imajinatif, dan mengundang siapa saja untuk tertarik masuk ke dalam dunia sains. Poinnya, sains diminta untuk tidak jumawa, merasa paling benar, totaliter, dan sebagainya, dan sebagainya, sehingga perkembangan sains tetap mengedepankan sikap untuk mau bercakap-cakap dengan serius-santai, berkomunikasi tanpa intimidasi, dan menggunakan dialektika tanpa mencela. Para ilmuwan pun diminta untuk menyadari bahwa setiap sains memiliki celah untuk dikritik, ada *margin of errors*, dan dengan begitu kebijaksanaan rendah hati menjadi prioritas. Para ilmuwan diminta untuk tidak jatuh pada pseudo sains.

Para penulis dalam buku ini adalah juga ilmuwan-ilmuan yang memiliki keprihatinan pada perubahan yang terjadi. Perubahan yang membuat situasi menjadi berisiko, persis seperti yang pernah disampaikan Ulrich Beck tentang adanya masyarakat resiko (*risk society*). Dalam masyarakat resiko, kita diminta untuk mengantisipasi dengan mengembangkan peralihan gerak dari gagasan menjadi tindakan, dan *vice versa*. Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang menyadarkan pada suatu resiko yang bukan saja mengantarkan kita pada untuk sekedar memikirkannya dalam bentuk gagasan, tetapi kita diminta untuk segera (*hurry up*) bertindak untuk menyelamatkan diri. Resiko yang terjadi mengantarkan kita pada ketakutan ultim, yaitu kematian. Ketakutan dan kecemasan membuat kita kembali ke cangkang kita masing-masing. Cangkang itu adalah rumah, sebagai bentuk proteksi diri agar tidak terancam beragam varian virus corona, mulai dari SARS-CoV-2 (Wuhan), Corona versi Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, dan Lambda.

ISBN 978-623-91605-7-9



KANJURUHAN
PRESS

Jl. S. Supriadi No.48 Malang, Telp. (0341) 801488, ext 133
email: kanjuruhanpress@unikama.ac.id



9 786239 160579